Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI DKI JAKARTA 2025 - 2029

KLHS

TA 2023

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

28 Februari 2024

Nomor : S.162/MENLHK-PKTL/PDLKWS/Pln.3/2/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029

Yth. Pj. Gubernur DKI Jakarta
di
Tempat

Dengan ini disampaikan bahwa ;

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
   a. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa :
      "Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan ***KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16"***
   b. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa :
      "Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh : a) ***Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi****"*
   c. Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa :
      "Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk ***memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel*** *dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik"*

2. Memperhatikan :
   a. Surat Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 781/LH.00.00 tanggal 28 Desember 2023 perihal Permohonan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
   b. Laporan KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029, diterima lengkap tanggal 15 Januari 2024;
   c. Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023; dan

d. Berita Acara (BA) Rapat Pembahasan dalam Rangka Asistensi Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Nomor BA.45/PDLKWS/KLHS/12/2023 tanggal 20 Desember 2023.

3. Dengan ini disampaikan sebagai berikut :
   a. Permohonan Validasi beserta lampiran dokumennya telah diterima lengkap pada tanggal 15 Januari 2023 sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP Nomor 46 Tahun 2016, yaitu:
      i. Laporan KLHS (termasuk hasil Penjaminan Kualitas); dan
      ii. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi.
   b. Telaahan terhadap KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 pada tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS, penjaminan kualitas KLHS, dan pendokumentasian KLHS telah tertuang dalam Berita Acara Nomor BA.45/PDLKWS/KLHS/11/2023 tanggal 20 Desember 2023 menyatakan bahwa Laporan KLHS memenuhi ketentuan.
   c. Atas dasar demikian, dinyatakan bahwa KLHS untuk RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 diberikan **persetujuan validasi, dengan rincian sebagaimana terlampir**

4. Adapun rekomendasi dan/atau tindak lanjut adalah sebagai berikut :
   1. Mengintegrasikan seluruh rekomendasi KLHS ke dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi DKI Jakarta;
   2. Menindaklanjuti hasil KLHS apabila dalam proses penyusunan KLHS terdapat keterbatasan metode ilmiah, serta situasi sosial dan politik yang dinamis;
   3. Melaksanakan dan memprioritaskan skenario dengan upaya tambahan untuk indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan namun belum tercapai sejumlah 116 indikator (46%), serta indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum tercapai sejumlah 4 indikator (2%)
   4. Melakukan pemenuhan data untuk setiap indikator TPB yang tidak ada data, yaitu sejumlah 66 indikator (26%);
   5. Melaksanakan skenario dengan upaya tambahan untuk indikator TPB yang sudah dilakukan tetapi belum tercapai sejumlah 116 indikator (46%), indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum tercapai sejumlah 4 indikator (2%), serta indikator TPB yang tidak ada data sejumlah 66 indikator (26%);
   6. Memastikan bahwa seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program;
   7. Menjadikan KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 sebagai rujukan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta; dan

8. Menyampaikan kepada publik tentang KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS beserta dokumen KLHS dan surat validasi KLHS sebagai bentuk akuntabilitas publik.

5. Pemilik KRP wajib melaksanakan rekomendasi sebagimana tercantum pada poin 4.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Tembusan :
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;

Lampiran surat
Nomor : S.162/Menlhk-PKTL/Pdl.kws/Pla.3/2/2024
Tanggal : 28 Februari **2024**

Rincian Hasil Telaahan:

a. KLHS RPMPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan PP No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;

b. Sistematika Laporan KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 telah sesuai dengan Permendagri No 07 Tahun 2018 dan kaidah-kaidah PP No 46 Tahun 2016;

c. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menunjukkan bahwa terdapat 67 indikator dengan kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS), 116 indikator dengan kategori sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB), 4 indikator dengan kategori belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB), dan 66 indikator dengan kategori tidak atau belum ada data (N/A).

d. Identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 telah dilakukan berdasarkan hasil sintesis isu antara isu-isu strategis Lingkungan hidup, isu-isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan isu-isu strategis kerangka kebijakan terkait yaitu Rancangan RPJPN Tahun 2025 – 2045, RTR Jabodetabekjur, RPD Tahun 2023 – 2026, KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 – 2042, RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 – 2042, rancangan RPPLH Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 – 2052, dan RUU DKJ Tahun 2010 – 2030. Berdasarkan hasil sintesa, diperoleh 4 (empat) isu PB Strategis untuk Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:
   - Tingginya Risiko Bencana;
   - Belum Optimalnya Tata Kelola Berbasis Wilayah Fungsional Perkotaan;
   - Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK Menuju Kota Berkelanjutan;
   - Kesenjangan Sosial-Ekonomi;
   - Degradasi Kualitas Lingkungan;
   - Degradasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

e. Analisis Capaian TPB terhadap Kondisi Lingkungan Hidup telah dilakukan sesuai ketentuan. Dalam melakukan analisis tersebut pada dasarnya telah dilakukan berbagai kajian sebagai berikut:
   (1) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan hasil sebagai berikut:
      a) Jumlah ketersediaan air di Provinsi DKI Jakarta adalah 550.116.002,13 m^3/tahun, sedangkan kebutuhan air di Provinsi DKI Jakarta baik untuk keperluan domestik maupun lahan adalah 1.036.651.092,35 m^3/tahun.

Sehingga, status daya dukung penyediaan air bagi penduduk di Provinsi DKI Jakarta adalah telah terlampaui;

b) Wilayah adminsitratsi kabupaten/kota yang telah melampaui ambang batas ketersediaan air di Provinsi DKI Jakarta meliputi Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu sebesar 0,63%, Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar 18,69%, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 7,20%, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar 22,27%, Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar 26,83%, dan Kota Administrasi Jakarta Utara 20,36% dari total luas Provinsi DKI Jakarta;

c) Daya dukung daya tampung Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan telah terlampaui sebesar 95,97%.

(2) Dampak dan risiko lingkungan hidup dengan hasil sebagai berikut:

a) Jenis bencana alam di Provinsi DKI Jakarta yang dominan terjadi adalah banjir, puting beliung dan tanah longsor;

b) Indeks risiko bencana Provinsi DKI Jakarta masuk ke dalam kelas sedang dengan nilai indeks 62.58;

c) Indeks risiko bencana banjir pada seluruh wilayah administrasi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 termasuk ke dalam kategori tinggi;

d) Selama rentang tahun 2019 – 2020, terjadi genangan banjir di wilayah DKI Jakarta seluas 18.184,41 Ha (27% luas Provinsi DKI Jakarta). Wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta yang mengalami genangan banjir terbesar ada di wilayah kota Jakarta Timur dengan persentase genangan sebesar 8,53% atau 5.642,77 Ha dari luasan total Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan, wilayah yang mengalami genangan paling rendah di tahun 2019-2020 ada pada kota Jakarta Pusat dengan luas genangan 487,15 Ha atau 0,74% dari luasan total DKI Jakarta;

e) Timbulan sampah tinggi berada di Kota Jakarta Pusat dengan nilai 10.08 – 13.43 kg/kapita/hari, dan kota potensi timbulan sampah kedua tertinggi berada di wilayah Kota Jakarta Barat dengan nilai 8.34 – 13.4 kg/kapita/hari. Sedangkan, untuk nilai terendah berada di Jakarta Utara dengan nilai 2.97 – 8.33 kg/kapita/hari;

f) Wilayah administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan potensi beban pencemar air sungai tertinggi adalah, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

(3) Kinerja jasa ekosistem dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

a) Jasa lingkungan hidup penyedia air di Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh kelas rendah sangat rendah, dan sedang;.

b) Jasa lingkungan hidup pengaturan air di Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh kelas rendah seluas 86,17% dari total luas Provinsi DKI Jakarta;

c) Jasa lingkungan hidup pengaturan kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh kelas rendah dan tinggi;

d) Jasa lingkungan hidup pengaturan mitigasi banjir di Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh kelas rendah;

(4) Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

a) Berdasarkan data tahun 2013 – 2017, kondisi Cekungan Air Tanah DKI Jakarta mengalami kekritisan dan rusak. Kondisi Air Tanah yang rusak terjadi di Kecamatan Kalideres, Cilincing Cengkareng, Penjaringan, Grogol Petamburan, Tambora, Taman sari, Sawah Besar, Pademangan, Senen, Kemayoran Johar Baru, Cempaka Putih, Tanjung Priok, Cakung, Gambir dan Kelapa Gading;

b) Rumah tangga pengguna SPAM bukan jaringan perpipaan di DKI Jakarta pada tahun 2019 mencapai 56,6% di mana salah satu sumber paling banyak dimanfaatkan adalah melalui penggunaan sumur yang memanfaatkan kapasitas air tanah;

c) Wilayah Jakarta bagian utara mengalami penurunan air tanah sehingga membentuk kerucut penurunan 5 – 10 meter di bawah permukaan air laut yang menyebabkan terjadinya intrusi air laut

(5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim diperoleh analisis sebagai berikut:

a) Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim, Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kerentanan sangat rendah serta didominasi kelas sedang pada wilayah *main land* dan Kepulauan Seribu;

b) Berdasarkan analisa yang telah dilakukan menggunakan data landsat, menunjukkan bahwa suhu permukaan rata-rata di Provinsi DKI Jakarta cenderung lebih tinggi dalam rentang 4 tahun untuk wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan;

c) Pada Tahun 2018, wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan mengalami peningkatan suhu tertinggi mencapai 39^0C, sedangkan untuk tahun 2019 - 2021 cenderung menurun secara fluktuatif, yaitu 37^0C, 35^0C, dan 36^0C.

(6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati diperoleh analisis sebagai berikut:

a) Kondisi tutupan karang hidup di 19 pulau dari 114 pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu cenderung mengindikasi kondisi yang memburuk. Hal ini terlihat dari penurunan tutupan karang hidup dari tahun awal yang teridentifikasi hingga tahun terakhir updating data yang tersedia;

b) Pulau Panjang memiliki kecenderungan menurun yang paling besar yaitu sekitar 30,2%. Pada tahun 2003, persentase tutupan karang hidup di Pulau Panjang mencapai 60,5% sementara pada tahun 2018 mencapai 30,3%;

c) Perairan di Wilayah DKI Jakarta khususnya di Kepulauan Seribu memiliki sebaran padang lamun dengan kategori jarang hingga sedang;

d) Padang lamun di Kepulauan Seribu memiliki status miskin dengan kondisi rusak dengan persentase tutupan total lamun kurang dari ≤ 29,9%;

e) Dalam kurun waktu 2009 – 2021, terjadi perubahan pada luasan hutan mangrove di Jakarta Utara yang cenderung naik dengan luasan 358,08 Ha
f) Luas penutup lahan hutan mangrove di wilayah Kepulauan Seribu selama 12 tahun cenderung mengalami penurunan sebesar 19.93 Ha.

f. Alternatif Skenario dan Rekomendasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

(1) Alternatif Skenario

a) Tingginya Risiko Bencana

- Skenario Moderatte
  - Penyusunan rencana mitigasi bencana alam dan non alam yang terpadu;
  - Kolaborasi dan koordinasi multi pihak, multi sector, dan lintas wilayah;
  - Peningkatan sarana prasarana serta logistik penanggulangan kebencanaan;
  - Peningkatan kapasitas masyarakat menuju masyarakat yang adaptif dan berketahanan;
  - Peningkatan pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Skenario Akselerasi

  Skenario moderate ditambah:
  - Pemanfaatan teknologi informasi untuk peringatan dini bencana yang terpadu;
  - Pengembangan teknologi dan inovasi untuk sistem pemulihan bencana yang terpadu.

b) Ancaman Keberlanjutan Sumber Daya Alam

- Skenario Moderate
  - Pemerataan infrastruktur perkotaan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - Peningkatan pengelolaan sampah melalui pemanfaatan teknologi;
  - Kerja sama antar wilayah dalam menjaga keberlanjutan SDA dan kualitas LH;
  - Penghematan pemanfaatan air melalui teknologi ramah lingkungan;
  - Perlindungan keberlanjutan sumber daya air melalui mekanisme konservasi tanah dan air;
  - Perlindungan kawasan ekosistem esensial dan keanekaragaman hayati.
- Skenario Akselerasi

  Skenario moderate ditambah:
  - Percepatan pencapaian 100% air perpipaan dan moratorium pengambilan air tanah di seluruh wilayah;
  - Rehabilitasi dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau perkotaan sesuai dengan ketentuan 30% dari luas wilayah;

- Pengembangan instrumen ekonomi lingkungan yang komprehensif dalam menjalankan kerja sama di wilayah fungsional.

c) Kualitas Lingkungan Hidup Rendah

- Skenario Moderate
  - Penurunan emisi GRK melalui pengendalian sumber pengendalian sumber emisi utama (transportasi, industri, dan pembangkit listrik);
  - Diversifikasi sumber energi (tenaga surya) pada setiap sektor terutama sumber emisi utama;
  - Pengembangan transportasi publik terintegrasi yang ramah lingkungan;
  - Peningkatan fungsi ruang terbuka hijau melalui kesesuaian rancangan RTH termasuk penanaman vegetasi yang efektif menyerap emisi;
  - Peningkatan daur ulang sampah melalui pemanfaatan teknologi dengan peran serta multi pihak
- Skenario Akselerasi

  Skenario moderate ditambah:
  - Pengembangan inovasi dan teknologi ramah lingkungan untuk menekan emisi;
  - Penerapan kebijakan infrastruktur hijau dalam pengembangan wilayah.

d) Ketimpangan Sosial Ekonomi

- Skenario Moderate
  - Peningkatan PDRB perkapita;
  - Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat kepulauan;
  - Penurunan tingkat pengangguran terbuka;
  - Penyediaan infrastruktur air bersih perpipaan;
  - Peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat;
  - Peningkatan IPM Kepulauan Seribu;
  - Penurunan gini rasio;
  - Penyediaan rumah layak huni;
  - Penurunan jumlah RW kumuh.
- Skenario Akselerasi

  Skenario moderate ditambah:
  - Pengembangan ekonomi makro berskala global berbasis bisnis dan jasa;
  - Peningkatan fungsi kota Jakarta sebagai kota transit internasional;
  - Peningkatan kerja sama internasional dalam pengembangan ekonomi.

e) Belum Optimalnya Tata Kelola

- Skenario Moderate
  - Penguatan kapasitas tata kelola daerah secara internal menuju *good governance*;
  - Peningkatan kerja sama antar daerah dalam wilayah fungsional;
  - Peningkatan kerja sama internasional untuk meningkatkan daya saing global;

- Peningkatan pemanfaatan sistem informasi berbasis digital dalam tata kelola termasuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KRP;
- Peningkatan sistem penegakan hukum.

- Rekomendasi Arahan Program

  Skenario moderate ditambah:
  - Kesiapan menuju terciptanya business enabling environment (Reformasi ekonomi, policy dialogue, knowledge sharing, civil society);
  - Penguatan mekanisme kerja sama multipihak dengan prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*).

f) Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK

- Skenario Moderate
  - Peningkatan inovasi pengembangan IPTEK untuk keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas lingkungan, penurunan risiko bencana, inklusivitas sarana prasarana perkotaan dan tata kelola pemerintahan;
  - Peningkatan kolaborasi untuk akselerasi inovasi terkait keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas lingkungan, penurunan risiko bencana, inklusivitas sarana prasarana perkotaan dan tata kelola pemerintahan.
- Skenario Akselerasi

  Skenario moderate ditambah
  - Pengembangan Jakarta sebagai smart city;
  - Peningkatan akses pembiayaan inovatif untuk menunjang pengembangan IPTEK dan penerapan teknologi yang climate friendly (*Green building*, pengembangan energi terbarukan).

(2) Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Arahan Program

a) Tingginya Risiko Bencana

- Rekomendasi Arah Kebijakan
  - Mengimplementasikan rencana mitigasi bencana terpadu berbasis sistem informasi kebencanaan menuju masyarakat yang berketahanan dengan pelibatan multi *stakeholder*;
  - Meningkatkan kualitas sarana prasarana kebencanaan secara inklusif dengan pengembangan teknologi dan inovasi untuk memperkuat ketangguhan kota dan masyarakat serta mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat bencana.
- Rekomendasi Arahan Program
  - Penanggulangan Bencana;
  - Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
  - Program Penanganan Bencana;
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
  - Penataan Bangunan Gedung;
  - Pengembangan Perumahan;

- Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b) Ancaman Keberlanjutan Sumber Daya Alam

- Rekomendasi Arah Kebijakan
  - Meningkatkan laju perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati berbasis wilayah fungsional dan teknologi berkelanjutan;
  - Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multi sector, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
- Rekomendasi Arahan Program
  - Pengelolaan Sumber Daya Alam;
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
  - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
  - Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
  - Pengelolaan Persampahan;
  - Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau Kecil;
  - Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - Pengelolaan Aspek Kegeologian.

c) Kualitas Lingkungan Hidup Rendah

- Rekomendasi Arah Kebijakan
  - Meningkatkan laju pengurangan emisi GRK melalui pemanfaatan teknologi hijau, infrastruktur hijau, dan dukungan kebijakan berbasis ekonomi hijau;
  - Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multi sektor, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan.
- Rekomendasi Arahan Program
  - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
  - Pencemaran Lingkungan Hidup;
  - Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH);
  - Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH untuk Masyarakat.

d) Ketimpangan Sosial Ekonomi

- Rekomendasi Arah Kebijakan
  - Menumbuhkan ekonomi kreatif yang pro UMKM bercirikan budaya, non ekstraktif untuk meningkatkan daya saing global;
  - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berorientasi global pada sector bisnis dan jasa berbasis teknologi digital modern serta sektor pariwisata, budaya, dan MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) berskala internasional;
  - Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, inovatif, produktif, dan berdaya saing global secara inklusif
  - Mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara kepulauan dan daratan melalui peningkatan kualitas hunian dengan penyediaan sarana prasarana social, ekonomi, dan budaya secara inklusif, aman, dan terjangkau menuju kota layak huni
- Rekomendasi Arahan Program
  - Pengelolaan Pendidikan;
  - Pengembangan Kurikulum;
  - Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
  - Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
  - Pengembangan Permukiman;
  - Pengembangan Perumahan;
  - Program Kawasan Permukiman;
  - Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
  - Pemberdayaan Sosial;
  - Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
  - Pemberdayaan UMKM;
  - Pengembangan UMKM;
  - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata;
  - Pemasaran Pariwisata;
  - Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektua;
  - Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - Perekonomian dan Pembangunan.

e) Belum Optimalnya Tata Kelola

- Rekomendasi Arah Kebijakan
  - Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup SDM, kelembagaan, skema pembiayaan inovatif, kebijakan, dan teknologi digital modern;

- Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk menjawab tantangan global (*Triple Planetary Crisis*);
- Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian *good governance* dan *global city*.

- Rekomendasi Arahan Program
  - Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - Program Penataan Organisasi;
  - Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - Program Perekonomian dan Pembangunan;
  - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - Program Kepegawaian Daerah;
  - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - Program Pelayanan Penghubung;
  - Penyelenggaraan Pengawasan.

f) Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK

- Rekomendasi Arah Kebijakan
  - Meningkatkan inovasi dan kolaborasi akselerasi pengembangan IPTEK menuju kota global yang berkelanjutan.
- Rekomendasi Arahan Program
  - Program Pengelolaan Pendidikan;
  - Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
  - Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik;
  - Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
  - Penelitian Pengembangan Daerah.

Jakarta, 28 Februari 2024
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor,

Erik Teguh Primantoro, S.Hut, MES.
NIP. 19690114 199603 1 001

Lampiran surat
Nomor : S. 162/Menlhk-PKTL/Pollkws/Pla.3/2/2024
Tanggal : 28 Februari 2024

Hasil Pelaksanaan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029

Nama KLHS	**KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029**
K/L Penanggung Jawab	**Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**
Tahun Pelaksanaan	**2024**

Keterangan penilaian:

- TS - Terpenuhi semua
- ST - Sebagian terpenuhi
- TP - Tidak terpenuhi
- N/A - Informasi tidak cukup untuk dilakukan penilaian

Penilaian 1: Kelengkapan dokumen		
Kriteria Penilaian	**Penilaian**	**Keterangan**
Surat Permohonan	**TS**	-
Dokumen KLHS yang telah disusun	**TS**	-
Hasil penilaian mandiri yang dilampirkan surat pernyataan penjaminan kualitas	**TS**	-
Bukti pemenuhan standar kompetensi Penyusun KLHS	**TS**	-
Dokumen rancangan KRP yang dilaksanakan KLHS	**TS**	-
Ringkasan Eksekutif	**TS**	-

Catatan :
Permohonan Validasi beserta lampiran dokumennya telah diterima lengkap sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP Nomor 46 Tahun 2016.

Pelaksanaan validasi dilakukan terhadap hasil penjaminan kualitas KLHS dengan kriteria pokoknya sebagai berikut :

Bagian I : Proses Penjaminan Kualitas			
Kriteria		**Validasi**	**Ket.**
Hasil penjaminan kualitas memuat informasi tentang:		Nilai : 1. Sudah 2. Belum 3. Ada catatan (jelaskan dalam keterangan)	
1.	Pemenuhan atas persyaratan dan kriteria penilaian mandiri	**Sudah**	
2.	Kesimpulan kelayakan proses dan dokumen KLHS	**Sudah**	
3.	Catatan dan/atau rekomendasi yang dianggap perlu terhadap KLHS, KRP, dan/atau proses keseluruhan	**Sudah**	

Bagian II : Keputusan Kelayakan KLHS			
Kriteria		**Pemenuhan**	**Ket**
Berdasarkan kelengkapan dokumentasi KLHS, KRP dan penjaminan kualitas KLHS, dapatkah disimpulkan dengan jelas dan mudah dipahami:		Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
1.	Apakah proses KLHS sesuai ketentuan	**Sudah**	
2.	Apakah penyusun KLHS memenuhi ketentuan	**Sudah**	
3.	Apakah metodologi KLHS memenuhi kaidah ilmiah	**Sudah**	
4.	Apakah muatan KLHS sesuai ketentuan	**Sudah**	
5.	Apakah hasil KLHS disampaikan dengan informasi yang sesuai ketentuan	**Sudah**	
6.	Apakah ada catatan dan/atau rekomendasi dari penjaminan kualitas mengenai hal-hal yang bersifat keterbatasan KLHS yang perlu menjadi pertimbangan	**Sudah**	

Catatan :

Hasil penjaminan kualitas agar ditambahkan catatan dan/atau rekomendasi mengenai hal-hal yang bersifat keterbatasan dari KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 yang perlu menjadi pertimbangan.

Bagian III : Rekomendasi dan Catatan Hasil Penjaminan Kualitas			
Kriteria		Pemenuhan	Ket
Apakah catatan hasil penjaminan kualitas memuat informasi sebagai berikut :			
1.	Keterbatasan ilmiah/metodologi KLHS yang disadari penyusun	**Belum**	Tidak dibahas pada penjaminan kualitas
2.	Lingkup integrasi hasil KLHS ke dalam KRP yang dituju apakah masuk penuh atau sebagian dan apa keterbatasannya	**Belum**	Jenis KLHS ini adalah *ex-ante*

Catatan :

Dokumen KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 belum menjelaskan adanya keterbatasan dan/atau ketidakpastian ilmiah dalam melakukan analisis dan tidak ada informasi kajian lanjutan yang diperlukan.

Bagian IV : Pertimbangan-pertimbangan Khusus			
Kriteria		Pemenuhan	Ket
1.	Adakah masukan masyarakat yang harus dipertimbangkan	**Sudah**	
2.	Situasi sosial, politik, budaya yang harus dipertimbangkan	**Sudah**	

Bagian V : Rekomendasi Hasil Validasi			
Pokok-pokok Rekomendasi		Pemenuhan	Ket
Adakah pertimbangan dan rekomendasi dari pemberi validasi yang perlu dicantumkan dalam keputusan validasi?			
1.	Adakah pertimbangan kebutuhan pemutakhiran KLHS atas alasan keterbatasan ilmiah dan/atau situasi sosial, politik, budaya, ekonomi yang terlalu dinamis?	**Belum**	Tidak dibahas dalam dokumen ini
2.	Adakah rekomendasi tentang KRP lain yang juga harus mempertimbangkan hasil KLHS ini?	**Sudah**	
3.	Adakah rekomendasi untuk muatan KLHS bagi KRP turunan/relevan dengan memperhatikan KLHS ini?	**Belum**	Tidak dibahas dalam dokumen ini
4.	Adakah rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL sebagai tindak lanjut KRP ini?	**Belum**	Tidak dibahas dalam dokumen ini

Catatan :

Perumusan Alternatif dan Rekomendasi KLHS terhadap penyempurnaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 agar dipastikan untuk mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup yang terlampaui dan tindaklanjutnya.

Jakarta, 28 Februari 2024
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor,

Erik Teguh Primantoro, S.Hut, MES.
NIP. 19690114 199603 1 001

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2029

Jakarta, November 2023

PENYUSUN:

Tim Pembuat KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029
sesuai Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.215 Tahun 2023
tentang Tim Pembuat KLHS RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2030.

Ketua:
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua I
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ketua II
Kepala Bappeda

Sekretaris
Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan DLH

Anggota merupakan perwakilan lintas perangkat daerah tingkat Provinsi DKI Jakarta dan pemangku kepentingan terkait (detil anggota disertakan dalam Lampiran 1. SK Gubernur No. 215 Tahun 2023 tentang Tim Pembuat KLHS RPJPD 2025 – 2045 dan RPJMD 2025 -2030):

- BPBD
- BPBUMD
- BPKD
- Bappeda
- Walikota dan Bupati administratif
- DLH
- Dinkes
- Disgulkarmat
- Distamhut
- DPPAPP
- Dinsos
- DSDA
- DCKTaru
- DKPKP
- Disdukcapil
- Dishub
- Dispora
- Disbud
- Disparekraf
- Diskominfo
- Disdik
- Disperaperkim
- Biro PLH
- Biro Hukum
- Biro Ekonomi
- Biro Pemerintahan
- Biro Kesos
- Sekretariat SDGs
- Perguruan Tinggi
- LM

TENAGA AHLI
Adi Wiyana | Sri Handayani | Endrawati Fatimah | Triarko Nurlambang | Dwi Nurcahyadi | Haditya Pradana | Agista Hijri| Elida Rizky

TENAGA AHLI PENDUKUNG
Fahmi Nur Amalia | Yasmine Azura Kirana

Disclaimer:

Dokumen KLHS untuk RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 disusun berdasarkan data dan informasi yang didapatkan pada saat kajian ini disusun dari bulan Juni-November 2023. Telah dilakukan pengumpulan data dan informasi terkini yang diidentifikasi bersama dengan OPD terkait. Data dan informasi tersebut dapat mengalami perubahan di masa mendatang. Dokumen KLHS ini milik Tim Pembuat KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dan dapat diakses secara umum pada laman https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/. Untuk keperluan reproduksi atau penggunaan, pemanfaatan oleh pihak lain dipersilahkan menghubungi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta selaku perwakilan Tim Pembuat KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dan diwajibkan mencantumkan sumber referensi: *Laporan KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025-2029*.

GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Dokumen KLHS ini disusun untuk mendokumentasikan hasil kajian yang dilakukan melalui serangkaian proses deliberatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses penyusunan KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 mengacu pada kaidah penyusunan KLHS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar seluruh kebijakan, perencanaan, dan program selaras serta prinsip pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Pembuat KLHS dari berbagai perangkat daerah, lembaga/organisasi kemasyarakatan, akademisi, swasta, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lain yang telah berkontribusi dalam penyusunan KLHS ini.

Akhir kata, semoga dokumen KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan terkait, khususnya RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 12 Januari 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Heru Budi Hartono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR LAMPIRAN x
RINGKASAN EKSEKUTIF 1
BAB 1 PENDAHULUAN 15
1.1 Latar Belakang 15
1.2 Dasar Hukum 16
1.3 Maksud dan Tujuan 16
1.4 Ruang Lingkup 17
1.5 Metodologi Penyusunan 17
1.6 Sistematika Laporan KLHS RPJMD 23
BAB 2 DASAR TEORI 25
2.1 Periode Pra Kemerdekaan – Tahun 1960 25
2.2 Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota 28
2.2.1 Pendekatan Pengembangan ruang 29
2.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah 32
2.3 Jakarta Sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) 34
BAB 3 KONDISI UMUM DAERAH 37
3.1 Kondisi Geografis 37
3.1.1 Wilayah Perencanaan dan Wilayah Fungsional (Wilayah Ekologis) 37
3.1.2 Karakteristik Wilayah 43
3.2 Kondisi Lingkungan Hidup 78
3.2.1 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup 78
3.2.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 85
3.2.3 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim 90
3.2.4 Timbulan Sampah dan Beban Pencemar Air Sungai 93
3.2.5 Keanekaragaman Hayati 100
3.2.6 Area Bernilai Konservasi Tinggi 111
3.3 Gambaran Keuangan Daerah dalam Pencapaian Indikator TPB 114
3.3.1 Pertumbuhan PDRB 114

3.3.2 Pendapatan Daerah 116
3.4 Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB 118
BAB 4 ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 124
4.1 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan 124
4.2 Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan Pendekatan Teknokratik 125
4.2.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Gambaran Umum Capaian TPB 125
4.2.2 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Kondisi Lingkungan Hidup 135
4.2.3 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Telaah Dokumen Perencanaan Strategis 140
4.3 Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis 147
4.4 Kerangka Kajian Isu PB Strategis dan Kajian Pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan Hidup 151
4.4.1 Tingginya Risiko Bencana 151
4.4.2 Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam 167
4.4.3 Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah 182
4.4.4 Ketimpangan Sosial Ekonomi 190
4.4.5 Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (Good Governance) 198
4.4.6 Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK menuju Kota Berkelanjutan 201
BAB 5 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA OPD 208
BAB 6 ALTERNATIF DAN REKOMENDASI 213
6.1 Perumusan Alternatif Skenario 213
6.1.1 Tingginya Risiko Bencana 214
6.1.2 Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam 218
6.1.3 Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah 222
6.1.4 Ketimpangan Sosial Ekonomi 227
6.1.5 Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (Good Governance) 231
6.1.6 Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK menuju Kota Berkelanjutan 234
6.2 Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Program Prioritas 236
6.2.1 Rekomendasi Tingginya Risiko Bencana 239
6.2.2 Rekomendasi Ancaman Keberlanjutan Sumber Daya Alam 239
6.2.3 Rekomendasi Kualitas Lingkungan Hidup Rendah 240
6.2.4 Rekomendasi Ketimpangan Sosial Ekonomi 241
6.2.5 Rekomendasi Belum Optimalnya Tata Kelola 242
6.2.6 Rekomendasi Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK 242
6.3 Usulan Integrasi 243
6.4 Rekomendasi Tindak Lanjut 249
BAB 7 KESIMPULAN 251
LAMPIRAN 254

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1. Tata Waktu Pelaksanaan KLHS RPJMD 18
Gambar 1-2 Diagram Alur Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 18
Gambar 1-3. Tahapan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD 19
Gambar 1-4. Rencana Kerja Pelaksanaan KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 19
Gambar 2-1 Ilustrasi Perkembangan Kota Jakarta Pra Kemerdekaan....25
Gambar 2-2 Struktur Kota Batavia....27
Gambar 2-3 Struktur Kota Batavia....28
Gambar 2-4 Model Perkotaan Sebagai Ekosistem Manusia 30
Gambar 2-5 Model Perencanaan Tata Ruang Kota Berbasis Perimbangan Rekayasa Investasi....31
Gambar 2-6 Orientasi Transportasi Massal Jabodetabek-Punjur 33
Gambar 2-7 Gambaran Jakarta di Masa Depan....35
Gambar 3-1. Peta Jakarta (Daratan dan Perairan) 37
Gambar 3-2. Batas Wilayah Sungai JABODETABEKPUNJUR 39
Gambar 3-3. Wilayah Fungsional DKI Jakarta berdasarkan Batas Sistem Hidrologi DAS 40
Gambar 3-4. Wilayah Fungsional DKI Jakarta....41
Gambar 3-5. Ekoregion Wilayah Fungsional DKI Jakarta 45
Gambar 3-6. Ekoregion Provinsi DKI Jakarta....47
Gambar 3-7. Ekoregion Provinsi DKI Jakarta....51
Gambar 3-8. Karakteristik Vegetasi Alami Provinsi DKI Jakarta....53
Gambar 3-9 Karakteristik Bentang Laut DKI Jakarta 54
Gambar 3-10. Kondisi Ketinggian Wilayah Provinsi DKI Jakarta 57
Gambar 3-11. Ketinggian wilayah Jabodetabek 58
Gambar 3-12. Kondisi Indeks Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta 2018....59
Gambar 3-13. Kondisi Cekungan Air Tanah Jakarta (warna kuning) 61
Gambar 3-14. Skema Sederhana Penampang Cekungan Air Tanah Jakarta dari Selatan ke Utara 62
Gambar 3-15 Kondisi Potensi Imbuhan Air Tanah Dangkal CAT Jakarta Tahun 1900, 1990, 2014 63
Gambar 3-16. Daerah Aliran Sungai dalam WS Kepulauan Seribu dan WS Ciliwung-Cisadane 65
Gambar 3-17. Peta Kawasan Hutan Provinsi DKI Jakarta 69
Gambar 3-18. Peta Kawasan Hutan Wilayah Fungsional 70
Gambar 3-19. Pola Perluasan Perkotaan Tahun 1972 - 2014....71
Gambar 3-20. Peta Penutupan Lahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 72
Gambar 3-21. Peta Penggunaan Lahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 73
Gambar 3-22 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 75
Gambar 3-23. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2022 75
Gambar 3-24. Angka Partisipasi Murni 2020-2022 SD, SMP, SMA....76
Gambar 3-25. Angka Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2022....77
Gambar 3-26. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta 2022 .78
Gambar 3-27. Distribusi Spasial Jasa Lingkungan Penyedia Air (a), Pengaturan Air (b), Pengaturan Udara (c) dan Mitigasi Banjir (d) Wilayah Fungsional Tahun 2020 79
Gambar 3-28. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup di Wilayah Funggsional Tahun 2020 80
Gambar 3-29. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022....81
Gambar 3-30. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022....82
Gambar 3-31. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 83
Gambar 3-32. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018....84
Gambar 3-33. Ketersediaan Air di Wilayah Fungsional Tahun 2020 86
Gambar 3-34. Peta D3TLH Penyedia Air di Wilayah Fungsional Tahun 2023....87

Gambar 3-35 Status Indikatif DDLH Penyedia Air Wilayah Daratan Provinsi DKI Jakarta 89
Gambar 3-36 Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim DKI Jakarta 91
Gambar 3-37 Kerentanan Terhadap Bencana Kekeringan DKI Jakarta.....91
Gambar 3-38 Monitoring Perubahan Suhu Permukaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021.....92
Gambar 3-39 Distrbusi Timbulan Sampah DKI Jakarta Tahun 2022 94
Gambar 3-40 Potensi Beban Pencemar BOD Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta 97
Gambar 3-41 Potensi Beban Pencemar COD Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta.....98
Gambar 3-42 Potensi Beban Pencemar TSS Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta.....99
Gambar 3-43. Persentase Tutupan Karang Hidup di Kabupaten Kepulauan Seribu 101
Gambar 3-44. Manfaat dan Fungsi Padang Lamun 105
Gambar 3-45. Perubahan Tutupan Lahan Hutan Mangrove 2009 – 2018 108
Gambar 3-46. Nilai – Nilai yang Terkandung Dalam Sebuah Kawasan dan Dianggap Sangat Penting Disebut Nilai Konservasi Tinggi 111
Gambar 3-47. Peta Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi DKI Jakarta 112
Gambar 3-48. PDRB ADHK 2012-2022 114
Gambar 3-49. Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2012-2022 115
Gambar 3-50 Struktur Ekonomi Provinsi DKI Jakarta 115
Gambar 4-1 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan 125
Gambar 4-2 Gambaran Capaian TPB DKI Jakarta 126
Gambar 4-3 Capaian Tiap Pilar 126
Gambar 4-4. Persandingan Kategori Status Capaian TPB 127
Gambar 4-5. Gambaran Capaian TPB DKI Jakarta tahun 2022 127
Gambar 4-6 Pola Pikir Identifikasi Isu Pembangunan Berdasarkan Data Pencapaian Target TPB 131
Gambar 4-7. Persentase indikator perlu perhatian khusus.....131
Gambar 4-8. Persentase indikator Tidak Ada Data.....133
Gambar 4-9 Zona Konservasi Air Tanah DKI Jakarta 136
Gambar 4-10 Zona Konservasi Air Tanah DKI Jakarta 137
Gambar 4-11 Zona Konservasi Air Tanah DKI Jakarta 138
Gambar 4-12 Trend Nilai IKLH DKI Jakarta 140
Gambar 4-13 Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Pendekatan Teknokratik dan Sintesisnya 147
Gambar 4-14 Visualisasi Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Keterkaitan antara Isu 149
Gambar 4-15 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Tingginya Risiko Bencana 151
Gambar 4-16. Indeks Risiko Bencana DKI Jakarta 2015 -2022 152
Gambar 4-17. Peta Genangan Banjir Provinsi DKI Jakarta Desember 2019 s.d. Februari 2020 155
Gambar 4-18 Kawasan Rawan Banjir 156
Gambar 4-19. Peta Wilayah Banjir Rob 17 November 2020 158
Gambar 4-20 Kejadian Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021.....161
Gambar 4-21. Data Kejadian Kebakaran 161
Gambar 4-22 Jumlah RT terdampak dan Perkiraan Kerugian yang dialami akibat Kebakaran Tahun 2020 dan Tahun 2021 161
Gambar 4-23 Sumber Bencana Kebakaran 162
Gambar 4-24 Risiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit.....162
Gambar 4-25 Risiko Bencana Kegagalan Teknologi 2022.....163
Gambar 4-26. Indeks Kesiapsiagaan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 165
Gambar 4-27. Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana 165
Gambar 4-28. Jumlah Sistem Peringatan Dini DKI Jakarta.....166
Gambar 4-29 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam 167
Gambar 4-29 Status Indikatif DDLH Penyedia Air Wilayah Daratan Provinsi DKI Jakarta 2023.....168
Gambar 4-31. Jaringan Perpiaan DKI Jakarta Berdasarkan Rencana Struktur Ruang.....170
Gambar 4-32. Peta Zona Bebas Air Tanah 171
Gambar 4-33. Kondisi degradasi Air Tanah 2013 -2017 di CAT Jakarta.....171
Gambar 4-34. Pola Ruang 2012 dan Kondisi Zona Konservasi Air Tanah 2017 172
Gambar 4-35. Zona Konservasi Air Tanah.....173
Gambar 4-36. Kondisi Muka Air Tanah (MAT) Akifer 0 – 40 m DKI Jakarta.....174
Gambar 4-37. Sebaran Klasifikasi Tanah berdasarkan N – SPT.....175

Gambar 4-38. Peta Kerawanan Kualitas Air Tanah Berdasarkan DHL pada Akuifer 0 – 40 m dan 40 – 300 m . 176
Gambar 4-39. Kondisi Jaringan Air Baku DKI Jakarta Berdasarkan Rencana Struktur Ruang 176
Gambar 4-40 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah 182
Gambar 4-41 Nilai IKA Wilayah Administratif 184
Gambar 4-42 Konsentrasi PM10 184
Gambar 4-43 Konsentrasi PM2.5 185
Gambar 4-44 IKTL DKI Jakarta 2018 – 2022 187
Gambar 4-45 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Ketimpangan Sosial Ekonomi 190
Gambar 4-46 Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta 191
Gambar 4-47 Tren Gini Ratio DKI Jakarta 192
Gambar 4-48 Tren Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 193
Gambar 4-49 Tren PDRB per Kapita 194
Gambar 4-50 Tren Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta 194
Gambar 4-50 Tingkat Kemiskinan Kepulauan 195
Gambar 4-52 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta 196
Gambar 4-53 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik 198
Gambar 4-54 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK menuju Kota Berkelanjutan 202
Gambar 5-1 Capaian Indikator TPB Tiap OPD dan Realisasi Anggaran 2018-2022 209
Gambar 6-1 Proyeksi Penduduk Sampai Dengan Tahun 2029 213
Gambar 6-2 Proyeksi IRBI Berdasarkan Skenario BAU, Moderate, dan Akseleterasi 215
Gambar 6-3 Proyeksi Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah Berdasarkan Skenario BAU, Moderate, dan Akselerasi 216
Gambar 6-4 Proyeksi Jumlah Sistem Peringatan Dini Berdasarkan Skenario BAU, Moderate, dan Akselerasi . 217
Gambar 6-5 Proyeksi Kerugian Bencana Berdasarkan Skenario BAU, Moderate, dan Akselerasi 217
Gambar 6-6 Grafik Perbandingan Ketersediaan Air DKI Jakarta Tahun 2022 - 2029 219
Gambar 6-7 Proyeksi Kondisi D3TLH Air untuk Provinsi DKI Jakarta 2029 220
Gambar 6-8 Rencana Jaringan Air Baku 221
Gambar 6-9 Proyeksi Kondisi IKLH untuk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2029 223
Gambar 6-10 Proyeksi Kondisi IKA Tahun 2029 224
Gambar 6-11 Proyeksi Kondisi IKU Tahun 2029 224
Gambar 6-12 Proyeksi Kondisi IKTL Tahun 2029 225
Gambar 6-13. Skenario Reduksi Emisi GRK 226
Gambar 6-14. Persentase Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan 226
Gambar 6-15 Proyeksi IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2029 227
Gambar 6-16 Proyeksi Gini Ratio Provinsi DKI Jakarta Tahun 2029 228
Gambar 6-17 Proyeksi PDRB Provinsi DKI Jakarta 229
Gambar 6-18 Proyeksi Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2029 229
Gambar 6-19 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta Tahun 2029 230
Gambar 6-20 Proyeksi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik 231
Gambar 6-21. Proyeksi dan Skenario Tingkat Penggunaan Transportasi Publik 235
Gambar 6-22 Proyeksi Proporsi Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2029 235
Gambar 6-23 . Kerangka Pikir Penyusunan Rekomendasi KLHS RPJMD DKI Jakarta 237
Gambar 6-24. Rekomendasi KLHS RPJPD 2025-2045 238
Gambar 6-25. Gambaran Usulan Pengintegrasian KLHS ke dalam RANWAL RPJMD 248

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Pendekatan dalam Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan 20
Tabel 3-1. Luas Wilayah DKI Jakarta.....37
Tabel 3-2. Ekoregion di DKI Jakarta 43
Tabel 3-3. Karakteristik Vegetasi Alami di DKI Jakarta 52
Tabel 3-4 Curah Hujan dan Hari Hujan Provinsi DKI Jakarta 59
Tabel 3-5 Data Cuaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2020.....60
Tabel 3-6. Nama Daerah Aliran Sungai dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta 63
Tabel 3-7.Tiga Belas Sungai Lintas Provinsi Dan Beberapa Saluran Makro Yang Berada Di Wilayah DKI Jakarta 66
Tabel 3-8 Wadah Parkir Air Eksisting Dan Luasnya 67
Tabel 3-9 Kondisi Penutupan Lahan DKI Jakarta Tahun 2022.....71
Tabel 3-10 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2022.....74
Tabel 3-11 Jumlah Fasilitas Kesehatan DKI Jakarta 77
Tabel 3-12. Angka Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta.....77
Tabel 3-13 Jumlah Ketersediaan Air (m3/tahun) pada wilayah fungsional DKI Jakarta Untuk Tiap WD 85
Tabel 3-14 Rekap Hasil Analisis Daya Dukung Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 90
Tabel 3.15 Nilai Koefisien Berdasarkan Jumlah Penduduk, Rasio Ekuivalen Wilayah dan Jarak Sungai (Parameter Domestik) Untuk Menentukan BOD, COD, dan TSS 95
Tabel 3.16 Koefisien Berdasarkan Tutupan Lahan Pertanian Untuk Menentukan BOD, COD, dan TSS.....95
Tabel 3.17 Koefisien Berdasarkan Tutupan Lahan Pertanian Untuk Menentukan BOD, COD, dan TSS..... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3-18. Kecenderungan Persentase Tutupan Karang Hidup di Kabupaten Kepulauan Seribu 100
Tabel 3-19. Kondisi Terumbu Karang Di Wilayah Kepulauan Seribu 2023 101
Tabel 3-20. Tutupan dan Status Kondisi Padang Lamun di Kepulauan Seribu. 105
Tabel 3-21. Update Kondisi Terkini Padang Lamun di Kepulauan Seribu.....107
Tabel 3-22. Perubahan Tutupan Lahan Hutan Mangrove di DKI Jakarta 2009 – 2021.....109
Tabel 3-23. Luasan Kategori dan Total Mangrove Kepulauan Seribu 2019 109
Tabel 3-24 Kondisi Ekosistem Mangrove di Lokasi Sampling 110
Tabel 3-25. Potensi KEHATI DKI Jakarta.....113
Tabel 3-26 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta.....114
Tabel 3-27 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Menurut Sumber Penerimaan (milyar rupiah).....117
Tabel 4-1 Kategori Capaian TPB DKI Jakarta 127
Tabel 4-2. Analisis TPB.....134
Tabel 4-3 Daftar Isu Pembangunan Berdasarkan Data Capaian TPB 134
Tabel 4-4 Daftar Isu Pembangunan Berkelanjutan yang Relevan degan Provinsi DKI Jakarta Bersumber dari Dokumen Perencanaan Strategis 144
Tabel 4-5. Rangkuman Masukan dari FGD Pengkayaan dan Penajaman Isu Pembangunan Strategis 147
Tabel 4-6 Kerangka Kajian Isu Risiko Bencana Tinggi 152
Tabel 4-7 Indeks Risiko Bencana Banjir Tahun 2020 - 2022.....153
Tabel 4-8 Tingkat Potensi Bahaya Banjir Tahun 2022 154
Tabel 4-9 Kelas Kerentanan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta 156
Tabel 4-10. Lokasi Sebaran rob di Pantai Utara Jakarta.....157
Tabel 4-11 Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi DKI Jakarta 164
Tabel 4-12 Kerangka Kajian Isu Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam 167
Tabel 4-13 Klasifikasi Zona Konservasi Air Tanah DKI Jakarta Tahun 2017 172
Tabel 4-14 Klasifikasi Air Berdasarkan Jumlah Garam Terlarut 175
Tabel 4-15 Kondisi Tutupan Mangrove 177
Tabel 4-16 Luas dan Kerusakan Padang Lamun.....178
Tabel 4-17 Kondisi Tutupan Ekosistem Terumbu Karang 179

Tabel 4-18 Kerangka Kajian Isu Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah 182
Tabel 4-19 Posisi IKLH Provinsi DKI Jakarta 5 Tahun Terakhir 183
Tabel 4-20 Status Mutu Udara Ambien Wilayah DKI Jakarta Tahun 2021 186
Tabel 4-21. Luas Tutupan Lahan Vegetasi Hutan dan non Hutan 187
Tabel 4-22.Inventarisasi emisi GRK Provinsi DKI Jakarta 190
Tabel 4-23 Kerangka Kajian Isu Ketimpangan Sosial Ekonomi 191
Tabel 4-24 Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta 191
Tabel 4-25 Tren Gini Ratio DKI Jakarta 192
Tabel 4-26 Tren Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 193
Tabel 4-27 Tren Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta 195
Tabel 4-28 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta 196
Tabel 4-29 Kerangka Kajian Isu Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik 198
Tabel 4-30 Indeks Kepuasan Masyarakat DKI Jakarta 199
Tabel 4-31 Nilai SAKIP DKI Jakarta 199
Tabel 4-32 Kriteria SAKIP 199
Tabel 4-33. Kebijakan dan Dokumen Perencanaan Eksisting 201
Tabel 4-34 Kerangka Kajian Isu Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK menuju Kota Berkelanjutan 202
Tabel 4-35 Jumlah Kolaborasi 202
Tabel 4-36 Jumlah Inovasi Daerah 204
Tabel 4-37 Kolaborasi Pemenuhan Sarana Prasana 204
Tabel 4-38 Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (public transportation modal share) 205
Tabel 4-39. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau 205
Tabel 4-40. Domain dan Aspek Penilaian Evaluasi SPBE 206
Tabel 4-41 Nilai SPBE DKI Jakarta 206
Tabel 5-1 Capaian dan Kontribusi OPD pada Target TPB 210
Tabel 6-1 Proyeksi IRBI 215
Tabel 6-2 Proyeksi Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah 216
Tabel 6-3 Proyeksi D3TLH Air DKI Jakarta 2029 219
Tabel 6-4 Target Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan 221
Tabel 6-5 Target dan Proyeksi IKLH DKI Jakarta Sampai Dengan Tahun 2029 223
Tabel 6-6 Target dan Proyeksi IKU DKI Jakarta Sampai Dengan Tahun 2029 224
Tabel 6-7 Target dan Proyeksi IKTL DKI Jakarta Sampai Dengan Tahun 2029 225
Tabel 6-8 Proyeksi IPM Provinsi DKI Jakarta 228
Tabel 6-9 Proyeksi Gini Ratio Provinsi DKI Jakarta 228
Tabel 6-10 Proyeksi Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 230
Tabel 6-11 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta 230
Tabel 6-12 Baseline dan Target SAKIP Provinsi DKI Jakarta 232
Tabel 6-13 Baseline dan Target Ketersediaan Kebijakan dan Dokumen Rencana 232
Tabel 6-14 Target Kerja Sama Provinsi DKI Jakarta 234
Tabel 6-15 Proyeksi Tingkat Penggunaan Transportasi Publik Provinsi DKI Jakarta 235
Tabel 6-16 Proyeksi Proporsi Hunian Layak dan Terjangkau Provinsi DKI Jakarta 236
Tabel 6-17 Proyeksi SPBE Provinsi DKI Jakarta 236
Tabel 6-18. Usulan Integrasi Rekomendasi KLHS ke dalam penyusunan RPJMD 244

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Gubernur No. 215 Tahun 2023 tentang Tim Pembuat KLHS RPJPD 2025 – 2045 dan RPJMD 2025 -2030 254
Lampiran 2. Kerangka Acuan Kerja Penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD DKI Jakarta 259
Lampiran 3. Focus Group Discussion Penjaringan Isu 271
Lampiran 4. Daftar Hadir Konsultasi Publik Isu Strategis KLHS RPJMD 273
Lampiran 5. Berita Acara Konsultasi Publik Isu Strategis KLHS RPJMD 277
Lampiran 6. Konsultasi Publik Alternatif Skenario KLHS RPJMD 279
Lampiran 7. Kompetensi Tenaga Ahli 281
Lampiran 8. Capaian TPB 318
Lampiran 9. Berita Acara Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD 358
Lampiran 10. D.1 Tabel Target dan Indikator 370
Lampiran 11. D.2 Tabel Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan yang Dilaksanakan Pemerintah 397
Lampiran 12. D.3 Tabel Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan yang Dilaksanakan oleh Non Pemerintah 409
Lampiran 13. Persandingan Program Rekomendasi KLHS dengan Program 2018 - 2022 414
Lampiran 14. Berita Acara Asistensi Validasi 419
Lampiran 15. Surat Permohonan Validasi 421

RINGKASAN EKSEKUTIF
KLHS RPJMD DKI JAKARTA 2025 - 2029

PENDAHULUAN

Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu dari 101 daerah yang pada tahun 2022 masa jabatan kepala daerah telah selesai sehingga akan mengikuti Pilkada serentak pada tahun 2024. Pergantian kepala daerah diikuti dengan penyusunan RPJMD sebagai rujukan pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan aturan turunannya (PP No. 46/2016 dan Permen LHK No. P.69/Menlhk/ Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis), penyusunan RPJMD wajib didampingi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selanjutnya, Pasal 26 Permendagri 7/2018 mengatur bahwa KLHS RPJMD dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Teknokratik. Hal ini diperkuat dengan Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 550/5112/Bangda Tanggal 5 Juli 2022 Hal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan KLHS RPJPD yang mengarahkan daerah untuk menganggarkan penyelenggaraan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD pada tahun anggaran 2023. Penyelenggaraan KLHS ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dijadikan dasar dan diintegrasikan ke dalam RPJMD DKI Jakarta 2025-2029.

Penyelenggaraan KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 dilakukan dengan pendekatan *Ex-Ante*, yaitu KLHS dilakukan sebelum adanya rancangan teknokratik ataupun rancangan awal RPJMD. KLHS dilakukan oleh Pokja KLHS yang dibentuk melalui SK Gubernur No. 215 Tahun 2023, dengan melibatkan dan partisipasi berbagai pihak termasuk perangkat daerah terkait, tenaga ahli, pemangku kepentingan terkait, dan publik. Dengan kata lain, KLHS ini dilakukan dengan kombinasi pendekatan teknokratik (menganalisis data dan informasi secara ilmiah) dan deliberatif/partisipatif (menggali dan memanfaatkan masukan-masukan pemangku kepentingan). Selain menganalisis data dan informasi sekunder, Pokja KLHS menyelenggarakan serangkaian pertemuan koordinasi, FGD, dan konsultasi publik baik secara tatap muka maupun virtual.

PENGKAJIAN PENGARUH KRP

1. Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi isu pembangunan dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik dan deliberatif/partisipatif yaitu melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, untuk menjamin agar isu-isu Pembangunan strategis yang dihasilkan sudah komprehensif dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Pendekatan teknokratik meliputi tiga jalur penelaahan: (a) status pencapaian target indikator pembangunan berkelanjutan (TPB), (b) dokumen terkait kondisi lingkungan wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan (c) dokumen-dokumen kebijakan dan perencanaan strategis.

Jalur Telaah Pencapaian Target Indikator TPB

Telaah pencapaian target indikator TPB menunjukkan adanya 23 indikator TPB pada tiga TPB (1, 3, 11) yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena belum mencapai target yang ditentukan. Seluruh 23 indikator tersebut apabila dilihat substansinya dapat dirangkum dalam isu, yaitu:

1. Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih
2. Kurang optimalnya penanganan korban bencana
3. Kualitas Kesehatan masyarakat belum sesuai target
4. Belum menyeluruhnya jaminan kesehatan
5. Rendahnya kegiatan pengembangan dan penelitian serta inovasi untuk menunjang pertumbuhan PDRB
6. Rendahnya kapasitas IKM untuk mengakses fasilitas keuangan (FI)

7. Ketimpangan infrastruktur yang menunjang pemerataan pembangunan (*Urban - Island based*)
8. Sarana dan prasarana permukiman belum mencapai target TPB Jakarta
9. Upaya adaptasi dan mitigasi bencana belum mencapai target TPB Jakarta
10. Pengelolaan sampah belum mencapai target terutama di Pulau

Jalur Telaah Kondisi Lingkungan Hidup

Pasal 13 PP No. 46/2016 mengamanatkan bahwa analisis KLHS meliputi enam muatan kajian, yaitu: (1) kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan; (2) perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup; (3) kinerja layanan atau jasa ekosistem; (4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan (7) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Telaah kondisi lingkungan hidup dari aspek enam muatan diperoleh empat isu Pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Keberlanjutan sumber daya air
2. Pencemaran lingkungan
3. Kerentanan terhadap bencana
4. Degradasi keanekaragaman hayati

Jalur Telaah Dokumen Strategis

Terdapat tujuh dokumen strategis yang ditelaah untuk mengidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) RPJPN 2025-2045, (2) RTRW Jabodetabekjur (Perpres 60/2020), (3) Naskah Akademik RUU DKJ, (4) RPPLH DKI 2022-2052, (5) RTRW DKI 2022-2042, (6) KLHS Harmonisasi RTRW-RZWP3K 2022-2042, (7) RPD DKI 2023-2026, (8) KLHS RPJPD 2025-2045. Dari kedelapan dokumen strategis ini dapat diidentifikasi sejumlah 41 (empat puluh satu) isu pembangunan berkelanjutan. Tentunya terdapat banyak irisan kesamaan (*overlap*) antara 41 isu tersebut dan setelah dengan *content analysis* 41 isu tersebut dapat disintesis menjadi tujuh isu pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. Tingginya risiko bencana
2. Belum optimalnya tata kelola berbasis Wilayah Fungsional Perkotaan
3. Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK menuju Kota Berkelanjutan
4. Iklim usaha untuk mendorong PDRB
5. Kesenjangan Sosial-Ekonomi
6. Degradasi kualitas lingkungan
7. Degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil

Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dari tiga jalur di atas kemudian disandingkan dan dianalisis kesamaan substansi atau materi muatannya supaya didapat daftar pendek isu pembangunan yang benar-benar bersifat strategis. Rangkuman proses dan hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana dideskripsikan di atas dapat disajikan pada Gambar 1 di bawah.

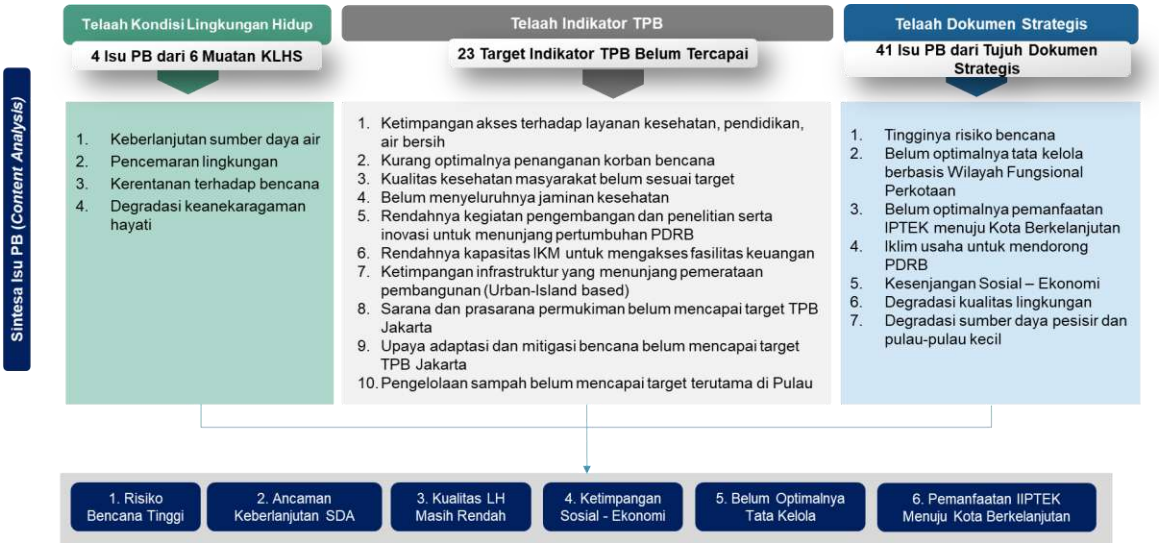

Gambar 1. Rangkuman Proses dan Hasil Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Telaah Literatur

Hasil akhir dari identifikasi isu pembangunan berkelanjutan secara teknokratik melalui tiga jalur telaahan kemudian dijadikan bahan untuk FGD dengan para pemangku kepentingan dan hasilnya dibawa ke forum Konsultasi Publik 1 untuk pengayaan, penajaman dan finalisasi. Hasil rumusan isu pembangunan strategis yang dihasilkan setelah melalui proses FGD dan Konsultasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Tingginya Resiko Bencana
2. Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam
3. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah
4. Ketimpangan Sosial-Ekonomi
5. Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK menuju Kota berkelanjutan
6. Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*)

Walaupun telah disepakati hanya ada 6 (enam) isu strategis, tidak berarti bahwa daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan tidak dimanfaatkan atau dibuang karena pada dasarnya setiap isu pembangunan berkelanjutan bersifat multi sektor dan saling terkait. Oleh karena itu, dilakukan analisis keterkaitan sebab-akibat (*mind-mapping*) antar isu untuk memastikan agar setiap isu pembangunan berkelanjutan diupayakan langkah-langkah penyelesaiannya nanti pada tahap identifikasi alternatif penyempurnaan KRP. Hasil analisis keterkaitan antar isu disajikan pada Gambar 2 di bawah.

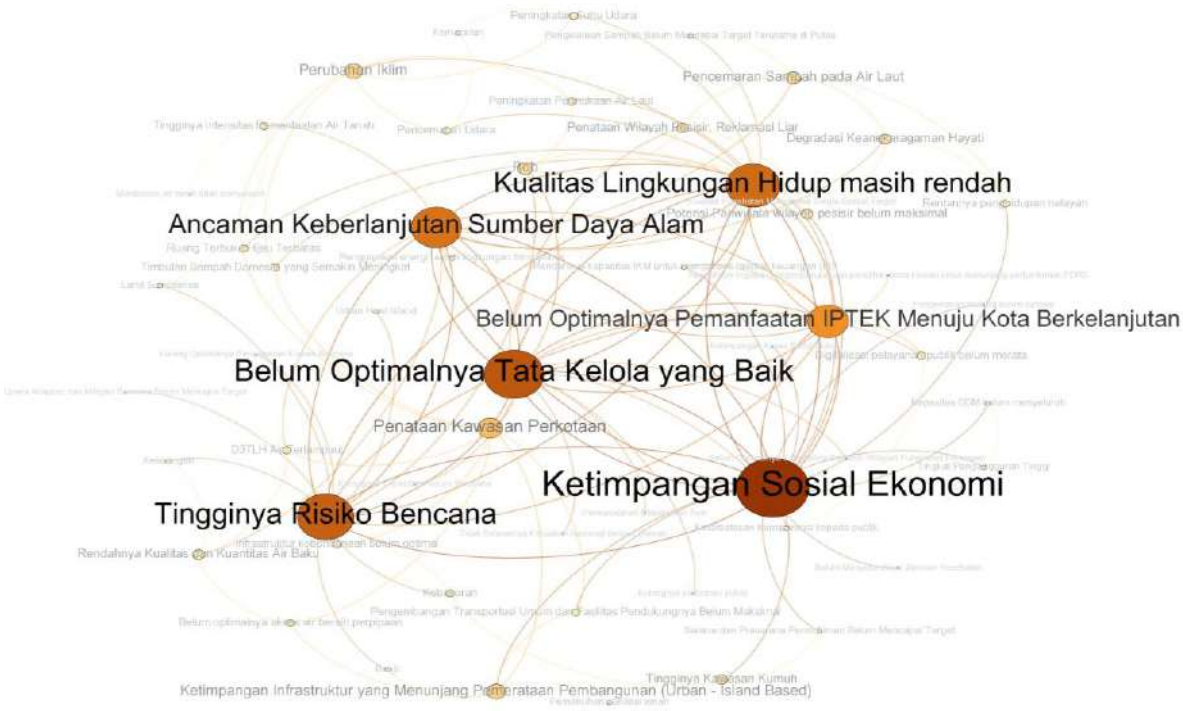

Gambar 2. Hasil Analisis Keterkaitan antar Isu Pembangunan Berkelanjutan

2. Penyusunan Kerangka Kajian

Setelah isu pembangunan berkelanjutan disepakati, langkah berikutnya adalah menyusun kerangka kajian. Kerangka kajian merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa kajian yang dilakukan harus berupaya untuk mengidentifikasi dan merumuskan alternatif-alternatif kebijakan untuk mengatasi semua isu pembangunan secara komprehensif. Kerangka kajian disajikan pada Tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Kerangka Kajian

Tujuan/ Deskripsi	Kriteria	Indikator
(1)	(2)	(3)
Mengkaji penurunan risiko bencana melalui upaya penurunan kerentanan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dengan pemanfaatan IPTEK	Tingkat dan Kerentanan bencana	• IRBI • Risiko Bencana alam dan non Alam (kebakaran, wabah penyakit, gagal teknologi)
	Kapasitas (tingkat ketahanan daerah terhadap bencana)	Kerugian bencana
	Pemanfaatan IPTEK (Digital Platform)	Sistem Peringatan dini
Mengkaji upaya Pemanfaatan dan Pengelolaan untuk mencapai keberlanjutan sumber daya alam	Ancaman Keberlanjutan Sumber Daya Air	Daya Dukung Air
		Infrastruktur Perkotaan (Penyediaan Air Bersih)
	Degradasi keanekaragaman Hayati	Kondisi Kerusakan Keanekaragaman Hayati
Mengkaji upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk mencapai kota berkelanjutan	Perbaikan kualitas lingkungan hidup	• IKA • IKU • IKTL RTH • Pengelolaan Sampah • Emisi GRK
Mengkaji upaya penurunan ketimpangan sosial ekonomi melalui inklusivitas akses fasilitas sosial ekonomi dan akses peningkatan kesejahteraan	Pemerataan akses pelayanan sosial ekonomi di daratan dan kepulauan	IPM
		Gini Ratio
		Pemenuhan Fasilitas Sosial Ekonomi
		Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita
		Tingkat Kemiskinan Kepulauan

Tujuan/ Deskripsi	Kriteria	Indikator
		Tingkat Pengangguran Terbuka
Mengkaji upaya menuju kota yang berkelanjutan dengan pemanfaatan IPTEK dalam menjaga keberlanjutan SDA, meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi risiko bencana, mengurangi ketimpangan sosial dan optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui kolaborasi para pihak penta helix (pemerintah, akademisi, badan/ pelaku usaha - swasta, Masyarakat, media massa)	Kolaborasi dan inovasi pengembangan IPTEK untuk keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas lingkungan dan penurunan risiko bencana	• Jumlah inovasi daerah (indeks inovasi daerah) • Jumlah kolaborasi (pihak terkait)
	Kolaborasi dan inovasi pengembangan IPTEK untuk menjamin inklusivitas sarana prasarana perkotaan	• Kolaborasi pemenuhan sarpras perkotaan • Pemenuhan infrastruktur perkotaan (transportasi publik) • Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
	Pengembangan IPTEK untuk tata kelola pemerintahan	SPBE (Sistem Informasi Berbasis Elektronik)
Mengkaji kapasitas kelembagaan untuk perbaikan pengelolaan sumber daya alam	Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Indeks Pelayanan Publik (Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik, SAKIP dan AKIP/ TPB 16)
	Pengelolaan Sumber daya Alam	• Kerja sama antar daerah • Ketersediaan Kebijakan dan Dokumen Perencanaan untuk Pengendalian Pemanfaatan SDA , peningkatan Kualitas Lingkungan, serta *monitoring* dan evaluasi

3. Baseline Data, Analisis Kecenderungan, Proyeksi, dan Skenario

Berdasarkan indikator pada kolom 4 Kerangka Kajian, maka dilakukan pengumpulan data seri untuk menyusun baseline. Berdasarkan baseline data tersebut kemudian dilakukan analisis kecenderungan (*tren analisis*), proyeksi tanpa upaya tambahan (*Business as usual* – BAU), dan skenario konservatif (moderat) dan optimistik (akselerasi). Seluruh hasil dari proses ini kemudian dipakai sebagai dasar untuk merumuskan alternatif KRP.

PERUMUSAN ALTERNATIF DAN REKOMENDASI KRP

1. Perumusan Alternatif KRP

Perumusan alternatif kebijakan dilakukan dengan melakukan daya upaya untuk mengidentifikasi berbagai alternatif solusi untuk mengatasi isu pembangunan strategis dengan mengacu pada kriteria kajian yang didukung dengan baseline data, analisis kecenderungan/*tren*, skenario BAU dan upaya tambahan (moderat dan akselerasi). Selain itu, perumusan alternatif KRP juga mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana dimuat dalam Pasal 26, Ayat (2) dan Lampiran V PermenLHK No. P.69 Tahun 2017. Dalam KLHS ini, perumusan alternatif kebijakan diharmonisasikan dengan kebijakan-kebijakan yang termuat dalam dokumen-dokumen kebijakan dan perencanaan strategis yang sudah ada, termasuk RPJPN, RUU DK Jakarta, RTRW, RPPLH dan dokumen strategis lainnya. Proses identifikasi dan perumusan alternatif KRP dapat dideskripsikan pada Gambar 3 di bawah.

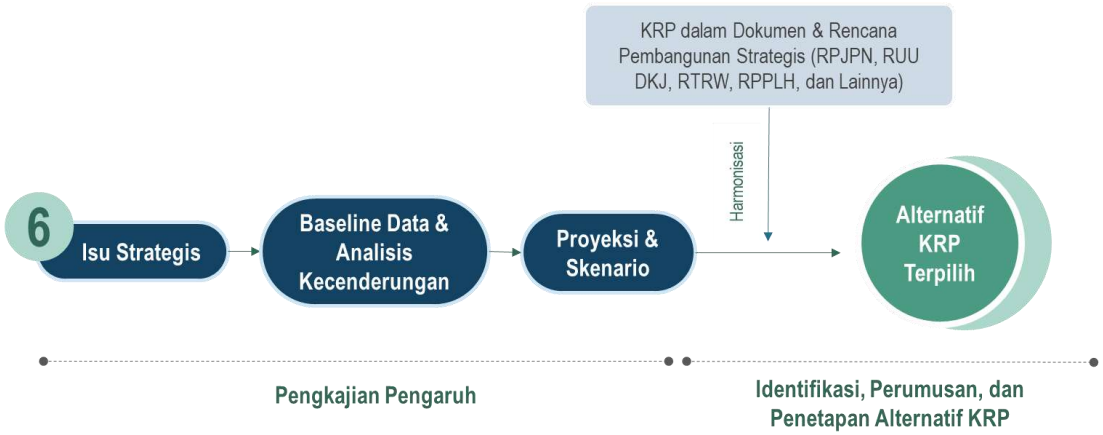

Gambar 3. Alur Proses Identifikasi, Perumusan dan Penetapan Alternatif KRP

Hasil identifikasi, perumusan dan penetapan alternatif KRP melalui alur seperti dideskripsikan pada Gambar 3 di atas kemudian ditelaah lebih lanjut dalam sebuah FGD dengan OPD terkait. Hasilnya kemudian dipaparkan kepada publik dalam sebuah Konsultasi Publik. Hasil akhir disajikan dalam Tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Hasil Identifikasi dan Perumusan Alternatif Kebijakan

Isu	Kriteria	Alternatif KRP	
		Moderate	Akselerasi
1. Tingginya Risiko Bencana	• Tingkat dan Kerentanan bencana • Kapasitas (tingkat ketahanan daerah terhadap bencana) • Pemanfaatan IPTEK (Digital Platform)	S1.1. Penyusunan rencana mitigasi bencana alam dan non alam yang terpadu S1.2. Kolaborasi dan koordinasi multi pihak, multi sector, dan lintas wilayah S1.3. Peningkatan sarana prasarana serta logistik penanggulangan kebencanaan S1.4. Peningkatan kapasitas masyarakat menuju masyarakat yang adaptif dan berketahanan S1.5. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana	S1.6. Pemanfaatan teknologi informasi untuk peringatan dini bencana yang terpadu S1.7. Pengembangan teknologi dan inovasi untuk sistem pemulihan bencana yang terpadu
2. Keberlanjutan SDA	• Perbaikan kualitas lingkungan hidup • Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA	S2.1. Pemerataan infrastruktur perkotaan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi S2.2. Peningkatan pengelolaan sampah melalui pemanfaatan teknologi S2.3. Kerja sama antar wilayah dalam menjaga keberlanjutan SDA dan kualitas LH S2.4. Penghematan pemanfaatan air melalui teknologi ramah lingkungan S2.5. Perlindungan keberlanjutan sumber daya air melalui mekanisme konservasi tanah dan air S2.6. Perlindungan kawasan ekosistem esensial dan keanekaragaman hayati	S2.7 Percepatan pencapaian 100% air perpipaan dan moratorium pengambilan air tanah di seluruh wilayah S2.8 Rehabilitasi dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau perkotaan sesuai dengan ketentuan 30% dari luas wilayah S2.9 Pengembangan instrumen ekonomi lingkungan yang komprehensif dalam menjalankan kerja sama di wilayah fungsional
3. Kualitas Lingkungan Hidup	Perbaikan kualitas lingkungan hidup	S3.1. Penurunan emisi GRK melalui pengendalian sumber pengendalian sumber emisi utama (transportasi, industri, dan pembangkit listrik)	S3.7 Pengembangan inovasi dan teknologi ramah lingkungan untuk menekan emisi

Isu	Kriteria	Alternatif KRP	
		Moderate	Akselerasi
		S3.2. Diversifikasi sumber energi (tenaga surya) pada setiap sektor terutama sumber emisi utama S3.3. Pengembangan transportasi publik terintegrasi yang ramah lingkungan S3.3. Peningkatan fungsi ruang terbuka hijau melalui kesesuaian rancangan RTH termasuk penanaman vegetasi yang efektif menyerap emisi S3.4. Peningkatan daur ulang sampah melalui pemanfaatan teknologi dengan peran serta multi pihak	S3.8 Penerapan kebijakan infrastruktur hijau dalam pengembangan wilayah
4. Ketimpangan Sosial Ekonomi	Pemerataan akses pelayanan sosial ekonomi di daratan dan kepulauan	S4.1. Peningkatan PDRB perkapita S4.2. Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat kepulauan S4.3. Penurunan tingkat pengangguran terbuka S4.4. Penyediaan infrastruktur air bersih perpipaan S4.5. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat S4.6. Peningkatan IPM Kepulauan Seribu S4.7. Penurunan gini ratio S4.8. Penyediaan rumah layak huni S4.9. Penurunan jumlah RW kumuh	S4.10 Pengembangan ekonomi makro berskala global berbasis bisnis dan jasa S4.11 Peningkatan fungsi kota Jakarta sebagai kota transit internasional S4.12 Peningkatan kerja sama internasional dalam pengembangan ekonomi
5. Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik	• Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah • Pengelolaan Sumber daya Alam pengembangan IPTEK untuk menjamin inklusivitas sarana prasarana perkotaan	S5.1. Penguatan kapasitas tata kelola daerah secara internal menuju *good governance* S5.2. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam wilayah fungsional S5.3. Peningkatan kerja sama internasional untuk meningkatkan daya saing global S5.4. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi berbasis digital dalam tata kelola termasuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KRP S5.5 Peningkatan sistem penegakan hukum	S5.6. Kesiapan menuju terciptanya *business enabling environment* (Reformasi ekonomi, *policy dialogue, knowledge sharing, civil society)* S5.7. Penguatan mekanisme kerja sama multipihak dengan prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*)
6. Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK Menuju Kota Berkelanjutan	• Kolaborasi dan inovasi pengembangan IPTEK untuk keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas lingkungan dan penurunan risiko bencana • Kolaborasi dan inovasi pengembangan IPTEK untuk menjamin inklusivitas sarana prasarana perkotaan • Pengembangan IPTEK untuk tata kelola pemerintahan	S6.1. Peningkatan inovasi pengembangan IPTEK untuk keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas lingkungan, penurunan risiko bencana, inklusivitas sarana prasarana perkotaan dan tata kelola pemerintahan S6.2. Peningkatan kolaborasi untuk akselerasi inovasi terkait keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas lingkungan, penurunan risiko bencana, inklusivitas sarana prasarana perkotaan dan tata kelola pemerintahan	S6.3. Pengembangan Jakarta sebagai smart city S6.4. Peningkatan akses pembiayaan inovatif untuk menunjang pengembangan IPTEK dan penerapan teknologi yang *climate friendly (Green building,* pengembangan energi terbarukan)

2. Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Program Prioritas

Hasil identifikasi, perumusan, dan pemilihan Alternatif KRP merupakan daftar Alternatif KRP per Isu Strategis. Daftar Alternatif KRP tersebut kemudian ditelaah dan dijadikan landasan untuk merumuskan rekomendasi arahan kebijakan dan rekomendasi arahan program prioritas. Substansi arahan kebijakan kemudian dapat dijadikan salah satu rujukan bagi para perencana untuk merumuskan kebijakan dalam RPJMD (Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan, dan lainnya.), sedangkan substansi rekomendasi arahan program prioritas untuk perumusan substansi program. Berikut disajikan Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Rekomendasi Arahan Program Prioritas pada Tabel 3 di bawah.

Tabel 3. Daftar Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Arahan Program Prioritas

Alternatif Skenario		Arahan Kebijakan	Arahan Program
Moderate	Akselerasi		
Tingginya Risiko Bencana			
S1.1. Penyusunan rencana mitigasi bencana alam dan non alam yang terpadu S1.2. Kolaborasi dan koordinasi multi pihak, multi sector, dan lintas wilayah S1.3. Peningkatan sarana prasarana serta logistik penanggulangan kebencanaan S1.4. Peningkatan kapasitas masyarakat menuju masyarakat yang adaptif dan berketahanan S1.5. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana	S1.6. Pemanfaatan teknologi informasi untuk peringatan dini bencana yang terpadu S1.7. Pengembangan teknologi dan inovasi untuk sistem pemulihan bencana yang terpadu	A1.1. Mengimplementasikan rencana mitigasi bencana terpadu berbasis sistem informasi kebencanaan menuju masyarakat yang berketahanan dengan pelibatan multi stakeholder A.1.2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana kebencanaan secara inklusif untuk memperkuat ketangguhan kota dan masyarakat serta mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat bencana	1.05.03 Penanggulangan Bencana 1.05.04 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 1.06.06 Program Penanganan Bencana 1.03.06 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 1 03 08. Penataan Bangunan Gedung 1.04.02 Pengembangan Perumahan 1.04.06. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Keberlanjutan SDA			
S2.1. Pemerataan infrastruktur perkotaan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi S2.2. Peningkatan pengelolaan sampah melalui pemanfaatan teknologi S2.3. Kerja sama antar wilayah dalam menjaga keberlanjutan SDA dan kualitas LH	S2.7 Percepatan pencapaian 100% air perpipaan dan moratorium pengambilan air tanah di seluruh wilayah S2.8 Rehabilitasi dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau perkotaan sesuai dengan ketentuan 30% dari luas wilayah	A2.1. Meningkatkan laju perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati berbasis wilayah fungsional dan teknologi berkelanjutan A2.2. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multi sector, multi pihak, dan lintas wilayah dalam	1.03.02 Pengelolaan SDA 1.03.03 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1.03.04 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 1.03.05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1.03.06 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Alternatif Skenario		Arahan Kebijakan	Arahan Program
S2.4. Penghematan pemanfaatan air melalui teknologi ramah lingkungan S2.5. Perlindungan keberlanjutan sumber daya air melalui mekanisme konservasi tanah dan air S2.6. Perlindungan kawasan ekosistem esensial dan keanekaragaman hayati	S2.9 Pengembangan instrumen ekonomi lingkungan yang komprehensif dalam menjalankan kerja sama di wilayah fungsional	upaya perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 2.11.08 Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 2.11.11 Pengelolaan Persampahan 3.25.02 Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau Kecil 3.25.05 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 3.28.04 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 3.29.02 Pengelolaan Aspek Kegeologian
Kualitas Lingkungan Hidup			
S3.1. Penurunan emisi GRK melalui pengendalian sumber pengendalian sumber emisi utama (transportasi, industri, dan pembangkit listrik) S3.2. Diversifikasi sumber energi (tenaga surya) pada setiap sektor terutama sumber emisi utama S3.3. Pengembangan transportasi publik terintegrasi yang ramah lingkungan S3.3. Peningkatan fungsi ruang terbuka hijau melalui kesesuaian rancangan RTH termasuk penanaman vegetasi yang efektif menyerap emisi S3.4. Peningkatan daur ulang sampah melalui pemanfaatan teknologi dengan peran serta multi pihak	S3.7 Pengembangan inovasi dan teknologi ramah lingkungan untuk menekan emisi S3.8 Penerapan kebijakan infrastruktur hijau dalam pengembangan wilayah	A3.1. Meningkatkan laju pengurangan emisi GRK melalui pemanfaatan teknologi hijau, infrastruktur hijau, dan dukungan kebijakan berbasis ekonomi hijau A3.2. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multi sector, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan	1.03.04 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 2.11.02 Pencemaran Lingkungan Hidup 2.11.03 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2.11.06 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH) 2.11.08 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH untuk Masyarakat 3.29.05 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
Ketimpangan Sosial Ekonomi			
S4.1. Peningkatan PDRB perkapita S4.2. Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat kepulauan	S4.10 Pengembangan ekonomi makro berskala global berbasis bisnis dan jasa	A4.1. Menumbuhkan ekonomi kreatif yang pro UMKM bercirikan budaya, non ekstraktif untuk meningkatkan daya saing global	1.01.02 Pengelolaan Pendidikan 1.01.03 Pengembangan Kurikulum 1.02.02 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Alternatif Skenario		Arahan Kebijakan	Arahan Program
S4.3. Penurunan tingkat pengangguran terbuka S4.4. Penyediaan infrastruktur air bersih perpipaan S4.5. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat S4.6. Peningkatan IPM Kepulauan Seribu S4.7. Penurunan gini ratio S4.8. Penyediaan rumah layak huni S4.9. Penurunan jumlah RW kumuh	S4.11 Peningkatan fungsi kota Jakarta sebagai kota transit internasional S4.12 Peningkatan kerja sama internasional dalam pengembangan ekonomi	A4.2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berorientasi global pada sector bisnis dan jasa berbasis teknologi digital modern serta sektor pariwisata, budaya, dan MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) berskala internasional A4.3. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, inovatif, produktif, dan berdaya saing global secara inklusif A4.4. Mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara kepulauan dan daratan melalui peningkatan kualitas hunian dengan penyediaan sarana prasarana social, ekonomi, dan budaya secara inklusif, aman, dan terjangkau menuju kota layak huni	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 1.03.07 Pengembangan Permukiman 1.04.02 Pengembangan Perumahan 1.04.03 Program Kawasan Permukiman 1.04.05 Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1 06 02. Pemberdayaan Sosial 1 06 05. Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.07.03 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2.14.04. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 2.17.07 Pemberdayaan UMKM 2.17.08 Pengembangan UMKM 3.25.06 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 3.26.02 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata 3.26.03 Pemasaran Pariwisata 3.26.04 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 3.26.05 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4.01.06 Perekonomian dan Pembangunan
Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik			
S5.1. Penguatan kapasitas tata kelola daerah secara internal menuju *good governance* S5.2. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam wilayah fungsional S5.3. Peningkatan kerja sama internasional untuk meningkatkan daya saing global S5.4. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi berbasis digital dalam tata kelola termasuk	S5.6. Kesiapan menuju terciptanya *business enabling environment* (Reformasi ekonomi, *policy dialogue, knowledge sharing, civil society)* S5.7. Penguatan mekanisme kerja sama multipihak dengan prinsip TARIF (*Transparency, Accountability,*	A5.1. Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup SDM, kelembagaan, skema pembiayaan inovatif, kebijakan, dan teknologi digital modern A5.2. Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk menjawab tantangan global (*Triple Planetary Crisis*) A5.3. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk	1.03.12. Penyelenggaraan Penataan Ruang 4.01.02. Program Penataan Organisasi 4.01.03. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 4.01.06. Program Perekonomian dan Pembangunan 5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5.03.02. Program Kepegawaian Daerah 5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.07.02. Program Pelayanan Penghubung 6.01.02. Penyelenggaraan Pengawasan

Alternatif Skenario		Arahan Kebijakan	Arahan Program
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KRP S5.5 Peningkatan sistem penegakan hukum	*Responsibility, Independency, Fairness*)	mendukung pencapaian good governance dan global city	
Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK Menuju Kota Berkelanjutan			
S6.1. Peningkatan inovasi pengembangan IPTEK untuk keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas lingkungan, penurunan risiko bencana, inklusivitas sarana prasarana perkotaan dan tata kelola pemerintahan S6.2. Peningkatan kolaborasi untuk akselerasi inovasi terkait keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas lingkungan, penurunan risiko bencana, inklusivitas sarana prasarana perkotaan dan tata kelola pemerintahan	S6.3. Pengembangan Jakarta sebagai smart city S6.4. Peningkatan akses pembiayaan inovatif untuk menunjang pengembangan IPTEK dan penerapan teknologi yang *climate friendly (Green building,* pengembangan energi terbarukan)	A6.1. Meningkatkan inovasi dan kolaborasi akselerasi pengembangan IPTEK menuju kota global yang berkelanjutan	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan 2.15.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2.16.03. Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik 3.26.04. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 5.05.02. Penelitian Pengembangan Daerah

ARAHAN INTEGRASI HASIL KLHS

1. Arahan Integrasi Hasil KLHS ke Dalam Naskah Akademik RPJMD

Penyusunan KLHS RPJMD DKI 2025-2029 telah menghasilkan dan menyepakati 6 (enam) Isu Strategis, 14 (empat belas) Arahan Kebijakan, dan 53 (lima puluh tiga) Arahan Program. Oleh karena pada waktu penyelesaian KLHS ini proses penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD belum dimulai, maka tidak dapat dilakukan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Rancangan Teknokratik. Pada saat ini, yang dapat dilakukan adalah menyediakan Arahan Pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Rancangan Teknokratik sebagaimana disajikan dalam Gambar 3 di bawah.

Gambar 3. Arahan Pengintegrasian Hasil KLHS ke Dalam Rancangan RPJMD DKI 2025-2029

2. Arahan Integrasi Hasil KLHS ke Dalam Rancangan RPJMD

Seperti halnya Rancangan Teknokratik, proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD DKI 2025-2029 baru akan dimulai pada tahun 2024 setelah KLHS ini selesai. Oleh karenanya, pada saat ini belum dapat dilakukan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam rancangan RPJMD DKI 2025-2029. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan Arahan Pengintegrasian yang memuat arahan/petunjuk ke mana hasil-hasil KLHS hendaknya diintegrasikan ke dalam tubuh atau bab-bab yang ada dalam Rancangan RPJMD, sebagaimana disajikan dalam Gambar 4 di bawah.

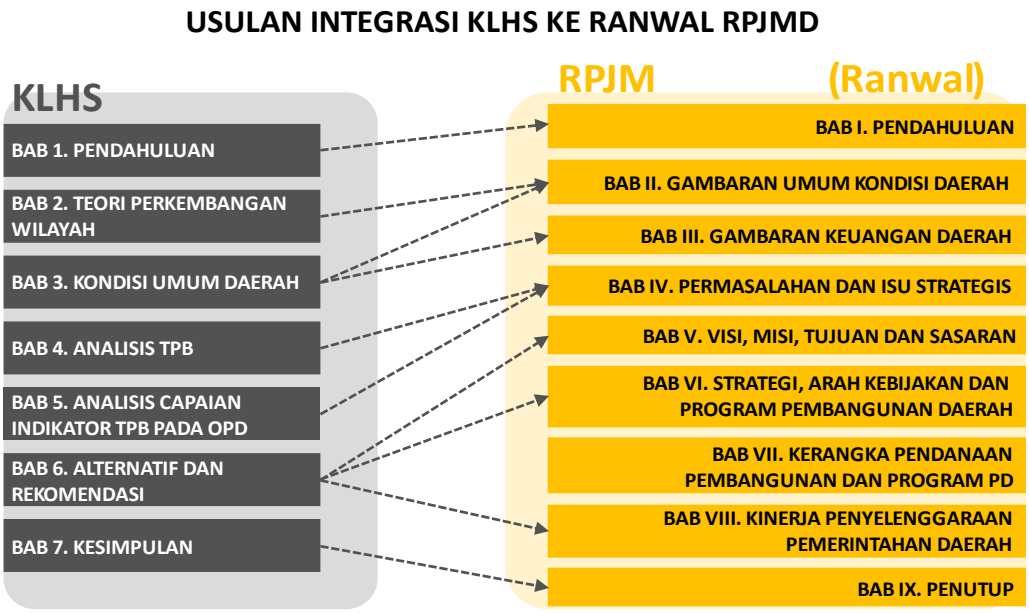

Gambar 4. Arahan Pengintegrasian Hasil KLHS ke Dalam Rancangan RPJMD DKI 2025-2029

KESIMPULAN

1. Penyusunan KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 dikerjakan dengan upaya optimal, baik dalam upaya memenuhi ketentuan tentang proses dan kualitas hasil kajian dan rekomendasi dan keluaran lainnya sebagaimana termuat dalam Permendagri 7/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan PP No. 46/2016 beserta dan aturan turunannya yaitu Permen LHK No. P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

   Berbagai usaha diupayakan untuk memastikan bahwa kualitas hasil KLHS dapat terpenuhi secara memadai, termasuk deskripsi kondisi sosial ekonomi berbasis data dan informasi mutakhir, hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan arahan-arahan rekomendasi kebijakan yang disinergikan dengan kebijakan nasional (RPJPN), diharmonisasikan dengan kebijakan-kebijakan jangka panjang internal DKI yang termuat dalam dokumen-dokumen kebijakan dan perencanaan strategis yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan hasil KLHS dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJMD 2025-2029 dan memberi manfaat yang nyata.

2. Dilakukan upaya cermat untuk mendokumentasikan proses dan hasil KLHS RPJMD DKI 2025-2029 dari awal hingga akhir ke dalam sebuah Laporan KLHS. Laporan KLHS RPJMD DKI 2025-2029 ini telah diselesaikan melalui proses Penjaminan Kualitas yang dokumennya telah ditandatangani oleh Kepala Daerah. Diharapkan Laporan ini dapat dijadikan salah satu tolok ukur oleh praktisi KLHS dan sebagai bahan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya peningkatan standar kualitas KLHS RPJMD.

3. KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 menetapkan 6 (enam) isu strategis yaitu: (1) tingginya risiko bencana, (2) keberlanjutan sumber daya alam, (3) kualitas lingkungan hidup masih rendah, (4) ketimpangan sosial-ekonomi, (5) pemanfaatan iptek menuju kota berkelanjutan, dan (6) belum optimalnya tata kelola yang baik.

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan

Ruang Lingkup
Metodologi Penyusunan
Sistematika Laporan KLHS

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan dan urbanisasi dalam beberapa dekade terakhir di DKI Jakarta berakibat pada meningkatnya kebutuhan sumber daya alam serta risiko terhadap lingkungan hidup. Permasalahan yang sama dapat ditemukan di berbagai kawasan di Indonesia. Orientasi pembangunan yang hanya memperhatikan aspek ekonomi dan kepentingan kelompok tertentu menyebabkan timbulnya berbagai masalah lingkungan dan konflik sosial. Pencemaran, kerusakan ekosistem, terancam punahnya spesies rentan sampai kepada dampak perubahan iklim menjadi permasalahan yang tidak dapat diabaikan lagi. Konflik sosial yang terjadi juga dapat mengancam keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menghambat pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Untuk itu, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilakukan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS diwajibkan dalam penyusunan atau evaluasi:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu dari 101 daerah yang pada tahun 2022 masa jabatan kepala daerah telah selesai sehingga akan mengikuti Pilkada serentak pada tahun 2024. Pergantian kepala daerah diikuti dengan penyusunan RPJMD sebagai rujukan pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan.

Proses penyusunan RPJMD telah diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 mengatur tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. TPB menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembangunan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS-RPJMD), diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya menyejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup. KLHS-RPJMD sendiri dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Sejalan dengan hal tersebut, Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 550/5112/Bangda Tanggal 5 Juli 2022 Hal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan KLHS RPJPD, terdapat arahan untuk menganggarkan kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

1.2 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
f. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
g. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
l. Surat Menteri Dalam Negeri No 660/5513/Bangda dan 660/5512/Bangda tentang Kebijakan pembuatan KLHS RPJPD/RPJMD untuk daerah PILSER 2024
m. SK MENLHK 8/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
n. SK MENLHK 1272/2021 tentang Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000
o. SK MENLHK 146/2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Skala 1:250.000

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan *environmental safeguard* bagi pelaksanaan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta melalui RPJMD dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam KRP tersebut sebagai dasar bagi penyusunannya.

b. Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah:
- Memberikan gambaran capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan kondisi lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kondisi dan ketersediaan data terkini.
- Melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan untuk menentukan isu strategis daerah

- Melakukan rumusan alternatif skenario perbaikan kebijakan, rencana dan/atau program
- Menyusun rekomendasi dalam bentuk usulan kebijakan dan program yang selanjutnya diintegrasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta ke dalam rancangan awal RPJMD Provinsi DKI Jakarta.
- Memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini meliputi:

a. Menyusun rencana kerja, daftar kebutuhan data, dan persiapan lainnya untuk menginventarisasi regulasi, data, dan informasi terbaru yang berkaitan dengan penyusunan KLHS RPJMD.
b. Melakukan studi terhadap regulasi, data, dan informasi terbaru yang berkaitan dengan KLHS RPJMD.
c. Melaksanakan koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan terkait penyusunan KLHS RPJMD sampai dengan proses validasi.
d. Melakukan pengkajian pengaruh yang meliputi identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, identifikasi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berdampak terhadap lingkungan hidup, serta analisis pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup.
e. Merumuskan alternatif dan rekomendasi KRP.
f. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS RPJMD serta konsultasi publik.
g. Melakukan pendampingan pada saat proses validasi KLHS RPJMD.
h. Mengadakan rapat, *Focus Group Discussion* (FGD), dan konsultasi publik terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan, koordinasi, komunikasi dan pengumpulan data.

1.5 Metodologi Penyusunan

KLHS penyusunan RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada mulai bulan Mei sampai dengan bulan November 2023, sementara rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD disusun pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa KLHS bersifat *Ex-Ante* yaitu dilakukan sebelum KRP disusun. Hal tersebut berimplikasi pada pendekatan dan pelaksanaan tahapan proses penyusunan KLHS.

PermenLHK No. 69 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (2) menegaskan bahwa penerapan mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS wajib mempertimbangkan jenis, tema, hierarki, dan skala informasi KRP serta prosedur dan mekanisme penyusunan dan/atau evaluasi KRP. Mengingat KRP yang dikaji adalah rancangan RPJMD yang pada dasarnya berada dalam ranah urusan Kementerian Dalam Negeri, maka keseluruhan tahapan penyelenggaraan KLHS RPJMD mengacu pada teknis pelaksanaan sesuai Permendagri No. 7 Tahun 2018. Secara umum, berdasarkan petunjuk teknis penyusunan KLHS RPJMD dari Kementerian Dalam Negeri, tata waktu penyelenggaraan KLHS RPJMD diilustrasikan pada Gambar 1-1 berikut ini.

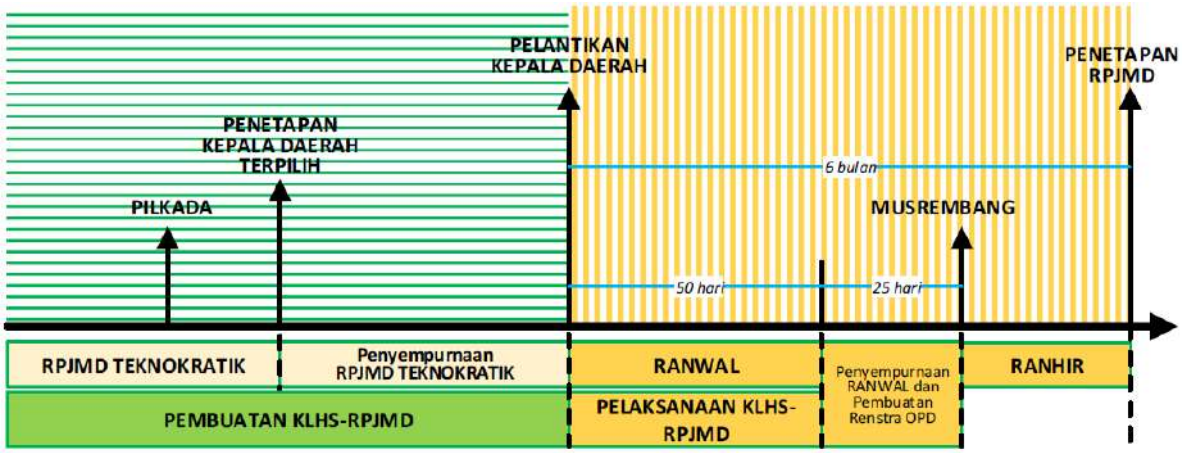

Gambar 1-1. Tata Waktu Pelaksanaan KLHS RPJMD
Sumber: Pedoman Pembuatan KLHS RPJMD, Kemendagri 2023

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa penyusunan KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta berada pada kerangka waktu yang berbeda. KLHS dilakukan terlebih dahulu sebelum disusunnya RPJMD. Sehingga, tata waktu pelaksanaan berbeda dengan Gambar 1-1 di atas. Atas dasar demikian maka tahapan penyelenggaraan KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta diilustrasikan pada Gambar berikut ini.

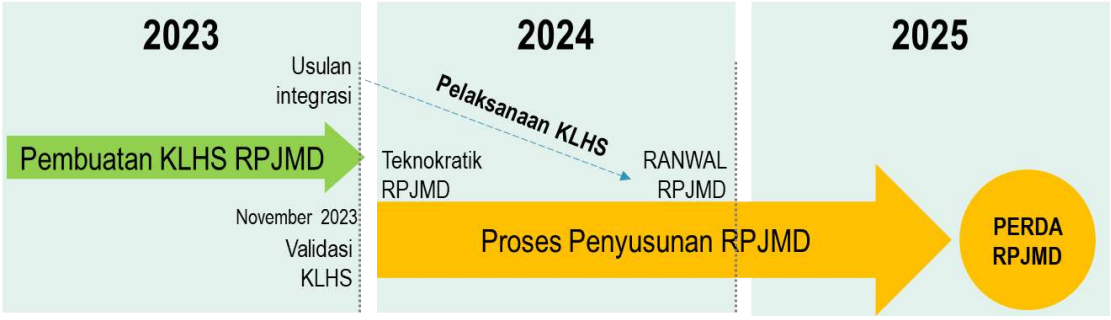

Gambar 1-2 Diagram Alur Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan KLHS terdiri dan tahapan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS. Pembuatan KLHS yang terdiri dari: (1) Pembentukan tim pembuat KLHS; (2) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan; (3) Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan dan (4) Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD. Sementara itu, pelaksanaan KLHS dilakukan dengan mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS ke dalam Rancangan Awal RPJMD. Secara umum, tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS ditunjukkan pada Gambar berikut.

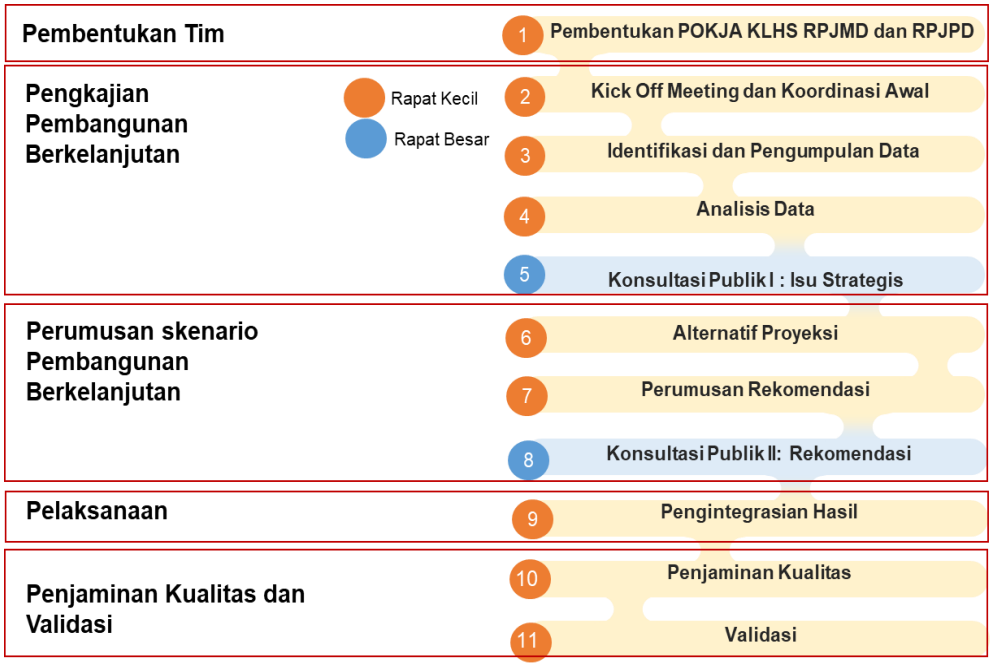

Gambar 1-3. Tahapan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD

Sebagian besar tahapan penyelenggaraan KLHS di atas dilaksanakan dengan pertemuan virtual dan/atau *hybrid*. Hal ini dilakukan untuk mengefisiensikan waktu dan sumber daya yang ada. Namun demikian, tetap berorientasi pada *output* yang diharapkan. Disamping itu, pengayaan kajian juga secara intensif dilakukan melalui beberapa pertemuan luring seperti pada saat penjaringan isu dan konsultasi publik.

KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan sedikitnya melalui 12 (dua belas) rangkaian pertemuan yang telah didokumentasikan secara terpisah dalam Laporan Dokumentasi KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Rangkaian pertemuan tersebut diselenggarakan sebagai wadah pembahasan dan penyepakatan terhadap beberapa pokok tema sebagai berikut.

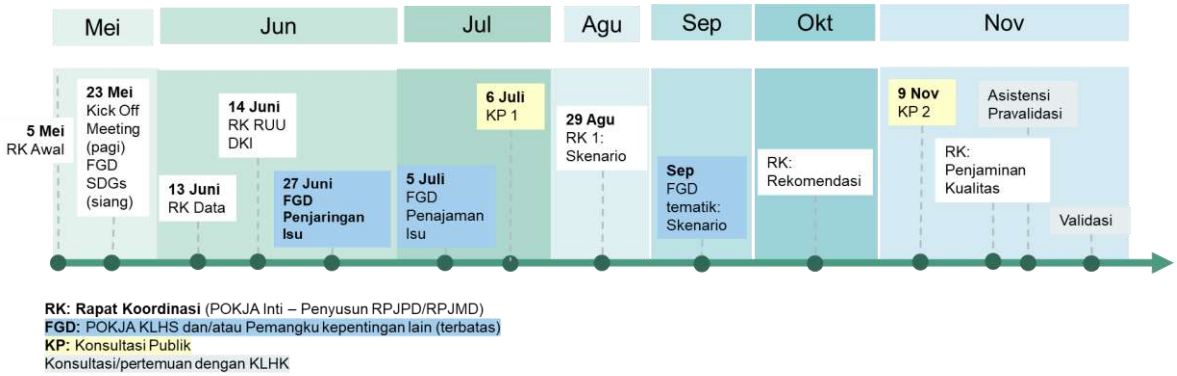

Gambar 1-4. Rencana Kerja Pelaksanaan KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025-2029

1. **Pembentukan Tim Penyusun KLHS**

   Proses pembentukan Tim Penyusun KLHS diawali dengan Rapat Koordinasi Awal (5 Mei 2023) dan *Kick-Off Meeting* (23 Mei 2023). ***Kick-Off Meeting*** merupakan awal ditandainya penyelenggaraan KLHS RPJMD DKI Jakarta telah dimulai. Pertemuan dilaksanakan dengan melibatkan OPD terkait sebagai POKJA KLHS. Melalui pertemuan ini pula dilakukan identifikasi awal kebutuhan data dan pihak-pihak terkait yang perlu dilibatkan dalam penyusunan KLHS. **POKJA KLHS** dibentuk melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 215

Tahun 2023 tentang Tim Pembuat KLHS RPJPD Tahun 2025 – 2045 dan RPJMD Tahun 2025 - 2029 (lihat lampiran 1). Tim tersebut bertugas mendampingi proses penyelenggaraan KLHS sebagai institusi kunci untuk terlibat secara intensif dalam setiap pertemuan persiapan, FGD tematik, dan konsultasi publik.

2. **Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan**

   Proses pengkajian pembangunan berkelanjutan dilaksanakan melalui serangkaian FGD dan rapat koordinasi serta 1 (satu) Konsultasi Publik.

   - **Identifikasi dan Pengumpulan Data**. Identifikasi dan analisis data TPB dilakukan secara iteratif melalui diskusi intensif dengan Sekretariat TPB Provinsi DKI Jakarta dan K/L terkait (Kemendagri, KLHK, Bappenas). Hal tersebut penting dilakukan di awal proses kajian mengingat terdapat berbagai pendekatan dalam menganalisis capaian TPB yang mencakup: penggunaan metadata TPB, penggunaan indikator TPB dalam konteks KLHS RPJMD – jangka menengah dan sinkronisasi data capaian TPB. Serangkaian FGD dalam rangka analisis capaian TPB menyepakati bahwa gambaran capaian TPB menggunakan metadata versi 1 (2018) sesuai dengan Permendagri 7/2018. Pada tahapan ini juga dilakukan FGD untuk membahas posisi DKI Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara.
   - **Analisis Data.** Analisis data dilakukan secara paralel dengan pengumpulan data. Pada tahap awal dilakukan *exercise* metadata versi II, untuk memberikan gambaran TPB apabila digunakan metadata tersebut. Hasil *exercise* dijadikan bahan pembahasan pada FGD dengan Sekretariat TPB Provinsi DKI Jakarta dan K/L terkait (Kemendagri, KLHK, Bappenas). Selain data TPB, analisis juga mencakup profil kondisi lingkungan hidup (6 muatan) dan perencanaan strategis yang relevan yang kesemuanya menjadi dasar dalam menyintesakan isu strategis. Analisis data dalam KLHS mencakup beberapa hal seperti diringkaskan pada tabel berikut:

Tabel 1-1 Pendekatan dalam Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Analisis	Pendekatan
Gambaran Kondisi Lingkungan Hidup	**Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup** Analisis mengenai daya dukung lingkungan hidup fokus pada pemanfaatan fungsi lingkungan hidup yaitu penyedia air. Tahapan penyusunan DDLH air secara umum telah mengacu pada Keputusan MenLHK SK.146/2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Pertimbangan nilai indeks jasa ekosistem sebagai penyedia air dan pangan merupakan dasar analisis DDLH. Perhitungan DDLH dilakukan secara spasial, menggunakan asumsi *close system* dengan memanfaatkan sistem grid sebagai dasar distribusi kebutuhan dan ketersediaan air maupun pangan. **Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup** Dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta dianalisis dan diukur melalui dua media lingkungan yaitu sumber daya alam dan ruang/lahan. Beberapa aspek yang dianalisis adalah tekanan penduduk, potensi beban pencemar sungai dan timbulan sampah **Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan** Parameter yang digunakan untuk melakukan analisis kinerja jasa lingkungan hidup mencakup bentang alam (morfologi), vegetasi, dan penutup lahan mengacu pada informasi spasial yang tersedia di tingkat provinsi. Hubungan ketiga parameter tersebut divisualisasikan secara spasial berdasarkan nilai indeks jasa ekosistem. Jasa ekosistem yang dinilai adalah Jasa Ekosistem Penyedia Air, Pengaturan Air, Pengaturan Bencana Banjir, Pengaturan kualitas Udara. **Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam** Pemanfaatan sumber daya alam dalam kajian ini direpresentasikan dari jasa lingkungan hidup **Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati**

	Potensi keanekaragaman hayati, salah satunya, dapat dinilai dengan mengidentifikasi kawasan dengan nilai konservasi tinggi di DKI Jakarta. **Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim** Analisis tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim menggunakan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) 2021 yang diterbitkan oleh KLHK. Dari gambaran di atas, selanjutnya isu strategis kondisi lingkungan hidup dapat disintesiskan.
Analisis Capaian TPB pada OPD	**Analisis Capaian TPB** Analisis capaian TPB dijadikan dasar untuk mengidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan. Indikator TPB yang dianalisis mengacu metadata nasional Bappenas yang diterbitkan pada tahun 2018 dan telah dilakukan *cascading* kewenangan oleh Kemendagri. Penilaian pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian RAD TPB DKI Jakarta 2018-2022 yang dilakukan setiap tahun. **Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah** Analisis ini dilakukan dengan cara penandaan capaian indikator TPB berdasarkan instansi pelaksananya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui besaran tanggung jawab OPD terhadap pencapaian pilar-pilar TPB serta besaran anggaran dana yang dialokasikan untuk pelaksanaannya. Dari analisis di atas, selanjutnya isu strategis capaian TPB DKI Jakarta dapat disintesiskan.
Perumusan Isu strategis	Perumusan isu strategis dipilih dengan beberapa tahapan proses, yaitu: 1. Identifikasi isu strategis dari 3 (tiga) pertimbangan, meliputi sintesis masing-masing isu strategis berdasarkan kondisi lingkungan hidup (6 muatan KLHS), capaian TPB, dan kerangka kebijakan terkait. 2. Analisis Keterkaitan Isu. Analisis keterkaitan isu dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dari isu-isu yang telah diidentifikasi. Hal ini penting dilakukan untuk melihat isu-isu yang paling berpengaruh. 3. Konsultasi Publik 1 (6 Juli 2023). Hasil sintesis penentuan isu strategis dikonsultasikan kepada publik untuk mendapatkan pengayaan, klarifikasi dan kesepakatan dari pemangku kepentingan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

3. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

- **Skenario Proyeksi**. Analisis proyeksi dilakukan terhadap indikator dalam kerangka kajian. Skenario ini didasarkan pada tahap 1 KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025 – 2045.
- **Rekomendasi.** Hasil analisis KLHS secara keseluruhan dan rumusan arahan kebijakan-program selanjutnya dibahas dalam Konsultasi Publik 2. Konsultasi Publik 2 dimaksudkan untuk menyepakati rumusan arahan kebijakan dan program sebagai rekomendasi KLHS untuk penyempurnaan RPJMD.
- **Integrasi KLHS ke RPJMD**. Integrasi ke dalam Rancangan Awal RPJMD belum dapat dilakukan mengingat KLHS ini merupakan KLHS *ex-ante*. Pada tahap ini, POKJA KLHS memberikan usulan integrasi sebagai bahan bagi penyusun KRP untuk Rancangan Awal RPJMD dan penelaahannya.

4. Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian

- **Penjaminan Kualitas** dilakukan dengan penilaian mandiri oleh Pokja KLHS bersama Penyusun KRP, yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta. FGD Penjaminan Kualitas dilakukan antara POKJA KLHS dan penyusun KRP pada tanggal 16 November 2023.
- **Pendokumentasian.** Keseluruhan proses penyelenggaraan KLHS dirangkum dalam Laporan Dokumentasi KLHS RPJMD DKI Jakarta yang terpisah dari laporan KLHS ini.

5. **Validasi.**
   Pelaksanaan validasi dilakukan secara sekaligus pada tahap akhir terhadap hasil penjaminan kualitas KLHS. Validasi KLHS dilakukan dengan mengirimkan permintaan surat permohonan validasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil validasi dituangkan dalam berita acara validasi untuk kemudian ditindaklanjuti dalam dokumen perbaikan.

1.6 Sistematika Laporan KLHS RPJMD

Sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD dari Kementerian Dalam Negeri, laporan KLHS mengikuti sistematika penulisan sebagai disajikan di bawah.

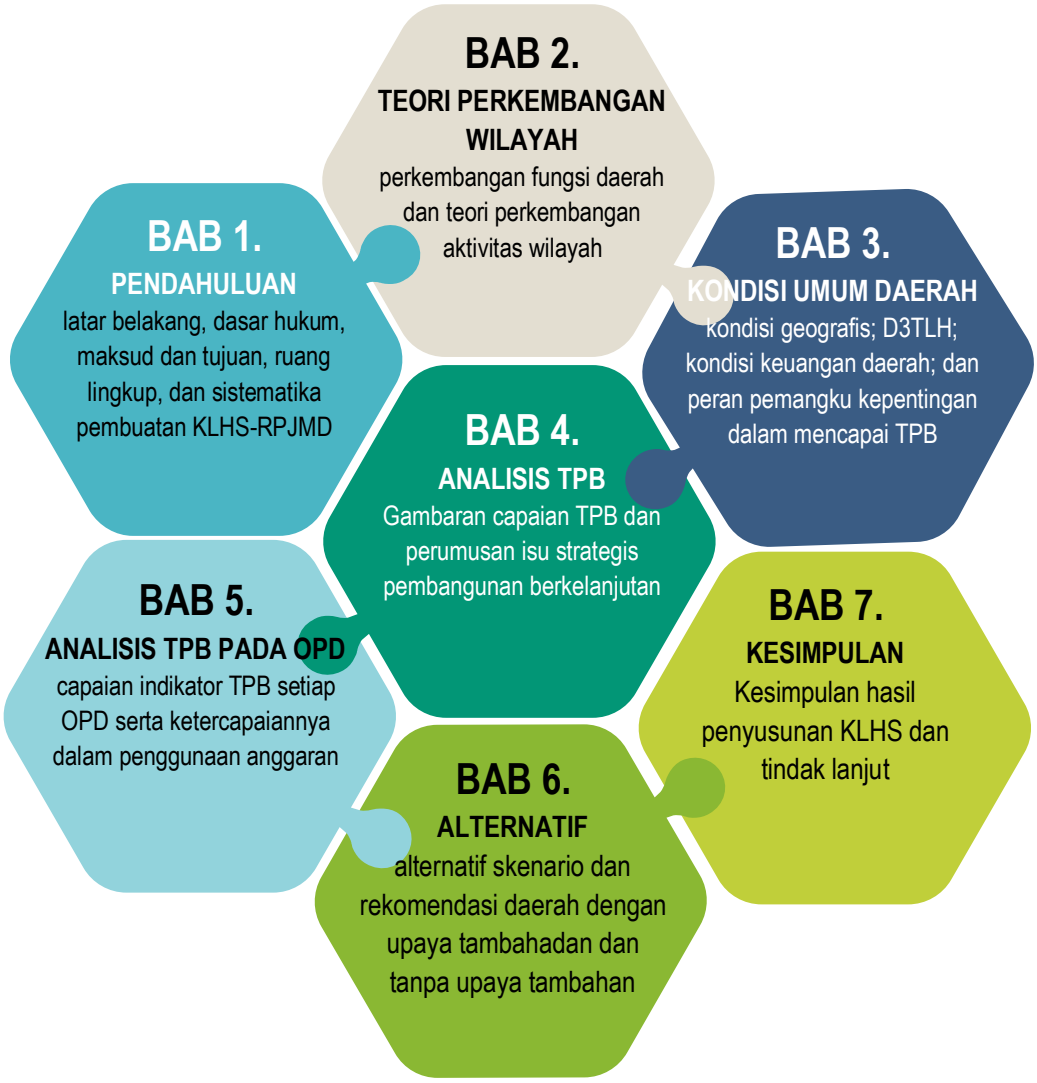

BAB 2

DASAR TEORI

- Periode Pra Kemerdekaan – Tahun 1960
- Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota
- Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta

BAB 2 DASAR TEORI

Perkembangan wilayah Jakarta di awali dari masa kerajaan hingga saat ini. Sejarah panjang perkembangan Jakarta sebagai salah satu pusat perdagangan, transit dan jasa di Pulau Jawa dimulai dari aktifnya Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pusat transportasi logistik. Saat ini Jakarta berkembang menjadi Ibu Kota Negara, kota jasa berskala global dan pusat ekonomi Indonesia. Namun demikian, keputusan pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan UU 3/2022 menjadi salah satu perkembangan signifikan di Jakarta.

2.1 Periode Pra Kemerdekaan – Tahun 1960

Sebelum menjadi ibukota Republik Indonesia, Jakarta telah melampaui masa yang sangat panjang sebagai suatu kota pelabuhan. Pada jaman Kerajaan Taruma Negara di Jawa Barat terdapat suatu kerajaan yang berpusat di Pajajaran dekat Bogor, di teluk Jakarta muara sungai Ciliwung terdapat suatu kota pelabuhan yang Sunda Kelapa. Masa ini berlangsung kira-kira dari abad ke 12 sampai abad ke 16. Kemudian kota pelabuhan ini direbut oleh kerajaan Demak dan dengan perantara Falatehan, diubah namanya menjadi Jayakarta. Masa ini berlangsung dari bagian pertama abad ke 16 sampai awal abad ke I7, kemudian ketika badan dagang Belanda yang bemama Vereenigde Oost Indische Compagnie mulai berdagang di Asia, maka kota pelabuhan ini mereka rebut dan menjadikannya pusat perdagangan VOC dengan nama Batavia. Masa ini berlangsung dari awal abad ke 17 sampai akhir abad ke 18.

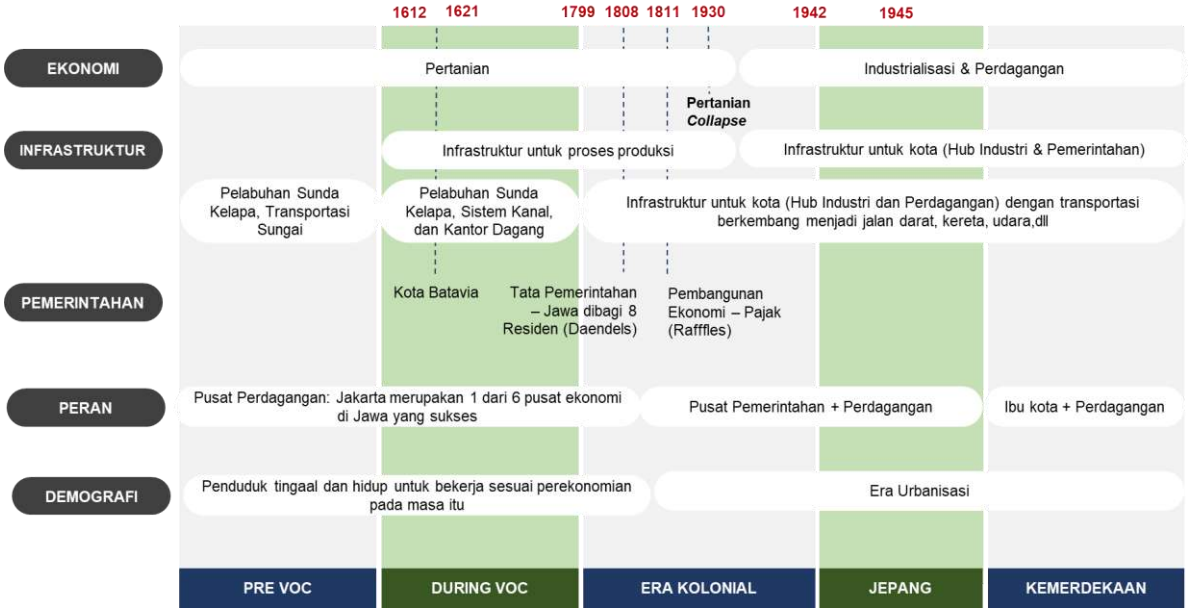

Gambar 2-1 Ilustrasi Perkembangan Kota Jakarta Pra Kemerdekaan
Sumber: Paparan Biro Pemerintahan DKI Jakarta "Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota", 2023

Sejarah Kota Jakarta bermula dari sejarah berdirinya kerajaan yang terletak di daerah Jawa Barat dekat Kota Bogor sekarang, bernama Padjadjaran yang diperintah oleh Sri Baduga Maharaja. Sisi utara Kerajaan Padjadjaran berbatasan dengan Muara Kali Ciliwung yang menjadi letak sebuah bandar bernama Sunda Kelapa yang berfungsi sebagai kota perdagangan. Sebagian besar perdagangan di semenanjung Malaka pada masa itu dikuasai oleh bangsa Portugis, yang selalu berusaha mengembangkan kegiatannya di Asia Tenggara.

Pada awal abad 16, Falatehan yang kemudian lebih dikenal dengan nama Fatahillah, segera menunjuk pembantunya untuk memerintah kota dan mengganti nama Bandar Sunda Kelapa dengan Fathan Mubina atau

Jayakarta, yang berarti “Kemenangan Akhir”. Pada tanggal 22 Juni 1527 dinyatakan sebagai tanggal dikuasainya oleh Falatehan yang pada akhirnya Jayakarta disingkat menjadi “Jakarta“

Pada tanggal 1 April 1905 Stad Batavia berubah dan berkembang menjadi Gemeente Batavia dan diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri sebagai bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. Gemeente Batavia merupakan Pemerintah Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas wilayah Gemeente Batavia kurang lebih 125 km2, tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu).

Pada tahun 1908 wilayah Afdeling Batavia dibagi menjadi 2 distrik, yakni Distrik Batavia dan Weltevreden yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (Onderdistrik). Distrik Batavia terdiri dari sub Distrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priuk sedangkan Distrik Weltevreden terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen, dan Tanah Abang.

Pada tanggal 5 Maret 1942 Kota Batavia jatuh ke tangan bala tentara Jepang dan pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pemerintah Jepang menerbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi satuan-satuan daerah yang disebut Pemerintahan Keresidenan (Syuu). Dimana Keresidenan (Syuu) dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten (Ken) dan Kota (Shi).

Pada masa pendudukan Jepang, Jakarta adalah satu-satunya pemerintahan kota khusus (Tokubetsu Shi) di Indonesia selama pemerintahan militer Jepang. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 setelah kemerdekaan, kedudukan kota Djakarta ditetapkan sebagai daerah Swatantra yang disebut “Kotapradja Djakarta Raya” dengan Walikotanya adalah Soewiryo (1945-1951), Syamsuridjal (1951-1953), dan Soediro (1953-1960).

Jakarta, mempunyai riwayat yang amat panjang sebelum tahun 1950. Riwayatnya sebagai tempat hunian manusia secara garis besar dapatlah ditahapkan sebagai berikut:

1. Tahap pemukiman sederhana di zaman prasejarah;
2. Tahap pemukiman terkoordinasi di zaman masa kerajaan Tarumanagara;
3. Tahap pertumbuhan sebagai kota pusat perdagangan, yang dapat diperinci dalam tahap-tahap:
    - Sunda Kelapa di bawah kedaulatan Pajajaran;
    - Jayakarta yang jadi perebutan;
4. Tahap sebagai kota pusat kekuasaan, yang menuruti perkembangan sebagai:
    - Batavia, pusat kekuasaan kolonialis Belanda;
    - Jakarta, ibukota negara Indonesia yang merdeka, sejak tahun 1950

Hasan Djafar (1987) menyatakan sekurang-kurangnya ada enam buah situs kepurbakalaan prasejarah yang telah dapat dinyatakan sebagai bekas tempat hunian manusia pra-sejarah. Situs-situs itu adalah: Pejaten, Kampungkramat, dan Condet-Balekambang yang ketiganya terletak di daerah aliran sungai Ciliwung; Bu/cit Sangkuriang dan Kelapa Dua yang keduanya terletak di sebelah selatan perbatasan wilayah DKI Jakarta dengan Kabupaten Bogor; dan situs Buni yang terletak di sebelah timur perbatasan wilayah DKI Jakarta dengan Kabupaten Bekasi, di daerah pantai utara dan terletak antara Kali Bekasi dan Kali Cilamaya. H.Th. Verstappen dalam telaah geomorfologisnya mengenai pembentukan garis pantai dan teluk Jakarta, telah memberikan taksiran bahwa dataran "kipas aluvial" yang meliputi wilayah Jabotabek (Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi) terbentuk sekitar 5000 tahun yang lalu· Jenis temuan di situs ini memberikan petunjuk mengenai tahap' perkembangan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Dari kebudayaan perundagian tahap kebudayaan bercocok tanam. Ini semua menunjukkan bahwa wilayah "Jakarta" telah dihuni sekurang- kurangnya sejak 'masa' bercocok tanam, yang diperkirakan berlangsung antara sekitar tahun 3000 dan 1000 Sebelum Masehi (Djafar 1987:14). Dataran aluvial Jabotabek itu telah dihuni manusia tak lama setelah terbentuknya, manusia menempati wilayah karena kesuburan dan kelimpahan aimya.

Munculnya Kerajaan Tarumanagara pada paruh kedua abad kelima Masehi di wilayah Jabotabek ditandai sejumlah inskripsi yang ditemukan di Ciaruteun, Kebon Kopi, Jambu, dan Tugu. Kerajaan ini cakupan wilayahnya bahkan lebih luas ·daripada wilayah Jabotabek sekarang, terbukti inskripsinya ditemukan juga di Cidanghiang (daerah Lebak, Banten). Inskripsi itu dapat dipastikan mewakili satu era yang sama. Memuat tentang: nagara Taruma, raja Pumavannan, dan pemujaan tapak kaki. Pengertian nagara, yaitu "kota", suatu tempat hunian yang berbatas jelas,, biasanya bergerbang dan berpagar, di mana kehidupan lebih canggih, dengan pengkhususan peranan yang lebih kentara, apabila dibandingkan dengan hunian "desa"; dapat diduga, bahwa konsep ini tidak hanya dikenal dan disebut, melainkan juga diwujudkan secara nyata di zaman Taruma. Terdapatnya wujud nagara (kota; 'dibedakan dengan nagara, yaitu “berkenaan dengan dimiliki oleh/ bersifat kota") pada masa Taruma itu menunjuk pada kenyataan yang dapat ditafsirkan· di samping nagara yang berkedudukan sebagai pusat (pemerintahan; kebudayaan) terdapat pula sejumlah daerah hunian 'bukan-nagara yang ·berkedudukan sebagai pinggiran. Inilah “desa-desa”, yang dilihat dari sudut perkembangan pemikiran memang bersifat "pinggiran", namun dilihat dari ·sudut perekonomian merupakan penyangga dari kebutuhan pusat.

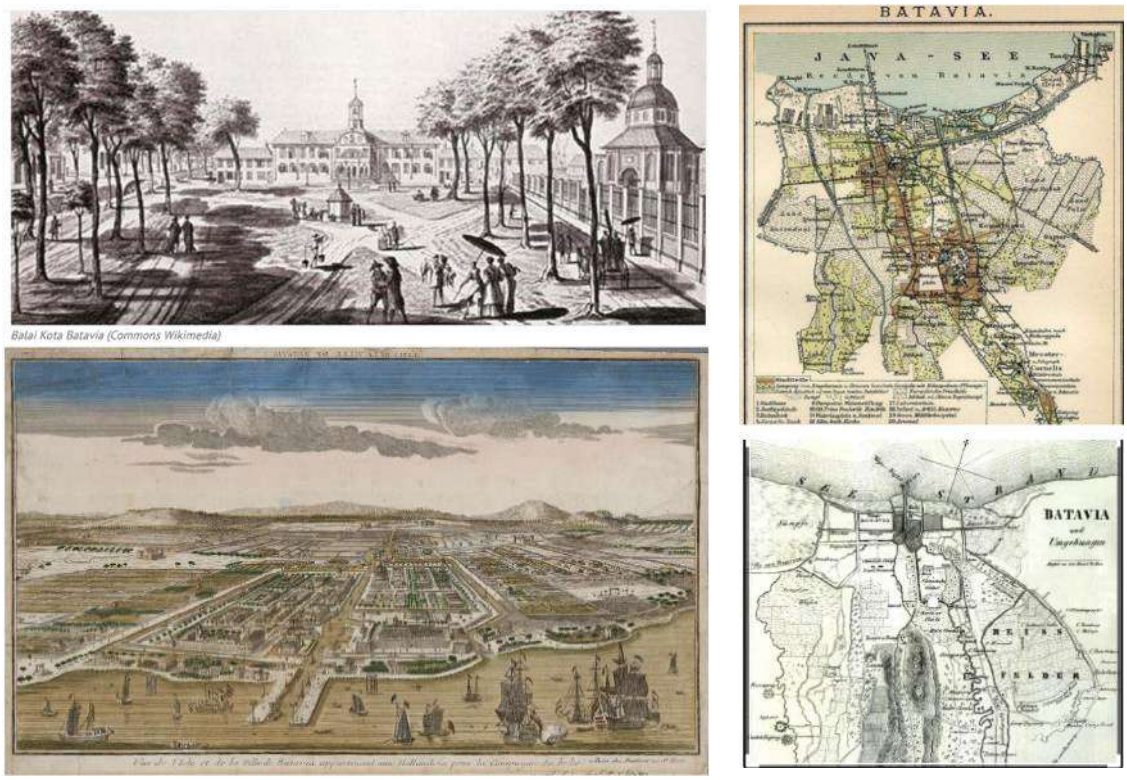

Gambar 2-2 Struktur Kota Batavia
Sumber: https://jhna.org/articles/dutch-batavia-exposing-hierarchy-dutch-colonial-city/

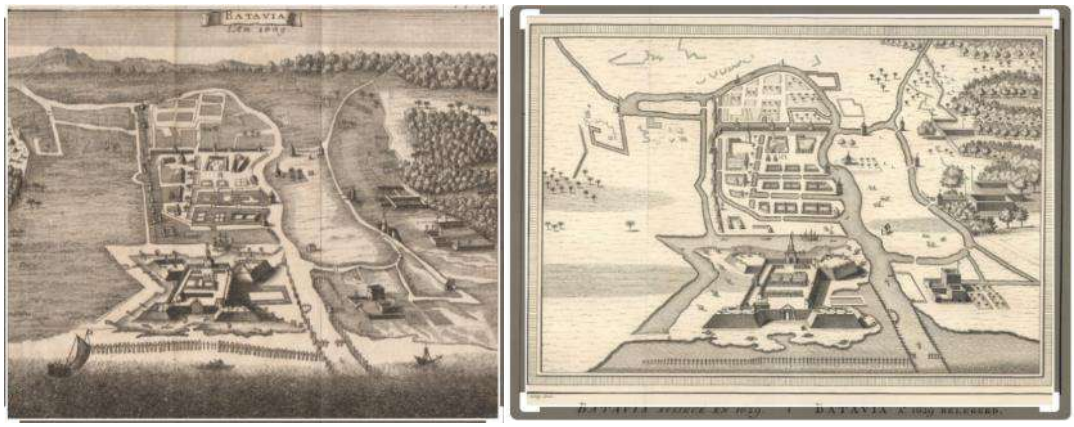

Gambar 2-3 Struktur Kota Batavia

Gambar di atas menunjukkan ilustrasi perkembangan Kota Jakarta dari masa Pra-VOC hingga masa kemerdekaan. Dapat dilihat bahwa dari segi ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, peran, dan secara demografi, Jakarta terus mengalami perubahan.

2.2 Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota

Meskipun sejak kemerdekaan Jakarta telah menjadi Ibukota Negara, secara historis, penamaan Daerah Khusus Ibukota pertama kali tertuang dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 2 Tahun 1961 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang kemudian menjadi UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Presiden Soekarno menyatakan Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga harus memenuhi syarat-syarat minimum sebagai kota internasional sesegera mungkin,

Kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang berpangkat Gubernur pada tanggal 15 Januari 1960. Pada periode Gubernur Soemarno (1960-1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan “Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta Raya. Landasan yuridis berikutnya adalah UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama “Djakarta”. Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta.

Undang-undang ini pun hanya berisi dua pasal yang menegaskan status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota serta masa berlaku surutnya dari 22 Juni 1964, yaitu sejak Presiden Soekarno mengumumkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Penegasan ini diperlukan mengingat Jakarta telah termasyhur dan dikenal, serta merupakan kota pencetusan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Juga pusat penggerak segala kegiatan, serta merupakan kota pemersatu dari pada seluruh aparat, revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh dunia.

Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977). Adapun gubernur selanjutnya berturut-turut yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987), Wiyogo Atmodarminto (1987-1992), Soerjadi Soerdirdja (1992-1997), Sutiyoso (1997-2007), Fauzi Bowo (2007-2012), Joko Widodo (2012-2014), Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017), dan Djarot Saiful Hidayat (2017), Anies Baswedan (2017-2022) dan Heru Budi Hartono (2022 – sekarang).

Pada masa **Gubernur Ali Sadikin**, perkembangan DKI Jakarta sudah sangat pesat, kegiatan -kegiatan industri dan perdagangan telah menimbulkan tekanan penduduk yang makin berat serta menimbulkan berbagai masalah perkotaan, sementara sebagai ibukota Negara, DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi cerminan peri kehidupan

bangsa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dikeluarkan kebijakan berupa Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 1976 tentang pengembangan wilayah Jabodetabek. Kebijaksanaan pembangunan daerah sekeliling Jakarta sebagai kesatuan JABOTABEK antara lain untuk mengembangkan pemukiman serta pengembangan kesempatan kerja yang lebih merata, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan penduduk di Jakarta. Wilayah Jabotabek meliputi wilayah Daerah Khusus Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kotamadya Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi tanpa perubahan dalam status masing-masing daerah dan dalam hak serta kewajiban masing-masing Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Upaya yang dilakukan adalah dengan penyerasian pengembangan wilayahnya.

Meskipun keterpaduan arahan pengembangan Jabodetabek sudah dilakukan sejak tahun 1976, Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur baru ditetapkan pada 2008 yaitu dengan terbitnya Peraturan Presiden No 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Peraturan Presiden 54/2008 ditetapkan setelah adanya Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur adanya PKN Jabodetabek dan KSN Metropolitan Jabodetabekjur. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tersebut kemudian dicabut dan direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2020.

Pada periode **Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit UU Nomor 11 Tahun 1990** tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur Surjadi Soedirdja (1992 – 1997). Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2007) terbit Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dan pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak itu sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya pada **periode Gubernur Fauzi Bowo (2007-2012)**, implementasi Undang- undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pembentukan deputi selaku pejabat yang membantu gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.1 Pendekatan Pengembangan ruang

Perencanaan ruang wilayah DKI Jakarta 2029 pada prinsipnya akan menggabungkan pendekatan sistem dinamis atau perencanaan komprehensif dengan pendekatan perencanaan strategis sekaligus. Pendekatan sistem dinamis terutama dilakukan untuk tahapan analisis, sehingga tidak ada aspek pertimbangan perencanaan yang tertinggal. Sementara itu, pendekatan strategis terutama dilakukan pada keluaran/*output* strategi, kebijakan, dan pengembangan indikasi program, sehingga lebih dapat dijaga fokus pembangunan dan penataan ruangnya ke depan. Oleh karenanya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan campuran atau yang sering dikenal dengan "*mixed approach*", atau yang dahulu sering disebut sebagai "*mixed scanning*". Selain itu, pendekatan penyeimbangan (optimasi, sinergi, dan minimasi konflik) juga dilakukan, khususnya penyeimbangan antara aspek fisik/lingkungan/daya dukung lingkungan dengan aspek ekonomi perkotaan, dan aspek sosial-budaya perkotaan, sehingga diperoleh model penataan ruang yang berkelanjutan.

Pendekatan sistem dinamis dilakukan dengan penyederhanaan sistem kota/perkotaan sebagai ekosistem manusia seperti yang dikembangkan Machlis, et al (2002) seperti terlihat pada gambar berikut.

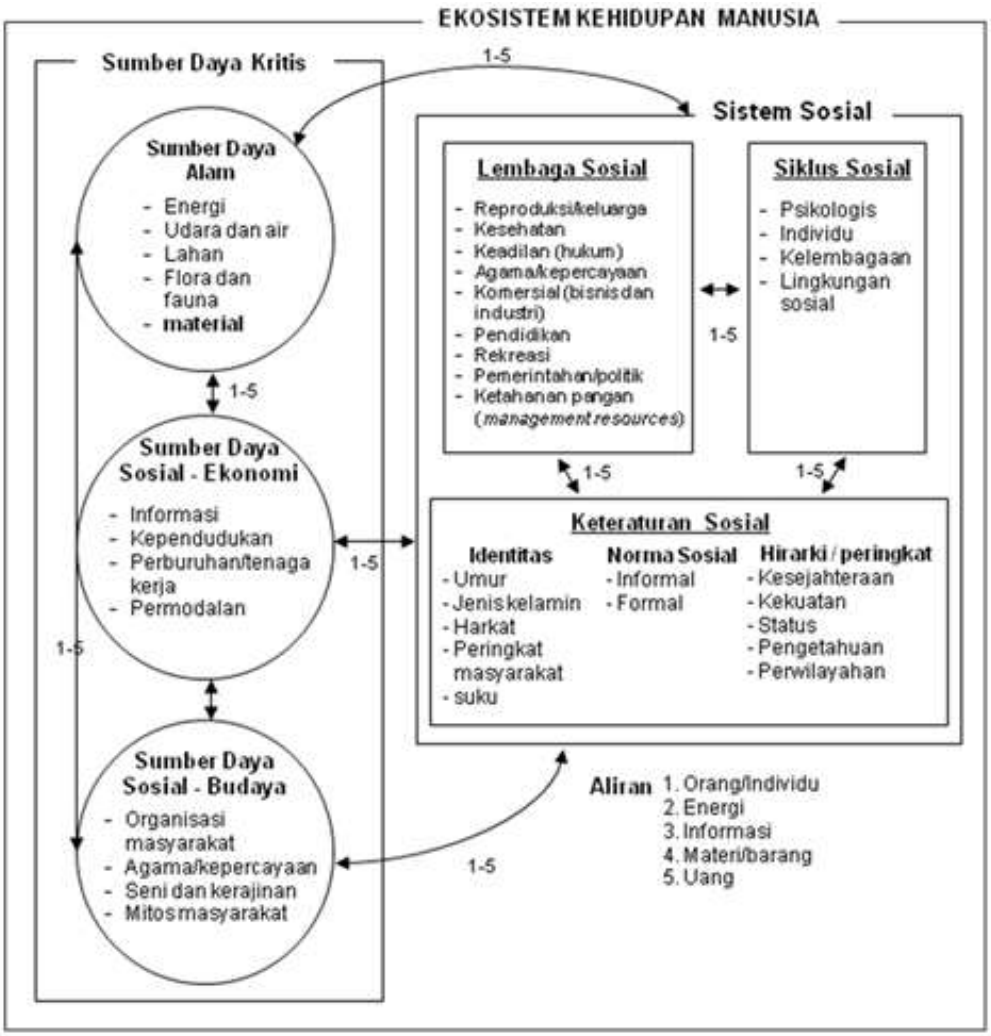

Gambar 2-4 Model Perkotaan Sebagai Ekosistem Manusia
Sumber: The Structure of Human Ecosystems, Machlis et al (2002)

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa DKI Jakarta sebagai suatu sistem sosial akan sangat dipengaruhi dan mempengaruhi tiga kelompok utama sumber daya kritis yang dipunyainya, yaitu: sumber daya alam (termasuk ruang), sumber daya sosial-ekonomi, dan sumber daya sosial-budaya. Masing-masing komponen dari ekosistem manusia tersebut satu dengan lainnya berhubungan melalui 5 (lima) macam jenis aliran: individu manusia, energi, informasi, barang/materi, dan uang. Oleh karena itu, menata ruang suatu kota/perkotaan seperti DKI Jakarta pada prinsipnya menata kelima jenis aliran tersebut secara seimbang, selaras, efektif dan efisien khususnya dalam pengaturan alokasi dan distribusi ruangnya secara makro.

Bagaimana sumber daya alam tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan berbagai aspek sistem sosial yang terwujud sebagai lingkungan spasial/ruang yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan utama untuk pengembangan sistem rekayasa investasi kota yang tepat dalam bentuk investasi publik (seperti ruang terbuka hijau, infrastruktur publik, sarana publik, dan lain-lain) maupun dalam bentuk investasi swasta (seperti industri, perdagangan, jasa, dan lain-lain). Pengembangan Sistem Rekayasa Investasi tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan manajemen sektor publik yang akan dikembangkan sesuai kebutuhan di masa mendatang sehingga diperoleh Rencana Tata Ruang Wilayah yang akan dapat dilaksanakan dan dikendalikan dengan mudah nantinya.

Dalam konteks pembangunan dan penataan ruang di DKI Jakarta, maka pendekatan pembangunan konvensional seperti apa adanya sudah tidak dapat diterapkan lagi. Hal ini mengingat bahwa sumber daya kritis alam sudah

tidak tersedia lagi. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang harus digunakan ke depan adalah "manajemen pembangunan" (*Growth Management*). Dalam konteks pengelolaan pembangunan, maka basis perencanaan fungsionalnya harus lebih luas dari sekedar batas administrasi wilayah DKI Jakarta, sehingga untuk kasus DKI Jakarta ini basis perencanaan fungsionalnya adalah Metropolitan Jabodetabekpunjur, dan/atau sampai ke Megalopolitan Jakarta-Bandung.

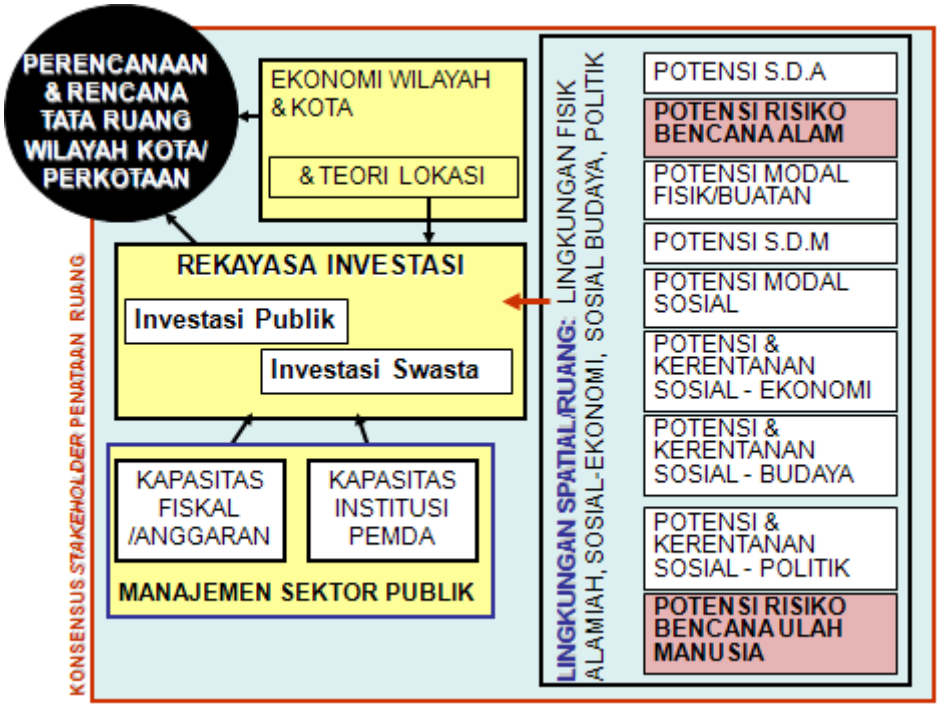

Gambar 2-5 Model Perencanaan Tata Ruang Kota Berbasis Perimbangan Rekayasa Investasi

Beberapa hal berikut ini adalah prinsip utama dalam manajemen pertumbuhan:

- Keinginan untuk secara rasional mengakomodasi dampak dari pertumbuhan
- Merupakan konsep komprehensif/menyeluruh, bukan hanya dampak fisik tetapi juga dampak ekonomi dan sosial
- Pemerintah mengambil peran utama dalam membentuk kerangka kerja yang terpadu
- Sektor dunia usaha, masyarakat, dan kelompok-kelompok kepentingan tertentu juga mempunyai peran yang penting
- Merujuk kepada teknik pengaturan perundang-undangan
- Fokus pada 'pembatasan' pertumbuhan, mengarahkan/ menyalurkannya, atau mengelola dampaknya.

Kemudian dalam konteks manajemen pertumbuhan itu juga, peran penting seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan ruang di DKI Jakarta harus dapat ditingkatkan menjadi pihak-pihak yang berkontribusi positif dalam penataan ruang. Jadi, harus ada pergeseran dari konsep stakeholders (pemangku kepentingan) kepada shareholders (pemegang saham/kontribusi), semua pihak tidak bisa hanya menyatakan punya kepentingan yang harus diakomodasi secara ruang, tetapi juga berkontribusi aktif memenuhi kepentingan masing-masing tersebut secara bersama-sama secara optimal, sinergi, dan meminimalkan konflik. Sehingga bukan hanya 'hak'-nya yang dituntut, tetapi juga 'kewajiban' yang harus ditunaikan agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal inilah yang akan menjadi dasar/acuan pada saat dilakukan perekayasaan investasi terhadap seluruh kebutuhan ruang untuk pembangunan, mana yang harus ditanggung oleh sektor publik (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah lainnya melalui kerja sama), sektor dunia usaha (skala besar, skala menengah, skala kecil atau UMKM), ataupun oleh masyarakat (orang perorangan, kelompok, badan usaha nir-laba).

2.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Peran Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia memicu perkembangan kota yang sangat pesat di berbagai sektor. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 mengenai RTR Jabodetabekpunjur, Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Dalam hal ini Jakarta berperan sebagai kawasan perkotaan inti. Jakarta sudah berkembang menjadi kawasan yang matang yang mengemban peran sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat perekonomian dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, serta pusat kegiatan bisnis dan perdagangan.

Dalam konstelasi Kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur, DKI Jakarta berfungsi sebagai Kawasan Perkotaan Inti yang menjadi pusat-pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan Kawasan perkotaan di sekitarnya. Dalam Peraturan Presiden tersebut, ditetapkan bahwa DKI Jakarta berfungsi sebagai

a. Pusat pemerintahan dan kawasan diplomatik;
b. Pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
c. Pusat pelayanan pendidikan tinggi;
d. Pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional;
e. Pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional;
f. Pusat kegiatan industri kreatif;
g. Pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
h. Pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
i. Pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
j. Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
k. Pusat kegiatan pariwisata; dan
l. Pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya

Rencana pemindahan ibu kota negara tidak membuat potensi Jakarta memudar. Beberapa fungsi kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 60 tahun 2020 akan tetap melekat pada DKI Jakarta, termasuk hierarki pelayanan yang mencakup skala internasional. Pada pidato kenegaraan bulan Agustus 2019, Presiden Ir. H. Joko Widodo bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyampaikan bahwa Jakarta tetap menjadi prioritas pembangunan dan akan dikembangkan sebagai pusat aktivitas bisnis dan keuangan dengan skala regional dan global. Kepala Bappenas RI juga mengatakan bahwa kedepannya akan menempatkan Jakarta sebagai daerah pusat perekonomian yang dapat bersaing dengan kota-kota di ASEAN.

Menjadi IKN sekaligus kota bisnis selama puluhan tahun menyebabkan besarnya kontribusi Provinsi DKI Jakarta bagi perekonomian Indonesia sebesar berturut-turut dari tahun 2018 – 2022 sebesar 17.3%, 17,6%, 17,6% 17,2% dan 16,6% (BPS, 2023). Jakarta merupakan destinasi investasi utama Indonesia dengan menarik Rp. 95.6 T investasi (15.9% total nasional) dari dalam dan luar negeri hingga triwulan III tahun 2019 (BKPM, 2019). Di tahun 2018, sebesar US$ 4.85 miliar dari total US$ 29 miliar penanaman modal asing ke Indonesia, atau sekitar 16.6% dari nilai nasional mengalir ke Jakarta, menempatkan Jakarta menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar kedua di Indonesia. Capaian ini diperkirakan akan tetap berkembang meskipun sudah tidak berfungsi sebagai IKN.

Selain aktivitas bisnis berskala nasional dan internasional, usaha mikro dan kecil juga memiliki peran yang besar yang mendominasi jumlah kegiatan ekonomi di Jakarta. UMKM membuka peluang penyerapan tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh UKM di DKI Jakarta selama kurun waktu 2012 hingga 2016 tercatat sebesar 93,46%.

Aktivitas perekonomian yang tinggi tersebut didukung oleh usaha penyediaan sarana dan prasarana perkotaan serta jaringan utilitas dan konektivitas di dalam wilayah dan terintegrasi dengan wilayah sekitarnya. Selain

berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga di dalam Jakarta, pengembangan tata ruang juga memiliki titik berat keterpaduan pembangunan dengan kawasan di sekitarnya. Mempertimbangkan pola pergerakan dan aktivitas perkotaan, pengembangan wilayah Jakarta kedepannya akan berorientasi pada penggunaan transportasi umum massal.

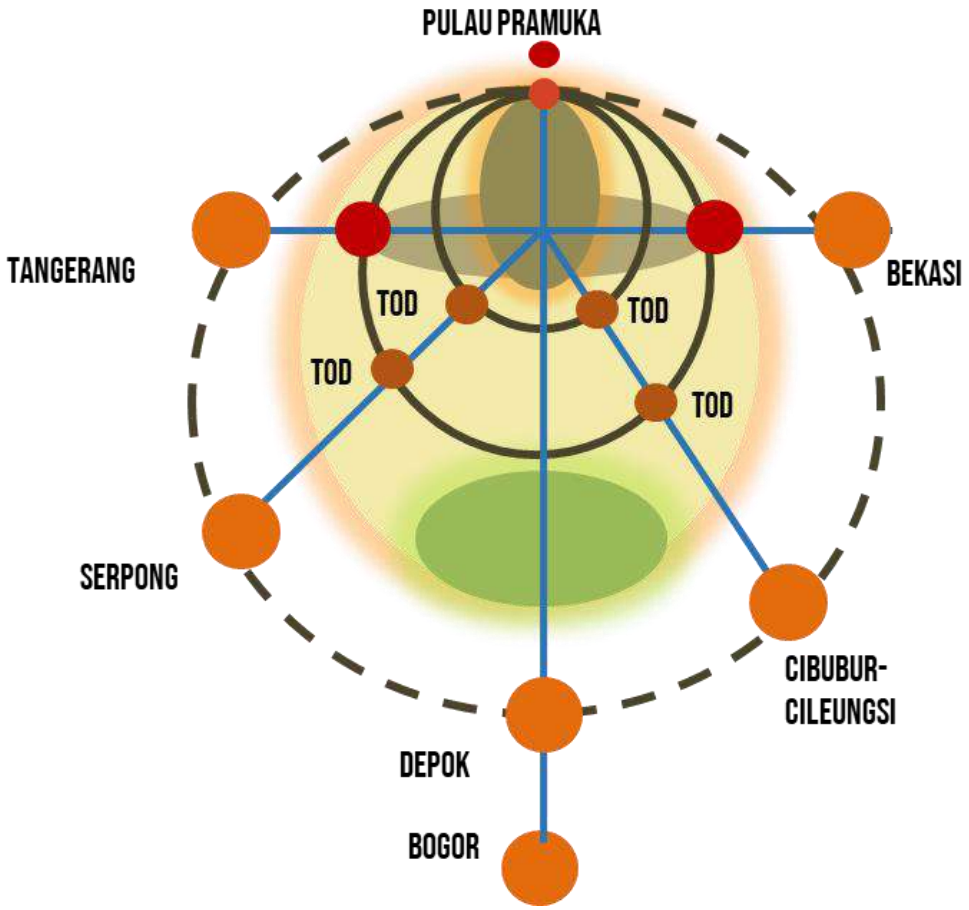

Gambar 2-6 Orientasi Transportasi Massal Jabodetabek-Punjur

Transportasi umum akan menjadi tulang punggung bagi ruang kota Jakarta. Pembangunan kota Jakarta 2029 akan berpihak pada kemudahan perpindahan setiap warganya. BRT Transjakarta serta KRL loopline dan Jabodetabek akan didukung oleh berbagai moda transportasi baru. Jaringan MRT membentang dari utara-selatan menghubungkan daerah pesisir Jakarta dengan perbatasan Tangerang Selatan, dan koridor barat-timur menghubungkan penduduk Jakarta menuju Tangerang sampai Bekasi. Jaringan LRT dibangun untuk membantu pergerakan di dalam pusat kota, maupun luar kota, seperti Cibubur dan Bekasi. Jalur pejalan kaki dan pesepeda disediakan di seluruh jaringan jalan dan di sekitar titik transit transportasi umum untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan. Struktur ruang kota juga dilengkapi dengan jaringan jalan arteri berbentuk radial yaitu *inner ring road, Outer Ring Road*, dan *Outer Ring Road* 2.

Aktivitas perkotaan dipadatkan di tengah pada bagian dalam loopline kereta api, dan dikembangkan melintang ke arah barat dan timur. Namun sentra-sentra baru juga dikembangkan untuk mempermudah setiap warga mencapai kebutuhan hariannya. Kawasan pusat kota direncanakan merupakan kawasan kompak dan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi. Begitupun dengan rumah-rumah warga yang direncanakan berada pada sekitar titik-titik transit di seluruh wilayah kota.

2.3 Jakarta Sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ)

Pada 15 Februari 2022, Pemerintah bersama DPR RI menyepakati terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam undang-undang ini, Pemerintah mendapat amanat untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Dengan adanya undang-undang ini, maka kedudukan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta.

Pemindahan Ibu Kota Negara dirasa perlu dilakukan dikarenakan hingga saat ini kegiatan perekonomian Indonesia terpusat di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu kota Nusantara dengan Keputusan Presiden (Ps. 39 (1)). Dan untuk menjamin keberlangsungan kedudukan, fungsi dan peran Jakarta maka paling lama dalam 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang IKN, maka UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia harus sudah diubah sesuai dengan ketentuan yang baru (Ps. 41 (2)), dalam ketentuan yang baru telah disepakati bahwa tidak dinyatakan sebagai pembentukan daerah otonom baru untuk menjaga kesinambungan badan hukum Jakarta saat ini, sehingga hanya mencabut kata Ibu Kota dari DKI menjadi DK saja. Selain itu juga disepakati bahwa Jakarta diarahkan sebagai *Global City* unggulan nasional dalam bersaing dengan kota global lainnya di dunia.

Gambar 2-7 menunjukkan beberapa gambaran harapan kondisi Jakarta di masa depan dari segi pemerintahan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan, kebudayaan, perhubungan/ transportasi, lingkungan dan keruangan.

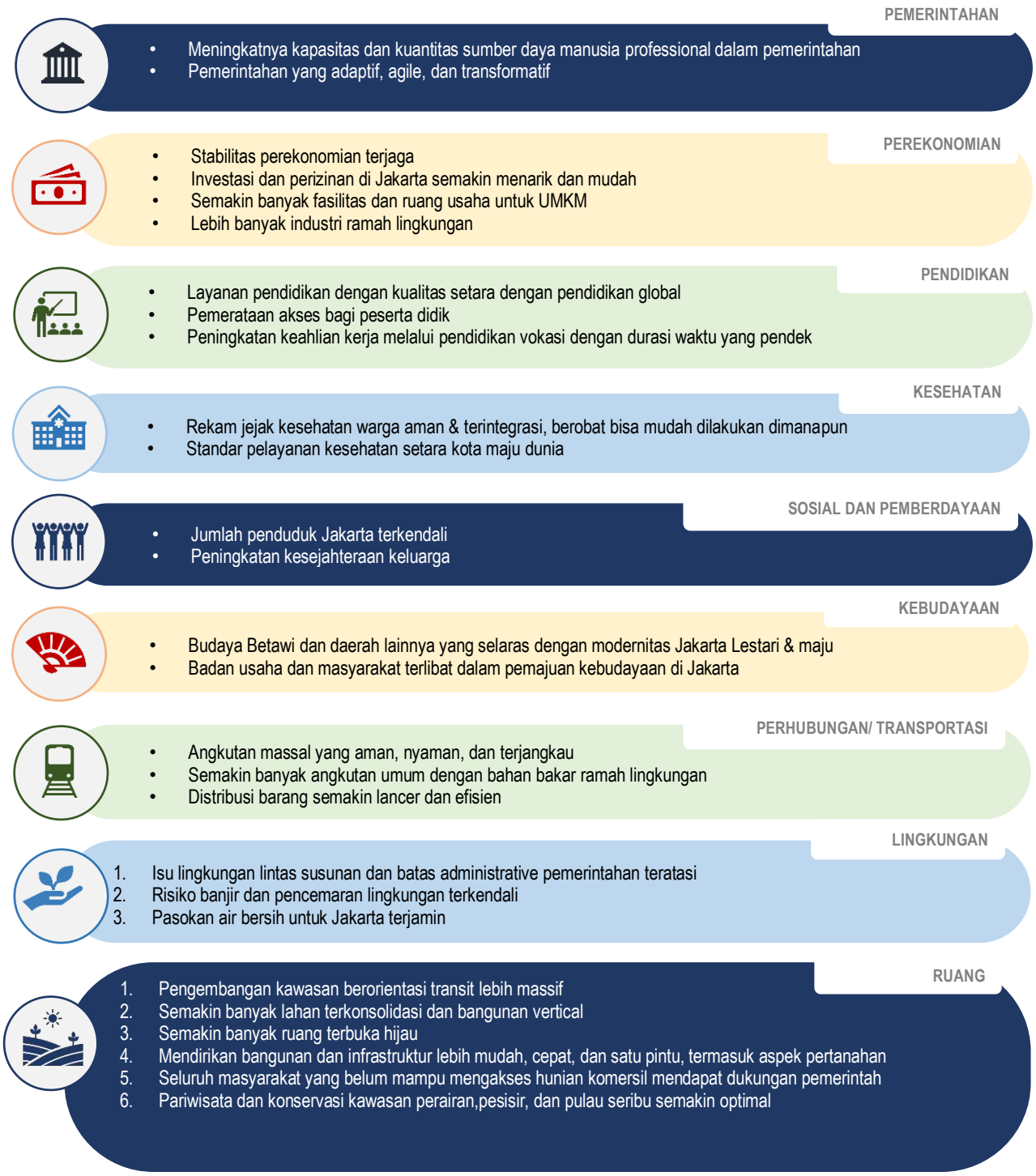

Gambar 2-7 Gambaran Jakarta di Masa Depan

Sumber: Paparan Biro Pemerintahan DKI Jakarta "Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota", 2023

BAB 3

KONDISI UMUM DAERAH

Kondisi Geografis
Kondisi Lingkungan Hidup

Gambaran Keuangan Daerah
Peran Pemangku Kepentingan

BAB 3 KONDISI UMUM DAERAH

3.1 Kondisi Geografis

3.1.1 Wilayah Perencanaan dan Wilayah Fungsional (Wilayah Ekologis)

Wilayah Provinsi DKI Jakarta terbentang antara 106°19‘30“ dan 106°58’18” Bujur Timur, serta antara 5°10‘00“ dan 6°23’54” Lintang Selatan. Provinsi DKI Jakarta memiliki luas daratan sebesar 669,64 km², termasuk sekitar 109 pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan penambahan luas daratan sekitar 7,31 km2 yang berupa lahan hasil reklamasi dan perluasan daratan, serta luas lautan sebesar 6.998 km².

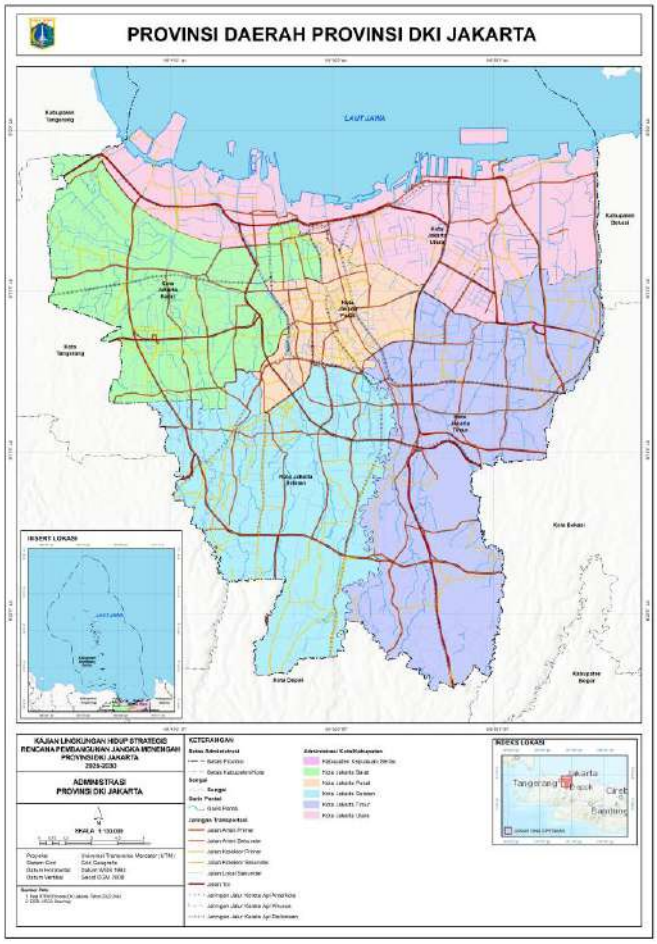

Gambar 3-1. Peta Jakarta (Daratan dan Perairan)

Sumber: RTRW 2020-2022-2042 dan RZWP3K DKI Jakarta

Wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri dibagi dalam lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi, yaitu

- Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Kota Administrasi Jakarta Barat
- Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Kota Administrasi Jakarta Timur
- Kota Administrasi Jakarta Utara
- Kota Administrasi Kepulauan Seribu

dengan luasan sebagai berikut.

Tabel 3-1. Luas Wilayah DKI Jakarta

Kabupaten/ Kota Administrasi	Luas Daratan (km²)
Kepulauan Seribu	8,7
Jakarta Utara	153,97
Jakarta Timur	188,03
Jakarta Pusat	48,13
Jakarta Barat	129,54
Jakarta Selatan	141,27
Total	**669,64**

Sumber: Keputusan Gubernur DKI Jakarta 171 /2007

Wilayah Fungsional

Wilayah fungsional merupakan konsep yang berhubungan dengan cara kita memahami dan mengelompokkan area geografis berdasarkan fungsi atau karakteristik tertentu. Wilayah fungsional dapat meliputi area geografis di mana terdapat interaksi dan keterkaitan yang kuat dalam hal fungsi atau aktivitas tertentu. Wilayah ini dapat terbentuk berdasarkan hubungan ekonomi, sosial, atau fungsional lainnya yang melintasi batas-batas administratif tradisional.

Wilayah fungsional ditentukan berdasarkan batas ekologis dan batas sosial. Batas ekologis merujuk pada batasan-batasan alami atau lingkungan yang mempengaruhi atau membatasi distribusi dan kelangsungan suatu ekosistem atau spesies tertentu. Batas ekologis menandai titik di mana lingkungan fisik atau biologis berubah dan dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem, distribusi organisme, serta interaksi antara spesies dan lingkungan. Batas ekologis dapat berkaitan dengan berbagai faktor, seperti iklim, pengaturan air, topografi, tanah, ketersediaan sumber daya, interaksi antara organisme dan lain-lain.

Sementara itu, batas sosial merujuk pada batasan-batas yang ada dalam interaksi sosial dan hubungan antara individu, kelompok, atau masyarakat dalam suatu lingkungan atau konteks tertentu. Batas sosial dapat bersifat fisik, psikologis, atau budaya, dan memainkan peran penting dalam membentuk norma, nilai-nilai, dan pola interaksi sosial.

Penentuan wilayah fungsional di DKI Jakarta merujuk pada batas ekologis yaitu **Wilayah Sungai, DAS, CAT, Ekoregion dan WPP 712** di wilayah administrasi DKI Jakarta dan batas sosial yang terkait dengan Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi JABODETABEKPUNJUR.

Wilayah sungai menekankan pada pendekatan kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai. Penetapan wilayah sungai di Indonesia adalah menjadi dasar untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air yang baik guna mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya air. Berdasarkan system wilayah sungai, DKI Jakarta masuk ke dalam wilayah sungai (WS) Ciliwung-Cisadane yang terbagi dalam dua *Water District* (WD) Ciliwung dan WD Cisadane Hulu Bd Pasar Baru. Namun demikian, berkaitan dengan fungsi DKI Jakarta sebagai ibukota, Keputusan Presiden No 12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai mengatur bahwa pengelolaan sumber daya air di:

- Wilayah Sungai Cidanau- Ciujung – Cidurian di Provinsi Banten dan Jawa Barat
- Wilayah Sungai Citarum di Provinsi Jawa Barat

harus tetap menjamin kebutuhan air baku wilayah DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa ke dua WS tersebut juga merupakan bagian dari sistem ekologi penyediaan air baku. Secara spasial WS yang dipertimbangkan dalam wilayah fungsional dapat dilihat pada Gambar 3.2.

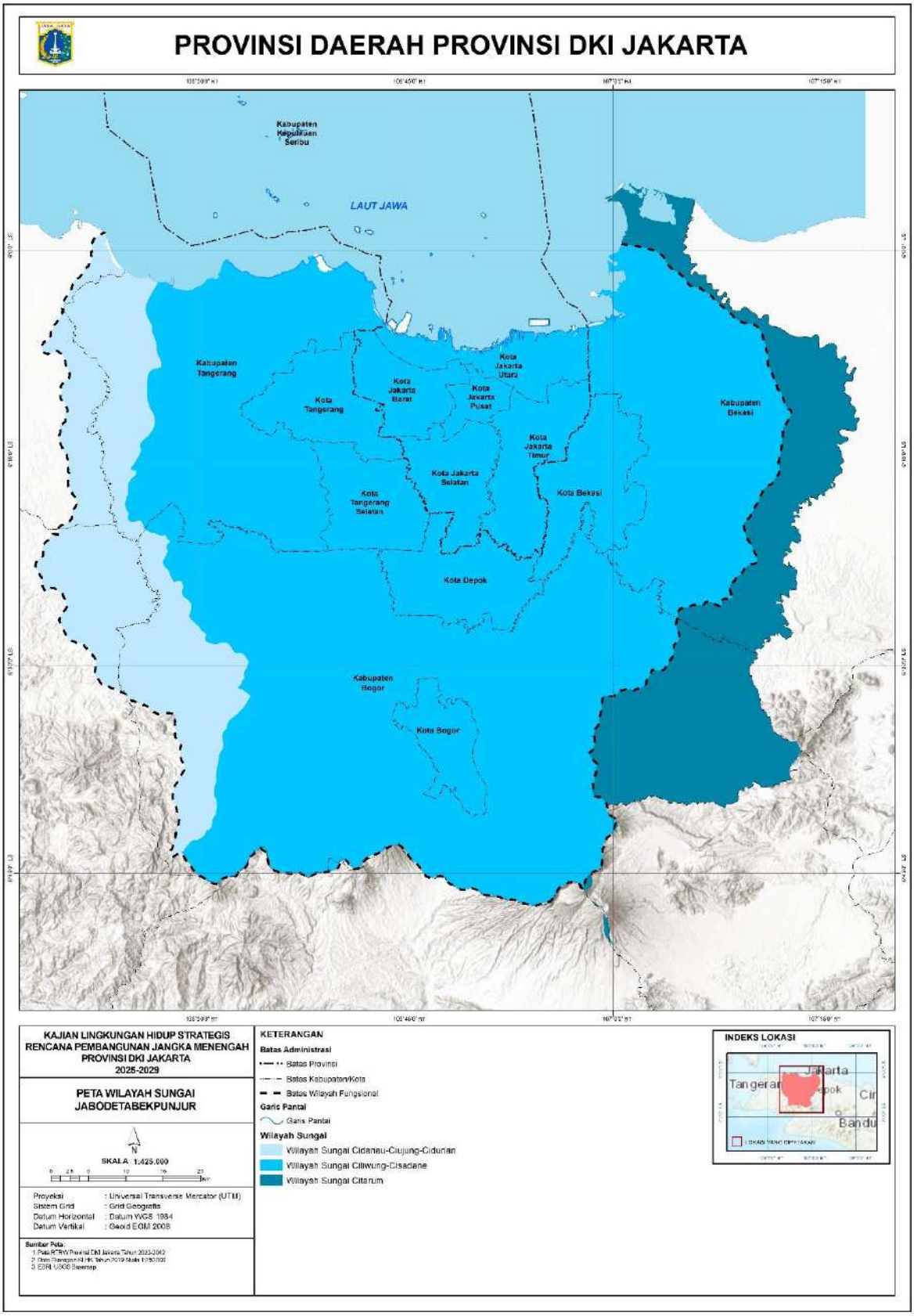

Gambar 3-2. Batas Wilayah Sungai JABODETABEKPUNJUR
Sumber: Kementerian PUPR dan Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan peta Wilayah Sungai tersebut, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang secara langsung berkaitan dengan sistem hidrologi dengan DKI Jakarta adalah 6 DAS yaitu Kali Angke Pesanggrahan, Kali Krukut, Ciliwung, Kali

Sunter, Kali Buaran dan Kali Cakung. Keenam DAS tersebut bermuara di DKI Jakarta atau dengan kata lain wilayah DKI Jakarta merupakan bagian hilir dari ke enam DAS tersebut. Secara spesifik keenam DAS ini akan memberikan pengaruh kepada dan sebaliknya dipengaruhi oleh aktivitas dan kegiatan di wilayah DKI Jakarta terutama terkait dengan bencana hidrologi seperti banjir dan atau kekeringan maupun daya dukung dan daya tampung sumber daya air. Gambar 3.3. menunjukkan batas sistem hidrologi DAS.

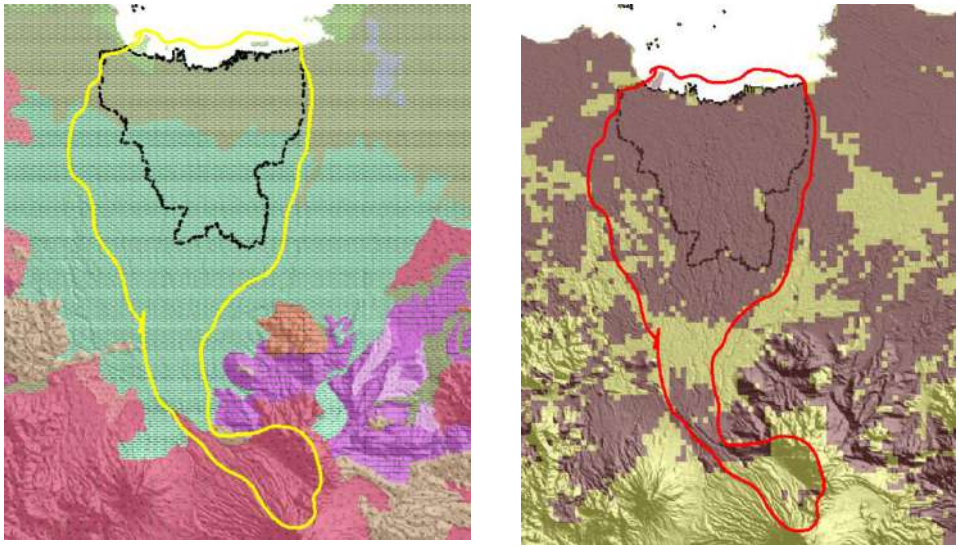

Gambar 3-3. Wilayah Fungsional DKI Jakarta berdasarkan Batas Sistem Hidrologi DAS
Sumber: KLHK

Untuk wilayah ekoregion, wilayah DKI Jakarta masuk kedalam 6 kelas ekoregion yang akan sangat berpengaruh dalam menentukan kinerja jasa lingkungan dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk wilayah perairan laut, DKI Jakarta masuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712, yang memiliki potensi perikanan tinggi serta habitat karang dan lamun yang cukup luas. Sehingga dalam penentuan wilayah fungsional perlu mempertimbangkan WPP 712 sebagai wilayah perairan provinsi DKI Jakarta.

Dalam sistem perkotaan Nasional sebagaimana diatur dalam PP 26 tahun 2008 jo PP 13 tahun 2017 tentang RTRWN, wilayah DKI Jakarta bersama dengan wilayah sekitarnya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi). Selain itu, berdasarkan PP 13 tahun 2017, wilayah DKI Jakarta juga termasuk salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari kepentingan ekonomi yaitu KSN Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu. Rencana Tata Ruang (RTR) KSN JABODETABEKPUNJUR yang berlaku saat ini adalah Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Sebagai suatu sistem perkotaan, wilayah perencanaan sesuai lingkup RTR KSN JABODETABEKPUNJUR akan sangat mempengaruhi perencanaan tata ruang DKI Jakarta, baik secara wilayah perencanaan, konektivitas antar wilayah, dan juga kondisi lingkungan hidup. Lingkup wilayah perencanaan KSN Jabodetabekpunjur berdasarkan PP 13 tahun 2017 memiliki kesamaan dengan batas wilayah sungai Gambar 3.2.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam kajian ini digunakan wilayah fungsional yang terdiri dari 7 administrasi kota dan 5 kabupaten di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, seperti dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

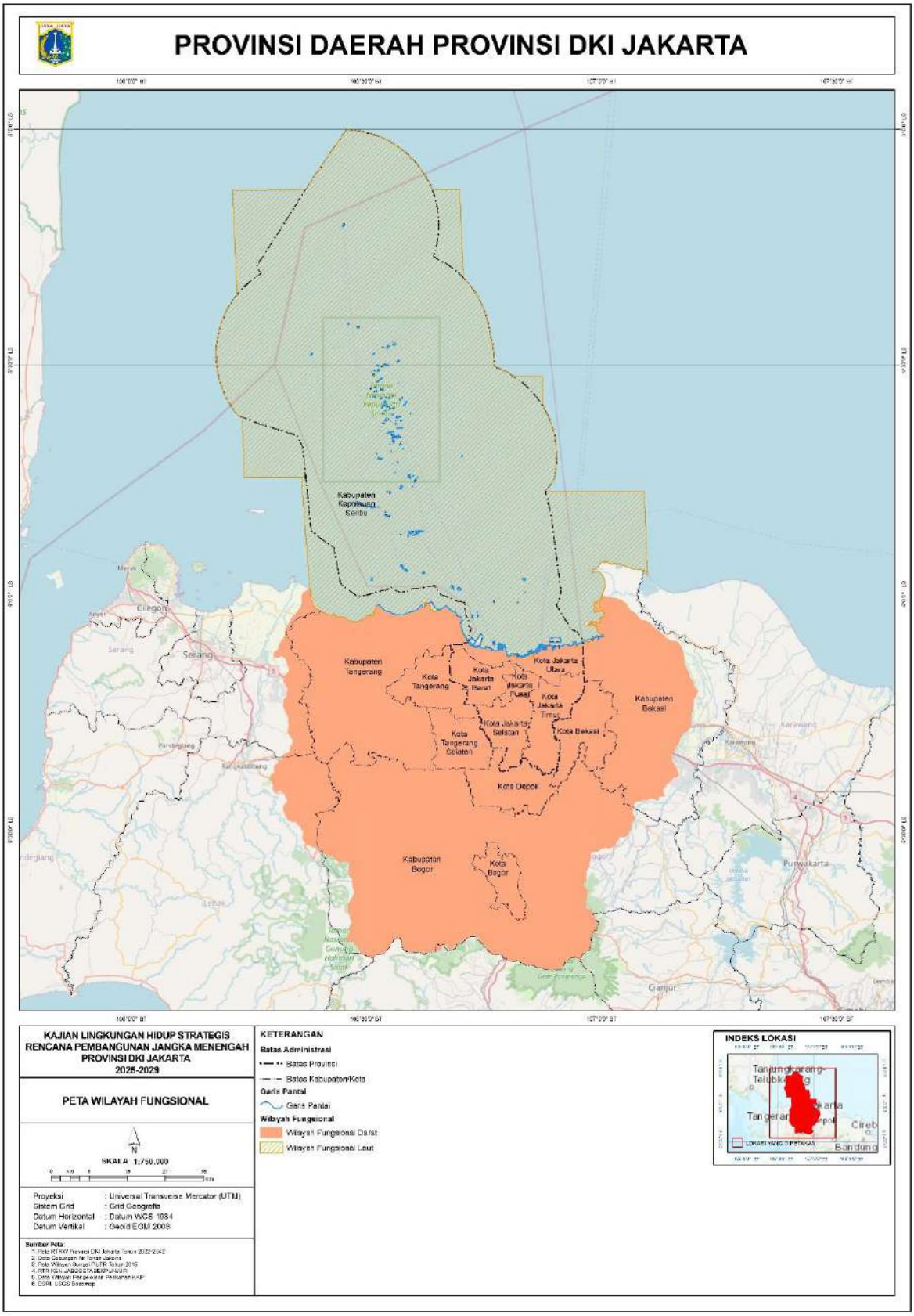

Gambar 3-4. Wilayah Fungsional DKI Jakarta
Sumber: Hasil Analisis, 2022

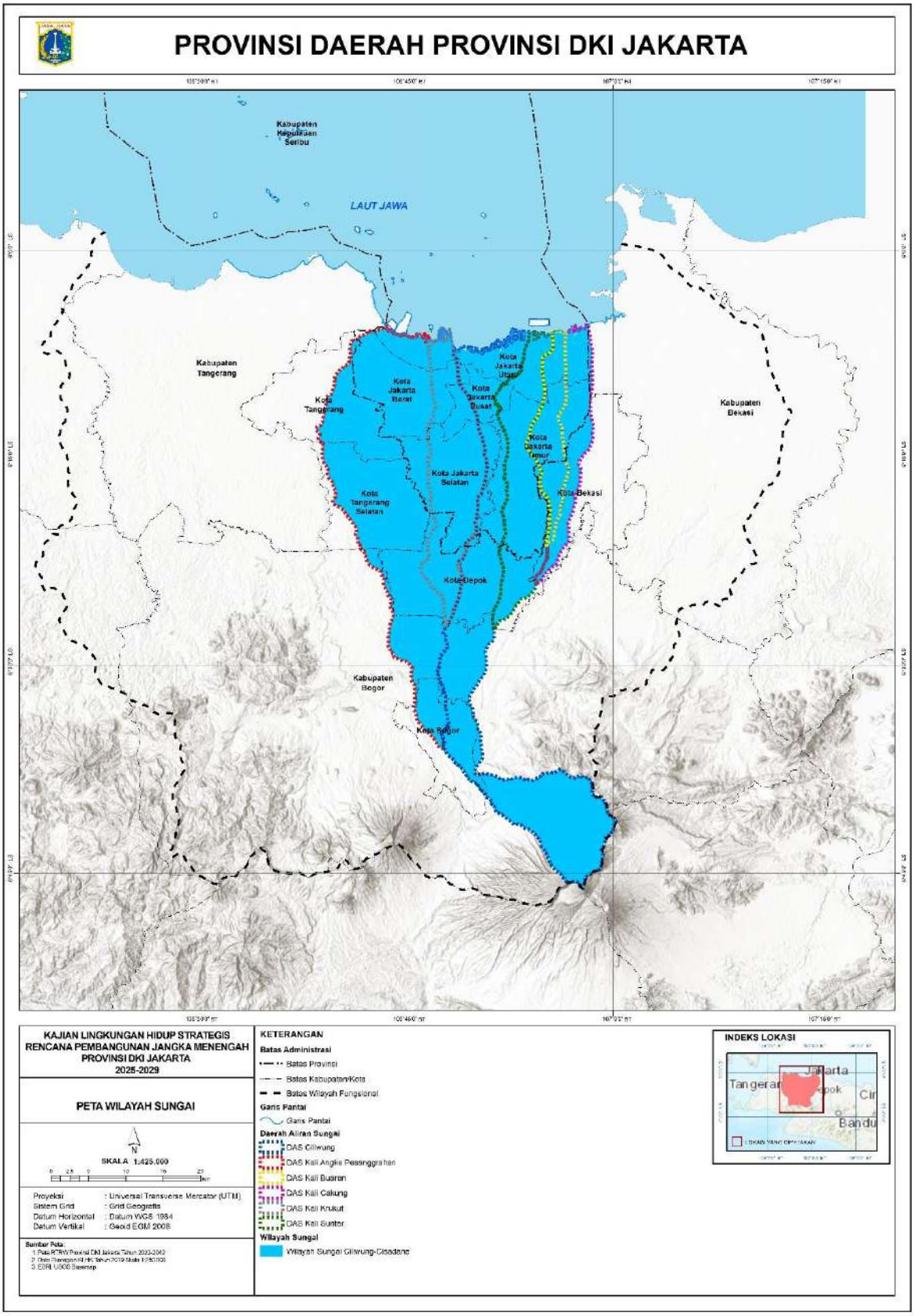

Gambar 3-5. Daerah Aliran Sungai Pada Wilayah Daerah Aliran Sungai

Sumber: Kementrian PUPR (Wilayah Sungai) dan Kementrian LHK (Daerah Aliran Sungai)

3.1.2 Karakteristik Wilayah

3.1.2.1 Karakteristik Biogeofisik Lingkungan

***Ekoregion* Darat**

Mengacu pada UU No. 32/2009, ekoregion didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. UU No. 32/2009 secara eksplisit mengamanatkan pentingnya pendekatan batas ekoregion sebagai asas dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, UU No. 26/2007 juga menegaskan pentingnya penggunaan ekoregion sebagai dasar perencanaan tata ruang wilayah.

Ekoregion ditetapkan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup (Pasal 7 ayat 2, UU No. 32/2009). Dalam hal ini, ekoregion dipahami sebagai konsep unit karakter lahan yang berperan sebagai penciri sifat dan potensi lahan serta sebagai pembatas dalam pengelolaan lahan.

Mengacu pada SK Menteri LHK Nomor 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Wilayah Indonesia dan SK Menteri LHK Nomor 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1:250.000, Pada wilayah fungsional terdapat 35 kelas ekoregion, dengan 19 kelas bentang lahan.

Pada wilayah fungsional terdapat ekoregion dataran fluvio vulkanik yang dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan sebagai peresapan untuk mengurangi laju aliran air dari hulu ke hilir. Dengan memiliki ekoregion tersebut secara fungsi alami, wilayah fungsional DKI Jakarta memiliki kemampuan yang tinggi terhadap pengaturan air dari hulu hingga ke hilir. Namun, saat ini dengan berkembangnya jumlah penduduk dan perkotaan terutama wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, menyebabkan bentang lahan tersebut dialihfungsikan untuk pemanfaatan lahan terbangun yang berdampak pada pengurangan kinerja jasa lingkungan hidup. Selain ekoregion dataran fluvio vulkanik, ada 24 kelas ekoregion lain yang terdapat di wilayah fungsional. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 3-2 dan Gambar 3-6.

Tabel 3-2. Ekoregion di DKI Jakarta

Bentang Lahan	Ekoregion
Dataran fluvial bermaterial aluvium	Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi hutan tepian sungai malar hijau
	Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air tawar
	Dataran fluvial bermaterial aluvium bervegetasi terna tepian sungai
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium bervegetasi mangrove
	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium bervegetasi mangrove monsun
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium	Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
	Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air tawar
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa monsun
Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar bervegetasi mangrove
Dataran organik koralian berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat	Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan pamah monsun malar hijau
Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan pamah monsun malar hijau
Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	Dataran vulkanik bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah monsun merangas
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar bervegetasi terna rawa air tawar
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik bervegetasi hutan pamah monsun merangas
Lembah sungai bermaterial aluvium	Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
	Lembah sungai bermaterial aluvium bervegetasi terna rawa air tawar
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)

Bentang Lahan	Ekoregion
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan atas
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan batugamping pamah
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan atas
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan subalpin
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan atas
	Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
	Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi hutan pegunungan bawah
	Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik bervegetasi terna rawa air tawar
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat bervegetasi hutan batugamping pamah
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam bervegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)

Sumber: SK MENLHK Nomor 1272 Tahun 2021

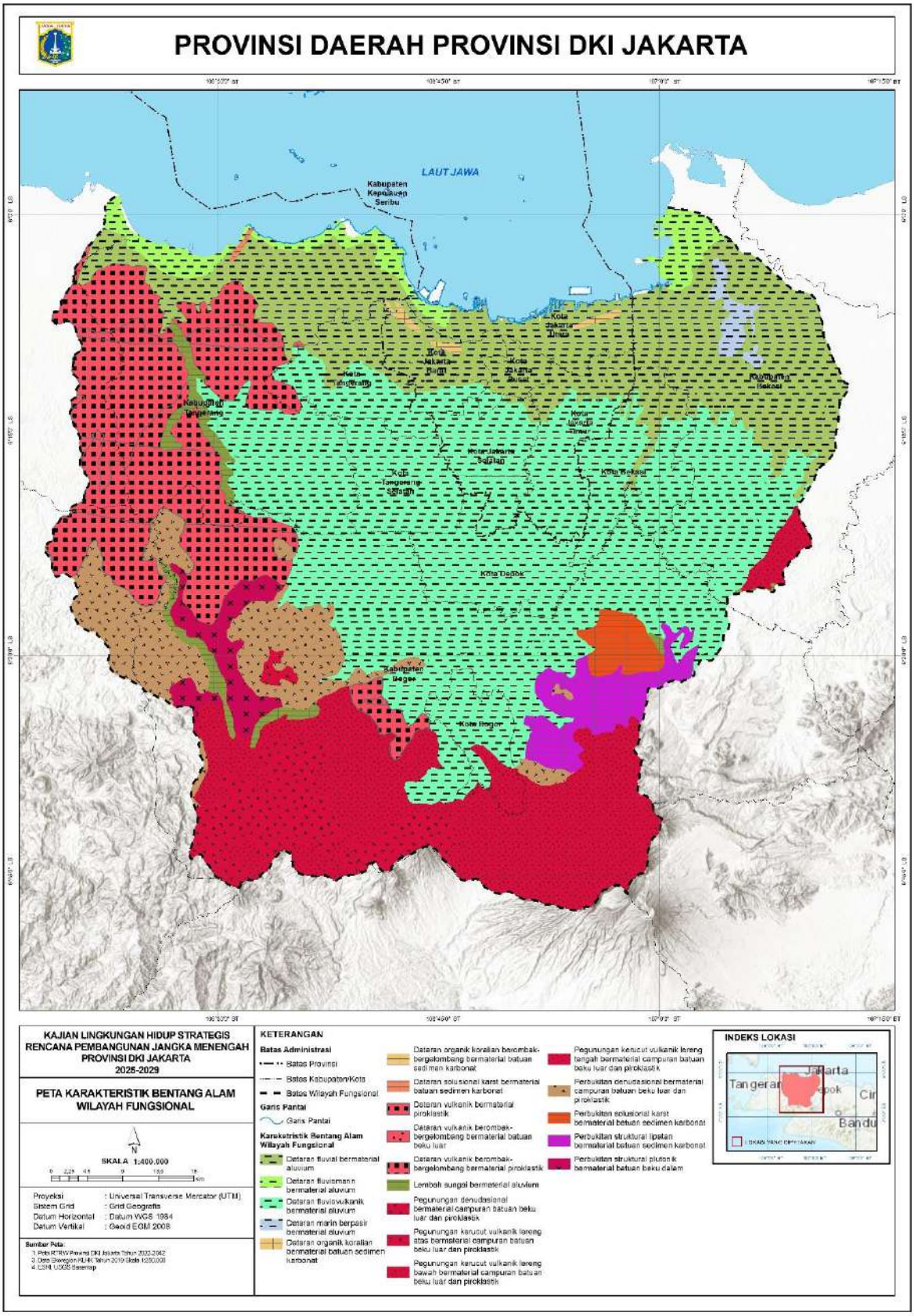

Gambar 3-6. Ekoregion Wilayah Fungsional DKI Jakarta

Sumber: SK MENLHK Nomor 1272 Tahun 2021

Mengacu pada SK Menteri LHK Nomor 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Wilayah Indonesia dan SK Menteri LHK Nomor 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1:250.000, DKI Jakarta memiliki 5 (lima) ekoregion dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan data ekoregion DKI Jakarta dari KLHK, diklasifikasikan menjadi enam tipologi dataran sebagai berikut:

a. **Dataran Fluvio - marin:** dataran ini terbentuk oleh proses pengendapan fluvial (aliran sungai). Kondisi hidrologi satuan ini dibangun oleh material aluvium yang mampu membentuk akuifer yang potensial.
b. **Dataran Fluvio - vulkanik:** dataran yang berasal dari proses fluvial yang bermaterial utama piroklastik, seperti abu, pasir, kerikil, dan bongkahan batuan yang terbawa aliran air pada saat hujan berlangsung.
c. **Dataran Fluvial:** dataran yang terbentuk dari hasil proses aliran sungai. Secara genetik material penyusun umumnya berupa aluvium dengan komposisi pasir, debu dan lempung relatif seimbang dengan sumber sangat bergantung kepada kondisi geologi daerah hulu, yang terbentuk akibat aktivitas pengendapan sungai.
d. **Dataran Organik Koralian:** Dataran yang terbentuk melalui proses penguraian materi organik dan batuan karang yang bermaterlial atuan sedimen karbonat

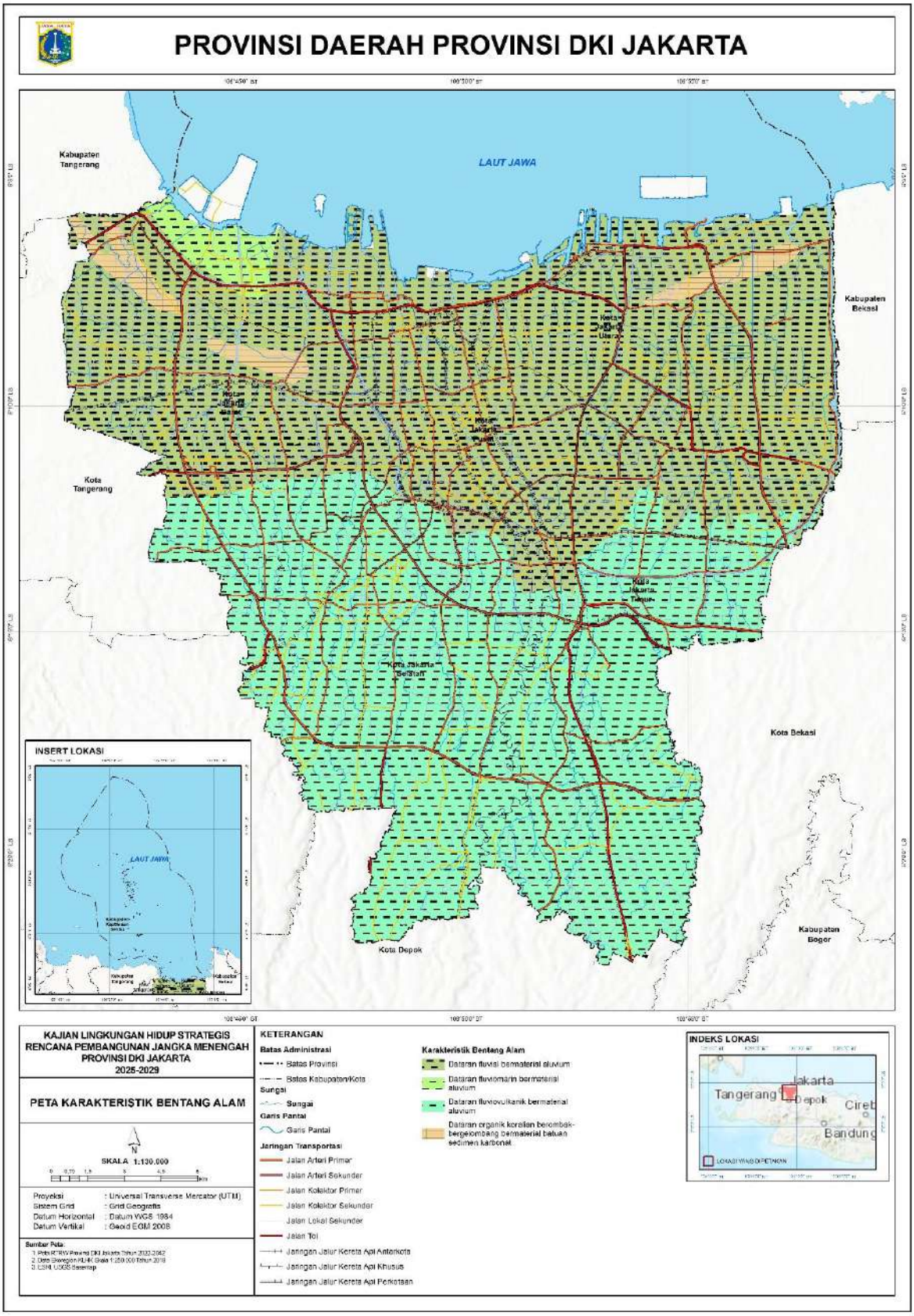

Gambar 3-7. Ekoregion Provinsi DKI Jakarta
Sumber: SK MENLHK Nomor 1272 Tahun 2021

Pada tahun 2014, Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah melakukan kajian penetapan ekoregion dalam Laporan Akhir Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahap II. Ekoregion darat didelineasi berdasarkan kesamaan dalam karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim serta batas administrasi (kecamatan). Dalam kajian tersebut Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 (enam) ekoregion dalam konteks pengelolaan air permukaan. Informasi ke enam ekoregion tersebut ditampilkan dalam peta di bawah ini:

a. Dataran Pasang Surut Berlumur

Dataran pasang surut berlumpur berada di sebagian Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, dan Kecamatan Cilincing. Dataran pasang surut berlumpur merupakan bentuk lahan (*landform*) dataran yang terbentang sepanjang garis pantai. Terbentuk oleh proses pengendapan marin (gelombang), yaitu penaikan dan penurunan permukaan air laut (efek gravitasi bulan-matahari), diiringi dengan aliran sungai (fluvial) yang bermuara ke laut. Secara umum, dataran ini tersusun atas endapan pematang pantai dan tuf banten (BPLHD, 2013).

Kondisi hidrologi pada dataran ini dikontrol oleh aliran sungai-sungai dengan debit aliran dan beban sedimen tinggi. Karakteristik litologinya berupa endapan aluvial laut; endapan aluvial estuarin baru; lunak. Material penyusun pada wilayah ini adalah aluvial lempung, yang membentuk jenis tanah berupa bahan induk endapan liat dan endapan liat-pasir. Sementara, pada daerah yang tersusun atas endapan pematang pantai umumnya tanah dengan tekstur pasiran halus-kasar dan kurang subur. Dilihat dari vegetasi alaminya, kawasan ini terdiri dari kawasan mangrove, nipah dan jenis bakau lainnya, pandanus, rumput-rumputan, kaktus, vegetasi air masin, vegetasi air masin pamah, vegetasi monsun air pamah.

b. Dataran Beting-Gisik dan Lembah Antar Gisik

Dataran beting-gisik (*beachridges*) dan lembah antar beting-gisik (*swales*) merupakan bentuk lahan (*landform*) marin. Beting-gisik terlihat sebagai timbunan pasir berbentuk punggungan (beting) yang memanjang sejajar garis pantai. Punggungan ini semula terbentuk di dasar laut dangkal tepi pantai sebagai hasil deposisi dari sedimen terangkut di dasar air laut oleh arus laut sepanjang pantai (*longshore current*) dan gelombang menuju ke pantai (*littoral drift*). Punggungan-punggungan ini terbentuk berulang dan berjajar dengan pola sejajar garis pantai. Pada saat air laut turun atau daratan terangkat, maka beting ini muncul ke permukaan membentuk beting-gisik. Cekungan memanjang di antara dua beting-gisik disebut *swale*. Material yang umum menyusun beting-gisik ini adalah pasir, sedangkan pada *swale* lebih bertekstur halus karena merupakan lokasi pengendapan lokal permukaan lahan di sekitarnya (BPLHD, 2014).

Karakteristik dasar dari hidrologi, jenis tanah, dan ekosistem alaminya serupa dengan Dataran Pasang Surut Berlumpur. Hanya saja kemiringan pada wilayah ini adalah 0-3% (secara umum) dan 3-8% (beberapa titik). Vegetasi di wilayah ini tidak memiliki ekosistem hutan mangrove. Pemanfaatan lahan yang mendominasi masih sebagai peruntukan permukiman dan usaha (industri, pergudangan, perikanan, perdagangan, perkantoran, jasa, pelayanan, dan perhotelan).

Mengingat karakteristik dasar yang serupa dengan Dataran Pasang Surut Berlumpur, maka secara umum peran wilayah dan identifikasi awal jasa lingkungan hidupnya pun sama (BPLHD, 2013). Pada referensi lain mengatakan karakteristik dataran beting – gisik relatif aman dari genangan/banjir, kelembaban tanah rendah, dan sesuai untuk kawasan permukiman dan kawasan budidaya lainnya. Sementara, dataran lembah antar beting – gisik memiliki kelembaban tanah tinggi, rentan terhadap terjadinya genangan, dan sesuai untuk pertanian sawah dan tambak (BPLHD, 2014).

c. Dataran Rawa

Dataran Rawa banyak ditemukan di Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Cakung, dan sedikit ditemukan di kecamatan lainnya. Dataran ini terbentuk dari hasil proses deposisi fluvial (seperti banjir) yang meninggalkan suatu dataran dengan cekungan-cekungan kecil yang tersebar secara acak. Material penyusunnya berupa

aluvium lempungan, dengan komposisi lempung, laman, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah yang seimbang, terbentuk akibat aktivitas pengendapan aliran sungai.

Material aluvium pada dataran ini mampu membentuk akuifer yang potensial sehingga cadangan atau ketersediaan air tanah dangkal sangat potensial. Dataran ini berpotensi membentuk reservoir air tanah atau cekungan hidrogeologi. Cekungan-cekungan ini sesuai dengan sifatnya mudah menampung air, sehingga di dataran ini wajar banyak terdapat rawa-rawa. Material aluvium akan berkembang menjadi tanah dengan solum sangat tebal didukung dengan ketersediaan air menjadikan tanah ini sangat subur.

Vegetasi pada dataran rawa ditumbuhi oleh jenis tanaman budidaya semusim (pertanian), vegetasi monsun rawa air tawar, vegetasi rawa air tawar pamah. Habitat yang cocok untuk wilayah ini merupakan jenis fauna katak, ikan air tawar dan burung.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dataran ini memiliki peran sebagai berikut:

- ✓ Memiliki kelembaban tanah tinggi dan kesuburan yang cukup baik untuk pengembangan lahan-lahan pertanian tanaman semusim dengan irigasi intensif.
- ✓ Sebagai reservoir air tanah sekaligus dapat dikembangkan sebagai lokasi budidaya ikan.
- ✓ Dataran ini rentan terjadi luapan aliran sungai (penggenangan).
- ✓ Daerah dengan ketersediaan air tinggi pun potensial untuk permukiman dan kegiatan perekonomian komersial, hal ini memicu alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman.
- ✓ Memerlukan investasi tinggi untuk penimbunan tanah jika wilayah ini dikonversikan menjadi lahan terbangun.

d. Dataran Banjir

Dataran Banjir terbentuk oleh proses pengendapan fluvial (aliran sungai) berada dalam lembah sungai (*river valley*). Dataran ini selalu tergenang banjir jika terjadi perluapan air sungai (debit meningkat) terutama di musim hujan. Kondisi hidrologi pada wilayah ini mampu membentuk akuifer potensial didukung dengan morfologi datar menyebabkan cadangan atau ketersediaan air tanah dangkal sangat potensial.

Dataran banjir tersusun dari material aluvium yang mudah mengalami pengikisan oleh aliran sungai. Aliran sungai cenderung mengalir sepanjang tahun dengan debit yang relatif besar. Vegetasi yang tumbuh di area ini berupa vegetasi monsun rawa air tawar dan vegetasi rawa air tawar pamah. Sifat tanah aluvium akan berkembang menjadi tanah dengan solum sangat tebal disertai ketersediaan air yang melimpah menjadikan tanah ini sangat subur, potensial untuk pertanian. Sayangnya, sebagian besar dataran banjir ini telah terkonversi menjadi lahan permukiman atau kegiatan usaha (komersial, industri, perdagangan, dan lainnya). Meskipun ditemukan sejumlah area-area peruntukan hijau dan lahan kosong di sepanjang aliran sungai. Sementara itu, hanya beberapa titik area kecamatan yang terlihat masih memanfaatkan dataran banjir untuk kegiatan tegalan/ladang atau sawah yaitu di Makasar, Cakung, Duren Sawit, Cilincing, dan Cipayung.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dataran banjir memiliki peran sebagai berikut:

- ✓ Memiliki kelembaban tanah tinggi dan kesuburan yang cukup baik untuk pengembangan lahan-lahan pertanian tanaman semusim.
- ✓ Sebagai reservoir air tanah dan cekungan hidrologi.
- ✓ Dataran ini rentan terjadi luapan aliran sungai (penggenangan).
- ✓ Dalam jangka panjang aktivitas perkotaan lambat laun menyebabkan degradasi lingkungan (pencemaran badan air).
- ✓ Memerlukan investasi tinggi untuk penimbunan tanah jika wilayah ini dikonversikan menjadi lahan terbangun.

e. Dataran Fluvio-Marin

Dataran ini terbentuk oleh gabungan proses fluvial dan marin, seperti delta sungai atau dataran estuarin lain dimana terbentuknya dipengaruhi oleh dua jenis proses geomorfik, yaitu aliran sungai dan arus/gelombang laut. Lokasi dari bentuk lahan ini biasanya sedikit agak jauh dari garis pantai atau berada di belakang dataran pasangsurut berlumpur. Pengaruh proses marin pasang-surut masih dapat dirasakan, namun jika pertumbuhan garis pantai (akresi) relatif cepat, maka pengaruh pasang-surut semakin kecil.

Secara genetik, material penyusun pada dataran ini umumnya berupa aluvium lempungan, dengan komposisi lempung, laman, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah yang seimbang, yang terbentuk akibat aktivitas pengendapan aliran sungai. Memiliki karakteristik dasar yang sama dengan dataran rawa maupun dataran banjir. Maka, hasil identifikasi awal jasa lingkungan hidup di dataran ini pun sama dengan dataran rawa dan dataran banjir. Secara umum peranan dataran fluvio-marin sesuai untuk pengembangan budidaya tambak atau pertanian sawah karena tanahnya bersifat gembur dan agak subur. Namun demikian, perlu diwaspadai bahwa area ini rentan terhadap genangan, banjir dan rob.

f. Dataran Fluvio-Vulkanik

Dataran yang berasal dari proses fluvial yang bermaterial utama piroklastik, seperti abu, pasir, kerikil, dan bongkahan batuan yang terbawa aliran air pada saat hujan berlangsung.

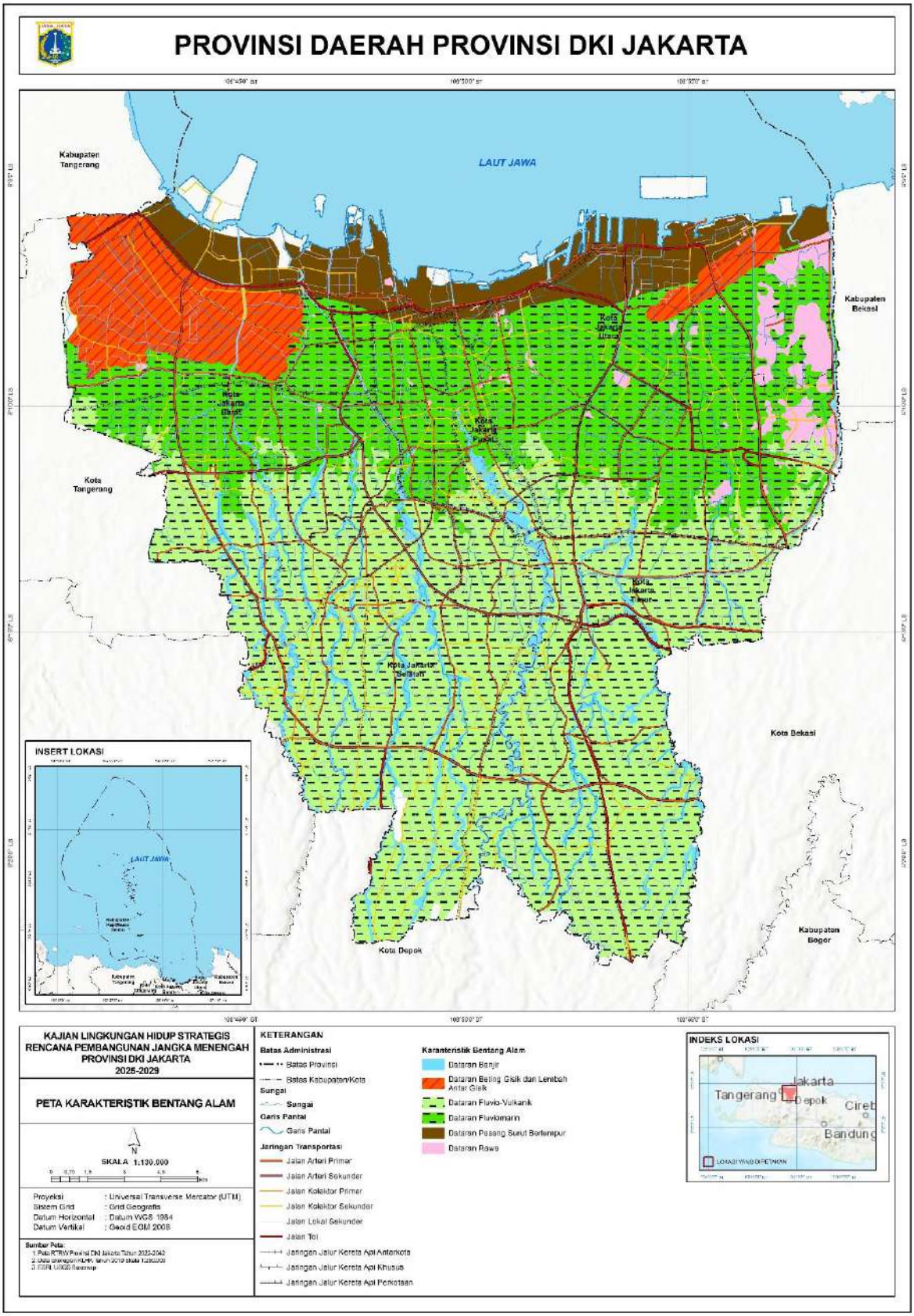

Gambar 3-8. Ekoregion Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta,2014

Karakteristik Vegetasi Alami

Karakteristik Vegetasi Alami merupakan kondisi respon dari hasil komponen-komponen abiotik dan biotik suatu ekosistem. Karakteristik Vegetasi Alami sangat erat hubungannya dengan ekoregion, karena kedua kondisi ini akan sangat mempengaruhi kondisi kinerja jasa lingkungan di DKI Jakarta. Dalam proses analisis penentuan kinerja jasa lingkungan, Karakteristik Vegetasi Alami akan memiliki bobot skoring sesuai dengan fungsi dari masing-masing Karakteristik Vegetasi Alami. Proses skoring dilakukan melalui *expert judgement* sebelum hasil skoring digunakan untuk menentukan kinerja jasa lingkungan. Setiap Karakteristik Vegetasi Alami yang memiliki nilai tinggi, maka akan berkontribusi besar terhadap kinerja jasa lingkungan.

Merujuk pada data KLH tahun 2021, wilayah DKI Jakarta memiliki 4 Karakteristik Vegetasi Alami yaitu, vegetasi hutan pantai pada wilayah Jakarta Utara dan Barat, vegetasi mangrove monsun di pesisir utara Jakarta, vegetasi hutan tepian sungai malar hijau di wilayah utara sampai dengan Jakarta Pusat serta vegetasi terna rawa air tawar yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan dan Timur. Data Karakteristik Vegetasi Alami ini menunjukkan bahwa dominasi vegetasi berada pada Karakteristik Vegetasi terna rawa air tawar dengan luas 31,796.96 Ha dan vegetasi hutan terna sungai malar hijau dengan luasan 30,045.81 Ha.

Tabel 3-3. Karakteristik Vegetasi Alami di DKI Jakarta

Bentang Alam	Karakteristik Vegetasi Alami	Luas (Ha)
Dataran fluvial bermaterial aluvium	Vegetasi hutan tepian sungai malar hijau	30,045.82
	Vegetasi terna rawa air tawar	2,169.10
Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	Vegetasi hutan pantai	1,369.99
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	Vegetasi mangrove monsun	974.27
Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium	Vegetasi terna rawa air tawar	29,627.87
Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	Vegetasi hutan pantai	23.23

Sumber: SK MENLHK Nomor 1272 Tahun 2021

Melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dataran fluvial bermaterial aluvium yang memiliki Karakteristik Vegetasi hutan tepian sungai malah hijau dan terna rawa air tawar mendominasi wilayah DKI Jakarta. Secara fungsi dataran fluvial adalah dataran yang memiliki fungsi menyerap air dengan sangat baik dan mampu mengalirkan air secara maksimal, sehingga jika melihat bagaimana Karakteristik Vegetasi Alami pada bentang alam tersebut maka Karakteristik Vegetasi Alami hutan tepian sungai malar hijau dan terna rawa air tawar sudah sesuai dengan fungsi alami bentang alam. Kemudian jika melihat pada fungsi dataran fluviomarin bermaterial aluvium yang berada di wilayah pesisir DKI Jakarta, juga sudah sesuai dengan keberadaan Karakteristik Vegetasi Alami mangrove monsun pada bentang alam tersebut. Secara detail sebaran Karakteristik Vegetasi Alami di DKI Jakarta dapat dilihat pada peta di bawah ini.

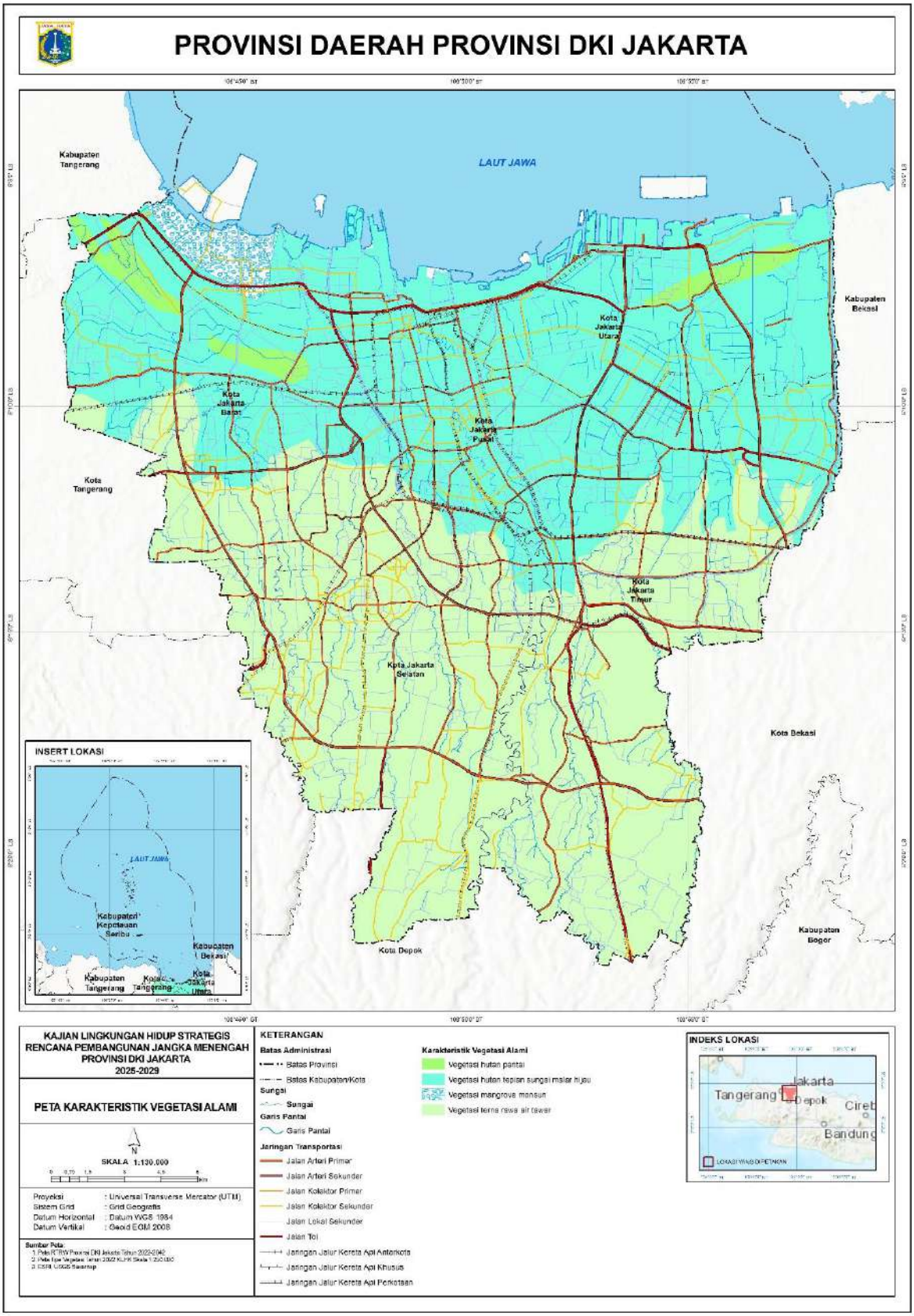

Gambar 3-9. Karakteristik Vegetasi Alami Provinsi DKI Jakarta
Sumber: SK MENLHK Nomor 1272 Tahun 2021

***Ekoregion* Laut**

Berdasarkan data Ekoregion Jakarta (BPLHD, 2014), kawasan ekoregion laut DKI Jakarta dapat dibagi menjadi 5, yaitu: Ekoregion Pesisir Utara Jawa, Ekoregion Dangkalan Utara Jawa, Ekoregion Alur Utara Jawa, Ekoregion Perairan Kepulauan Seribu, dan Ekoregion Dangkalan Lampung,

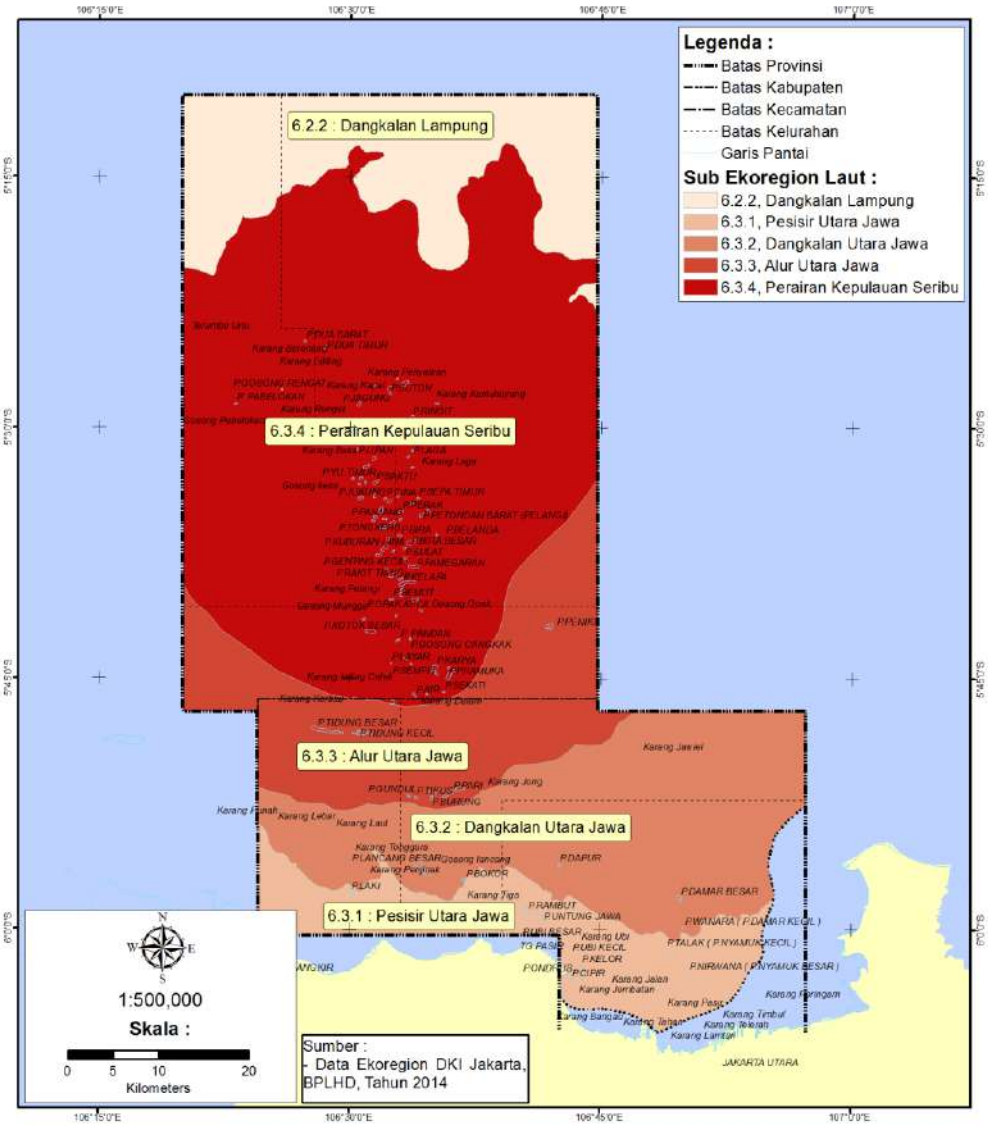

Gambar 3-10 Karakteristik Bentang Laut DKI Jakarta
Sumber: BPLHD 2014

Karakteristik masing-masing sub ekoregion tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. **Ekoregion Pesisir Utara Jawa**

   Ekoregion ini meliputi perairan Teluk Jakarta yang mencakup Pulau Rambut, Pulau Untung Jawa, Pulau Kelor, Pulau Onrus, Pulau Kayangan dan Pulau Laki. Ekoregion ini memiliki kedalaman laut berkisar antara 0 – 18 m. Morfologi pantai di sepanjang Teluk Jakarta sangat beragam. Ongkosongo (1981) membagi pantai Jakarta yang terbentuk secara alami ke dalam tiga jenis pantai yakni pantai landai (kemiringan lereng 0° - 5°), pantai miring (kemiringan lereng 5° - 15°) dan pantai terjal (kemiringan lereng 15° – 90°).

   Pantai landai terbentuk pada lingkungan pantai yang ditumbuhi vegetasi mangrove. Akar tumbuhan bakau dapat berfungsi menjerat material sedimen dan membentuk rataan lumpur. Pantai demikian dapat ditemukan

di daerah Kamal dan Angke. Pantai miring dijumpai pada daerah pantai yang tersusun oleh material pasir dengan energi gelombang yang cukup besar. Jenis pantai demikian dapat dijumpai di sepanjang pantai Marunda - Segara Makmur. Pantai terjal terjadi pada wilayah pantai yang sekarang mengalami erosi. Lereng-lereng terjal sebenarnya merupakan bekas erosi terutama pada dataran pantai yang tersusun oleh material lempung membentuk gerongan. Jenis pantai demikian dijumpai di sepanjang pantai Cilincing hingga Marunda.

Oleh karena kawasan ekoregion ini merupakan perairan teluk yang menjadi muara dari 13 sungai yang mengalir melewati metropolitan Jakarta dan daerah padat di belakangnya, tingkat pencemaran di ekoregion laut ini menjadi sangat tinggi, baik oleh limbah padat maupun limbah cair yang mengandung bahan beracun dan berbahaya. Dapat dikatakan bahwa karena kedekatannya dengan Jakarta, pantai dan pulau-pulau di ekoregion ini juga paling banyak mengalami degradasi habitat akibat kegiatan manusia. Beberapa pulau telah lenyap atau hampir lenyap akibat penambangan pasir dan karang yang tak terkendali. Perubahan geomorfologi juga terjadi di pantai daratan Jakarta, yang juga sering mengalami banjir rob. Sumber air tawar di pulau-pulau kecil di teluk ini umumnya telah dieksploitasi berlebihan hingga menjadi payau atau asin karena intrusi air laut. Eksploitasi sumber daya hayatinya pun sudah demikian parah hingga banyak jenis biota perairan yang dulunya umum terdapat di perairan ini, sekarang sudah jarang atau tak dijumpai lagi. Di beberapa pulau, penduduk setempat telah mengalihkan mata pencahariannya dari semula sebagai nelayan kemudian ke aktivitas yang terkait dengan pariwisata. Namun pengelolaan menuju pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) tampaknya masih menghadapi berbagai kendala.

2. Ekoregion Dangkalan Utara Jawa

Ekoregion ini meliputi perairan Laut Jawa termasuk di dalamnya perairan sekitar Pulau Damar Besar, Pulau Damar Kecil, Pulau Bokor, Pulau Lancang Besar dan Pulau Lancang Kecil. Ekoregion ini terletak tepat di sebelah utara dari ekoregion Pesisir Utara Jawa hingga degradasi lingkungan serta akibatnya pun sedikit lebih kecil, meskipun masalah utamanya masih hampir sama. Beberapa pulau yang terletak di ekoregion ini tidak berpenghuni, karena berfungsi sebagai cagar alam (Pulau Bokor) atau hanya dihuni oleh petugas mercu suar (Pulau Damar Besar) hingga pengaruh kegiatan manusia pun lebih kecil. Meskipun demikian, beberapa pulau kecil di ekoregion ini dilaporkan telah lenyap atau mengalami perubahan geomorfologi yang parah.

Pulau yang berpenghuni hanyalah Pulau Lancang Besar dan Pulau Lancang Kecil. Sampah yang tak putus-putusnya hanyut dalam jumlah besar dari daratan Jakarta yang terdampar di pulau ini merupakan masalah yang mengganggu lingkungan dan kegiatan nelayan. Pada musim barat, bagan apung penangkap ikan dipindahkan lokasinya ke sebelah selatan pulau, sedangkan pada musim timur bagan-bagan itu dipindahkan ke utara untuk menghindari tekanan sampah dari Jakarta yang sangat mengganggu. Tampaknya belum ada solusi terbaik untuk menangani masalah sampah kiriman ini. Penduduk Pulau Lancang mulai mengalihkan mata pencaharian mereka ke kegiatan pariwisata, misalnya dengan mengelola rumah singgah (*home stay*) tidak saja di pulau ini tetapi juga di pulau lainnya di luar ekoregion ini, seperti di Pulau Pari.

3. Ekoregion Alur Utara Jawa

Ekoregion ini terletak di sebelah Utara dari ekoregion Dangkalan Utara Jawa. Ekoregion ini meliputi tiga pulau besar yaitu Pulau Tidung, Pulau Payung dan gugus Pulau Pari yang didelineasi berdasarkan parameter batimetri. Perairan ekoregion ini merupakan perairan dalam, berkisar antara 30 – 90 m, dan dapat dikatakan sebagai “pemisah” antara perairan pesisir Laut Jawa dengan perairan Teluk Jakarta.

Ekoregion ini terletak lebih jauh ke utara dari metropolitan Jakarta, dan karenanya pula dampaknya terhadap ekoregion laut ini lebih kecil. Adanya alur laut dalam di sisi menyebabkan pengaruh daratan Jakarta hampir tidak dirasakan di ekoregion ini. Sebagai contoh, kondisi terumbu karang di wilayah ekoregion ini tidak mendapat pengaruh sedimentasi dari daratan Jakarta, dibandingkan dengan pulau Lancang (Ekoregion Dangkalan Utara Jawa) dan pulau Onrust (Ekoregion Pesisir Utara Jawa) yang telah mengalami kerusakan. Pulau Tidung dan Pulau Payung, yang dipisahkan oleh perairan dalam dengan Gugus Pulau Pari, Pulau Kongsi, Pulau Tengah, dan Pulau Burung memiliki kesamaan dalam hal keragaman hayatinya.

Meskipun demikian telah terdeteksi terjadinya pencemaran air, dan perubahan komposisi dan tutupan karang keras seiring dengan berjalannya waktu. Pulau berpenghuni antara lain Pulau Pari, Pulau Tidung dan Pulau Payung. Perkembangan penduduk di pulau-pulau ini telah menyebabkan masalah ketersediaan air tawar terutama di musim kemarau, sedangkan di perairan pantai telah menunjukkan adanya pencemaran. Penduduk pulau-pulau ini semula adalah nelayan penangkap ikan, namun setelah berkembangnya budidaya rumput laut, penduduk mengalihkan mata pencahariannya ke budidaya rumput laut. Tetapi keberhasilan budidaya ini kemudian tumbang setelah terserang penyakit. Kini sebagian besar penduduk beralih profesi dengan keterlibatan dalam aktivitas pariwisata. Di pihak lain muncul pihak tertentu yang mendirikan resort di dalam gugus Pulau Pari, yang melakukan pembangunan konstruksi pantai dan dermaga dengan penggalian karang dan pembendungan pantai yang merusak lingkungan tanpa adanya kontrol yang memadai dari pihak berwajib. Hal ini menunjukkan terjadinya konflik pemanfaatan ruang dan lemahnya penegakan hukum.

4. Ekoregion Perairan Kepulauan Seribu

Ekoregion ini memiliki kedalaman laut berkisar antara 0 - 40 m. Untuk kelerengan dasar laut ekoregion ini mempunyai kelerengan dasar laut berkisar antara 0,35° - 0,64° dan 0,64°-1,8°. Sebagian wilayah lain mempunyai kelerengan antara 0,06° - 0,17°, serta sebagian kecil wilayah mempunyai kelerengan antara 0° – 0,06°. Kelas lereng pada ekoregion ini sebagian berkelas datar-agak miring dan sebagian berkelas miring (Sulistyo dan Triyono, 2009). Berdasarkan Peta Sedimen Permukaan Dasar Laut wilayah ekoregion EL 6.3.3 ini mempunyai sedimen dasar laut berupa lumpur (70,90%) dan pasir dan lanau (29,10%).

Ekoregion ini memiliki pulau terbanyak yang masuk dalam zona Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKS) dan didelineasi berdasarkan parameter batimetri dan keanekaragaman hayati. Seperti halnya ekoregion laut lainnya, ketersediaan air tawar di pulau-pulau ini dan pencemaran antropogenik merupakan masalah tersendiri, terlebih dengan semakin pesatnya kegiatan pariwisata.

TNKS berada di wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta namun pengelolaan TNKS berada di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kondisi ini berkontribusi timbulnya tantangan dan kendala dalam koordinasinya. Keterbatasan & kapasitas TNKS dalam melakukan kontrol wilayah mengakibatkan kurang maksimalnya dalam pengawasan.

Wilayah TNKS ditetapkan melalui **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6310/Kpts-II/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Perairan TNKS**. Pembagian zonasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PHKA) dengan SK No 05/IV-KK/2004 tanggal 27 Januari 2004 tentang Zonasi Pengelolaan TNKS (Taman Nasional Kep. Seribu, 2013).

Pertumbuhan pariwisata di ekoregion ini dikhawatirkan telah mencapai kapasitas lebih (*over capacity*). Eksploitasi sumber daya hayati laut secara berlebihan telah mengancam kelestarian berbagai jenis ikan, termasuk ikan-ikan hias. Potensi pencemaran tidak saja bersumber dari kawasan pemukiman dan pariwisata, tetapi juga risiko buangan dari kapal tanker yang lalu lalang di sekitar wilayah ini yang melepas limbah cucian air balastnya berupa minyak mentah dalam bentuk gumpalan (tar ball) yang akhirnya terdampar dan mencemari pantai. Pencemaran *tar ball* ini dilaporkan telah beberapa kali terjadi dan melanda pulau-pulau di kawasan ekoregion ini. Dalam pengembangan pariwisata, resort telah banyak yang dibangun tetapi acapkali menimbulkan konflik dengan nelayan setempat, karena dirasakan membatasi kegiatan penangkapan ikan setempat. Masalah lain yang dihadapi oleh nelayan setempat adalah konflik dengan nelayan pendatang dari luar yang membawa alat tangkapnya yang merusak lingkungan seperti jaring muroami.

5. Ekoregion Dangkalan Lampung

Ekoregion ini meliputi sebagian perairan Laut Jawa dan hanya mencakup satu pulau saja yaitu Pulau Sebira (8 ha) dengan jumlah penduduk sekitar 500 jiwa. Pulau ini merupakan bagian paling utara dari gugus Kepulauan Seribu. Pulau ini, telah berada di luar Taman Nasional Kepulauan Seribu, dan bercirikan dengan adanya mercu suar yang vital untuk navigasi pelayaran. Pulau kecil dan sangat terpencil ini menyebabkan

masalah lingkungan yang timbul di pulau ini juga minim. Kondisi terumbu karangnya masih dalam keadaan baik. Penduduk setempat bermata pencaharian utama sebagai nelayan. Karena tekanan penduduk terhadap lingkungan masih kecil, masyarakat belum merasakan ketersediaan air tawar sebagai masalah yang mengkhawatirkan. Sesekali terjadi konflik dengan nelayan pendatang yang membawa alat tangkap yang merusak seperti muroami. Dekat pulau Sebira terdapat tambang migas lepas pantai yang dioperasikan oleh CNOOC (China National Offshore Oil Corporation), yang dapat berpotensi menimbulkan pencemaran atau blowout yang bisa berimbas ke pulau ini.

Topografi

Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 m di atas permukaan laut. Sekitar 40% wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 m di bawah muka laut pasang. Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam satuan morfologi dengan kemiringan lereng 0-0,5% dan ketinggian kurang dari 10 meter di daerah pantai hingga 70 meter di bagian selatan Jakarta mendekati Bogor. Ragam elevasi wilayah Provinsi DKI Jakarta ditampilkan pada Gambar 3-11.

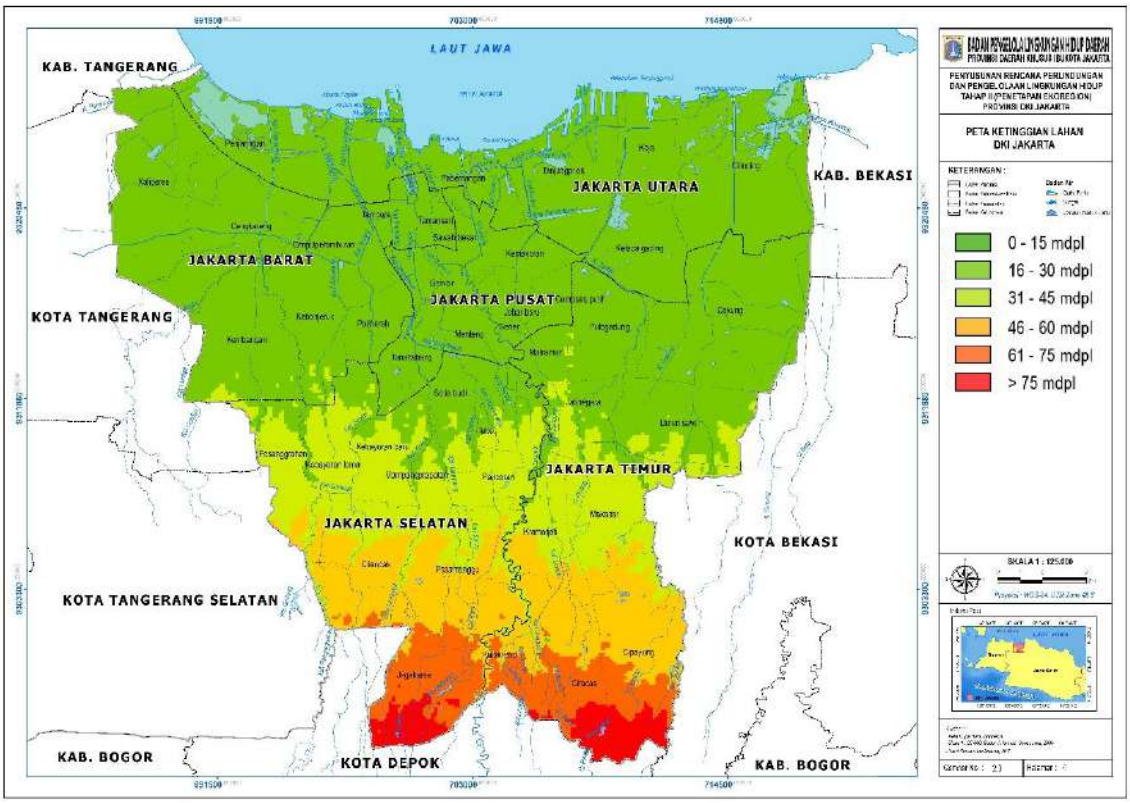

Gambar 3-11. Kondisi Ketinggian Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Sumber: DEMNAS, 2015

Ditinjau dari data kontur, meskipun sebagian besar wilayah Provinsi DKI Jakarta dikatakan relatif datar, akan tetapi terdapat beberapa titik wilayah yang memiliki kontur bergelombang. Kondisi ini erat kaitannya dengan potensi bencana banjir/genangan air. Wilayah-wilayah dengan kontur bergelombang tentunya memerlukan rekayasa saluran air maupun pompa air yang memadai sehingga aliran air dapat diarahkan ke laut. Beberapa titik wilayah yang diperkirakan memiliki kontur bergelombang tersebar di Jakarta Pusat (Kecamatan Gambir, Menteng, Tanah Abang, dan Senen), Jakarta Selatan (Kecamatan Setiabudi, Pancoran, Mampang, Cilandak, Kebayoran Lama, dan Kebayoran Baru), Jakarta Barat (Kecamatan Grogol Petamburan, Kembangan, Tambora, dan Cengkareng), Jakarta Timur (Kecamatan Cakung, Pulo Gadung, dan Makasar-HLP) dan Jakarta Utara (Kecamatan Pademangan, Kelapa Gading, Penjaringan dan Cilincing).

Namun demikian, pengelolaan lingkungan hidup seyogyanya dapat dilakukan dengan pendekatan batas ekoregion meskipun pelaksanaannya tetap diselenggarakan sesuai batas administrasi suatu wilayah. Memahami konsep ini,

maka pada dasarnya pembahasan daya dukung dan daya tampung air di Provinsi DKI Jakarta tidak dapat lepas dari peranan wilayah hulu dan hilir mencakup daerah penyangga ibukota yaitu Bodetabekjur (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur).

Mengidentifikasi peranan wilayah hulu dan hilir sangat penting dilakukan sebagai dasar menentukan kerangka pikir analisis, salah satunya untuk melihat peranan dari kabupaten/kota di sekitar Provinsi DKI Jakarta. Gambaran peranan hulu dan hilir salah satunya dapat diidentifikasi dari topografi wilayah seperti ditampilkan pada peta berikut.

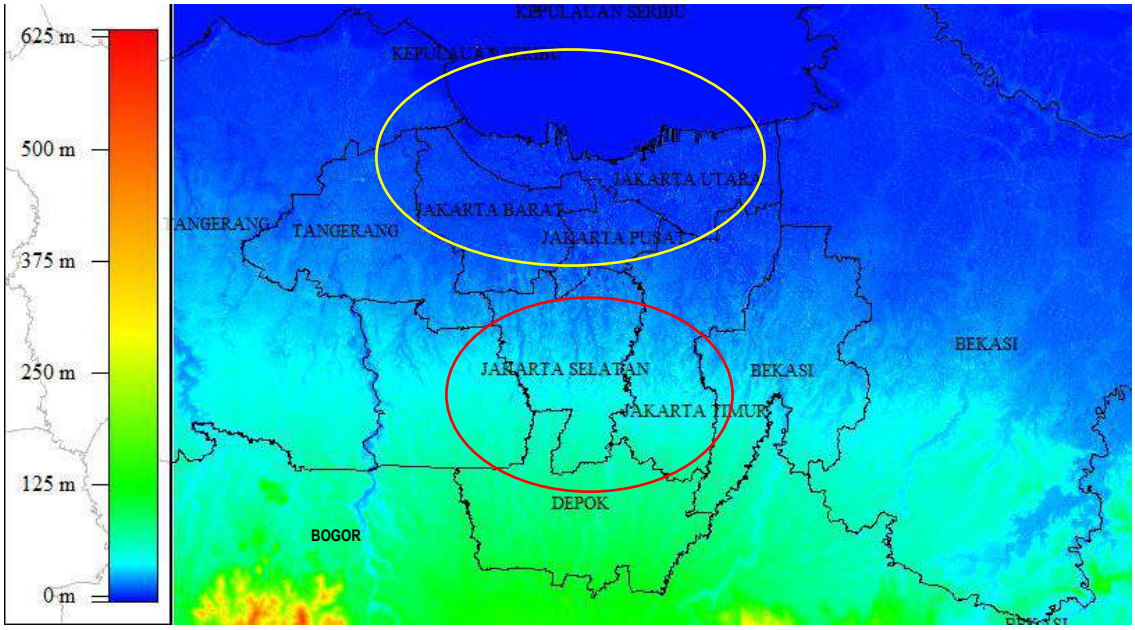

Gambar 3-12. Ketinggian wilayah Jabodetabek
Sumber: DEMNAS, http://tides/big.go.id/DEMNAS/

Dari peta di atas, untuk lingkup Provinsi DKI Jakarta, bagian selatan dari Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur (warna gradasi hijau hingga biru muda, ditunjukkan pada lingkaran merah) memiliki peran penting sebagai wilayah hulu. Ditandai dengan warna gradasi biru tua menunjukkan hampir sebagian besar area tengah dan utara Provinsi DKI Jakarta diidentifikasi sebagai wilayah hilir (ditandai dengan lingkaran kuning). Bagian tengah merupakan area transisi elevasi yang banyak ditemukan **titik-titik kontur bergelombang**. Sedangkan, pada bagian utara relatif datar dan landai, area ini hampir terbiasa dengan kondisi genangan air karena pada dasarnya muka air laut pasang lebih tinggi dibandingkan permukaan tanahnya.

Dalam cakupan yang lebih luas, kondisi topografi Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok menunjukkan elevasi yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi DKI Jakarta maupun daerah Bekasi dan Tangerang. Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok memiliki peranan sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) hulu yang alirannya bermuara ke Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Terdapat juga dua area konservasi taman nasional yang sebagian kawasannya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur yaitu Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Secara tidak langsung, keberadaan kawasan ini turut mempengaruhi pengaturan tata air dan iklim berkaitan dengan intensitas hujan di DKI Jakarta.

Keterkaitan antara daerah sebelah barat dan timur Provinsi DKI Jakarta diidentifikasi sebagai penyangga kegiatan perekonomian. Daerah Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi berperan sebagai penyangga penyediaan bahan-bahan pertanian dan lahan untuk industri. Sedangkan, Kota Bekasi tepatnya di Kecamatan Bantar Gebang berperan sebagai penyedia lahan pembuangan akhir. Meskipun lahan TPA di kecamatan tersebut telah menjadi milik DKI Jakarta, tetapi proses pengangkutan sampah dari DKI Jakarta menuju TPA Bantar Gebang telah memberikan dampak bagi masyarakat di sekitar rute pengangkutan dan pembuangan akhir. Maka, menjadi

penting melakukan identifikasi keterkaitan antar daerah sebagai sebuah ekosistem, setidaknya dengan memperhatikan peran wilayah Bodetabekjur terhadap DKI Jakarta.

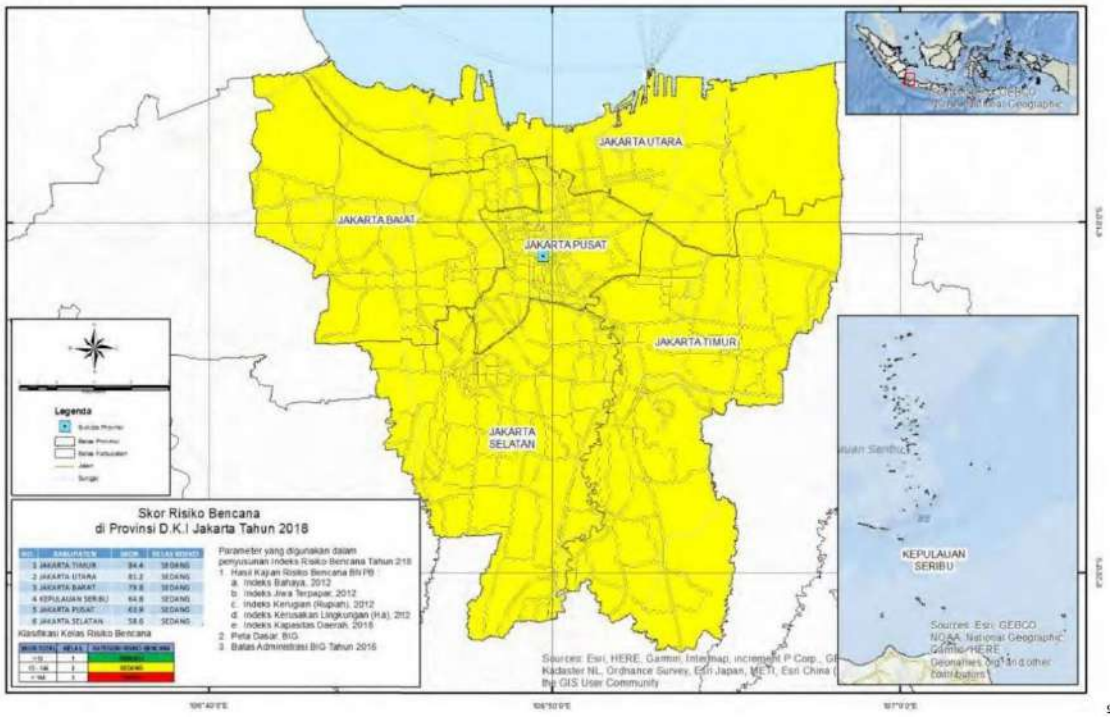

Gambar 3-13. Kondisi Indeks Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta 2018
Sumber: BNPB, IRBI 2018

Dalam siklus 5-6 tahunan Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, terbukti pada tahun 2002, 2007 dan tahun 2013, 2014 terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula.

Sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia terbentuk dari sejarah peninggalan atau pemekaran wilayah yang sudah ada. DKI Jakarta termasuk salah satu kota yang terbentuk dari sejarah peninggalan yang berkembang secara massif. Penataan kota di DKI Jakarta tidak dapat dilakukan secara optimal karena sebagian besar area-area pemukiman dan fasilitas kota sudah terbangun sejak lama. Hal tersebut menyebabkan penataan sistem tata air/drainase dan jalan disesuaikan dengan kondisi penataan eksisting.

Klimatologi

Jakarta termasuk dalam wilayah iklim tropis memiliki karakteristik musim penghujan rata-rata pada bulan Oktober hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Puncak musim penghujan di DKI Jakarta terjadi pada bulan November hingga Januari dengan curah hujan dan hari hujan tertinggi pada bulan Januari dan bulan Februari, seperti terlihat pada Tabel 3-4 berikut:

Tabel 3-4 Curah Hujan dan Hari Hujan Provinsi DKI Jakarta

No	Bulan	2017		2018		2019		2020	
		Curah Hujan (mm^2)	Banyaknya Hari Hujan	Curah Hujan (mm^2)	Banyaknya Hari Hujan	Curah Hujan (mm^2)	Banyaknya Hari Hujan	Curah Hujan (mm^2)	Banyaknya Hari Hujan
1	Januari	214,10	19	215,1	23	383,9	25	504	25
2.	Februari	520,80	24	431,2	24	270,1	16	763,7	25
3.	Maret	138,70	15	188,6	22	327,3	23	220,6	19
4.	April	156,50	16	159,1	16	194,6	19	110,6	10
5.	Mei	135,00	10	16,7	5	47,8	6	52,5	11
6.	Juni	138,50	11	12,6	5	23,1	2	63,3	9
7.	Juli	119,90	7	14,5	1	0	0	99,9	9
8.	Agustus	0,80	1	33	1	0	0	77,9	5

9.	September	165,80	7	62	7	1	0	131,9	8
10.	Oktober	112,40	12	133,8	6	1	1	101,7	12
11.	November	195,30	17	140,9	11	50,1	8	111,2	15
12.	Desember	254,10	12	52,3	13	263,8	17	244,2	21

Cuaca di DKI Jakarta dipengaruhi angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam, dengan rata-rata temperatur terendah terjadi pada bulan Januari dan Februari, sedangkan tertinggi pada bulan Oktober dan November. Perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil. Perubahan suhu udara di kawasan Jakarta seperti wilayah lainnya di Indonesia tidak dipengaruhi oleh musim, melainkan oleh perbedaan ketinggian wilayah. Suhu udara harian rata-rata pada daerah pantai di wilayah Utara Jakarta umumnya relatif tidak berubah, baik pada siang maupun malam hari. Secara rinci data suhu udara Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3-5 berikut:

Tabel 3-5 Data Cuaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2020

No	Bulan	2017			2018			2019			2020		
		Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)		
		Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata
1.	Januari	34,40	24,00	28,20	33,80	23,00	27,70	34,00	23,60	27,90	34,4	24	28,02
2.	Februari	32,40	23,40	27,20	32,40	23,40	27,20	34,00	24,00	28,20	34,6	24	27,72
3.	Maret	34,40	24,00	28,10	34,20	23,80	27,90	34,80	23,80	28,10	34,6	25	28,6
4.	April	34,20	24,80	28,50	34,40	24,00	28,70	35,20	24,80	28,80	34,8	25	29,08
5.	Mei	35,00	25,00	29,00	34,60	25,00	29,40	35,00	25,00	29,60	35,6	24,8	29,58
6.	Juni	35,20	24,00	28,70	35,00	24,00	28,90	34,40	24,40	29,20	35	24,4	29,49
7.	Juli	34,60	24,00	28,50	34,20	24,00	28,20	34,00	24,00	28,70	34,2	24,2	28,93
8.	Agustus	34,40	24,00	28,70	34,20	23,00	28,20	33,60	24,00	28,20	34,8	24	29,12
9.	September	35,00	24,00	28,80	35,40	24,20	28,60	35,00	24,00	28,80	35	24	29,29
10.	Oktober	34,20	23,00	28,90	35,20	24,00	29,30	35,00	24,60	29,40	34,6	24	28,83
11.	November	34,40	24,20	28,20	36,60	24,40	28,90	34,60	25,00	29,50	35,2	25	29
12.	Desember	34,80	24,00	28,20	35,40	24,40	28,70	33,80	24,80	28,40	34,8	24,2	28,15

Hidrogeologi

Wilayah daratan Provinsi DKI Jakarta berada dalam wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta yang terbentang antara 106°36'32.54" dan 107°4'4.78" Bujur Timur serta antara 6°0'43.50" dan 6°26'58.23" Lintang Selatan. CAT Jakarta dengan luas wilayah 1.439 km² ini merupakan CAT lintas provinsi yang sebarannya mencapai Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor (Permen ESDM no. 2 tahun 2017). Secara geologis, wilayah cekungan air tanah ini dibatasi oleh lapisan kedap air dari kala Miosen yang naik ke permukaan di kawasan Tangerang, Depok dan Bekasi (Delinom 2008). Gambar di bawah menunjukkan batasan wilayah CAT Jakarta beserta batasan daerah imbuhan dan lepasannya.

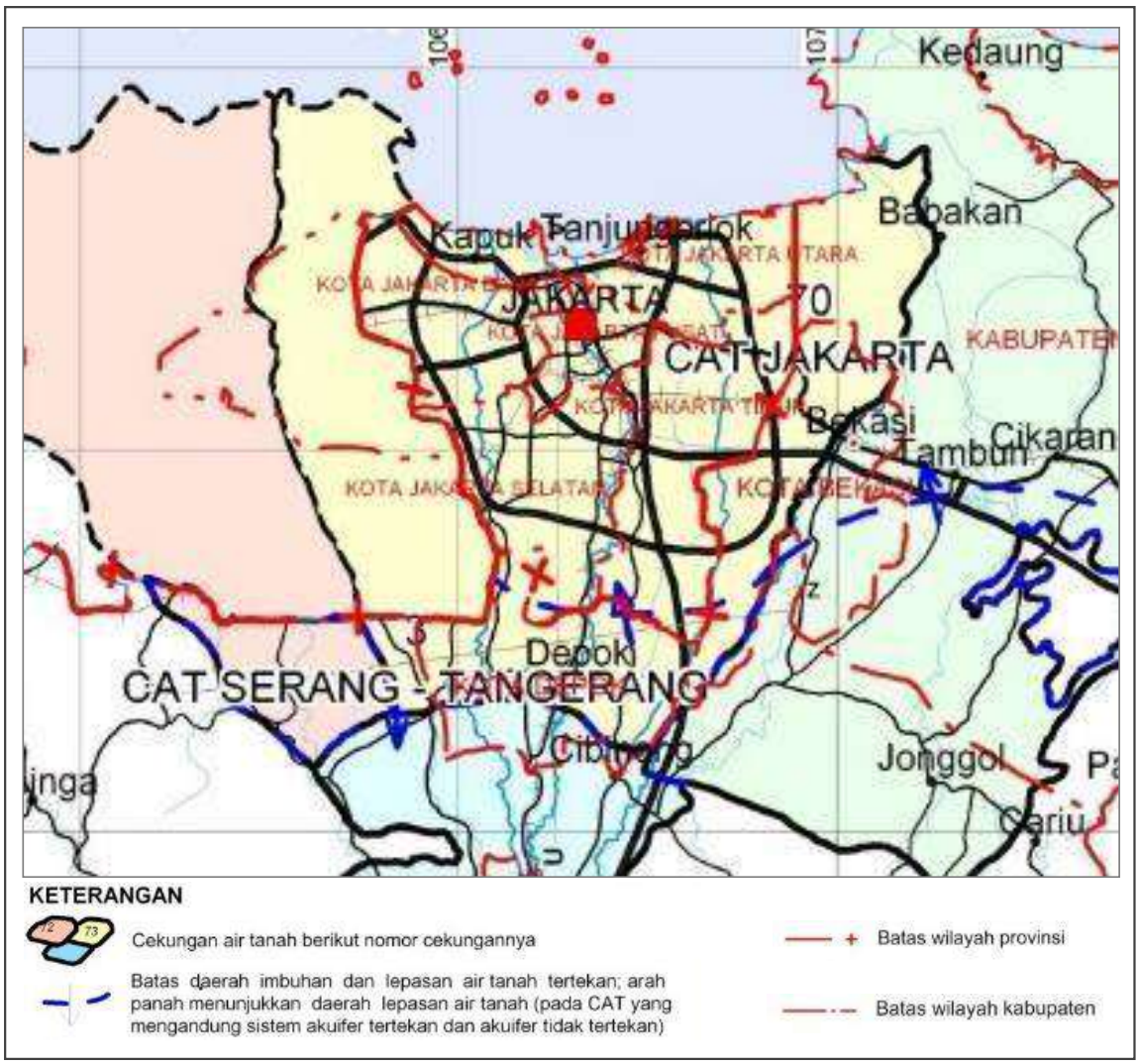

Gambar 3-14. Kondisi Cekungan Air Tanah Jakarta (warna kuning)
Sumber: Permen ESDM no. 2 tahun 2017

CAT Jakarta terdiri dari beberapa lapisan akuifer dengan kedalaman yang berbeda-beda. Setiap lapisan akuifer dibatasi oleh lapisan akuitar yang memiliki permeabilitas air rendah. Berdasarkan satuan hidrogeologi dan kedalamannya, lapisan akuifer CAT Jakarta secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 4 zona (Herlambang and Indriatmoko 2005; Tirtomihardjo 2014; Setyawan et al. 2015):

1. Kelompok akuifer dangkal/tidak tertekan dengan kedalaman sampai 40 m (zona 1). Lapisan akuifer ini disusun oleh lapisan tanah berjenis lempung, lempung pasiran, lempung pasir tufaan, pasir lempungan, pasir dan kerikil.
2. Kelompok akuifer dalam/tertekan dengan kedalaman lebih dari 40 m, yang dapat dibagi menjadi 3 zona:
   a. Zona 2: akuifer tertekan atas yang diapit oleh dua lapisan akuitar dengan kedalaman mencapai 150 m. Lapisan akuifer ini terdiri dari 4 satuan lapisan tanah yang berbeda. Lapisan pertama dan kedua terdiri dari lempung keras, lempung pasiran, pasir, kerikil batu pasir dan konglomerat. Lapisan ketiga dan keempat terdiri dari lempung, lempung pasiran, pasir kuarsa dan lempung keras.
   b. Zona 3: akuifer tertekan tengah yang berada di bawah kelompok akuifer tertekan atas dan juga diapit oleh dua lapisan akuitar dengan kedalaman mencapai 250 m. Lapisan akuifer ini tersusun atas lempung pasiran, pasir lempungan, pasir kuarsa, kerikil dan lempung.
   c. Zona 4: akuifer tertekan bawah yang diapit oleh lapisan akuitar dan lapisan batuan dasar dari kala Miosen dengan kedalaman di bawah 250 m. Lapisan akuifer ini tersusun atas lempung pasiran, lempung berkerikil, dan konglomerat. Umumnya akuifer ini tidak produktif.

Skema sederhana lapisan akuifer Jakarta dapat dilihat di Gambar 3.6. Lapisan-lapisan akuifer ini tidak merata tersebar di seluruh kawasan Jakarta. Kedalaman setiap lapisan pun dapat berbeda-beda, tergantung dari lapisan dan jenis tanah penampungnya. Kerumitan sistem akuifer di CAT Jakarta serta pemetaan geologi yang belum menyeluruh membuat pendeskripsian letak akuifer secara tepat dan rinci sulit dilakukan. Dalam pengembangan rencana pemanfaatan ruang yang lebih konkret, kajian lebih lanjut mengenai daerah yang terdampak perlu

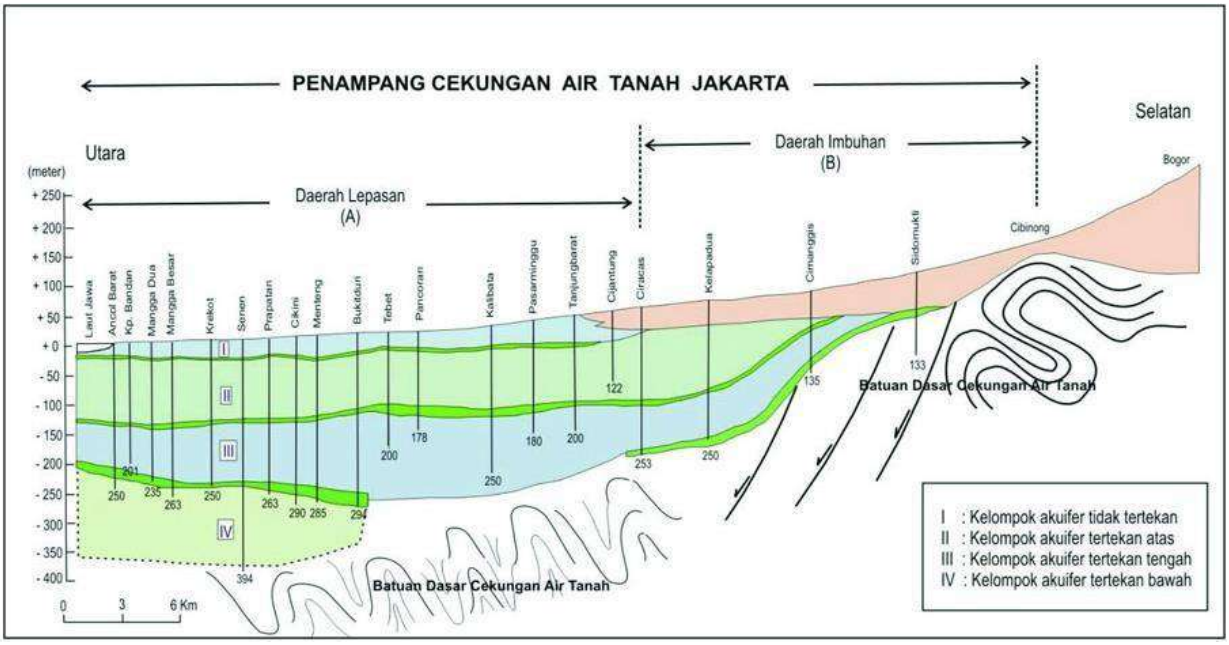

dilakukan untuk menghindari dampak negatif terhadap kondisi akuifer CAT Jakarta.

Gambar 3-15. Skema Sederhana Penampang Cekungan Air Tanah Jakarta dari Selatan ke Utara
Sumber: http://geomagz.geologi.esdm.go.id/air-tanah-dan-pembangunan-bawah-tanah-jakarta/

Sebagai cekungan air tanah yang terdapat di kawasan pantai, lapisan akuifer di Jakarta, terutama lapisan akuifer tidak tertekan, bersinggungan langsung dengan air laut di kawasan utara. Dalam keadaan alami, terdapat gradien hidrolik yang umumnya mengarah ke laut, sehingga air tawar dalam akuifer mengalir ke arah laut dan air laut tidak serta-merta masuk ke dalam lapisan akuifer. Hanya di daerah transisi, tempat persinggungan antara akuifer dan air laut, air tanah berubah menjadi air payau karena adanya proses pencampuran.

Potensi Air Tanah CAT Jakarta

Berdasarkan potensi tanah untuk menyimpan air, wilayah DKI Jakarta pada dasarnya memiliki potensi tinggi untuk menyimpan air tanah di akuifer dangkal. Selama pengambilan air tanah tidak melebihi tingkat regenerasinya, keberadaan air tanah dalam akuifer dangkal dapat terjaga. Namun, dengan semakin meningkatnya luas lahan yang terbangun dan yang dipadatkan, lahan yang mampu menyerap air hujan semakin sedikit sehingga tingkat regenerasi akuifer dangkal pun semakin menurun.

Menurut Seizarwati et al. (Seizarwati et al. 2017), potensi imbuhan air tanah dangkal di wilayah CAT Jakarta di tahun 2014 telah menurun drastis dibandingkan dengan kondisi tahun 1900 dan tahun 1990. Faktor utama penyebab penurunan potensi imbuhan ini adalah perubahan penggunaan lahan dari lahan tidak kedap menjadi lahan kedap. Pada tahun 1900 wilayah CAT Jakarta masih didominasi oleh lahan dengan potensi imbuhan > 750 mm/tahun, di tahun 1990 lahan potensi imbuhan > 750 mm/tahun hanya di kawasan timur dan selatan CAT Jakarta. Hasil perhitungan tahun 2014 menunjukkan potensi imbuhan air tanah semakin berkurang. Hampir seluruh wilayah CAT Jakarta telah didominasi oleh lahan kedap dengan potensi imbuhan < 250 mm/tahun. Gambar 3.7 menunjukkan persebaran potensi imbuhan air tanah dangkal CAT Jakarta pada tahun 1900, 1\990 dan 2014.

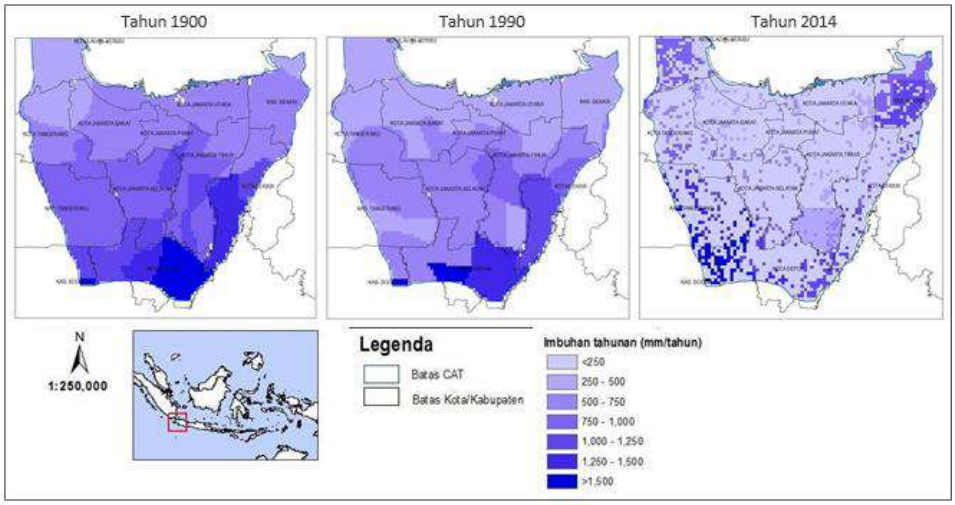

Gambar 3-16 Kondisi Potensi Imbuhan Air Tanah Dangkal CAT Jakarta Tahun 1900, 1990, 2014
Sumber: Seizarwati et al, 2017

Berbeda halnya dengan akuifer dalam, wilayah DKI Jakarta hampir secara keseluruhan merupakan daerah lepasan air tanah dalam. Penelitian yang dilakukan oleh Delinom (Delinom 2008) menunjukkan bahwa daerah imbuhan akuifer tertekan baru dapat ditemukan di batas selatan DKI Jakarta (lihat juga Gambar 3.5 dan Gambar 3.6). Adanya lapisan akuitar yang menjadi pembatas atas akuifer tertekan menyulitkan air hujan untuk bisa masuk ke lapisan akuifer tersebut. Simulasi yang dilakukan oleh Djaeni dan Schmidt et al (Djaeni et al. 1986; Schmidt et al. 1990) juga menunjukkan rendahnya tingkat regenerasi akuifer tertekan yang terjadi dalam wilayah DKI Jakarta. Konduktivitas vertikal akuifer tertekan hanya mencapai 0,02% dari konduktivitas horizontal rata-rata yang berkisar 1,3 m/hari, sehingga regenerasi air tanah dalam di kawasan DKI Jakarta dapat dikatakan hampir tidak terjadi. Sementara, regenerasi air tanah dalam dari kawasan imbuhan di selatan diperkirakan mencapai sebesar 15 juta m^3/tahun (Djaeni et al. 1986; Geyh und Söfner 1989; Schmidt et al. 1990).

Hidrologi

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, wilayah daratan DKI Jakarta terletak dalam Wilayah Sungai (WS) Ciliwung-Cisadane, sedangkan wilayah Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai Wilayah Sungai Kepulauan Seribu.

WS Ciliwung-Cisadane merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang pengelolaannya berada di bawah wewenang dan tanggung jawab Menteri, namun dapat ditugaskan kepada pengelola sumber daya air kawasan. Sementara WS Kepulauan Seribu merupakan wilayah sungai dalam satu kabupaten yang kewenangan pengelolaannya seharusnya jatuh kepada Bupati. Namun, karena kewenangan otonomi DKI Jakarta berada di tingkat provinsi, maka tanggung jawab pengelolaan jatuh kepada Gubernur.

Wilayah Sungai yang termasuk dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi lagi menjadi beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Berdasarkan Data DAS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, WS Kepulauan Seribu terbagi menjadi 106 DAS dan WS Ciliwung-Cisadane yang ada dalam wilayah daratan DKI Jakarta terbagi menjadi 9 DAS. Daerah Aliran Sungai yang terdapat dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta dirinci dalam Tabel 3-6. dan Gambar 3-17.

Tabel 3-6. Nama Daerah Aliran Sungai dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta

DAS di Wilayah Sungai Kepulauan Seribu			
1	Pulau Tidung Besar	54	Pulau Bokor
2	Pulau Pari	55	Pulau Pabelokan Besar
3	Pulau Sebaru Besar	56	Pulau Panggang
4	Pulau Rambut	57	Pulau Pelangi
5	Pulau Untung Jawa	58	Pulau Pantara Timur

6	Pulau Bira Besar	59	Pulau Jukung
7	Pulau Panjang Besar	60	Pulau Rengat
8	Pulau Genteng Besar	61	Pulau Melinjo
9	Pulau Damar Besar	62	Pulau Pantara Barat
10	Pulau Lancang Besar	63	Pulau Opak Besar
11	Pulau Payung Besar	64	Pulau Kelapa 2
12	Pulau Kelapa 1	65	Pulau Putri Barat
13	Pulau Penjaliran Barat	66	Pulau Tengah
14	Pulau Kotok Besar	67	Pulau Jagung
15	Pulau Pramuka	68	Pulau Bira Kecil
16	Pulau Penjaliran Timur	69	Pulau Onrus
17	Pulau Laki	70	Pulau Karya
18	Pulau Melintang Besar	71	Pulau Papatheo
19	Pulau Tidung Kecil	72	Pulau Nyamplung
20	Pulau Lancang Kecil	73	Pulau Putri Timur
21	Pulau Pamegaran	74	Pulau Melintang Kecil
22	Pulau Sebaru Kecil	75	Pulau Semut Besar
23	Pulau Satu	76	Pulau Kaliage Besar
24	Pulau Sepa Barat	77	Pulau Bidadari
25	Pulau Yu Timur	78	Pulau Anyer
26	Pulau Bunder	79	Pulau Ayer
27	Pulau Peniki	80	Pulau Macan Besar Matahari
28	Pulau Kelor Timur	81	Pulau Lipan
29	Pulau Karang Beras 2	82	Pulau Yu Barat
30	Pulau Tongkeng	83	Pulau Genteng Kecil
31	Pulau Kelapa Dua	84	Pulau Panjang
32	Pulau Cina	85	Pulau Kotak Kecil
33	Pulau Burung	86	Pulau Kayangan
34	Pulau Kongsi	87	Pulau Peteloran Barat
35	Pulau Perak	88	Pulau Opak Kecil
36	Pulau Kelor Barat	89	Pulau Tikus
37	Pulau Sepa Timur	90	Pulau Kayu Angin Bira
38	Pulau Bulat	91	Pulau Kongsi Timur
39	Pulau Gosong Rengat	92	Pulau Damar Kecil
40	Pulau Rose	93	Pulau Kayu Angin Puteri
41	Pulau Karang Bongkok	94	Pulau Semak Daun
42	Pulau Panjang Kecil	95	Pulau Semut Kecil
43	Pulau Kelor	96	Pulau Kongsi Tengah
44	Pulau Gosong Pramuka	97	Pulau Macan Kecil
45	Pulau Belanda	98	Pulau Kaliage Kecil
46	Pulau Kayuangin Melintang	99	Pulau Gosong Sekati
47	Pulau Gosong Congkak	100	Pulau Karang Beras 1
48	Pulau Gudus Tinggi	101	Pulau Semut
49	Pulau Perawan	102	Pulau Genteng
50	Pulau Macan Gundul	103	Pulau Kapas 1
51	Pulau Payung Kecil	104	Pulau Nyamuk Kecil
52	Pulau Gosong Keroya	105	Pulau Laga
53	Pulau Pari 1	106	Pulau Peteloran Timur
DAS Di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane			
1	Cisadane		
2	Kali Angke Pesanggrahan		
3	Ciliwung		
4	Kali Krukut		
5	Kali Sunter		
6	Kali Cakung		
7	Kali Buaran		
8	Pulau Reklamasi 1		
9	Pulau Reklamasi 2		

Sumber: Permen PUPR nomor 04/PRT/M/2015 dan Data DAS KLHK

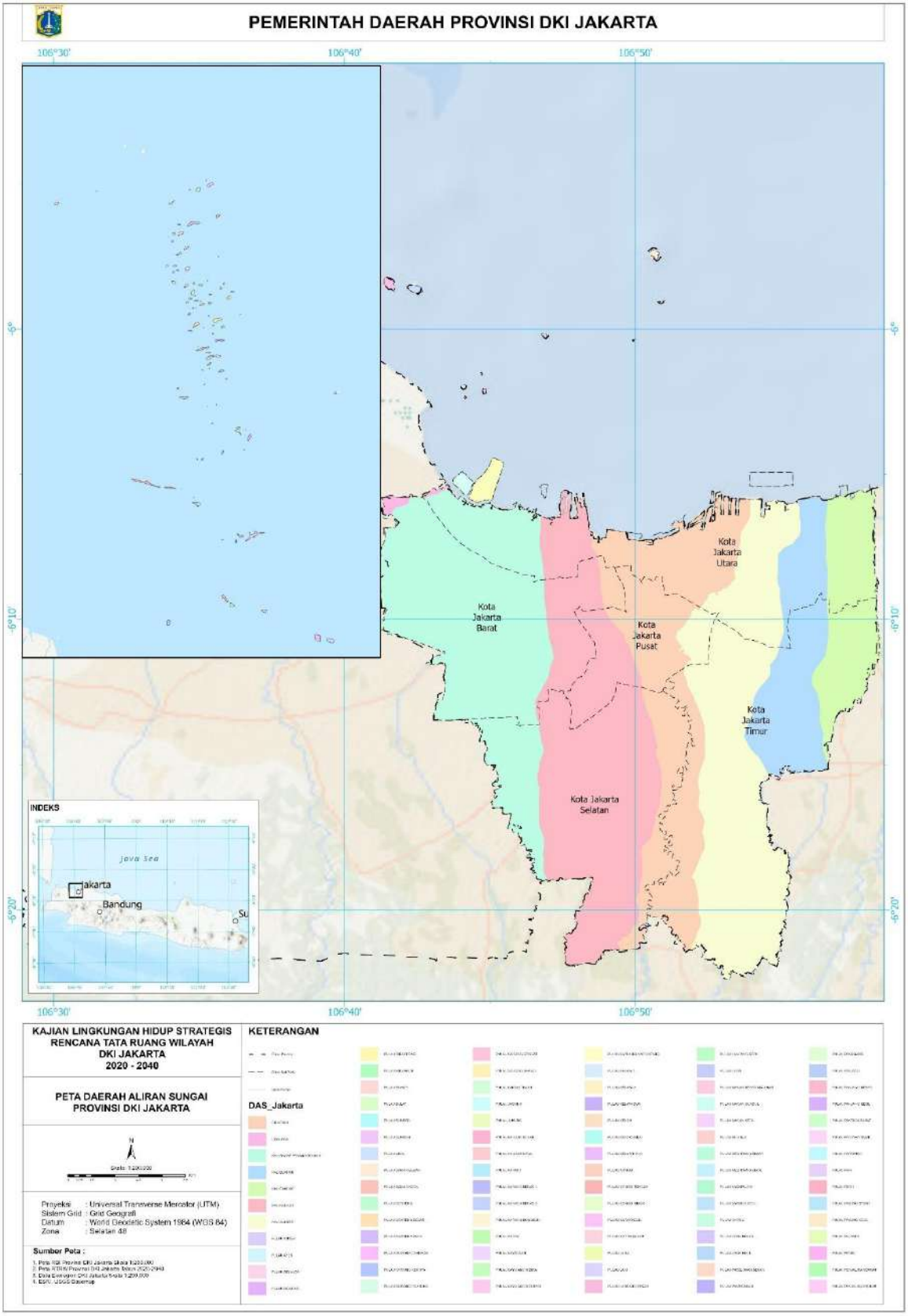

Gambar 3-17. Daerah Aliran Sungai dalam WS Kepulauan Seribu dan WS Ciliwung-Cisadane

Sumber: Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015

Terdapat 13 sungai lintas provinsi yang mengalir di wilayah Jakarta. Sungai-sungai ini membawa air dari daerah hulu ke daerah hilir di Teluk Jakarta. Ketiga belas sungai tersebut yaitu Ciliwung, Kali baru Barat, Kali baru Timur, Krukut, Cipinang, Sunter, Grogol, Pesanggrahan, Angke, Mookervart, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Selain ketiga belas sungai ini terdapat banyak anak-anak sungai yang lebih kecil dan beberapa kanal buatan yang mengalir dalam wilayah daratan Jakarta. Informasi mengenai 13 sungai besar dan beberapa saluran makro lainnya dapat dilihat dalam Tabel 3-7.

Secara alami, dataran rendah Jakarta merupakan dataran banjir bagi sungai-sungai besar yang ada, sehingga kerawanan terhadap banjir bukanlah hal yang baru. Sungai-sungai besar di Jakarta secara alami akan meluap dan menggenangi daerah sekitarnya bila curah hujan di wilayah hulu sungai maupun dalam wilayah DKI Jakarta sedang tinggi. Peningkatan pemanfaatan lahan di kawasan rawan banjir yang tidak memperhatikan kondisi alami inilah yang menyebabkan permasalahan banjir yang dihadapi Jakarta tiap tahunnya. Selain itu, peningkatan intensitas guna lahan dan penutupan lahan dengan lapisan kedap air semakin memperparah kerawanan banjir karena air limpasan yang seharusnya dapat diserap oleh tanah mengalir di permukaan.

Tabel 3-7.Tiga Belas Sungai Lintas Provinsi Dan Beberapa Saluran Makro Yang Berada Di Wilayah DKI Jakarta

No.	Sungai/Kanal	Panjang (km)	Luas permukaan (ha)	Kedalaman (m)	Debit aliran (m^3/set)	Peruntukan Sungai*
1	Ciliwung	46,2	115,5	2,4	28 - 62	Usaha Perkotaan
2	Kali Grogol	23,6	16,5	-	-	Perikanan
3	Sunter	37,25	108	-	-	Usaha Perkotaan
4	Krukut	28,75	17,25	1,1	4,6 -14	Air Baku Air Minum
5	Cakung	20,7	41,4	1,1	4,6 -14	Usaha Perkotaan
6	Kali baru Timur	39,2	39,3	0,85	2,3 - 3,7	Usaha Perkotaan
7	Kali baru Barat	17,7	17,7	0,45	0,02 - 2,2	Air Baku Air Minum
8	Kali Angke	12,81	53,8	2,2	7,4 – 27	Usaha Perkotaan
9	Kali Pesanggrahan	27,3	25,5	2,6	10 - 22	Perikanan
10	Cipinang	27,35	46,5	1,4	3,3 - 3,5	Usaha Perkotaan
11	Buaran	7,9	15,8	1,3	0,4 - 5,9	Usaha Perkotaan
12	Mookervart	7,3	23,4	2,34	1,3 - 2,5	Air Baku Air Minum
13	Jati Kramat	3,8	1,9	-	-	Usaha Perkotaan
14	Banjir Kanal Barat	12,85	77,1	-	-	Usaha Perkotaan
15	Banjir Kanal Timur	23	138	-	-	Perikanan
16	Cengkareng Drain	7,6	38	-	-	Usaha Perkotaan
17	Cakung Drain	11,2	67,2	-	-	Usaha Perkotaan
18	Kali Cideng	17,8	28,5	-	-	Usaha Perkotaan
19	Ancol	8,3	24,1	-	-	Usaha Perkotaan
20	Sekretaris	12,6	8,8	-	-	-

*Berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 582 tahun 1995

Sumber: Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2030 (2011), BPS Jakarta Dalam Angka 2017, Dokumen IKPLHD DKI Jakarta 2016

Dari data sungai yang tersedia tampak bahwa sungai-sungai besar di Jakarta termasuk dangkal dengan kedalaman rata-rata tidak lebih dari 2,5 m. Penyebab pendangkalan utama adalah tingginya tingkat sedimentasi lumpur yang terbawa dari daerah hulu. Selain itu, sampah dan air limbah yang dibuang secara sembarangan ke dalam badan sungai juga merupakan salah satu faktor yang memperparah pendangkalan. Akibatnya, kapasitas tampung dan kapasitas aliran sungai menurun.

Upaya normalisasi dan pembersihan sungai dan kanal yang dilakukan secara teratur di beberapa tahun terakhir telah mampu meningkatkan kembali kapasitas sungai yang ada. Sayangnya, tidak ada pendataan secara menyeluruh mengenai kapasitas tampung maupun kapasitas aliran dari saluran drainase yang ada, sehingga sulit untuk menyebutkan besarnya peningkatan kapasitas tampung setelah dilaksanakan normalisasi dan pembersihan tersebut.

Dalam kondisi hujan lebat, kapasitas sungai dan kanal yang ada untuk mengalirkan air ke laut dapat terlampaui sehingga limpasan air hujan tidak cukup cepat dapat dialirkan dan sungai pun meluap. Oleh karena itu, keberadaan wadah parkir air (retention basin) sangat diperlukan untuk menampung limpasan air hujan dan mengurangi beban kanal dan sungai secara sementara. Wadah parkir air tersebut dapat berupa waduk, situ maupun embung.

Wadah parkir air yang selalu digenangi air juga dapat memiliki fungsi lainnya, seperti fungsi sebagai penampung air cadangan (reservoir) di masa kering, sehingga ketersediaan sumber daya air tetap terjaga. Keberadaan wadah air terbuka juga mempengaruhi suhu ambien di sekelilingnya karena air mampu menyerap panas lebih besar dibandingkan dengan permukaan jalan, gedung ataupun tanah, sehingga dapat menjadi penyeimbang suhu perkotaan. Kawasan sekitar wadah parkir air yang ditata dengan baik juga dapat menjadi lokasi rekreasi masyarakat dan penyangga ekosistem kota. Dari data yang diperoleh, diketahui terdapat 58 wadah tampungan air yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta, sebagaimana terlihat pada Tabel 3-8. Selain 58 wadah parkir air permanen ini, terdapat sekitar 23 lokasi rencana pengembangan waduk baru.

Tabel 3-8 Wadah Parkir Air Eksisting Dan Luasnya

No	Nama Waduk/Situ/Parkir Air	Luas (ha)	No	Nama Waduk/Situ/Parkir Air	Luas (ha)
Jakarta Selatan			Jakarta Utara		
1	Babakan	32	1	Cendong	
2	Bonbin Ragunan	10	2	Don Bosco	2
3	Mangga Bolong	13	3	Kemayoran	11,3
4	Pancoran / MBAU	2	4	Muara Angke	0,5
5	Pertanian	3,7	5	Pegangsaan Dua	2,1
6	Ragunan 1	11	6	Pluit	80
7	Ragunan 2	4,5	7	Rawa Kendal	27,5
8	Setiabudi Barat	4	8	Sunter Selatan	4,3
9	Setiabudi Timur	4	9	Sunter Timur 3	13
10	Sigura-gura	1	10	Sunter Timur 1 A	7
11	TMP Kalibata	0,5	11	Sunter Timur 1 B	8
12	UI	7	12	Sunter Utara	32
13	Walikota Jakarta Selatan		13	Teluk Gong	2,1
Jakarta Timur			Jakarta Pusat		
1	Aneka Elok	3,8	1	Lembang	1
2	Ceger Bambu Apus	2,1	2	Melati	3,5
3	Ceger TMII		3	Taman Ria Senayan	6
4	Cibubur Baru	8	Jakarta Barat		
5	Cilangkap 1 (Agrowisata)	4,7	1	Cengkareng	2
6	Cilangkap 2 (Kebun Bibit)	6,4	2	Grogol	2,4
7	Cimanggis	4,7	3	Hankam	1
8	Halim I	7	4	Jelambar	1,5
9	Halim II	12	5	Kalideres	2
10	Munjul	5	6	KFT	2
11	Pacuan Kuda Pulo Mas	3,1	7	Rawa Kepa	0,5
12	Rawa Badung	4,8	8	Tomang	6
13	Rawa Dongkal	12	9	Wijaya kusuma	2,5
14	Rawa Gelam	3			
15	Rawa Kelapa Dua Wetan	4,5			
16	Rawa Penggilingan				
17	Rawa TMII	3			
18	Ria Rio	9			
19	Sunter Hulu	11			
20	Taman Modern	3,1			

Sumber: Naskah Akademis RTRW DKI 2030 (2011), Materi Teknis RDTR-PZ DKI Jakarta 2014, BPS 2017

Kondisi Kawasan Hutan dan Penggunaan/Penutupan Lahan

Kawasan Hutan

Melihat status dan kondisi Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan kota metropolitan sudah dapat disimpulkan bahwa status kawasan, didominasi oleh Areal Penggunaan Lain (APL) dengan luas 65,310.57 Ha. Namun luasan tersebut merupakan luas pada wilayah daratan, sedangkan DKI Jakarta juga memiliki wilayah Kepulauan dan juga wilayah laut, yang sebagian besar wilayah laut dan kepulauannya memiliki status sebagai kawasan pelestarian alam, yaitu Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu dengan luasan 104.080.96 yang menjadi luasan paling luas dalam status kawasan hutan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu untuk kawasan konservasi di wilayah DKI Jakarta, adalah Cagar Alam Pulau Bokor dengan luas 19.26 Ha, Suaka Margasatwa Muara Angke dan Suaka Margasatwa Pulau Rambut dengan luasan 188.09 Ha dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dengan luasan 102.06 Ha. Sedangkan untuk kawasan hutan lain di DKI Jakarta ada hutan lindung dengan luas 51.12 Ha dan hutan produksi seluas 158.74 Ha. Secara spasial, distribusi kawasan hutan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Jika melihat secara keseluruhan untuk wilayah Fungsional, kondisinya tidak jauh berbeda dengan wilayah administrasi DKI Jakarta, yaitu Areal Penggunaan Lain juga mendominasi dengan luas dengan luas 550,862.17 Ha yang melingkupi wilayah DKI Jakarta, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Bekasi. Untuk Kawasan hutan pada wilayah fungsional terdiri dari Kawasan lindung seluas 7.964,95 Ha yang berada pada wilayah pesisir DKI Jakarta, pesisir Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, Kawasan Hutan Produksi seluas 20.853,68 Ha di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 7.114,30 Ha di wilayah Kabupaten Bogor serta Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam seluas 29.177,18 Ha di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor. Dengan melihat secara keseluruhan wilayah fungsional, masih banyak terdapat Kawasan hutan dan Kawasan konservasi yang cukup luas yang berada pada wilayah hulu dari DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Kawasan hutan dan Kawasan konservasi tersebut dapat mendukung wilayah DKI Jakarta melalui kinerja jasa lingkungan untuk penyedia air dan pengaturan air. Untuk distribusi spasial Kawasan hutan yang berada pada wilayah fungsional dapat dilihat pada gambar di bawah ini

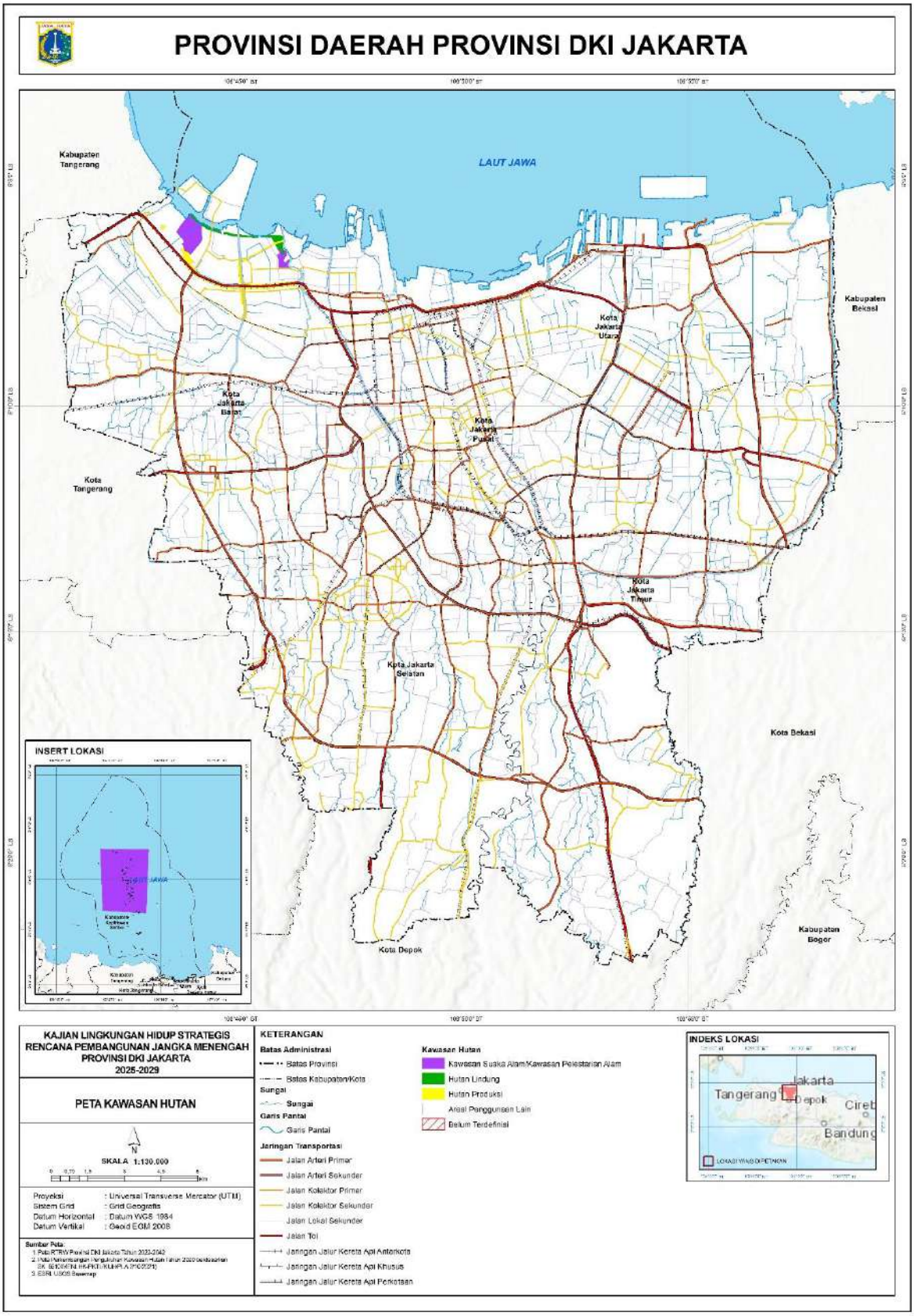

Gambar 3-18. Peta Kawasan Hutan Provinsi DKI Jakarta

Sumber: SK Menhut No. 220 Tahun 2000 dan SK MenLHK No. 6610 Tahun 2021

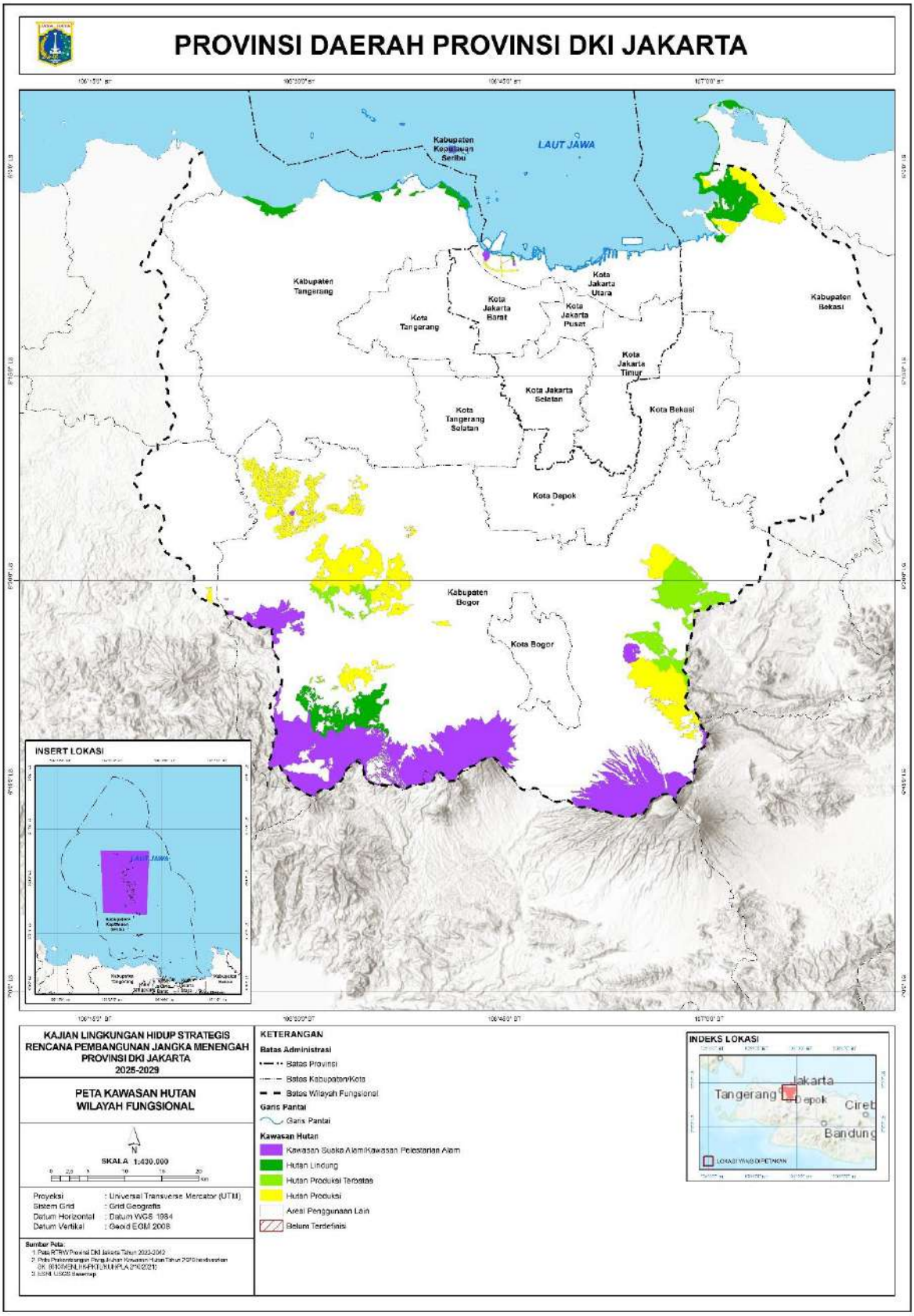

Gambar 3-19. Peta Kawasan Hutan Wilayah Fungsional

Sumber: SK Menhut No. 220 Tahun 2000 dan SK MenLHK No. 6610 Tahun 2021

Penutupan lahan

Pesatnya perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta ditandai dengan semakin luasnya lahan terbangun. Kecenderungan tersebut mengindikasikan ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Provinsi DKI Jakarta, pola perubahan penggunaan lahan dililustrasikan sejak tahun 1972 hingga 2014.

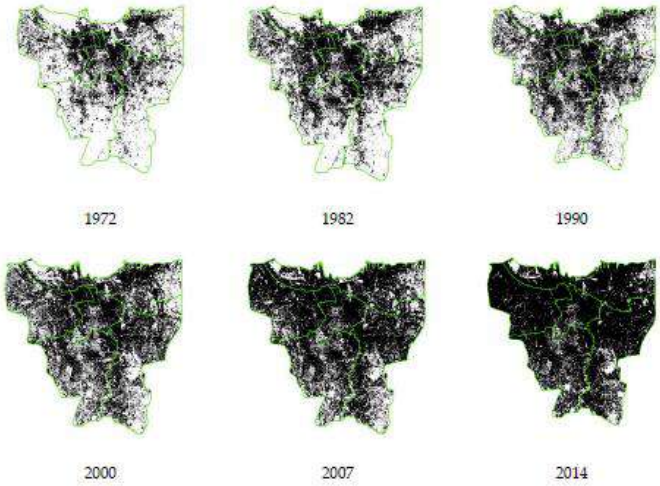

Gambar 3-20. Pola Perluasan Perkotaan Tahun 1972 - 2014

Ilustrasi pada gambar di atas, menunjukkan perluasan perkotaan (ditandai dengan warna hitam) yang cenderung semakin massif dan padat, lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun. Sebagai Daerah Khusus Ibukota, Jakarta memposisikan wilayahnya sebagai provinsi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya. Saat ini, populasi Jakarta telah berkembang menjadi lebih dari 10 juta, dari hanya sekitar 3 juta pada awal 1960-an. Seiring dengan pertumbuhan ini, DKI Jakarta telah mengalami ekspansi ruang yang luas.

Mencermati data spasial penggunaan lahan (penutupan lahan) pada tahun 2022, pemanfaatan lahan DKI Jakarta didominasi oleh penutupan permukiman sebesar 89,27% (59.182.09Ha). Lahan hunian termasuk *guest house*, paviliun, rumah, panti dan asrama. Terlihat dari peta penutupan lahan tahun 2020, menunjukkan seluruh wilayah DKI Jakarta dipenuhi dengan warna merah hitam yang merepresentasikan peruntukan permukiman semakin padat dan luas. Penggunaan lahan perkotaan telah meningkat sebesar 276% selama empat dekade terakhir, memanfaatkan 565 km^2 dari 674 km^2 ruang yang tersedia, yaitu lebih dari 83%.

Tabel 3-9 Kondisi Penutupan Lahan DKI Jakarta Tahun 2022

Penutupan Lahan	Luas (Ha)
Hutan Lahan Kering Sekunder	588.22
Hutan Mangrove Sekunder	544.88
Belukar	20.09
Savanna	351.83
Pertanian Lahan Kering	494.12
Pertanian Lahan Kering Campur	875.35
Sawah	2,328.80
Permukiman	188,135.92
Bandara/Pelabuhan	1,007.40
Lahan Terbuka	122.97
Tambak	299.80
Tubuh Air	568.02

Sumber: Data Penutupan Lahan KLHK Tahun 2022

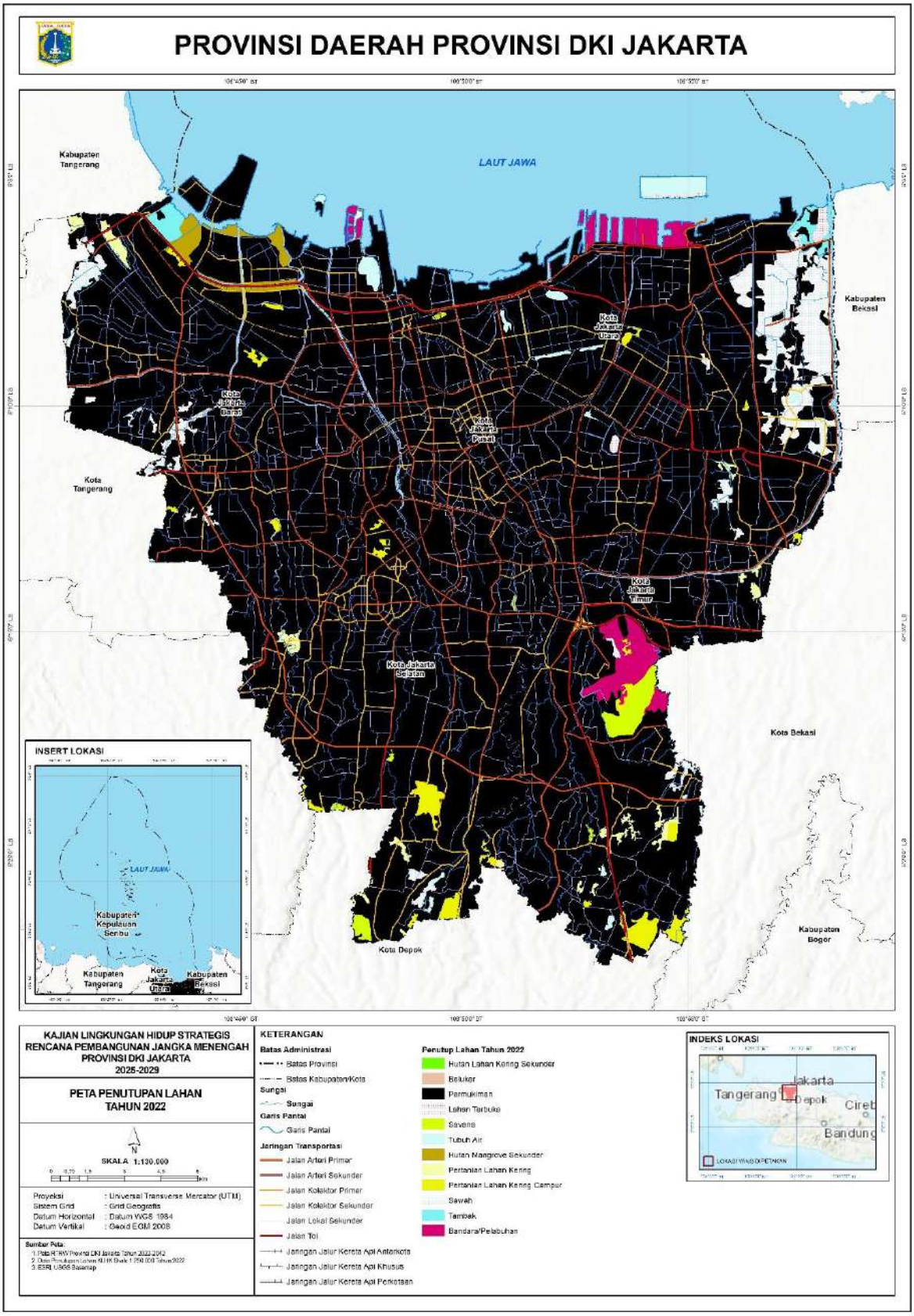

Gambar 3-21. Peta Penutupan Lahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
Sumber: KLHK, 2022

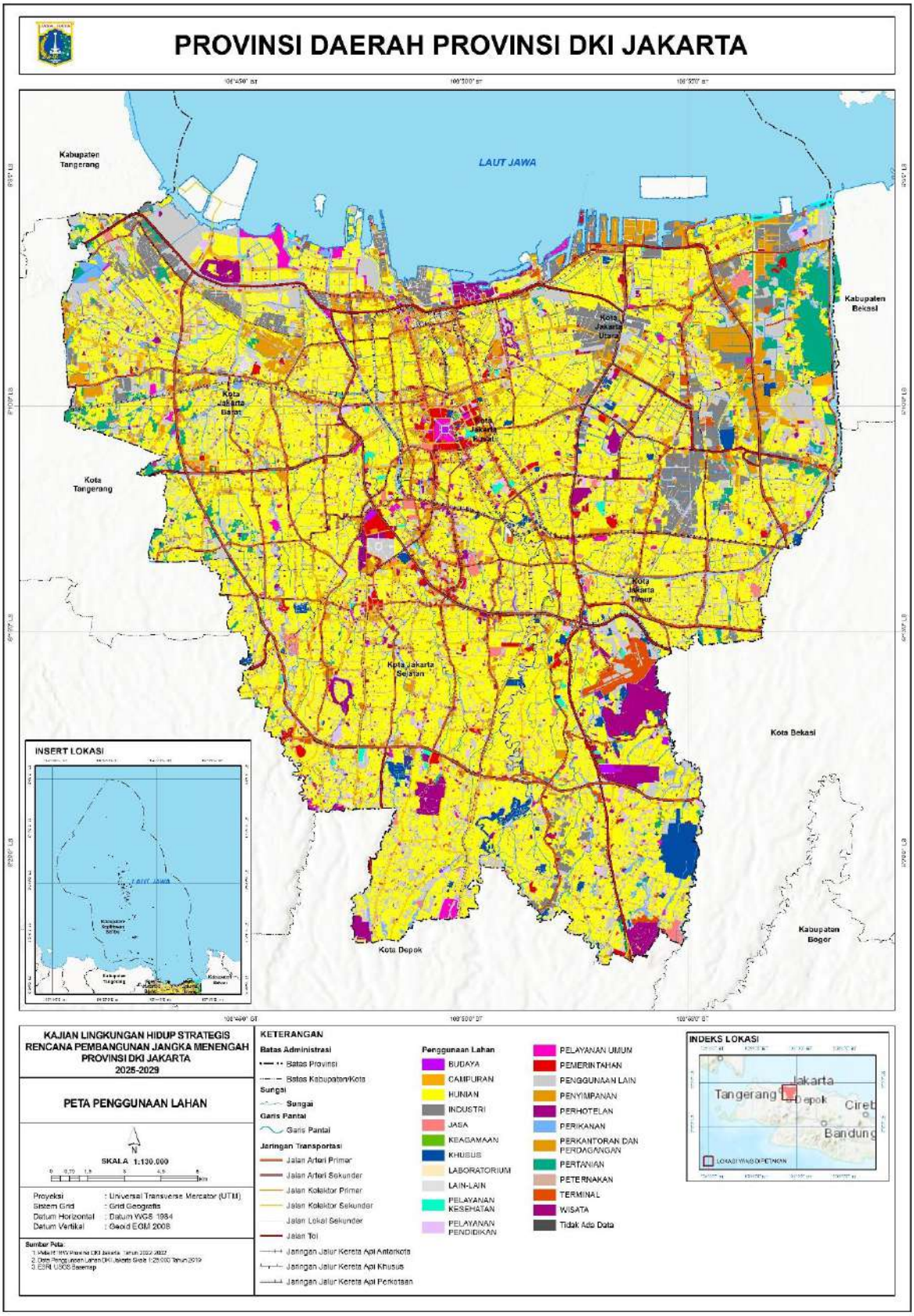

Gambar 3-22. Peta Penggunaan Lahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Sumber: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Karena pemanfaatan lahan yang sebagian besar digunakan untuk hunian, hampir dapat dipastikan bahwa DKI Jakarta tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi alam dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan air. Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas Lingkungan Hidup (hulu-hilir) dilakukan dengan upaya kebijakan kerja sama antar daerah dan upaya rekayasa teknologi.

3.1.2.2 Karakteristik Sosial Budaya

Demografi

Hingga saat ini, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi etalase Indonesia yang merepresentasikan keragaman etnis dan budaya nasional. Bahkan tidak sedikit pendatang internasional yang datang dan tinggal di DKI Jakarta. Ditinjau dari sejarah perkembangan kota, DKI Jakarta berawal dari sebuah Bandar kecil bernama Sunda Kelapa.[1] Selain itu, sudah sejak tahun 1964 DKI Jakarta berperan sebagai hub yang melayani penerbangan internasional.

Mempertimbangkan sejarah dan perkembangannya, walaupun Provinsi Jakarta nantinya tidak menjadi ibu kota NKRI lagi, diperkirakan Jakarta tetap menjadi magnet bagi para pendatang atau pengunjung. Arus urbanisasi masih akan terjadi walaupun tidak setinggi pada saat menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian serta budaya. Heterogennya penduduk yang tinggal di Jakarta menjadikan Provinsi Jakarta berpenduduk sangat majemuk dan lebih terbuka terhadap perubahan.

Pada tahun 2022 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.609.681 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sebanyak 5.375.869 jiwa atau 50,6% dari jumlah keseluruhan penduduk, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 5.304.082 jiwa atau 49,4%. Rincian perkembangan komposisi penduduk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3-10 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2022

No	Uraian	Tahun							
		2010	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Laki-laki	4.870.938	5.159.683	5.202.815	5.244.690	5.285.321	5.334.781	5.349.641	5.375.869
2	Perempuan	4.736.849	5.117.945	5.171.420	5.222.939	5.272.489	5.227.307	5.260.040	5.304.082
3	Jumlah	9.607.787	10.277.628	10.374.235	10.467.629	10.557.810	10.562.088	10.679.951	10.609.681
4	Pertumbuhan	1,42%	1,07%	1,05%	1,07%	1,19%	0,92%	0,57%	0,66%
5	Densitas (ribu jiwa/km^2)	13,157	15,517	15,663	15,804	15,900	15,907	15.978	16.084
6	Sex Ratio	102,83	100,8	100,61	100,42	100,24	102,06	101,53	101,35

Sumber: BPS, 2023

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Provinsi DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dengan kepadatan penduduk 16,08 ribu jiwa/km^2 di tahun 2022.

Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta menunjukkan dominasi penduduk usia produktif (15-64) sebagaimana terlihat pada gambar di bawah. Pada tahun 2020, penduduk usia produktif tercatat sebanyak 7.224.705 jiwa atau sebesar 68% dari total penduduk. Dengan struktur penduduk tersebut, angka ketergantungan (*dependency ratio*) DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar 46,2% yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta akan menanggung secara ekonomi sebesar 46,2 penduduk usia tidak produktif. Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dapat dilihat melalui piramida penduduk pada Gambar 3-23 berikut:

[1] Dikutip dari http://www.tamanmini.com/anjungan/anjungan-dki-jakarta

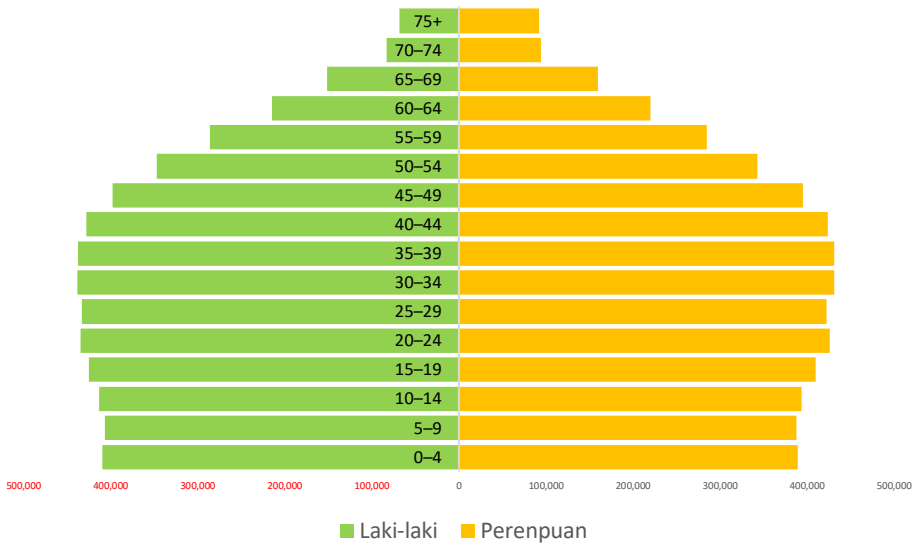

Gambar 3-23 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
Sumber: BPS DKI Jakarta

Tingkat Pendidikan dan Kesehatan

Pada tahun 2020, jumlah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Mengah Kejuruan (SMK) tidak mengalami perubahan yang berarti dibandingkan tahun sebelumnya. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan tingkat pendidikannya dijelaskan pada Gambar 3-24 di bawah ini.

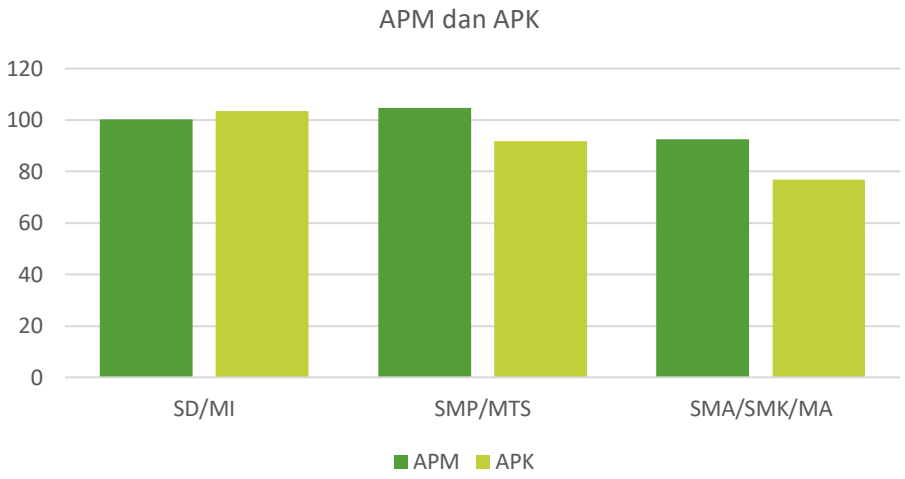

Gambar 3-24. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2022
Sumber: BPS, 2023

Secara lebih rinci perkembangan APM tahun 2020, 2021 dan 2022 untuk masing-masing tingkat pendidikan di masing-masing kota/ kabupaten di DKI Jakarta adalah sebagai berikut

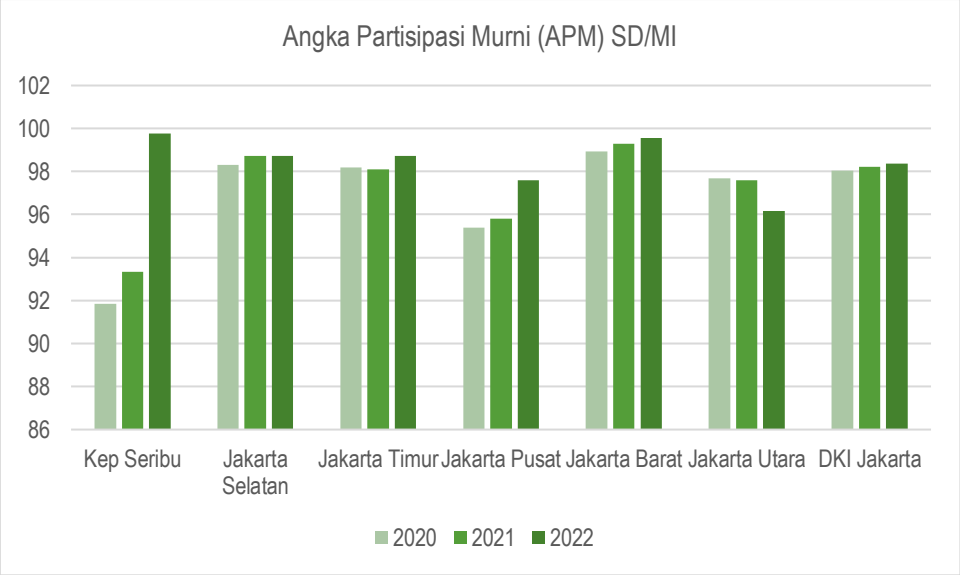

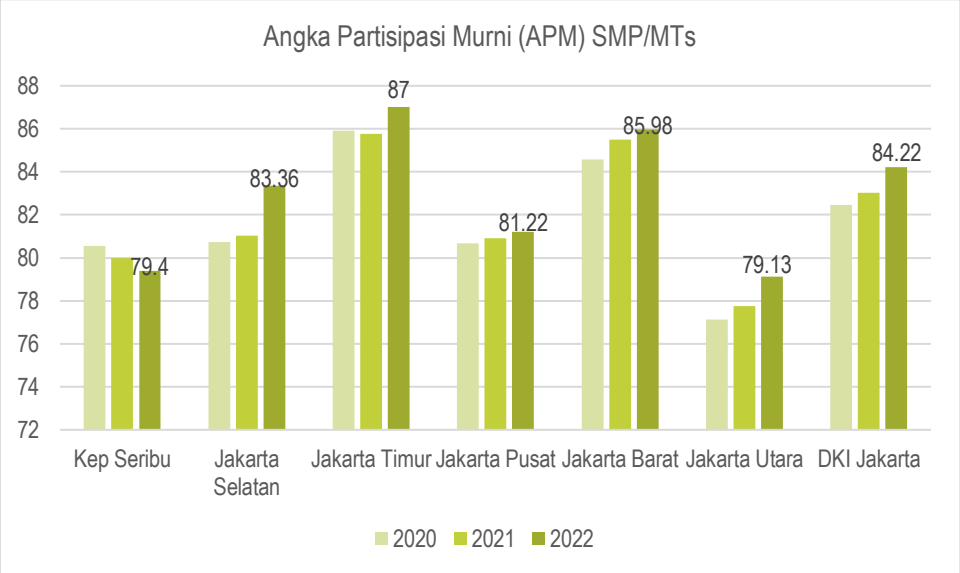

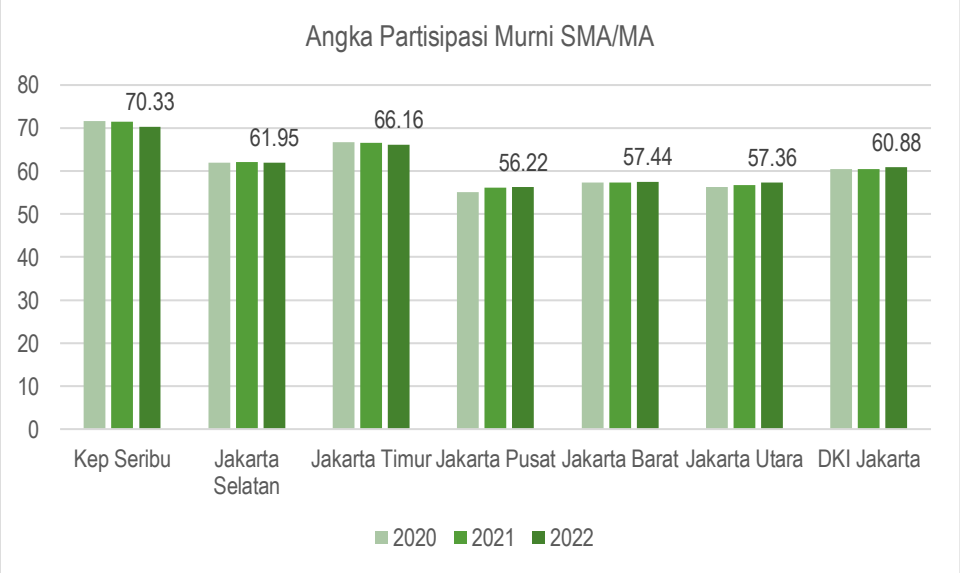

Gambar 3-25. Angka Partisipasi Murni 2020-2022 SD, SMP, SMA
Sumber: BPS 2023

Sementara itu, fasilitas kesehatan di DKI Jakarta mencakup 122 Rumah Sakit, 66 Rumah Sakit Bersalin, 227 Poliklinik dan 252 Puskesmas dengan rincian tiap Kabupaten/Kota Administratif sebagai berikut.

Tabel 3-11 Jumlah Fasilitas Kesehatan DKI Jakarta

No	Kab/Kota Administratif	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas
1	Kepulauan Seribu	1	–	-	6
2	Jakarta Selatan	37	24	58	63
3	Jakarta Timur	28	22	59	65
4	Jakarta Pusat	20	3	31	38
5	Jakarta Barat	20	9	48	49
6	Jakarta Utara	16	8	31	31
		122	66	227	252

Sumber: BPS, 2021

3.1.2.3 Karakteristik Kesejahteraan Masyarakat

Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tahun 2022 sebanyak 502.040 ribu orang. Kota administrasi Jakarta Utara merupakan wilayah dengan penduduk miskin terbanyak yaitu sebesar 133.73 ribu orang sedangkan Kepulauan Seribu merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit yaitu sebanyak 3,67 ribu orang. Namun demikian, Kepulauan Seribu dengan persentase penduduk miskin terbesar di Jakarta. Indikator kemiskinan lainnya yaitu indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di DKI Jakarta pada September tahun 2022 masing-masing sebesar 0,77 persen dan 0,19 persen.

Tabel 3-12. Angka Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
Kep Seribu	3.67	14.11
Jakarta Selatan	81.11	3.52
Jakarta Timur	126.63	4.3
Jakarta Pusat	44.72	4.9
Jakarta Barat	112.18	4.22
Jakarta Utara	133.73	7.24
Provinsi DKI Jakarta	**502.04**	**4.69**

Gambar 3-26. Angka Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2022
Sumber: BPS, 2023

Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Rasio

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 81,65 persen. DKI Jakarta masih menempati peringkat IPM tertinggi dari semua provinsi di Indonesia. Berikut ini disajikan IPM masing-masing Kabupaten dan kota Administratif.

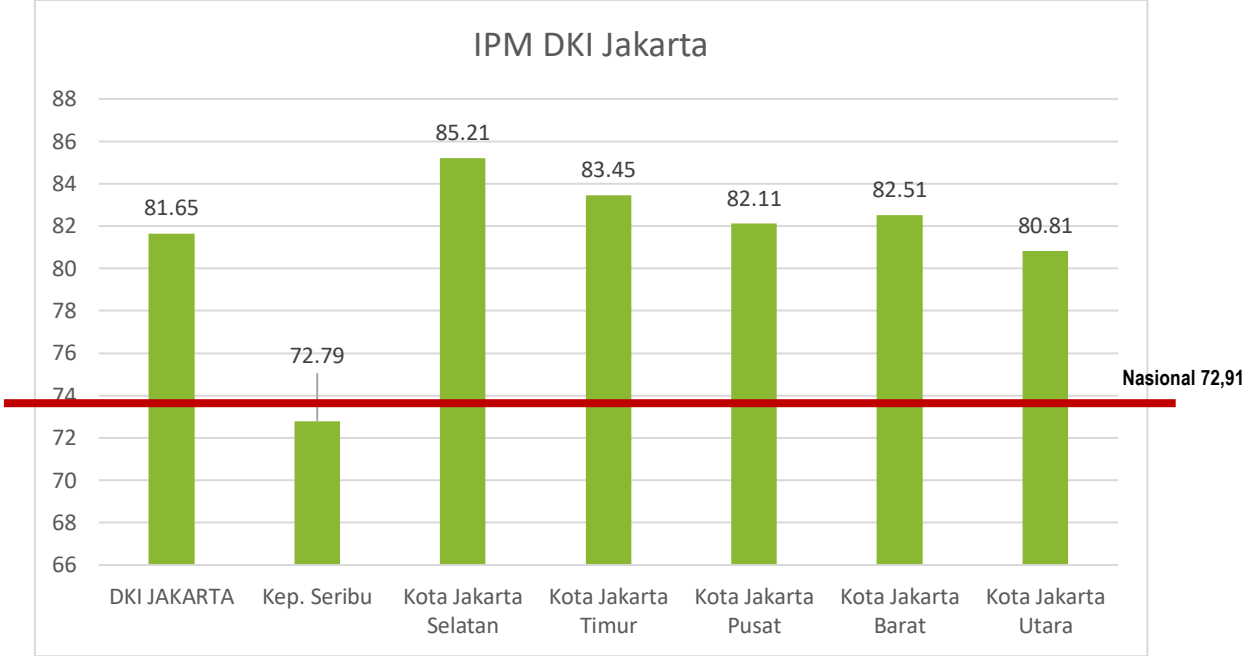

Gambar 3-27. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta 2022
Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini DKI Jakarta berada di level 0,412 pada September 2022. Rasio gini mendekati 0 mengindikasikan semakin terjadinya pemerataan pengeluaran. Sebaliknya jika mendekati 1, maka ketimpangan pengeluaran masyarakat di suatu wilayah semakin besar. Rasio gini di ibu kota naik 0,01 poin dari posisi September 2021 yang masih sebesar 0,41. Nilainya juga lebih tinggi dari posisi September 2020 yang sebesar 0,40. Sebelum terjadi pandemi Covid-19 atau Desember 2019, rasio gini di Jakarta tercatat sebesar 0,391. Turunnya daya beli serta rendahnya produktivitas di beberapa sektor seiring pemberlakuan pembatasan sosial berpengaruh terhadap pengeluaran masyarakat.

3.2 Kondisi Lingkungan Hidup

Gambaran kondisi lingkungan hidup di DKI Jakarta ditunjukkan melalui kinerja jasa lingkungan hidup, profil daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) dan area bernilai konservasi tinggi. Kinerja jasa lingkungan hidup mengidentifikasi jasa lingkungan yang relevan dengan kondisi DKI Jakarta yaitu penyedia air, pengaturan air, kualitas udara dan pengaturan mitigasi banjir. Ke-empat jasa lingkungan tersebut diinventarisir karena sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem di DKI Jakarta. Sementara itu, profil D3TLH hanya untuk penyedia air, hal ini sejalan dengan SK MenLHK No. 146/2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional.

3.2.1 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup

3.2.1.1 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup di Wilayah Fungsional

Berdasarkan analisa dan kajian yang dilakukan terhadap wilayah fungsional provinsi DKI Jakarta, terdapat 4 kinerja jasa lingkungan hidup yang berhasil diidentifikasi berdasarkan isu ketersediaan air, pengendalian bencana banjir dan kualitas udara di DKI Jakarta. Keempat jasa lingkungan hidup tersebut adalah:

1. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air
2. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air
3. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara

4. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Banjir.

Keempat jasa lingkungan hidup tersebut akan sangat mempengaruhi terhadap ketersediaan air, kualitas udara dan juga pengaturan air terhadap mitigasi banjir di DKI Jakarta dan wilayah fungsionalnya. Jasa lingkungan hidup ini dianalisis berdasarkan skala Nasional karena luas wilayah fungsional merupakan wilayah antar provinsi yang terdiri dari provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dapat dilihat secara spasial jasa lingkungan penyedia air dan pengaturan air didominasi oleh kelas sangat rendah sampai dengan sangat tinggi dengan rentang nilai indeks 0 – 5 untuk jasa lingkungan penyedia dan pengaturan air. Secara spasial distribusi indeks jasa lingkungan hidup penyedia air dan pengaturan air dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

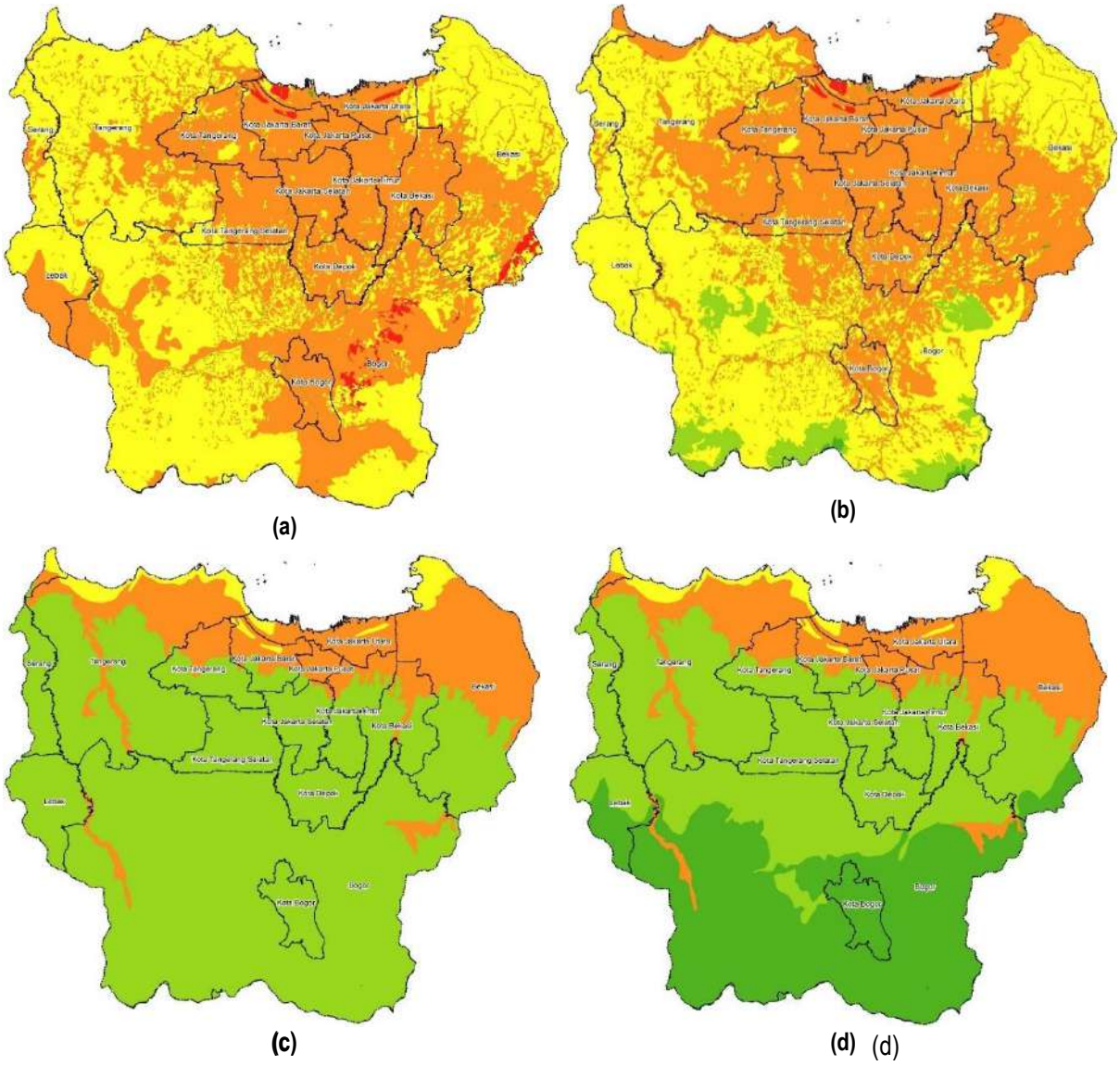

Gambar 3-28. Distribusi Spasial Jasa Lingkungan Penyedia Air (a), Pengaturan Air (b), Pengaturan Udara (c) dan Mitigasi Banjir (d) Wilayah Fungsional Tahun 2020

Sumber: Hasil Analisa, 2022

Sedangkan untuk jasa lingkungan pengaturan kualitas udara di wilayah fungsional DKI Jakarta, didominasi oleh kelas tinggi ±75% dari luasan total, yang menggambarkan bahwa kondisi lingkungan hidup eksisting dapat membantu dalam pengaturan udara, namun dengan syarat tidak boleh melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tidak merubah penutupan lahan yang ada diwilayah fungsional. Untuk jasa lingkungan hidup

pengaturan mitigasi banjir didominasi oleh kelas sangat tinggi diwilayah Kota dan Kabupaten Bogor, sedangkan untuk wilayah Jakarta didominasi oleh kelas tinggi menuju rendah. Hal tersebut berarti dapat diindikasikan bahwa wilayah Jakarta saat ini sangat bergantung pada wilayah hulu untuk memitigasi bencana banjir karena, melihat kondisi jasa lingkungan hidup di wilayah Jakarta mulai menuju ke angka rendah. Dari 4 jenis jasa lingkungan yang telah dipetakan, kinerja jasa lingkungan di wilayah fungsional dan sekitarnya dianalisis untuk mengetahui jasa lingkungan dominan di setiap wilayah sungai. Jasa lingkungan dominan dinilai dari perkalian antara luas satu unit spasial, yaitu luas wilayah sungai di wilayah fungsional dengan nilai indeks jasa lingkungan hidup. Dari hasil perkalian akan diperoleh satu nilai maksimum dari 4 jenis jasa lingkungan yang dihasilkan, dan nilai maksimum inilah yang menunjukkan jenis jasa lingkungan hidup yang dominan di setiap wilayah sungai.

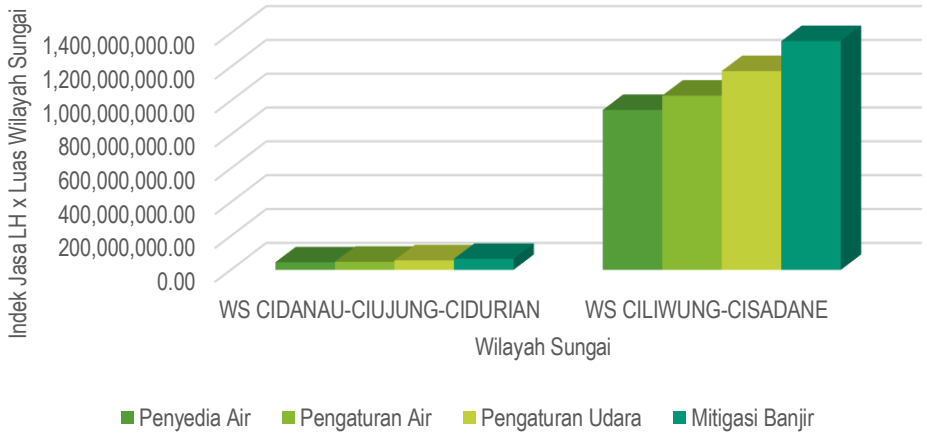

Gambar 3-29. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup di Wilayah Funggsional Tahun 2020
Sumber: Hasil Analisa, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dapat dilihat bahwa di Wilayah Sungai Cidanau Ciujung-Cidurian dan WS Ciliwung-Cisadane menunjukkan bahwa kinerja jasa lingkungan hidup yang paling dominan adalah jasa lingkungan hidup pengaturan mitigasi banjir. Untuk wilayah WS Ciliwung-Cisadane memiliki nilai kinerja jasa lingkungan hidup terbesar dibandingkan dengan WS Cidanau-Ciujung-Cidurian, karena wilayah WS Cidanau-Ciujung-Cidurian pada wilayah fungsional, memiliki luasan yang lebih kecil dibandingkan WS Ciliwung-Cisadane. Dengan nilai kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan mitigasi banjir yang dominan diwilayah fungsional, maka diindikasikan bahwa dengan status kinerja jasa lingkungan hidup saat ini, dapat memitigasi bencana banjir melalui pengaturan air yang tersedia diwilayah fungsional, dengan syarat tidak ada gangguan atau perubahan terhadap kondisi penutupan lahan yang ada di wilayah fungsional agar tidak menurunkan kinerja jasa lingkungan hidup eksisting.

3.2.1.2 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup di DKI Jakarta

Berdasarkan analisa yang dilakukan pada tahun 2020, identifikasi kinerja jasa lingkungan di wilayah provinsi DKI Jakarta akan menitikberatkan pada 4 jasa lingkungan hidup, yaitu: Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air, Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air, Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara, dan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir. Berikut penjelasan tentang kinerja jasa lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta.

A. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air DKI Jakarta menunjukkan dominasi kelas kinerja rendah (warna orange), sangat rendah (warna merah), dan sedang (warna kuning). Sebaran kinerja rendah membentang dari selatan hingga ke tengah wilayah Jakarta. Sementara, dari tengah hingga utara wilayah Jakarta didominasi oleh kinerja sangat rendah. Hal ini mengindikasikan fungsi penyediaan air di wilayah Jakarta secara keseluruhan memang sudah rendah. Wilayah yang berpotensi krisis terhadap penyediaan air berada

di area utara Jakarta. Tidak lain kondisi ini terjadi diakibatkan dari besarnya alokasi penggunaan lahan berupa permukiman/lahan terbangun. Meskipun memiliki akses air bersih, pada kenyataannya masyarakat di wilayah utara lebih memilih menggunakan air isi ulang karena kualitas air yang didistribusikan melalui perpipaan kurang memuaskan dengan debit yang terlalu kecil. Terlebih kualitas air tanahnya yang sudah tercemar berat di 9 kelurahan3 dalam lima kecamatan mencakup Kecamatan Cilincing, Koja, Pademangan, Tanjung Priuk dan Penjaringan.

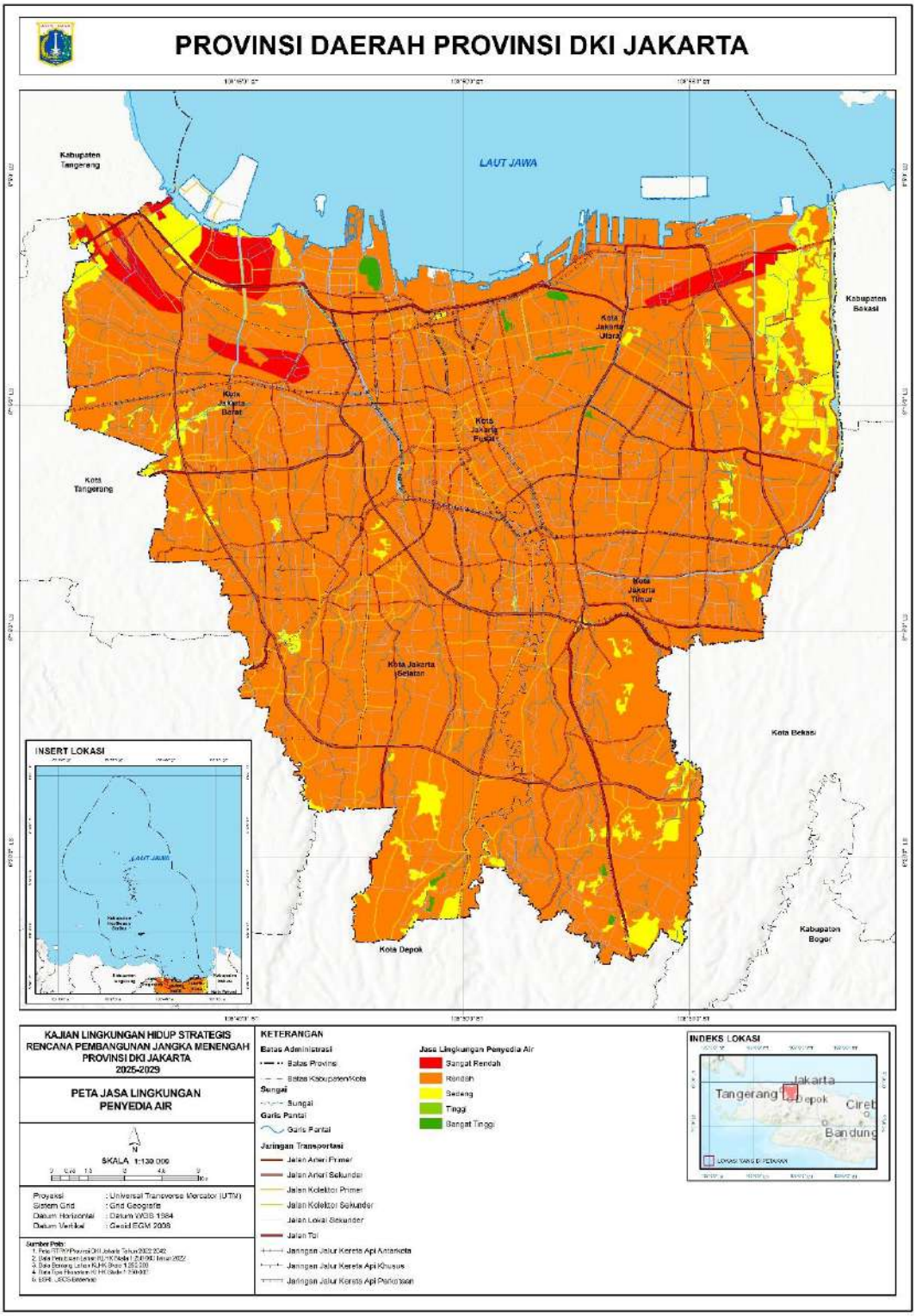

Gambar 3-30. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
Sumber: KLHK, 2022

B. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air kelas rendah (warna orange) mendominasi 86,17% wilayah DKI Jakarta. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air merupakan representasi fungsi tata air seperti untuk infiltrasi dan pelepasan air secara berkala. Infiltrasi berkaitan dengan fungsi peresapan, sementara pelepasan air berkaitan dengan fungsi tata alir air dan *discharge*. Dalam peta penggunaan lahan/pemanfaatan lahan skala detil tahun 2018, diperkirakan DKI Jakarta telah memanfaatkan 78% wilayahnya untuk pengembangan perkotaan sebagai lahan terbangun. Artinya, fungsi sebagai area resapan berkurang namun fungsi sebagai tata air melalui fasilitas drainase masih cukup baik. Meskipun sebagian besar wilayah DKI Jakarta dimanfaatkan sebagai lahan terbangun, tidak serta merta membuat kinerja pengaturan airnya pada kelas sangat rendah. Sebagian wilayah di perbatasan timur Jakarta menunjukkan kinerja tinggi dan sangat tinggi karena wilayah tersebut masih berupa sawah/kebun campur. Sementara itu, area sawah/kebun campur tersebut berpotensi akan mengalami alih guna lahan mengingat pola ruang di wilayah yang sama telah dialokasikan sebagai perumahan/permukiman. Tentu hal tersebut akan memicu penurunan kelas kinerja pengaturan air yang berdampak pada fungsi sediaan air.

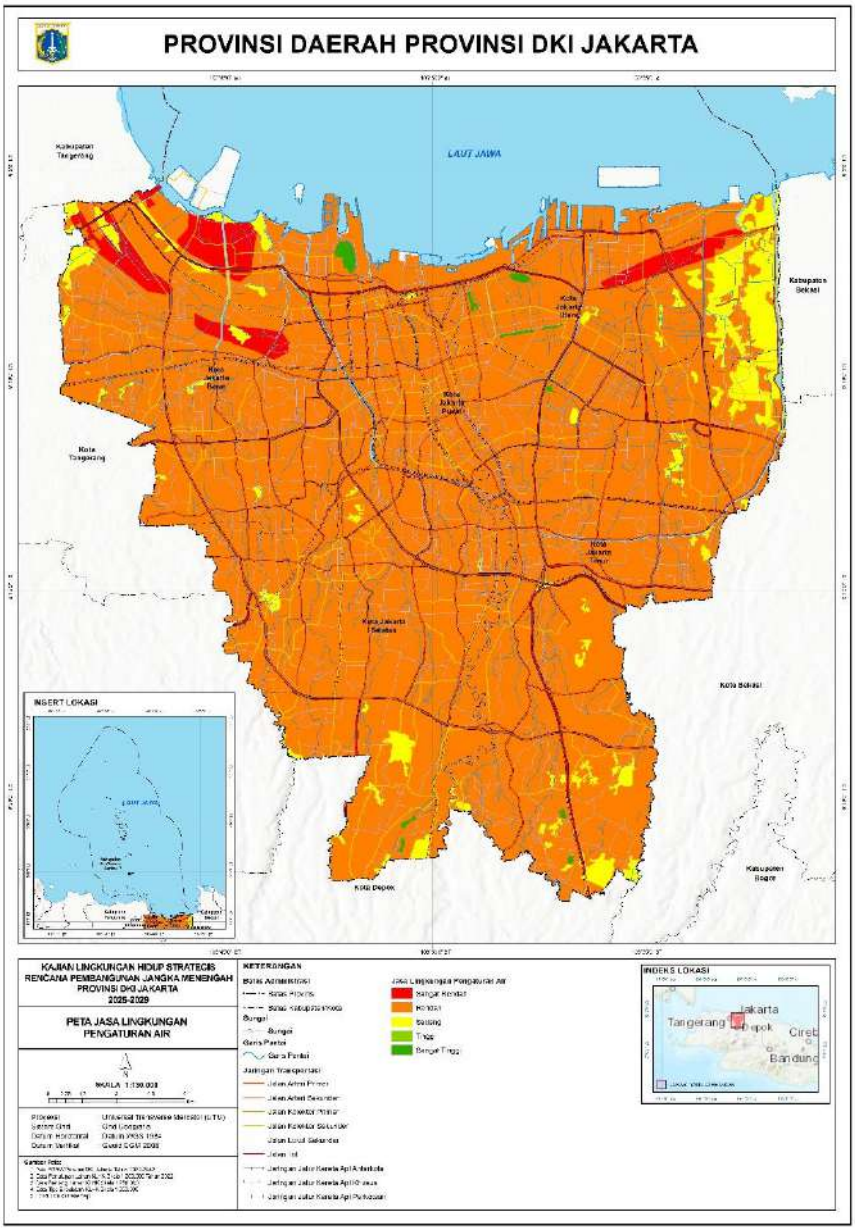

Gambar 3-31. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Sumber: KLHK, 2022

C. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara sangat erat kaitannya dengan ketersediaan ruang hijau. Ruang hijau ini dimaksudkan sebagai taman, hutan kota, hutan wisata, atau fungsi lain seperti kebun binatang atau taman makam. Keberadaan ruang-ruang tersebut menjamin teralokasinya sebagian wilayah untuk pertumbuhan tanaman, dalam rangka mendukung keberlangsungan siklus pemulihan kualitas udara secara alami. Pada kenyataannya, saat ini ruang penggunaan lain yang teralokasi untuk ruang hijau, danau, kebun, rawa, situ dan lainnya hanya 14,59% dari luas wilayah DKI Jakarta. Bahkan persentase luasan tersebut berpotensi menurun ke depannya karena rencana pola ruang DKI Jakarta hanya mengalokasikan 13,55% dari luas wilayah DKI Jakarta untuk ruang penggunaan lain.

Sejalan dengan pernyataan di atas, peta di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara DKI Jakarta didominasi kelas rendah (warna merah) dan tinggi (warna hijau). Sebaran kinerja rendah membentang pada wilayah utara Jakarta. Pada dasarnya, tipologi penutup lahan di wilayah utara adalah perumahan atau lahan terbangun terutama untuk peruntukan industri di wilayah utara, menyebabkan rendahnya jasa lingkungan pengaturan kualitas udara. Namun demikian, pada wilayah selatan terlihat bahwa kondisi tinggi mendominasi karena pada wilayah Selatan masih terdapat tutupan lahan hutan lahan kering sekunder walaupun sebarannya hanya Sebagian kecil pada wilayah Selatan namun sangat mempengaruhi kondisi jasa lingkungan pengaturan kualitas udara. Selain itu, keberadaan bentang alam, yang mana di bagian selatan lebih banyak berupa dataran fluviovulkanik dan fluvial juga mempengaruhi kinerja jasa lingkungan kualitas pengaturan udara.

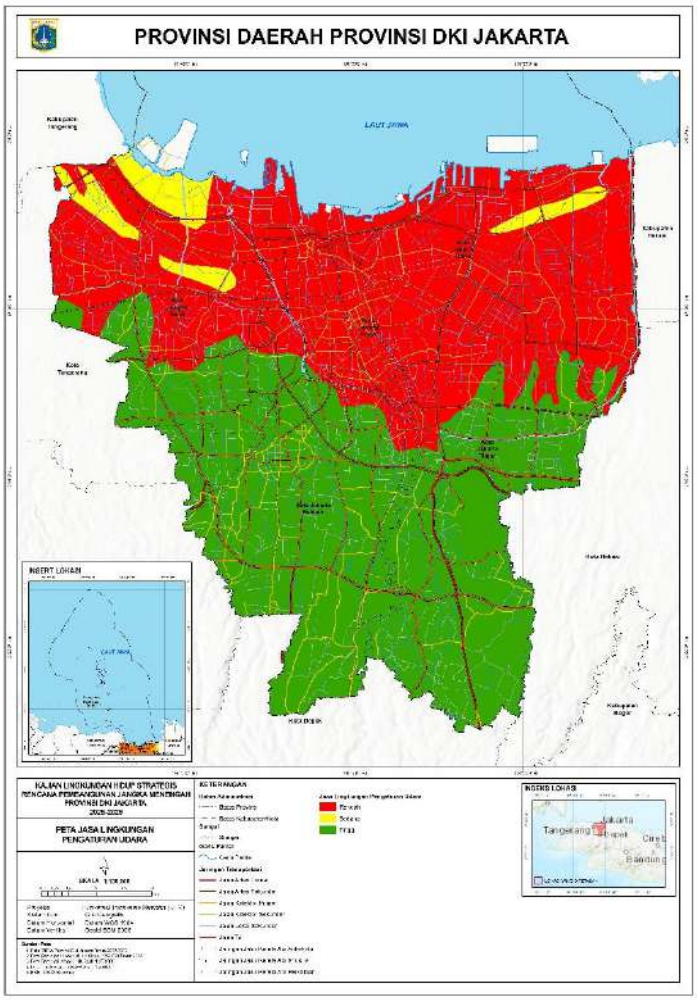

Gambar 3-32. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Sumber: Dokumen Kajian D3TLH Penyedia Air DKI Jakarta Tahun 2019

D. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Banjir

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir erat kaitannya dengan fungsi pengaturan air, namun lebih condong pada peran wilayah sebagai resapan. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir di DKI Jakarta juga didominasi kelas rendah (warna orange) dan sangat rendah (warna merah). Sebaran kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir sangat rendah menghampar di tengah dan sepanjang aliran sungai. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan tipologi bentang alam. Tipologi bentang alam berupa dataran fluvial landai, dataran fluvial sangat landai, dan dataran banjir merupakan dataran yang riskan terhadap luapan air sungai. Oleh karena itu, kinerja pengaturan mitigasi banjir pada wilayah ini dinilai sangat rendah. Berbeda halnya dengan wilayah selatan Jakarta, dataran fluviovulkanik menghampar di bagian selatan yang secara alami memiliki potensi resapan yang lebih baik dibandingkan tipologi dataran lain. Sebenarnya dataran fluviovulkanik ini dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai peresapan untuk mengurangi laju aliran air dari hulu ke hilir. Sayangnya, area selatan ini sudah teralihkan hampir merata untuk perumahan/lahan terbangun. Inilah yang menyebabkan nilai kinerja pengaturan mitigasi bencana banjir menjadi rendah.

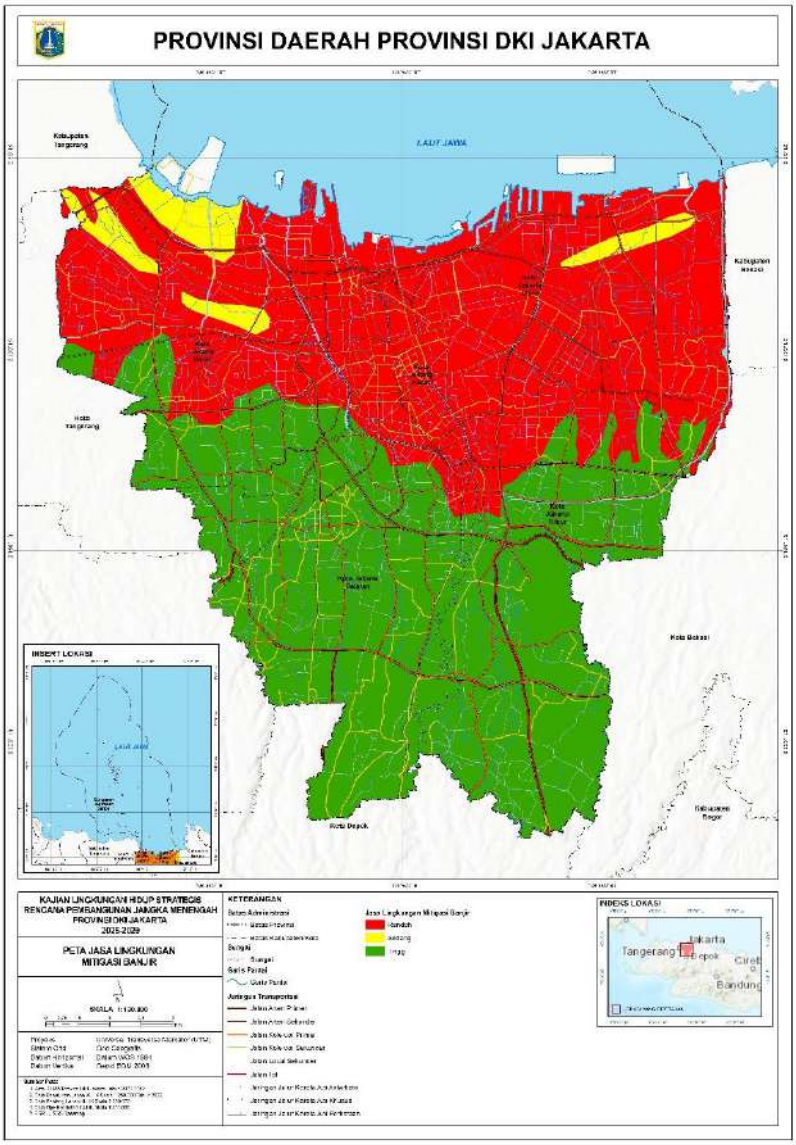

Gambar 3-33. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Sumber: Dokumen Kajian D3TLH Penyedia Air DKI Jakarta Tahun 2019

3.2.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

3.2.2.1 D3TLH Wilayah Fungsional (D3TLH Nasional)

Memahami kondisi lingkungan hidup suatu wilayah menjadi sangat penting terutama dalam hal melakukan perencanaan pembangunan dan evaluasinya. Sejak awal, Jakarta dijadikan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia agar dapat menjadi kota indoktrinasi, kota teladan dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia. Implikasi dari keputusan ini mengarahkan Jakarta sebagai sentral kegiatan nasional sehingga memiliki daya tarik migrasi masuk yang besar.

Perkembangan pemanfaatan lahan Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, bahkan terhitung pada tahun 2014 penggunaan lahan perkotaan telah meningkat sebesar 276% selama empat dekade terakhir, memanfaatkan 565 km^2 dari 674 km^2 ruang yang tersedia, yaitu lebih dari 83% (Garschagen, Matthias et.al, 2018). Hal ini secara langsung dan tidak langsung turut mempengaruhi kemampuan lingkungan hidup dalam memberikan fungsi dan manfaat kepada manusia. Tentunya kondisi tersebut dapat berimbas pada penurunan daya dukung lingkungan hidup di suatu wilayah.

Tekanan jumlah penduduk yang besar tentu akan berbanding lurus dengan upaya pemanfaatan sumber daya alam. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam seperti air bersih, pangan, dan lahan untuk bermukim. Dalam hal ini, DKI Jakarta memiliki keterbatasan ruang dan kebijakan yang dinamis untuk memenuhi kebutuhan dasar utamanya terkait air bersih dan pangan secara berkelanjutan. Bahkan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipandang secara politis dengan melibatkan banyak pihak dan daerah sekitarnya dalam rangka mewujudkan kesetimbangan daya dukung lingkungan hidup

Dalam rangka melakukan analisa daya dukung lingkungan hidup terhadap penyedia air, KLHS memanfaatkan hasil-hasil studi yang tersedia untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan cakupan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), DKI Jakarta memiliki keterikatan ekosistem dengan wilayah Bodetabek-Punjur. Selain berkaitan dengan wilayah Bodetabek-Punjur, wilayah Provinsi DKI Jakarta juga sangat bergantung pada Wilayah Sungai Citarum, karena sebagian besar ketersediaan air di Jakarta sangat bergantung pada kondisi ketersediaan air di WS Citarum (waduk Jatiluhur). Sehingga, walaupun wilayah fungsional DKI Jakarta hanya mencangkup dua wilayah sungai yaitu WS Cidanau-Ciujung-Cidurian dan WS Ciliwung-Cisadane, namun untuk melihat kondisi ketersediaan air perlu memperhitungkan kondisi ketersediaan WS Citarum, yang juga mempengaruhi ketersediaan air Jakarta.

Dapat dilihat dari gambar di bawah ini, ketersediaan air di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi 7 WD pada 3 wilayah sungai yaitu Wilayah Sungai Cidanau Ciujung-Cidurian, WS Ciliwung-Cisadane dan WS Citarum, yang mencakup lintas administrasi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Lima WD meliputi WD Cidanau-Ciujung-Cidurian, WD Ciliwung-Cisadane, WD Ciliwung, WD Cisadane Hulu Bendung Pasar Baru, WD Citarum Tengah dan WD Kepulauan Seribu. Data debit air dari KemenPU pada tahun 2016 menunjukkan WD Cisadane Hilir Bendung Pasar Baru memiliki ketersediaan air permukaan paling banyak (lihat Tabel 3-13).

Tabel 3-13 Jumlah Ketersediaan Air (m^3/tahun) pada wilayah fungsional DKI Jakarta Untuk Tiap WD

WD	Ketersediaan Air (m^3/tahun)
WD Cidanau-Ciujung-Cidurian	2.065.825.816
WD Ciliwung Cisadane	1.890.981.644
WD Ciliwung	1.650.778.439
WD Cisadane Hulu Bendung Pasar Baru	432.605.843
WD Kepulauan Seribu	2.678.700
WD Citarum Tengah	3.344.259.984
WD Citarum Hilir	1.890.981.644
Total Ketersediaan Air 6 WD	**10.586.690.442**

Sumber: KemenPU, 2016

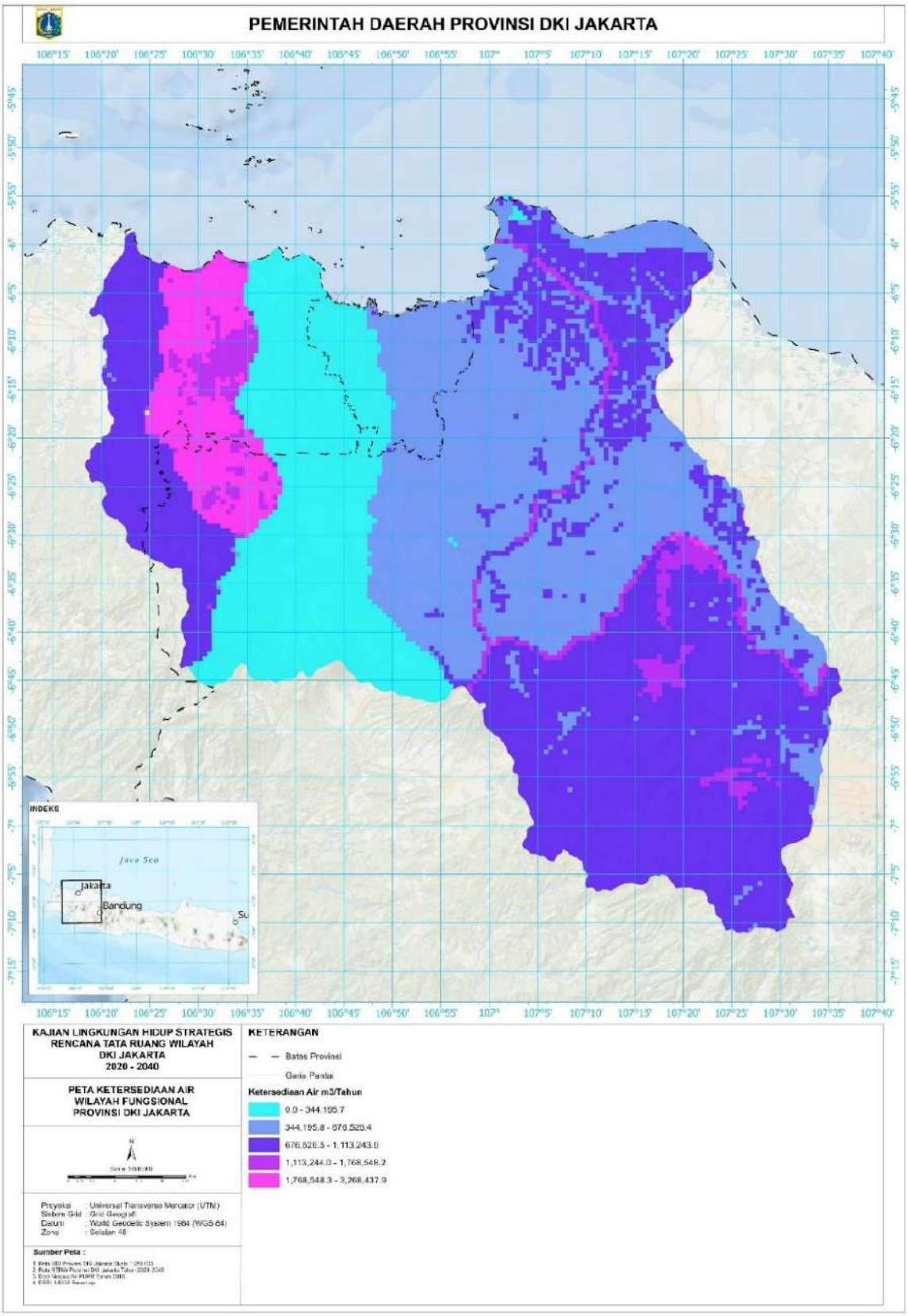

Gambar 3-34. Ketersediaan Air di Wilayah Fungsional Tahun 2020
Sumber: Hasil Analisa, 2022

Data di atas digunakan sebagai informasi dasar untuk membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air sehingga dapat diketahui dimana wilayah-wilayah yang diindikasikan telah melampaui daya dukung air. Metodologi

perhitungan daya dukung air memanfaatkan pendekatan jasa lingkungan hidup penyedia air dengan bantuan distribusi spasial sistem grid 30''x30'' dalam model *close system.* Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air, diperoleh hasil sebagai berikut:

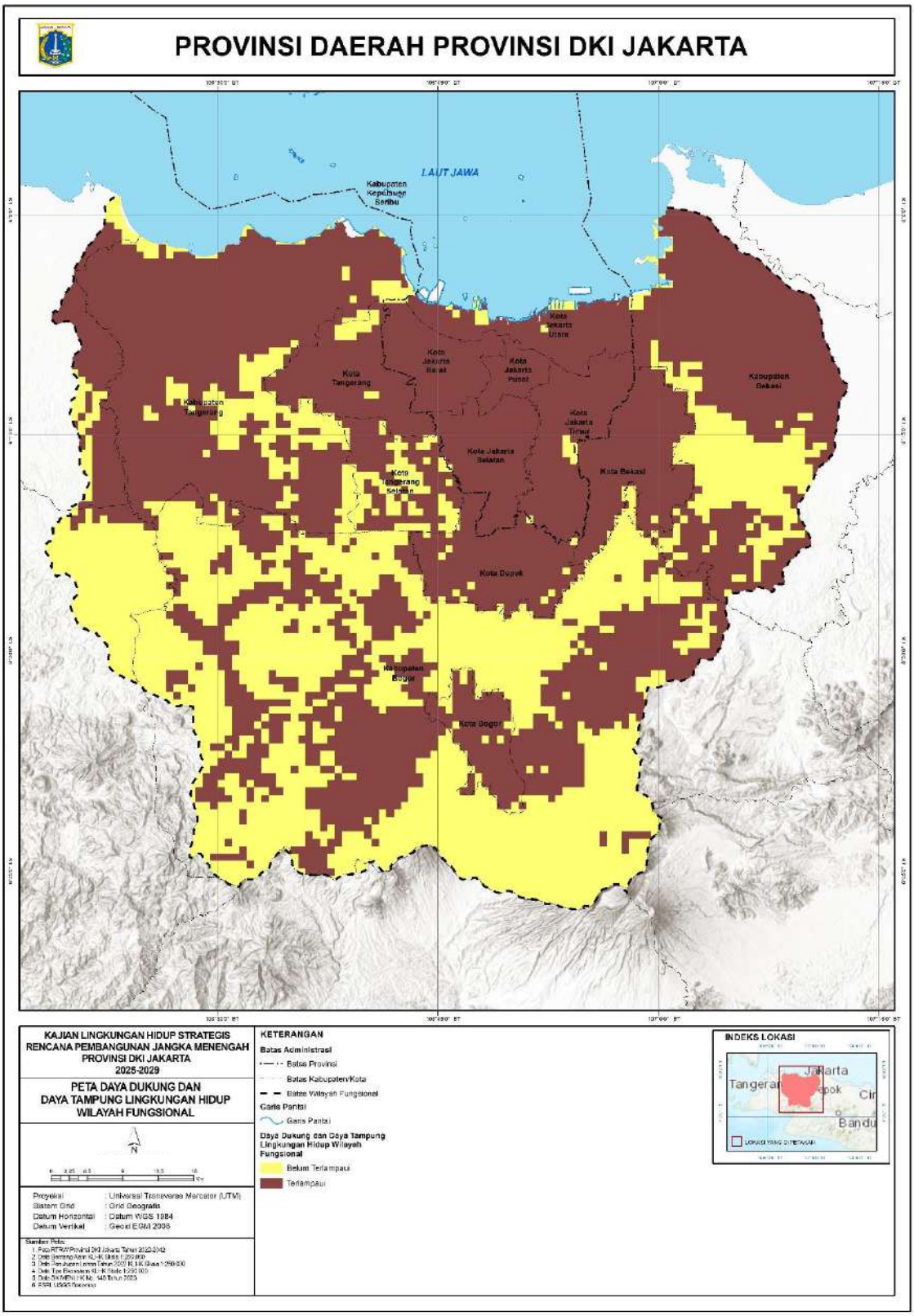

Gambar 3-35. Peta D3TLH Penyedia Air di Wilayah Fungsional Tahun 2023

Sumber: SK MenLHK No. 146 Tahun 2023, skala kedetilan data 1:250.000

Berdasarkan pada peta di atas menunjukkan bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah fungsional Jakarta didominasi oleh status terlampaui. Hal tersebut karena pada wilayah tersebut telah menjadi lahan terbangun ataupun wilayah pertanian. Indikasi tersebut dapat dibuktikan seperti pada contoh diwilayah Jakarta yang lebih dari 90% dari luasan total, memiliki status terlampaui akibat penggunaan lahannya merupakan lahan terbangun yang juga berbanding lurus dengan padatnya penduduk Jakarta sebagai ibu kota negara. Begitu pula diwilayah perkotaan seperti diwilayah kota Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor serta Kabupaten Bekasi dan Tangerang yang sebagian besar wilayahnya memiliki status daya dukung penyedia air yang telah terlampaui. Hal ini menunjukkan air permukaan pada wilayah tersebut tidak mampu menampung kebutuhan air baik untuk kegiatan domestik ataupun kegiatan pertanian. Dampak dari hal ini pula yang bisa menyebabkan wilayah Jakarta dan sekitarnya akan mengalami krisis air bersih.

Gambaran data daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air pada wilayah fungsional di atas menunjukkan bahwa kondisi status wilayah fungsional saat ini secara keseluruhan memiliki potensi sangat kecil untuk mendukung kebutuhan air bagi masyarakat serta mendukung wilayah didalamnya termasuk Provinsi DKI Jakarta. Namun, hal ini masih perlu ditindaklanjuti dengan mendetailkan skala data untuk melakukan analisa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) terhadap penyedia air pada Provinsi DKI Jakarta. Skala data yang digunakan dalam menilai status D3TLH pada wilayah fungsional menggunakan skala 1:500.000 yang bersumber dari SK MenLHK No. 297 Tahun 2019 dan digunakan sebagai data nasional. Oleh karena itu, perlu melakukan pendetailan skala data untuk menilai kondisi D3TLH penyedia air Provinsi DKI Jakarta secara komprehensif sesuai kondisi saat ini.

3.2.2.2 D3TLH Wilayah Perencanaan

Dalam analis D3TLH penyedia air pada wilayah fungsional menyatakan bahwa lebih dari 90% wilayah DKI Jakarta diindikasikan telah melampaui daya dukung air (ditandai dengan warna **cokelat**). Maka untuk melakukan analisa secara komprehensif terhadap D3TLH penyedia air DKI Jakarta, maka dilakukan identifikasi status D3TLH terhadap wilayah DKI Jakarta menggunakan skala data 1:250.000 berdasarkan SK 146/2023 dan mempertimbangkan tekanan jumlah penduduk, ketersediaan air di wilayah DKI Jakarta serta kebutuhan air baik untuk kegiatan domestik atau pertanian. Kondisi D3TLH penyedia air provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada peta di bawah ini:

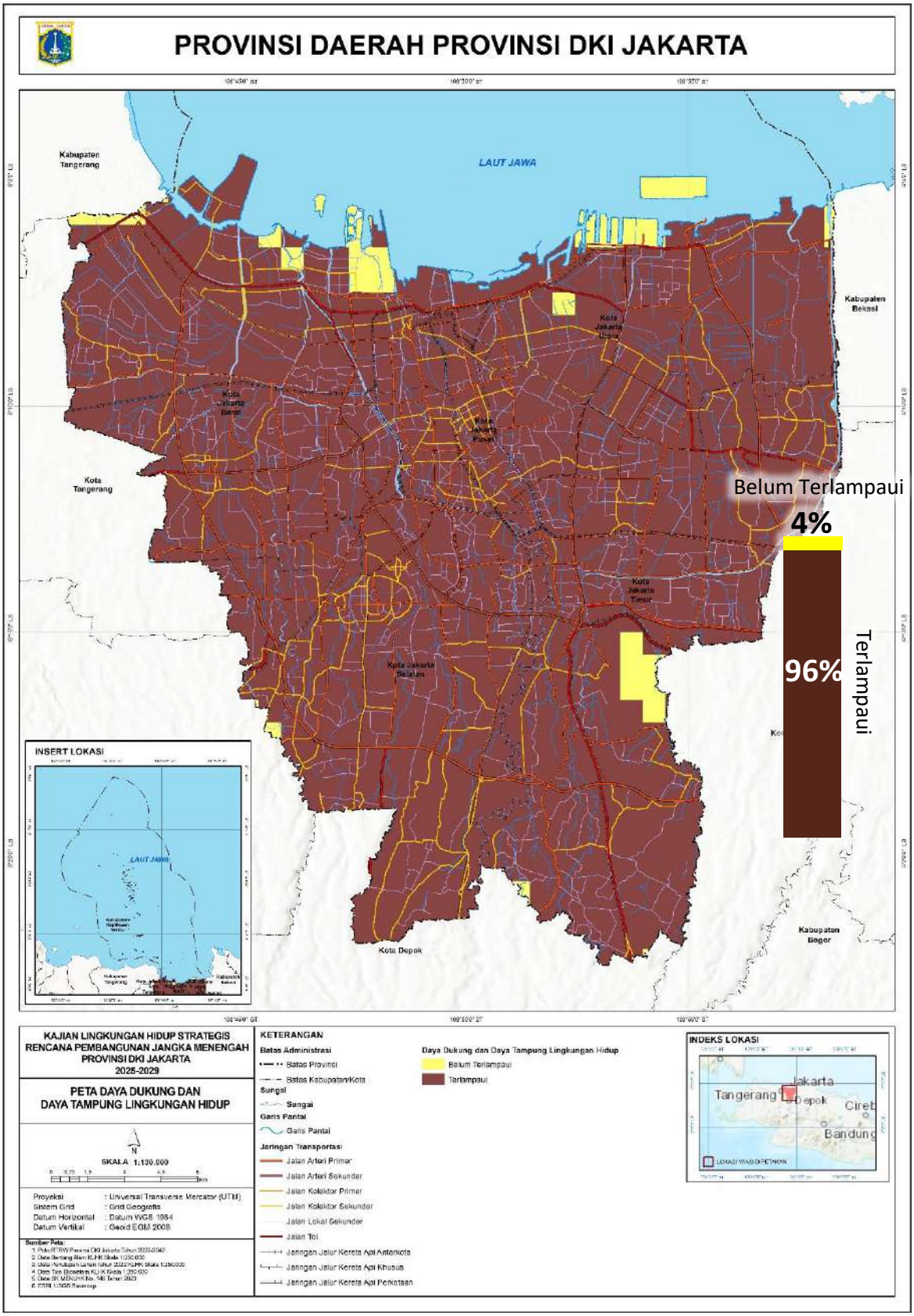

Gambar 3-36 Status Indikatif DDLH Penyedia Air Wilayah Daratan Provinsi DKI Jakarta

Sumber: SK MENLHK No. 146 Tahun 2023, skala kedetilan data 1:250.000

Status indikatif terlampaui menunjukkan bahwa kemampuan fungsi lingkungan DKI Jakarta dalam menyediakan air permukaan belum mampu memenuhi kebutuhan air baik untuk kegiatan domestik dan lahan di provinsi tersebut. Jumlah ketersediaan air jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan air DKI Jakarta. Berdasarkan data dari SK MENLHK No. 146 Tahun 2023, sejumlah 96% wilayah DKI Jakarta telah melampaui D3TLH Air. Tidak mengherankan, apabila DKI Jakarta perlu melakukan pasokan air dari luar daerah untuk mendapatkan sumber-sumber air baku demi memenuhi kebutuhan air di dalam wilayah provinsi. Terlebih kondisi kualitas air sungai di Provinsi DKI Jakarta dalam status cemar sedang dan berat sehingga kurang layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

Indikasi daya dukung air terlampaui ditentukan berdasarkan selisih antara ketersediaan air dan kebutuhan air dalam satu wilayah seperti disajikan pada tabel berikut.

Wilayah DAS – WD (wilayah fungsional)	Ketersediaan Air (m^3/tahun)
Cisadane Hilir Bd Psrbaru	2.065.825.816
Citarum Hilir	1.890.981.644
Ciliwung	1.650.778.439
Cisadane Hulu Bd Psrbaru	432.605.843
Kepulauan Seribu	2.678.700
Total	**6.042.870.443**

Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Volume (m3/Tahun)					Luas D3TLH Air (Air)		Indikasi Status D3TLH Air
	Ketersediaan Air Jakarta	Kebutuhan Air			Selisih	Belum Terlampaui	Terlampaui	
		Domestik	Lahan	Kebutuhan Total				
Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4,163,057.32	2,396,044.80	1,109,769.45	3,505,814.25	657,243.07	658.91	419.13	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Barat	102,105,718.45	221,240,073.60	12,756,910.02	233,996,983.62	-131,891,265.17	144.29	12,414.16	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Pusat	34,911,044.24	91,315,728.00	172,052.54	91,487,780.54	-56,576,736.29		4,781.08	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Selatan	118,049,489.86	203,236,560.00	3,629,945.37	206,866,505.37	-88,817,015.52	39.68	14,791.38	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Timur	152,307,750.72	287,173,814.40	20,180,742.05	307,354,556.45	-155,046,805.74	500.85	17,817.79	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Utara	138,578,941.54	154,893,340.80	38,546,111.31	193,439,452.11	-54,860,510.57	1,329.83	13,522.02	Terlampaui
Total	**550,116,002.13**	**960,255,561.60**	**76,395,530.74**	**1,036,651,092.35**	**-486,535,090.22**	**2,673.56**	**63,745.56**	

Tabel 3-14 Rekap Hasil Analisis Daya Dukung Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Sumber: SK MENLHK No. 146 Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa daya dukung seluruh kota dan kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta diindikasikan terlampaui. Selain keterikatan ekosistem, penentuan 5 (lima) wilayah DAS sebagai wilayah fungsional yang mempengaruhi ketersediaan air di DKI Jakarta didasarkan pada pertimbangan pengambilan sumber air baku DKI Jakarta yang sebagian besar berasal dari Waduk Jatiluhur, IPA Cikokol dan IPA Serpong.

Meskipun DKI Jakarta didukung dari lima sisi wilayah DAS, tidak serta merta menjadikan wilayah provinsi memiliki surplus ketersediaan air permukaan. Berdasarkan modeling spasial, dari total ketersediaan air permukaan 5 (lima) wilayah DAS sebanyak 6.042.870.443 m^3/tahun hanya sekitar 4,69% atau 283.250.615 m^3/tahun air yang terdistribusi ke wilayah DKI Jakarta. Sementara, kebutuhan air Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 1.650.486.049 m^3/tahun dengan proporsi peruntukan 92,61% digunakan untuk memenuhi kegiatan domestik dan 7,39% digunakan untuk memenuhi kegiatan ekonomi berbasis lahan. Selisih kesetimbangan ketersediaan dan kebutuhan air menunjukkan nilai minus, yang mengartikan bahwa air di DKI Jakarta akan terus mengalami defisit kuantitas jika dimanfaatkan tanpa melakukan upaya *recharge* ataupun alternatif lain. Inilah yang mendasari seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta diindikasikan telah melampaui daya dukung dan daya tampung air.

3.2.3 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim

Kota Jakarta termasuk pada kota delta (*delta city*) atau dapat disebut dengan kota yang berada pada muara sungai yang umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Dampak nyata dari perubahan iklim yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat adalah bencana banjir yang sedikit banyak terpengaruh dari adanya perubahan iklim. Dibawa ini merupakan gambaran dampak dari perubahan iklim yang

terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu dampak dari perubahan iklim global adalah kenaikan suhu. Kenaikan suhu pada permukaan laut dapat mengakibatkan naiknya tinggi muka air laut, sementara pengaruhnya pada daratan salah satunya adalah potensi kekeringan.

Merujuk pada data SIDIK (Sistem Informasi Data indeks Kerentanan) tahun 2021, Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kerentanan sangat rendah serta didominasi kelas sedang pada wilayah *main land* dan Kepulauan Seribu (data skala kota/kabupaten). Hal tersebut menunjukan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki risiko rendah-sedang terhadap kerentanan akibat perubahan iklim dengan nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) 0.303 – 0.498 dan nilai Indeks Kemampan Adaptif (IKA) dengan rentang nilai 0.453 – 0.664. Dengan nilai IKA DKI Jakarta yang relatif tinggi, menunjukan kerentanan terhadap perubahan iklim sangat rendah. Sedangkan untuk indeks risiko kekeringan, DKI Jakarta memiliki klasifikasi risiko sangat-sangat rendah menuju ke rendah, yang didominasi oleh kelas rendah di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Untuk kelas sangat-sangat rendah berada di Jakarta Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa provinsi DKI Jakarta memiliki kerentanan rendah terhadap bencana kekeringan.

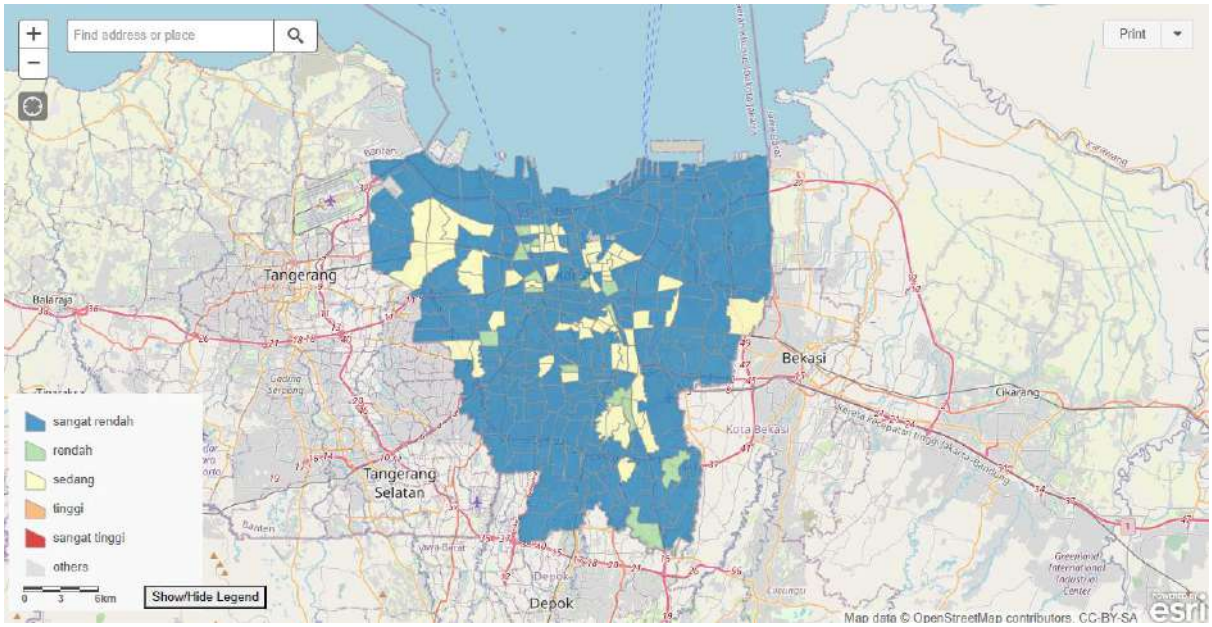

Gambar 3-37 Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim DKI Jakarta
Portal SIDIK, KLHK Data Hasil Analisis Tahun 2021

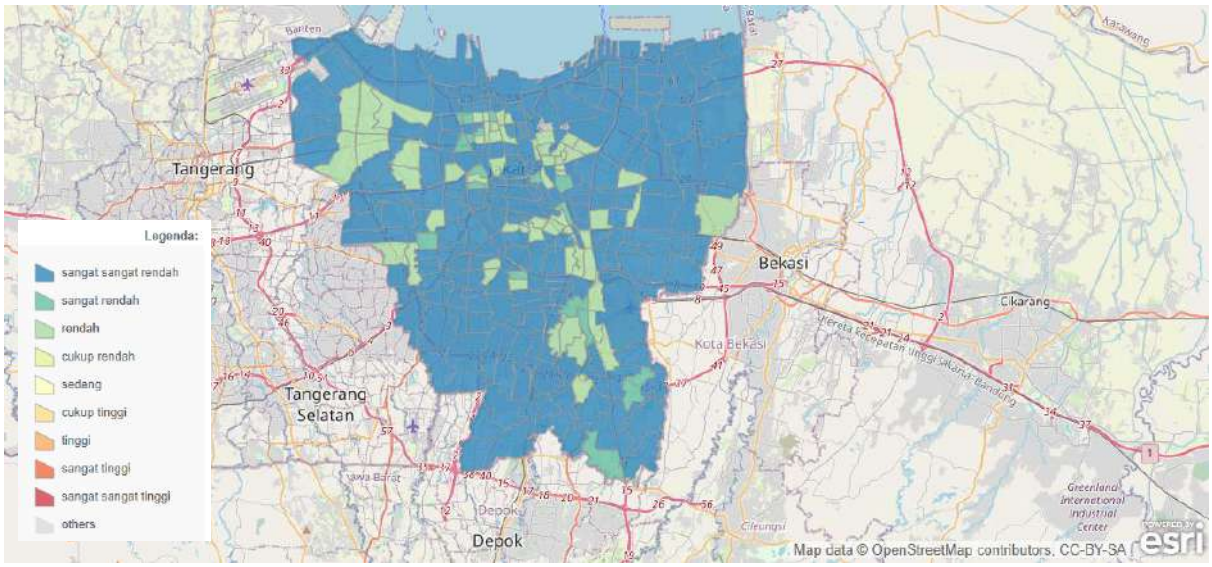

Gambar 3-38 Kerentanan Terhadap Bencana Kekeringan DKI Jakarta
Sumber: Portal SIDIK, KLHK Data Hasil Analisis Tahun 2021

Fenomena perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi kondisi kelembapan udara, suhu udara, serta curah hujan, tetapi juga kondisi suhu permukaan. Perubahan kondisi permukaan terjadi akibat lahan yang didominasi oleh lahan terbangun. Pada wilayah perkotaan, dimana permukaan bangunan gedung-gedung lebih banyak menyerap energi panas daripada memantulkannya, sehingga mengakibatkan naiknya suhu di wilayah sekitar gedung. Kondisi tersebut jika terus meningkat akan menimbulkan adanya fenomena *Urban Heat Island* (UHI). UHI merupakan fenomena yang terjadi di sebuah kota atau wilayah metropolitan yang secara signifikan lebih panas dibandingkan sekitarnya, akibat dari aktivitas yang lebih besar di wilayah tersebut.

Fenomena *Urban Heat Island* tidak bisa lepas dari kondisi provinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu kota dengan status kota metropolitan dengan dominasi lahan terbangun. Dengan status tersebut, maka provinsi DKI Jakarta berpotensi mengalami kenaikan suhu permukaan karena didominasi oleh lahan terbangun dan sedikit lahan bervegetasi. Berdasarkan data citra landsat 8 antara tahun 2018 – 2021 yang digunakan untuk melakukan gmonitoring suhu permukaan, menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi kenaikan suhu permukaan di beberapa wilayah DKI Jakarta, walaupun terjadinya kenaikan tidak terlalu signifikan dari tahun awal.

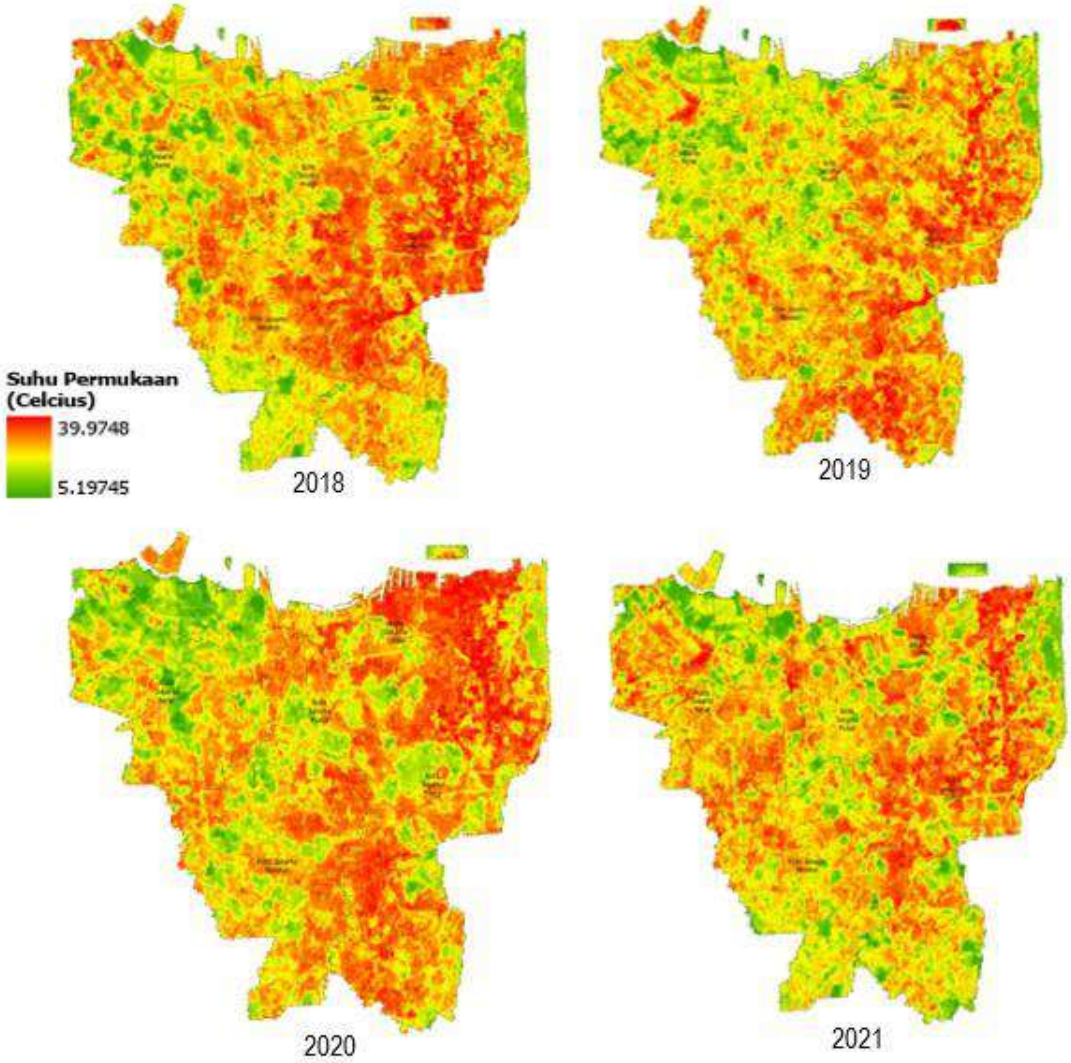

Gambar 3-39 Monitoring Perubahan Suhu Permukaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021
Sumber: Citra Landsat 8 dan Hasil Analisis 2022

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan menggunakan data landsat, menunjukkan bahwa suhu permukaan rata-rata di Provinsi DKI Jakarta cenderung lebih tinggi dalam rentang 4 tahun untuk wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Pada tahun 2018, beberapa lokasi pada 3 wilayah perkotaan tersebut, mengalami peningkatan suhu tertinggi mencapai 39^{0}C, sedangkan untuk tahun 2019 - 2021 cenderung menurun secara

fluktuatif, yaitu 37^{0}C, 35^{0}C, dan 36^{0}C. Meningkatnya suhu permukaan di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan di beberapa lokasi dikarenakan faktor lahan yang didominasi oleh lahan terbangun yang cenderung menyerap panas dibandingkan vegetasi yang memantulkan panas. Hal ini menjadi sebuah permasalahan lingkungan akibat perubahan iklim dan akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup dimasa yang akan datang.

3.2.4 Timbulan Sampah dan Beban Pencemar Air Sungai

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, tekanan penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan terjadinya tekanan terhadap lingkungan. Salah satu dampak dari tekanan ini adalah terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Analisa dilakukan untuk mengetahui potensi timbulan sampah dan beban pencemar sungai hingga2045 sebagai dampak dari adanya tekanan penduduk.

A. Timbulan Sampah

Sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas penduduk yang merupakan sampah domestik. Analisis potensi timbulan sampah dilakukan berdasarkan jumlah sampah yang dihasilkan per kapita per hari di wilayah DKI Jakarta. Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan keputusan no. e-0014 tahun 2023, yang menginformasikan bahwa timbulan sampah per kapita per hari di DKI Jakarta sebesar 0.76 kg/kapita/hari.Hasil analisis menunjukkan bahwa pola sebaran timbulan sampah mengikuti pola distribusi penduduk berdasarkan grid 30”x30”. Timbulan sampah tinggi berada di Kota Jakarta Pusat dengan nilai 10.08 – 13.43 kg/kapita/hari. sedangkan potensi timbulan sampah kedua tertinggi berada di wilayah Kota Jakarta Barat dengan nilai 8.34 – 13.4 kg/kapita/hari. untuk nilai terendah masih berada di Jakarta Utara dengan nilai 2.97 – 8.33 kg/kapita/hari.

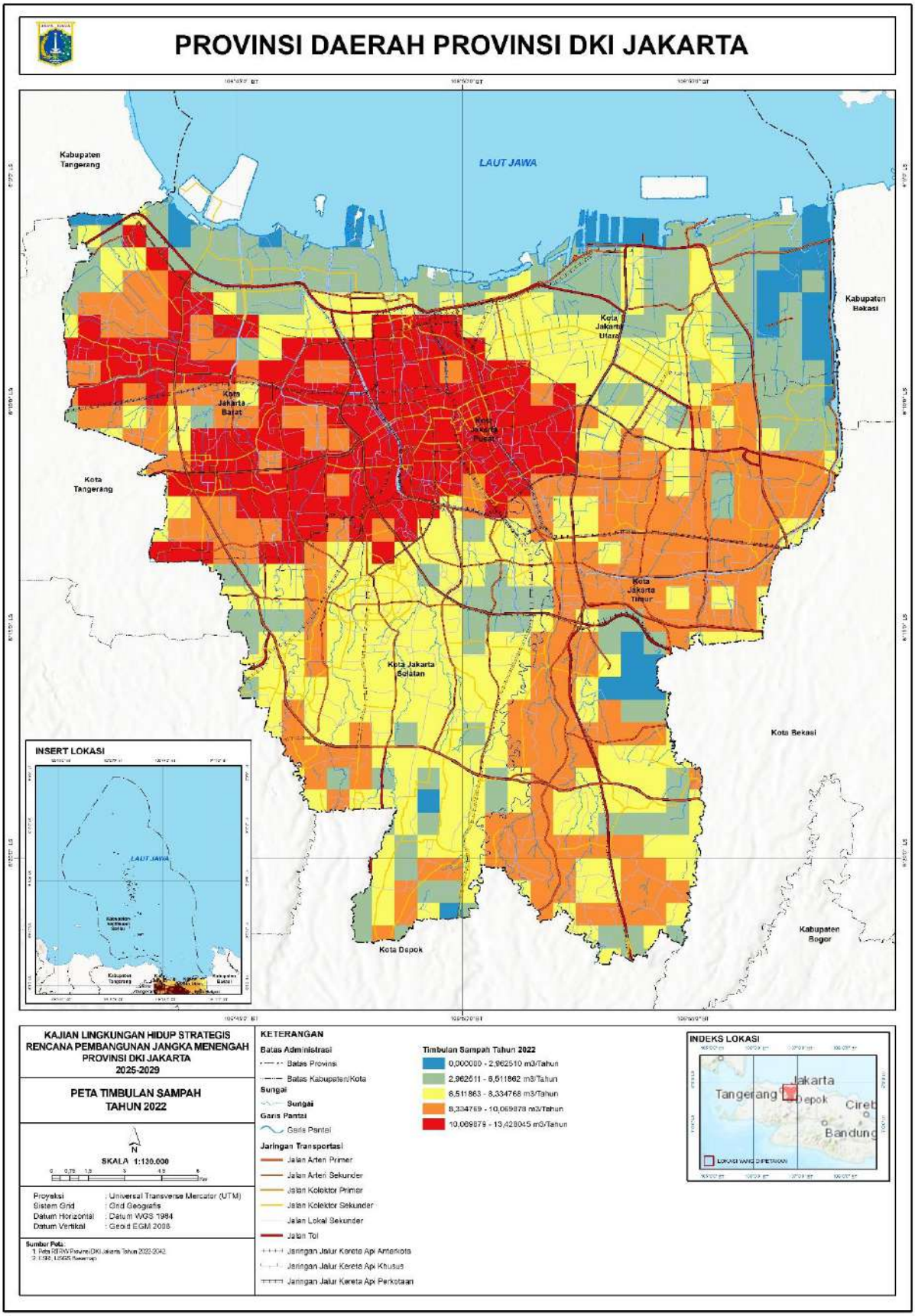

Gambar 3-40 Distrbusi Timbulan Sampah DKI Jakarta Tahun 2022

Sumber: Hasil Analisis 2022

A. Potensi Beban Pencemar Air Sungai

Adanya tekanan penduduk juga memberikan dampak pada meningkatnya tingkat aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, seperti kegiatan rumah tangga, pertanian, hingga industri yang akan menghasilkan limbah untuk lingkungan. Limbah ini akan berdampak pada penurunan kualitas air sungai. Dengan menggunakan model distribusi penduduk dan tekanannya, serta dengan mempertimbangkan jenis penutup lahan yang ada di DKI Jakarta, maka potensi beban pencemar air sungai dapat didistribusikan secara spasial. Pada pemodelan potensi beban pencemar air sungai, terdapat tiga sumber dari potensi beban pencemar yang dihitung, yaitu potensi beban pencemar yang berasal dari domestik, pertanian, dan penggunaan lahan. Adapun zat yang diperhitungkan adalah zat BOD, COD, dan TSS untuk potensi beban pencemar yang bersumber dari domestik dan pertanian, serta zat BOD dan COD untuk potensi beban pencemar dari penggunaan lahan.

Potensi beban pencemar yang berasal dari domestik dihitung berdasarkan jumlah penduduknya. Terdapat pula beberapa faktor yang mempengaruhi nilai dari potensi beban pencemar domestik, yaitu jarak lokasi terhadap sungai, rasio ekuivalen kota, serta faktor emisi dari masing-masing zat BOD, COD, dan TSS.

Tabel 3.15 Nilai Koefisien Berdasarkan Jumlah Penduduk, Rasio Ekuivalen Wilayah dan Jarak Sungai (Parameter Domestik) Untuk Menentukan BOD, COD, dan TSS

Faktor Emisi		Rasio Ekuivalen Wilayah		Jarak Lokasi Terhadap Sungai	
Parameter	FE (kg/org/hari)	Jenis	Re	Jarak (m)	α
BOD	0.04	Kota	1	0 – 100	1
COD	0.055	Pinggiran Kota	0.8125	100 – 500	0.85
TSS	0.038	Pedalaman	0.625	>500	0.3

Sumber: Riqqi.A, 2017

Sementara itu, potensi beban pencemar yang berasal dari pertanian dan penggunaan lahan dihitung berdasarkan luasan tutupan lahan dan faktor emisi dari masing-masing zat pencemar.

Tabel 3.16 Koefisien Berdasarkan Tutupan Lahan Pertanian Untuk Menentukan BOD, COD, dan TSS

Parameter	Tutupan Lahan Pertanian		
	Sawah (kg/Ha/Musim Tanam)	Palawija (Kg/Ha/Musim Tanam)	Kebun/Tegalan (Kg/Ha/Musim Tanam)
BOD	255	125	32.5
COD	(BOD*1.5)	(BOD*1.5)	(BOD*1.5)
TSS	0.46	2.4	1.6

Sumber: Riqqi.A, 2017

Jenis tutupan lahan yang menjadi sumber dari potensi beban pencemar untuk pertanian adalah sawah, tegalan/ladang, dan kebun atau perkebunan. Untuk potensi beban pencemar penggunaan lahan, lahan yang dimaksud meliputi lahan terbangun dan hutan. Potensi beban pencemar total diperoleh dari akumulasi potensi beban pencemar domestik, pertanian, dan penggunaan lahan untuk masing-masing zat BOD, COD, dan TSS.

Seluruh proses yang dilakukan untuk melakukan estimasi nilai beban pencemar terhadap parameter BOD, COD, dan TSS dilakukan melalui analisis spasial, berdasarkan data grid 30” x 30” dan juga distribusi penduduk untuk tiap gridnya yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Hasil dari estimasi untuk setiap nilai koefisien jumlah penduduk, rasio ekuivalen wilayah, jarak dari sungai, tutupan lahan pertanian, tutupan lahan terbangun dan juga tutupan hutan, kemudian dijumlahkan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$PBP_{total} = PBP_{dom} + PBP_{pertanian} + PBP_{lahan}$$

Keterangan:

PBP_{total} : Jumlah nilai total parameter BOD, COD, dan TSS berdasarkan koefisien domestik, pertanian dan tutupan lahan
PBP_{dom} : Jumlah nilai parameter BOD, COD, dan TSS berdasarkan koefisien domestik
$PBP_{pertanian}$: Jumlah nilai parameter BOD, COD, dan TSS berdasarkan koefisien pertanian
PBP_{lahan} : Jumlah nilai parameter BOD, COD, dan TSS berdasarkan koefisien tutupan lahan (hutan dan lahan terbangun

Pola sebaran dari potensi beban pencemar tidak bergantung pada sebaran penduduk karena terdapat faktor potensi beban pencemar yang berasal dari lahan. Terlihat bahwa Kota Jakarta Pusat memiliki potensi beban pencemar air sungai tertinggi di DKI Jakarta, kemudian disusul dengan Jakarta Barat dan Jakarta Timur yang tidak hanya memiliki jumlah penduduk yang tinggi tetapi juga ada beberapa area pertanian seperti Pertanian lahan kering/campur dan juga sawah yang mempengaruhi tingginya potensi beban pencemar air sungai.

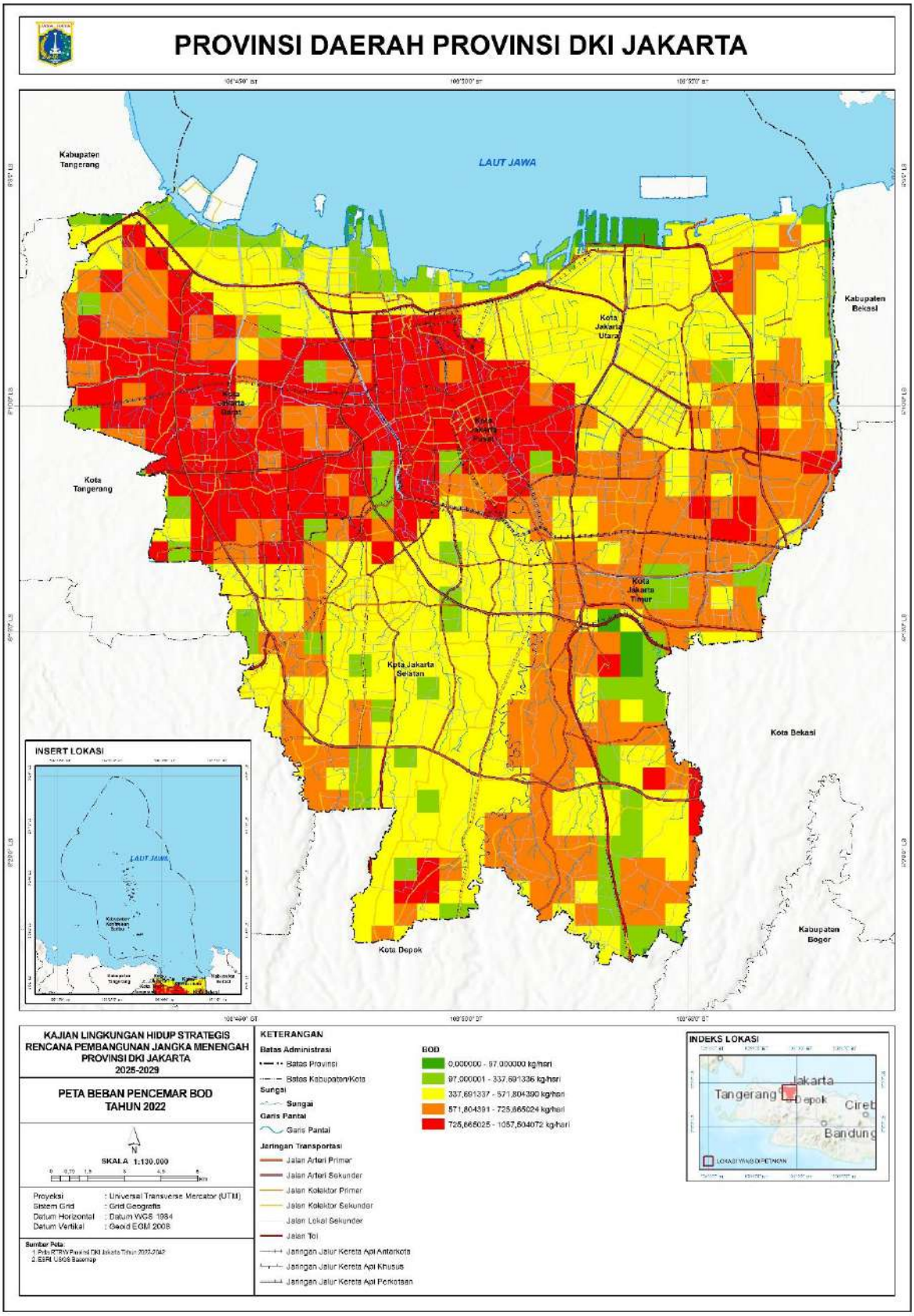

Gambar 3-41 Potensi Beban Pencemar BOD Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Hasil Analisis, 2023

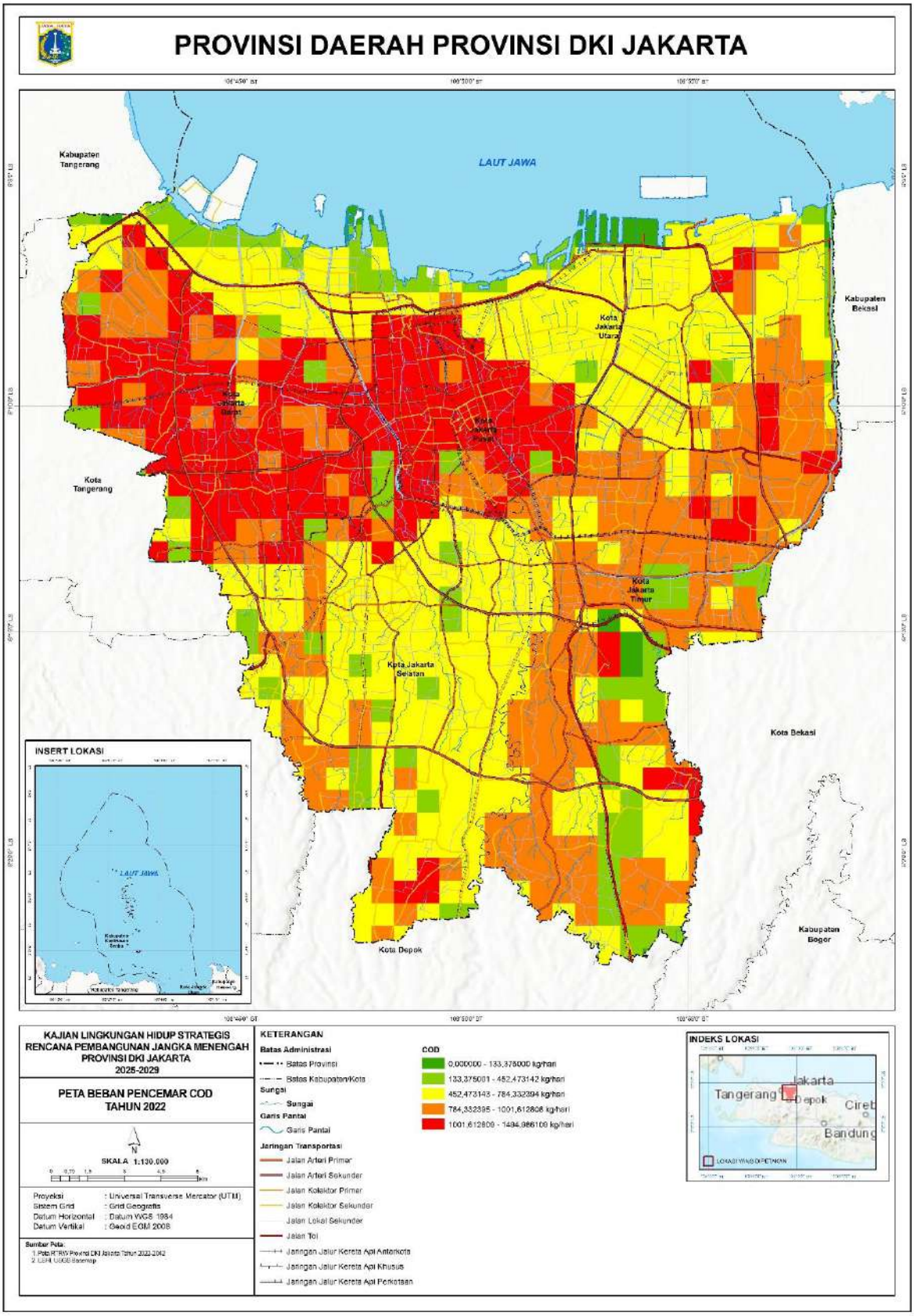

Gambar 3-42 Potensi Beban Pencemar COD Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Hasil Analisis, 2023

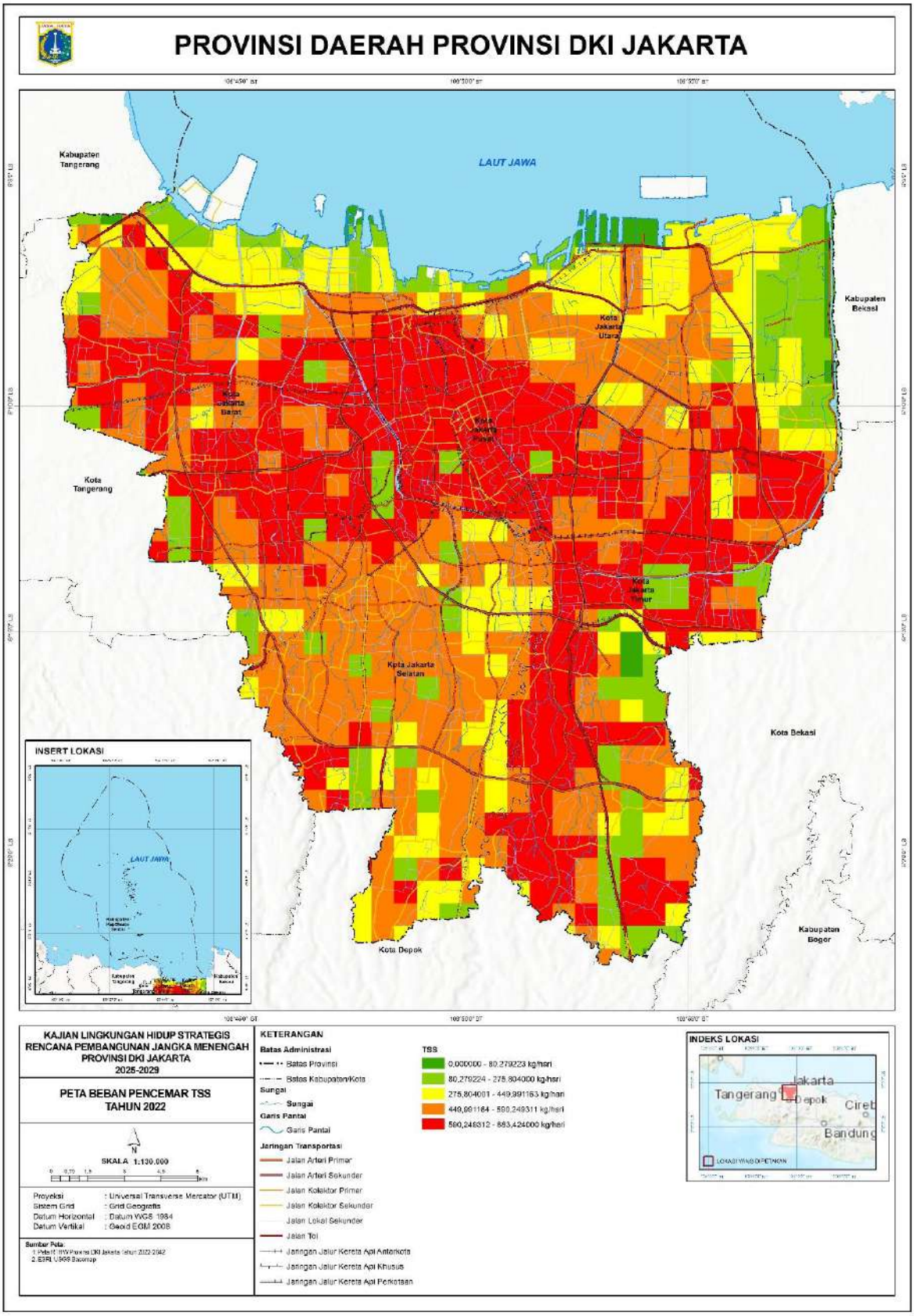

Gambar 3-43 Potensi Beban Pencemar TSS Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.5 Keanekaragaman Hayati

Profil Keanekaragaman Hayati di Kepulauan Seribu terlihat dari perubahan kondisi ekosistem yang memiliki kecenderungan semakin terdegradasi mencerminkan bahwa daya dukung dan daya tamping cenderung terlampaui. Menurunnya fungsi lingkungan akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya alam mengakibatkan adanya perubahan kondisi alami di wilayah tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 2.1.5 Keanekaragaman Hayati, terdapat 2 (dua) ekosistem yang ada di wilayah dan pesisir, yaitu ekosistem mangrove dan ekosistem perairan laut dangkal (terumbu karang dan padang lamun). Oleh karenanya, dalam pembahasan ini, dilakukan analisis untuk melihat kecenderungan perubahan kondisi ekosistem alami yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang besar kaitannya dengan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

A. Ekosistem Terumbu Karang

Kecenderungan perubahan kondisi ekosistem terumbu karang di Kepulauan Seribu dianalisis berdasarkan persentase tutupan karang hidup berdasarkan data series yang tersedia. Data dan informasi tutupan karang disadur dari Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019 dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa secara umum kondisi tutupan karang hidup di 19 pulau dari 114 pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu cenderung mengindikasi kondisi yang memburuk. Hal ini terlihat dari penurunan tutupan karang hidup dari tahun awal yang teridentifikasi hingga tahun terakhir updating data yang tersedia, meskipun terjadi fluktuasi pada beberapa pulau. Dari 19 pulau, 11 diantaranya menunjukkan kecenderungan yang menurun.

Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan persentase tutupan karang hidup di 19 pulau dari tahun 2003 hingga 2019. Meskipun setiap pulau memiliki ketersediaan tahun data yang sangat beragam namun dapat disimpulkan kecenderungannya dengan melihat kondisi awal dan kondisi akhir dari data tersebut.

Tabel 3-17. Kecenderungan Persentase Tutupan Karang Hidup di Kabupaten Kepulauan Seribu

No	Pulau	% Tutupan Karang Hidup														Kecenderungan
		2003	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Gugus Pulau Pari*						40,6			20,1			30	26,3		↘
2	Pulau Payung Besar*	12,9	24,6	24,7							28,1			2,7		↘
3	Pulau Payung Kecil*	3,4	10,6	18,3							28,1		44,5	13,5		↗
4	Pulau Tidung*			68,2						52,7			48	32,8		↘
5	Pulau Pramuka*	34,7	16	34,6	31,4	9,2			39,4			47,7		25,8		↘
6	Gosong Pramuka*					17,6			30,7				40	40		↗
7	Pulau Panggang*		42,8	32,5	35,7	35,1			55,6					48,4		↗
8	Pulau Harapan*	42,7	26,4	48,6	38,6	63			53,7				38	26		↘
9	Pulau Panjang	60,5	11,9	9,4		7,5			28,5					30,3		↘
10	Genteng Besar							33,6							28,0	↘
11	Macan Besar							44,7							61,8	↗
12	Sepa Timur							20,5							46,2	↗
13	Sepa Barat							28,2							28,9	↗
14	Jukung							6,36							28,1	↗
15	Melinjo							30,5							28,9	↘
16	Semut Besar							20							2,61	↘
17	Semut Kecil							35,9							36,8	↗
18	Satu							16,4							7,65	↘
19	Lipan							72,3							20,3	↘

↗ : Membaik
↘ : Menurun
: Tidak ada data
* : Pulau Berpenghuni

Sumber: Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Gambar 3-44. Persentase Tutupan Karang Hidup di Kabupaten Kepulauan Seribu

Sumber: Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Dari 19 pulau di atas, Pulau Panjang memiliki kecenderungan menurun yang paling besar yaitu sekitar 30,2%. Pada tahun 2003, persentase tutupan karang hidup di Pulau Panjang mencapai 60,5% sementara pada tahun 2018 mencapai 30,3%. Meskipun demikian, angka penurunan ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan pulau lain yang memiliki perbedaan tahun data. Pada dasarnya, Persentase penutupan karang keras di Pulau Panjang memiliki penutupan yang cukup tinggi dan termasuk dalam kriteria sedang dengan penutupan sebesar 30,3%. Namun, melihat dari kecenderungan yang menurun dalam 15 tahun terakhir di Pulau Panjang, mengindikasikan adanya kegiatan bawah laut yang merusak tutupan karang. Penurunan karang hidup disebabkan oleh penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti pengeboman masih terjadi. Nilai Indeks Mortalitas Karang (IMK) di Pulau Panjang mendekati angka 1, yaitu 0,655, sehingga dapat diartikan bahwa perubahan karang hidup menjadi karang mati sangat berarti.

Berdasarkan data dari DKPKP, 2020, terdapat 11 pulau berpenghuni yaitu: Pulau Sabira, Pulau Harapan, Pulau Kelapa Dua, Pulau Kelapa, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Payung, Pulau Pari, Pulau Lancang, dan Pulau Untung Jawa. Jika melihat dari tabel di atas, terdapat 8 pulau yang berpenghuni (ditandai dengan *) dimana sebagian besar memiliki kecenderungan yang menurun. Hal ini menandakan bahwa kegiatan manusia berpengaruh buruk bagi keberadaan terumbu karang.

Tabel 3-18. Kondisi Terumbu Karang Di Wilayah Kepulauan Seribu 2023

Gugus	Karakteristik Terumbu Karang	Permasalahan
1. Pulau Untung Jawa	• Terumbu karang rusak karena kondisi perairan sangat subur • Pulau Untung Jawa ini didominasi oleh kategori pasir, karang lunak, karang mati yang sudah ditumbuhi alga dan patahan karang • Berdasarkan bentuk pertumbuhan karang (*coral lifeform*), karang keras yang banyak dijumpai di perairan pulau Untung Jawa memiliki bentuk coral massive (CM)	▪ Kegiatan perikanan dan penggunaan jangkar yang kurang tepat; hal tersebut semakin diperparah dengan tingkat kekeruhan dan kesuburan perairan yang tinggi akibat lokasinya dekat dengan daratan utama Jakarta. ▪ Tingginya turbiditas dan nutrien yang tinggi pada perairan sekitar Pulau Untung

Gugus	Karakteristik Terumbu Karang	Permasalahan
	• Terdapat 8 genus karang yang berada di perairan pulau Untung Jawa; genus karang Platygyra merupakan genus dengan persentase tertinggi untuk jenis karang, disusul dengan genus Turbinaria dan Goniopora yang memiliki persen penutupan tergolong relatif tinggi • Persen penutupan karang keras terendah berasal dari genus • Porites, Montipora dan Favites • Komunitas ikan terumbu di Pulau Untung Jawa memiliki keanekaragaman yang sedang dengan nilai 2.05 dan • keseragaman yang tinggi (0.83) • Kepadatan ikan terumbu mencapai 70 hingga 80 ind/100 m²	Jawa mengakibatkan kompetisi ruang lebih menguntungkan bagi alga dan karang lunak untuk tumbuh dibandingkan dengan karang.
2. Pulau Lancang **a.** Pulau Lancang Kecil	• Penutupan substrat dasar didominasi oleh kategori pasir, diikuti oleh kategori karang mati yang telah tertutupi alga dan patahan karang; mengacu pada PerMen LH No. 41 tahun 2001 maka kondisi terumbu karang di Pulau Lancang Kecil tergolong dalam kategori rusak • Didominansi dengan bentuk pertumbuhan karang massive. • Terdapat 10 genus karang; genus karang Porites adalah genus yang paling sering ditemukan sepanjang garis pengamatan; komposisi genus karang keras jenis lain di bawah 1% • Keanekaragaman ikan termasuk sedang dengan nilai 2.97, keseragaman yang tinggi (0.94) dengan tingkat dominansi rendah (0.06)	
b. Pulau Lancang Besar	• Secara umum kondisi terumbu karang kurang baik • Terdapat lima jenis bentuk pertumbuhan terumbu karang • Terdapat 11 genus karang karas; genus yang sering ditemukan adalah Montipora dan Porites; selanjutnya genus Echinopora, Favites, Lobophyllia dan Goniopora.; beberapa jenis karang Acropora juga ditemukan dalam lokasi pengamatan meskipun dalam nilai persentase yang sangat rendah • Indeks komunitas ikan (Shannon-wiener) menunjukkan nilai keanekaragaman yang	

Gugus	Karakteristik Terumbu Karang	Permasalahan
	mendekat nilai tinggi (2.95), namun masih cenderung memiliki keseragaman yang tinggi	
3. Pulau Pari	• Kondisi terumbu karang tergolong dalam kategori buruk dengan substrat dasar perairan didominansi oleh tutupan kategori patahan karang • Terdapat lima jenis bentuk pertumbuhan karang keras yang didominasi oleh karang jamur, kemudian bentuk massive • Terdapat tujuh genus karang keras yang didominasi oleh genus Fungia, kemudian disusul dengan genus Acropora dan Montipora; genus karang yang memiliki nilai persentase rendah adalah genus Favites, Lobophyllia dan Alveopora • Keanekaragaman ikan terumbu tergolong sedang, dengan nilai indeks keseragaman sebesar 2.70 yang sudah mendekati batas nilai tinggi (>3) • Kepadatan jumlah individu ikan terumbu yang tercatat pada saat pengamatan di lapangan sebanyak 120 individu dengan jumlah spesies yang teridentifikasi lebih dari 40 spesies per 100 m²	▪ Banyak mendapat tekanan dari kegiatan antropogenik selama bertahun-tahun seperti aktivitas wisata bawah air yang kurang bertanggung jawab, penggunaan jangkar yang kurang tepat, dan *coral mining*. ▪ Tutupan karang hidup di lokasi pengamatan telah terganti dengan patahan karang (*rubble*), pasir dan alga ▪ Penurunan kestabilan komunitas ikan terumbu ditandai variasi warna dalam komunitas ikan terumbu tergolong rendah.
4. Pulau Payung	• Substrat dasar perairan P. Payung Besar didominansi oleh kategori patahan karang, karang mati yang sudah ditumbuhi alga, makro alga, karang hidup dan pasir • memiliki bentuk pertumbuhan sebanyak delapan dengan dominasi karang menggerak; hal ini menunjukkan terumbu karang sedang mengalami pemulihan. • Genus karang yang paling sering ditemukan berasal dari genus Porites dan Montipor selain itu juga terdapat genus Acropora, Fungia, Turbinaria, Goniopora, Favites dan Oxypora walaupun tidak banyak ditemukan • Indeks shannon-wiener menunjukkan nilai yang baik dengan kondisi komunitas ikan terumbu yang stabil; komunitas ikan terumbu tuing memiliki keanekaragaman yang sedang (2.90), dengan keseragaman tinggi (0.93) • Kepadatan ikan terumbu pada lokasi ini sekitar tergolong tinggi (200 individu/100 m²) dan diimbangi dengan kekayaan spesies 44 jenis	
5. Pulau Tidung **a.** Pulau Tidung Kecil	• Tutupan substrat dasar di dominasi oleh patahan karang, pasir dan karang mati yang sudah tertutupi alga.	▪ Sudah mengalami perubahan selama beberapa tahun terakhir ▪ Kerusakan disebabkan oleh perikanan yang kurang

Gugus	Karakteristik Terumbu Karang	Permasalahan
	• Tutupan karang hidup hanya sebesar 7,15%, berdasarkan PerMen LH No. 41 tahun 2001 termasuk kategori rusak • Bentuk pertumbuhan karang yang ditemukan yaitu *coral massive, Acropora* bercabang, karang bercabang, karang menggerak, karang lembaran, karang jamur dan karang submassive, dengan dominasi oleh karang massive • Terdapat 12 genus karang karas; umumnya jenis karang yang dijumpai adalah Porites dengan bentuk pertumbuhan karang massive • Indeks keanekaragaman ikan terumbu menunjukkan kategori sedang • Tidak ada jenis spesies ikan yang dominan • Kepadatan ikan mencapai 140 individu/100 m², dengan 41 spesies ikan	bertanggungjawab dan *coral mining*
b. Pulau Tidung Besar	• Daerah perlindungan laut, sehingga kondisi terumbu karang relatif baik • Substrat dasar berupa pasir, patahan karang, makro alga, dan biota lainnya • Karang keras memiliki bentuk pertumbuhan yang beragam dengan dominasi karang bercabang • Karang Acropora merupakan genus yang paling sering ditemukan kemudian disusul dengan Genus Porites • Indeks keanekaragaman ikan sebesar 2,9 • Kepadatan ikan terumbu sekitar 210 individu/100 m²	

Sumber: Database Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

B. Ekosistem Padang Lamun

Ekosistem Padang Lamun termasuk dalam ekosistem perairan laut dangkal. Padang lamun yang tumbuh rapat dengan subratnya merupakan habitat bagi alga dan hewan laut lainnya. Tempat berlindung dan habitat dari beberapa organisme merupakan peran yang penting dari padang lamun. Pada setiap bagian lamun yaitu daun, rimpang dan akar akan memiliki perbedaan keragaman biota. Hal ini akan berdampak pada peningkatan keragaman dari fauna, walaupun kenyataannya fauna tersebut tidak secara langsung memakan lamun (Azkab,2014). Lebih lanjut Kikucbi (1974) mengatakan bahwa pada padang lamun yang kepadatannya tinggi akan memperlambat gerakan air yang diakibatkan oleh arus dan gelombang. Hal ini menyebabkan tingginya keragaman fauna mysid, hydromedusa dan juvenil ikan yang memang menyukai daerah perairan tenang. Keadaan perairan yang tenang ini juga mengakibatkan mineral dan organik terlarut mudah mengendap di padang lamun.

Gambar 3-45. Manfaat dan Fungsi Padang Lamun
Sumber: KKP,2020 (https://kkp.go.id/djprl/artikel/5140-manfaat-dan-fungsi-padang-lamun)

Perairan di Wilayah DKI Jakarta khususnya di Kepulauan Seribu memiliki sebaran padang lamun dengan kategori jarang hingga sedang. Pengamatan kondisi padang lamun berdasarkan Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019, DKPKP dilakukan untuk 66 Pulau di Kepulauan Seribu. Sebagian Pulau juga teridentifikasi tidak memiliki tutupan padang lamun seperti Pulau Panjang Besar, Panjang Kecil, Karang Baronang, Bulat, Kayu Angin Bira, Kayu Angin Genteng, Macan Kecil, Kayu Angin Putri, Kayu Angin Melintang, Dua Timur dan Pulau Sabira.

Status kondisi lamun di Kepulauan Seribu ditentukan berdasarkan KepmenLH No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun. Secara umum, padang lamun di Kepulauan Seribu memiliki status miskin dengan kondisi rusak dengan persentase tutupan total lamun kurang dari ≤ 29,9%. Hal ini menandakan bahwa kondisi padang lamun di Kepulauan Seribu sangat buruk sehingga diperlukan upaya konservasi ekosistem padang lamun yang cukup intensif.

Tabel 3-19. Tutupan dan Status Kondisi Padang Lamun di Kepulauan Seribu.

No	Pulau	Tutupan Total Lamun %		Kategori. Status berdasarkan Kepmen LH No. 200 tahun 2004
		2018	2019	
1	Gugus Pulau Pari*	38,95		Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
2	a. Pulau Tidung Besar*	21,32		Jarang. Dengan status miskin
	b. Pulau Tidung Kecil*	22,12		Jarang. Dengan status miskin
3	Pulau Payung*	41,62		Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
4	Pulau Pramuka*	34,55		Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
5	Gosong Pramuka*	13,03		Jarang. Dengan status miskin
6	Pulau Karya	42,61		Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
7	Pulau Panggang*	38,64		Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
8	Pulau Harapan*	29,09		Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
9	Pulau Kelapa	13,86		Jarang. Dengan status miskin
10	Pulau Panjang*	27,42		Jarang. Dengan status miskin
11	Pulau Panjang Besar			Tidak ditemukan padang lamun
12	Panjang Kecil			Tidak ditemukan padang lamun
13	Pamegaran		61,6	Padat. Dengan status sehat
14	Karang Baronang			Tidak ditemukan padang lamun
15	Bulat			Tidak ditemukan padang lamun
16	Bira Kecil		45,8	Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
17	Kuburan Cina		12	Jarang. Dengan status miskin
18	Bira Besar		37	Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
19	Kayu Angin Bira			Tidak ditemukan padang lamun
20	Kayu Angin Genteng			Tidak ditemukan padang lamun

No	Pulau	Tutupan Total Lamun %		Kategori. Status berdasarkan Kepmen LH No. 200 tahun 2004
		2018	2019	
21	Genteng Kecil		12,6	Jarang. Dengan status miskin
22	Genteng Besar		23,4	Jarang. Dengan status miskin
23	Macan Besar		20,6	Jarang. Dengan status miskin
24	Macan Kecil			Tidak ditemukan padang lamun
25	Macan Gundul		20,6	Jarang. Dengan status miskin
26	Putri Barat		33,6	Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
27	Putri Timur		9,6	Jarang. Dengan status miskin
28	Tongkeng		4	Jarang. Dengan status miskin
29	Kayu Angin Putri			Tidak ditemukan padang lamun
30	Panjang		5	Jarang. Dengan status miskin
31	Melintang Kecil		15	Jarang. Dengan status miskin
32	Kayu Angin Melintang			Tidak ditemukan padang lamun
33	Melintang Besar		7,8	Jarang. Dengan status miskin
34	Sepa Timur		35,6	Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
35	Sepa Barat		22,4	Jarang. Dengan status miskin
36	Papatheo		67	Padat. Dengan status sehat
37	Pelangi		2	Jarang. Dengan status miskin
38	Perak		16	Jarang. Dengan status miskin
39	Jukung		3,2	Jarang. Dengan status miskin
40	Melinjo		0,8	Jarang. Dengan status miskin
41	Cina		0,2	Jarang. Dengan status miskin
42	Semut Besar		0,2	Jarang. Dengan status miskin
43	Semut Kecil		52,5	Padat. Dengan status sehat
44	Kelor Barat		3,6	Jarang. Dengan status miskin
45	Kelor Timur		2	Jarang. Dengan status miskin
46	Satu		18,8	Jarang. Dengan status miskin
47	Yu Barat		2,8	Jarang. Dengan status miskin
48	Yu Timur		2	Jarang. Dengan status miskin
49	Karang			Jarang. Dengan status miskin
50	Pantara Barat		3,2	Jarang. Dengan status miskin
51	Pantara Timur		2,8	Jarang. Dengan status miskin
52	Bunder		2,2	Jarang. Dengan status miskin
53	Kapas		2	Jarang. Dengan status miskin
54	Lipan		1,6	Jarang. Dengan status miskin
55	Sebaru Kecil		2	Jarang. Dengan status miskin
56	Nyamplung		2,8	Jarang. Dengan status miskin
57	Sebaru Besar		30,2	Sedang. Dengan status kurang kaya atau kurang sehat
58	Rengat		2	Jarang. Dengan status miskin
59	Jagung		5,8	Jarang. Dengan status miskin
60	Pateloran Barat		3,6	Jarang. Dengan status miskin
61	Penjaliran Barat		2	Jarang. Dengan status miskin
62	Penjaliran Timur		2,6	Jarang. Dengan status miskin
63	Pateloran Timur		3	Jarang. Dengan status miskin
64	Dua Barat		4	Jarang. Dengan status miskin
65	Dua Timur			Tidak ditemukan padang lamun
66	Pulau Sabira*			Tidak ditemukan padang lamun

Sumber: Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Melihat kondisi ekosistem lamun yang secara umum buruk, tentunya akan mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati di wilayah tersebut, termasuk produksi ikan dan hewan laut lainnya sebagai sumber mata pencaharian nelayan. Hal ini juga berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup di wilayah perairan. Oleh karenanya, diperlukan beberapa upaya dalam mempertahankan dan memperbaiki ekosistem lamun melalui:

1. Rehabilitasi ekosistem lamun melalui metode yang sesuai, seperti pembibitan/pembenihan (seeding), sprig dengan jangkar, plug, dll.
2. Membuat Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) untuk ekosistem lamun.
3. Mengatur pemanfaatan di sekitar ekosistem lamun, seperti budidaya rumput laut,tambat kapal, karamba ikan, wisata, lalu lintas perahu, dll.

Berdasarkan database keanekaragaman hayati Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, terdapat update informasi terkini terkait kondisi padang lamun di beberapa pulau di Kepulauan Seribu dengan Indeks Kondisi Kesehatan Ekosistem Lamun (IKEL) termasuk kategori sangat buruk sampai sedang, sedangkan menurut KEPMEN LH No.200 Tahun 2004 termasuk kategori miskin sampai kaya. Berikut kondisi pada lamun di beberapa pulau di Kepulauan Seribu.

Tabel 3-20. Update Kondisi Terkini Padang Lamun di Kepulauan Seribu

Stasiun	Koordinat	Jenis Lamun	Tutupan Lamun	Status Ekosistem Lamun a)	Status Ekosistem Lamun b)
P. Untung Jawa	E:106°42'39" S: 5°58'37"	Th	6	Sangat buruk	Miskin
P. Lancang Kecil	E:106°35'29.64" S: 5°56'1.59"	Ea, Th	43	Buruk	Kurang kaya
P. Lancang Besar	E:106°35'15.79" S: 5°56'6.76"	Ea, Th, Cr, Ho, Si	72	Sedang	Kaya
P. Pari	E:106°36'47.29" S: 5°51'45.48"	Ea, Th, Cr	55	Buruk	Kurang kaya
P. Payung	E:106°33'10.63" S: 5°49'21.18"	Ea, Th, Cr, Ho	42	Buruk	Kurang kaya
P. Tidung Kecil	E:106°31'23.38" S: 5°48'15.06"	Ea, Th, Cr, Ho	45	Sedang	Kurang kaya
P. Tidung Besar	E:106°30'39.5" S: 5°48'29.93"	Ea, Th, Cr, Ho	68	Sedang	Kaya
P. Kelapa	E: 106°34'27.1" S: 5°39'15.3"	Th, Ho	35	Sangat buruk	Kurang Kaya
P. Panjang	E:106°33'30.3" S: 5°38'47.1"	Cr, Ho, Si	13	Sangat buruk	Miskin
P. Pramuka	E:106°36'42.7" S: 5°44'52.0"	Ea, Th, Cr, Ho, Hu, Si	48	Sedang	Kurang Kaya
P. Panggang	E:106°36'15.5" S: 5°44'32.8"	Ea, Th, Si	74	Sedang	Kaya
P. Dua Timur	E:106°29'34.28" S: 5°25'20.02"	Th	n/a	n/a	n/a

Keterangan: a) kategori berdasarkan IKEL, b) kategori berdasarkan KEPMEN LH No. 200 Tahun 2004; n/a = tidak dilakukan pendataan persentase tutupan karena pertumbuhannya hanya *patchy*

Cr = *Cymodocea rotundata*, Ea = *Enhalus acoroides*, Ho = *Halophila ovalis*, Si = *Syringodium Isoetifolium*,Th = *Thalassia hemprichii*

Sumber: Database Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

C. Ekosistem Mangrove

Ekosistem Mangrove sebagai ekosistem daratan pesisir di wilayah DKI Jakarta memegang peranan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan menopang daya dukung lingkungan hidup di wilayah tersebut. Keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di wilayah ekosistem mangrove dapat dilihat dari kecenderungan perubahan tutupan lahan hutan mangrove dalam periode waktu tertentu. Dalam analisis ini, digunakan peta penutup lahan skala 1:250.000 pada tahun 2009 dan 2021 dari KLHK untuk melihat perubahan yang terjadi pada hutan mangrove.

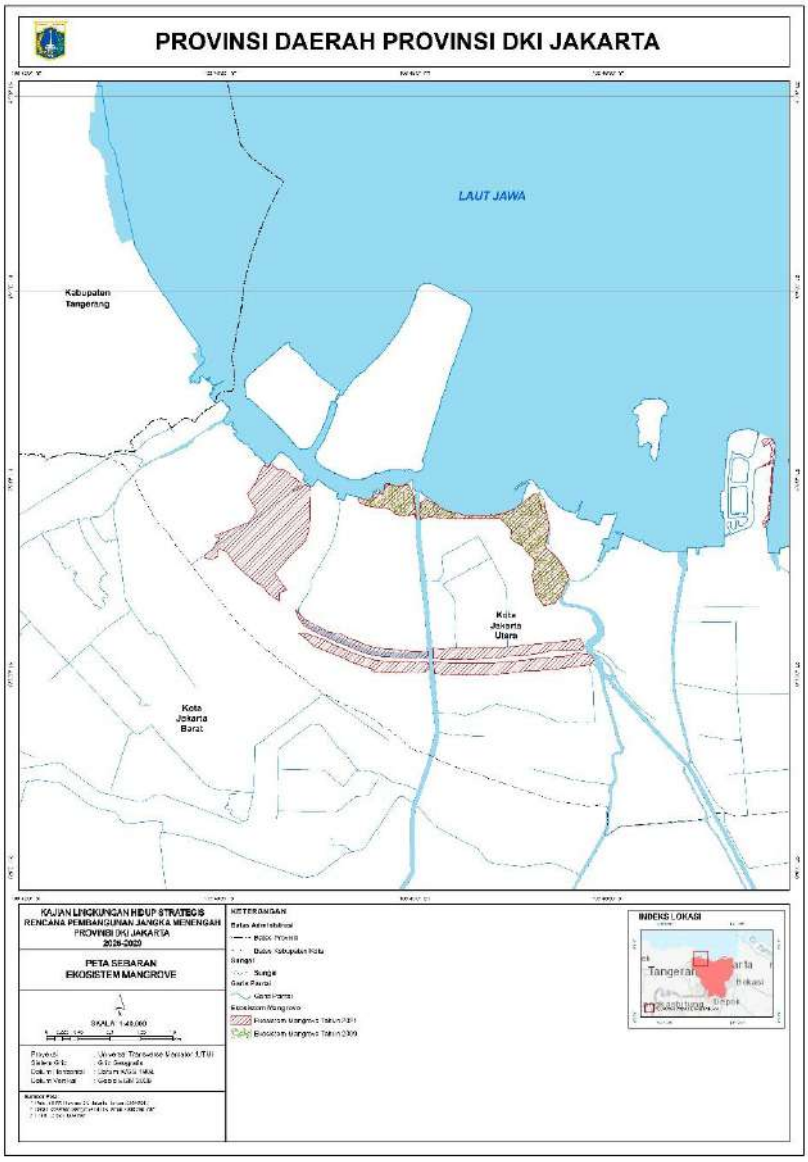

Gambar 3-46. Perubahan Tutupan Lahan Hutan Mangrove 2009 – 2018
Sumber: Analisis lanjutan dari kajian D3TLH Provinsi DKI Jakarta 2019

Secara umum, sebaran tutupan hutan mangrove berada pada Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Gambar 3-46. di atas hanya menunjukkan hutan mangrove pada Kecamatan Penjaringan, karena berdasarkan peta penutup lahan yang digunakan (skala 1:250.000), karena berdasarkan skala peta, ekosistem mangrove dapat mudah dilihat pada Kecamatan Penjaringan. Berikut ini merupakan perubahan tutupan lahan hutan mangrove di DKI Jakarta.

Tabel 3-21. Perubahan Tutupan Lahan Hutan Mangrove di DKI Jakarta 2009 – 2021

Kab/Kota Administratif/ Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan (Ha)	
	2009	2021
Jakarta Utara		
Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	101,11	358,08
Kepulauan Seribu		
Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	169,77	149.84
Total Tutupan Mangrove	**270.88**	**507.92**

Sumber: Analisis lanjutan dari kajian D3TLH Provinsi DKI Jakarta 2019

Dalam kurun waktu 2009 – 2021, terjadi perubahan pada luasan hutan mangrove di Jakarta Utara yang cenderung naik dengan luasan 358.08 Ha. Hal ini diasumsikan terjadi reforestasi lahan mangrove sebesar 256.97 Ha. Sedangkan untuk wilayah Kepulauan Seribu selama 12 tahun cenderung mengalami penurunan sebesar 19.93 Ha. Perubahan ini tentunya perlu dilihat lebih rinci mengingat bahwa peta penutup lahan yang digunakan berada pada skala besar, sementara wilayah Kepulauan Seribu dengan banyak pulau-pulau kecil memerlukan identifikasi penutup lahan yang lebih rinci untuk melihat perubahan yang terjadi. Merujuk pada data kondisi hutan mangrove tahun 2019 di Kepulauan Seribu, ekosistem hutan mangrove terbagi menjadi 3 kategori yaitu jarang, sedang dan lebat. Berdasarkan 3 kategori ini dapat dinilai bagaimana kondisi hutan mangrove yang di Kepulauan Seribu. Tabel di bawah ini menjelaskan kondisi hutan mangrove di 56 pulau yang diidentifikasi di Kepulauan Seribu pada tahun 2019.

Tabel 3-22. Luasan Kategori dan Total Mangrove Kepulauan Seribu 2019

No	Pulau	Kategori (ha)			Total Ha
		Jarang	Sedang	Lebat	
1	Pulau Panjang Besar	0,22	0,01	0,04	0,27
2	Panjang Kecil	0,02	-	-	0,02
3	Pamegaran	1,54	0,17	0,51	2,22
4	Karang Baronang	-	-	-	-
5	Bulat	0,02	0,01	0,02	0,04
6	Bira Kecil	-	-	-	-
7	Kuburan Cina	-	-	-	-
8	Bira Besar	0,03	0,02	0,03	0,08
9	Kayu Angin Bira	-	-	-	-
10	Kayu Angin Genteng	-	-	-	-
11	Genteng Kecil	-	-	-	-
12	Genteng Besar	-	-	-	-
13	Macan Besar	-	-	-	-
14	Macan Kecil	0,02	0,01	0,01	0,03
15	Macan Gundul	0,13	0,02	0,01	0,16
16	Putri Barat	1,11	0,18	0,52	1,8
17	Putri Timur	-	-	-	-
18	Tongkeng	0,36	0,02	0,01	0,39
19	Kayu Angin Putri	-	-	-	-
20	Panjang	-	-	-	-
21	Melintang Kecil	0,57	0,17	1,14	1,88
22	Kayu Angin Melintang	0,02	-	-	0,02
23	Melintang Besar	0,35	0,1	0,98	1,44
24	Sepa Timur	-	-	-	-
25	Sepa Barat	-	-	-	-
26	Papatheo	0,93	0,01		0,94
27	Pelangi	-	-	-	-
28	Perak	-	-	-	-
29	Jukung	-	-	-	-
30	Melinjo	0,04	-	-	0,04
31	Cina	-	-	-	-

No	Pulau	Kategori (ha)			Total Ha
		Jarang	Sedang	Lebat	
32	Semut Besar	-	-	-	-
33	Semut Kecil	0,49	-	-	0,49
34	Kelor Barat	-	-	-	-
35	Kelor Timur	-	-	-	-
36	Satu	1,63	0,16	0,77	2,56
37	Yu Barat	0,03	0,01	0,01	0,05
38	Yu Timur	-	-	-	-
39	Karang	-	-	-	-
40	Pantara Barat	0,26	0,06	0,13	0,44
41	Pantara Timur	-	-	-	-
42	Bunder	0,17	0,09	0,01	0,26
43	Kapas	0,01	0	0	0,01
44	Lipan	0,21	0	0	0,21
45	Sebaru Kecil	0,19	0,1	0,56	0,84
46	Nyamplung	0,04	0,01	0,01	0,06
47	Sebaru Besar	3,74	0,78	6,56	11,08
48	Rengat	0,43	0,02	0,03	0,48
49	Jagung	0,38	0,06	0,23	0,67
50	Pateloran Barat	0,03	0,2	0,03	0,27
51	Penjaliran Barat	1,84	0,42	5,18	7,44
52	Penjaliran Timur	3,14	0,46	3,2	6,8
53	Pateloran Timur	-	-	-	-
54	Dua Barat	0,33	0,1	0	0,43
55	Dua Timur	0,46	0,63	0,02	1,12
56	Pulau Sabira	0,13	0,23	0,39	0,75
Total		**18,87**	**4,05**	**20,4**	**43,29**
%		44%	9%	47%	100%

Sumber: Laporan Akhir Updating Ekosistem Bawah Laut tahun 2018 dan 2019, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Pada tabel di atas terlihat bahwa total tutupan mangrove pada pulau-pulau yang teridentifikasi hanya sekitar 43,29 Ha dimana kategori yang dominan adalah mangrove lebat (47%) dan jarang (44%). Hal ini menandakan bahwa pada dasarnya kondisi mangrove di Kepulauan Seribu dalam kondisi yang cukup baik namun rentan terhadap kerusakan.

Berdasarkan database keanekaragaman hayati Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, terdapat update informasi terkini terkait kondisi ekosistem mangrove di beberapa pulau di Kepulauan Seribu sebagai berikut.

Tabel 3-23 Kondisi Ekosistem Mangrove di Lokasi Sampling

Pulau	Koordinat	Jenis	Kategori (ha)		
			Tutupan	Kerapatan	CHDNcv
P. Panggang	E:106°36'37.89" S: 5°46'48.52"	Rm	Sedang	Sedang	Sedang
P. Panjang	E:106°33'33.59" S: 5°39'30.25"	Rm, Rs	Sedang	Sedang	Sedang
P. Pramuka	E:106°36'41.10" S: 5°44'55.75"	Rm, Rs	Sedang	Sedang	Sedang
P. Harapan	E:106°34'26.57" S: 5°39'12.71"	Rs, Sa	Sedang	Sedang	Sedang
P. Dua Timur	E:106°29'32.01" S: 5°25'22.45"	Rs, Rm, Ra	Sedang	Baik	Sedang
P. Sebaru Besar	E:106°33'0.42" S: 5°30'0.61"	Bg, Ra	Sedang	Baik	Sedang
P. Tongkeng	E:106°32'29.78"	Rm	Sedang	Buruk	Buruk

Pulau	Koordinat	Jenis	Kategori (ha)		
			Tutupan	Kerapatan	CHDNcv
	S: 5°35'32.28"				

Keterangan: a) kategori berdasarkan KEPMEN LH No. 201 Tahun 2004 dan b) kategori berdasarkan buku Panduan Monitoring Struktur Komunitas Mangrove di Indonesia (Dharmawan *et al*. 2020).

Sumber: Laporan Akhir Pemantauan Ekosistem Pesisir, Laut, dan Perhitungan IKL Provinsi DKI Jakarta, 2023

3.2.6 Area Bernilai Konservasi Tinggi

Nilai Konservasi Tinggi adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kawasan baik itu lingkungan maupun sosial, seperti habitat satwa liar, daerah perlindungan resapan air atau situs arkeologi (kebudayaan) dimana nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional atau global. Sedangkan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi adalah suatu area yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT). (Konsorsium Revisi *High Conservation Value Toolkit* Indonesia, 2008).

Gambar 3-47. Nilai – Nilai yang Terkandung Dalam Sebuah Kawasan dan Dianggap Sangat Penting Disebut Nilai Konservasi Tinggi

Tujuan pengelolaan dan pemeliharaan Area NKT adalah agar nilainya tetap terjaga dan tidak terdegradasi. Maka dari itu, pengelolaan atau manajemen yang semakin baik adalah dengan tetap mengacu pada tujuan tersebut diatas. Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi yang telah diidentifikasi kemudian dikelola dan dipelihara sehingga Nilai-Nilai Konservasi yang terdapat didalamnya dapat terjaga, tetap, bertambah, kembali seperti semula.

Dalam melakukan penilaian NKT terhadap suatu kawasan, ada enam kategori nilai yang digunakan sesuai dengan ketentuan dari *High Conservation Value Resource Network*, yaitu:

- NKT 1 Keanekaragaman hayati
- NKT 2 Ekosistem dan mosaic pada level lanskap
- NKT 3 Ekosistem dan habitat langka atau terancam punah
- NKT 4 Jasa Ekosistem
- NKT 5 Kebutuhan Masyarakat
- NKT 6 Nilai Kultural

Berdasarkan hasil analisis dari data yang tersedia, wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki kawasan atau area yang bernilai konservasi tinggi. Area NKT yang berada di wilayah DKI Jakarta adalah area NKT 1 yang merupakan suatu area yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan NKT 4 yang merupakan suatu area yang memiliki

tingkat kinerja jasa lingkungan yang tinggi. Pada area yang memiliki NKT 1 di DKI Jakarta, merupakan wilayah yang memiliki status sebagai kawasan konservasi yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi baik pada ekosistem darat dan juga laut. Kawasan konservasi tersebut terdiri dari Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, Cagar Alam Pulau Bokor, Suaka Margasatwa Muara Angke, Suaka Margasatwa Pulau Rambut Taman Wisata Alam Angke Kapuk dengan luasan total 104,702.3 Ha. Sedangkan, untuk area yang memiliki NKT 4 di DKI Jakarta, merupakan wilayah yang memiliki jasa lingkungan hidup tinggi terhadap penyedia dan pengaturan air, dengan luasan total 309 Ha.

Gambar 3-48. Peta Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Hasil Analisa 2022

Berdasarkan data DIKPLHD tahun 2020, pada kawasan yang memiliki NKT 1 di DKI Jakarta memiliki potensi KEHATI tinggi. Potensi tersebut antara lain, memiliki spesies dengan status dilindungi berdasarkan PP No. 7 tahun

1999 sebanyak 71 spesies dan status dilindungi berdasarkan IUCN sebanyak 36 spesies. Selain itu, area NKT 1 juga berfungsi sebagai tempat persinggahan spesies migrasi Asia Timur – Australia dan berfungsi atau berperan sebagai koridor alami berbagai tipe ekosistem. Secara rinci potensi KEHATI pada wilayah NKT 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3-24. Potensi KEHATI DKI Jakarta

NO	Keterangan	Suaka Margasatwa Pulau rambut EL 6.3.1	CA P.BOKOR EL 6.3.2	Suaka Margasatwa Muara Angke	Taman wisata alam angke kapuk
A	Luas	90 ha	18 ha	22,05 ha	99,82 ha
B	Spesies endemik/ dilindungi				
1	Ramsar site	Ramsar site			
2	Status dilindungi PP 7/1999	22 spesies	5 spesies	26 spesies	16 spesies
3	IUCN	Near Threatened 24 spesies Vulnerable 1 spesies Endagered 1 spesies Critically Endangered 1 spesies	Near Threatened 5 spesies Vulnerable 2 spesies		2 spesies
4	CITES	Appendix I 3 spesies Appendix II 3 spesies	Appendix II 4 spesies	Appendix I 1 spesies Appendix II 7 spesies Appendix III 1 spesies	
C	TEMPAT PERSINGGAHAN SPECIES MIGRASI ASIA TIMUR - AUSTRALIA	16 spesies	2 species	15 spesies	3 spesies
D	Tipe ekosistem yang berfungsi atau berperan sebagai koridor alami berbagai	Hutan mangrove Hutan dataran rendah Hutan pantai	Hutan pantai Hutan mangrove Hutan dataran rendah	Hutan mangrove Rawa	Hutan mangrove
1	Flora	159 spesies, 31 tumbuhan eksotik	83 spesies (4 belum teridentifikasi), 10 spesies lainnya eksotik	144 spesies, 61 spesies eksoitik	160 spesies, 87 eksotik
2	Fauna	91 spesies : 71 sp aves, 1 sp mamalia, 10 sp reptil, dan 9 sp biota laut	38 spesies : 34 sp aves, 1 sp primata, 2 sp reptil	142 spesies : 120 sp burung, 9 sp mamalia, 13 sp reptil dan amphibia	55 spesies : 48 sp aves, 3 sp mamalia, 4 sp reptil

Sumber: DIKPLHD, 2020

Sedangkan untuk kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu yang merupakan salah satu dari 6 Taman Nasional laut di Indonesia dan menjadi satu-satunya Taman Nasional yang terletak di Ibukota Negara, memiliki potensi KEHATI tinggi yaitu pada ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang. Ketiga ekosistem tersebut saling berinteraksi dan memiliki konektivitas secara fisik maupun biologi. Padang lamun berfungsi sebagai penyaring polutan dari daratan sebelum masuk ke ekosistem terumbu karang. Juga menjadi habitat komoditas hasil laut bernilai ekonomi tinggi seperti ikan baronang dan rajungan. Secara fisik ekosistem mangrove berfungsi sebagai penahan laju sedimentasi dari daratan, sehingga menjaga kejernihan air. Secara biologi, konektivitas ketiga ekosistem dapat dilihat dari habitat sebagai *nursery ground*. Hasil pengamatan Jaxion-Ham et al. (2012) menyimpulkan bahwa ikan juvenil banyak dijumpai di ekosistem lamun dan mangrove, sementara ikan dewasa

berada di terumbu karang. Taman Nasional Kepulauan Seribu memiliki luas tutupan mangrove sebesar 51,85 Ha, padang lamun seluas 147,26 Ha dan terumbu karang seluas 321,43 Ha.

Untuk wilayah NKT 4 di DKI Jakarta, merupakan wilayah yang memiliki kinerja jasa lingkungan hidup tinggi sebagai penyedia dan pengaturan air. Mengingat isu terhadap ketersediaan air bersih di Jakarta sangat tinggi, sehingga wilayah-wilayah yang memiliki jasa lingkungan hidup tinggi, memiliki nilai konservasi tinggi karena fungsi dan peran yang penting untuk kelangsungan kehidupan makhluk hidup.

3.3 Gambaran Keuangan Daerah dalam Pencapaian Indikator TPB

3.3.1 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel 3-25 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (juta Rupiah)
1.	2012	1.222.527.924
2.	2013	1.296.694.573
3.	2014	1.373.389.129
4.	2015	1.454.563.847
5.	2016	1.539.916.881
6.	2017	1.635.359.147
7.	2018	1.736.291.045
8.	2019	1.838.500.708
9.	2020	1.792.794.590
10	2021	1.856.075.820
11	2022	1.953.455.850

Sumber: BPS 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan yaitu yang semula Rp 1.222 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 1.953 triliun pada tahun 2022 (ADHK). Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, walaupun terus mengalami peningkatan secara nominal laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga konstan mengalami tren yang menurun terutama pada kurun 2019-2020 akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

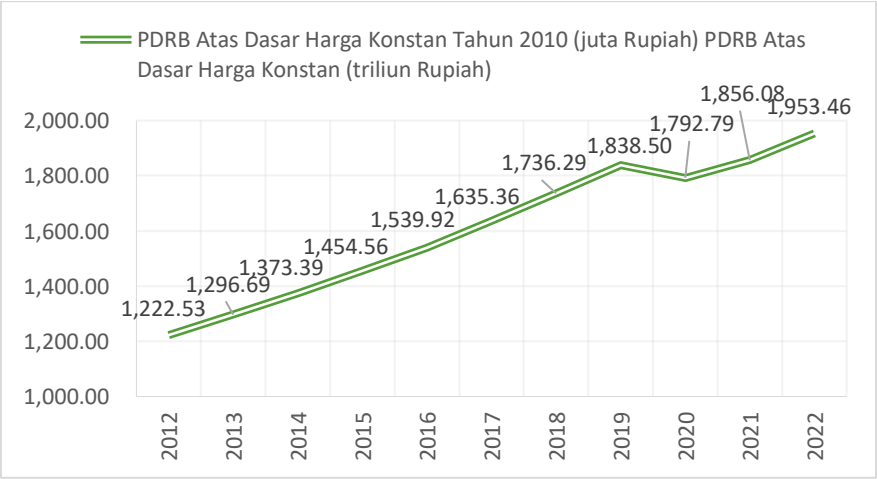

Gambar 3-49. PDRB ADHK 2012-2022

Sejalan dengan tren PDRB, pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta yang cenderung konstan pada tahun 2012 hingga 2019 yaitu diangka 5 – 6,5%. Namun demikian terjadi penurunan yang signifikan akibat pandemi COVID -19 mencapai – 2,4%. Perlahan ekonomi Jakarta mulai tumbuh dan mencapai angka pertumbuhan 5.3% pada tahun 2022.

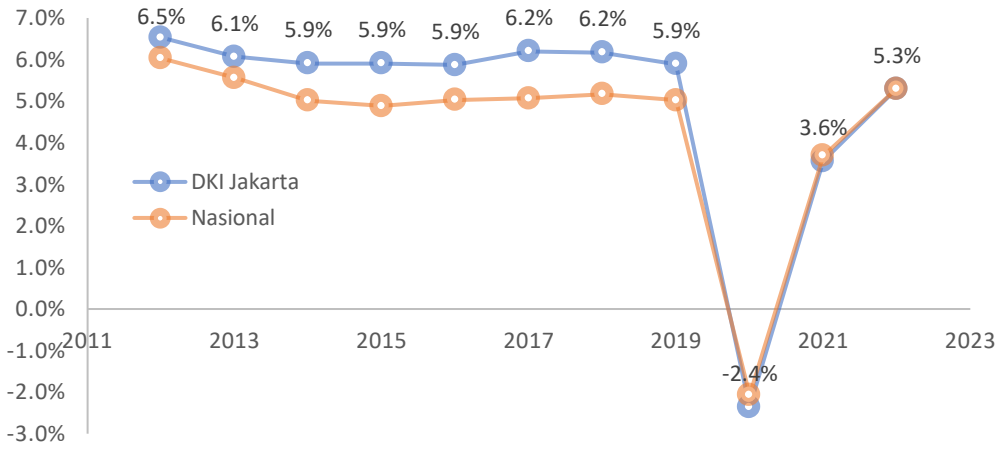

Gambar 3-50. Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2012-2022
Sumber: Evaluasi RPJPD 2005-2025

Apabila dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan 3 industri terbesar terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta dengan nilai kontribusi berada pada kisaran 16% selama periode 2012-2020. Sektor ekonomi yang mengalami tren peningkatan kontribusi adalah sektor informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dari enam sektor tersebut peningkatan tren paling signifikan ditunjukkan oleh sektor informasi dan komunikasi.

Gambar di bawah ini juga memperlihatkan struktur ekonomi Provinsi DKI Jakarta, dimana perekonomian Provinsi DKI Jakarta lebih ditunjang oleh sektor perdagangan besar dan eceran; konstruksi; industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada saat ini terletak pada kelima sektor tersebut. Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian kelima sektor tersebut.

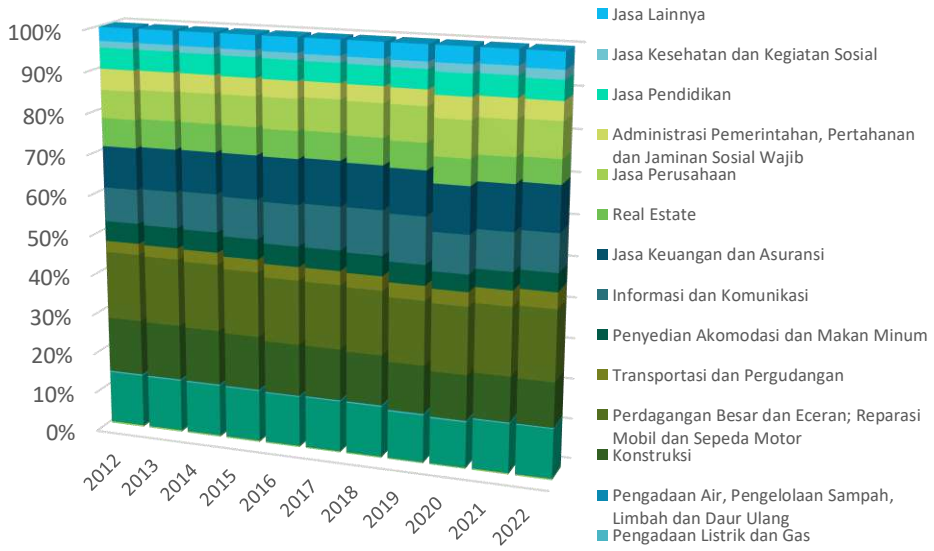

Gambar 3-51 Struktur Ekonomi Provinsi DKI Jakarta
Sumber: BPS 2023

3.3.2 Pendapatan Daerah

Menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Berdasarkan data APBD DKI Jakarta 2018-2022, pendapatan daerah DKI Jakarta secara total mengalami tren meningkat dari 61 triliun pada 2018 menjadi 88 triliun pada 2020, namun mengalami penurunan cukup banyak pada tahun 2021 menjadi 66 triliun dan menurun lagi menjadi 62 triliun pada tahun 2022. Penurunan terjadi sebagai akibat dari Pandemi Covid-19 dan kondisi global dimana sektor perekonomian mengalami kontraksi yang sangat kuat.

Sedangkan berdasarkan sumber pendapatan daerah pada Tabel 3-26Tabel 3-26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Menurut Sumber Penerimaan (milyar rupiah) DKI Jakarta sejak tahun 2018 telah menunjukkan diri sebagai daerah yang memiliki kemandirian fiskal dengan proporsi pendapatan asli daerah dari sektor pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah dan sumber PAD lainnya yang sah di atas 60 persen bahkan menjadi 70an persen pada tahun 2022. Dengan kemandirian fiskal ini maka DKI akan mampu bertahan apabila statusnya tidak lagi menjadi ibukota negara, namun tetap harus berinovasi meningkatkan pendapatan daerah untuk mengisi potensi kehilangan yang akan terjadi.

Tabel 3-26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Menurut Sumber Penerimaan (milyar rupiah)

No	SUMBER PENDAPATAN DAERAH	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	**Pendapatan**	**61,235,821.00**		**62,295,830.00**		**82,311,510.00**		**66,000,700.00**		**62,949,960.00**	
A	**Pendapatan Asli**	**43,327,135.00**	**70.75**	**45,701,580.00**	**73.36**	**57,561,160.00**	**69.93**	**41,606,300.00**	**63.04**	**45,635,080.00**	**72.49**
1	Pajak Daerah	37,538,912.00		40,298,700.00		50,170,000.00		34,575,560.00		40,340,450.00	
2	Retribusi Daerah	578,555.00		587,450.00		755,750.00		383,860.00		375,850.00	
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	592,956.00		619,460.00		750,000.00		398,790.00		415,920.00	
4	Lain-lain PAD yang sah	4,616,712.00		4,195,970.00		5,885,410.00		6,248,090.00		4,502,850.00	
B	**Dana Perimbangan/Transfer Daerah**	**17,855,175.00**	**29.16**	**14,494,390.00**	**23.27**	**21,733,820.00**	**26.40**	**22,673,790.00**	**34.35**	**17,141,130.00**	**27.23**
1	Bagi hasil pajak	15,026,197.00		11,585,300.00		18,387,830.00					
2	Bagi hasil sumber daya	183,375.00		113,090.00		115,520.00					
3	Dana Alokasi Khusus	2,645,603.00		2,796,000.00		3,230,470.00					
C	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**53,511.00**	**0.09**	**2,099,860.00**	**3.37**	**3,016,530.00**	**3.66**	**1,720,610.00**	**2.61**	**173,750.00**	**0.28**
1	Pendapatan hibah	53,511.00		2,042,680.00		2,953,910.00		1,286,910.00		168,990.00	
	Dana Penyesuaian dan otonomi daerah			57,180.00		62,620.00		433,700.00		4,760.00	

Sumber: Jakarta dalam Angka 2019, 2020, dan 2021 BPS, www.djpk.go.id dan Pengolahan Data 2023

Untuk tahun Anggaran 2023, APBD DKI Jakarta sudah disahkan senilai Rp 83,7 triliun. Alokasi anggaran akan digunakan untuk 3 (tiga) program prioritas di tahun ini adalah 1) Penanganan banjir; 2) penanganan kemacetan dan 3) antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi (resesi). Alokasi anggaran untuk ketiga program tersebut adalah berkisar 41,27 persen.

3.4 Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB

Menurut Panduan Kemitraan Multipihak (KMP) untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (2019) yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemitraan multipihak adalah kerja sama antara **pemerintah, swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan media** dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Kemitraan multipihak dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)[2] sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi:

(1) Kemitraan Multipihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga media massa, dan/atau lembaga lainnya yang berkepentingan.
(2) Kemitraan Multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, sinergi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan TPB.
(3) Kemitraan Multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
    a. Berdasarkan kesepakatan bersama dan saling menghormati;
    b. Berorientasi pada hasil dan dampak;
    c. Berkelanjutan dan beradaptasi dengan perubahan;
    d. Transparan dan bertanggung jawab; dan
    e. Memperhatikan aspek gender dan inklusif.

Pentingnya keterlibatan aktor non-pemerintah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah[3] yang menekankan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah (Bab 2); dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah (Bab 3).

Berdasarkan karakteristik kemitraan di Indonesia, Panduan Kemitraan Multi Pihak mendefinisikan KMP sebagai bentuk kerja sama yang berlandaskan kesepakatan sukarela, saling membutuhkan, kebersamaan dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan yang berasal dari berbagai spektrum institusi, baik pemerintah, sektor bisnis, masyarakat sipil dan LSM (NGO) dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dalam isu yang dikerjasamakan. KMP dapat berupa kemitraan yang formal atau informal tergantung keberadaan, tipe dan isi klausul perjanjian kerja sama dan tipe kelembagaan yang diputuskan bersama. KMP merupakan bentuk kerja sama dimana seluruh pemangku kepentingan menanggung risiko secara bersama-sama dan menggabungkan sumber daya manusia, finansial, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk memaksimalkan potensi dalam mencapai tujuan bersama. KMP dapat beroperasi pada berbagai tingkat di tataran global, regional, nasional dan lokal.

Pembangunan segala sektor di DKI Jakarta tidak terlepas dari peran para pihak. Identifikasi para pihak dilakukan dengan melihat kontribusinya pada pencapaian TPB, hal ini juga tercantum dalam laporan pencapaian TPB. Tabel di bawah ini menunjukkan kontribusi mitra pembangunan ke dalam indikator TPB.

---

[2] Lihat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

[3] Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mitra	Kontribusi Capaian TPB
1. UN Habitat	TPB 16, indikator 16.1.2.(a), TPB 11, indikator 11.7.1(a)
2. AUSAID – MAMPU	TPB 16, indikator 16.2.1.(b) TPB 5, indikator 5.2.2.*
	TPB 16, indikator 16.3.1.(a), 16.10.1.(b) TPB 11, indikator 11.7.2.(a) TPB 10, indikator 10.3.1.(c)
3. MAMPU	TPB 10, indikator 10.4.1.(b) TPB 1
	TPB 8, indikator 8.3.1*, 8.3.1.(c)
4. USAID – MAJU	TPB 16, indikator 16.2.1.(b)
	TPB 16, indikator 16.10.1.(b) TPB 11, indikator 11.7.2.(a) TPB 10, indikator 10.3.1.(c) TPB 5, indikator 5.2.2.*
5. European Union	TPB 16, indikator 16.6.1.(d)
	TPB 11, indikator 11.3.2.(a)
6. IDLO	TPB 16, indikator 16.10.1.(b)
7. LBH Apik	TPB 16, TPB 10 indikator 10.3.1.(c) TPB 5, indikator 5.2.2.*
	TPB 16, indikator 16.10.1.(b) TPB 5, indikator 5.2.2.*
8. Yayasan Karina	TPB 12, indikator 12.5.1.(a), TPB 11, indikator 11.6.1.(a), TPB 8, indikator 8.3.1.(b)
	TPB 8, indikator 8.3.1.(b) TPB 2, indikator 2.1.1* TPB 1
	TPB 11, indikator 11.5.1.(b)
	TPB 6, indikator 6.1.1.(a), TPB 1 1.4.1 (d)
	TPB 6, indikator 6.2.1.(c)
	TPB 4, indikator 4.4.1*
9. InsWa	TPB 12, indikator 12.5.1.(a) TPB 11, indikator 11.6.1.(a)
	TPB 16

Mitra	Kontribusi Capaian TPB
10. UCLG	TPB 11, indikator 11.5.1.(b)
11. RCUS Goethoeus Institute	TPB 11, indikator 11.1.1(a) TPB 11, indikator 11.3.2.(a) TPB 11, indikator 11.6.1.(a)
12. FES	TPB 11, indikator 11.1.1(a)
13. Yayasan Plan International	TPB 16, indikator 16.10.1.(b) TPB 11, indikator 11.3.2.(a) TPB 5, indikator 5.2.1* TPB 8, indikator 8.6.1*
14. PPNI	TPB 11, indikator 11.5.1*, TPB 3, TPB 2, TPB 1
15. Platform Muria	TPB 11, TPB 6, TPB 2, TPB 1 TPB 4, indikator 4.4.1*
16. Rumah Zakat	TPB 10, indikator 10.1.1*, 10.1.1.(a), 10.2.1*, TPB 1 TPB 5, indikator 5.6.1.(a), TPB 3, 3.7.1.(a), TPB 1 indikator 1.4.1.(c) TPB 4, indikator 4.1.1.(d), TPB 1 TPB 2, indikator 2.1.1.(a) TPB 1, indikator 1.4.1.(a) TPB 1, indikator 1.4.1.(b)
17. Komunitas Raksasa	TPB 8, indikator 8.2.1*
18. Armor Indonesia	TPB 8, indikator 8.2.1*
19. Accenture	TPB 8, indikator 8.6.1*
20. PAM Jaya	TPB 6, indikator 6.1.1.(a) TPB 6, indikator 6.1.1.(b) TPB 6, indikator 6.1.1.(c), TPB 1, 1.4.1.(d)
21. GIZ	TPB 6, indikator 6.2.1.(c), TPB 1 1.4.1 (e)

Mitra	Kontribusi Capaian TPB
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH	
22. **Jakarta Berketahanan**	TPB 6, indikator 6.2.1.(c), TPB 1 1.4.1 (e)
23. **Youth Coalition for Girls**	TPB 5, indikator 5.2.1.(a)
24. **Google**	TPB 5, indikator 5.2.1.(a)
25. **ECPAT**	TPB 5, indikator 5.2.1.(a)
26. **ICT Watch**	TPB 5, indikator 5.2.1.(a)
27. **Sejiwa**	TPB 5, indikator 5.2.1.(a)
28. **Yayasan Tunas Muda Care**	TPB 4, indikator 4.1.1*, TPB 1
29. **YPAC**	TPB 4, indikator 4.a.1* TPB 1
30. **IGI**	TPB 4, indikator 4.c.1*
31. **PGRI**	TPB 4, indikator 4.c.1*
32. **IBI bersama masyarakat**	TPB 3, indikator 3.1.1*, 3.2.2.(b) TPB 2, indikator 2.1.1.(a), 2.2.2* TPB 1

Mitra	Kontribusi Capaian TPB
33. IPPI	TPB 3, indikator 3.3.1.(a)
34. Smoke Jakarta	TPB 3, indikator 3.3.1.(a), 3.a.1*
35. ITMI	TPB 1, indikator 1.3.1.(c)
36. Yayasan Mitra Netra	TPB 1, indikator 1.3.1.(c)
37. YDMI & Mitra	TPB 1, indikator 1.3.1.(c)
38. Yayasan Peduli Anak Berkebutuhan Khusus	TPB 1, indikator 1.3.1.(c)

BAB 4

ANALISIS TPB

- Proses Identifikasi dan Perumusan Isu PB
- Identifikasi dan Perumusan Isu PB dengan Pendekatan Teknokratik
- Perumusan Isu PB Strategis
- Kerangka Kajian Isu PB Strategis dan Kajian Pengaruh terhadap Konfisi Lingkungan Hidup

BAB 4 ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.1 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi dan perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik dan pendekatan deliberatif/partisipatif yaitu melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, untuk menjamin agar proses ini menghasilkan daftar isu-isu pembangunan yang komprehensif serta rumusan isu strategis yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Telaah literatur meliputi: (a) status pencapaian target indikator pembangunan berkelanjutan (TPB), (b) dokumen terkait kondisi lingkungan wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan (c) dokumen-dokumen perencanaan strategis. Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dari ke tiga kategori dokumen perencanaan strategis tersebut (daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan) kemudian ditelaah dengan menggunakan metode analisis substansi (*content analysis*) untuk memperoleh daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan strategis.

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan melakukan pengumpulan data terkait status pencapaian target dari 253 indikator pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Data status pencapaian target 253 indikator TPB ini kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran tentang indikator-indikator yang pencapaian targetnya perlu diberi perhatian khusus untuk periode lima tahun ke depan.

Selain itu juga dilakukan upaya identifikasi isu pembangunan berkelanjutan melalui telaah kondisi lingkungan wilayah Provinsi DKI Jakarta, terutama yang terkait dengan: (a) daya dukung dan daya tampung LH; (b) ketahanan keanekaragaman hayati; (c) dampak dan risiko LH; (d) layanan dan jasa ekosistem; (e) pemanfaatan dan efisiensi SDA; dan (f) kerentanan dan adaptasi “bencana”, termasuk perubahan iklim.

Upaya identifikasi isu pembangunan berkelanjutan adalah menelaah dokumen-dokumen perencanaan strategis yang relevan dengan Provinsi DKI Jakarta yang meliputi dokumen perencanaan strategis yang berskala nasional, regional (Jabodetabekpunjur), dan provinsi. Secara keseluruhan ada tujuh dokumen perencanaan strategis yang ditelaah. Daftar isu-isu pembangunan ini ditelaah lebih lanjut dengan mencermati perbedaan dan persamaan agar dapat disintesis menjadi daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan.

Proses dan hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf-paragraf di atas kemudian dipaparkan dalam satu *Focus Group Discussion* (FGD) dengan undangan sebanyak 50 (lima puluh) peserta dari berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk pengayaan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dan penajaman perumusan isu pembangunan strategis. Hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dari proses FGD ini selanjutnya divisualkan dengan menggunakan Aplikasi *Gephi* untuk memperlihatkan saling keterkaitan antar isu strategis maupun antar isu-isu pembangunan terkait lainnya.

Hasil pengayaan daftar isu dan penajaman perumusan isu pembangunan berkelanjutan dari proses FGD kemudian dibawa ke forum Konsultasi Publik, dengan undangan sebanyak 100 (seratus) peserta dari berbagai kelompok kepentingan mendapatkan umpan balik dari publik. Umpan balik dan masukan dari Konsultasi Publik digunakan untuk finalisasi daftar dan rumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis.

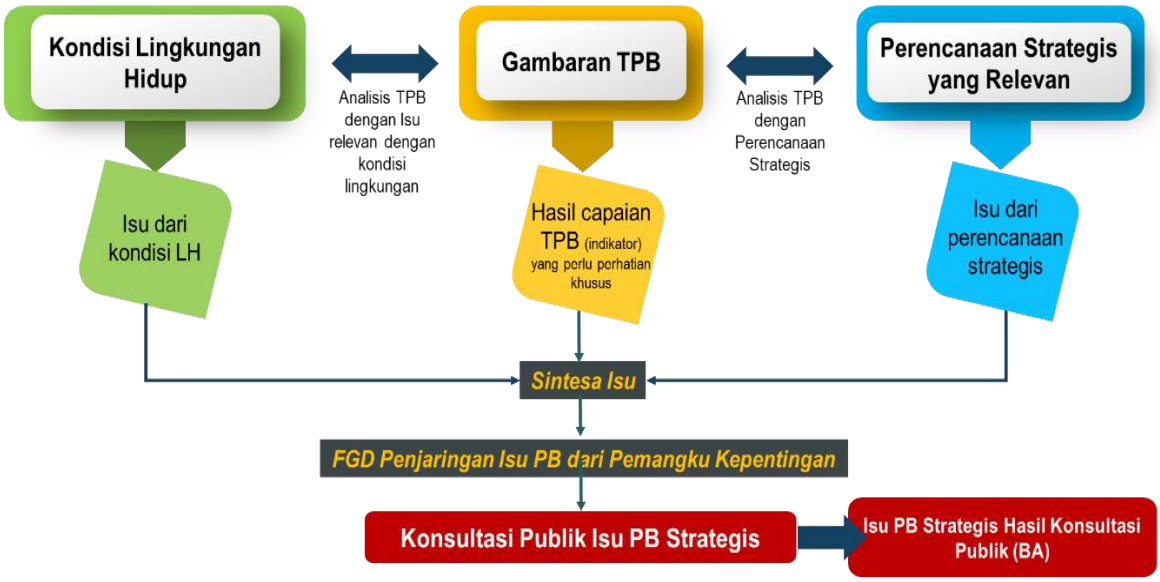

Gambar 4-1 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

4.2 Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan Pendekatan Teknokratik

4.2.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Gambaran Umum Capaian TPB

Dasar pemikiran utama (*layer 1*) dalam upaya mengidentifikasi isu pembangunan dari status pencapaian target indikator-indikator TPB meliputi dua pertimbangan. Pertama, indikator-indikator TPB yang jarak capaian (*gap*) terhadap target yang ditetapkan masih lebar, maka indikator-indikator tersebut dijadikan dasar dalam menentukan isu pembangunan berkelanjutan. Semakin lebar jarak antara capaian dengan target, maka semakin besar potensi untuk dianggap sebagai isu pembangunan berkelanjutan. Kedua, indikator-indikator TPB yang tidak ada data capaiannya dianggap merupakan indikator untuk dipertimbangkan dalam menentukan isu pembangunan berkelanjutan. Semakin besar persentase ketiadaan data, maka semakin besar pula potensi untuk dijadikan isu pembangunan berkelanjutan.

Sesuai arahan Permendagri No. 7/2018, identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan menelaah status pencapaian target indikator TPB untuk menemukan indikator-indikator yang memerlukan perhatian khusus agar targetnya tercapai dalam periode perencanaan berikutnya. Analisis dilakukan dengan 253 indikator TPB sesuai dengan Metadata TPB Edisi I. Pemilihan 253 indikator TPB sesuai dengan kewenangan Provinsi DKI Jakarta yang secara otonomi juga memiliki sebagian kewenangan Kabupaten/Kota. Data capaian diperoleh dari Sekretariat TPB Provinsi DKI Jakarta yang setiap tahun melakukan evaluasi capaian TPB, sebagaimana terdapat pada Lampiran 8.

Status capaian TPB sesuai dengan Pedoman Pembuatan KLHS RPJMD dari Kemendagri 2023 dikategorikan menjadi 4 (empat) yaitu:

1) Indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target;
2) Indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target;
3) Indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target;
4) Indikator yang tidak tersedia data.

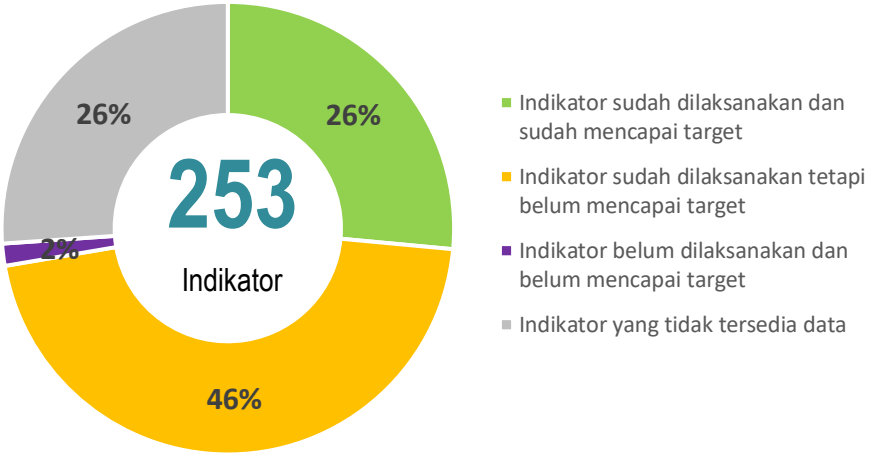

Gambar 4-2 Gambaran Capaian TPB DKI Jakarta

Berdasarkan pencapaian dari masing-masing target TPB yang ditunjukkan pada diagram di atas, 26% indikator atau 67 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 46% indikator atau 116 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 2% indikator atau 4 indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, serta 26% indikator atau 66 indikator tidak tersedia data. Secara umum, gambaran capaian TPB untuk setiap pilar dijabarkan pada gambar di bawah ini. Pilar lingkungan memiliki persentase indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target terbesar dibanding pilar lainnya yaitu sebesar 38,8%. Selain itu pilar hukum dan tata kelola memiliki indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebesar 12,9%.

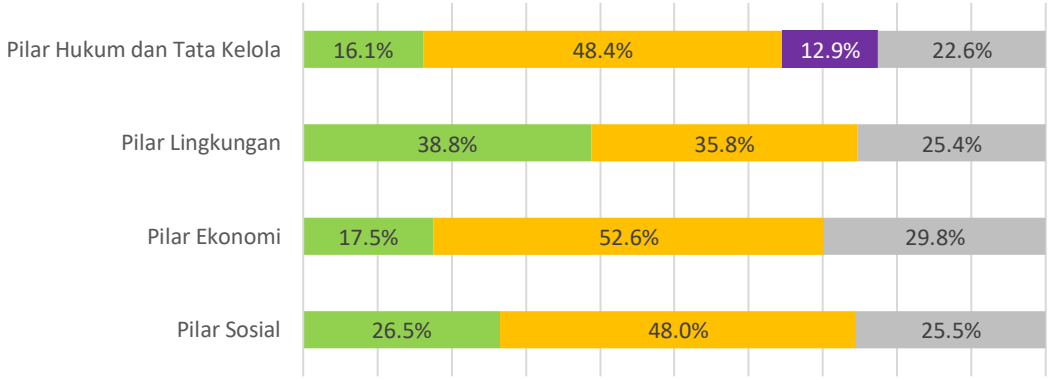

Gambar 4-3 Capaian Tiap Pilar

Setelah itu untuk analisis selanjutnya, dilakukan pengategorisasian capaian TPB berdasarkan Pedoman Monev TPB Bappenas yang menjadi acuan Laporan TPB provinsi setiap tahunnya. Hal ini dilakukan sebagai pemenuhan kategori yang ada pada kedua pedoman.

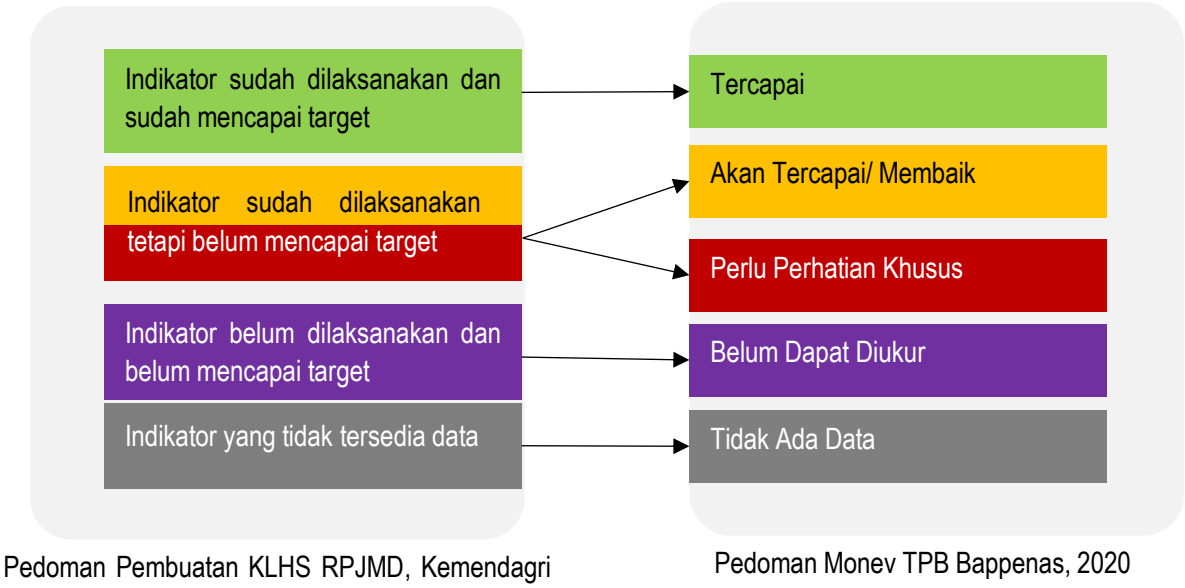

Gambar 4-4. Persandingan Kategori Status Capaian TPB

Berdasarkan persandingan di atas, status capaian TPB menurut berdasarkan Pedoman Monev TPB Bappenas terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagaimana dijelaskan berikut.

Tabel 4-1 Kategori Capaian TPB DKI Jakarta

Kategori	Deskripsi
Tercapai	Target tahun berjalan telah tercapai
Akan Tercapai/ Membaik	Tren capaian naik dari tahun sebelumnya, walaupun belum mencapai target tahun berjalan
Perlu Perhatian Khusus	Tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai
Tidak Ada Data	Tidak tersedia data capaian
Belum Dapat Diukur	Capaian indikator belum dapat diukur karena terdapat perbedaan metode dan penghitungan capaian indikator dengan tahun sebelumnya

Sumber: Pedoman Monev TPB Bappenas

Distribusi capaian TPB 2022 ditunjukkan pada Gambar 4-3 di samping. Dari analisis data pencapaian target indikator TPB tahun 2022 per tanggal 19 Juni 2023, dari 253 indikator TPB, sebanyak 26% (67 Indikator) telah mencapai target. Namun demikian, terdapat 46 indikator (18%) yang memerlukan perhatian khusus dan 66 indikator (26%) yang tidak tersedia datanya, atau sejumlah 112 indikator yang berpotensi problematik. Indikator yang perlu perhatian khusus menjadi salah satu dasar identifikasi isu dari capaian TPB.

Secara umum, gambaran capaian TPB untuk setiap pilar adalah sebagai berikut.

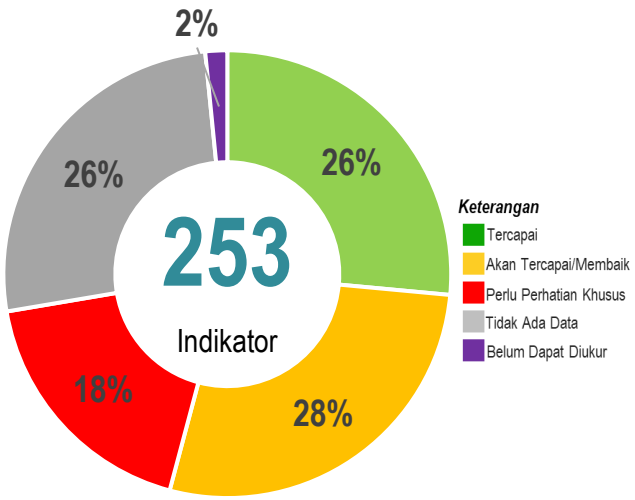

Gambar 4-5. Gambaran Capaian TPB DKI Jakarta tahun 2022

Berikut ini dijelaskan secara singkat capaian masing-masing TPB pada setiap Pilar beserta permasalahannya.

4.2.1.1 Gambaran Umum Capaian TPB

PILAR SOSIAL

Pilar sosial terdiri dari TPB 1. Tanpa Kemiskinan, TPB 2. Tanpa Kelaparan, TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 4. Pendidikan Berkualitas dan TPB 5. Kesetaraan Gender. Gambaran tiap TPB dijabarkan sebagai berikut.

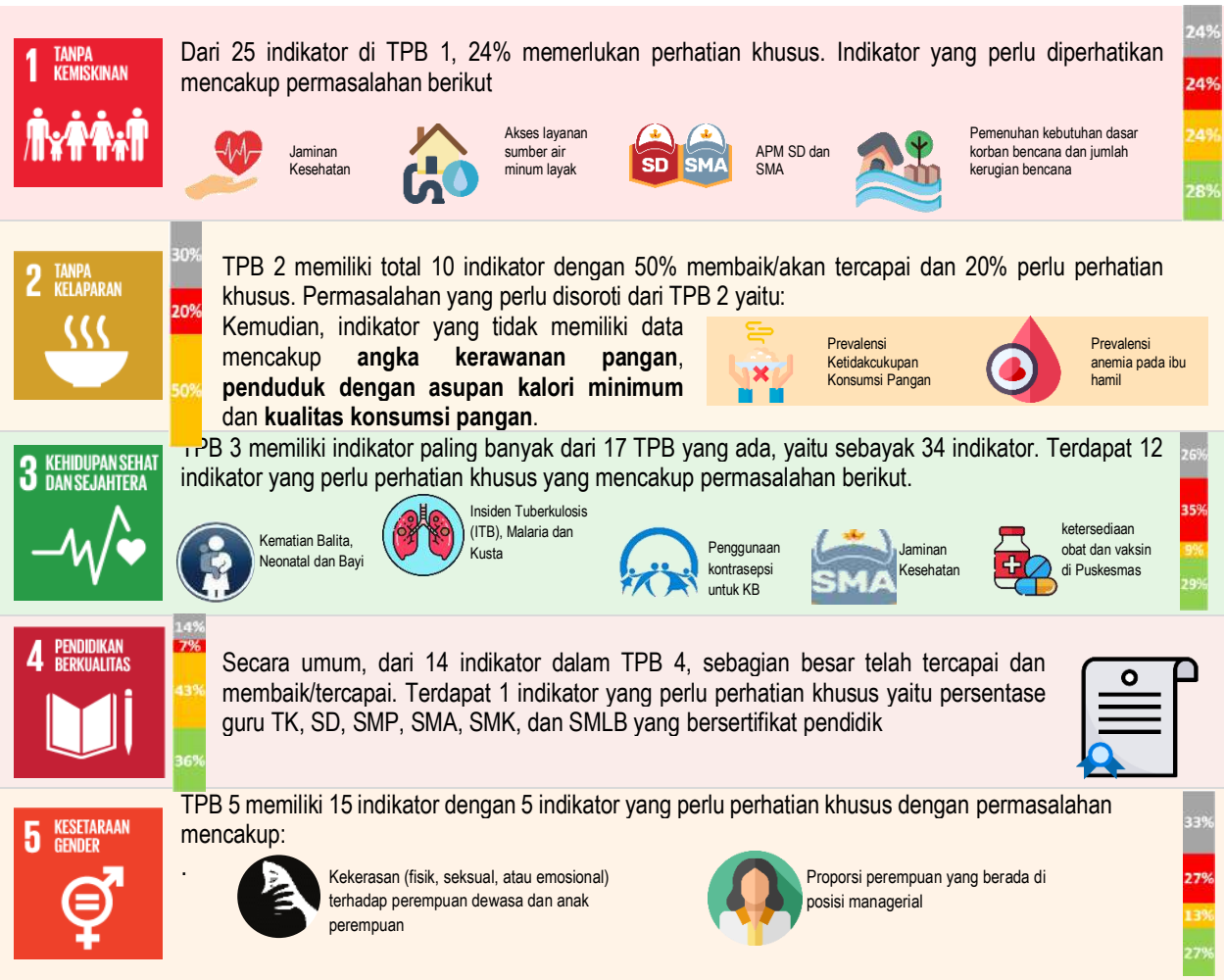

Pilar Ekonomi

Pilar Pembangunan Ekonomi mencakup TPB 7. Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 8. Ekonomi dan Penghidupan Layak, TPB 9. Industri dan Infrastruktur, TPB10. Berkurangnya Kesenjangan, dan TPB 17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan

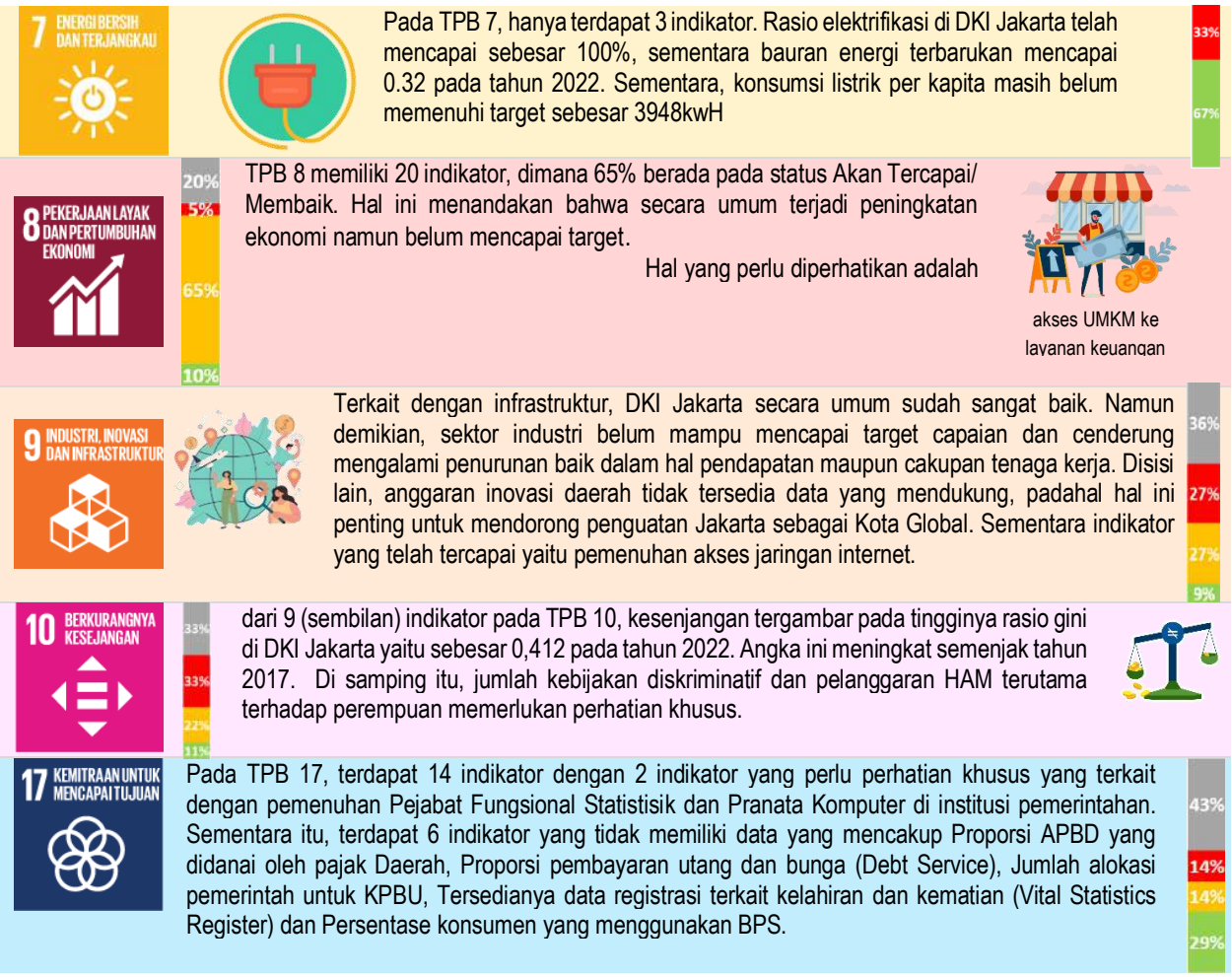

Pada TPB 7, hanya terdapat 3 indikator. Rasio elektrifikasi di DKI Jakarta telah mencapai sebesar 100%, sementara bauran energi terbarukan mencapai 0.32 pada tahun 2022. Sementara, konsumsi listrik per kapita masih belum memenuhi target sebesar 3948kwH

TPB 8 memiliki 20 indikator, dimana 65% berada pada status Akan Tercapai/ Membaik. Hal ini menandakan bahwa secara umum terjadi peningkatan ekonomi namun belum mencapai target.

Hal yang perlu diperhatikan adalah

Terkait dengan infrastruktur, DKI Jakarta secara umum sudah sangat baik. Namun demikian, sektor industri belum mampu mencapai target capaian dan cenderung mengalami penurunan baik dalam hal pendapatan maupun cakupan tenaga kerja. Disisi lain, anggaran inovasi daerah tidak tersedia data yang mendukung, padahal hal ini penting untuk mendorong penguatan Jakarta sebagai Kota Global. Sementara indikator yang telah tercapai yaitu pemenuhan akses jaringan internet.

dari 9 (sembilan) indikator pada TPB 10, kesenjangan tergambar pada tingginya rasio gini di DKI Jakarta yaitu sebesar 0,412 pada tahun 2022. Angka ini meningkat semenjak tahun 2017. Di samping itu, jumlah kebijakan diskriminatif dan pelanggaran HAM terutama terhadap perempuan memerlukan perhatian khusus.

Pada TPB 17, terdapat 14 indikator dengan 2 indikator yang perlu perhatian khusus yang terkait dengan pemenuhan Pejabat Fungsional Statistisik dan Pranata Komputer di institusi pemerintahan. Sementara itu, terdapat 6 indikator yang tidak memiliki data yang mencakup Proporsi APBD yang didanai oleh pajak Daerah, Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service), Jumlah alokasi pemerintah untuk KPBU, Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) dan Persentase konsumen yang menggunakan BPS.

Pilar Lingkungan

Pilar Pembangunan Lingkungan mencakup TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab, TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim, TPB 14. Ekosistem Lautan, dan TPB 15. Ekosistem Darat.

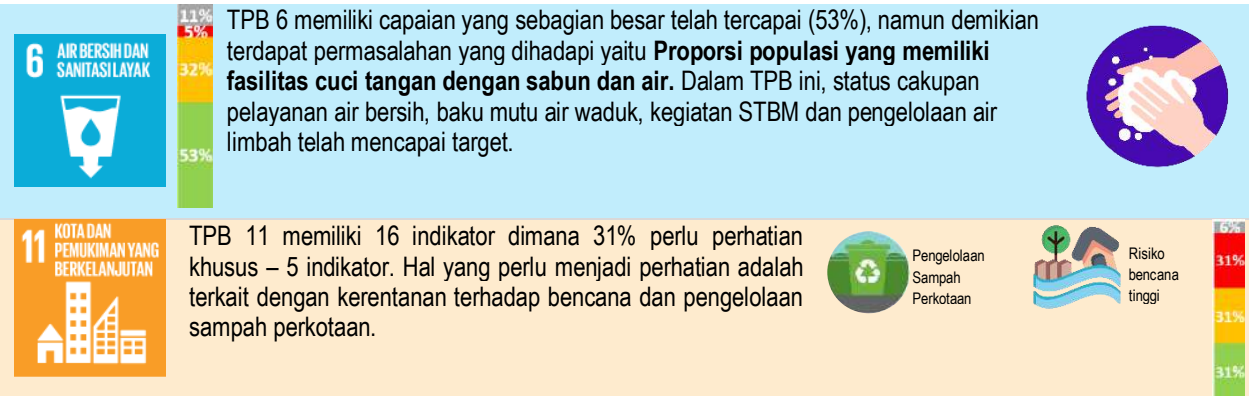

TPB 6 memiliki capaian yang sebagian besar telah tercapai (53%), namun demikian terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu **Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.** Dalam TPB ini, status cakupan pelayanan air bersih, baku mutu air waduk, kegiatan STBM dan pengelolaan air limbah telah mencapai target.

TPB 11 memiliki 16 indikator dimana 31% perlu perhatian khusus – 5 indikator. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan kerentanan terhadap bencana dan pengelolaan sampah perkotaan.

hanya terdapat 7 (tujuh) indikator pada TPB 12, dimana sebagian besar tidak memiliki data yang mencakup pelayanan pengelolaan limbah B3, perusahaan yang menerapkan ISO 14001 dan fasilitas publik yang menerapkan SPM. Meskipun pada TPB ini tidak ada indikator yang perlu perhatian khusus, namun demikian praktik pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab perlu diperdalam mengingat limbah yang dihasilkan baik dari industri maupun domestik memperburuk kualitas lingkungan hidup di DKI Jakarta.

TPB 13 hanya memiliki 4 indikator, dimana didominasi oleh indikator ketersediaan dokumen yang terkait dengan perubahan iklim. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah memerlukan perhatian khusus karena belum mencapai target. Idealnya, indikator utama dalam perubahan iklim yaitu Emisi GRK yang belum tergambar pada TPB ini.

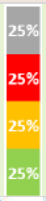

terdapat 9 (sembilan) indikator dalam TPB 14 dimana sebagian besar telah tercapai yang mencakup kerangka kebijakan pengelolaan laut, pengelolaan wilayah perikanan dan kawasan konservasi laut. Terdapat satu indikator yang tidak memiliki data yaitu proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.

Potensi Perikanan

Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

terdapat 12 indikator pada TPB 15 dimana 75% tidak tersedia datanya. TPB 15 merupakan TPB yang paling banyak tidak tersedianya datanya. Ketika ditelaah lebih lanjut, TPB 15 menekankan pada kawasan konservasi dan kehutanan, yang mana memang kurang sesuai dengan karakteristik DKI Jakarta. Indikator yang perlu perhatian dan relevan dengan DKI Jakarta yaitu pemenuhan ketersediaan RTH.

Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola hanya terdiri dari TPB 16 yaitu Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

dari 31 indikator yang ada di TPB 16, terdapat 4 indikator yang belum dapat diukur yaitu Indeks Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil dan Indeks Hak-hak Politik dan Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. Hal ini disebabkan karena pada saat pengumpulan terdapat metode perhitungan baru yang belum dilakukan. Indikator yang perlu perhatian khusus terkait dengan tingkat kriminalitas dan keamanan masyarakat.

4.2.1.2 Identifikasi Isu

Setelah diidentifikasi jumlah indikator TPB yang memerlukan perhatian khusus dan jumlah indikator TPB yang capaiannya tidak didukung dengan data, selanjutnya digunakan 3 (tiga) faktor untuk menentukan isu pembangunan berkelanjutan dari gambaran TPB.

Kesatu, persentase jumlah indikator yang perlu mendapat perhatian khusus dalam masing-masing TPB terhadap **total jumlah indikator TPB (253 indikator)**. Semakin tinggi persentasenya berarti semakin tinggi pula kontribusinya terhadap pencapaian target TPB, dan oleh karenanya semakin besar pula kemungkinannya sebagai isu pembangunan strategis.

Kedua, persentase jumlah indikator yang perlu mendapat perhatian khusus dalam masing-masing TPB terhadap keseluruhan jumlah indikator dalam **TPB yang bersangkutan**.

Ketiga, persentase jumlah indikator yang tidak didukung dengan keberadaan data dalam masing-masing TPB terhadap jumlah indikator dalam TPB yang bersangkutan. Semakin tinggi ketidaktersediaan data, maka membuka

peluang menurunkan capaian TPB. Tingkat kepercayaan (*confidence level*) tinggi apabila ketersediaan data minimal mencapai 80 persen. (Lazuardi, 2016).

Pola pikir yang dijadikan dasar untuk menentukan isu pembangunan dari data-data pencapaian target dari masing-masing indikator TPB seperti dijelaskan di atas disajikan dalam Gambar 4-6 di bawah.

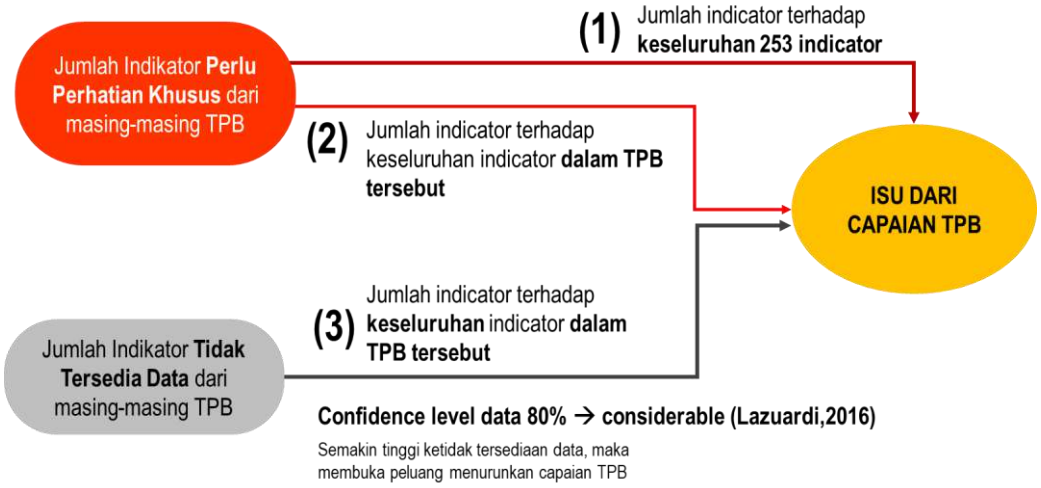

Gambar 4-6 Pola Pikir Identifikasi Isu Pembangunan Berdasarkan Data Pencapaian Target TPB

Untuk indikator dengan perhatian khusus, didapatkan hasil analisis untuk faktor (1) dan (2) sebagaimana Gambar berikut.

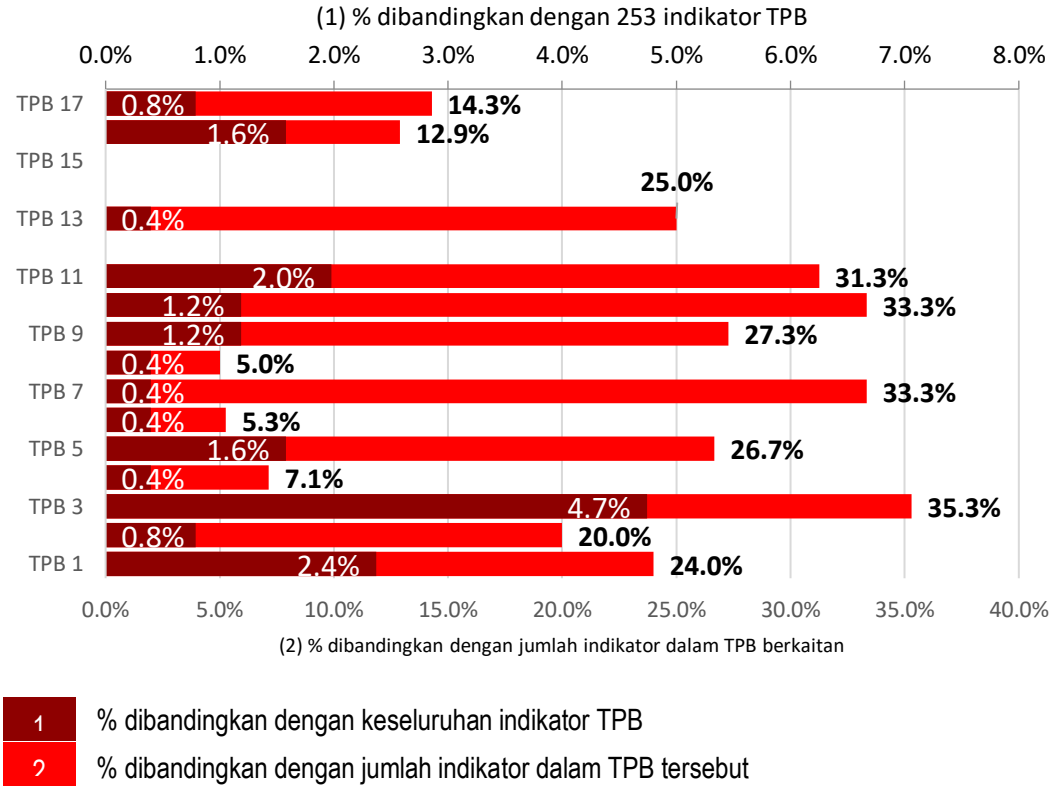

Gambar 4-7. Persentase indikator perlu perhatian khusus.
Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan Gambar 4-4 di atas, terlihat bahwa TPB 3 memiliki persentase indikator yang perlu perhatian khusus terbanyak baik dibandingkan dengan jumlah indikator TPB 3 maupun keseluruhan indikator TPB. Dari 34 indikator di TPB 3, terdapat 10 indikator yang perlu perhatian khusus. Dari hasil analisis tersebut **dilakukan pemeringkatan dengan peringkat atas yang memiliki persentase terbesar**.

Dari tampilan grafis dalam Gambar 4-4 di atas tampak dengan jelas sejumlah TPB yang memerlukan perhatian khusus. Namun, agar tidak terkecoh dengan penampilan grafis saja, perlu penelaahan yang lebih cermat agar tidak salam membuat kesimpulan.

Perlu dicermati TPB 13 – Penanganan Perubahan Iklim. Di dalam TPB 13 ini terdapat indikator-indikator sebagai berikut:

13.1.1*. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah

13.1.2*#. Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah

13.2.1*. Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia

13.2.1.(a). Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)

Apabila dicermati, tiga dari empat indikator tersebut hanya berupa dokumen, dan satu berisikan indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut tidak menggambarkan secara faktual kinerja Provinsi DKI Jakarta dalam menangani permasalahan-permasalahan terkait perubahan iklim. Idealnya, TPB ini berisikan indikator-indikator kunci yang menggambarkan kinerja daerah dalam perubahan iklim, seperti pengurangan tingkat emisi GRK.

Kemudian, perlu juga dicermati TPB 6. Walaupun tingkat pencapaian targetnya tampak sudah cukup bagus, namun sebenarnya belum cukup menggambarkan permasalahan sebenarnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagian besar indikator sudah tercapai dengan 1 (satu) indikator yang perlu perhatian khusus yaitu 6.2.1.(a). proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Padahal, pada aspek kondisi lingkungan hidup, keberlanjutan sumber daya air menjadi salah satu isu di DKI Jakarta.

Pada 6.1.1.(a)# Cakupan pelayanan air bersih, pada tahun 2022 memiliki target 79.61% sementara capaiannya hanya 65,3 %. Secara eksplisit, masih terdapat gap capaian sekitar 14% namun dikategorikan Akan tercapai/ membaik karena ada tren peningkatan dari tahun 2018.

Langkah selanjutnya yaitu menganalisis persentase indikator yang tidak tersedia datanya dibandingkan dengan keseluruhan indikator dalam TPB bersangkutan **(3).** Hal ini dilakukan untuk menekankan pentingnya pengumpulan data dan atau analisis terhadap capaian indikator. Semakin banyak jumlah indikator yang tidak tersedia datanya, maka semakin besar kemungkinan tidak tercapai target indikator tersebut. Setelah itu dilakukan pemeringkatan dengan persentase ketidaktersediaan data tertinggi menjadi peringkat teratas.

Berikut ini merupakan persentase ketidaktersediaan data dari masing-masing TPB.

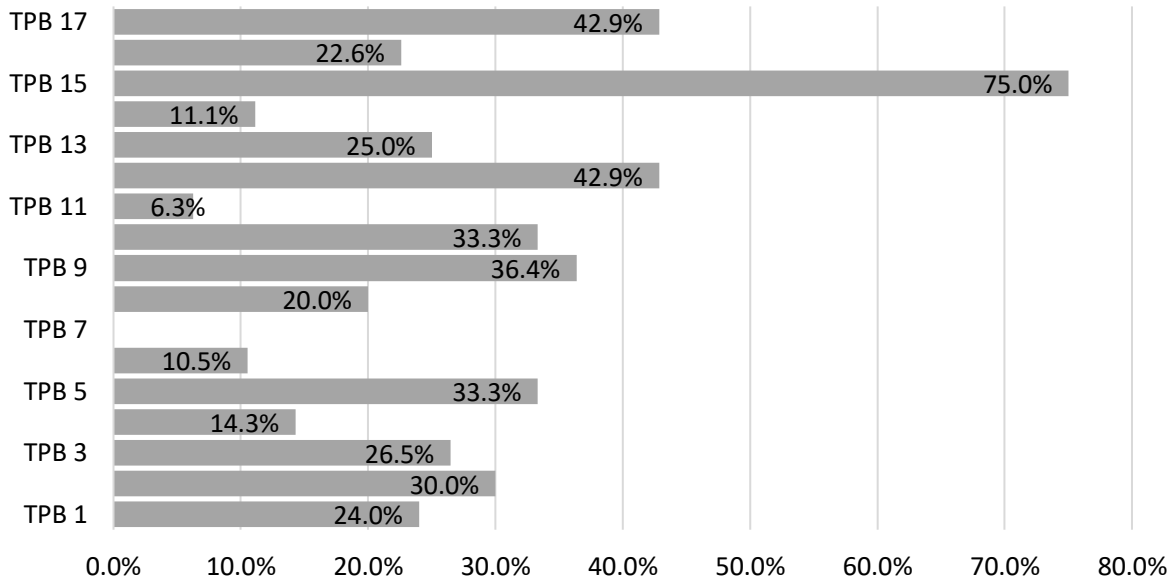

Gambar 4-8. Persentase indikator Tidak Ada Data
Sumber: Hasil Analisis

Pada Gambar 4-5, terlihat bahwa indikator yang paling banyak tidak ada datanya yaitu TPB 15 Ekosistem Darat. Namun apabila diperhatikan lebih lanjut, dari total 12 indikator di TPB 15, terdapat 9 indikator yang tidak memiliki data, yaitu:

15.1.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan
15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi

Apabila ditelaah lebih lanjut, indikator-indikator tersebut sebagian besar terkait dengan sektor kehutanan, padahal DKI Jakarta sendiri sangat minim dengan area hutan. Oleh karenanya, perlu ditinjau kembali relevansi indikator yang digunakan terhadap karakteristik daerah.

Pemeringkatan dan analisis dari poin (1) , (2) dan (3) dilakukan dengan menjumlahkan masing-masing peringkat untuk mendapatkan prioritas TPB sebagai isu pembangunan berkelanjutan. Hasil tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4-2. Analisis TPB

TPB	Perlu Perhatian Khusus (1)		Perlu Perhatian Khusus (2)		Tidak Ada Data (3)		TOTAL Peringkat	Prioritasi	
	%	Peringkat	%	Peringkat	%	Peringkat			
TPB 1	2.4%	2	24.0%	8	24.0%	10	20	5	✓
TPB 2	0.8%	8	20.0%	9	30.0%	7	24	8	
TPB 3	4.7%	1	35.3%	1	26.5%	8	10	1	✓
TPB 4	0.4%	10	7.1%	12	14.3%	13	35	14	
TPB 5	1.6%	4	26.7%	6	33.3%	5	15	3	✪
TPB 6	0.4%	10	5.3%	13	10.5%	15	38	16	
TPB 7	0.4%	10	33.3%	2	0.0%	17	29	11	
TPB 8	0.4%	10	5.0%	14	20.0%	12	36	15	
TPB 9	1.2%	7	27.3%	5	36.4%	4	16	4	✓
TPB 10	1.2%	6	33.3%	2	33.3%	5	13	2	✓
TPB 11	2.0%	3	31.3%	4	6.3%	16	23	7	✓
TPB 12	0.0%	15	0.0%	15	42.9%	2	32	13	
TPB 13	0.4%	10	25.0%	7	25.0%	9	26	9	
TPB 14	0.0%	15	0.0%	15	11.1%	14	44	17	
TPB 15	0.0%	15	0.0%	15	75.0%	1	31	12	
TPB 16	1.6%	4	12.9%	11	22.6%	11	26	9	
TPB 17	0.8%	8	14.3%	10	42.9%	2	20	5	✪

✪ *croscutting*

✓ menjadi TPB prioritas

Hasil analisis di atas menghasilkan prioritasi TPB yang perlu menjadi Isu Pembangunan Berkelanjutan di DKI Jakarta. Dari 7 (tujuh) prioritas yang didapat yaitu TPB 3, TPB 10, TPB 5, TPB 9, TPB 17, TPB 1, dan TPB 11, ditelaah lebih lanjut secara substantif untuk mendapatkan isu yang sesuai. Pada TPB 5 dan TPB 17, merupakan croscutting atau TPB yang sebenarnya mewarnai keseluruhan TPB yang ada. Aspek kesetaraan Gender pada TPB 5, seyogyanya menjadi pertimbangan penting dalam pencapaian TPB lainnya, begitu pula aspek tata kelola pada TPB 17 yang melingkupi TPB lainnya. Atas dasar demikian, terdapat 5 (lima) TPB prioritas dengan 10 (sepuluh) isu pembangunan berkelanjutan sebagai disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 4-3 Daftar Isu Pembangunan Berdasarkan Data Capaian TPB

TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan
TPB 1	**Tanpa Kemiskinan**
	1. Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih
	2. Kurang optimalnya penanganan korban bencana
TPB 2	**Kehidupan Sehat dan Sejahtera**
	1. Kualitas Kesehatan masyarakat belum sesuai target
	2. Belum menyeluruhnya jaminan kesehatan
TPB 9	**Industri, Inovasi, dan Infrastruktur**
	1. Rendahnya kegiatan pengembangan dan penelitian serta inovasi untuk menunjang pertumbuhan PDRB
	2. Rendahnya kapasitas IKM untuk mengakses fasilitas keuangan (Financial Institution)
TPB 10	**Berkurangnya Kesenjangan**
	1. Ketimpangan infrastruktur yang menunjang pemerataan pembangunan (Urban-Island based)
	2. Ketimpangan infrastruktur yang menunjang pemerataan pembangunan (Urban-Island based)

TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan
TPB 11	**Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan**
	1. Sarana dan prasarana permukiman belum mencapai target TPB Jakarta
	2. Upaya adaptasi dan mitigasi bencana belum mencapai target TPB Jakarta
	3. Pengelolaan sampah belum mencapai target terutama di Pulau

4.2.2 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Kondisi Lingkungan Hidup

Dari data dan informasi tentang kondisi lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dideskripsikan pada Sub Bab 3.2 di atas memperlihatkan empat permasalahan utama. Pertama, pemanfaatan air tanah yang berlebihan di satu pihak, dan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan yang masih jauh dari mencukupi di pihak lainnya. Kedua, masalah pencemaran lingkungan masih berlanjut hingga saat ini. Walaupun sudah dilakukan upaya-upaya sistem transportasi di wilayah Jabodetabek, namun pencemaran udara masih berlanjut terutama yang disebabkan oleh penggunaan bahan fosil dan kemacetan lalu lintas. Pencemaran air pun masih berlanjut yang bersumber dari pembuangan sampah, pembuangan limbah domestik, dan pembuangan limbah cari dari wilayah hulu. Ketiga, wilayah DKI Jakarta rentan terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat kegiatan manusia. Jakarta terletak di pantai utara Jawa dan tidak jauh dari Anak Gunung Krakatau yang aktif dan merupakan ancaman letusan, gempa, dan tsunami. Jakarta yang terletak di dataran rendah sangat rentan terhadap ancaman banjir yang terjadi di wilayah Jakarta maupun di wilayah hulu. Banjir rob juga merupakan ancaman di wilayah pesisir akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan turunnya permukaan tanah (*land subsidence*) yang dibarengi dengan peningkatan permukaan air laut akibat dari perubahan iklim (*climate change*). Kebakaran juga menjadi ancaman kebencanaan akibat kondisi permukiman, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kemampuan serta sarana dan prasarana pemadaman kebakaran yang belum mencukupi. Ke empat, degradasi keanekaragaman hayati yang terjadi di wilayah pesisir dan kepulauan akibat pencemaran lingkungan dan kegiatan pembangunan.

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari telaah kondisi lingkungan hidup wilayah Jakarta terdapat 4 (empat) isu pembangunan berkelanjutan utama yang harus segera diatasi, yaitu:

1. Keberlanjutan sumber daya air
2. Pencemaran lingkungan
3. Kerentanan terhadap bencana
4. Degradasi keanekaragaman hayati

Keberlanjutan Sumber Daya Air

Merujuk pada hasil analisis daya dukung dan daya tampung penyedia air yang menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023, daya dukung penyedia air yang belum terlampaui hanya ada di angka 4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa DKI Jakarta sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat.

Dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat, penggunaan air tanah masih dilakukan saat ini. Dengan melihat kondisi saat ini dan merujuk pada kondisi daya dukung dan daya tampung, penggunaan air tanah perlu dibatasi. Hal ini pun juga sejalan dengan terbitnya PERGUB no. 93 tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah. Pada peraturan tersebut menunjukkan zona bebas air tanah pada daerah seperti Kawasan Industri Pulo Gadung, Kawasan Mega Kuningan, Kawasan Rasuna Epicentrum, SCBD Sudirman, Kawasan Kuningan, Kawasan Medan Merdeka, Kawasan Asia Afrika, Kawasan Menteng, dan Kawasan Tanah Abang.

Kondisi sumber daya air di DKI Jakarta juga dapat dilihat berdasarkan peta zona konservasi air tanah yang diterbitkan oleh BKAT tahun 2017. Dapat dilihat bahwa kondisi air di DKI Jakarta masuk dalam kategori zona rusak pada wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Hanya wilayah Jakarta Selatan yang sebagian besar masuk dalam kategori zona aman dan zona imbuhan air.

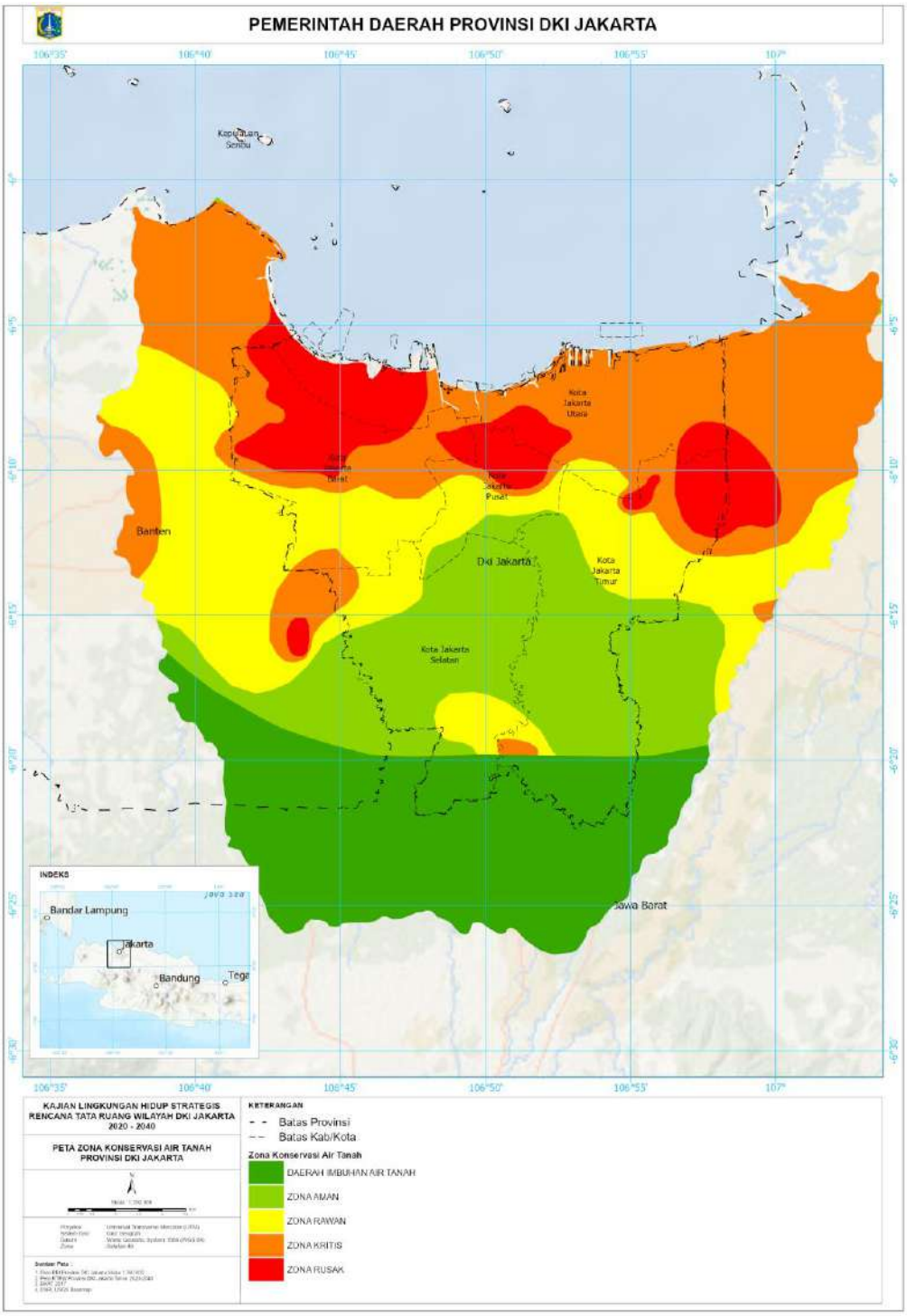

Gambar 4-9 Zona Konservasi Air Tanah DKI Jakarta
Sumber: BKAT, 2017

Sumber air baku di DKI Jakarta tidak terlepas dari keberadaan wilayah fungsional DKI Jakarta. Oleh karena itu saat ini, sumber air baku yang dimanfaatkan berasal dari Waduk Jatiluhur, IPA Cikokol dan IPA Serpong (KLHS RTRW DKI Jakarta). Berdasarkan data struktur ruang RTRW DKI Jakarta tahun 2022 – 2042 menunjukkan bahwa telah dibangun jaringan air baku sebanyak 235.662 jaringan dan 4 jaringan akan direncanakan untuk dibangun dalam kurun waktu kedepan, dengan saluran yang tersambung pada wilayah luar Jakarta. Dengan kondisi eksisting saat ini, seharusnya kebutuhan air minum Masyarakat bisa terpenuhi. Namun, merujuk pada data PAM Jaya pada tahun 2021, kebutuhan air masyarakat baru bisa terlayani mencapai angka 65% walaupun jaringan air baku sudah tersebar di hampir wilayah Jakarta, kecuali wilayah Kepulauan Seribu. Hal tersebut diperkuat dengan

saat ini DKI Jakarta memiliki 181 sumber air baik berupa waduk, embung dan Sungai. Berdasarkan 181 sumber air yang ada, hanya 6% yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku, karena banyak sumber air yang tidak bisa dimanfaatkan karena tercemar oleh sampai atau pun zat kimia. Oleh karena itu diperlukan perbaikan kualitas sumber air permukaan yang potensial (181 titik) untuk dapat dimanfaatkan melalui pemanfaatan rekayasa inovasi teknologi yang teruji untuk memperbaiki kualitas air yang tercemar.

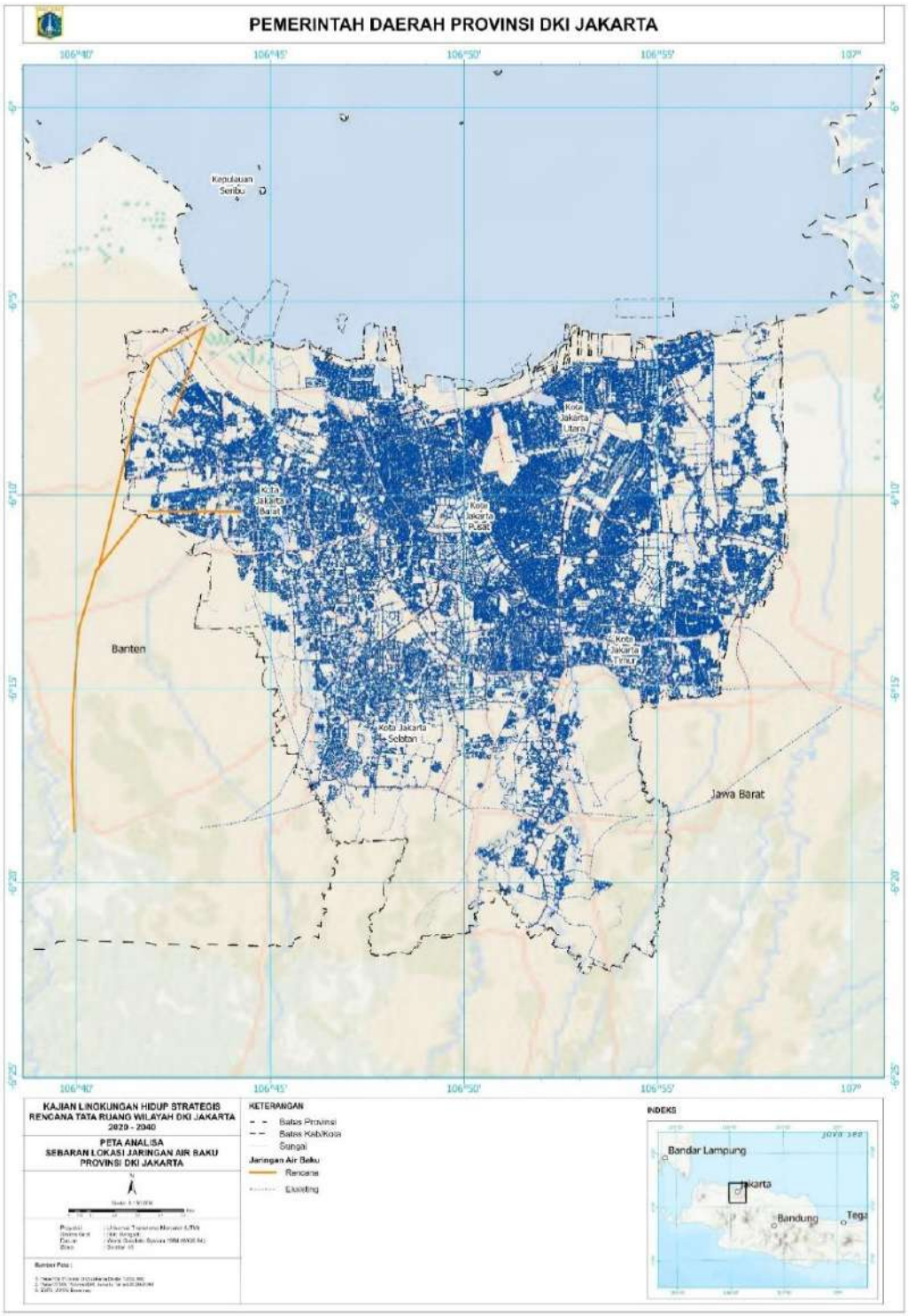

Gambar 4-10 Zona Konservasi Air Tanah DKI Jakarta
Sumber: BKAT, 2017

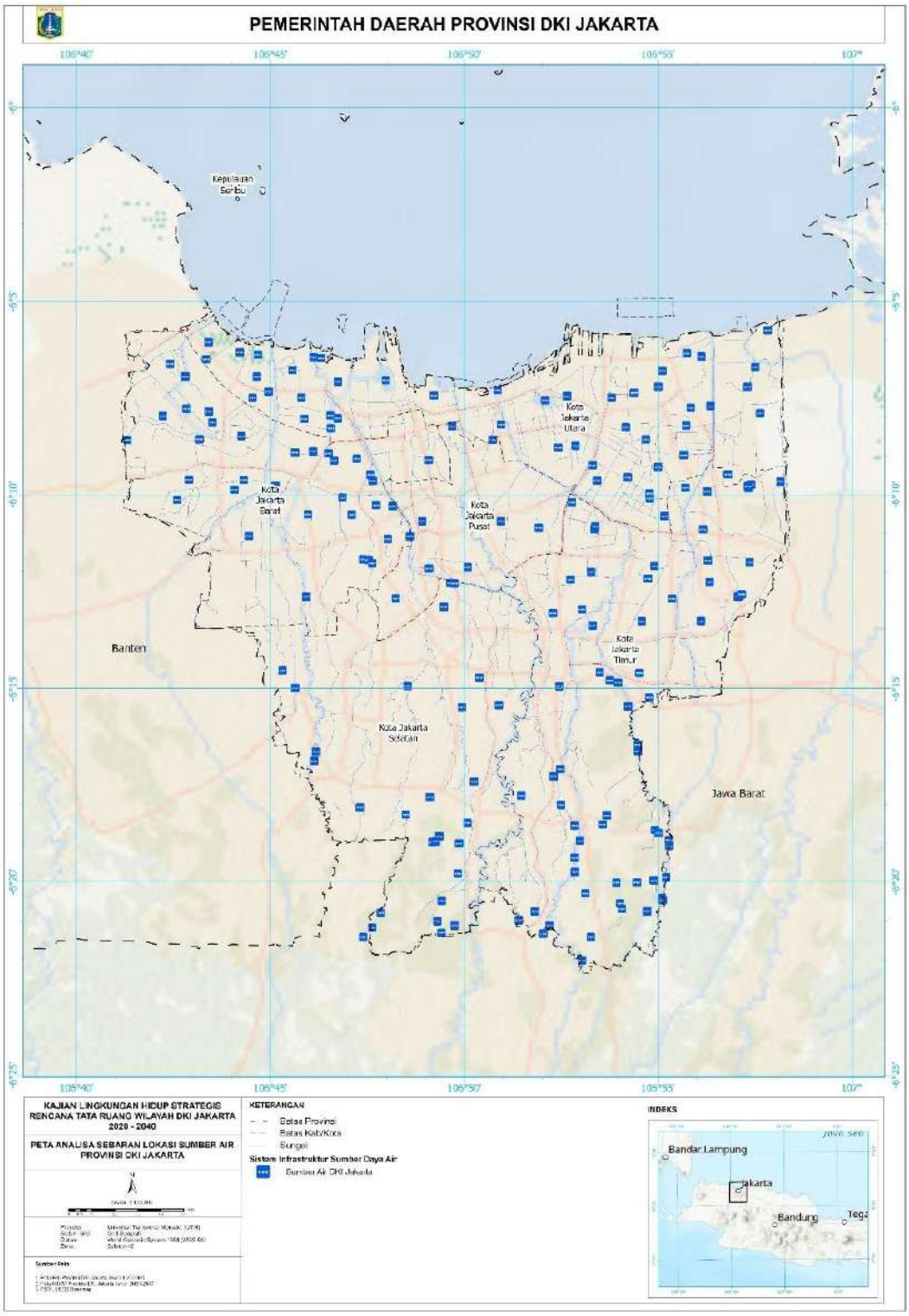

Gambar 4-11 Zona Konservasi Air Tanah DKI Jakarta
Sumber: BKAT, 2017

Hasil progres penyusunan RISPAM DKI Jakarta pun menunjukkan bahwa saat ini jumlah waduk yang belum tercemar hanya 7% yaitu Situ Hutan Kota Srengseng, Situ Pos Pengumben, Situ Lembang, dan Waduk Sunter Timur IA. Selain itu pencemaran air Sungai saat ini berada pada status tercemar berat dengan persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas situ/waduk dan Sungai yang menjadi sumber air baku di DKI Jakarta memiliki status tercemar.

Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan hasil penyusunan KLHS RTRW DKI Jakarta dan KLHS RPJPD DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa saat ini isu pencemaran lingkungan masih sangat dekat dengan DKI Jakarta, terutama karena keterbatasan pengelolaan sampah dan keterbatasan sarana pengelolaan limbah. Jumlah penduduk yang tinggi (10.679,951 jiwa pada tahun 2022), memiliki andil terhadap tingkat pencemaran lingkungan, terutama untuk jumlah timbulan sampah. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, timbulan sampah tahun 2022 sebesar 7.544 ton/hari. Persentase penanganan sampah sesuai dengan SIPSN hampir 100%, namun nyatanya belum bisa menyelesaikan permasalahan ini. Pola penanganan sampah yang masih menerapkan kumpul-angkut-buang, yang mengakibatkan lebih dari 90% sampah dikirim ke TPST Bantargebang. Hal ini mengakibatkan kondis TPST Bantargebang sudah mendekati kapsitas maksimumnya. Pendekatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan penerapan 3R (reduce, reuse, recycle) sebagaimana mandat dari Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah masih sangat minim sehingga perlu didorong lebih lanjut. Diperlukan optimalisasi teknologi untuk mendukung upaya tersebut .

Isu lain yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan di DKI Jakarta adalah pencemaran perairan. Pencemaran perairan di DKI Jakarta saat ini dipengaruhi oleh kegiatan di darat karena jumlah penduduk dan aktivitas per harinya yang sangat tinggi dan kegiatan di perairan itu sendiri. Pencemaran darat selain dipengaruhi oleh padatnya penduduk dan kegiatan setiap harinya, juga dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah, karena DKI Jakarta merupakan wilayah hilir yang sangat dipengaruhi oleh pengelolaan lahan di wilayah Hulu. Merujuk dari hasil potensi beban pencemar di DKI Jakarta, menunjukkan bahwa potensi beban pencemar tinggi baik BOD, COD dan TSS berada pada wilayah hulu DKI Jakarta terutama pada wilayah Jakarta Selatan. Kegiatan perindustrian pun juga sangat mempengaruhi kondisi perairan DKI Jakarta terutama kegiatan industri yang membuang limbah padat atau cair dengan jumlah besar. Sebagaimana dilaporkan dalam DIKPLHD 2020, pertumbuhan industri serta perumahan di DKI Jakarta sebagai imbas perkembangan ekonomi tentunya memberikan dampak pada pembuangan limbah baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat memengaruhi kualitas air di DKI Jakarta.

Selain itu juga pencemaran lingkungan terutama untuk air dan udara pun masih sangat tinggi terutama udara saat ini di DKI Jakarta. Jika melihat Indeks kualitas udara (AQI), indeks kualitas udara di DKI Jakarta sudah masuk kategori tidak sehat[4]. Akibat hal tersebut, menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penyakit saluran pernapasan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Beberapa faktor penyebab tingginya polusi udara adalah karena keberadaan kawasan industri, pembangkit listrik dan yang paling utama adalah sektor transportasi. Menurut data KLHK, sektor transportasi menyumbang pencemaran terbesar di DKI Jakarta sebesar 44% dan berpotensi meningkat pada musim kemarau hingga 57%[5]. Selain itu, berdasarkan perhitungan Indeks Status Mutu (ISM) DKI Jakarta tahun 2022, menunjukkan kondisi tercemar, dengan nilai ISM sebesar 0.44.

Pencemar udara seperti SO2, NOx hingga PM10 dan PM2.5 dapat menimbulkan permasalahan hujan asam (khususnya SO2 dan NOx) dan permasalahan kesehatan (penyakit pernapasan). Pencemar seperti PM10 dan PM2,5 yang memiliki diameter sangat kecil dapat terhirup ke dalam sistem pernapasan dan menyebabkan berbagai gangguan pernapasan seperti bronchitis kronis dan akut (Infeksi Saluran Pernapasan Akut/ISPA), hingga gangguan jantung. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (2022) mencatat terdapat 192.067 penderita (pasien penyakit jawat jalan) ISPA.[6]

[4] Polusi udara Jakarta sudah “sangat krisis”, Pemprov DKI siapkan razia uji emisi kendaraan - BBC News Indonesia

[5] Mencermati Polusi Udara Jakarta - Kompas.id

[6] DIPKLHD, 2023

Jika melihat dari tren indeks kualitas lingkungan hidup berdasarkan Laporan Akhir IKLH 2022, menunjukkan angka IKLH pada tahun 2022 sebesar 54,65. Angka IKLH ini merupakan angka yang rendah jika dibandingkan dengan kondisi IKLH Nasional yang mencapai nilai 72.42.

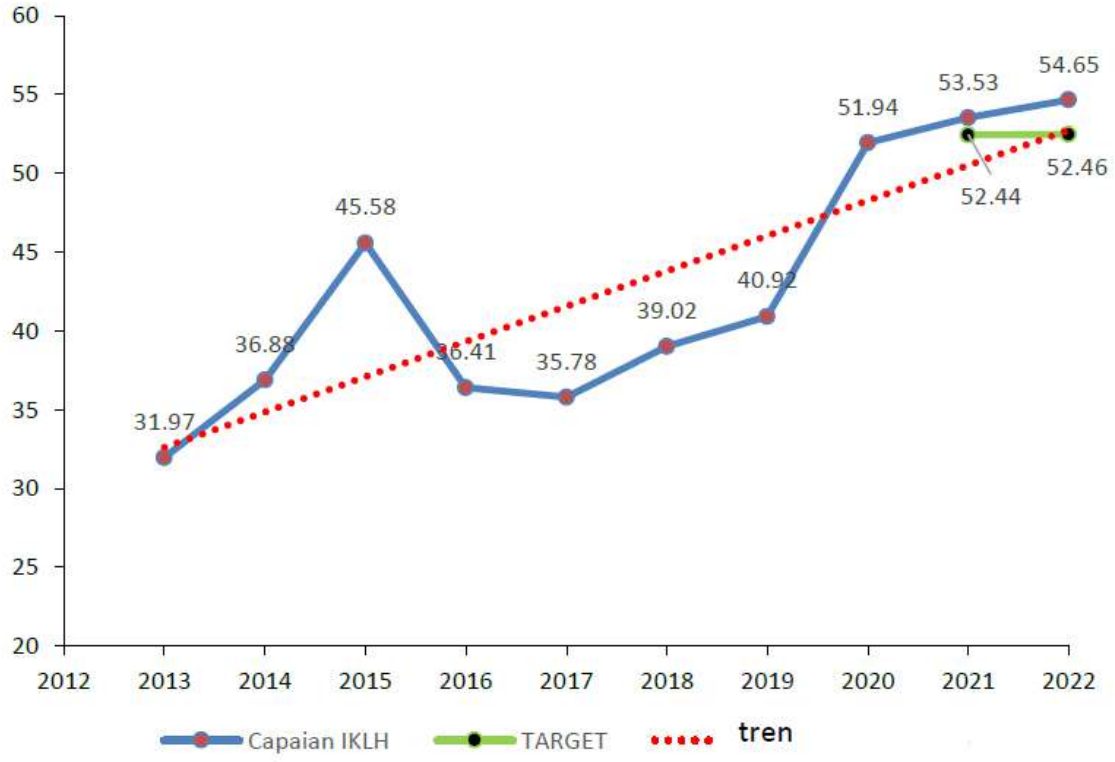

Gambar 4-12 Trend Nilai IKLH DKI Jakarta
Sumber: Laporan IKLH 2013-2022

Degradasi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati di DKI Jakarta dapat dilihat dari keberadaan kawasan konservasi yang terdiri dari Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, Cagar Alam Pulau Bokor, Suaka Margasatwa Muara Angke, Suaka Margasatwa Pulau Rambut Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Selain itu keberadaan ekosistem terumbu karang di wilayah Kepulauan Seribu, ekosistem lamun dan ekosistem mangrove di wilayah pesisir juga menjadi indikator bahwa DKI Jakarta masih memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun kondisi ini bukan berarti keberadaan KEHATI tersebut tidak tanpa ancaman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi DKI Jakarta sangat rentan terhadap pencemaran lingkungan akibat kegiatan di darat dan juga di perairan, kemudian pencemaran lingkungan dan juga ketahanan terhadap perubahan iklim (untuk ekosistem lamun dan juga terumbu karang). Selain itu ancaman kegiatan Pembangunan pun juga turut andil terhadap keterancaman keberadaan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu keberadaan keanekaragaman hayati perlu menjadi pertimbangan untuk melakukan mitigasi terjadi degradasi keanekaragaman hayati.

4.2.3 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Telaah Dokumen Perencanaan Strategis

Pokja KLHS menelaah satu dokumen perencanaan strategis nasional dan satu dokumen perencanaan strategis regional serta lima dokumen perencanaan strategis internal Provinsi DKI Jakarta yang memuat isu-isu pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk dua puluh tahun ke depan. Dokumen-dokumen perencanaan strategis tersebut yaitu: (1) Rancangan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, (2) Tata Ruang Jabodetabekjur (Perpres No. 60 Tahun 2020,

(3) Naskah Akademik RUU Daerah Istimewa Jakarta, (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi DKI Jakarta 2022-2052, (5) Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2022-2042, (6) Laporan KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta 2022-2042 (7) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 dan (8) KLHS RPJPD DKI Jakarta 2025-2045.

RPJPN 2025 - 2045

Dokumen Rancangan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 memuat isu-isu pembangunan yang dihadapi negara Indonesia secara nasional. Dari isu pembangunan nasional tersebut, 13 (tiga belas) di antaranya relevan dengan kondisi di Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. **Produktivitas masih rendah**, Rata-rata produktivitas yang tercermin dari ***Total Factor Productivity (TFP)*** Indonesia selama tahun 2005-2019 **tumbuh negatif** sebesar 0,66 tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019; yang banyak disebabkan oleh ketertinggalan **kualitas SDM terutama perempuan**, **produktivitas ekonomi yang rendah**, tertinggalnya **kapasitas iptek dan inovasi**, **kelembagaan** yang belum sempurna dan **kepastian hukum** yang lemah.
2. **Kinerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masih Rendah**, yang disebabkan oleh masih **terbatasnya atraksi, aksesibilitas**, dan **amenitas,** serta **kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah**, terjadi **perubahan preferensi pasar** dan **disrupsi terkait dengan teknologi** dan **digitalisasi** serta **kebencanaan**
3. **Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Perikanan Masih Rendah**, disebabkan terbatasnya pengembangan budidaya perikanan, masih **lemahnya rantai nilai tambah kekayaan laut**, terbatasnya **pengembangan riset dan teknologi kelautan**, **belum berkembangnya industri pengolahan** dan **emerging sektor lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut** dalam **menciptakan nilai tambah ekonomi**
4. **Kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian relatif Rendah**, walaupun menyerap tenaga kerja yang tinggi. Hal ini disebabkan karena UMKM memiliki **pekerja berkeahlian rendah** dan juga banyak **bergerak di sektor bernilai tambah rendah**; **rendahnya penggunaan teknologi**, **inovasi**, dan **investasi** untuk pengembangan usaha, **rendahnya kapasitas pengelolaan**, **rendahnya partisipasi UMKM** dalam rantai nilai produksi, dan **rendahnya jumlah koperasi yang bergerak disektor riil.**
5. **Masih tingginya penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil dibandingkan dengan energi baru dan terbarukan** (EBT). Bahwa pada tahun 2022 porsi EBT hanya 12,30 persen dari bauran energi nasional, atau naik hanya 8 persen bila dibandingkan porsi EBT pada tahun 2005 yang sebesar 4,24 persen.
6. **Rendahnya pengelolaan limbah B3**, yang mencapai 60 juta ton sepanjang tahun 2022, sementara regulasi tentang insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau juga masih lemah. Selain itu masih ada tantangan **pemanfaatan SDA yang merusak** ekosistem, termasuk pertambangan terbuka, pertanian dan perkebunan yang mengakibatkan **degradasi hutan** dan **deforestasi.**
7. **Rendahnya Literasi Digital**, karena jumlah pengguna internet masih 62 persen dari populasi, **jaringan 4G belum merata** dan **kecepatan internet masih lambat** terutama pada daerah yang **kondisi geografisnya sulit**. Selain itu masih tinggi **ketergantungan** terhadap **teknologi** dan **produk luar negeri** dan **tingginya serangan siber.**
8. **Konektivitas Antar Wilayah Masih Ada Kesenjangan**, dengan kondisi geografis yang kepulauan **konektivitas *hinterland*** masih perlu ditingkatkan, masih terbatasnya **angkutan masal perkotaan**, masih rendahnya **jangkauan serat optik**, belum meratanya **jaringan internet seluler** di pedesaan dan kawasan timur.
9. **Akses pendidikan belum merata,** terjadi karena **disparitas partisipasi pendidikan** antar wilayah dan **sosial ekonomi masyarakat**. Kualitas pendidikan juga masih rendah disebabkan oleh **sarana-prasarana pendidikan** dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, jumlah **guru profesional** dengan **kompetensi**

tinggi masih terbatas dan belum **terdistribusi** ke seluruh daerah dan satuan pendidikan, menyebabkan **keterserapan tenaga kerja** lebih banyak di tingkat pendidikan menengah.

10. **Tinginya beban penyakit menular dan tidak menular** serta **kekurangan gizi mikro dan makro**, disebabkan adanya **transisi demografi** yang bersamaan dengan meningkatnya **mobilitas penduduk**, **urbanisasi**, **transisi epidemiologi** dan **perilaku hidup tidak sehat.**
11. **Belum meratanya jaminan sosial** dalam mendapatkan **pelayanan kesehatan**, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari masih rendahnya **kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan** untuk pekerja informal, dan tingkat **kepatuhan pembayaran iuran** jaminan sosial masih rendah.
12. **Tata Kelola masih harus diperbaiki**, diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja yang **efektif** dan **akuntabel** dan mampu memberikan **pelayanan publik** yang **berkualitas**. Tata kelola yang bermasalah diantaranya ***hyper regulation*** yang menyebabkan **tumpang tindih** dan **disharmoni regulasi** baik pusat maupun daerah yang menyebabkan *ketidakpastian hukum*. Kelembagaan dan proses bisnis pemerintah masih **terfragmentasi** dan **tidak adaptif**, **manajemen talenta** belum berjalan baik, rentannya **intervensi politik**, belum meratanya **kualitas pelayanan publik** dan **transformasi digital** masih belum berjalan lancar.
13. **Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan kehati** yang berkelanjutan, semakin **tingginya risiko bencana** terutama **hidrometeorologi**, adanya **ketidakseimbangan** antara kebutuhan dan ketersediaan **pangan**, **energi** dan **air** di berbagai wilayah.

Perpres 60/2020 RTR Jabodetabek Punjur

Penelaahan berikutnya adalah penelaahan dokumen tata ruang Jabodetabekjur yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 dan merangkum isu-isu strategis yang relevan dengan isu-isu di DKI Jakarta terdiri dari:

1. Banjir
2. Ketersediaan Air
3. Sanitasi dan Persampahan
4. Kemacetan
5. Permasalahan pesisir dan pulau reklamasi
6. Pengaturan Kawasan Pulau Seribu
7. Antisipasi pemindahan IKN

Ke-7 (tujuh) isu yang ada dalam tata ruang Jabodetabekjur tersebut merupakan isu yang bersifat lintas wilayah sehingga sangat strategis dan menjadi arahan dalam upaya pengurangan permasalahan yang ada di DKI Jakarta tidak hanya oleh DKI Jakarta tetapi juga daerah lain di sekitarnya melalui kolaborasi dan pemberian insentif dan disinsentif antar wilayah administrasi.

DRAFT RPPLH DKI Jakarta 2022

Dalam dokumen rancangan RPPLH DKI Jakarta yang sedang disusun, dapat dirangkum bahwa isu strategis dalam dokumen RPPLH DKI Jakarta adalah:

1. Keberlanjutan SDA
2. Tata Kelola SDA dan LH
3. Kebencanaan

Ketiga isu strategis ini merupakan isu yang menjadi perhatian di Jakarta, karena kondisi lingkungan hidup di Jakarta masih belum sesuai dengan yang diharapkan seperti misalnya kualitas air sungai yang masih tinggi beban

pencemarnya dan pencemaran udara yang meningkat pasca Covid-19, selain itu dalam beberapa tahun terakhir mulai sering terjadi cuaca ekstrem yang menyebabkan genangan dan banjir di luar perkiraan sementara pembangunan fisik kota terus berjalan sementara ruang terbuka hijau, sebagai penyeimbang, tidak banyak bertambah.

Rancangan RTRW DKI Jakarta 2022 – 2042 (versi Mei 2022)

Berdasarkan dokumen rancangan RTRW 2022-2042 yang sudah mengintegrasikan RZWP3K dapat dilihat bahwa isu-isu strategis dari sudut pandang RTRW adalah:

1. Mobilitas Penduduk Tidak Efisien Sehingga Muncul Kemacetan dan Ekonomi Biaya Tinggi
2. Kurang Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Digital
3. Munculnya Pertumbuhan Permukiman Bersifat *Squatter* dan *Sprawling*
4. Kurangnya Pengendalian Pembangunan Menyebabkan Masalah Lingkungan
5. Rendahnya Kualitas Lingkungan

Isu-isu strategis dalam RTRW merupakan isu yang terkait dengan penataan ruang yang terdiri dari upaya perwujudan rencana jaringan infrastruktur dan rencana pola ruang. Jaringan infrastruktur, salah satunya adalah terkait dengan upaya mengurai kemacetan melalui rencana infrastruktur dan mengoptimalkan infrastruktur untuk memperlancar perekonomian di DKI Jakarta termasuk di dalamnya mengenai infrastruktur digital. Dari pemanfaatan ruang, bahwa pertumbuhan permukiman di Jakarta yang squatter dan sprawling, menyulitkan untuk menyediakan fasilitas pendukungnya seperti jaringan pipa air, pipa gas bahkan RTH sehingga diperlukan penataan yang lebih baik. Selain itu pemanfaatan lahan yang tidak dikendalikan akan menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan yang pada akhirnya akan membebani pembiayaan perbaikan lingkungan dan penyelenggaraan kesehatan.

KLHS RTRW DKI Jakarta 2022-2042

Berdasarkan dokumen KLHS RTRW yang mengiringi proses penyusunan RTRW DKI Jakarta, merumuskan isu strategis KLHS RTRW sebagai berikut:

1. Kesenjangan Penghidupan Masyarakat
2. Keberlanjutan Sumber Daya Alam
3. Risiko Kebencanaan Tinggi
4. Tata Kelola Pemanfaatan Ruang

Isu kesenjangan penghidupan masyarakat ini dapat dikaitkan dengan masih adanya kawasan permukiman kumuh yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah di DKI Jakarta dengan beragam permasalahan yang ada di dalamnya baik sosial budaya dan lingkungan. Sedangkan keberlanjutan sumber daya alam berkaitan dengan isu terkait pemanfaatan air, pencemaran dan penurunan kehati akibat dari pembangunan fisik di DKI Jakarta. Kebencanaan menjadi isu strategis, mengingat bahwa beberapa tahun belakang ini semakin sering terjadi bencana akibat perubahan iklim seperti banjir dan angin kencang di luar perkiraan. Sedangkan tata kelola pemanfaatan ruang berkaitan dengan penegakan hukum atas pemanfaatan alokasi ruang yang tidak sesuai yang menyebabkan dampak negatif dalam jangka panjang

Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

Di dalam dokumen RPD 2023-2026, isu strategis yang diangkat adalah:

1. Ketahanan Terhadap Bencana
2. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik
3. Ketahanan Ekonomi Inklusif
4. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas

5. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara
6. Pemerataan Pembangunan

Isu ketahanan terhadap bencana muncul sebagai akibat semakin seringnya terjadi bencana akibat perubahan iklim yang menimbulkan gangguan/disrupsi kepada berbagai kegiatan masyarakat dan menimbulkan dampak ikutan yang lain dan cenderung wilayah terdampak semakin meluas. Pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik merupakan salah satu target pemerintah daerah untuk menuju good governance dan memberikan pelayanan sesuai SPM kepada masyarakat untuk menghadapi tantangan global ke depan. Ketahanan ekonomi inklusif menjadi salah satu isu mengurangi kesenjangan ekonomi di DKI Jakarta dengan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan koperasi yang mampu berdaya saing secara nasional sehingga mampu menciptakan manusia sehat, berdaya saing dan setara dalam berbagai aspek kehidupan di perkotaan.

RUU Daerah Khusus Jakarta

Sehubungan dengan adanya IKN yang akan merubah status Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah merancang UU daerah Khusus Jakarta, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) isu yaitu:

1. Tata Kelola Kawasan Jabodetabekpunjur
2. Perbaikan peringkat Global Power City Index Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional

Perubahan status daerah khusus ibukota perlu memastikan kerja sama antar daerah dalam kerangka Jabodetabekjur tetap ada dan diharapkan mampu mendukung Jakarta sebagai sebuah kota yang mampu diperhitungkan secara global melalui perbaikan peringkat Jakarta dalam berbagai penilaian kota global.

Hasil identifikasi sejumlah isu strategis pembangunan dari ke tujuh dokumen perencanaan strategis tersebut, berjumlah empat puluh satu isu pembangunan berkelanjutan, disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 4-4 Daftar Isu Pembangunan Berkelanjutan yang Relevan degan Provinsi DKI Jakarta Bersumber dari Dokumen Perencanaan Strategis

No	Isu Pembangunan	No	Isu Pembangunan
	Isu Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 yang Relevan dengan DKI		**Isu dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DKI 2022-2042**
1.	Produktivitas Masih Rendah	1.	Keberlanjutan Sumber Daya Alam
2.	Kinerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masih Rendah	2.	Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3.	Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Perikanan Masih Rendah	3.	Kebencanaan
4.	Kontribusi UMKM dalam Ekonomi Relatif Rendah		
5.	Masih Tingginya Penggunaan Energi Fosil		**Isu Strategis RTRW 2022-2042:**
6.	Rendahnya Pengelolaan Limbah B3	1.	Mobilitas Penduduk Tidak Efisien Sehingga Muncul Kemacetan dan Ekonomi Biaya Tinggi
7.	Rendahnya Literasi Digital	2.	Kurang Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Digital
8.	Konektivitas Antar Wilayah Masih Ada Kesenjangan	3.	Munculnya Pertumbuhan Permukiman Bersifat Squatter dan Sprawling
9.	Akses Pendidikan Belum Merata	4.	Kurangnya Pengendalian Pembangunan Menyebabkan Masalah Lingkungan
10.	Tinginya beban penyakit menular dan tidak menular serta kekurangan gizi mikro dan makro	5.	Rendahnya Kualitas Lingkungan
11.	Belum meratanya jaminan sosial		
12.	Tata Kelola masih harus diperbaiki		**Isu Strategis KLHS RTRW 2022-2042**
13.	Meningkatnya kompleksitas ancaman keamanan di Kawasan	1.	Kesenjangan Penghidupan Masyarakat
14.	Tingginya laju kehilangan dan rendahnya kehati	2.	Keberlanjutan Sumber Daya Alam
	Tata Ruang Jabodetabekjur (Perpres 60/2020)	3.	Risiko Kebencanaan Tinggi
1.	Banjir	4.	Tata Kelola Pemanfaatan Ruang
2.	Ketersediaan air		
3.	Sanitasi dan persampahan		**Isu strategis RPD Tahun 2023-2026**

4.	Kemacetan	1.	Ketahanan Terhadap Bencana
5.	Permasalahan pesisir dan pulau reklamasi	2.	Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik
6.	Pengaturan Kawasan Pulau Seribu	3.	Ketahanan Ekonomi Inklusif
7.	Antisipasi pemindahan IKN	4.	Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas
	Isu dari Naskah Akademis RUU DKJ	5.	Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara
1.	Tata Kelola Kawasan Jabodetabekpunjur	6.	Pemerataan Pembangunan
2.	Perbaikan peringkat Global Power City Index Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional		
	Isu Strategis KLHS RPJPD 2025-2045		
1	Tingginya Risiko Bencana		
2	Ancaman Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
3	Ketimpangan Sosial - Ekonomi		
4	Belum Optimalnya Tata kelola yang baik (*good governance*)		

Langkah selanjutnya adalah penelaahan ke empat puluh satu isu pembangunan tersebut, dengan menggunakan metode analisis substansi (*content analysis*), dengan cara mencermati intisari dari masing-masing isu pembangunan, mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Dari hasil analisis ini diperoleh sintesis sebanya enam isu pembangunan berkelanjutan strategis sebagai berikut:

Langkah selanjutnya adalah penelaahan ke empat puluh satu isu pembangunan tersebut, dengan menggunakan metode analisis substansi (*content analysis*), dengan cara mencermati intisari dari masing-masing isu pembangunan, mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya.

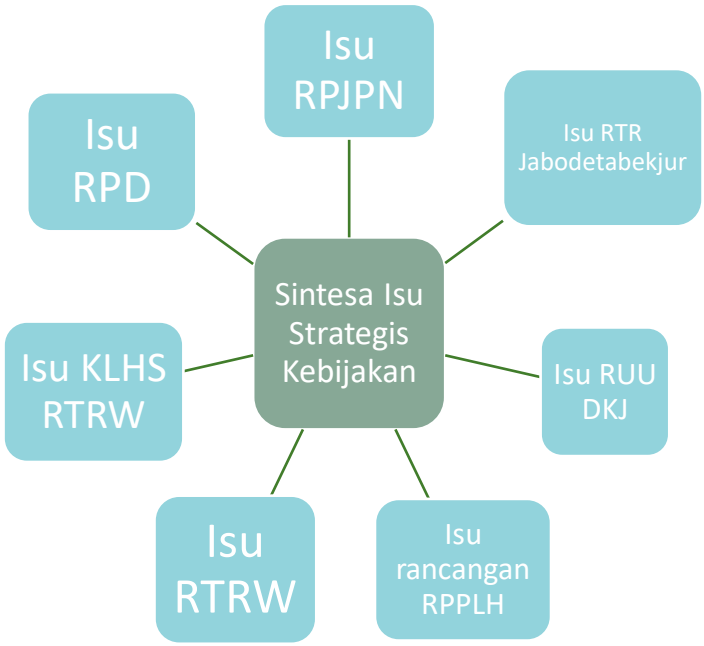

Dari hasil analisis ini diperoleh sintesis sebanyak enam isu pembangunan berkelanjutan strategis sebagai berikut:

1) Tingginya Risiko Bencana
   Tingginya risiko bencana di DKI Jakarta didominasi oleh adanya bencana banjir di sekitar wilayah sungai yang mengalir dari hulu di wilayah selatan menuju hilir di Laut Jawa di Utara dan banjir rob di pesisir utara

DKI Jakarta. Dalam beberapa tahun belakangan, memang jumlah dan lama genangan di DKI Jakarta relatif menurun seiring dengan upaya perbaikan kawasan sekitar sungai di DKI Jakarta yang disebut dengan normalisasi kawasan sungai begitu juga dengan upaya membangun tanggul pantai di pesisir Utara sudah nampak adanya penurunan jumlah banjir Rob.

Namun seiring dengan adanya perubahan iklim, dalam kurun waktu tersebut juga terjadi cuaca ekstrem dimana curah hujan turun dengan intensitas tinggi tidak merata dalam waktu yang singkat telah menimbulkan genangan-genangan baru terutama di jalan protokol yang menyebabkan kemacetan panjang, dan di pesisir utara jika bersamaan dengan pasang air naik, maka menimbulkan genangan yang lebih lama.

2) Belum Optimalnya Tata Kelola Berbasis Wilayah Fungsional Perkotaan
Tata kelola berbasis wilayah fungsional perkotaan terkait dengan upaya tata kelola berbagai permasalahan di DKI Jakarta yang bersifat hulu hilir, dimana terkait dengan isu bencana banjir dan air bersih ada berbagai urusan yang kewenangan atau minimal pengaruhnya sangat tergantung dengan wilayah sekitar DKI Jakarta, dalam hal ini kawasan Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang. Dalam penyediaan air bersih DKI Jakarta masih sangat tergantung kepada wilayah DAS Ci Tarum yang berhulu di Bandung Utara sedangkan Ci Liwung belum dimanfaatkan secara optimal. Upaya dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dengan mendorong peningkatan perjalanan menggunakan transportasi umum untuk komuter masih belum meningkat, salah satunya karena integrasi dengan layanan transportasi umum di wilayah asal yang masih sangat kurang.

3) Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK Menuju Kota Berkelanjutan
Pemanfaatan IPTEK menuju kota berkelanjutan di DKI Jakarta sangat rendah, dapat dilihat dalam Index global city bahwa peran riset dan pengembangan (R&D) dalam pembangunan perkotaan relatif sangat rendah, termasuk upaya kolaborasi dengan universitas dalam menyelesaikan masalah-masalah perkotaan. Perlu dilihat seberapa besar pemangku kepentingan utama di Jakarta seperti pemerintah dan pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan besar (*holding company*) dan perguruan tinggi menyediakan dana untuk kolaborasi riset dan pengembangan.

4) Kesenjangan Sosial-Ekonomi
Kesenjangan sosial ekonomi di Jakarta dapat dilihat dengan mudah dengan masih adanya kekumuhan di Jakarta. Selain itu dapat dilihat bahwa akses terhadap pendidikan yang inklusi bagi penyandang disabilitas juga masih rendah termasuk juga akses mereka terhadap pekerjaan yang layak. Dengan karakter kegiatan ekonomi di DKI Jakarta yang beragam, ternyata lulusan SMA dan SMK di Jakarta masih cukup banyak yang belum dapat terserap oleh dunia kerja.

5) Degradasi Kualitas Lingkungan
Degradasi kualitas lingkungan di DKI Jakarta masih nyata terlihat dengan adanya ketergantungan air bersih dari wilayah lain, masih tingginya produksi sampah, kualitas udara yang cenderung masih buruk terutama di saat hari dan waktu kerja, masih adanya kejadian bencana banjir, penurunan muka air tanah dan banjir rob.

6) Degradasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Degradasi sumber daya pesisir terutama ancaman perubahan iklim dimana potensi kenaikan permukaan air laut mengancam menenggelamkan pulau-pulau kecil dan terjadinya *bleaching* di terumbu karang di Kepulauan Seribu. Selain itu masalah sampah dari daratan yang terbawa arus laut terdampar di pulau-kecil sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

4.3 Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Isu-isu pembangunan berkelanjutan hasil dari pendekatan teknokratik sebagaimana dijelaskan pada Bab 4.2 di atas dianalisis menggunakan metode *content analysis* untuk memperoleh daftar pendek isu pembangunan yang paling strategis. Hasilnya disajikan pada Gambar 4-13 di bawah.

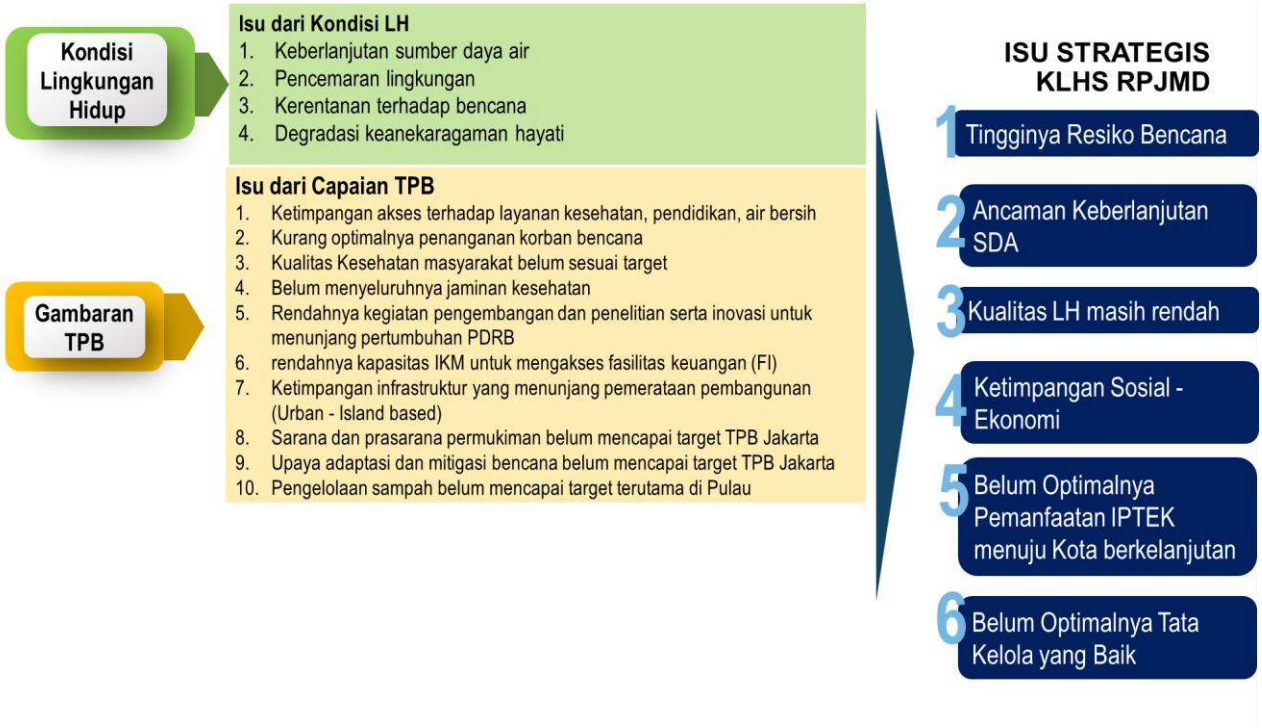

Gambar 4-13 Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Pendekatan Teknokratik dan Sintesisnya

Proses dan hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan kemudian dipaparkan dalam satu *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 27 Juni 2023, dengan undangan sebanyak 50 (lima puluh) peserta dari berbagai kelompok pemangku kepentingan, untuk pengayaan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dan penajaman perumusan isu pembangunan strategis. Hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dari proses FGD ini selanjutnya divisualkan dengan menggunakan Aplikasi *Gephi* untuk memperlihatkan saling keterkaitan antar isu strategis maupun antar isu-isu pembangunan terkait. (Untuk dokumen-dokumen terkait FGD, dapat dilihat pada lampiran. Masukan-masukan yang diperoleh dari FGD dirangkum dalam Tabel 4-5 di bawah.

Tabel 4-5. Rangkuman Masukan dari FGD Pengkayaan dan Penajaman Isu Pembangunan Strategis

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	No	Isu Pembangunan Berkelanjutan
	Risiko Bencana		**Ketimpangan Sosial Ekonomi**
1.	Banjir	1.	Ketimpangan Infrastruktur pada wilayah DKI Jakarta
2.	Land Subsidence*	2.	Ketimpangan akses pendidikan
3.	Urban Heat Island*	3.	SDM rendah
4.	Kekeringan*	4.	Tingkat Pengangguran Tinggi
	Keberlanjutan Sumber Daya Air	5.	Pengembangan transportasi umum dan fasilitas pendukungnya belum maksimal
1.	Rendahnya kualitas dan kuantitas air baku	6.	Kualitas kesehatan masyarakat belum sesuai target
2.	Rendahnya kualitas dan kuantitas air tanah dan air permukaan	7.	Rendahnya persentase rumah layak huni
3.	Pencemaran sampah pada air laut		**Tata Kelola**
	Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK Menuju Kota Berkelanjutan

1.	Pencemaran Udara	2.	Belum optimalnya tata kelola berbasis wilayah fungsional perkotaan
2.	Ruang terbuka hijau terbatas	3.	Manajemen aset
3.	Perubahan Iklim: peningkatan permukaan air laut	4.	Tidak Selarasnya Kebijakan Nasional dengan Jakarta
4.	Degradasi Keanekaragaman Hayati	5.	Kurangnya kepastian hukum berusaha
		6.	Penataan wilayah pesisir, Reklamasi
		7.	Penataan kawasan perkotaan

Masukan-masukan dari FGD sebagaimana dimuat dalam Tabel 4-5 di atas dimanfaatkan untuk memperkaya hasil identifikasi dan perumusan isu-isu strategis yang dihasilkan dari proses teknokratik.

Secara rinci, kelompok isu terkait dengan isu strategis ditunjukkan pada tabel berikut

1. Tingginya Risiko Bencana

Rob
Banjir
Land Subsidence
Urban Heat Island
Kekeringan
Kebakaran
Kurang Optimalnya Penanganan Korban Bencana
Upaya Adaptasi dan Mitigasi Bencana Belum Mencapai Target
Infrastruktur kebencanaan belum optimal
Penggunaan energi ramah lingkungan belum optimal

2. Ancaman Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Air Baku
Tingginya Intensitas Pemanfaatan Air Tanah
Moratorium air tanah tidak menyeluruh
Pencemaran Sampah pada Air Laut
D3TLH Air Terlampaui
Degradasi Keanekaragaman Hayati
Potensi Pariwisata wilayah pesisir belum maksimal

3. Ketimpangan Sosial Ekonomi

Pengentasan stunting belum optimal
Ketimpangan Infrastruktur yang Menunjang Pemerataan Pembangunan (Urban - Island Based)
Ketimpangan Akses Pendidikan
Kapasitas SDM belum menyeluruh
Tingkat Pengangguran Tinggi
Pengembangan Transportasi Umum dan Fasilitas Pendukungnya Belum Maksimal
Kualitas Kesehatan Masyarakat Belum Sesuai Target
Belum Menyeluruhnya Jaminan Kesehatan
Tingginya Kawasan Kumuh
Sarana dan Prasarana Permukiman Belum Mencapai Target
Rentannya penghidupan nelayan

4. Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah

Belum optimalnya akses air bersih perpipaan
Pemenuhan sanitasi aman
Pencemaran Udara
Kemacetan
Ruang Terbuka Hijau Terbatas
Perubahan Iklim
Peningkatan Suhu Udara
Peningkatan Permukaan Air Laut
Timbulan Sampah Domestik yang Semakin Meningkat

Pengelolaan Sampah Belum Mencapai Target Terutama di Pulau

5. Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK Menuju Kota Berkelanjutan

Rendahnya kegiatan pengembangan dan penelitian serta inovasi untuk menunjang pertumbuhan PDRB

Rendahnya kapasitas IKM untuk mengakses fasilitas keuangan (FI)

6. Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik

Belum Optimalnya Tata Kelola Berbasis Wilayah Fungsional Perkotaan

Permasalahan Manajemen Aset

Tidak Selarasnya Kebijakan Nasional dengan Daerah

Kurangnya Kepastian Hukum Berusaha

Penataan Wilayah Pesisir, Reklamasi Liar

Penataan Kawasan Perkotaan

Kurangnya partisipasi publik

Digitalisasi pelayanan publik belum merata

Keterbatasan transparansi kepada publik

Kemudian, seluruh isu pembangunan strategis yang sudah diidentifikasi disimulasikan dalam Aplikasi *Gephi* untuk memvisualisasikan keterkaitan antar isu dan untuk menunjukkan isu-isu pembangunan yang paling strategis, sebagaimana disajikan dalam Gambar 4-14 di bawah.

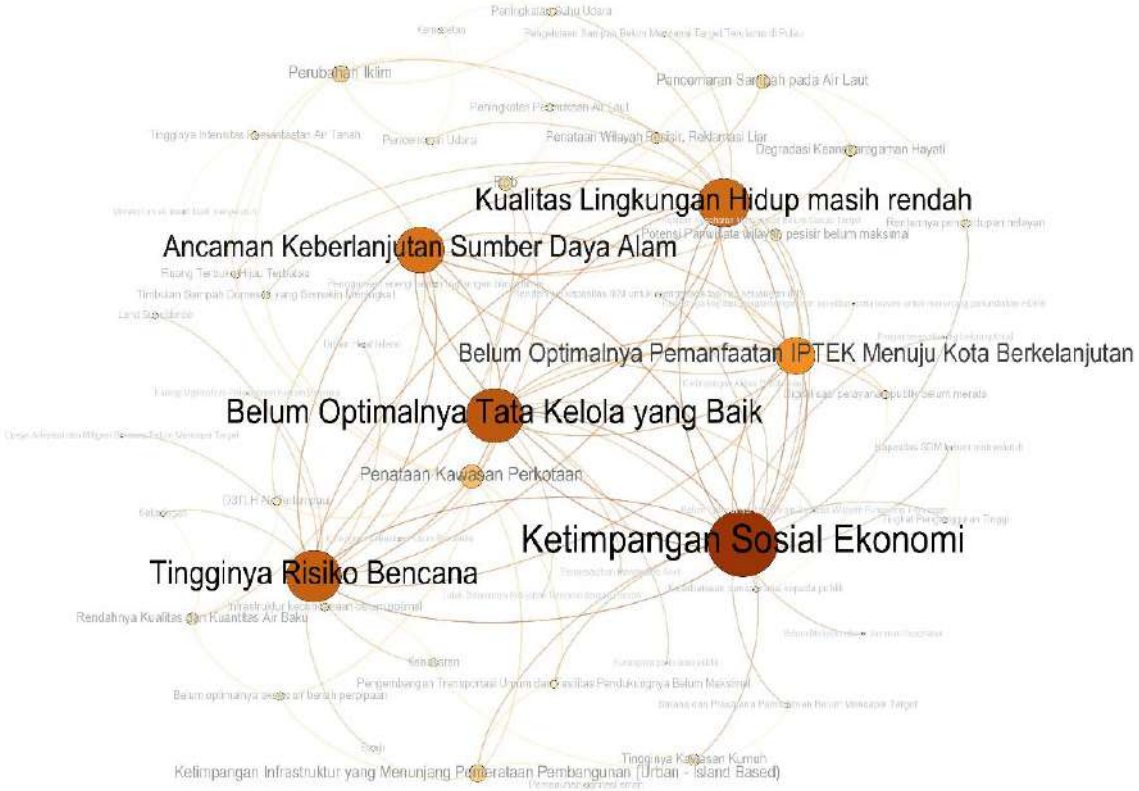

Gambar 4-14 Visualisasi Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Keterkaitan antara Isu

Hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dari pendekatan teknokratik dan partisipatif sebagaimana dijelaskan pada Butir 4.2.3 di atas kemudian dibawa dan didiskusikan di dalam forum Konsultasi Publik pada tanggal 6 Juli 2023, dengan undangan berjumlah 100 (seratus) peserta dari berbagai kelompok kepentingan, untuk masukan dari publik guna menyempurnakan hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan. Banyak diskusi tentang klarifikasi terkait isu-isu pembangunan. Masukan terpenting

dari Konsultasi Publik ini adalah penajaman rumusan empat isu strategis yang paling strategis, menjadi rumusan sebagaimana disajikan di bawah. (Untuk dokumen-dokumen terkait Konsultasi Publik dapat dilihat pada lampiran).

1) Tingginya Risiko Bencana
2) Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA)
3) Kualitas Lingkungan Hidup masih Rendah
4) Ketimpangan Sosial Ekonomi
5) Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*)
6) Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK menuju Kota Berkelanjutan

4.4 Kerangka Kajian Isu PB Strategis dan Kajian Pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

4.4.1 Tingginya Risiko Bencana

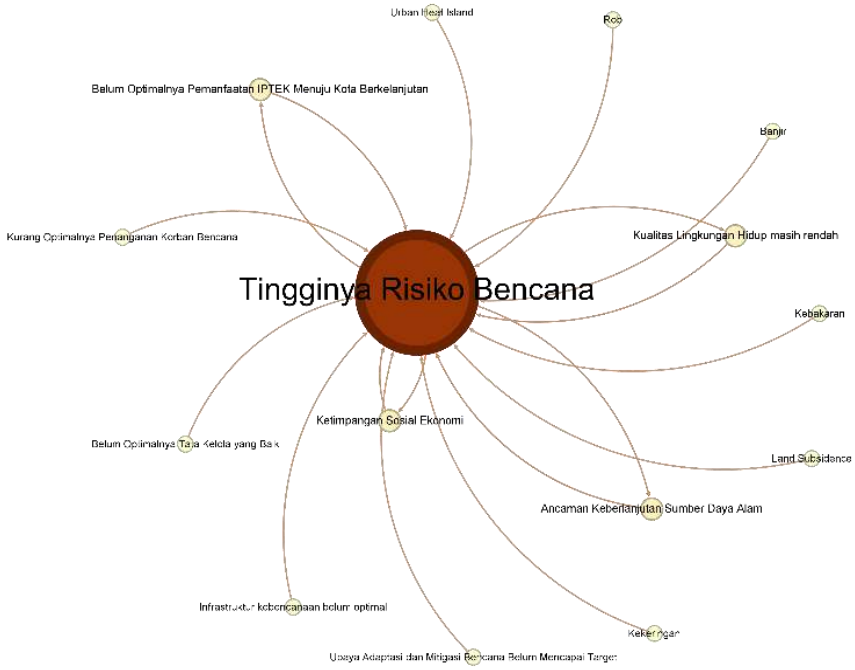

Gambar 4-15 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Tingginya Risiko Bencana

Hasil visualisasi dengan Aplikasi *Gephi* untuk isu strategis Tingginya Risiko Bencana menunjukkan bahwa kondisi risiko bencana dipengaruhi dan dipengaruhi oleh beberapa isu strategis lainnya yaitu kualitas lingkungan hidup, keberlanjutan sumber daya alam, ketimpangan sosial ekonomi, pemanfaatan IPTEK dan belum optimalnya tata kelola yang baik.

Risiko bencana merupakan kemungkinan terjadinya kerusakan, akibat bahaya gempa atau bencana alam lainnya, pada suatu daerah, akibat kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan. Rumus dari risiko bencana adalah:

$$Risiko\ (R) = Bahaya(H) \times \frac{Kerentanan\ (V)}{Kapasitas\ (C)}$$

Dari rumus di atas dapat dilihat keterkaitan isu PB strategis Tingginya Risiko Bencana di DKI Jakarta akan dipengaruhi secara positif oleh tingginya bahaya. Sementara bahaya sangat berkaitan dengan kondisi keberlanjutan Sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Kerentanan sendiri dipengaruhi antara lain oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti kemiskinan, lingkungan yang buruk, konflik, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, anak-anak, wanita, dan lansia yang tidak terlindungi. Sedangkan kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia (fisik, manusia, keuangan, dan lainnya) atau lebih terkait dengan isu strategis tata kelola serta pemanfaatan teknologi di dalamnya.

Berdasarkan Buku RBI 2023, land subsidence dan urban heat island tidak tercakup dalam kategori bencana. Namun demikian kedua hal tersebut akan dibahas dalam kaitannya dengan bencana yang kemudian dipengaruhinya. Land subsidence akan diuraikan karena terkait dengan tingkat bahaya banjir dan rob yang akan mempengaruhi Tingkat Risiko bencana secara positif. Sementara fenomena urban heat island akan berkaitan dengan isu bencana kekeringan.

Bencana non alam yang dianggap penting namun tidak teridentifikasi dalam konsultasi publik adalah bencana wabah penyakit. Dengan mewabahnya Covid 19 sejak awal tahun 2019 sampai dengan 2022, semua pihak disadarkan pada adanya ketidakpastian dalam memahami fenomena bencana. Berkaitan dengan bencana wabah penyakit juga akan diuraikan dalam sub bab ini.

Hasil konsultasi publik menyepakati bahwa bencana yang prioritas untuk ditangani di DKI Jakarta dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bencana Alam dan Bencana Non Alam. Bencana Alam yang teridentifikasi antara lain banjir, rob, land subsidence, kekeringan dan bencana klimatologi berupa urban heat island. Sementara bencana non alam yang teridentifikasi adalah bencana kebakaran.

Untuk dapat merumuskan alternatif kebijakan dan strategi bagaimana menurunkan tingkat Bahaya dan tingkat Kerentanan serta bagaimana meningkatkan Kapasitas, berikut ini merupakan kerangka kajian isu risiko bencana tinggi.

Tabel 4-6 Kerangka Kajian Isu Risiko Bencana Tinggi

Tujuan/ Deskripsi	Kriteria	Indikator
Mengkaji penurunan risiko bencana melalui upaya penurunan kerentanan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dengan pemanfaatan IPTEK	Tingkat dan Kerentanan bencana	• IRBI • Risiko Bencana alam dan non Alam (kebakaran, wabah penyakit, gagal teknologi)
	Kapasitas (tingkat ketahanan daerah terhadap bencana)	Kerugian bencana
	Pemanfaatan IPTEK (Digital Platform)	Sistem Peringatan dini

Sumber: Hasil Analisis, 2023

TINGKAT DAN KERENTANAN BENCANA

Pada tahun 2022 Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) mencatat 3 jenis bencana alam yang dominan terjadi di DKI Jakarta adalah banjir, puting beliung dan tanah longsor. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks risiko sebesar 62.58 (sedang). Angka indeks ini kian menurun dari tahun 2015 yang menunjukkan risiko bencana di DKI Jakarta semakin rendah.

Gambar 4-16. Indeks Risiko Bencana DKI Jakarta 2015 -2022
Sumber: IRBI

Tingkat risiko bencana alam dan non alam dijelaskan di bawah ini.

A. *Bencana Alam*

Banjir

Banjir adalah bencana alam yang paling sering terjadi di Jakarta. Genangan dalam jumlah besar dapat melumpuhkan Ibukota dan menimbulkan dampak yang cukup besar karena banyak kegiatan ekonomi yang terganggu. Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk dalam kota delta (*delta city*) yaitu kota yang berada pada muara sungai. Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim, terutama terkait banjir (BPLHD, 2013). Wilayah DKI Jakarta merupakan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hilir dari beberapa DAS yaitu DAS Ciliwung, DAS Pesanggrahan, DAS Angke, DAS Cakung, DAS Sunter, dan DAS Krukut Grogol. Selain itu, karakteristik ekoregion daratan DKI Jakarta hampir 50% luasnya memiliki karakteristik ekoregion rawan banjir yaitu berupa ekoregion fluvial bermaterial aluvium, fluviomarine dan dataran organik.

Kejadian banjir di wilayah DKI Jakarta yang merupakan hilir DAS ini tidak dapat dipisahkan dengan kondisi di wilayah DAS bagian Hulu dan DAS bagian Tengah yang mana letaknya di luar wilayah administrasi DKI Jakarta. Oleh karenanya penanganan banjir di DKI Jakarta harus terintegrasi dengan pemerintah daerah di sekitarnya.

Selain itu, permasalahan banjir tidak hanya disebabkan semata karena faktor alam. Pada umumnya, permasalahan banjir terkait dengan makin berkurangnya kemampuan wilayah meresapkan air dan/atau mengalirkan air ke laut (karena daerah hilir). Hal ini dapat diartikan bahwa permasalahan banjir sangat berkaitan dengan luasan wilayah resapan air atau kondisi infrastruktur hidrologi yang ada seperti saluran drainase, situ, bangunan pengendali banjir serta kondisi sungai yang baik. Menurut Ketua Panitia Khusus Banjir (Pansus Banjir) DPRD DKI Jakarta (2020 dalam SIKPLHD Jakarta 2022) menyebutkan bahwa kapasitas sungai yang ada di DKI Jakarta dalam mengalirkan air hanya 950 m3/s, sedangkan rata-rata debit air banjir tahunan mencapai 2.100-2.650 m3/s. Terjadinya sedimentasi dan penyempitan daerah aliran sungai karena alih guna fungsi lahan juga membuat sungai tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengalirkan air.

Upaya penanganan banjir di DKI Jakarta setiap tahun sudah dilaksanakan. Meskipun demikian, kejadian banjir masih terjadi hingga saat ini. Indeks risiko bencana banjir tahun 2020 - 2022 menunjukkan bahwa risiko bencana banjir berbeda antara kota administrasi yang ada. Tabel di bawah ini menunjukkan Indeks Risiko Bencana Banjir yang dikeluarkan oleh BNPB.

Tabel 4-7 Indeks Risiko Bencana Banjir Tahun 2020 - 2022

Kota/Kabupaten	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Jakarta Utara	Tinggi (27,58)	Tinggi (18,15)	Tinggi (22,54)
Jakarta Timur	Tinggi (25,74)	Tinggi (16,94)	Tinggi (21,03)
Jakarta Pusat	Tinggi (25,74)	Tinggi (16,94)	Tinggi (21,03)
Jakarta Barat	Tinggi (25,74)	Tinggi (16,94)	Tinggi (21,03)
Jakarta Selatan	Tinggi (17,16)	Sedang (11,29)	Tinggi (14,02)
Kepulauan Seribu	Tinggi (21,60)	Sedang (10,89)	Tinggi (13,52)

Sumber: BNPB, 2021

Secara umum, meskipun di tahun 2021 terdapat 2 (dua) kota/kabupaten yang memiliki indeks Sedang, risiko bencana Banjir DKI Jakarta masih dapat dikategorikan sebagai Risiko Tinggi. Sesuai dengan rumus risiko, penyebab tingginya risiko dapat dipengaruhi oleh Bahaya, Kerentanan dan Kapasitas.

Berdasarkan hasil kajian dari BPBD DKI Jakarta tahun 2022, Potensi bahaya di DKI Jakarta termasuk kategori Tinggi, karena dari 46.314 luas terdampak, 23% memiliki potensi bahaya Tinggi, 43% Sedang dan 3,1% Rendah. Secara lebih rinci, sebaran tingkat potensi bencana per Kabupaten/kota tahun 2021 berdasarkan luas potensi bahayanya adalah sebagai berikut:

Tabel 4-8 Tingkat Potensi Bahaya Banjir Tahun 2022

Kota/Kabupaten	Luas Wilayah (ha)	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
Jakarta Utara	15397	462	3,0	7290	47,3	3719	24,2	11471	74,5
Jakarta Timur	18803	577	3,1	7048	37,5	3937	20,9	11562	61,5
Jakarta Pusat	4813	497	10,3	3456	71,8	1153	24,0	5106	106,1
Jakarta Barat	12954	490	3,8	7424	57,3	3724	28,7	11638	89,8
Jakarta Selatan	14127	69	0,5	4057	28,7	2411	17,1	6537	46,3
Kepulauan Seribu	870	-		-		-			
DKI JAKARTA	66964	2095	3,1	29275	43,7	14944	22,3	46314	69,2

Keterangan:

Berdasarkan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012:

- ketinggian genangan < 0,76 m (rendah);
- Ketinggian genangan 0,76–1,5 m (sedang);
- Ketinggian genangan > 1,5 m (tinggi).

Potensi bahaya banjir tersebut paling kecil terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Hal ini sejalan dengan karakteristik ekoregion darat DKI Jakarta, dimana dari ke 6 ekoregion di DKI Jakarta hanya ekoregion fluvio vulkanik, yang mencakup wilayah Jakarta Selatan, yang tidak bercirikan rawan bahaya banjir.

Berdasarkan data genangan banjir BNPB tahun 2019-2020, menunjukan bahwa sekitar 27% dari wilayah DKI Jakarta atau seluas 18.184,41 Ha terjadi genangan banjir dalam rentang dua tahun tersebut. Data tersebut menunjukan genangan banjir pada wilayah perkotaan DKI Jakarta, sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Seribu diindikasikan tidak terjadi genangan banjir. Berdasarkan pembagian wilayah perkotaan DKI Jakarta, wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta yang mengalami genangan banjir terbesar ada di wilayah kota Jakarta Timur dengan persentase genangan sebesar 8,53% atau 5.642,77 Ha dari luasan total Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan wilayah yang mengalami genangan paling rendah di tahun 2019-2020 ada pada kota Jakarta Pusat dengan luas genangan 487,15 Ha atau 0,74% dari luasan total DKI Jakarta. Secara rinci, sebaran genangan banjir pada tahun 2019-2020 di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

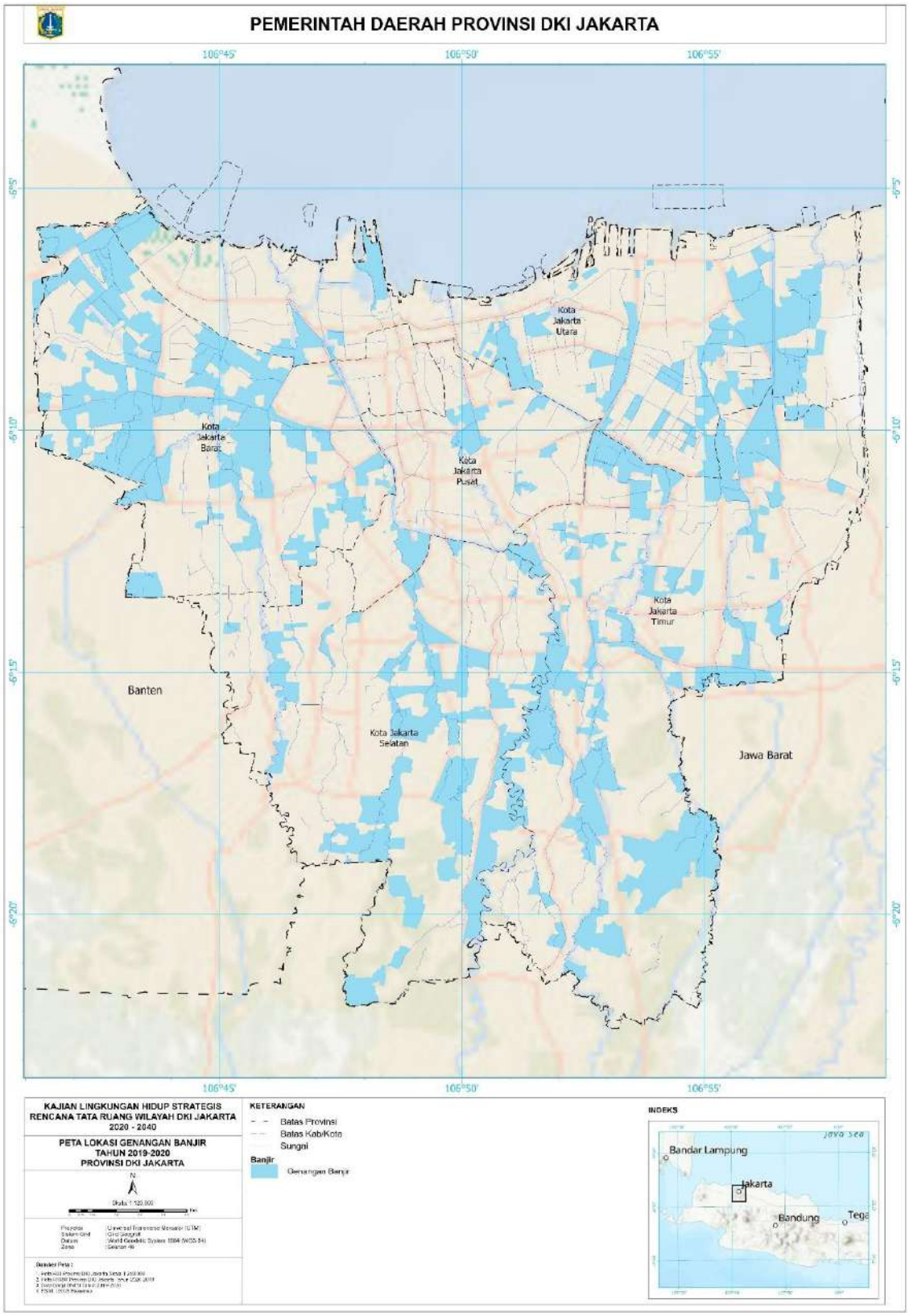

Gambar 4-17. Peta Genangan Banjir Provinsi DKI Jakarta Desember 2019 s.d. Februari 2020

Sumber: Data Genangan Banjir BNPB tahun 2020

Kawasan rawan banjir yang dirilis oleh BNPD Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

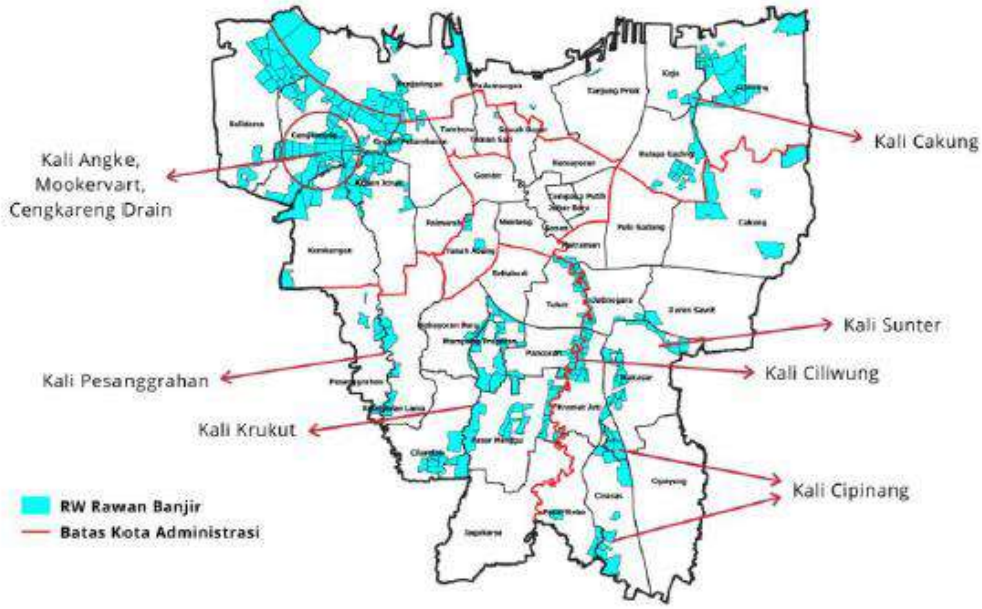

Gambar 4-18 Kawasan Rawan Banjir

Sumber: Data Kawasan Banjir BNPD Provinsi DKI Jakarta, 2020

Hasil kajian risiko bencana Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 menyebutkan bahwa tingkat kerentanan terhadap bencana banjir diidentifikasi berdasarkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian fisik, ekonomi dan kerusakan lingkungan. Potensi penduduk terpapar mencakup jumlah penduduk terpapar dan jumlah penduduk terpapar dalam kelompok rentan (umur rentan, penduduk miskin dan penduduk disabilitas). Hasil kajian secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4-9 Kelas Kerentanan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta

Kota	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
Jakarta Pusat	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
Jakarta Utara	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
Jakarta Barat	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
Jakarta Selatan	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
Jakarta Timur	Sedang	Tinggi	-	Tinggi
DKI JAKARTA	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi

Ditinjau dari aspek hidrologi atau factor alam, sumber banjir di DKI Jakarta adalah 1) hujan yang jatuh di wilayah Jabodetabek dan mengalir atau bermuara di Jakarta; 2) tingginya curah hujan yang terjadi di Jakarta dan 3) adanya pasang naik air laut di wilayah Jakarta Utara. Risiko bencana banjir tersebut diperparah oleh faktor manusia maupun tata kelola kota. Berdasarkan hasil kajian BNPBD DKI Jakarta, terdapat beberapa faktor lain yang memperparah bencana banjir:

1. Penurunan permukaan air tanah, dipengaruhi oleh penggunaan atau eksploitasi air tanah yang berlebihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan tanah, diperkirakan laju penurunan tanah sekitar 3 - 18 cm per tahun. Selain itu, wilayah Jakarta Utara berbatasan dengan laut, sebagian wilayah tersebut lebih rendah dari permukaan air laut, sehingga mengakibatkan aliran air dari hulu tidak dapat terbuang atau mengalir langsung ke laut.

2. Keberadaan jaringan drainase di Provinsi DKI Jakarta yang over atau melebihi kapasitas menampung air hujan. Hal ini dapat terlihat dari genangan air di berbagai lokasi ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Tidak optimalnya fungsi drainase disebabkan oleh saluran air yang ada tersumbat oleh sampah dan tertutupnya permukaan tanah yang dilapisi material yang kedap air, sehingga air tidak dapat meresap dalam tanah dengan baik.
3. Pendangkalan dan rusaknya saluran dan tangkapan air seperti drainase, waduk, banjir kanal, dan sungai. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya kapasitas dalam menampung volume air yang menyebabkan terjadinya peluapan air. Selain itu, terjadinya pendangkalan sungai-sungai yang melewati wilayah Provinsi DKI Jakarta memicu terjadinya banjir, hal ini diperparah dengan terjadinya curah hujan ekstrem dengan intensitas tinggi dan durasi lama di wilayah hulu (Bogor dan sekitarnya).
4. Perubahan tutupan lahan. Dari tahun ke tahun terjadi perubahan tutupan lahan yang signifikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, seperti permukiman semakin luas dan keberadaan ruang terbuka hijau yang kecil. Kondisi tersebut memicu peluang meluapnya sungai dan jaringan drainase jika terjadi hujan lebat.
5. Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang semakin hari kian menurun, seperti pembuangan sampah secara sembarangan dan pembangunan secara masif di sekitar bantaran sungai.

Banjir Rob

Bencana alam banjir Rob sering pula disebut sebagai Bencana Gelombang Ekstrem. Dampak dari gelombang ini antara lain abrasi atau erosi di pesisir Pantai. Bencana gelombang ekstrem dan abrasi ini mengancam kehidupan di wilayah pesisir (Jakarta Utara dan kepulauan Seribu.

Wilayah Jakarta bagian utara tercatat memiliki elevasi terendah sebesar -13 mdpl. Tingkat penurunan muka tanah di Jakarta bagian utara juga cukup tinggi. Dengan kombinasi tersebut, jika air laut sedang pasang, banjir rob tidak dapat dielakkan. Pada tahun 2050 ketinggian muka air pasang laut diproyeksikan sebesar 149,72 cm (Karma dan Qamila, 2022). Sehingga wilayah dengan ketinggian kurang dari 149,72 cm akan terkena banjir rob, dengan luas area sekitar 19.463,26 Ha atau 29,39% dari luas daratan DKI Jakarta. Wilayah yang terkena bencana banjir rob akan makin meluas dan makin tinggi jika air laut pasang terjadi bersamaan dengan hadirnya hujan di wilayah Jakarta bagian utara.

Data di bawah ini menunjukkan lokasi sebaran Rob di Pantai Utara Jakarta.

Tabel 4-10. Lokasi Sebaran rob di Pantai Utara Jakarta

No	Desa Pantai	Kecamatan	Bencana Rob	Karakteristik Tinggi Rob					Keterangan
				Tinggi Air Pasang Tahun 2008 (m)	Tinggi Gelombang Tahun 2008 (m)	Penurunan Tanah Tahun 2007-2008 (m)	Kenaikan Muka Laut s/d Tahun 2030 (m)	Total	
1	Kamal Muara	Penjaringan	Terkena	0,70	2,86	0,08	0,15	3,79	Bangunan yang ada kurang memadai
2	Kapuk Muara	Penjaringan	Bebas	0,70	2,86	0,08	0,15	3,79	Terdapat hutan mangrove
3	Pluit	Penjaringan	Terkena	0,70	2,86	0,03	0,15	3,74	Bangunan tanggul yang ada kurang tinggi
4	Penjaringan	Penjaringan	Terkena	0,70	2,86	0,03	0,15	3,74	Bangunan tanggul yang ada kurang tinggi
5	Ancol	Pademangan	Hampir	0,70	2,86	0,09	0,15	3,80	Bangunan krib yang ada kurang panjang/ banyak
6	Tj. Priok	Tj. Priok	Bebas	0,70	2,86	0,09	0,15	3,80	Ada bangunan peredam gelombang
7	Koja	Koja	Bebas	0,70	2,86	0,09	0,15	3,80	Ada bangunan peredam gelombang
8	Kali baru	Cilincing	Terkena	0,70	2,86	0,08	0,15	3,79	Belum ada Prasarana
9	Cilincing	Cilincing	Terkena	0,70	2,86	0,08	0,15	3,79	Bangunan yang ada kurang memadai

10	Marunda	Cilincing	Terkena	0,70	2,86	0,08	0,15	3,79	Bangunan yang ada kurang memadai

Sumber : Geodessy Reaseach Division ITB, 2010

Keterangan : Data Ketinggian telah disesuaikan dengan MSI/Peil Tanjung Priok

Wilayah yang menjadi daerah rawan genangan banjir di kawasan Pantai Utara Jakarta antara lain: Kapuk Kamal Muara, Kapuk Kamal, Kapuk Muara Teluk Gong, Pluit, Pedemangan Barat, Pademangan Timur, Sunter Agung, Rawa Badak, Tugu, Lagoa, Tugu Utara, Perum Walikota Jakarta Utara, Kebon Bawang, Warakas, Sungai Bambu dan sebagainya.

Pada umumnya kejadian rob di pantai Utara Jakarta terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari setiap tahunnya. Bulan-bulan tersebut merupakan musim angin musim Barat dimana angin bertiup dari arah Barat Laut dengan kecepatan 8,21-10,62 knot. Beberapa wilayah yang terkena dampak rob adalah Kamal Muara, Pluit, Penjaringan, Ancol, Kali baru, Cilincing dan Marunda.

Berdasarkan data November 2020 dari laman website BPBD DKI Jakarta, kejadian banjir rob terjadi di 4 Kecamatan yaitu: Kecamatan Kalideres, Penjaringan, Pademangan dan CIlincing. Dimana rata-rata ketinggian banjir berkisar antara 10-70 cm. Lokasi terparah terjadinya banjir rob terjadi di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Gambar di bawah ini merupakan kejadian banjir rob pada November 2020 berdasarkan laporan UPT Pusdatin BPBD DKI Jakarta.

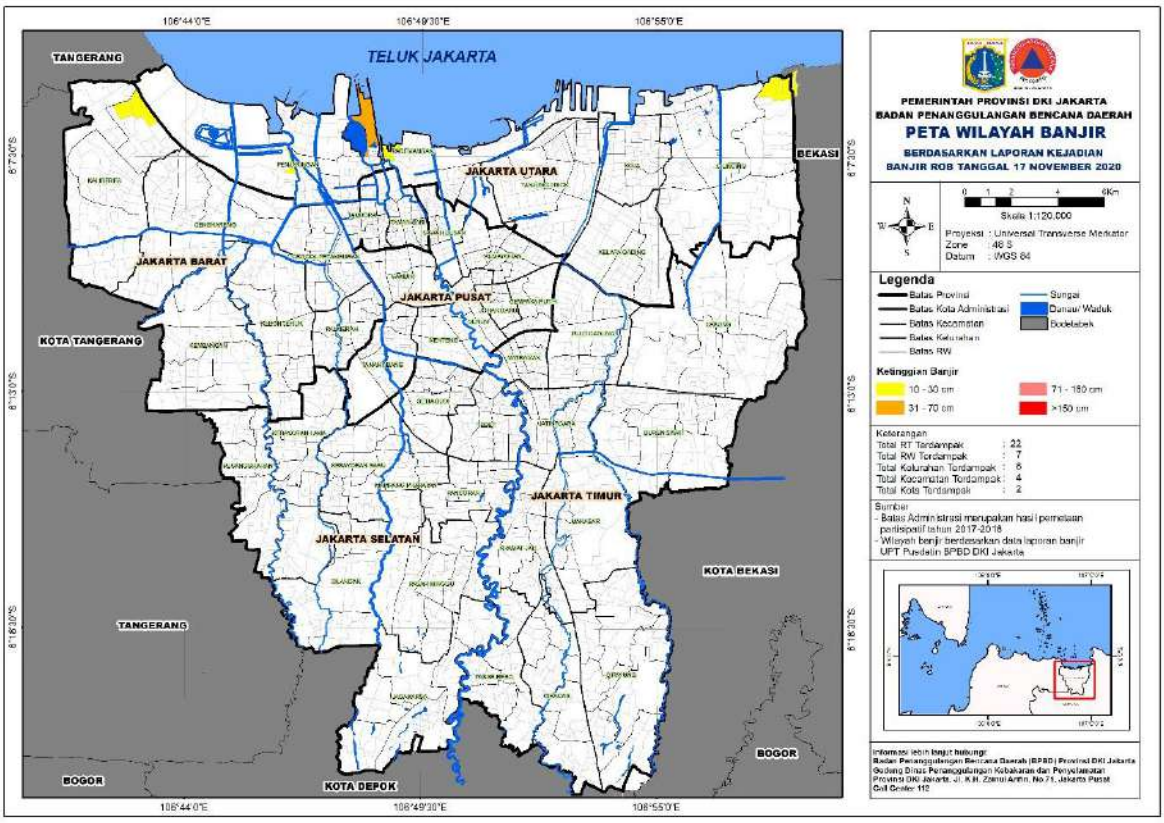

Gambar 4-19. Peta Wilayah Banjir Rob 17 November 2020

Sumber: UPT Pusdatin BPBD DKI Jakarta

Berdasarkan Hasil kajian BPBD DKI Jakarta, Kelas Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Kepulauan Seribu adalah Rendah dan Kelas Kerentanan juga Rendah. Sementara untuk Jakarta Utara, Kelas Bahaya Gelombang ekstrem dan abrasi dalam kelas Bahaya Tinggi dan kelas Kerentanan Tinggi.

Kelas bahaya tinggi di wilayah Jakarta Utara antara lain dipengaruhi oleh terjadinya *land sub-subsidence*. Selain itu, faktor perubahan iklim termasuk pemanasan global juga menjadi pemicu bencana ini.

Kekeringan

Sedangkan untuk indeks risiko kekeringan, DKI Jakarta memiliki klasifikasi risiko sangat-sangat rendah menuju ke rendah, yang didominasi oleh kelas rendah di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Untuk kelas sangat-sangat rendah berada di Jakarta Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa provinsi DKI Jakarta memiliki kerentanan rendah terhadap bencana kekeringan.

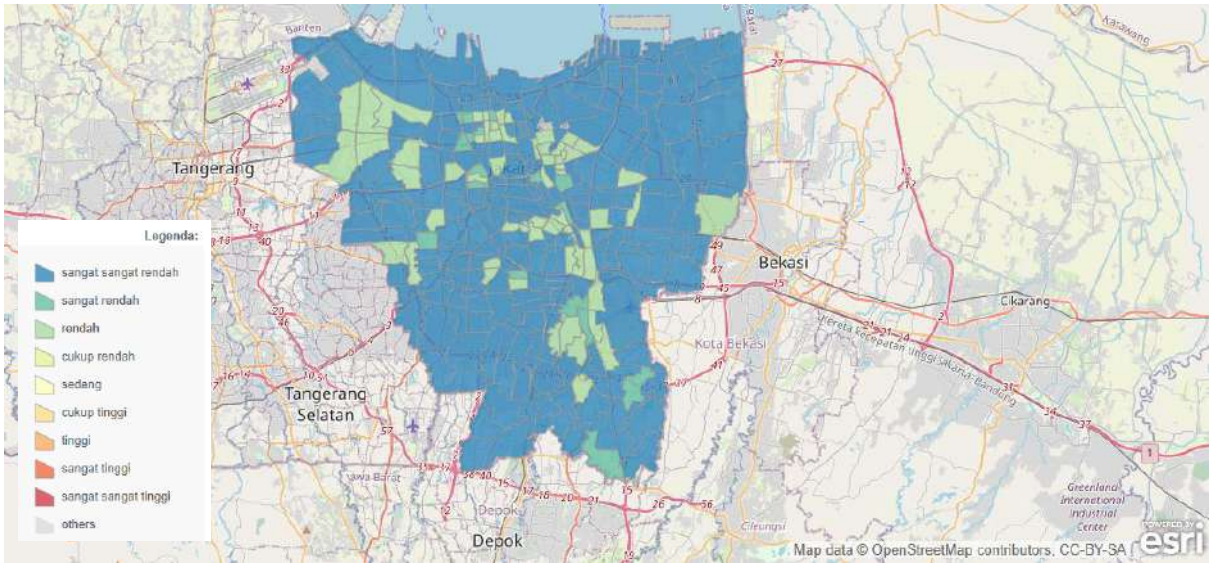

Gambar 4-19. Kerentanan Terhadap Bencana Kekeringan DKI Jakarta

Sumber: Portal SIDIK, KLHK Data Hasil Analisis Tahun 2021

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya risiko bencana alam dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Karakteristik wilayah
   Wilayah DKI Jakarta secara alamiah memang berpotensi terhadap bahaya bencana. Jakarta merupakan dataran rendah dan wilayah bagian hilir beberapa Daerah Aliran Sungai serta muara dari Sungai-sungai tersebut. DKI Jakarta DKI juga memiliki pesisir yang sebagian memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, wilayah perairan laut yang luas dan pulau-pulau kecil – sedang berpenghuni.

2. Kependudukan
   DKI Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Tingginya jumlah penduduk dan kepadatannya menimbulkan berbagai permasalahan berkaitan dengan kerentanan. Pada saat terjadinya bencana, jumlah penduduk yang terpapar bencana menjadi banyak. Selain itu, dari data yang ada, Masyarakat dengan umur rentan dan atau miskin yang terdampak bencana masih tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi sebagian besar terdapat di wilayah daratan DKI Jakarta. Tingginya penduduk ini menyebabkan beberapa lokasi yang telah teridentifikasi rawan bencana tetap menjadi Kawasan permukiman.

3. Kapasitas Daerah
   Untuk menurunkan tingkat risiko bencana, diperlukan peningkatan kapasitas daerah

Perubahan Iklim

Faktor perubahan iklim dirasakan secara global. Namun demikian, wilayah DKI Jakarta yang memang termasuk wilayah rawan terhadap bencana, akan merasakan dampak dari fenomena perubahan iklim tersebut. Dengan adanya pemanasan global tersebut mengakibatkan perubahan iklim serta kenaikan frekuensi atau intensitas cuaca yang ekstrem. Dilihat dari analisis proyeksi perubahan suhu kenaikan suhu pada daerah utara Jakarta lebih hangat 0,2^{o}C daripada wilayah selatan. Kenaikan suhu bersifat naik turun, batas bawah (rata-rata minimum suhu harian)

selalu naik 0,1°C hingga 1°C dari pada tahun-tahun sebelumnya. Ketika suhu naik, evaporasi meningkat dikhawatirkan mempengaruhi ketersediaan air bersih (debit andalan sungai khususnya daerah hulu). Jika pasokan air bersih tidak terpenuhi, masyarakat akan kembali mengekstraksi air tanah. Waspada kenaikan muka air laut akibat kenaikan suhu, ditambah tren curah hujan yang meningkat 10-20 tahun yang akan datang yaitu bahaya banjir.

Fenomena perubahan iklim diproyeksikan menyebabkan intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem lebih tinggi dan lebih cepat terjadi. Herizal mengatakan dari pengkajian data historis curah hujan harian BMKG selama 150 tahun (1866-2015), terdapat tren semakin seringnya kejadian hujan ekstrem tahunan, peningkatan 2-3% probabilitas bila dibandingkan dengan kondisi iklim 100 tahun lalu. BNPB mencatat, curah hujan di Jakarta pada awal Januari tahun 2020 menjadi curah hujan tertinggi dalam 1,5 abad. Berdasarkan data BNPB, curah hujan mencapai 377 mm/hari. Angka ini lebih dari dua kali lipat dari curah hujan tahun 2016 yang mencapai 100-150 mm/hari.

Kota Jakarta termasuk pada kota delta (*delta city*) atau dapat disebut dengan kota yang berada pada muara sungai yang umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Dampak nyata dari perubahan iklim yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat adalah bencana banjir yang sedikit banyak terpengaruh dari adanya perubahan iklim. Dibawa ini merupakan gambaran dampak dari perubahan iklim yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu dampak dari perubahan iklim global adalah kenaikan suhu. Kenaikan suhu pada permukaan laut dapat mengakibatkan naiknya tinggi muka air laut, sementara pengaruhnya pada daratan salah satunya adalah potensi kekeringan.

Merujuk pada data SIDIK (Sistem Informasi Data indeks Kerentanan) tahun 2018 seperti dijelaskan pada sub bab 3.2.3 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim, Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kerentanan sangat rendah serta didominasi kelas sedang pada wilayah *main land* dan Kepulauan Seribu (data skala kota/kabupaten). Fenomena perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi kondisi kelembapan udara, suhu udara, serta curah hujan, tetapi juga kondisi suhu permukaan. Perubahan kondisi permukaan terjadi akibat lahan yang didominasi oleh lahan terbangun. Pada wilayah perkotaan, dimana permukaan bangunan gedung-gedung lebih banyak menyerap energi panas daripada memantulkannya, sehingga mengakibatkan naiknya suhu di wilayah sekitar gedung. Kondisi tersebut jika terus meningkat akan menimbulkan adanya fenomena *Urban Heat Island* (UHI). UHI merupakan fenomena yang terjadi di sebuah kota atau wilayah metropolitan yang secara signifikan lebih panas dibandingkan sekitarnya, akibat dari aktivitas yang lebih besar di wilayah tersebut. Fenomena *Urban Heat Island* tidak bisa lepas dari kondisi provinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu kota dengan status kota metropolitan dengan dominasi lahan terbangun. Dengan status tersebut, maka provinsi DKI Jakarta berpotensi mengalami kenaikan suhu permukaan karena didominasi oleh lahan terbangun dan sedikit lahan bervegetasi. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan menggunakan data landsat, menunjukkan bahwa suhu permukaan rata-rata di Provinsi DKI Jakarta cenderung lebih tinggi dalam rentang 4 tahun untuk wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Pada tahun 2018, beberapa lokasi pada 3 wilayah perkotaan tersebut, mengalami peningkatan suhu tertinggi mencapai 39^{0}C, sedangkan untuk tahun 2019 - 2021 cenderung menurun secara fluktuatif, yaitu 37^{0}C, 35^{0}C, dan 36^{0}C. Meningkatnya suhu permukaan di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan di beberapa lokasi dikarenakan faktor lahan yang didominasi oleh lahan terbangun yang cenderung menyerap panas dibandingkan vegetasi yang memantulkan panas. Hal ini menjadi sebuah permasalahan lingkungan akibat perubahan iklim dan akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup dimasa yang akan datang.

B. Bencana Non Alam

Kebakaran

Bencana kebakaran di DKI Jakarta semakin meningkat dengan bertambahnya permukiman yang saling berimpitan, di Provinsi DKI Jakarta selain adanya bencana banjir yang melanda setiap tahun, dalam kenyataannya juga banyak terjadi adanya bahaya kebakaran. Pada tahun 2020 luas area terbakar mencapai 9.731,98 Ha di

Jakarta Timur yang merupakan area terluas dari keseluruhan kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

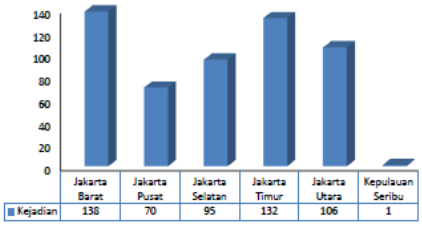

2020

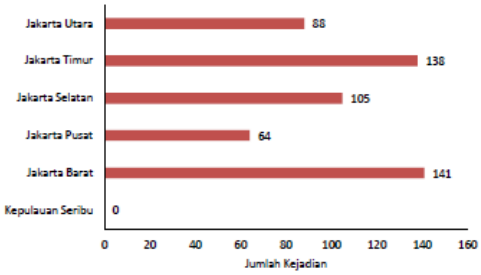

2021

Gambar 4-20 Kejadian Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021

Peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada kejadian bencana kebakaran di tahun 2022. Tercatat hingga April 2022, terdapat 543 kejadian kebakaran di wilayah DKI Jakarta, meningkat lebih dari 200 kejadian dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Gambar 4-21. Data Kejadian Kebakaran
Sumber: infografis oleh republika berdasarkan data Digulkarmat DKI Jakarta 2022

Jumlah kerugian yang diakibatkan oleh adanya bencana kebakaran pada tahun 2020 di Kepulauan Seribu tidak ada kerugian, Jakarta Utara 20 miliar rupiah, Jakarta Timur 36 miliar rupiah, Jakarta Selatan 41 miliar rupiah, Jakarta Pusat 61 miliar rupiah, dan Jakarta Barat 76 miliar rupiah merupakan nilai kerugian tertinggi di Provinsi DKI Jakarta.

Sepanjang tahun 2021 bencana kebakaran menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda. Sekitar 536 RT di lima wilayah kota di DKI Jakarta terdampak, dengan korban mengungsi mencapai 9.827 jiwa dan korban meninggal dunia sebanyak 24 orang. Sementara perkiraan kerugian materiil mencapai tidak kurang dari Rp 177.183.000,00. Salah satu kasus bencana kebakaran adalah yang terjadi di pemukiman kumuh di Jl. Kemang Utara, Mampang Prapatan yang menghanguskan sekitar 50 lapak pemulung.

Kerawanan terhadap bencana kebakaran antara lain karena kepadatan bangunan dan serta pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang maupun tata aturan pendirian bangunan. Alih tata guna lahan seperti mendirikan pemukiman di lokasi yang bukan peruntukannya, akan menciptakan pemukiman kumuh, fasilitas air bersih dan listrik kurang memadai, serta rentan terhadap bencana kebakaran.

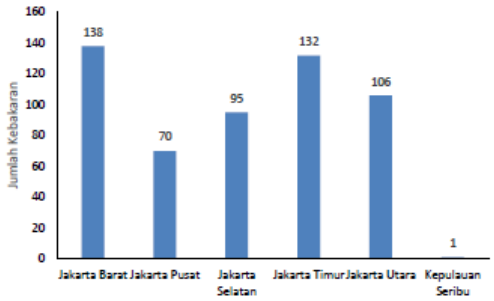

2020

2021

Gambar 4-22 Jumlah RT terdampak dan Perkiraan Kerugian yang dialami akibat Kebakaran Tahun 2020 dan Tahun 2021

Penyebab utama terjadi kebakaran adalah bersumber dari listrik. Kepadatan bangunan yang ada akan memperparah dan memperbanyak jumlah RT yang terdampak serta kerugian yang dialami. Kepadatan bangunan juga mempersulit pihak Pemadam Kebakaran untuk dapat mengendalikan kebakaran yang terjadi karena sulitnya akses menuju lokasi maupun sulitnya akses mencari sumber air.

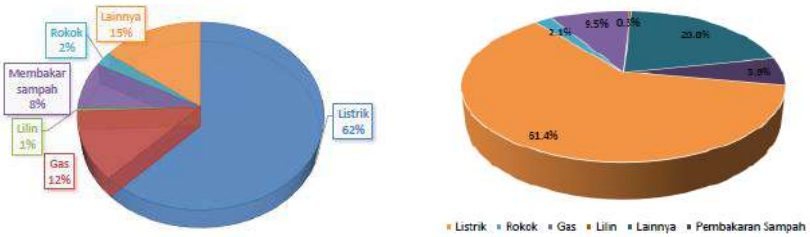

Gambar 4-23 Sumber Bencana Kebakaran

Wabah Penyakit

Epidemi adalah kondisi yang mirip dengan wabah. Keadaan dikatakan epidemi jika suatu kelompok masyarakat atau wilayah terkena penyakit menular dan kejadiannya terjadi secara cepat. Berdasarkan dokumen rancangan Rencana Penanggulangan Bencana tahun **2022, risiko bencana epidemi dan wabah penyakit** di Provinsi DKI Jakarta berada pada **kelas Sedang.**

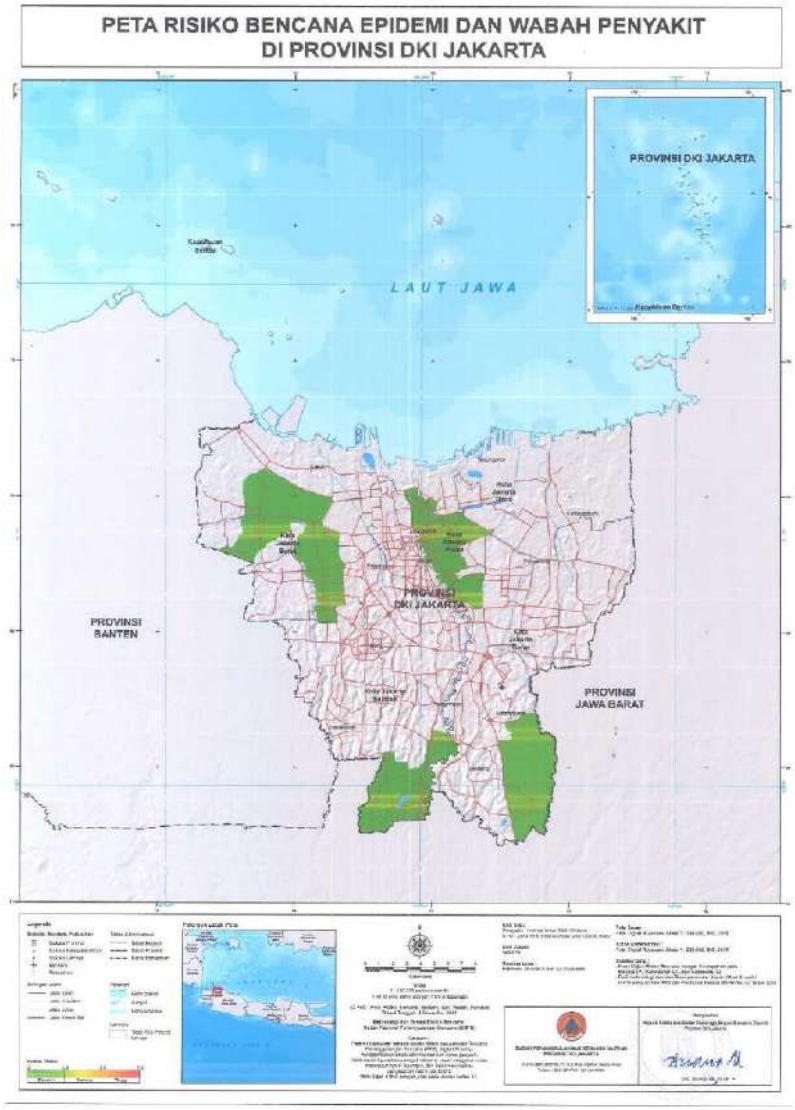

Gambar 4-24 Risiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta 2022 – 2026

Kegagalan Teknologi

Bencana gagal teknologi merupakan jenis kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi seperti bencana kecelakaan transportasi, kecelakaan industri kegagalan konstruksi dan bangunan seperti: lereng galian/timbunan longsor, tanggul saluran jebol, situ/embung/ bendungan runtuh, dan lain sebagainya. Berdasarkan dokumen rancangan Rencana Penanggulangan Bencana tahun **2022, risiko bencana kegagalan teknologi** di Provinsi DKI Jakarta berada pada **kelas Sedang.**

Gambar 4-25 Risiko Bencana Kegagalan Teknologi 2022

Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi DKI Jakarta 2022 - 2026

KAPASITAS DAN TINGKAT KETAHANAN DAERAH TERHADAP BENCANA

Kapasitas Daerah adalah kemampuan daerah dan Masyarakat untuk melakukan Tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan daerah akibat bencana. Kapasitas daerah ditentukan menggunakan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Hasil kajian BNPB DKI Jakarta menunjukkan bahwa IKD DKI Jakarta masih tergolong Sedang. Penghitungan IKD didasarkan pada 7 (tujuh) fokus prioritas yaitu 1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3) pengembangan Sistim Informasi Diklat dan Logistik; 4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; 5) Peningkatan Efektivitas pencegahan dan Mitigasi bencana; 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan 7) pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0 – 1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah:

- Indeks ≤ 0,4 adalah Rendah
- Indeks 0,4 – 0,8 adalah Sedang
- Indeks 0,8 – 1 adalah Tinggi

Berikut ini merupakan hasil kajian IKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2022.

Tabel 4-11 Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi DKI Jakarta

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,69	0,54	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,47		
3	Pengembangan Sistem Informasi Diklat *and logistic*	0,63		
4	Penanganan tematik Kawasan rawan bencana	0,61		
5	Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,57		
6	Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0,51		
7	Pengembangan sistem pemulihan bencana	0,44		

Sumber: BPBD, 2022

Secara umum, ketujuh prioritas tersebut perlu ditingkatkan kapasitasnya. Meskipun demikian, dari ke tujuh indeks prioritas, terdapat 3 prioritas yang masih di bawah rata-rata perlu menjadi perhatian, yaitu pengembangan sistem pemulihan bencana, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu dan perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

Disisi lain, kesiapsiagaan bencana daerah juga ditunjukkan dengan indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah. Indikator ini tertuang dan menjadi bagian dalam indikator TPB yaitu pada TPB 1, TPB 11 dan TPB 13. Secara untuk, tingkat kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah kian meningkat. Pada tahun 2022 telah mencapai angka 7,32

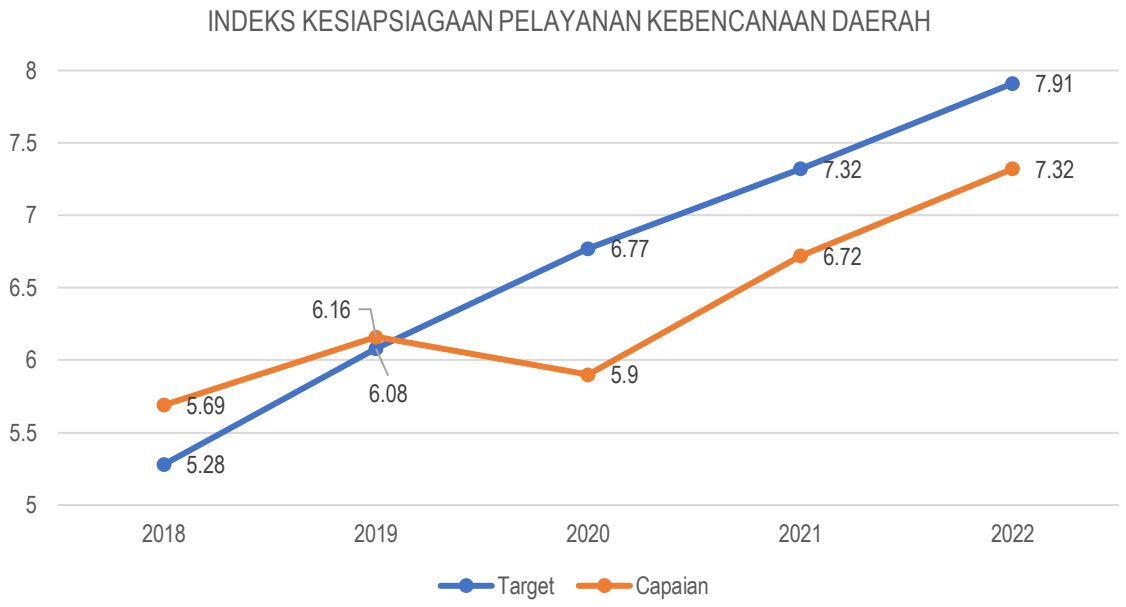

Gambar 4-26. Indeks Kesiapsiagaan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta 2018-2022
Sumber: Capaian TPB DKI Jakarta (2018-2022) – TPB 1, 11, 13, Sekretariat TPB Provinsi DKI Jakarta

Gambar di atas menunjukkan tren yang cukup membaik. Namun demikian, terjadi gap pencapaian target dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2020-2022), dimana capaian masih di bawah target daerah. Pada tahun 2022, target indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah adalah 7,91 sementara capaian masih di angka 7,32.

Dalam melihat seberapa baik ketahanan daerah terhadap bencana, perlu pula dilihat dari jumlah kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Pada TPB 1 (indikator 1.5.2.(a)) dan TPB 11 (indikator 11.5.2.(a)), terdapat data kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Data ini sebagian besar didominasi oleh kerugian akibat bencana kebakaran.

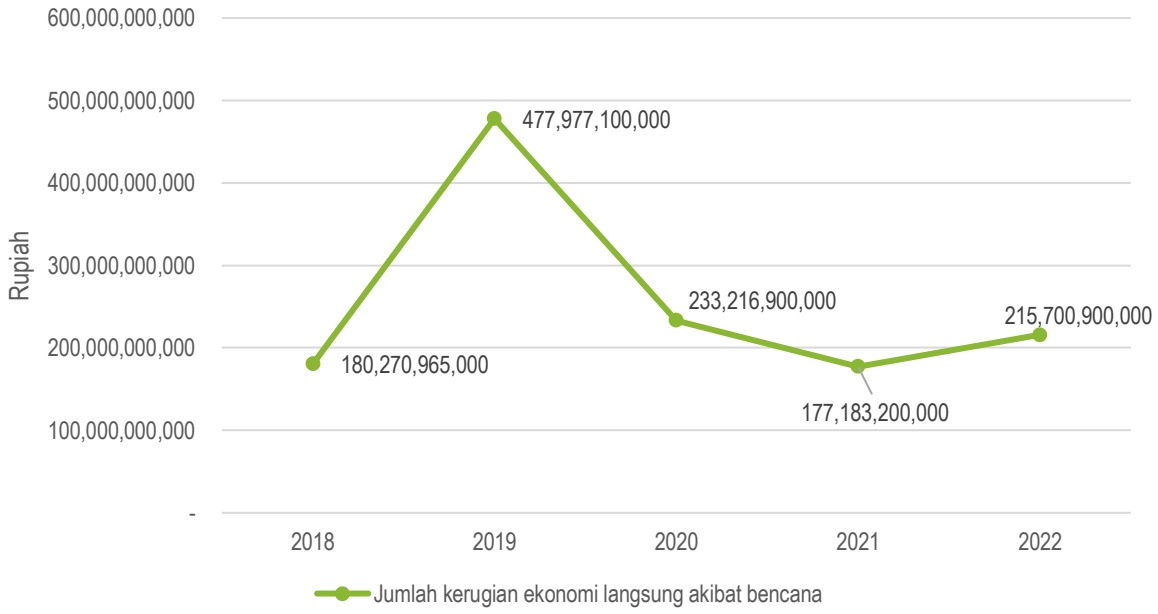

Gambar 4-27. Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana
Sumber: Capaian TPB DKI Jakarta (2018-2022) – TPB 1, 11, 13, Sekretariat TPB Provinsi DKI Jakarta

Secara umum, terjadi peningkatan kerugian bencana dari tahun 2018, meskipun terjadi secara fluktuatif. Pada tahun 2022, jumlah kerugian langsung mencapai 215,7 Miliar Rupiah.

PEMANFAATAN IPTEK (*DIGITAL PLATFORM*)

Pemanfaatan IPTEK dalam penanggulangan bencana daerah penting dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah. Teknologi yang terus berkembang harus dimanfaatkan untuk menjamin efektivitas penanggulangan bencana. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta adalah penggunaan *digital platform* untuk memberikan informasi terkait dengan kebencanaan daerah. *Platform* ini terdiri dari *website* dan media sosial BPBD.

Website BPBD salah satunya memberikan informasi terkait dengan informasi Tinggi Muka Air sungai, prakiraan cuaca, peringatan dini cuaca, gelombang air laut, COVID-19, Monitoring kejadian banjir dan infografis kebencanaan daerah. Selain itu, *website* tersebut juga menghubungkan dengan laman informasi BNPB, BMKG, JAKI, Pantau Banjir, Jakarta Satu dan ruang literasi kebencanaan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan bahaya bencana, BPBD membuka Ruang Literasi Kebencanaan yang merupakan fasilitas fisik yang menggunakan teknologi simulasi *Virtual Reality* (VR) untuk menyediakan sumber daya edukasi gratis. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bencana alam melalui pengalaman belajar interaktif.

Sebagai salah satu indikator dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi kebencanaan ditunjukkan melalui jumlah sistem peringatan dini yang terdapat dalam TPB 11 (indikator 11.5.1). Secara umum pada tahun 2022, terjadi penurunan jumlah sistem peringatan dini menjadi 23 sistem sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut.

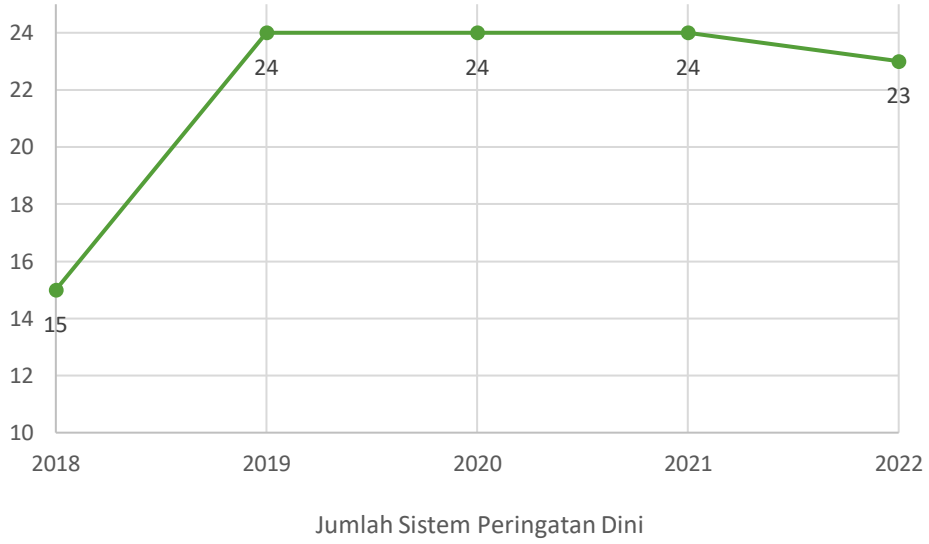

Gambar 4-28. Jumlah Sistem Peringatan Dini DKI Jakarta

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Daerah 2022-2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun beberapa sistem peringatan dini untuk bencana banjir seperti Pantauan TMA (Tinggi Muka Air) oleh BPBD, Pantauan Curah Hujan/Status Siaga Banjir oleh DSDA, dan Pantau Banjir oleh BBWS CC. Sementara itu perlu pengembangan dan pembangunan sistem peringatan dini untuk bencana tsunami di sepanjang pesisir daerah rawan tsunami, bencana banjir bandang, bencana longsor, bencana kekeringan dan bahaya cuaca ekstrem.

4.4.2 Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam

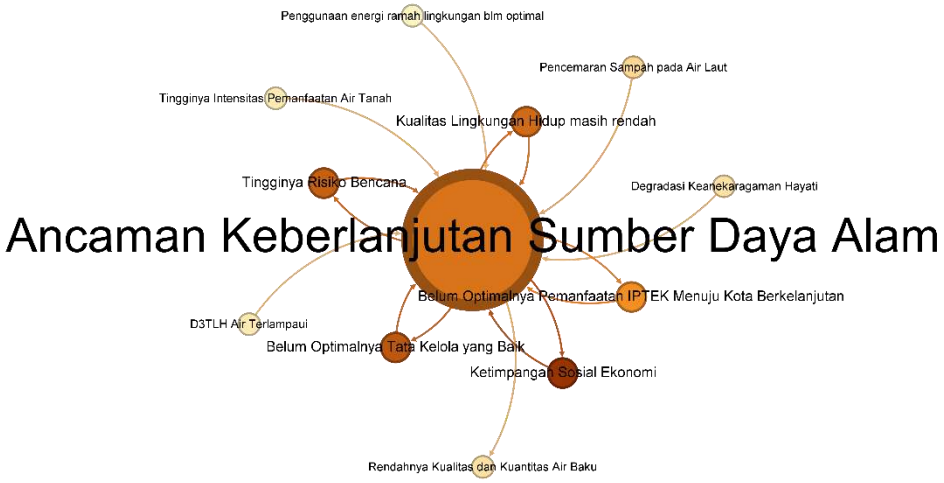

Gambar 4-29 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Isu paling strategis **Ancaman Keberlanjutan Sumber Daya Alam** terkait dengan 5 (lima) isu strategis lainnya. Kualitas lingkungan hidup yang rendah akibat pencemaran tentunya akan berdampak pada produktivitas dan kualitas sumber daya alam. Hal yang serupa juga terkait dengan tingginya risiko bencana. Bencana kekeringan, banjir dan land subsidence erat kaitannya dengan pola pemanfaatan sumber daya alam lahan, air dan keanekaragaman hayati. Berikut ini merupakan kerangka kajian isu Ancaman keberlanjutan SDA.

Tabel 4-12 Kerangka Kajian Isu Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Tujuan/ Deskripsi	Kriteria	Indikator
Mengkaji upaya Pemanfaatan dan Pengelolaan untuk mencapai keberlanjutan sumber daya alam	Ancaman Keberlanjutan Sumber Daya Air	Daya Dukung Air
		Infrastruktur Perkotaan (Penyediaan Air Bersih)
	Degradasi keanekaragaman Hayati	Kondisi kerusakan keanekaragaman hayati

ANCAMAN KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA AIR

Keberlanjutan sumber daya air di DKI Jakarta berada dalam posisi yang rentan. Hal ini ditunjukkan melalui analisis daya dukung dan daya tampung air yang telah dibahas sebelumnya. Kondisi sumber daya air terutama di wilayah daratan 98% wilayahnya berada pada status telah terlampaui. Sementara di Kepulauan Seribu, secara agregat ketersediaan air juga belum mampu mencukupi kebutuhan domestik.

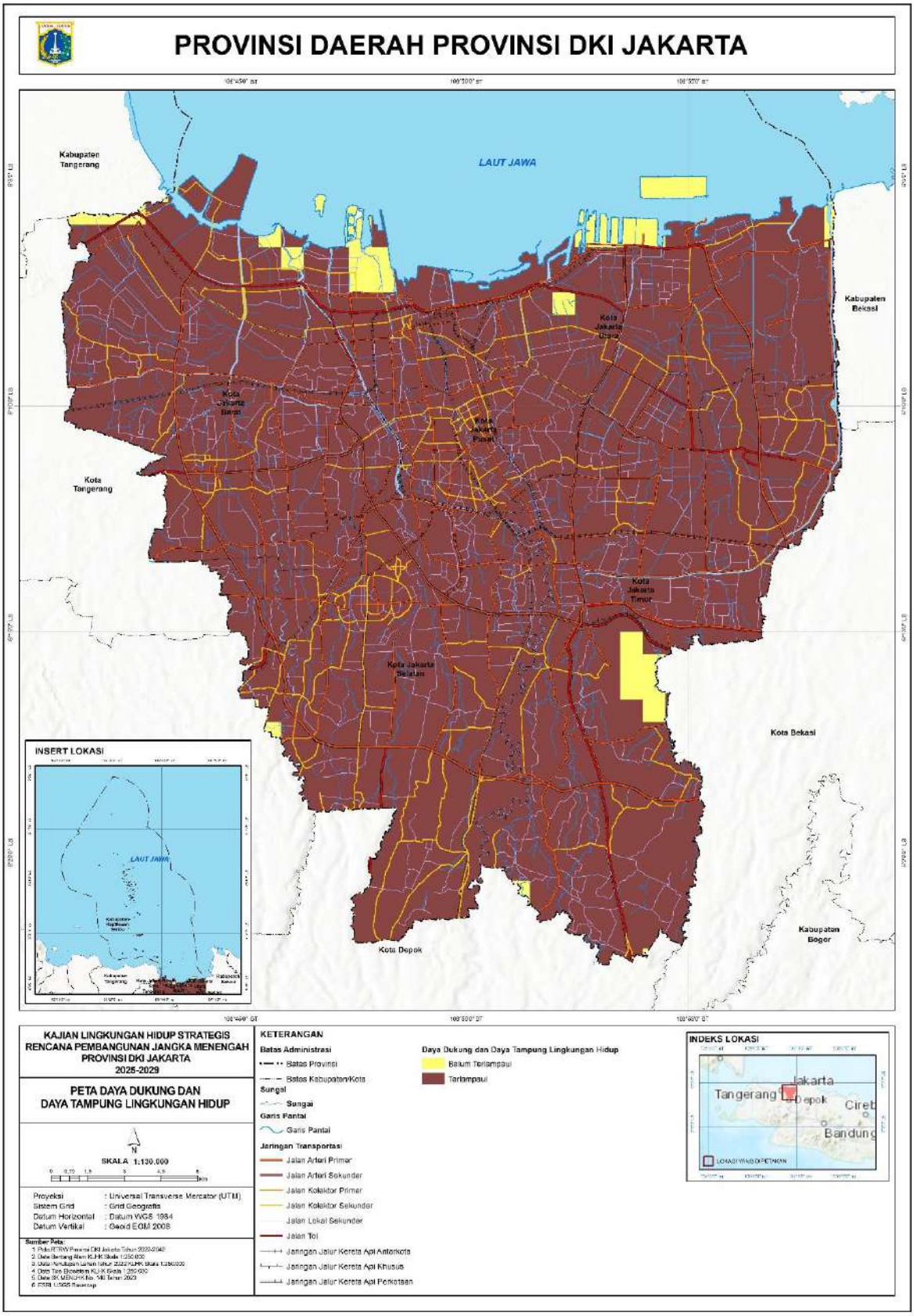

Gambar 4-30 Status Indikatif DDLH Penyedia Air Wilayah Daratan Provinsi DKI Jakarta 2023

Sumber: SK MENLHK No. 146 Tahun 2023

Ketersediaan air di DKI Jakarta didukung oleh wilayah lain. Sebanyak 81 persen air baku berasal dari Waduk Juanda Jatiluhur, 16 persen berasal dari pembelian air curah PDAM Kabupaten Tangerang, dan 3 persen berasal dari sungai-sungai di Jakarta[7]. Hal ini menandakan bahwa wilayah fungsional sangat berperan penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air di DKI Jakarta. Padahal, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah fungsional Jakarta didominasi oleh status terlampaui.

Kerentanan sumber daya air di Jakarta diperparah dengan kondisi eksisting pemanfaatan air perpipaan yang masih minim. Saat ini hanya sekitar 65% daerah teraliri jaringan perpipaan. Sementara itu pemanfaatan air tanah juga masih secara masif dilakukan. Berikut ini merupakan peta jaringan perpipaan di DKI Jakarta berdasarkan rencana struktur ruang Draft RTRW DKI Jakarta 2022-2042 per tanggal Mei 2022.

[7] https://kilasdaerah.kompas.com/dki-jakarta/read/2019/11/09/19110001/pemprov-dki-pastikan-ketersediaan-air-bersih-bagi-warga-jakarta-

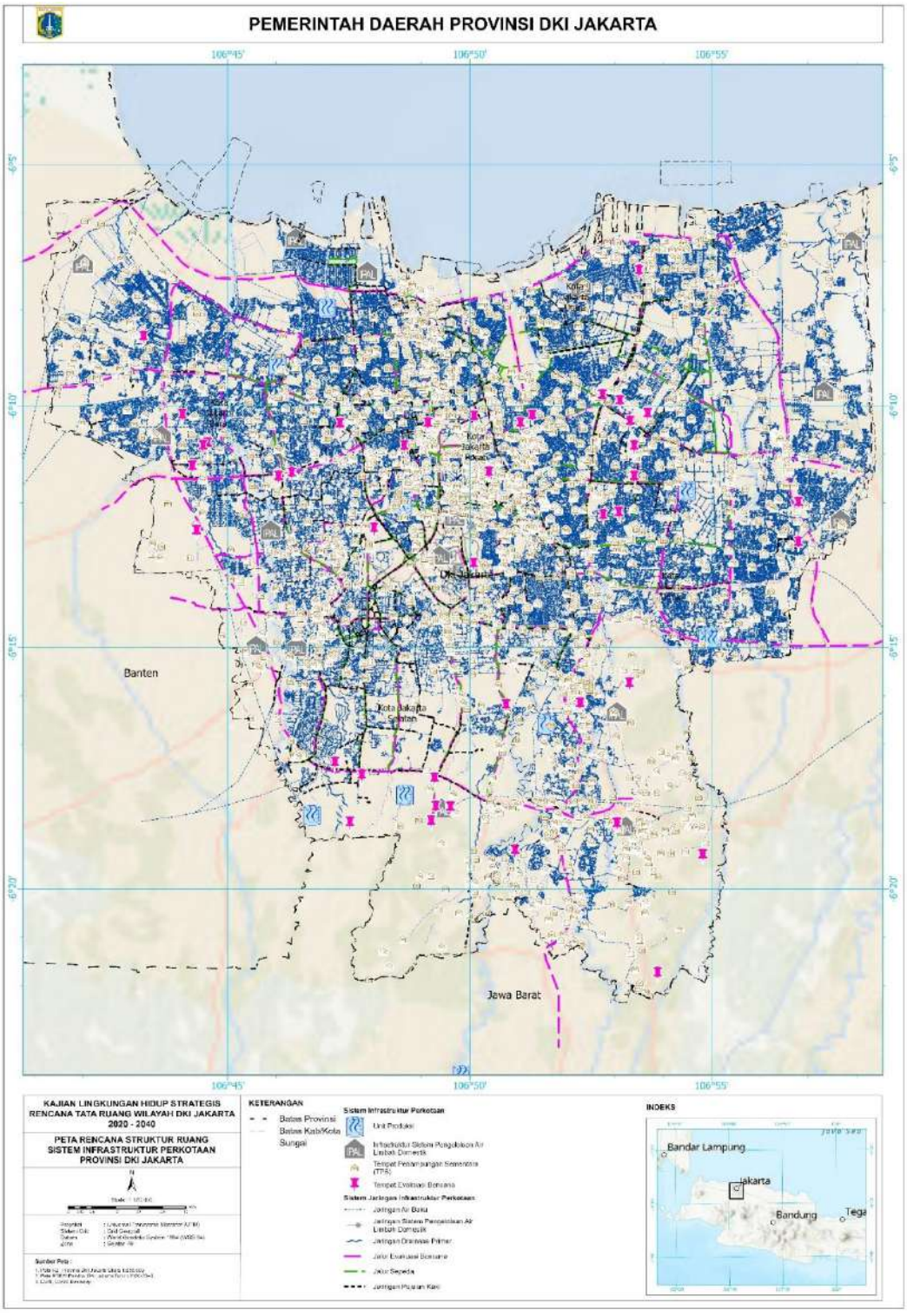

Gambar 4-31. Jaringan Perpiaan DKI Jakarta Berdasarkan Rencana Struktur Ruang
Sumber: Draft RTRW DKI Jakarta 2022-2042 per tanggal Mei 2022

Kondisi pemanfaatan air tanah saat ini DKI Jakarta hampir menyeluruh di DKI Jakarta meskipun jaringan perpipaan telah tersedia. Hal tersebut meningkatkan risiko terjadinya land subsidence di berbagai tempat khususnya di wilayah utara Jakarta. Serangkaian upaya dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya air tanah telah dilakukan salah satunya yaitu penetapan zona bebas air tanah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur N0. 93 tahun 2021.

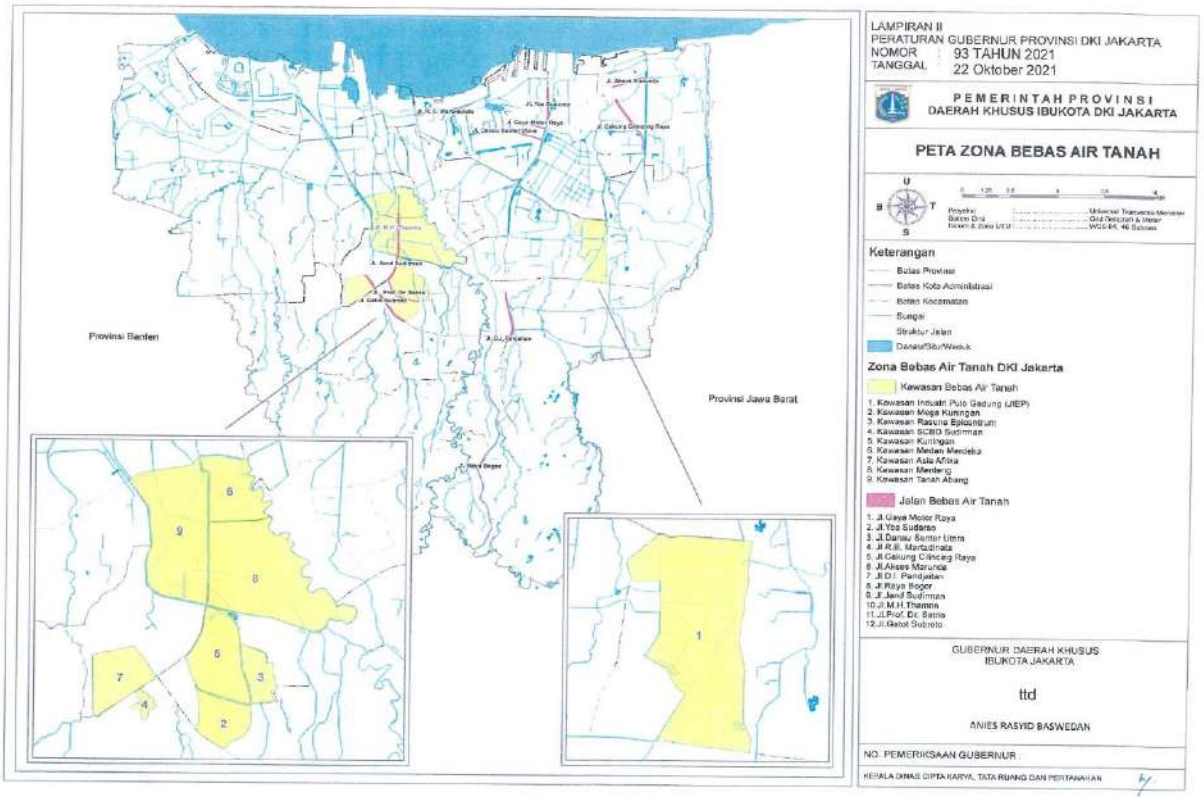

Gambar 4-32. Peta Zona Bebas Air Tanah
Sumber: Peraturan Gubernur 93/2021

Data lain bersumber dari Badan Geologi menunjukkan kondisi Cekungan Air Tanah DKI Jakarta mengalami kekritisan dan rusak. Sebagian besar wilayah Jakarta Utara mengalami perluasan dari kondisi Rawan menjadi Kritis dan wilayah yang Rusak relatif tetap. Kondisi Air Tanah yang rusak terjadi di Kecamatan Kalideres, Cilincing Cengkareng, Penjaringan, Grogol Petamburan, Tambora, Taman sari, Sawah Besar, Pademangan, Senen, Kemayoran Johar Baru, Cempaka Putih, Tanjung Priok, Cakung , Gambir dan Kelapa Gading.

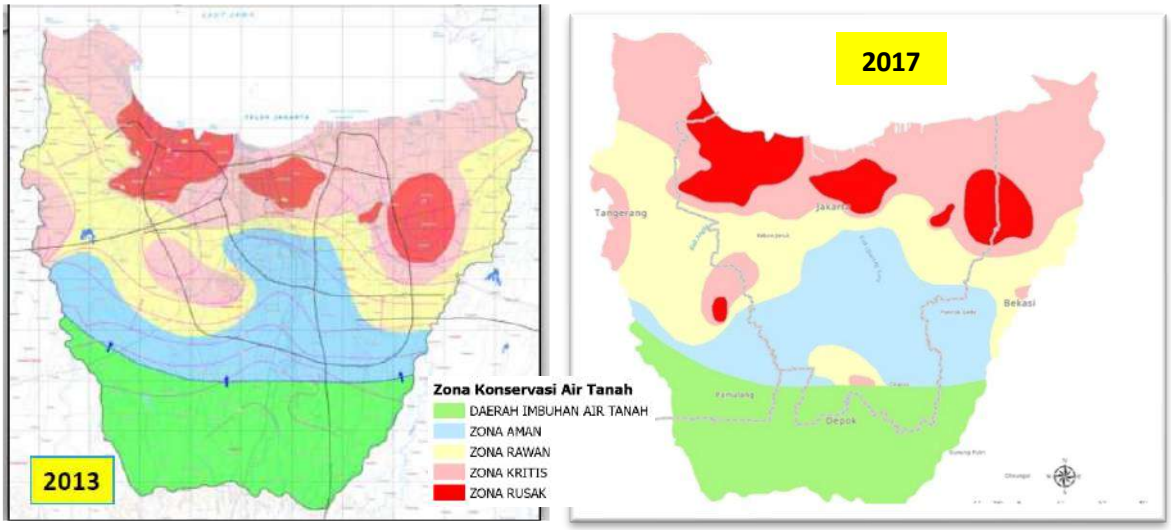

Gambar 4-33. Kondisi degradasi Air Tanah 2013 -2017 di CAT Jakarta
Sumber: BKAT

Tabel 4-13 Klasifikasi Zona Konservasi Air Tanah DKI Jakarta Tahun 2017

Zona	Keterangan	Penggunaan	Luas
DAERAH IMBUHAN AIR TANAH	Daerah imbuhan air tanah , dilarang melakukan kegiatan penggalian dan pengeboran air tanah, kecuali untuk keperluan pokok sehari-hari perorangan masih diizinkan.		32,004.16
ZONA AMAN	Zona ini ditandai oleh penurunan muka piezometrik <40% dari kedudukan awalnya, penggunaan air tanah	Air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari perorangan dan pertanian rakyat masing2 diizinkan dengan debit maksimum 100 m3/KK	28,955.77
ZONA KRITIS	zona ini ditandai oleh penurunan muka piezometrik 60-80% dari kedudukan muka piezometrik awal dan nilai dhl 1500-500 mikromhos/cm	Air tanah baru untuk berbagai keperluan selain kebutuhan pokok sehari-hari bagi perorangan dan pertanian rakyat tidak diizinkan. Untuk kebutuhan pokok maksimum 100 m3/bln/kk	38,468.74
ZONA RAWAN	zona ini ditandai oleh penurunan muka piezometrik 40-60% dari kedudukan muka piezometrik awal dan nilai dhl 1000-1500 mikromhos/cm	Air tanah untuk keperluan kebutuhan pokok sehari-hari bagi perorangan dan pertanian rakyat diizinkan dengan debit maksimum 100 m3/bulan/kk.	32,536.51
ZONA RUSAK	sub zona ini ditandai oleh penurunan muka piezometrik 80% dari kedudukan muka piezometrik awal dan nilai dhl >5000 mikromhos/cm, penurunan tanah lebih dari 100 cm/thn	Air tanah baru untuk pelbagai keperluan tidak diizinkan, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari bagi perorangan, debit pengambilan air tanah yang diizinkan <100 m3/bln/kk	13,950.94
TOTAL			**145,916.11**

Sumber: BKAT, ESDM 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada zona kritis dan zona rusak pada zona konservasi air tanah, disebutkan bahwa penggunaan air tanah di wilayah tersebut sudah tidak diizinkan untuk pemanfaatan baru dan dibatasi penggunaan air ≤100 m^3/bln/kk untuk keperluan sehari-hari. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada data zona konservasi air tanah antara tahun 2013 dan tahun 2017. Dapat dilihat pada Gambar 2-41 terjadi perubahan antara tahun 2013 dan 2017 dari zona aman menjadi zona rawan dan kritis, bahkan pada wilayah utara Jakarta pada tahun 2017 beberapa wilayah sudah masuk kedalam zona kritis dan rusak. Perubahan tersebut diindikasikan terjadi akibat perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan kondisi air tanah.

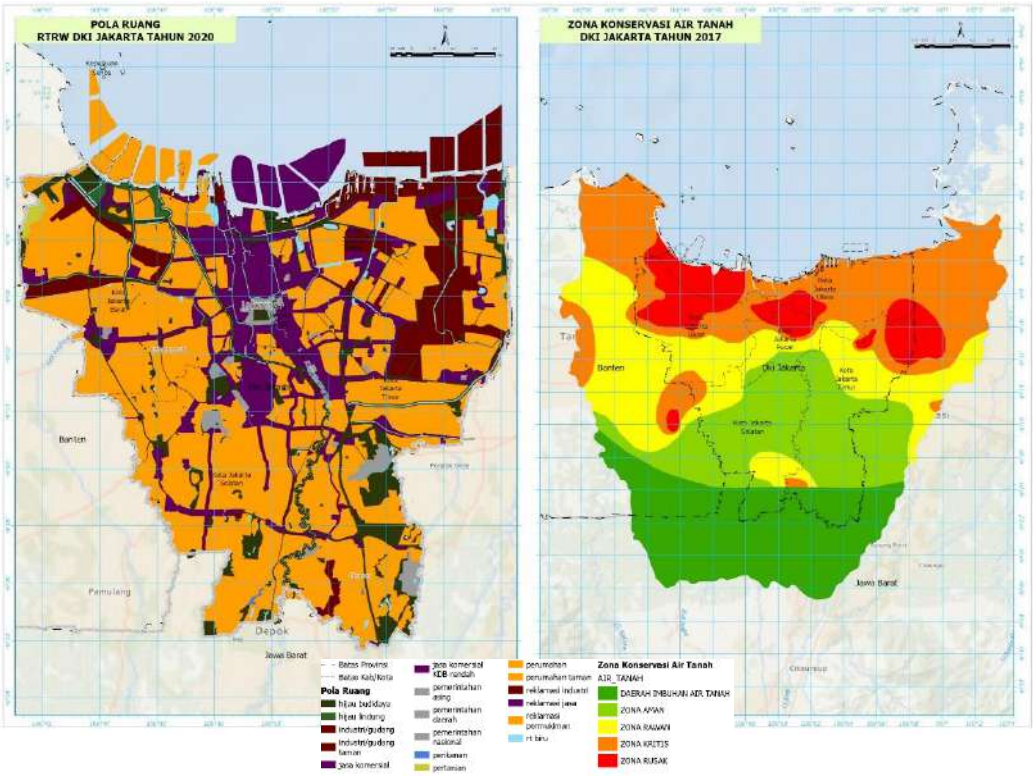

Gambar 4-34. Pola Ruang 2012 dan Kondisi Zona Konservasi Air Tanah 2017
Sumber: BKAT dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan peta di atas, menunjukkan bahwa rencana pola ruang di tahun 2012 memberikan dampak yang cukup signifikan terkait penurunan kondisi zona air tanah. Sebagian besar arahan ruang yang berdampak pada kondisi air tanah baik terhadap zona kritis dan zona rusak adalah **kawasan permukiman.** Arahan permukiman yang memberikan dampak pada penurunan kondisi zona konservasi air ke arah rusak memiliki luasan sebesar 5,584.24 Ha, sedangkan arahan kawasan permukiman yang memberikan dampak terhadap penurunan kondisi zona konservasi air tanah ke arah kritis memiliki luasan sebesar 6,795.09 Ha. Dengan kondisi seperti ini, pengembangan kawasan permukiman yang direncanakan diasumsikan masih memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan domestik masyarakat. Dengan asumsi penggunaan air tanah pada kawasan permukiman berdasarkan arahan rencana pola ruang tahun 2012, zona konservasi air tanah antara tahun 2013-2017 (4 tahun) berubah cukup signifikan terutama pada zona aman menjadi rawan atau kritis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam waktu 4 tahun dengan penggunaan air tanah dapat memberikan perubahan yang cukup signifikan.

Permasalahan land subsidence dan intrusi air laut sangat terkait erat dengan pola konsumsi masyarakat serta kemampuan pemerintah dalam penyediaan air bersih. Hingga saat ini penyediaan air jaringan perpipaan di DKI Jakarta masih rendah. Berdasarkan Kementerian PUPR (2020), rumah tangga pengguna SPAM bukan jaringan perpipaan di DKI Jakarta pada tahun 2019 mencapai 56,6% dimana salah satu sumber paling banyak dimanfaatkan adalah melalui penggunaan sumur yang memanfaatkan kapasitas air tanah. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta, penggunaan air tanah di pada Januari-September tahun 2019 telah mencapai 6.693.949 m3 (DIKPLHD, 2021). Sementara itu, Kementerian ESDM mengeluarkan peta zona konservasi Air Tanah CAT Jakarta sebagaimana gambar berikut ini:

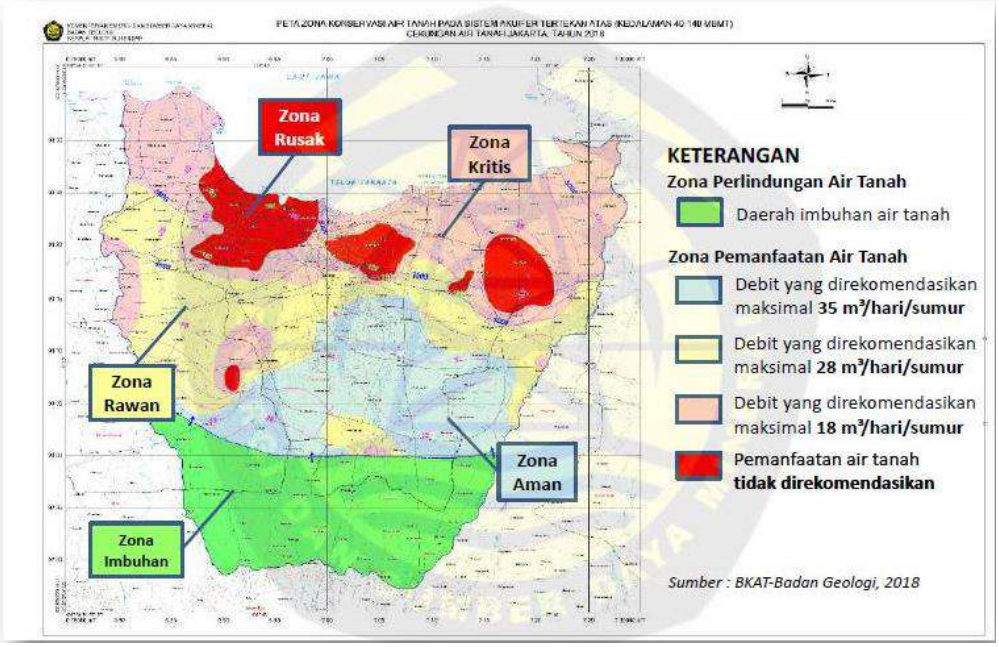

Gambar 4-35. Zona Konservasi Air Tanah

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa di zona kritis tidak direkomendasikan lagi adanya pengambilan air tanah. Sebagai konsekuensi adalah penyediaan air minum jaringan perpipaan sudah menjadi suatu keharusan dan melakukan pembatasan pengambilan air tanah.

Pada tahun 2014, Dinas Perindustrian dan Energi melakukan pemetaan terhadap Muka Air Tanah Akuifer 0 – 40 DKI Jakarta. Hasil pemetaan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini yang menunjukkan bahwa wilayah Jakarta bagian utara mengalami penurunan air tanah sehingga membentuk kerucut penurunan 5 – 10 meter di bawah permukaan air laut. Kondisi penurunan air tanah ini menyebabkan terjadinya masalah intrusi air laut. Makin ke selatan kondisi penurunan muka air tanah makin baik.

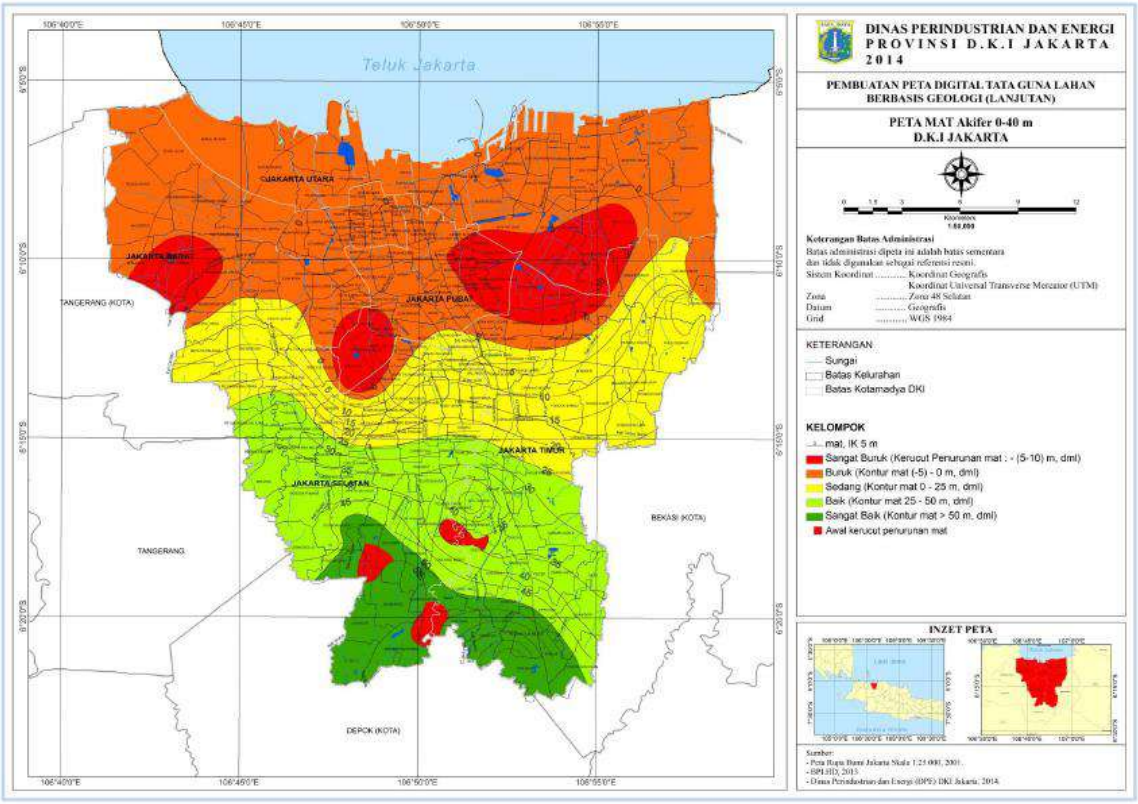

Gambar 4-36. Kondisi Muka Air Tanah (MAT) Akifer 0 – 40 m DKI Jakarta

Penyebab penurunan muka tanah dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Whittaker dan Reddish, 1989, diambil dari Yuwono dkk, 2013, penurunan muka tanah dapat disebabkan oleh:

- Penurunan muka tanah alami karena berlangsungnya proses geologi
- Penurunan muka tanah yang disebabkan pengambilan bahan cair dalam tanah seperti air tanah atau minyak bumi
- Penurunan muka tanah yang disebabkan oleh adanya beban-beban berat di atasnya seperti struktur bangunan
- Penurunan muka tanah akibat pengambilan bahan padat dari tanah misal aktivitas penambangan atau pembuatan konstruksi bawah tanah

Permasalahan penurunan muka tanah di DKI Jakarta tersebut juga dipengaruhi oleh karakteristik ekoregion terutama dikaitkan dengan kondisi N – SPT tanah atau ukuran konsistensi atau *density* tanah. Data dari Dinas Pertambangan dan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta menunjukkan N – SPT di wilayah DKI yang relatif rendah karena batuannya terbentuk karena sedimentasi dan masih muda. Hal ini menyebabkan sifat muka tanah yang lunak dan mudah dipengaruhi oleh beban. Gambar sebaran N – SPT di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Gambar 4-37. Sebaran Klasifikasi Tanah berdasarkan N – SPT

Gambar tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah DKI Jakarta terutama di bagian utara merupakan *soft soil* dengan N – SPT < 15. Kondisi N-SPT ini menyebabkan tanah sangat peka terhadap beban.

Permasalahan intrusi air laut pada air tanah dapat diidentifikasi dengan mengukur DHL (Daya Hantar Listrik). Air yang banyak mengandung garam akan mempunyai DHL tinggi. Pengukurannya dengan alat ***Electric Conductivity Meter*** (EC Meter), yang satuannya adalah mikromhos/cm atau µmhos/cm atau µsiemens/cm sering ditulis µS/cm. Air tanah pada umumnya mempunyai harga 100 – 5000 µmhos. Besaran DHL dapat dikonversikan menjadi jumlah garam terlarut (mg/l), yaitu: 10 m^3 µmhos/cm = 640 mg garam/l atau 1 mg/l = 1,56 ***m***mhos/cm (1,56 µS/cm). Dengan menggunakan klasifikasi Davis dan DeWiest, kualitas air dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4-14 Klasifikasi Air Berdasarkan Jumlah Garam Terlarut

Jumlah garam terlarut (mg/l)	Macam Air
< 1000	Tawar
1000 – 10.000	Payau (brackish)
10.000 – 100.000	Cukup asin (moderate saline)
> 100.000	Asin sekali (briny)

Sumber: Davis dan DeWiest, 1966

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Energi mengklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu Daerah Aman (DHL < 1000µS/cm), Daerah Rawan (DHL 1000 – 1500µS/cm) dan Daerah Kritis (DHL > 1500µS/cm). Daerah kritis berdasarkan klasifikasi di atas sudah termasuk air payau (brackish) yang berarti telah terjadi intrusi air laut. Gambar 2.6. menunjukkan hasil pemetaan kondisi kualitas air tanah berdasarkan DHL pada kedalaman 0-40 m dan 40 – 300 m.

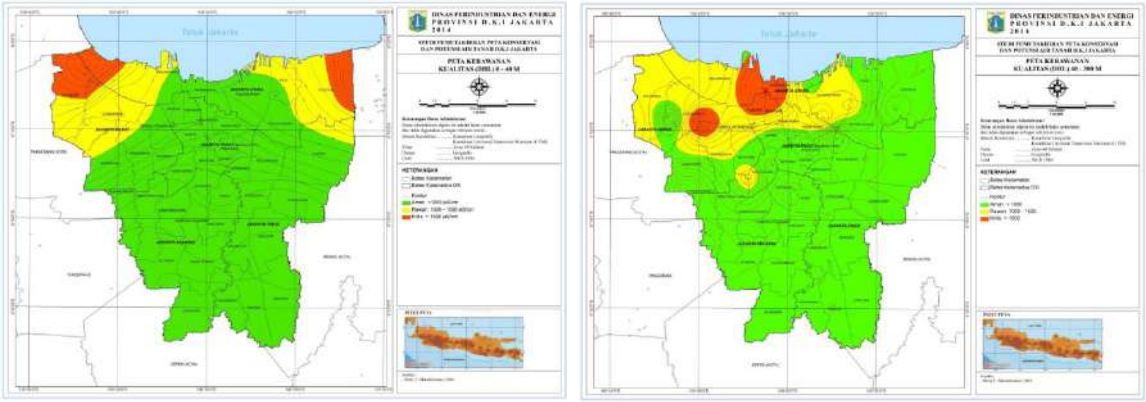

Gambar 4-38. Peta Kerawanan Kualitas Air Tanah Berdasarkan DHL pada Akuifer 0 – 40 m dan 40 – 300 m

Infrastruktur Perkotaan

Berdasarkan RTRW DKI Jakarta Tahun 2022 – 2042, jaringan air baku DKI Jakarta digambarkan pada peta di bawah.

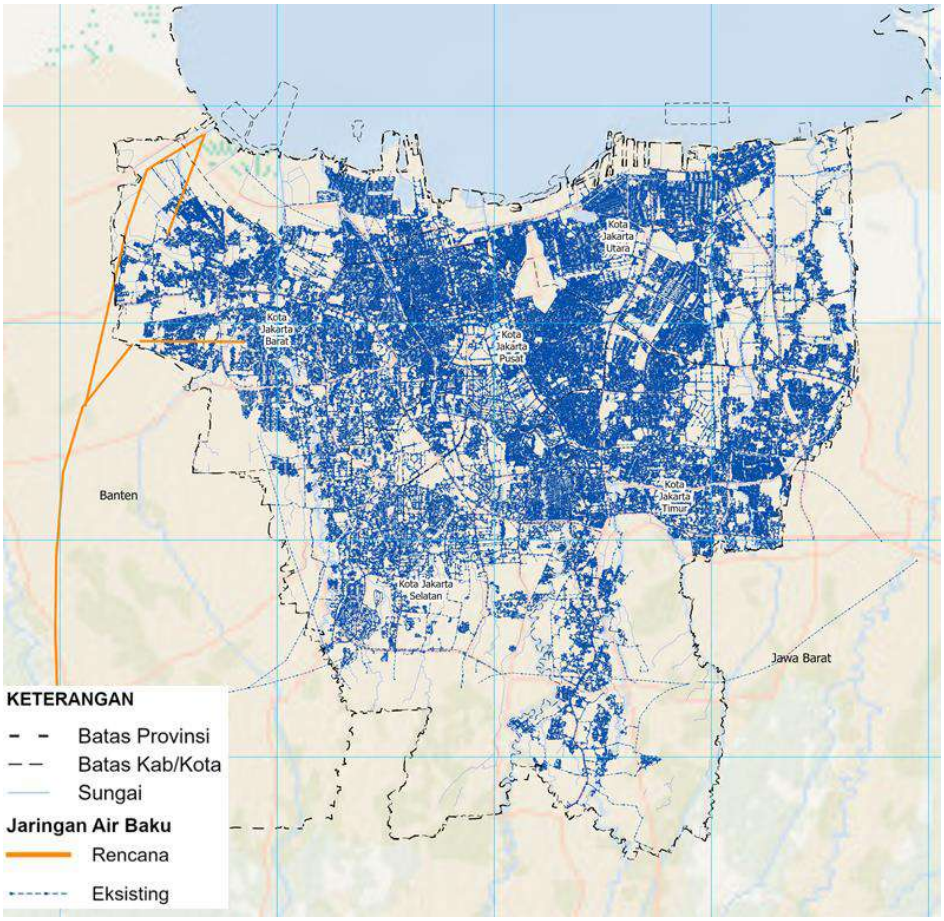

Gambar 4-39. Kondisi Jaringan Air Baku DKI Jakarta Berdasarkan Rencana Struktur Ruang
Sumber: RTRW DKI Jakarta Tahun 2022-2042

DEGRADASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Keanekaragaman hayati di DKI Jakarta sebagian besar merupakan berada pada Ekosistem Pesisir. Ekosistem tersebut sebagian besar menjadi bagian dari Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) yang terletak kurang lebih 45 km dari daratan utama Provinsi DKI Jakarta dengan koordinat 5°23' - 5°40' LS, 106°25' - 106°37' BT sebelah Utara Jakarta. Secara administratif kawasan TNKpS berada dalam wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terdiri dari wilayah perairan laut seluas 107.489.ha (22,65% dari luas perairan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu).

Ekosistem wilayah pesisir termasuk pulau-pulau kecil terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun.

a. Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove di wilayah DKI Jakarta terdapat di wilayah pesisir Teluk Jakarta dan di wilayah Kepulauan Seribu. Saat ini sebaran ekosistem mangrove di DKI Jakarta hanya menyisakan sedikit hutan mangrove primer dan sebagian besar merupakan hutan mangrove sekunder hasil kegiatan rehabilitasi.

Dari Tabel Sebaran Mangrove di DKI Jakarta Tahun 2019 dan 2021 dapat diketahui bahwa telah terjadi degradasi terhadap luasan Mangrove dan/atau persentase tutupan mangrove. Secara umum, penurunan luasan mangrove terjadi di wilayah pulau-pulau di Kepulauan Seribu, sementara hutan mangrove di wilayah pesisir daratan memiliki luasan yang tetap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun intensitas kegiatan lebih tinggi di wilayah daratan, penerapan pengendalian pemanfaatan ruang lebih dilakukan. Sementara, degradasi mangrove ditinjau dari kerapatannya terjadi di SM Pulau Rambut dan SM Muara Angke. Menurut Onrizal (2005) ada tiga faktor utama penyebab kerusakan mangrove, yaitu (1) pencemaran, (2) konversi hutan mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan dan (3) penebangan yang berlebihan.

Tabel 4-15 Kondisi Tutupan Mangrove

Lokasi	Wilayah Administrasi	Tahun 2019			Tahun 2021		
		Luas (ha)	Persentase Tutupan (%)	Kerapatan (Pohon/ Ha)	Luas (ha)	Persentase Tutupan (%)	Kerapatan (Pohon/Ha)
CA Pulau Bokor	Kel. Pulau Pari, Kel. Pulau Seribu Selatan, Kab. Adm. Kep. Seribu	18	92,41	-	0,5 ↓	100 ↑	-
SM Pulau Rambut	Kel. Pulau Untung Jawa, Kee. Pulau Seribu Selatan, Kab. Adm. Kep. Seribu	90	90,78	-	22,7 ↓	76,56 ↓	822
SM Muara Angke	Kel. Kapuk Muara, Kee. Penjaringan, Kata Adm Jakarta Utara	25,02	70,18	-	25,02	43,72 ↓	-
TWA Angke Kapuk	Kel. Kamal Muara, Kee. Penjaringan, Kata Adm Jakarta Utara	99,82	41,85	-	99,82	46,46 ↑	978
Hutan Lindung Angke Kapuk	Kel. Kamal Muara, Kee. Penjaringan, Kata Adm Jakarta Utara	44,76	52,8	-	44,76	79,56 ↑	440
TN Kepulauan Seribu		**51,85**	**-**	**-**	**42,73** ↓	**100**	**3000**

Keterangan: (-) = tidak dilakukan pengukuran

Sumber: Balai Konservasi SDA Provinsi DKI Jakarta dan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta diambil dari DIKPLHD DKI Jakarta tahun 2019 dan 2021.

b. Ekosistem Padang Lamun

Kawasan atau ekosistem padang lamun umumnya berada di daerah pesisir pantai dengan kedalaman kurang dari 5 m saat pasang, kawasan ini biasanya terletak di antara ekosistem mangrove dan terumbu karang atau terletak di dekat pantai berpasir dan hutan pantai (Rahmawati, et.al.,2014). Dalam ekosistemnya, padang lamun memiliki fungsi sebagai media filtrasi perairan laut dangkal, tempat tinggal dan tempat mencari makan berbagai biota laut, hingga berperan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hingga saat ini, di luasan padang lamun di DKI Jakarta mencapai 533,96 Ha yang banyak tersebar di Kepulauan Seribu. Terdapat 10 segmentasi padang lamun yang tersebar sebagai zona perlindungan bahari, zona inti, ataupun zona pemanfaatan wisata. Segmen 3 yang terdiri atas Pulau Macan Besar, Macan Kecil, Macan Gundul, Putri Barat dan Putri Timur memiliki persentase luasan padang lamun paling tinggi, yaitu 48%.

Kondisi tutupan lamun yang terdapat di perairan Teluk Jakarta adalah dari jarang hingga rapat. Kondisi padang lamun dengan kerapatan tinggi terdapat di Pulau Genteng Besar, P.Kelapa dan P.Panggang. Adapun kondisi kerapatan lamun dari jarang hingga sedang terdapat di P.Jukung, P.Putri, P.Sepa, P.Bira Besar, P.Kotok Besar, P.Harapan, P.Tidung Kecil dan P.Pari.

Dari hasil pengamatan, terdapat 12 pulau yang tidak memiliki lamun yaitu Pulau Panjang Besar, Panjang Kecil, Karang Baronang, Bulat, Kayu Angin Bira, Kayu Angin Genteng, Macan Kecil, Macan Besar, Kayu Angin Putri, Kayu Angin Melintang, Karang, Dua Timur dan Sebira. Pulau Pamegaran dan Papatheo memiliki nilai tutupan lamun yang paling tinggi dan termasuk ke dalam kategori kaya dan padat. Jenis-jenis lamun yang ditemukan ada 6 jenis yaitu: Cr = Cymodoceae rotundata; Cs = Cymodoceae serrulata; Ea = Enhalus acoroides; Th = Thalassia hemprichii; Ho = Halophila ovalis; dan Hu = Halodule uninervis.

Data secara lengkap terkait dengan Kondisi ekosistem Padang Lamun belum tersedia, namun untuk menunjukkan masih terdapatnya isu degradasi ekosistem lamun digunakan data dari dokumen DIKLH DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020. Data tahun 2021 hanya menunjukkan sebaran luasan mangrove di wilayah kecamatan Kepulauan Seribu Utara tepatnya di Kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu..

Tabel 4-16 Luas dan Kerusakan Padang Lamun

Zona	Lokasi	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Luas	**% Area Kerusakan**	**Luas (ha)**	**% Area Kerusakan**
Inti	Penjaliran Timur	-	-	1,83	2
	Peteloran Timur	-	-	0,19	0
Pemanfaatan Wisata I	Bira Besar	-	20,86	12,9	16,2
	Bira Kecil	-	11,7	0,87	6,06
	Genteng Besar	-	8	11,09	3,6
	Jukung	-	0	1,75	19,33
	Kelor Timur	-	0	0,46	0
	Kuburan Cina	-	0	1,11	4
	Melintang Besar	-	12,58	7,16	5,13
	Nyamplung	-	0	0,83	0
	Putri Barat	-	22	9,81	2
	Semut Kecil	-	31,08	6,31	26,93
Pemanfaatan Wisata II	Pamegaran	-	18,96	42,41	11,8
Perlindungan Bahari	Dua Barat	-	0	0,43	0
	Dua Timur	-	0	1,12	1,3
	Jagung	-	0	0,97	17

Keterangan = (-) tidak dilakukan pengukuran

Sumber: Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta; Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Data di atas belum menunjukkan kondisi keseluruhan sebaran padang lamun yang dilaporkan memiliki luas 533,96 ha dimana 164,99 termasuk dalam TN Kepulauan Seribu. Berdasarkan DIKPLHD 2021, sebanyak 44 pulau di Kepulauan Seribu memiliki ekosistem padang lamun, namun belum seluruhnya dilakukan pendataan kerusakannya. Berdasarkan data di atas, kerusakan padang lamun cenderung menurun dari tahun 2019 – 2021, kecuali di Jukung dan Kuburan Cina yang termasuk dalam zona Pemanfaatan I. Diperkirakan kerusakan padang lamun ini disebabkan karena pencemaran dan/atau aktivitas manusia seperti pariwisata yang tidak dikendalikan.

b. Ekosistem Terumbu Karang

Ekosistem Terumbu Karang di Teluk Jakarta terdapat di hampir semua paparan pulau *(Island Shell)* di Kepulauan Seribu, dengan kondisi rusak sampai sedang (Bapedalda, 2001). Kondisi yang masih baik terdapat di P. Kayu Angin Bira dan P. Melintang. Berdasarkan pengamatan selama kurun waktu 22 tahun, tercatat sebanyak 68 genera dan sub-genera dengan 134 spesies terumbu yang ada di Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Teluk Jakarta. Luas terumbu karang di Kepulauan Seribu, khususnya P.Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara mencapai 1.130,5 ha (Ruyani, 2003). Melihat luas terumbu karang d lokasi ini, maka potensi yang dimiliki cukup besar. Akan tetapi kondisinya secara umum dapat dikategorikan dalam kondisi rusak dan sedang. Persentase penutupan karang hidupnya hanya berkisar antara 0-25% dan 25-49,9%, selebihnya didominasi oleh unsur abiotik seperti pasir, pecahan karang, karang mati, dan lainnya.

Hasil studi oleh Suharsono (1995) menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara penutupan karang dengan jarak antara lokasi karang dengan daratan utama (*mainland*), yaitu semakin menjauhi daratan utama maka makin tinggi persentase penutupan karang hidup. Hal ini mengingat ada 13 sungai sumber pencemar dan sumber sedimen dari daratan yang bermuara ke perairan Teluk Jakarta hingga mempengaruhi kualitas perairan dan biota terumbu karang.

Berdasarkan hasil pengamatan di 56 pulau di Kepulauan Seribu menunjukkan bahwa terdapat dua pulau yang memiliki terumbu karang dengan kategori baik yaitu Pulau Macan Besar dan Bunder, Sebanyak 27 pulau dikategorikan kedalam kategori cukup baik dan sisanya sebanyak 27 pulau dikategorikan kedalam kategori kurang baik. Persentase tutupan substrat dasar perairan ekosistem terumbu karang di Kepulauan Seribu adalah sebagai berikut.

Tabel 4-17 Kondisi Tutupan Ekosistem Terumbu Karang

Nama Pulau	% Persentase Tutupan					Kategori
	Karang Hidup	Karang Mati	Abiotik	Alga	Biota lainnya	
Macan Besar	61,82	16,69	18,83	0,6	2,07	Baik
Bunder	51,56	3,81	20	19,51	5,1	Baik
Panjang Besar	30,28	1,47	58,93	8,07	1,25	Cukup Baik
Bira Besar	34,57	2,69	5895	1,03	2,75	Cukup Baik
Kayu Angin Bira	28,8	89,3	56,2	0,27	5,8	Cukup Baik
Kayu Angin Genteng	22,35	12 34	40,76	17,41	7,14	Cukup Baik
Genteng Kecil	28,71	2,11	65,78	2,65	0,75	Cukup Baik
Genteng Besar	28,08	7,82	61,18	1,77	1,16	Cukup Baik
Macan Kecil	36,12	7,62	56,12	-	0,14	Cukup Baik
Tongkeng	35,22	193	52,97	6,94	2,94	Cukup Baik
Melintang Kecil	30,97	22,3	36,32	8,14	2,27	Cukup Baik
Sepa Timur	46,2	1,33	42,73	0,87	8,87	Cukup Baik
Sepa Barat	28,97	0,14	64,69	3,89	2,32	Cukup Baik
Pelangi	42,11	25 22	30,35	0,34	1,98	Cukup Baik
Jukung	28,19	1,7	32,11	33,68	4,32	Cukup Baik

Nama Pulau	% Persentase Tutupan					Kategori
	Karang Hidup	Karang Mati	Abiotik	Alga	Biota lainnya	
Melinjo	28,97	26,3	36,32	2,67	5,67	Cukup Baik
Semut Kecil	36,83	2,25	50,63	6,74	3,54	Cukup Baik
KelorTimur	42,47	5,8	47,27	2,93	1,53	Cukup Baik
Yu Barat	34,25	17,82	21,7	22,83	34	Cukup Baik
Yu Timur	39,33	45 73	3,87	4,67	6,27	Cukup Baik
Karang	37,33	25,93	28,2	6,67	1,87	Cukup Baik
Pantara Barat	27,4	7,47	41	23,27	0,87	Cukup Baik
Pantara Timur	27,59	27,12	32,46	11,22	1,6	Cukup Baik
Kapas	45,22	19,51	21,98	11,96	1,14	Cukup Baik
Jagung	26,03	46,19	21,03	6,74	0	Cukup Baik
Pateloran Barat	39 43	17,28	34,16	8,54	6	Cukup Baik
Penjaliran Barat	36,41	22,95	29,27	7,24	4,03	Cukup Baik
PenjaliranTimur	42,6	0	40,47	8,27	2,67	Cukup Baik
Sebira	36,05	1142	30,57	15,95	6,01	Cukup Baik
Perak	11,8	19	50,4	18,2	0,6	Kurang baik
Dua Barat	24,47	18,87	55,93	0,27	0,47	Kurang baik
Panjang Kecil	19,93	24,44	40,85	7,91	6,86	Kurang baik
Pamagaran	14,39	-	75,92	0,41	3,27	Kurang baik
Karang Baronang	16,56	7,54	28,5	36,05	11,35	Kurang baik
Bulat	6,88	0,07	85,3	6,74	1,02	Kurang baik
Bira Kecil	23,3	24,55	50	-	2,16	Kurang baik
Kuburan Cina	2,59	2,38	80,07	14,15	0,82	Kurang baik
Putri Timur	6,8	19,4	66,13	6,47	1,2	Kurang baik
Kayu Angin Melintang	10,2	2, 13	73,13	14,07	0,47	Kurang baik
Cina	6,6	0,61	56,16	35,87	0,75	Kurang baik
Semut Besar	2,61	14,91	53,14	25,27	4,08	Kurang baik
Kelor Barat	12,73	17,8	29,53	38,53	1,4	Kurang baik
Satu	7,65	-	58,5	30,2	3,66	Kurang baik
Lipan	20,33	3,87	40,53	33,27	2	Kurang baik
Sebaru Kecil	50,6	2,87	31,27	2,27	13	Kurang baik
Nyamptung	21,85	42,63	22,46	12,25	0,81	Kurang baik
Sebaru Besar	10,6	27	56,93	5,07	0,4	Kurang baik
Rengat	8,71	15,4	62,32	12,02	1,55	Kurang baik
PateloranTimur	5,67	2,33	45,5	44,7	1,8	Kurang baik
Macan Gundul	4	1,27	92,8	1,2	0,73	Kurang baik
Putri Barat	24,22	10,14	63,38	2	0,27	Kurang baik
Kayu Angin Putri	2,14	0,27	64,42	33,04	0,13	Kurang baik
Panjang	27,5	25,14	44,43	1,38	1,55	Kurang baik
Melintang Besar	10,41	33,56	54,9	0	1,13	Kurang baik
Papatheo	8,16	0,68	89,93	0,41	0,82	Kurang baik
Dua Timur	17,82	28,17	52,47	1,54	0	Kurang baik
Rata- rata	**24,96**	**57,19**	**85,19**	**43,55**	**3,33**	

Sumber: Buku Saku Kelautan 2020

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa lokasi terumbu karang tersebar di 56 pulau di Kepulauan Seribu. Namun demikian, dari ke 56 pulau tersebut, hanya di 2 (dua) terumbu karang dalam kondisi yang Baik. Terumbu Karang di masing-masing 17 pulau dalam Kondisi Cukup Baik dan Kurang Baik. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi ekosistem terumbu karang.

Dari data dan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa ekosistem pesisir berupa Mangrove, padang lamun dan terumbu karang masih terdapat di wilayah DKI Jakarta terutama di wilayah pesisir Kabupaten kepulauan Seribu. Namun demikian, data juga menunjukkan bahwa kondisi ekosistem wilayah pesisir mengalami degradasi. Upaya perbaikan dan pengendalian kerusakan yang dilakukan belum sebesar kerusakan yang terjadi setiap tahunnya. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kerusakan ekosistem pesisir ini dapat dikarenakan adanya pencemaran perairan, dan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali termasuk alih fungsi lahan. Pengendalian kegiatan di pesisir, perairan dan pulau-pulau seperti kegiatan permukiman, pariwisata maupun kegiatan ekonomi lainnya perlu dilakukan agar ekosistem pesisir dapat terjaga.

Kerusakan ekosistem pesisir akan sangat mempengaruhi keanekaragaman hayati biota laut. Sebagai suatu ekosistem yang khas wilayah pesisir, hutan mangrove memiliki fungsi ekologis penting terhadap siklus ekologi laut sebagai dasar dari rantai makanan yang kompleks, tempat memijah, tempat asuh bagi larva berbagai biota, menyaring polusi, menjaga kestabilan dari substrat mangrove dan menjaga pantai dari erosi (Riley, 2001). Selain berfungsi sebagai penyaring bahan nutrien dan penghasil bahan organik, mangrove juga berfungsi sebagai daerah penyangga antara daratan dan lautan dan penstabil bagi habitat satwa liar serta sebagai sumber produk perikanan dan sumber fotosintesis yang besar. Perairan mangrove merupakan daerah asuhan berbagai jenis ikan dan udang. Bagi manusia, manfaat langsung yang dapat dirasakan sebagai penghasil kayu, bahan obat-obatan, dan hasil-hasil hutan lainnya. Demikian pula ekosistem Padang Lamun dan Terumbu Karang berperan penting dalam mempertahankan keberlangsungan sector perikanan maupun keanekaragaman hayati.

Selain keanekaragaman hayati. sumber daya alam pesisir mencakup sumber daya air dan lahan. Degradasi sumber daya alam pesisir termasuk menjadi isu strategis antara lain ditunjukkan dari ekoregion dan status daya dukung sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya. Empat pesisir yaitu kecamatan Koja, Penjaringan, Tanjung Priok dan Cilincing berdasarkan karakteristiknya termasuk dalam ekoregion Dataran Fluvial yaitu dataran yang terbentuk karena proses sedimentasi dari sungai dan dataran Fluvio-marin yaitu Dataran ini terbentuk oleh gabungan proses fluvial dan marin, seperti delta sungai atau dataran estuarin lain dimana terbentuknya dipengaruhi oleh dua jenis proses geomorfik, yaitu aliran sungai dan arus/gelombang laut.. Pengaruh proses marin pasang-surut masih dapat dirasakan, namun jika pertumbuhan garis pantai (akresi) relatif cepat, maka pengaruh pasang-surut semakin kecil. Dengan karakter tersebut, dataran fluvial dan fluvio-marin biasanya memiliki tanah gembur dan agar subur, Rentan terhadap genangan, banjir dan rob, sesuai untuk pengembangan budidaya tambak atau pertanian sawah dan sering kali dilakukan penimbunan dan rentan terhadap konversi lahan. Proses pembentukan daratan di Wilayah DKI Jakarta ini dapat terjadi karena wilayah ini merupakan muara dari banyak sungai dan pengaruh dari arus/gelombang laut. Di bagian utara DKI Jakarta terbangun oleh material aluvium dan mampu membentuk akuifer yang potensial. Namun demikian, Kawasan ini memiliki beberapa keterbatasan pengembangan antara lain sangat dimungkinkan terjadinya intrusi air laut, perluasan daratan karena sedimentasi yang berlangsung terus menerus, adanya kecenderungan tergenang karena tanah berlempung yang sulit menyerap air.

Secara umum, kondisi daya dukung daya tampung di bagian Utara (wilayah pesisir) DKI Jakarta memiliki kondisi jasa lingkungan yang lebih rendah dibanding wilayah bagian Selatan. Secara rinci, wilayah pesisir DKI Jakarta memiliki

- kondisi jasa lingkungan penyedia Air rendah dan beberapa titik sangat rendah
- Kondisi jasa pengaturan air rendah dan beberapa titik sangat rendah
- Kondisi jasa pengaturan udara sebagian besar sangat rendah, beberapa titik sedang

- Kondisi mitigasi banjir sebagian besar sangat rendah dan beberapa titik sedang

Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat rentan untuk terdegradasi maupun rentan bencana.

Degradasi sumber daya alam pesisir dapat ditunjukkan antara lain oleh gambaran tentang pencemaran perairan, abrasi dan sedimentasi, land subsidence, dan intrusi air laut.

4.4.3 Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah

Gambar 4-40 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah

Kualitas lingkungan hidup di DKI Jakarta menjadi perhatian yang penting. Intensitas pemanfaatan ruang dan kepadatan penduduk yang tinggi ditambahkan aktivitas komuter menjadikan tingginya beban pencemar. Kondisi ini kemudian mengakibatkan kualitas lingkungan hidup yang rendah. Kualitas lingkungan hidup berpengaruh dengan aspek kehidupan lainnya seperti sosial dan ekonomi. Apalagi, impian Kota Jakarta menjadi salah satu 10 besar *global city* turut mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan *livability* dimana kualitas hidup menjadi hal yang penting. Untuk memberikan gambaran kualitas lingkungan hidup, maka pada isu ini perlu mengkaji upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk mencapai kota berkelanjutan melalui indikator IKA dan IKU serta upaya pengelolaan sampah.

Tabel 4-18 Kerangka Kajian Isu Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah

Tujuan/ Deskripsi	Kriteria	Indikator
Mengkaji upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup (Air, Lahan, Udara) untuk mencapai kota berkelanjutan	Perbaikan kualitas lingkungan hidup	• IKA • IKU • IKTL • Pengelolaan Sampah (pengurangan sampah terangkut ke TPA) • Emisi GRK

PERBAIKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan ukuran atau nilai yang memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup pada lingkup spasial dan periode tertentu. Pada periode sebelum IKLH, untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu kualitas air, udara, dan lahan. Sehingga sulit untuk masyarakat luas menilai kondisi lingkungan hidup suatu wilayah dari watu ke waktu secara garis besar. Salah satu cara untuk melakukan penarikan kesimpulan dari banyak data dan

informasi sehingga dapat dengan mudah dipahami masyarakat luas adalah dengan mengkonsolidasikannya dalam bentuk indeks.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 4-19 Posisi IKLH Provinsi DKI Jakarta 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	IKA	IKU	IKTL/IKL	IKAL	IKLH
1	2016	24,62	56,4	-	-	36,41
2	2017	21,33	53,56	-	-	35,78
3	2018	31,43	66,57	24,04	-	39,02
4	2019	35,56	67,97	24,66	53,7	40,92
5	2020	41,19	66,69	25,99	59,95	51,94
6	2021	43,1	66,39	26,24	70,37	53,53
7	2022	41,17	68,06	27,07	80,08	54,65

Sumber: Laporan IKLH Provinsi DKI Jakarta 20216-2022

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat IKLH Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terjadi peningkatan secara signifikan pada nilai IKLH dimana pada tahun 2016 memiliki nilai 36,41 dan untuk tahun 2022 memiliki nilai 54,65. Dengan melihat peningkatan nilai IKLH Provinsi DKI Jakarta ini menunjukkan tren yang positif dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup yang telah dikelola, sehingga diharapkan akan memberikan efek yang positif terhadap kualitas sumber daya alam yang ada dan pengendalian pencemaran yang semakin baik.

Kualitas Air

Kualitas Air yang ditunjukkan melalui IKA menggambarkan bahwa kualitas air di DKI Jakarta berada pada status kurang. Tingginya jumlah penduduk menyebabkan penambahan beban pencemaran khususnya terhadap badan air sehingga pada tahun 2022 mengalami penurunan nilai IKA sebesar 1,93 poin dibandingkan IKA pada tahun 2021. Hal tersebut menjadi bentuk evaluasi bagi Provinsi DKI Jakarta agar dapat meningkatkan kualitas air mengingat belum tercapainya target IKA Nasional yang mencapai 44,64.

Penentuan kualitas air meliputi kualitas sungai dan kualitas situ yang merupakan jenis air permukaan yang ada di Provinsi DKI Jakarta dengan parameter berupa TSS, BOD, COD, pH, DO, Nitrat, Total Phospat dan Fecal coliform. Pengambilan sampel lokasi sungai dilakukan pada sungai yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas nasional untuk dipulihkan khususnya Sungai Ciliwung, melintasi wilayah kota lain dan digunakan sebagai sumber air baku dalam pemenuhan air bersih di Provinsi DKI Jakarta khususnya Sungai Tarum Barat. Secara umum, untuk parameter TSS, pH, DO, Nitrat dan fosfat rata-rata menunjukkan hasil yang baik dimana memenuhi baku mutu maksimal, kecuali pada Sungai Ciliwung yang melebihi ambang batas baku mutu untuk parameter TSS dan DO.

Sementara itu, hampir seluruh titik pemantauan memiliki jumlah Fecal Coliform yang terlampau tinggi yang melampaui Baku Mutu. Hingga saat ini, kondisi pelayanan air limbah domestik di Provinsi DKI Jakarta baru mencapai 1,26% (JaKita, 2022) serta pelayanan sanitasi yang hanya mencakup 4% dari keseluruhan wilayah (KPPIP, 2020). Tingginya jumlah F. Coli dapat mengindikasikan bahwa badan air telah terkontaminasi tinja bahkan sejak dari titik hulu dan semakin tinggi bermuara di titik hilir.

Untuk kualitas air Danau/Waduk/Situ kondisinya cenderung lebih baik dibandingkan dengan kualitas air sungai dimana didominasi oleh kondisi Baik hingga Cemar Ringan. Kualitas air Danau/Waduk/Situ tetap dipengaruhi oleh aliran sungai utama, faktor eksternal dari lingkungan sekitarnya memberikan pengaruh yang cukup tinggi.

Secara wilayah administratif (daratan utama), wilayah Jakarta Pusat memiliki nilai IKA yang paling baik atau sebesar 44,67 dan wilayah Jakarta Barat memiliki nilai IKA paling buruk atau sebesar 35,52. Kondisi ini disebabkan oleh paling tingginya titik pemantauan yang termasuk ke dalam Cemar Berat, mencapai 24% dari keseluruhan titik

pantau di Jakarta Barat. Parameter Fecal Coliform yang sangat tinggi pun banyak berasal dari wilayah Jakarta Barat, sehingga dapat menjadi penyebab utama cemaran tinggi di wilayah tersebut. Sedangkan untuk nilai IKA pada Kepulauan Seribu, hanya mencapai nilai 30 karena hanya satu titik (satu periode pemantauan) yang dilakukan pemantauan, yaitu pada Empang P. Untung Jawa.

Gambar 4-41 Nilai IKA Wilayah Administratif

Kualitas Udara

Kualitas udara di DKI Jakarta berdasarkan nilai IKU pada dasarnya berada pada kelas sedang. Pada tahun 2022, nilai IKU berada pada angka 68,8. Namun demikian, isu kualitas udara menjadi hal perlu disoroti karena tingkat pencemaran yang tinggi dan berpengaruh pada kesehatan masyarakat.

Indikator lain sebagai penguat untuk menggambarkan kondisi kualitas udara di Jakarta adalah, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Pemantauan kualitas udara ambien di DKI Jakarta secara kontinu telah dilakukan pada 5 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yaitu di Bundaran HI (DKI1), Kelapa Gading (DKI2), Jagakarsa (DKI3), Lubang Buaya (DKI4) dan Kebon Jeruk (DKI5). Analisis status mutu udara ambien DKI Jakarta menggunakan data pencemar udara dengan parameter PM_{10}, $PM_{2.5}$, SO_2, CO, O_3, dan NO_2.

Konsentrasi rata-rata bulanan PM10 disemua SPKUA sepanjang Januari – Desember cenderung meningkat hingga pertengahan tahun kemudian menurun menjelang akhir tahun, baik tahun 2019, 2020, 2021 maupun 2022.

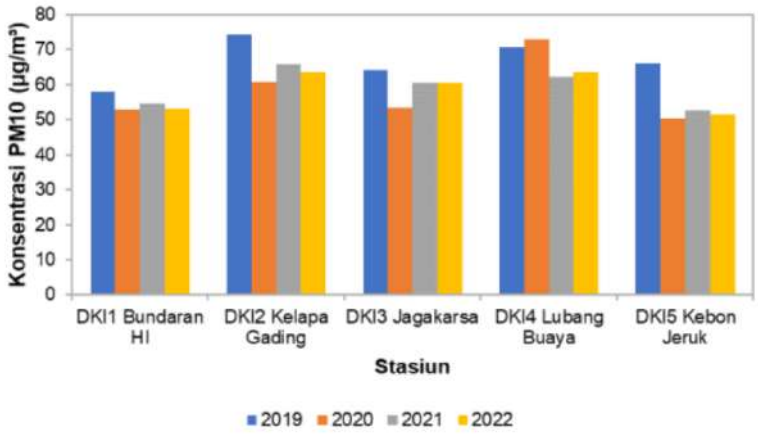

Gambar 4-42 Konsentrasi PM10

Sumber: Laporan Indeks Standar Pencemar Udara DKI Jakarta, 2022

Parameter lainnya yaitu PM2.5 merupakan parameter yang banyak disoroti di perkotaan, karena menjadi indikator tingkat kesehatan udara. Fluktuasi konsentrasi rata-rata bulanan selama Januari hingga Desember dari tahun 2019 – 2022 berbeda antar lokasi SPKUA. Rata-rata harian konsentrasi PM2.5 bulan Januari hingga Desember setiap tahun (2019 – 2022) menunjukkan tren meningkat, tetapi dibanding dengan tahun 2019 besaran nilai rata-rata lebih rendah terutama untuk DKI1 Bundaran HI – DKI3 Jagakarsa, karena DKI4 Lubang Buaya dan DKI5 Kebon Jeruk PM2.5 belum diukur. Namun terjadi kenaikan nilai rata-rata dibanding 2020. Dibandingkan dengan tahun 2021, tren dan besaran rata-rata konsentrasi harian PM2.5 di DKI4 Lubang Buaya meningkat sangat signifikan. Hal ini harus mendapat perhatian untuk ditelusuri sumber emisinya dan solusi yang harus dilakukan.

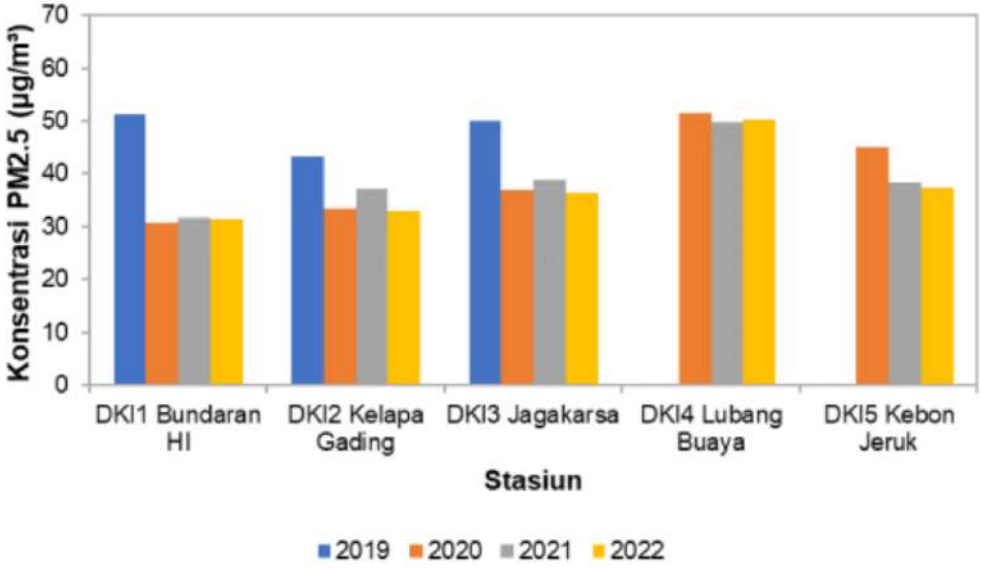

Gambar 4-43 Konsentrasi PM2.5
Sumber: Laporan Indeks Standar Pencemar Udara DKI Jakarta, 2022

Selain PM 10 dan PM 2,5, hasil analisis parameter lainnya yang dipertimbangkan yaitu SO_2, CO, O_3, dan NO_2) per 30 menit. Penentuan status mutu udara ambien untuk satu lokasi dihitung dengan menggunakan data pencemar udara (PM_{10}, $PM_{2.5}$, SO_2, CO, O_3, dan NO_2) yang kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan rata-rata menggunakan rerata *geometri* (*Geomean*). Nilai skor dari geomean harian maksimum dalam 1 tahun dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ketercemaran udara di suatu kota terhadap parameter pencemar udara tertentu. Berdasarkan PERMEN LH No 12 Tahun 2010, **jika nilai skor dari geomean harian maksimum dalam 1 tahun > 1** maka status suatu kota dapat dikatakan tercemar untuk parameter pencemar tersebut dan berlaku sebaliknya.

Setelah diperoleh nilai skor rata-rata dari setiap parameter pencemar, selanjutnya menentukan indeks status mutu udara (ISM). Indeks status mutu udara dihitung menggunakan data nilai bobot dari setiap parameter pencemar. Indeks status mutu udara ini digunakan untuk menilai status mutu udara di suatu kota. Berdasarkan PERMEN LH No 12 Tahun 2010, **apabila indeks status mutu udara (ISM) ≥ 0.1 maka status mutu udara di suatu kota dapat dikatakan tercemar** dan berlaku sebaliknya. Dalam perhitungan ISM DKI Jakarta tahun 2022 ini, **$PM_{2.5}$ belum dimasukkan karena belum ada ketentuan bobot $PM_{2.5}$.**

Nilai skor dari *geomean* di DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 1.30 untuk parameter $PM_{2.5}$, dan 1.52 untuk parameter PM_{10}, yang menunjukkan pada tahun **2022 wilayah DKI Jakarta tercemar oleh $PM_{2.5}$ dan PM_{10}**. Dalam perhitungan ISM tahun 2022 menunjukkan kondisi tercemar, dengan nilai ISM sebesar 0.44. Lebih rinci hasil perhitungan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4-20 Status Mutu Udara Ambien Wilayah DKI Jakarta Tahun 2021

Parameter	Baku Mutu Udara Ambien 24 jam (µg/m³)	*Geomean* Harian Maksimum (HR Maks)	*Score* dari HR Maks (Sc HR Maks)	*Score* Rata-Rata Harian (Scr)	Bobot	Indeks Status Mutu (ISM)	Status Mutu Udara
PM_{10}	75	114.09	1.52	0.71	2	**0.44**	Tercemar
$PM_{2.5}$	55	71.65	1.30	0.55			
SO_2	75	70.27	0.94	0.58	2		
CO	4*	1.85	0.46	0.22	3		
O_3	100*	97.35	0.97	0.42	1		
NO_2	65	43.61	0.67	0.35	2		

*) baku mutu udara ambien 8 jam

Sumber: Laporan Indeks Standar Pencemar Udara DKI Jakarta, 2022

Berdasarkan Laporan Kajian Inventarisasi Emisi Polusi Udara DKI Jakarta 2020, beban emisi pencemar udara berasal dari 5 sektor yaitu industri energi, manufaktur industri, transportasi, komersial, dan perumahan. Beban emisi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Sektor	Emisi (Ton)						
		SO_2	NO_x	CO	PM_{10}	$PM_{2,5}$	BC	$NMVOC_s$
1.A.1	Industri Energi	1.071	12.244	5.252	660	447	157	352
1.A.2	Manufaktur Industri	2.637	12.183	3.738	2.989	2.102	799	1.212
1.A.3	Transportasi	493	76.793	287.317	5.113	5.257	5.048	198.936
1.A.4a	Komersial	14	321	90	7	3	1	64
1.A.4b	Perumahan	41	4.527	1.774	48	33	1	2.407
	Total	4.257	106.068	298.170	8.817	7.842	6.007	201.972

Sumber: Laporan Kajian Inventarisasi Emisi Polusi Udara DKI Jakarta 2020

Sektor transportasi, sektor industri manufaktur, dan sektor energi industri adalah sektor-sektor dengan pengemisi terbesar untuk kelima indikator pencemar udara diatas. Ketiga sektor tersebut perlu dilakukan reduksi beban emisi untuk mencapai kualitas udara yang sesuai dengan baku mutu nasional maupun internasional. Selanjutnya dilihat kontribusi kelima sektor di atas terhadap indikator pencemar yang dijabarkan sebagai berikut.

- Sulfur Dioksida (SO_2)
  Industri manufaktur merupakan sumber terbesar kontributor untuk pencemar emisi SO_2 yaitu sebesar 67%, diikuti dengan industri energi sebesar 25,17%

- Nitrogen Dioksida (NO_2)
  Kontributor terbesar terhadap emisi NO_x yaitu transportasi sebesar 71%. Gas NOx dihasilkan dari reaksi antara nitrogen dan oksigen pada saat pembakaran dan pembentukannya signifikan pada suhu tinggi. Di tempat-tempat dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi, jumlah nitrogen oksida yang dilepaskan ke udara sebagai polusi udara dapat meningkat signifikan

- Karbon Monoksida (CO)
  Sektor transportasi merupakan sektor terbesar kontribusi beban emisi CO yaitu sebesar 96,3% atau sebesar 287.317,07 ton/tahun.

- PM_{10}
  Total Partikulat dengan ukuran 10 mikrometer di DKI Jakarta sebesar 8.817 ton/tahun dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor transportasi yaitu 57,99% atau 5.113,24 ton/tahun

- $PM_{2.5}$
  Transportasi berkontribusi sebesar 5.256,55 ton/ tahun atau sebesar 67%, diikuti dengan industri manufaktur memberi kontribusi sebesar masing-masing 26,81% dan 5,69%.
- Black Carbon (BC)
  Sektor transportasi kembali menjadi kontributor utama sebesar 84,04%. Sedangkan sektor industri manufaktur dengan menggunakan bahan bakar gas berkontribusi sebesar 2,61%.
- Non – Methane Volatile Organic Compund (NMVOCs)
  Total emisi NMVOCs untuk daerah DKI Jakarta sebesar 201.971 ton/tahun dengan sumber utama dari sektor transportasi yaitu 198.936,18 ton/tahun atau 98%. Sektor Industri Manufaktur, Industri Energi, Perumahan dan Komersial berkontribusi di bawah 1%.

Kualitas Lahan

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 ini, meningkat dari pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,83 poin yang setara dengan peningkatan sebesar 3,2% dari 26,24 menjadi 27,07.

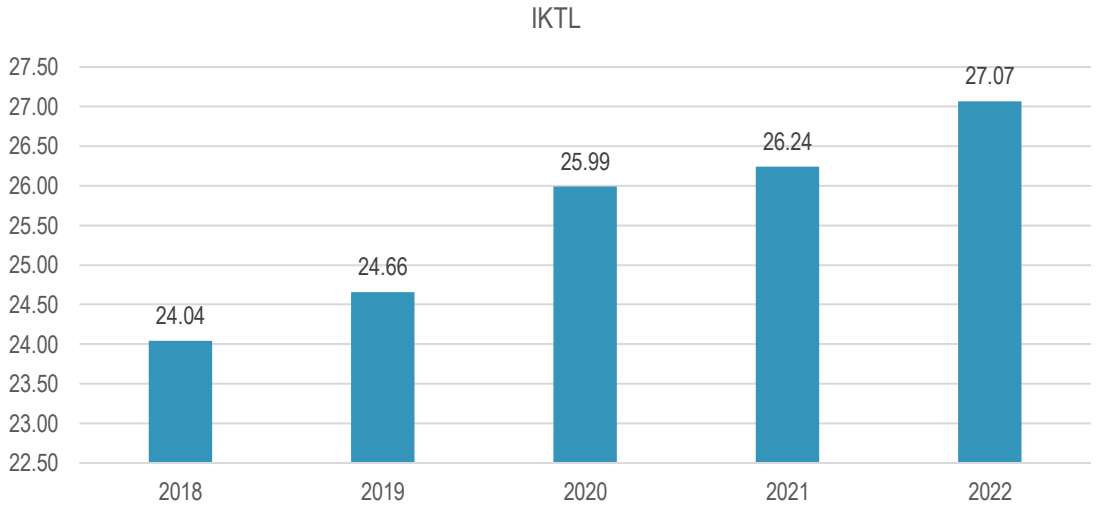

Gambar 4-44 IKTL DKI Jakarta 2018 – 2022

Gambar di atas menunjukkan perbaikan IKTL yang terus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penataan lahan untuk mendapatkan kondisi ekologis yang baik. Namun demikian, angka ini masih berada dalam kelas kurang. Artinya luas tutupan lahan bervegetasi belum cukup. Saat ini, hanya terdapat 7,58% dari luas DKI Jakarta yang bervegetasi. Tentunya jumlah ini masih jauh dari ketentuan RTH perkotaan sejumlah 30% dari luas wilayah. Data luas tutupan lahan vegetasi hutan dan non-hutan berdasarkan laporan IKLH 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 4-21. Luas Tutupan Lahan Vegetasi Hutan dan non Hutan

Tutupan Lahan	Luas (Ha)
Vegetasi Hutan	
Hutan & Hutan Lindung	719,65
Vegetasi Non-Hutan	
Luas Belukar Dalam Kawasan	5,493
Luas Belukar pada Fungsi Lindung	1,826
RTH	651,859
Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya	3.740,319
RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan)	12,500
TOTAL	5.131,647

Bertambahnya jumlah penduduk turut meningkatkan kepadatan penduduk sebagai akibat keterbatasan lahan untuk pemukiman. Untuk dapat tinggal di DKI Jakarta, beberapa warga memilih untuk tinggal di luar kawasan pemukiman, seperti bantaran sungai hingga kawasan lindung, sehingga terjadi perubahan fungsi lahan. Area yang sejatinya dapat difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi semakin berkurang luasnya, bahkan RTH yang sudah ada semakin berkurang fungsinya.

Dalam perkembangannya DKI Jakarta tetap berusaha mempertahankan lahan hijau untuk tetap menjaga kualitas tutupan lahan yang salah satunya adalah melalui hutan kota. Menurut Irwan (2008), hutan kota memiliki berbagai manfaat seperti dapat menurunkan suhu disekitarnya hingga 3,46%, menaikkan kelembaban hingga 0,81%, menurunkan tingkat kebisingan hingga 18,94%, dan bahkan menurunkan kadar debu mencapai 46,13%. Sehingga, hutan kota sejatinya memiliki peranan vital terhadap kenyamanan hidup masyarakat di DKI Jakarta. Selain tutupan lahan berupa hutan kota di daratan, tutupan lahan lainnya juga berada di pesisir yaitu Kawasan Mangrove. Kawasan ini memiliki fungsi seperti peredam gelombang dan angin badai, pelindung pantai dari abrasi, pencegah intrusi air laut ke daratan, hingga dapat menjadi penetralisir pencemaran perairan pada batas tertentu (Lasibani & Eni, 2009). Dengan berbagai fungsinya, kawasan mangrove sama pentingnya seperti kawasan hutan kota dalam menjaga kondisi lingkungan di Provinsi DKI Jakarta.

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dilihat berdasarkan persentase sampah yang terolah di tempat pengolahan. Capaian sampah terolah ini pada tahun 2020 sebesar 1,02% dan terus meningkat hingga 2022 menjadi 1,13%.

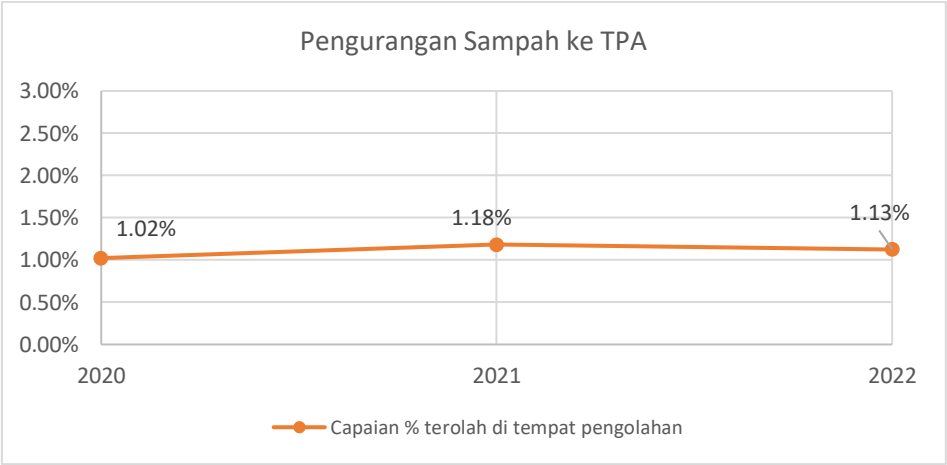

Dalam mengelola sampah, DKI Jakarta berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kawanan Sadar Sampah merupakan label khusus untuk kawanan kolaborator atau komunitas yang turut aktif dan berperan dalam kegiatan sadar sampah. Saat ini, telah terdapat 50++ kolaborator dengan 319++ penerima bantuan.

Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 di sektor Fasyankes diatur dalam permen No. 56 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Limbah B3 yang dihasilkan dari Fasyankes (Rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktik mandiri) di DKI Jakarta terus meningkat. Berdasarkan PPSML SIL UI (2022), menunjukkan pada tahun 2022 limbah B3 medis mencapai 33 ton/hari. Timbulan limbah B3 medis tertinggi dihasilkan dari Rumah Sakit, yaitu mencapai 22 ton/hari dengan jumlah Rumah Sakit 194 unit. Klinik menghasilkan limbah B3 sebanyak 5 ton/hari (dari 1947 Unit), PMTK menghasilkan hampir 4 ton/hari (dari 3044 unit), sedangkan Puskesmas menghasilkan hampir 2 ton/hari (dari 335 unit).

Selain pada fasyankes, dilakukan identifikasi limbah B3 pada USK percetakan, laundry, dan perbengkelan. Berdasarkan PPSML SIL UI (2022), Limbah yang dihasilkan industri percetakan berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat percetakan terdiri dari: kertas potongan penjilidan, kertas dari kesalahan cetak atau hasil pencetakan yang tidak lolos quality control, kain lap mesin cetak yang pada umumnya telah terkontaminasi dengan tinta atau bahan pelarut/pembersih lainnya plastik, dan lain-lain. Sedangkan limbah cair industri percetakan terdiri dari: tinta yang rusak, bahan pelarut, bahan pencair, bahan pengering. Limbah cair ini banyak terkontaminasi bahan kimia berbahaya seperti alkohol atau aseton dan esternya dan juga terkontaminasi logam berat seperti krom, kobalt mangan dan timah yang dapat larut ke dalam berbagai bahan pengikat.

Terkait pengelolaan limbah B3 UMKM, pengelolaan limbah B3 khusus UMKM digabung dengan pengelolaan limbah B3 Industri pada umumnya. Berdasarkan hasil analisis permasalahan dan kesenjangan pengelolaan sampah dan limbah B3, masih perlunya harmonisasi antar pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah dan limbah B3.

Infrastruktur Air Bersih

Akses air bersih di Jakarta belum merata, hingga tahun 2021 layanan perpipaan air bersih baru mencakup 65% dari kebutuhan, padahal Jakarta merupakan wilayah aluvial yang menjadi muara dari banyak sungai di DAS Ci Liwung Ci Sadane. Namun karena kualitas air permukaan yang tersedia masih di bawah baku mutu maka hingga saat ini kebutuhan air baku untuk perpipaan masih mengandalkan air dari waduk Jatiluhur. Sebagai upaya perbaikan atas jangkauan pelayanan air bersih perpipaan, maka diperlukan peningkatan debit air dari yang tersedia saat ini sebesar 21.000 liter per detik menjadi sebesar 31.875 liter per detik. Pada tahun 2022 telah mulai diupayakan pembangunan sisi hulu meliputi SPAM Regional Jatiluhur 1, SPAM Karina-Serpong dan SPAM Ir. H.

Djuanda, sedangkan pada sisi hilir melakukan optimalisasi aset eksisting SPAM dan pembangunan jaringan baru mendukung SPAM Regional hulu dengan pembiayaan sindikasi perbankan yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Emisi GRK

Emisi GRK DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 29.253 Gg (ribu ton) CO2e (direct emission) dan 31.145 Gg (ribu ton) CO2e (indirect emission) dari penggunaan listrik. Pada Tabel di bawah ini disampaikan perbandingan hasil inventarisasi emisi GRK tahun 2010 dan 2022. Tingkat emisi GRK (total direct dan indirect) di tahun 2022 meningkat 32% dibandingkan emisi GRK di 2010.

Tabel 4-22.Inventarisasi emisi GRK Provinsi DKI Jakarta

Sektor		Tahun (Ribu Ton CO2e)		Persentase (%)	
		2010	2022	2010	2021
1	Energi	18.881	26.777	91	92
2	IPPU	NE	NE	NE	NE
3	AFOLU	59	-2	0,3	0,01
4	Limbah	1.873	2.478	9	8
Total Direct Emission		20.813	29.253		
Indirect Emission		19.733	31.145		

Sumber: Profil Inventarisasi Emisi GRK Provinsi DKI Jakarta,2023

Pada 2022, sektor energi merupakan kontributor terbesar penghasil emisi GRK direct (92%), diikuti oleh sektor limbah (8%) dan sejumlah kecil sisanya sektor AFOLU. Sedangkan jika emisi GRK indirect diperhitungkan, maka kontributor terbesar emisi GRK dari penggunaan listrik sebesar 52%, diikuti direct emission (sektor industri, transportasi, komersial, rumah tangga, dan lain-lain) sebesar 32%, emisi dari sektor pembangkit listrik sebesar 12%, dan sektor limbah sebesar 4%.

4.4.4 Ketimpangan Sosial Ekonomi

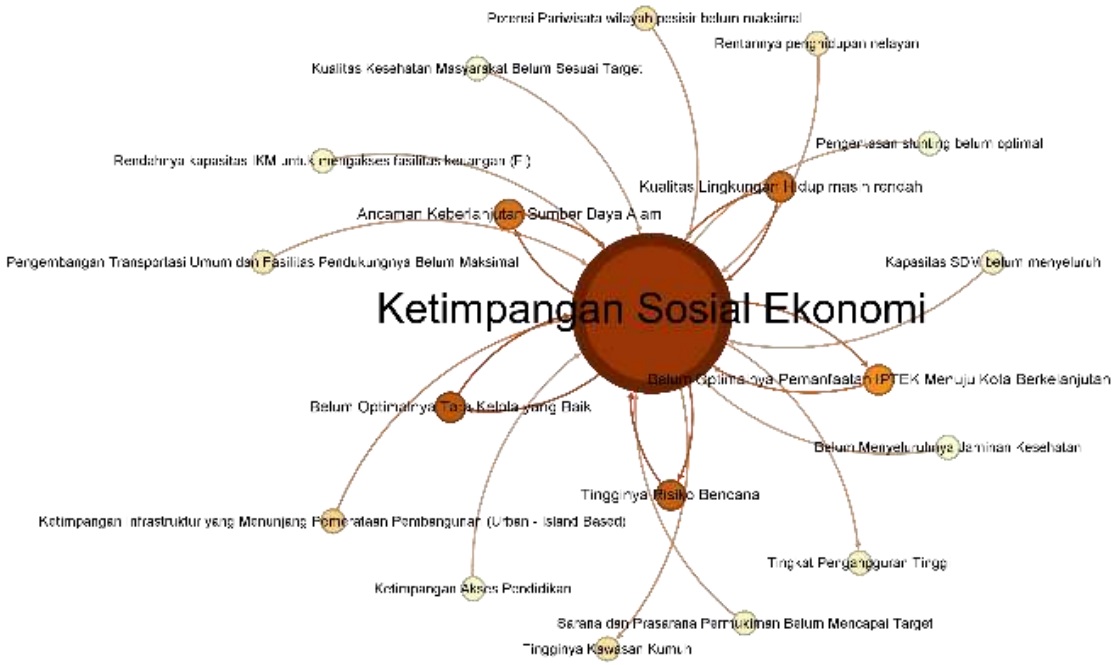

Gambar 4-45 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Ketimpangan Sosial Ekonomi

Isu paling strategis Ketimpangan Sosial - Ekonomi terdiri atas sejumlah isu pembangunan berkelanjutan terkait, diantaranya adalah masih adanya ketimpangan infrastruktur termasuk belum meratanya layanan transportasi publik, ketimpangan akses pendidikan, masih adanya pengangguran, kualitas kesehatan masyarakat yang masih belum mencapai target serta masih adanya RW kumuh.

Tabel 4-23 Kerangka Kajian Isu Ketimpangan Sosial Ekonomi

Tujuan/ Deskripsi	Kriteria	Indikator
Mengkaji upaya penurunan ketimpangan sosial ekonomi melalui inklusivitas akses fasilitas sosial ekonomi dan akses peningkatan kesejahteraan	Pemerataan akses pelayanan sosial ekonomi di daratan dan kepulauan	IPM
		Gini Ratio
		Pemenuhan Fasilitas Sosial Ekonomi
		Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita
		Tingkat Kemiskinan Kepulauan
		Tingkat Pengangguran Terbuka

PEMERATAAN AKSES PELAYANAN SOSIAL EKONOMI DI DARATAN DAN KEPULAUAN

Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan data 6 tahun terakhir, indeks pembangunan manusia DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan meningkat dan lebih tinggi dibanding capaian nasional yaitu 78,39 pada tahun 2014; 78,99 pada tahun 2015; 79,6 pada tahun 2016; 80,06 pada tahun 2017; 80,47 pada tahun 2018; 80,76 pada tahun 2019; 80,77 pada tahun 2020; 81,11 pada tahun 2021; hingga 81,65 pada tahun 2022. Sedangkan IPM di Kepulauan Seribu menunjukkan capaian yang lebih rendah dari rata-rata provinsi DKI Jakarta dan capaian nasional. Akan tetapi capaian IPM Kepulauan Seribu cenderung meningkat dengan nilai IPM 68,48 pada tahun 2014 dan 72,79 pada tahun 2022.

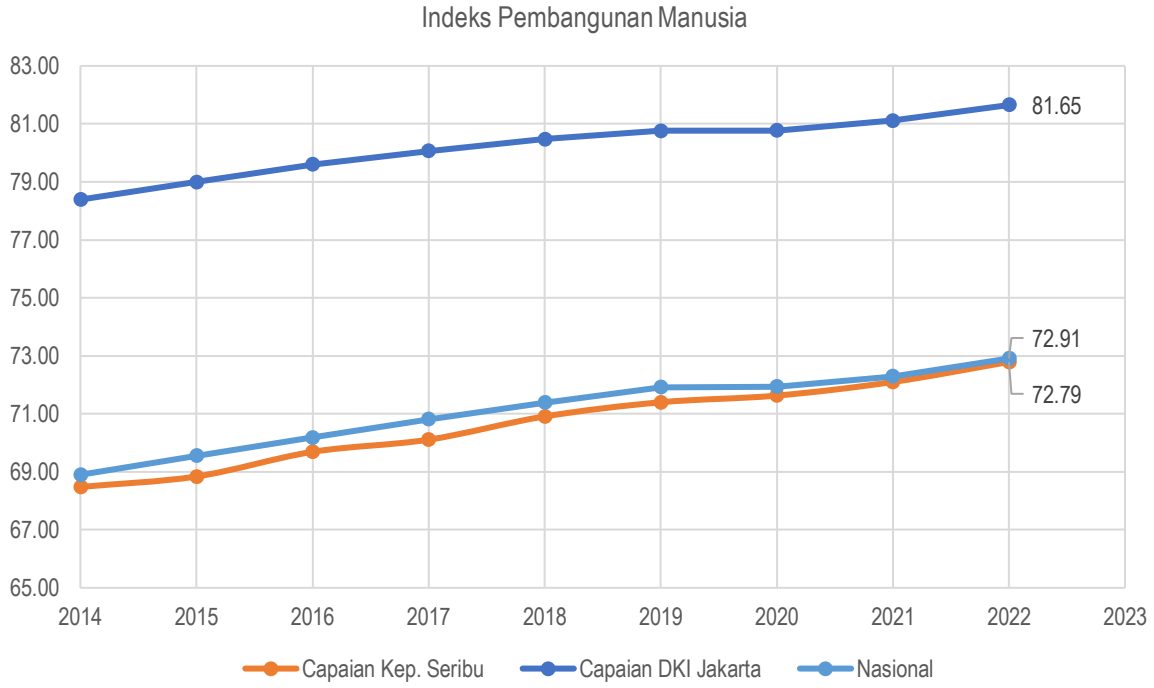

Gambar 4-46 Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta

Secara lebih rinci berikut merupakan indeks pembangunan manusia secara nasional, DKI Jakarta, dan Kepulauan Seribu.

Tabel 4-24 Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta

	Capaian Nasional	Capaian DKI Jakarta	Capaian Kep. Seribu

2014	68.9	78.39	68.48
2015	69.55	78.99	68.84
2016	70.18	79.6	69.69
2017	70.81	80.06	70.11
2018	71.39	80.47	70.91
2019	71.92	80.76	71.40
2020	71.94	80.77	71.63
2021	72.29	81.11	72.10
2022	72.91	81.65	72.79

Gini Ratio

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, sedangkan rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Berdasarkan data selama 8 tahun terakhir, gini ratio Jakarta menunjukkan penurunan dari tahun 2015 (0,430) – 2019 (0,391). Akan tetapi sejak 2020 – 2022, gini ratio DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang berarti tingkat ketimpangan semakin tinggi.

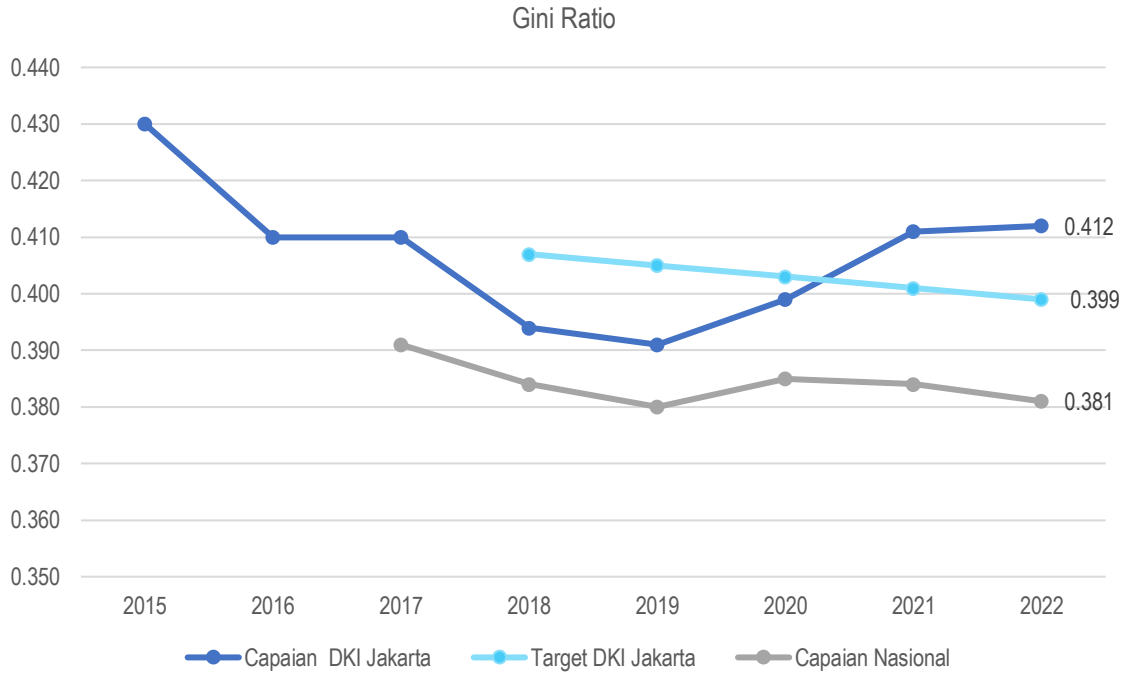

Gambar 4-47 Tren Gini Ratio DKI Jakarta

Jika dibandingkan dengan nasional, gini ratio DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Secara lebih rinci berikut merupakan nilai gini ratio secara nasional dan DKI Jakarta.

Tabel 4-25 Tren Gini Ratio DKI Jakarta

	Capaian DKI Jakarta	Target DKI Jakarta	Capaian Nasional
2015	0.430		
2016	0.410		
2017	0.410		0.391
2018	0.394	0.407	0.384
2019	0.391	0.405	0.38
2020	0.399	0.403	0.385
2021	0.411	0.401	0.384

2022	0.412	0.399	0.381

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2012 hingga tahun 2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2012 sebesar 6,5% dan menurun menjadi 5,9% pada tahun 2016. Setelah itu pertumbuhan ekonomi meningkat pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 6,2%. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta menurun secara signifikan hingga diangka -2,4%. Setelah itu pertumbuhan ekonomi perlahan meningkat kembali pada tahun 2021 (3,6%) dan 2022 (5,3%).

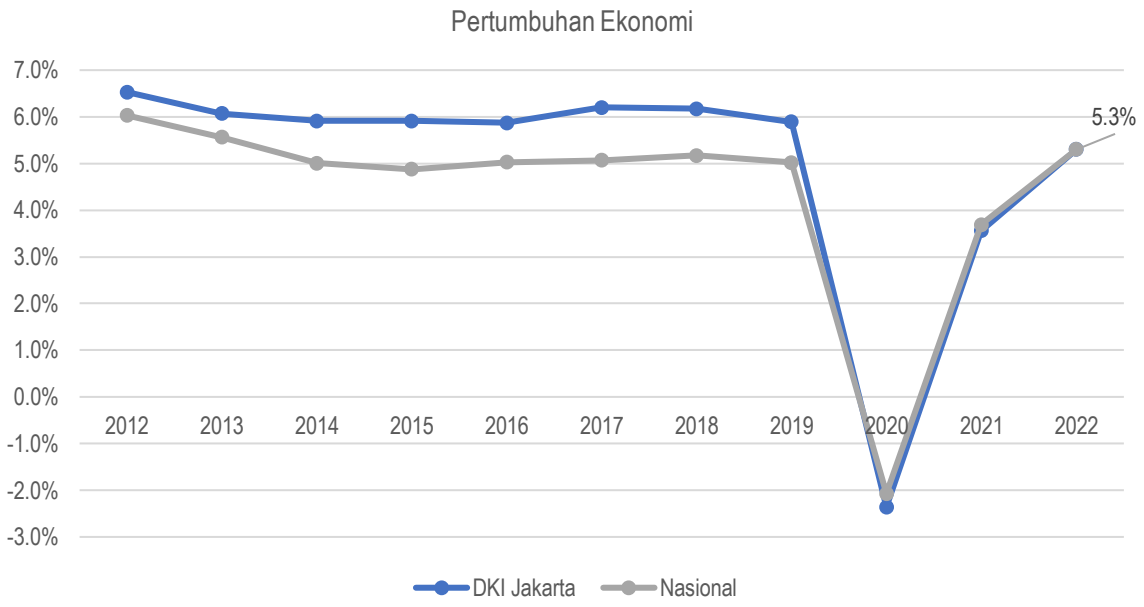

Gambar 4-48 Tren Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Secara lebih rinci berikut merupakan capaian DKI Jakarta dan nasional.

Tabel 4-26 Tren Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta

	DKI Jakarta	Nasional
2012	6.5%	6.03%
2013	6.1%	5.56%
2014	5.9%	5.01%
2015	5.9%	4.88%
2016	5.9%	5.03%
2017	6.2%	5.07%
2018	6.2%	5.17%
2019	5.9%	5.02%
2020	-2.4%	-2.07%
2021	3.6%	3.69%
2022	5.3%	5.3%

PDRB per Kapita

PDRB per kapita DKI Jakarta terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010 (Rp111.528.860) hingga tahun 2022 (Rp298.359.970). PDRB perkapita DKI Jakarta ini jauh lebih tinggi daripada PDB nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

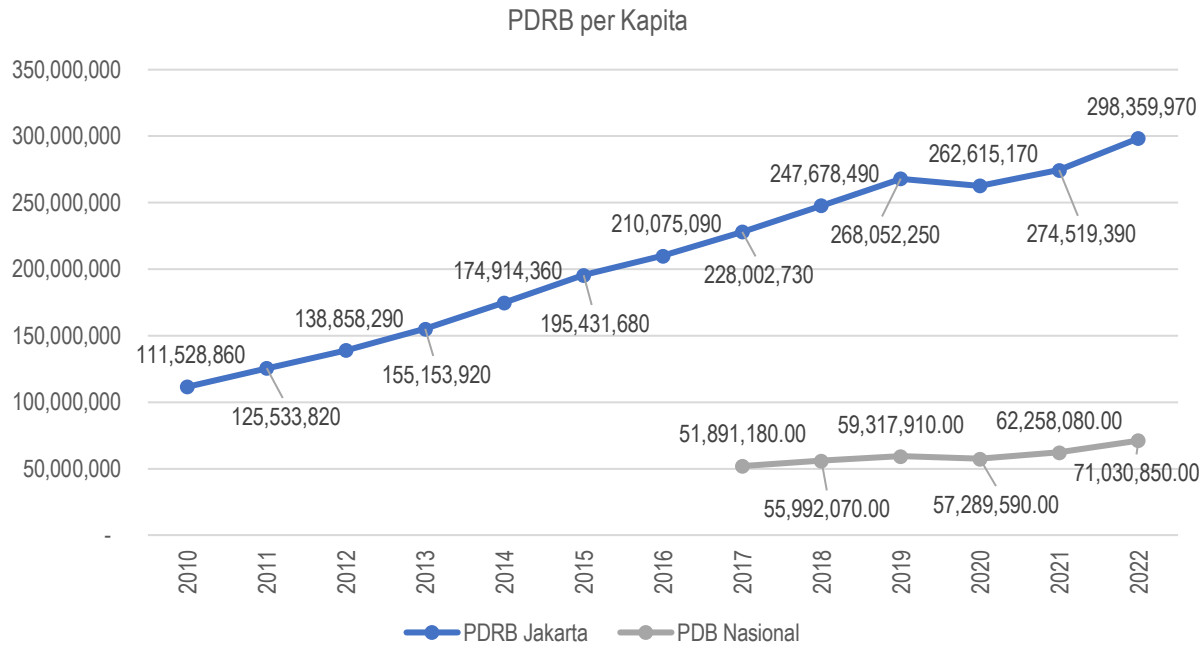

Gambar 4-49 Tren PDRB per Kapita

Tingkat Kemiskinan Kepulauan

Pada tahun 2005, tingkat kemiskinan DKI Jakarta mencapai 3,61% dan cukup fluktuatif hingga tahun 2019 (3,42%). Pada tahun 2020 - 2021 tingkat kemiskinan cenderung meningkat yaitu mencapai 4,53% pada tahun 2020 dan 4,72% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan berkurang kembali di angka 4,61%. Data ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya indikator ini jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh DKI Jakarta pada tahun 2018 – 2022.

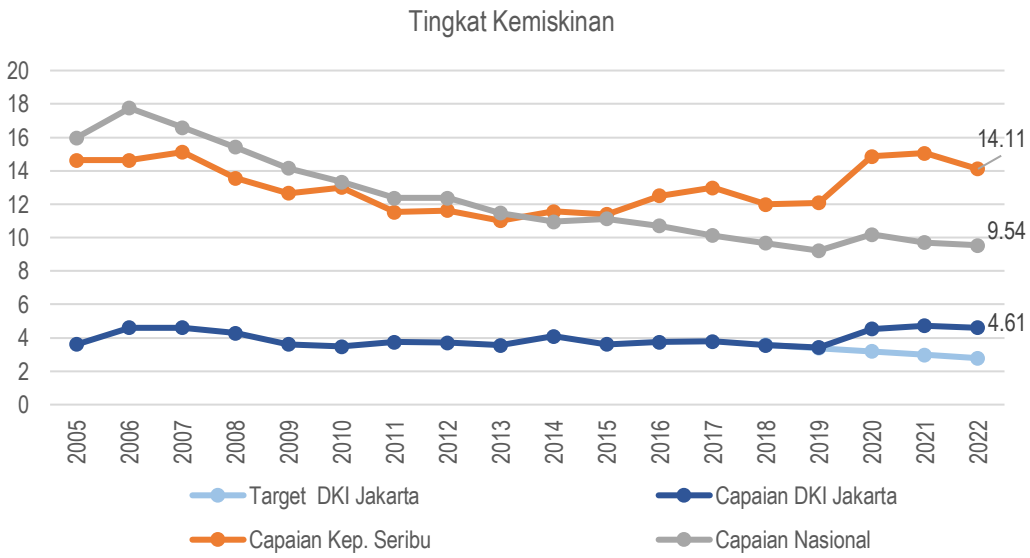

Gambar 4-50 Tren Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta

Hal yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kemiskinan di Kepulauan Seribu dimana angka kemiskinan jauh lebih tinggi dibanding DKI Jakarta secara keseluruhan. Hal ini berarti terdapat ketimpangan ekonomi antara kepulauan dengan daratan. Tingkat kemiskinan di Kepulauan Seribu pada tahun 2015 - 2022 juga lebih tinggi dari pada tingkat kemiskinan nasional. Secara lebih rinci berikut merupakan tingkat kemiskinan secara nasional, DKI Jakarta, dan Kepulauan Seribu.

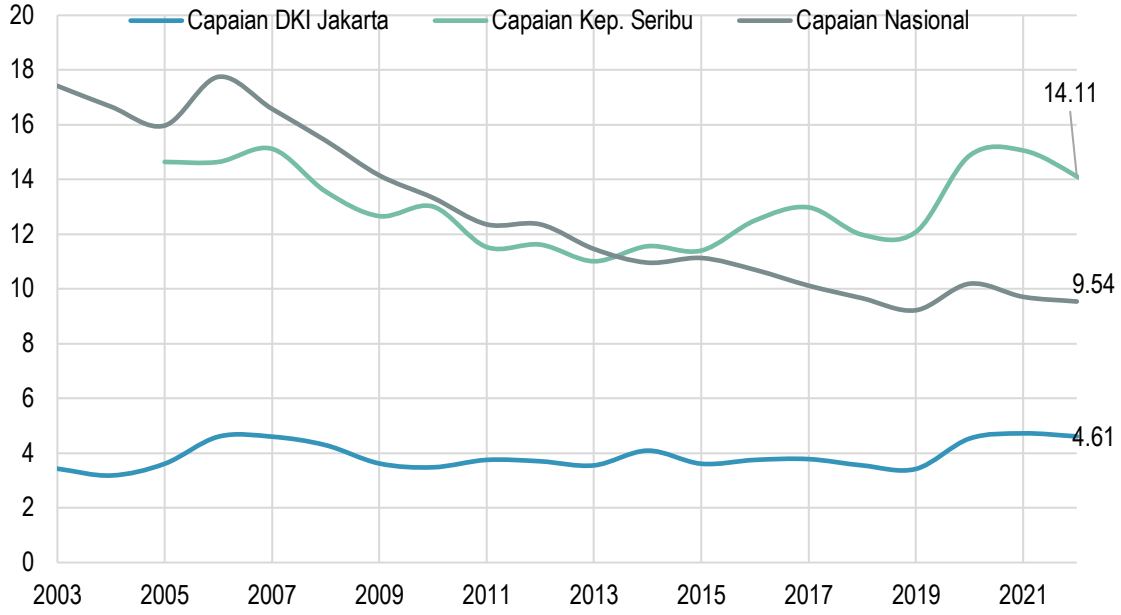

Gambar 4-51 Tingkat Kemiskinan Kepulauan

Tabel 4-27 Tren Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta

	Target DKI Jakarta	Capaian DKI Jakarta	Capaian Kep. Seribu	Capaian Nasional
2005		3.61	14.64	15.97
2006		4.6	14.64	17.75
2007		4.6	15.12	16.58
2008		4.29	13.56	15.42
2009		3.62	12.66	14.15
2010		3.48	13.01	13.33
2011		3.75	11.53	12.36
2012		3.7	11.62	12.36
2013		3.55	11.01	11.46
2014		4.09	11.56	10.96
2015		3.61	11.4	11.13
2016		3.75	12.50	10.7
2017		3.78	12.98	10.12
2018	3.58	3.55	11.98	9.66
2019	3.38	3.42	12.08	9.22
2020	3.18	4.53	14.87	10.19
2021	2.98	4.72	15.06	9.71
2022	2.78	4.61	14.11	9.54

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta selama periode 2010 – 2019 cenderung menurun yaitu 11,05 pada tahun 2010 dan 6,22 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran meningkat menjadi 10,95 karena adanya Pandemi Covid-19. Setelah tahun 2020, secara berangsur-angsur tingkat pengangguran terus menurun. Data ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya indikator ini jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh DKI Jakarta.

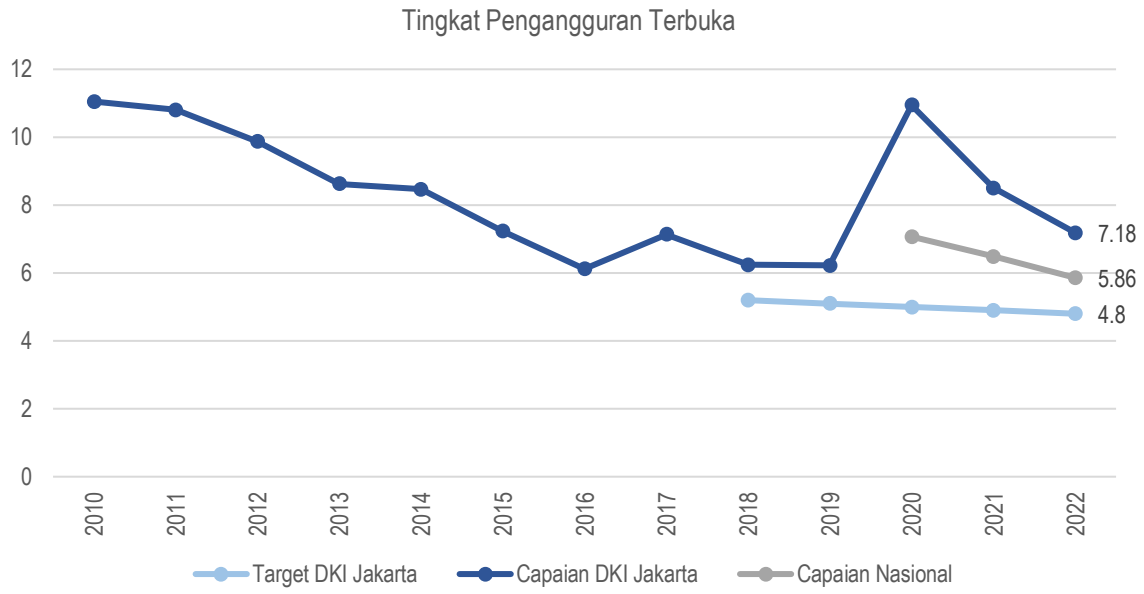

Gambar 4-52 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta

Selain itu tingkat pengangguran terbuka DKI Jakarta juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun 2020 – 2022. Secara lebih rinci berikut merupakan tingkat pengangguran terbuka DKI Jakarta dan nasional.

Tabel 4-28 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta

	Target DKI Jakarta	Capaian DKI Jakarta	Capaian Nasional
2010		11.05	
2011		10.8	
2012		9.87	
2013		8.63	
2014		8.47	
2015		7.23	
2016		6.12	
2017		7.14	
2018	5.2	6.24	
2019	5.1	6.22	
2020	5	10.95	7.07
2021	4.9	8.5	6.49
2022	4.8	7.18	5.86

Ketimpangan

Infrastruktur Jalan

Dalam perkembangannya sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta terus mengembangkan jaringan jalan di Jakarta, baik melalui kewenangan nasional maupun kewenangan provinsi, sehingga pada tahun 2020, panjang jalan di Jakarta mencapai 6.652 Km. Namun ternyata panjang jalan Jakarta dibandingkan dengan luas wilayah baru mencapai kurang lebih 7,15 % padahal idealnya panjang jalan mencapai 11-15% dari luas wilayah. Selain itu di Jakarta pertumbuhan kendaraan bermotor pada tahun 2022 mencapai 9,3% per tahun jauh lebih tinggi dari pertumbuhan pembangunan jalan yang hanya 0,1% per tahun. Anggaran infrastruktur jalan di DKI lebih banyak digunakan untuk pemantapan kualitas jalan daripada membangun infrastruktur jalan yang baru. Sehingga dalam perkembangannya konsep pengendalian kemacetan jalan dilakukan dengan membatasi akses masuk kendaraan dan memaksa masyarakat meninggalkan angkutan pribadi dan menggunakan angkutan umum.

Layanan Transportasi Publik

Layanan transportasi publik di Jakarta lima tahun terakhir ini sebenarnya sudah jauh membaik dari 42% menjadi 82%, karena mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik melalui JakLingko. Namun dalam diskusi beberapa permasalahan yang muncul adalah keengganan masyarakat untuk mengakses layanan publik karena memerlukan kartu elektronik dan sistem transit yang dirasa masih menyusahkan. Maka perlu dipertimbangkan manajemen pengelolaan rute layanan angkutan umum yang lebih baik, dan juga kemudahan pembayaran bagi masyarakat umum yang tidak memiliki pemahaman tentang *cashless*.

Berdasarkan survei Litbang Kompas (2022) didapatkan hasil analisis bahwa kurang lebih 96,1% penduduk DKI Jakarta atau 8,7 juta jiwa telah terlayani oleh angkutan umum. Data ini diperoleh dengan menganalisis sebaran halte/terminal/stasiun terhadap sebaran permukiman penduduk. Layanan transportasi di DKI Jakarta ternyata jauh lebih baik bila dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, dimana Kota Depok hanya memiliki jangkauan layanan sebesar 21,5 % atau 322.000 jiwa, Kota Bekasi yang terlayani sebesar 32,9 % atau 690.000 jiwa, dan Kota Tangerang yang mampu melayani 34 % atau 497.000 jiwa. Kabupaten Tangerang menjadi wilayah yang tingkat pelayanan transportasi publiknya paling buruk dengan hanya melayani 4,5 % atau 70.000 jiwa.

Dari sisi komuter, Survei Komuter BPS 2014 mencatat ada 23,6 % penduduk pengguna angkutan umum dan sisanya menggunakan kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua. Namun pada tahun 2019 jumlah komuter pengguna angkutan umum cenderung menurun, sedangkan pertumbuhan kendaraan penumpang pada tahun 2020, BPS mencatat jumlah mobil di DKI Jakarta mencapai 3,4 juta unit atau naik 30,9 % dibandingkan pada 2015, sedangkan di Bodetabek, jumlah mobil meningkat sebesar 42,5 % dari tahun 2015 menjadi 1,6 juta unit, sedangkan pertumbuhan motor di DKI Jakarta naik 16,1 juta unit atau naik 21 % dari tahun 2015 dan di wilayah Bodetabek naik 8 juta unit atau naik 7,1 %.

Sementara berdasarkan jumlah perjalanan di wilayah DKI Jakarta, pada tahun 2020 dari total 15 juta perjalanan, yang menggunakan angkutan umum hanya sebesar 8,2 % atau sebesar 1,2 juta perjalanan, sisanya menggunakan moda transportasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung menggunakan moda transportasi lain untuk melakukan perjalanan baik roda-2 atau pun roda-4.

Sedangkan untuk transportasi di Kepulauan Seribu, hingga saat ini masih dirasakan sangat kurang memadai karena hingga saat ini ongkos perjalanan ke Kepulauan Seribu relatif mahal bila dibandingkan dengan ongkos transportasi di daratan yang dilayani oleh TransJakarta hanya Rp. 3.500,-. Saat ini pelayanan transportasi ke Kepulauan Seribu dilayani oleh kapal-kapal tradisional dan kapal milik Dishub Provinsi DKI Jakarta yang melayani setiap hari, namun dengan jumlah trip per hari yang terbatas karena terbatasnya jumlah kapal. Pengintegrasian layanan transportasi laut ke Kepulauan Seribu dengan TransJakarta ternyata tidak dapat dilakukan karena Peraturan Daerah yang mengatur tentang TransJakarta membatasi layanan hanya untuk daratan, tidak termasuk transportasi laut sehingga diperlukan adanya *bridging policy* untuk mengatasi *gap* yang terjadi.

Perumahan Yang Layak

Perumahan layak yang menjadi perhatian di DKI Jakarta adalah upaya penanganan RW kumuh, dari 223 RW di tahun 2003 menjadi 23 RW di tahun 2022. Pada tahun 2020, jumlah RW kumuh tersisa 147 RW dengan segala keterbatasan dan tantangan yang terjadi akibat *re-focusing* anggaran Covid-19. RW kumuh yang menjadi prioritas perbaikan pada tahun 2020 tersebar di Kelurahan Karet Tengsin dan Menteng di Jakarta Pusat; Kelurahan Duri Kepa dan Keagungan di Jakarta Barat; Kelurahan Gandaria di Jakarta Selatan, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Rawamangun dan Rawa Bunga di Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.

Pengangguran

Tingkat pengangguran di Jakarta mengalami peningkatan drastis pada tahun 2020 karena Covid-19, namun berangsur-angsur menurun seiring dengan masuknya masa endemi Covid-19 di dunia. Dalam diskusi dengan dinas pendidikan permasalahan utama pengangguran di Jakarta dialami paling besar oleh lulusan SMA dan SMK yang sampai tahun 2021 masih di atas 10%. Permasalahan utama dari lulusan SMA dan SMK adalah keterampilan yang belum dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja di Jakarta dan sekitarnya. Bagi lulusan SMA cenderung semakin berat tantangannya karena kurikulum SMA tidak menyertakan pelatihan keterampilan untuk masuk ke dunia kerja, karena memang pada hakikatnya lulusan SMA diharapkan mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi baik jalur sarjana atau keahlian (vokasi). Namun pada kenyataannya banyak yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi karena berbagai faktor, diantaranya adalah akses pembiayaan. Sedangkan bagi lulusan SMK seringkali keterampilan yang ada dalam kurikulum sekolah sudah *out of date* tidak mampu mengejar kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi.

4.4.5 Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (Good Governance)

Gambar 4-53 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik

Berdasarkan hasil telaah akademis dan diskusi dengan perwakilan publik diperoleh temuan bahwa Tata Kelola menjadi salah satu isu yang dinilai paling strategis dalam merumuskan kebijakan kemudian menetapkan institusi dan melaksanakan implementasi dari kebijakan pembangunan di wilayah pembangunan Jakarta.

Tabel 4-29 Kerangka Kajian Isu Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik

Tujuan/ Deskripsi	Kriteria	Indikator
Mengkaji kapasitas kelembagaan untuk perbaikan pengelolaan sumber daya alam	Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Indeks Pelayanan Publik (Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik, SAKIP dan AKIP/ TPB 16)
	Pengelolaan Sumber daya Alam	• Kerja sama antar daerah • Ketersediaan Kebijakan dan Dokumen Perencanaan untuk Pengendalian

		Pemanfaatan SDA , peningkatan Kualitas Lingkungan, serta monitoring dan evaluasi

Isu tata kelola menjadi isu paling strategis karena mencakup kewenangan lintas hierarki pemerintahan, lintas sektor, lintas wilayah dan lintas waktu perencanaan.

KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Fungsi utama pemerintah yaitu melayani masyarakat, sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan pemberian pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan tercapai apabila penerima pelayanan menerima pelayanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan.

Salah satu cara untuk mengukur hal tersebut dengan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di DKI Jakarta menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 – 2020 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4-30 Indeks Kepuasan Masyarakat DKI Jakarta

	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,76	84,41	86,34

SAKIP

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah. Evaluasi atas implementasi SAKIP terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kriteria yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan IKU sampai saat dilakukan evaluasi (PM PANRB 12/ 2015).

Berdasarkan hasil penilaian, nilai SAKIP Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4-31 Nilai SAKIP DKI Jakarta

	2018	2019	2020	2021
SAKIP	BB	BB	BB	A

Berdasarkan evaluasi di atas, pada tahun 2018 – 2019 nilai indeks evaluasi SAKIP DKI Jakarta yaitu BB atau sangat baik. Pada tahun 2021, nilai SAKIP menunjukkan peningkatan menjadi A atau memuaskan. Kriteria nilai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4-32 Kriteria SAKIP

NILAI	PREDIKAT	STATUS
AA	> 90 Sangat Memuaskan	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90 Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.
BB	>70-80 Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki

		sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 – 70 Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
C	>50 – 60 Memadai	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
CC	>30 – 50 Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0 – 30 Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Jumlah Kerja Sama dan Kolaborasi antar Wilayah Fungsional

Kerja sama dan kolaborasi antar wilayah fungsional merupakan upaya untuk memastikan jasa layanan ekosistem terjadi antara hulu dan hilir. Hingga tahun 2022 paling tidak ada 3 (tiga) kerja sama antara Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah tetangganya yaitu:

1. Provinsi DKI Jakarta – Kota Bekasi

   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal peningkatan pengelolaan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi. Ruang lingkup kerja sama meliputi dana kompensasi, revisi dokumen Andal RKL/RPL, pengkajian daya dukung dan daya tampung lingkungan, jalur dan waktu pengangkatan sampah, inovasi teknologi reduksi sampah, hingga proses pengakhiran TPST Bantargebang.

   Sementara untuk lingkup kompensasi, dalam kerja sama ini dicapai sejumlah kesepakatan yaitu kompensasi penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan. Kompensasi dalam bentuk lain yaitu bantuan langsung tunai (BLT) dan pertanggungan kematian (polis) bagi warga yang terkena dampak TPST Bantargebang.

2. Provinsi DKI Jakarta – Bodetabekjur

   Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Bodetabekjur) tentang ketahanan pangan, transportasi, dan penyediaan air bersih. Contoh kerja sama yang dilakukan yaitu (a) Ketahanan pangan, berupa pemberdayaan UMKM, (b) Transportasi, berupa pembangunan *park and ride* untuk mengurai kemacetan, (c) Penyediaan air bersih, berupa normalisasi situ, pembangunan kolam retensi, sumur resapan, dan lainnya.

3. Provinsi DKI Jakarta - Kota Bekasi dan Kota Tangerang Selatan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan Bekasi dan Tangerang Selatan dalam hal pengendalian polusi udara, salah satunya yaitu uji emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dinilai menjadi salah satu kontributor pencemaran udara untuk sumber bergerak yang mengakumulasi polutan berbahaya. Selain sumber bergerak, terdapat sumber polutan tidak bergerak seperti PLTU. Kerja sama ini dilakukan agar semua kota dapat bersinergi untuk menghasilkan kota dengan udara yang bersih.

Ketersediaan Kebijakan dan Dokumen Rencana

Dalam penjagaan dan pengelolaan lingkungan hidup, Provinsi DKI Jakarta telah memiliki kebijakan dan dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan dasar rencana dalam bertindak. Kebijakan dan dokumen rencana ini berupa peraturan gubernur, peraturan daerah, keputusan gubernur, dan/ atau instruksi gubernur yang berkaitan dengan moratorium air tanah/ perluasan *coverage area*, keanekaragaman hayati, pencemaran udara, dan sampah. Kebijakan dan dokumen perencanaan eksisting yang terdapat di DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4-33. Kebijakan dan Dokumen Perencanaan Eksisting

	Kebijakan dan Dokumen Perencanaan Eksisting
Moratorium Air Tanah/ Perluasan *coverage area*	PERGUB DKI No. 93 Tahun 2021 tentang Kawasan Bebas Air Tanah
	RTRW DKI Jakarta Tahun 2022 – 2042
	Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kehati	PERGUB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2017 Penyelenggaraan Hutan Kota
	PERGUB No. 31 Tahun 2022 tentang RDTR (Pembagian zona lindung)
	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2020 - 2024
Pencemaran Udara	PERDA DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
	PERGUB DKI Jakarta No 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
	PERGUB No. 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
	PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
	KEPGUB No. 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara
	INGUB DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara
Sampah	PERDA No.3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
	PERDA No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERDA No.3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
	PERGUB No. 108 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	PERGUB No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat
	PERGUB No.77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Tingkat Rukun Warga
	PERGUB No. 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah
	PERGUB No. 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah
	PERGUB No. 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah
	PERGUB No.95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah
	PERGUB No.102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan
	INGUB No. 107 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah

4.4.6 Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK menuju Kota Berkelanjutan

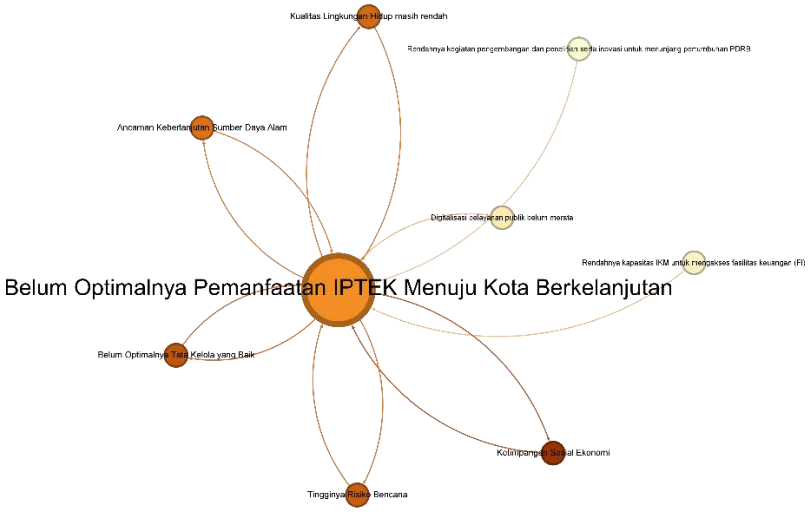

Gambar 4-54 Visualisasi dan Keterkaitan Isu Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK menuju Kota Berkelanjutan

Tabel 4-34 Kerangka Kajian Isu Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK menuju Kota Berkelanjutan

Tujuan/ Deskripsi	Kriteria	Indikator
untuk mengkaji upaya menuju kota yang berkelanjutan dengan pemanfaatan IPTEK dalam menjaga keberlanjutan SDA, meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi risiko bencana, mengurangi ketimpangan social dan optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui kolaborasi para pihak penta helix – pemerintah, akademisi, badan/pelaku usaha - swasta, Masyarakat, media massa)	Kolaborasi dan inovasi pengembangan IPTEK untuk keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas lingkungan dan penurunan risiko bencana	• Jumlah kolaborasi (pihak terkait) • Jumlah inovasi daerah (indeks inovasi daerah)
	Kolaborasi dan inovasi pengembangan IPTEK untuk menjamin inklusivitas sarana prasarana perkotaan	• Kolaborasi pemenuhan sarpras perkotaan • Pemenuhan infrastruktur perkotaan (transportasi publik) (TPB 11) • Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (TPB 11)
	Pengembangan IPTEK untuk tata kelola pemerintahan	SPBE (system informasi berbasis elektronik)

KOLABORASI DAN INOVASI PENGEMBANGAN IPTEK

Jumlah Kolaborasi

Dalam mewujudkan keberhasilan kolaborasi, perlu adanya komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak lainnya. DKI Jakarta telah menjalankan kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan bersama dengan NGO, asosiasi, dan lainnya yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4-35 Jumlah Kolaborasi

No	Organisasi	Program	Kegiatan
1	LKNU (Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama)	Gerebek Investigasi Kontak dan Sosialisasi TB	• Investigasi Pasien TB dengan melakukan deteksi terhadap 20-30 orang di sekitar rumah pasien positif TB • Pertemuan Koordinator Kader

2	GenRe	Workshop Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja Puteri	• Workshop Pro-PN Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Puteri • Sosialisasi Modul serta Pembinaan bagi para Pembina PIK Remaja dan BKR
3	Tzu Chi	Berbenah Kampung Kamal Muara	Melakukan Renovasi dan perbaikan Rumah dilingkungan Padat, kumuh, miskin
4	AMPP	Motivasi Edukatif	• Kunjungan Edukatif bagi anak Jalanan terkait kesehatan, kekerasan, pendidikan karakter • Pemberian Pendidikan Karakter dan Santunan Anak Yatim
5	YDMI (Yayasan Difabel Mandiri Indonesia)	Disabilitas Mandiri	• Program Peningkatan Kapasitas Hard Skill dan Soft Skill bagi orang degan disabilitas yang berorientasi kerja • Program Start up wirausaha bagi orang dengan disabilitas
		Pendampingan dan Fasilitasi	• Membentuk Inkubator wirausaha bagi orang dengan disabilitas • Adanya lembaga penjamin kredit bagi orang dengan disabilitas yang berwirausaha
6	IPPI (Ikatan Perempuan Positif Indonesia)	Penyusunan Program Nasional Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu dan Anak Serta KB untuk ODHA	• National Workshop PPIA dan KB untuk Komunitas perempuan yang hidup dengan HIV • Training Nasional pedoman PPIA dan KB untuk PDHA
7	UCLG	Pelatihan Diplomasi Kota	Pelatihan Diplomasi Kota selama 2 hari sebagai bagian dari Kerja sama Bappeda
8	UID	Happines Festival	• Happines Festival 16 dan 17 untuk meningkatkan awareness dan kepedulian masyarakat terhadap SDGs • YAF 16 dan 17
9	Lentera Anak	Young Health Program Indonesia	• Pelatihan Peer Educator di 8 Sekolah • Pelatihan Guru dan Orang Tua • Pembentukan Posyandu Remaja
10	ACT	Global Wakaf Corporation	• Warung Wakaf • Mobil Sosial Rescue (Ambulan Pre-hospital)
11	Wiranesia	Pembuatan Branding dan Packaging Produk UMKM	Pelatihan Pentingnya Wirausaha dan Packaging Produk UMKM
12	Wallezz	Bank Sampah	Digitalisasi Bank Sampah
13	IKAN	MRT Transportasi Publik dan Contoh Perubahan Tingkah Laku	Promosi MRT langsung dan tidak langsung serta sosialisasi perubahan tingkah laku ditransportasi publik
14	PAM Jaya	Penyediaan Akses Air Minum Berkualitas bagi Warga Jakarta	Pembangunan dan penyediaan fasilitas sebagai akses air minum berkualitas bagi warga Jakarta
15	ARMOR	Pembuatan Branding dan Packaging Produk UMKM	Pelatihan Pentingnya Wirausaha dan Packaging Produk UMKM
16	PLAN	Down to Zero	Penguatan KPAD untuk Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak melalui Program Down to Zero

17	AKI	Training Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa	Pembentukan dan Pengembangan Kapasitas Komunitas SKPB terkait Isu Kepemudaan dan Anak
18	IUWASH	Peningkatan Akses Air Limbah Domestik dan Pembangunan IPAL	• Peningkatan Akses Air Limbah Domestik di Kelurahan Tebet Timur • Pendampingan Pembangunan IPAL Komunal di 10 Lokasi di DKI Jakarta
19	Instan.id	Riset Ekonomi dan Sosial	Riset Brand Awareness Brand OK OCE
20	PRAKARSA	Riset Ekonomi dan Sosial	Riset Terkait Over Indebtedness

Inovasi Daerah untuk keberlanjutan SDA, Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Penurunan Risiko Bencana

DKI Jakarta memiliki jumlah inovasi daerah yang cukup tinggi dan terus meningkat, dari 134 inovasi pada tahun 2019 hingga 349 inovasi pada tahun 2021. Pemerintah daerah dapat saling bekerja sama sehingga jumlah inovasi akan semakin meningkat dan kebijakan yang dikeluarkan daerah dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Tabel 4-36 Jumlah Inovasi Daerah

Tahun	Jumlah Inovasi Daerah	Penilaian Inovasi Daerah (Kemendagri)
2019	134	Sangat Inovatif
2020	170	Sangat Inovatif
2021	349	Inovatif

Kolaborasi Pemenuhan Sarana Prasarana Perkotaan

Dalam pemenuhan sarana perkotaan, Pemerintah DKI Jakarta telah berkolaborasi dengan berbagai organisasi sebagaimana dirincikan pada tabel di bawah.

Tabel 4-37 Kolaborasi Pemenuhan Sarana Prasana

No	Organisasi	Program	Kegiatan
1	Tzu Chi	Berbenah Kampung Kamal Muara	• Melakukan Renovasi dan perbaikan Rumah dilingkungan Padat, kumuh, miskin
2	ACT	Global Wakaf Corporation	• Warung Wakaf • Mobil Sosial Rescue (Ambulan Pre-hospital)
3	IKAN	MRT Transportasi Publik dan Contoh Perubahan Tingkah Laku	• Promosi MRT langsung dan tidak langsung serta sosialisasi perubahan tingkah laku ditransportasi publik
4	PAM Jaya	Penyediaan Akses Air Minum Berkualitas bagi Warga Jakarta	• Pembangunan dan penyediaan fasilitas sebagai akses air minum berkualitas bagi warga Jakarta
5	IUWASH	Peningkatan Akses Air Limbah Domestik dan Pembangunan IPAL	• Peningkatan Akses Air Limbah Domestik di Kelurahan Tebet Timur • Pendampingan Pembangunan IPAL Komunal di 10 Lokasi di DKI Jakarta

Pemenuhan infrastruktur perkotaan (transportasi publik) (TPB 11)

Berdasarkan data yang diperoleh, persentase penduduk yang melakukan pergerakan dengan transportasi umum cenderung meningkat (Tahun 2018 – 2019) dan mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan adanya Pandemi Covid-19, dimana Pemerintah DKI Jakarta membatasi operasional transportasi umum selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi pada penurunan persentase penggunaan transportasi publik. Setelah tahun 2020, persentase penggunaan transportasi publik berangsur-angsur mengalami peningkatan.

Tabel 4-38 Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (*public transportation modal share)*

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
2018	20	15
2019	22	21.7
2020	25	8.2
2021	28	14.76
2022	30	18.45

Berdasarkan TPB 11.2.1 (b), DKI Jakarta telah memiliki 3 sistem angkutan rel yang dikembangkan yaitu KRL, MRT, dan LRT.

Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau (TPB 11)

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat seringkali tidak diiringi dengan pertumbuhan penyediaan perumahan bagi masyarakat. Di lain sisi, faktor finansial juga mempengaruhi daya beli dan keputusan masyarakat untuk memiliki sebuah rumah. Sejalan dengan permasalahan tersebut, pemerintah telah mengatur dan memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat. Hal ini merupakan wujud implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 11 poin 1, yaitu memastikan tersedianya akses terhadap penyediaan perumahan yang cukup, aman, dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan dasar (layak huni) selambatnya pada tahun 2029.

Berdasarkan data yang diperoleh, proporsi rumah tangga yang memiliki hunian layak huni dan terjangkau di DKI Jakarta pada tahun 2021 hanya sebesar 40% dan pada 2022 menurun menjadi 36,23%. Artinya, sebanyak ± 60% rumah tangga di DKI Jakarta tidak memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.

Tabel 4-39. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Tahun	Proporsi Rumah Tangga
2019	34,25
2020	33,18
2021	40
2022	36,23

Kriteria hunian layak dan terjangkau di atas berdasarkan BPS yaitu:

1. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m^2 per kapita (*sufficient living space*)
2. Memiliki akses terhadap air minum layak
3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak
4. Ketahanan bangunan (*durable housing*) - yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah

PENGEMBANGAN IPTEK UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Sistem Informasi Berbasis Elektronik

Berdasarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (untuk kemudian disingkat SPBE), domain dan aspek penilaian evaluasi SPBE dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4-40. Domain dan Aspek Penilaian Evaluasi SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 – Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 – Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 – Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Berdasarkan aspek tersebut, nilai SPBE DKI jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4-41 Nilai SPBE DKI Jakarta

Tahun	SPBE DKI Jakarta	Predikat
2021	3,47	Baik
2022	3,67	Sangat Baik

Sumber: KM PAN RB

Melalui hasil pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan Kementerian PAN RB, hasil evaluasi SPBE DKI Jakarta berada pada indeks 3,47 (predikat baik) pada tahun 2021 dan 3,67 (predikat sangat baik) pada tahun 2022.

BAB 5

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR PADA OPD

BAB 5 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA OPD

Dalam RAD TPB 2017 – 2022, telah diidentifikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kunci untuk masing-masing indikator dalam TPB. OPD ini disesuaikan dengan capaian indikator yang terkait. Oleh karenanya, penting untuk melihat seberapa besar alokasi anggaran dan realisasinya dalam satu OPD. Meskipun, alokasi anggaran tersebut tidak sepenuhnya diperuntukkan untuk indikator TPB.

Seyogyanya, penandaan anggaran untuk setiap indikator TPB dan atau TPB secara umum dilakukan agar alokasi penganggaran eksisting dapat tergambar. Namun demikian, penandaan secara rinci ini harus melihat sub kegiatan dari program-program RPJMD dan siapa OPD pelaksananya. Dalam laporan KLHS ini, penggambaran alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing OPD untuk capaian indikator TPB dilakukan secara umum. Dengan maksud bahwa, potensi penganggaran untuk perbaikan capaian TPB didapat dari OPD mana saja. Gambar di bawah ini menunjukkan anggaran dan realisasi tahun 2018 hingga 2022 untuk OPD kunci dan status capaian indikatornya. Dengan catatan bahwa grafik di bawah ini belum mencakup semua OPD di DKI Jakarta, dan hanya 30 OPD yang menjadi OPD kunci dalam pencapaian indikator TPB berdasarkan dokumen RAD TPB.

Pada Gambar di bawah ini , OPD yang memiliki indikator paling banyak diampu oleh Dinas Kesehatan dengan total 39 indikator mencakup 10 indikator sudah tercapai, 8 indikator akan tercapai/membaik, 13 indikator perlu perhatian khusus dan 8 indikator tidak ada data. Seiring dengan banyaknya jumlah indikator tersebut, alokasi anggaran APBD dan Realisasinya pada tahun 2022 pada Dinas Kesehatan merupakan yang terbesar dengan total anggaran APBD 7,8 Triliun rupiah . Anggaran APBD Dinas Kesehatan perlu diidentifikasi lebih lanjut untuk melihat seberapa besar kontribusinya dalam pencapaian TPB.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk memiliki indikator paling banyak diampu kedua setelah Dinas Kesehatan dengan 30 indikator. Dari sejumlah indikator tersebut, didominasi oleh indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target. Secara lebih rinci, capaian per OPD dapat dilihat pada tabel 5-1.

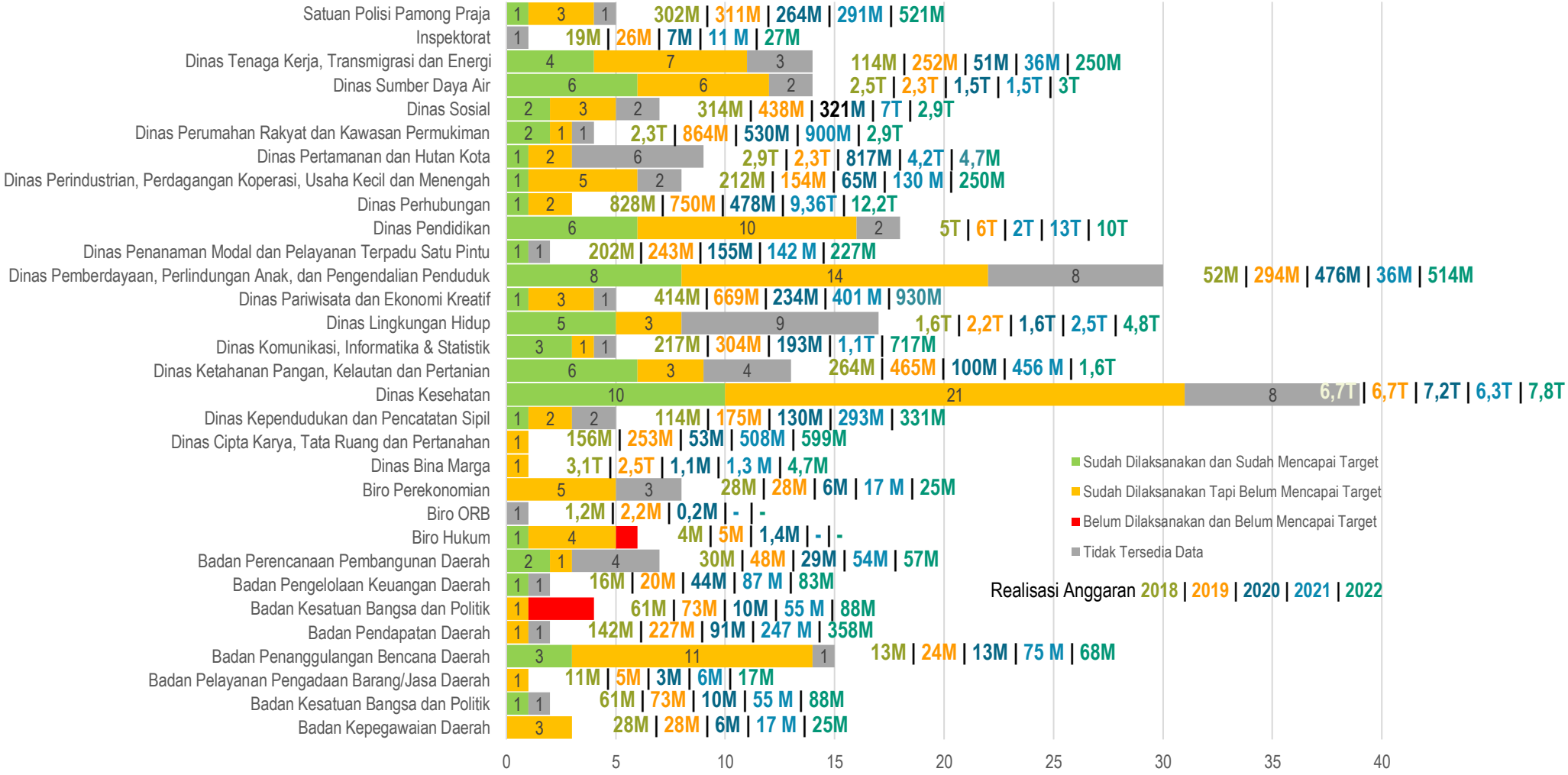

Gambar 5-1 Capaian Indikator TPB Tiap OPD dan Realisasi Anggaran 2018-2022

Identifikasi lebih lanjut dilakukan untuk melihat kontribusi OPD pada Target TPB sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 5-1 Capaian dan Kontribusi OPD pada Target TPB

OPD	Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target	Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target	Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Tidak Tersedia Data	Total Indikator	Target TPB Terkait
Badan Kepegawaian Daerah		3			3	17.19
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1			1	2	3.5, 10.3, 16.7
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah		1			1	16.6
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	11		1	15	1.5, 11.5, 11.b, 13.1
Badan Pendapatan Daerah		1		1	2	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1	3		4	3.5, 10.3, 16.7
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1			1	2	16.6, 17.1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	1		4	7	6.5, 9.5
Biro Hukum	1	4	1		6	10.3,16.10
Biro ORB				1	1	16.6
Biro Perekonomian		5		3	8	8.1, 8.2, 8.10, 10.1, 10.2, 17.4
Dinas Bina Marga		1			1	9.1
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan		1			1	11.4
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	2		2	5	1.4, 16.9, 17.19
Dinas Kesehatan	10	21		8	39	1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.a, 3.b, 3.c, 6.2
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	6	3		4	13	2.1, 2.2, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6, 14.b, 14.c, 15.5
Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik	3	1		1	5	9.C, 16.10, 17.8
Dinas Lingkungan Hidup	5	3		9	17	9.4, 11.6, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 13.2, 15.7,15.9, 15.c
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	3		1	5	8.9
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	8	14		8	30	1.4, 3.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 10.3, 11.7, 16.2, 16.7, 16.10
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1			1	2	17.17
Dinas Pendidikan	6	10		2	18	1.4, 1.a,4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.a, 4.c, 5.3
Dinas Perhubungan	1	2			3	9.1, 11.2

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	5		2	8	7.1, 8.3, 8.10, 9.2, 9.3 17.11
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	1	2		6	9	11,7, 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 15.8
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	1		1	4	1.4, 11.1
Dinas Sosial	2	3		2	7	1.2, 1.3, 1.5, 1.a, 10.1, 10.4
Dinas Sumber Daya Air	6	6		2	14	1.4, 6.1-6.6
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	4	7		3	14	1.3, 1.4, 7.1, 7.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 10.4
Inspektorat				1	1	16
Satuan Polisi Pamong Praja	1	3		1	5	3.5, 16.1

Sumber: SDGs DKI Jakarta dan RAD TPB DKI Jakarta 2017-2022

BAB 6

ALTERNATIF DAN REKOMENDASI

- Perumusan Alternatif Skenario
- Rekomendasi
- Usulan Integrasi

BAB 6 ALTERNATIF DAN REKOMENDASI

Hasil perumusan isu dan pengkajian pengaruh pada KLHS selanjutnya diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagai upaya peningkatan kualitas rencana Pembangunan Daerah melalui perumusan rekomendasi. Alternatif skenario disusun sebagai upaya dalam menangani isu strategis yang selanjutnya dirumuskan melalui rekomendasi KLHS. Rekomendasi KLHS akan diintegrasikan ke dalam RPJMD merupakan usulan konkret yang dapat menjawab isu dan permasalahan pembangunan daerah.

6.1 Perumusan Alternatif Skenario

Penyusunan Alternatif Skenario dilakukan dengan melalukan analisis proyeksi capaian secara *Business as usual* (BAU), persandingan dengan target daerah dan/atau nasional pada akhir masa perencanaan (2029) dan analisis skenario moderat serta akselerasi yang dapat dipilih oleh penyusun KRP sebagai pertimbangan perumusan target pembangunan 2029. Pada setiap skenario target yang disusun, akan dilengkapi dengan sejumlah arahan alternatif yang dapat digunakan guna mendukung pencapaian. Pilihan alternatif yang disusun menekankan pada fokus kegiatan pada masing-masing usulan program sebagai rekomendasi KLHS.

Pada KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025 – 2029, skenario tanpa upaya tambahan ditunjukan dengan skenario BAU. Sementara skenario dengan upaya tambahan ditunjukan dengan skenario moderate dan akselerasi yang tercermin dalam rumusan alternatif. Upaya tambahan tersebut disusun dengan memperhatikan beberapa hal yaitu: a) Pencapaian target tanpa upaya tambahan, b) Potensi, daya saing, dan inovasi daerah, c) Daya dukung dan daya tampung daerah, dan d) Pertimbangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sejumlah pertimbangan digunakan dalam analisis proyeksi. Salah satunya adalah pertimbangan peningkatan penduduk hingga akhir masa perencanaan. Berdasarkan data *time series* penduduk, rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 0,57%. Dengan pendekatan perhitungan geometri, maka diproyeksikan pada tahun 2029, jumlah penduduk di DKI Jakarta mencapai 11.116.758 jiwa.

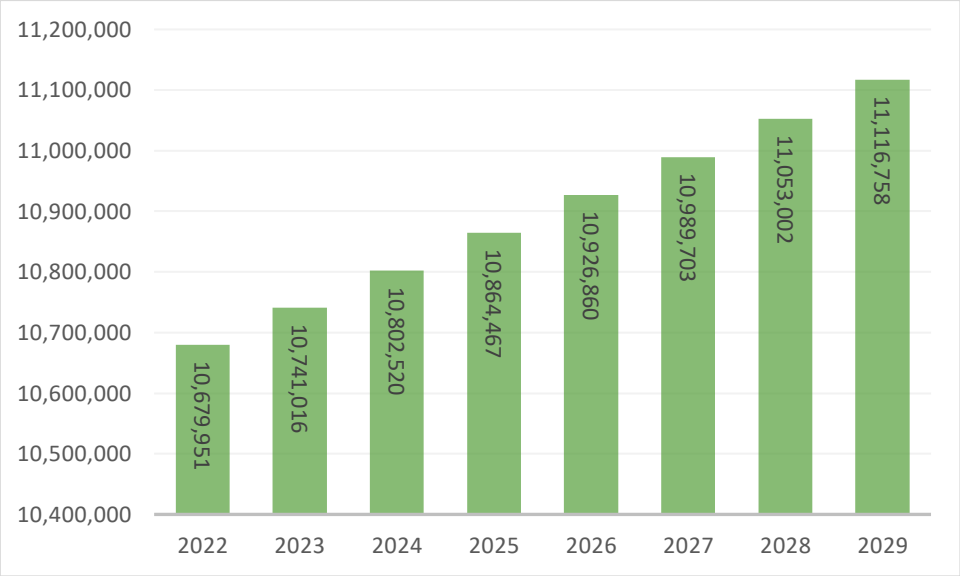

Gambar 6-1 Proyeksi Penduduk Sampai Dengan Tahun 2029
Sumber: Hasil Analisa 2023

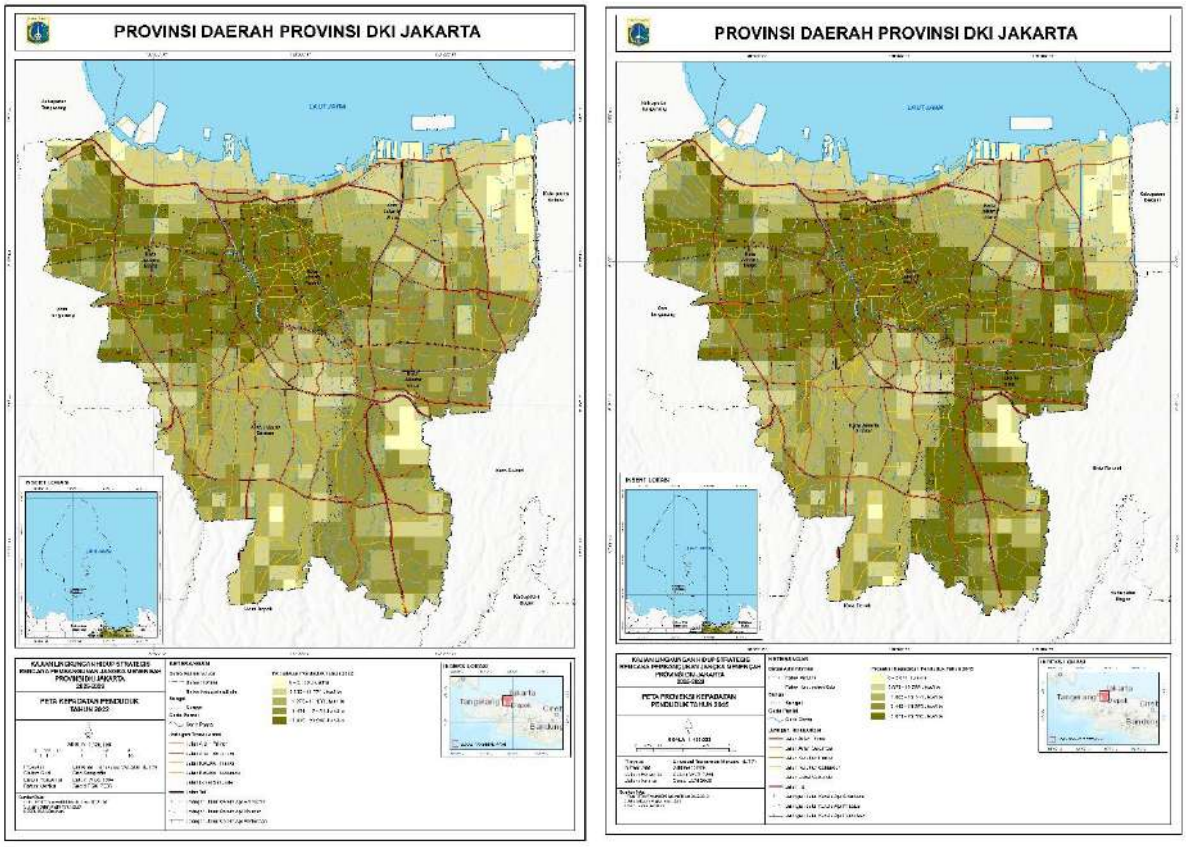

Gambar 6-2. Kondisi Distribusi Tekanan Penduduk DKI Jakarta Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2029

Sumber: Hasil Analisa 2023

Analisis proyeksi dilakukan dengan melihat indikator-indikator dalam kerangka kajian untuk masing-masing isu. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kesinambungan antara permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan melalui perumusan alternatif. Berikut ini merupakan analisis proyeksi beserta alternatif arahan dari masing-masing isu strategis.

6.1.1 Tingginya Risiko Bencana

Risiko bencana di Provinsi DKI Jakarta yang terdapat dalam dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan risiko dari nilai indeks >100 pada tahun 2015 menjadi nilai indeks 62,58 pada tahun 2022. Penurunan indeks risiko bencana ini disumbangkan dari peningkatan nilai indeks Kapasitas Daerah yang setiap tahun terus diperkuat. Berdasarkan data IRBI berseri waktu dari tahun 2015 - 2022 maka dengan menjaga konsistensi nilai peningkatan kapasitas daerah pada tahun-tahun berikutnya, yang disebut sebagai Skenario BaU maka pada tahun 2029 dapat diproyeksikan bahwa nilai indeks risiko bencana akan terus menurun menuju nilai indeks 52,08.

Indeks risiko bencana ini dapat lebih diturunkan apabila terdapat upaya tambahan untuk meningkatkan kapasitas daerah dengan lebih cepat disertai anggaran yang semakin membaik. Asumsi yang digunakan dalam membuat skenario yaitu untuk skenario akselerasi, diharapkan pada tahun 2045 menuju risiko rendah. Sehingga untuk menuju ke arah tersebut, diharapkan dapat mencapai angka IRBI 49,62 pada tahun 2029. Sementara, skenario moderate diusulkan untuk menuju penurunan risiko, namun dilakukan antara proyeksi BAU dan skenario moderate yaitu di angka 47,46 pada 2029. Secara lebih jelas, skenario ini digambarkan sebagai berikut.

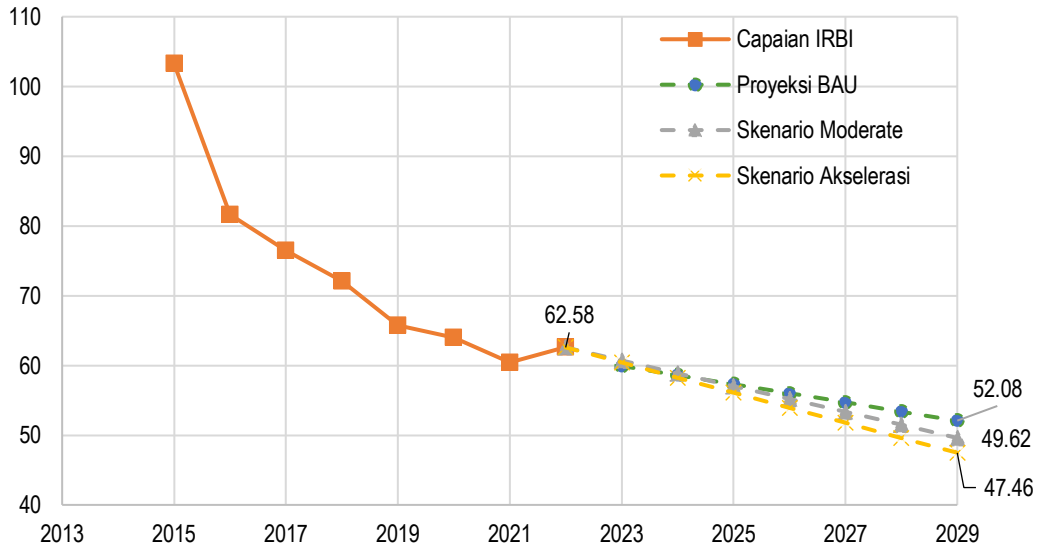

Gambar 6-2 Proyeksi IRBI Berdasarkan Skenario BAU, Moderate, dan Akseleterasi

Tabel 6-1 Proyeksi IRBI

Tahun	Proyeksi BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi
2025	57.31	57.03	56.10
2026	56.00	55.17	53.94
2027	54.70	53.32	51.78
2028	53.39	51.47	49.62
2029	52.08	49.62	47.46

Indikator lain yang menjadi perhatian adalah indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah. Indeks tersebut menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2018 – 2022. Berdasarkan tren tersebut, proyeksi BaU pada tahun 2029 mencapai 8,37. Jika DKI Jakarta menggunakan upaya tambahan, proyeksi tentunya menunjukkan tren meningkat sebagaimana terlihat pada skenario moderate dengan pertimbangan 5% lebih tinggi dari proyeksi BaU. Sedangkan skenario akselerasi dilakukan dengan pertimbangan 10% lebih tinggi dari proyeksi BaU. Proyeksi ini dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

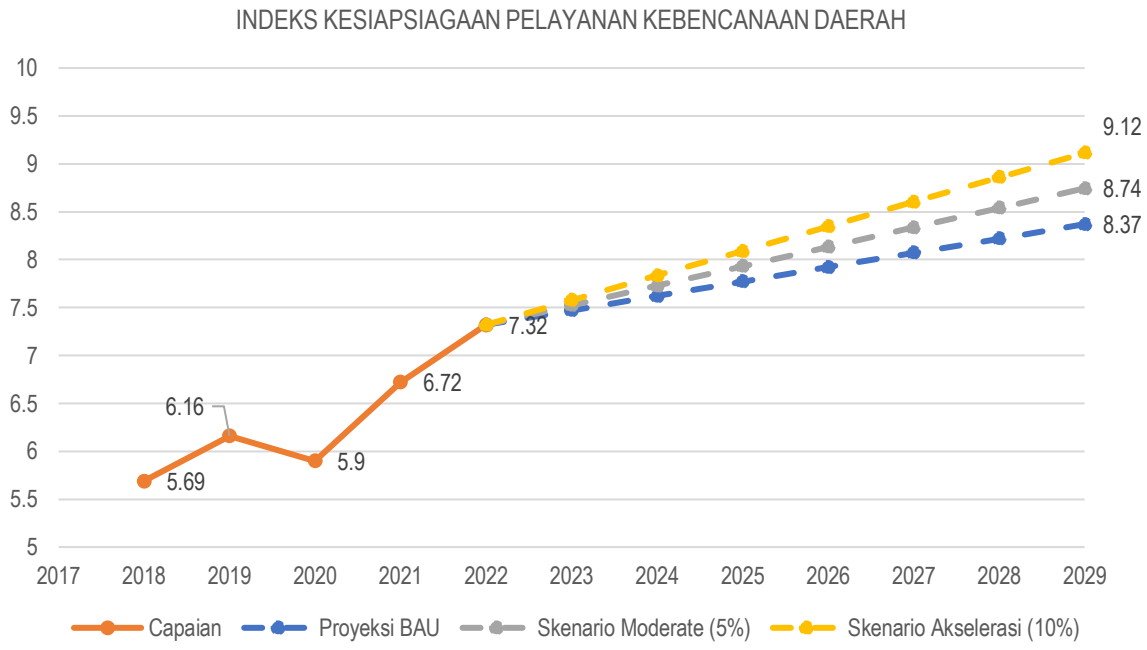

Gambar 6-3 Proyeksi Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah Berdasarkan Skenario BAU, Moderate, dan Akselerasi

Tabel 6-2 Proyeksi Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah

Tahun	Proyeksi BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi
2025	7.77	7.93	8.09
2026	7.92	8.13	8.35
2027	8.07	8.34	8.60
2028	8.22	8.54	8.86
2029	8.37	8.74	9.12

Sistem peringatan dini merupakan salah satu elemen yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Berdasarkan tren eksisting, proyeksi BaU menunjukkan tren yang meningkat hingga 31 pada 2029. Jika menggunakan upaya tambahan berupa skenario moderate dengan peningkatan 5% dari BaU, jumlah sistem peringatan dini mencapai 32. Sedangkan dengan menggunakan skenario akselerasi dengan peningkatan 10%, jumlah sistem peringatan dini mencapai 34. Upaya tambahan ini perlu dilakukan mengingat dengan adanya peringatan dini bencana, masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban serta mengurangi dampak bencana tersebut. Proyeksi ini dapat dilihat pada gambar berikut.

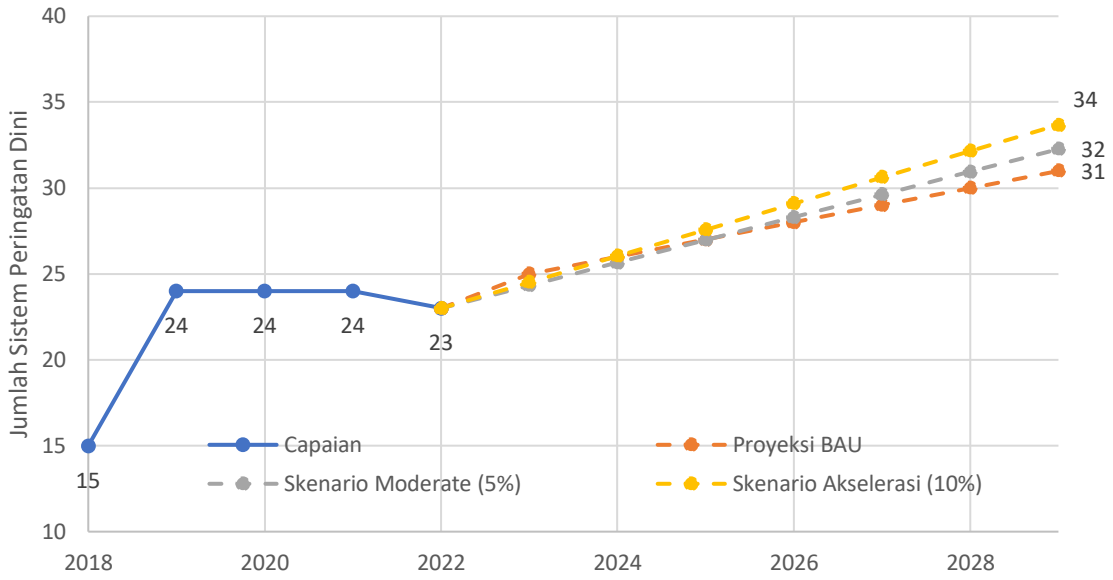

Gambar 6-4 Proyeksi Jumlah Sistem Peringatan Dini Berdasarkan Skenario BAU, Moderate, dan Akselerasi
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Disisi lain, kerugian bencana yang dialami DKI Jakarta menunjukkan tren yang meningkat pada tahun 2029 yaitu mencapai 265 miliar. Kerugian ini dapat dikurangi jika terdapat upaya tambahan sehingga menjadi 241 miliar dengan skenario moderate (penurunan 10%), serta 229 miliar dengan skenario akselerasi (penurunan 15%). Proyeksi ini dapat dilihat pada gambar berikut.

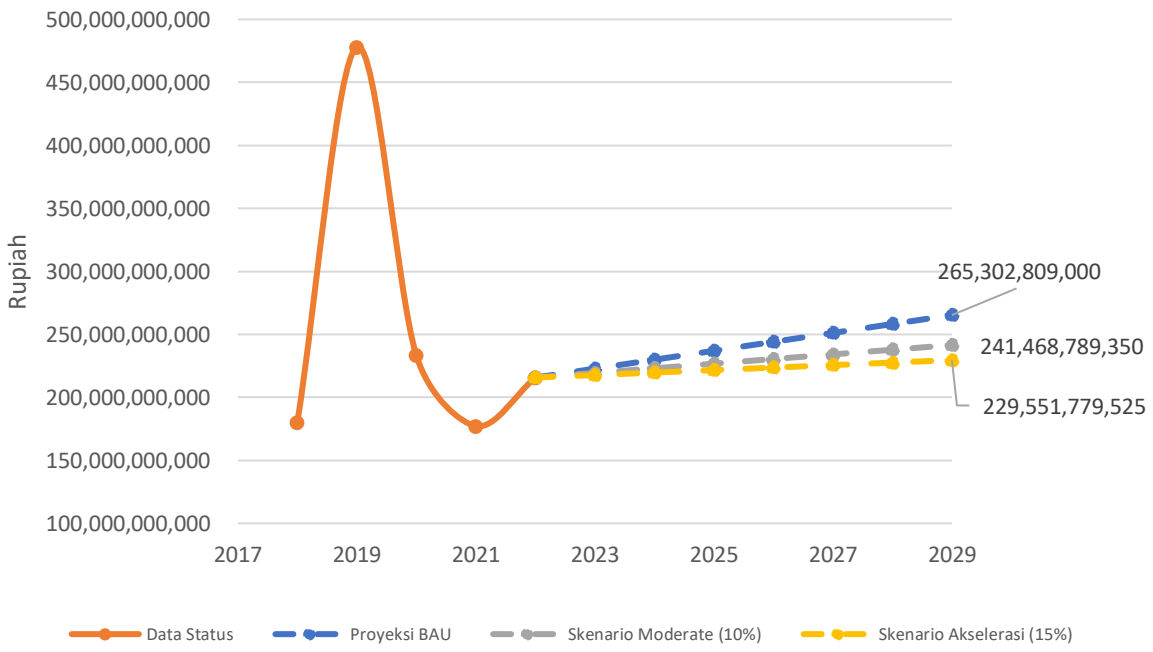

Gambar 6-5 Proyeksi Kerugian Bencana Berdasarkan Skenario BAU, Moderate, dan Akselerasi
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan analisis di atas, alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam RPJMD DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut.

Alternatif	Isu Tingginya Risiko Bencana
Moderate	**Akselerasi**
S1.1. Penyusunan rencana mitigasi bencana alam dan non alam yang terpadu S1.2. Kolaborasi dan koordinasi multi pihak, multi sector, dan lintas wilayah S1.3. Peningkatan sarana prasarana serta logistik penanggulangan kebencanaan S1.4. Peningkatan kapasitas masyarakat menuju masyarakat yang adaptif dan berketahanan S1.5. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaran penanggulangan bencana	S1.6. Pemanfaatan teknologi informasi untuk peringatan dini bencana yang terpadu S1.7. Pengembangan teknologi dan inovasi untuk sistem pemulihan bencana yang terpadu

6.1.2 Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Berdasarkan penjelasan kondisi D3TLH air untuk provinsi DKI Jakarta tahun 2023 pada paragraf sebelumnya, kemudian analisa dilanjutkan dengan melihat kondisi D3TLH untuk 5 tahun kedepan. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan jangka waktu perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi DKI Jakarta. Proses analisis akan menggunakan analisis proyeksi untuk melihat kondisi D3TLH air DKI Jakarta 5 tahun mendatang hingga tahun 2029. Proses analisis dilakukan berdasarkan perubahan jumlah penduduk antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2029 dengan menggunakan perhitungan proyeksi geometri sebagaimana terdapat pada Gambar 6-1.

Proses analisis kemudian dilanjutkan dengan melakukan proyeksi terhadap ketersediaan Air di DKI Jakarta berdasarkan wilayah sungai (WS) Cidanau-Ciujung-Cidurian dan Ciliwung-Cisadane yang terbagi menjadi beberapa WD[8]. Secara total saat ini ketersediaan air diwilayah DKI Jakarta mencapai **440,941,300.46** m^3/tahun. Berdasarkan ketersediaan air saat ini kemudian dilakukan analisa proyeksi secara linear untuk melihat kondisi ketersediaan air pada tahun 2029.

[8] Data Ketersediaan Air KEMEN PUPR Tahun 2016 berdasarkan wilayah sungai

Gambar 6-6 Grafik Perbandingan Ketersediaan Air DKI Jakarta Tahun 2022 - 2029
Sumber: Hasil Analisa 2023

Hasil analisa proyeksi jumlah penduduk dan ketersediaan air DKI Jakarta, kemudian digunakan untuk melihat bagaimana kondisi D3TLH air pada tahun 2029. Analisa proyeksi dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, dan ketersediaan air di DKI Jakarta. Berikut hasil proyeksi D3TLH air untuk DKI Jakarta di tahun 2029:

Tabel 6-3 Proyeksi D3TLH Air DKI Jakarta 2029

Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	Volume (m3/Tahun)					Luas D3TLH Air (Air)		Indikasi Status D3TLH Air
	Ketersediaan Air Jakarta	Kebutuhan Air			Selisih	Belum Terlampaui	Terlampaui	
		Domestik	Lahan	Kebutuhan Total				
Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu	4,163,057.32	2,396,044.80	1,109,769.45	3,505,814.25	657,243.07	658.91	419.13	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Barat	49033720.7	229,399,430.40	12,756,910.02	242,156,340.42	-193,122,619.72	79.93	12,428.80	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Pusat	34183620.49	101,017,152.00	172,052.54	101,189,204.54	-67,005,584.04		4,781.08	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Selatan	78997432.6	213,712,905.60	3,629,945.37	217,342,850.97	-138,345,418.37		14,831.06	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Timur	149615054.8	315,252,691.20	20,180,742.05	335,433,433.25	-185,818,378.50	291.62	18,027.02	Terlampaui
Kota Administratif Jakarta Utara	124948414.6	160,352,092.80	38,546,111.31	198,898,204.11	-73,949,789.52	1,420.35	13,481.21	Terlampaui
Total	**440,941,300.46**	**1,022,130,316.80**	**76,395,530.74**	**1,098,525,847.55**	**-657,584,547.08**	**2,450.81**	**63,968.30**	

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa luas area yang terlampaui memiliki luasan sebesar 63.968,30 Ha dan area yang belum terlampaui sebesar 2.450.81 Ha. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2029 wilayah Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat secara keseluruhan telah terlampaui daya dukung dan daya tampung untuk penyedia air. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Utara, masih memiliki wilayah sebesar 1.420.35 Ha untuk wilayah yang masih belum terlampaui atau paling besar diantara wilayah kota/kabupaten lain di DKI Jakarta.

Pada tahun 2029, kebutuhan air secara total juga mengalami kenaikan yang dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk, dengan total kebutuhan sekitar 1.098.525.847.55 m^3/tahun yang jika dibandingkan dengan kebutuhan ditahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 61,874,755.20 m^3/tahun. Secara spasial distribusi status D3TLH air untuk DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

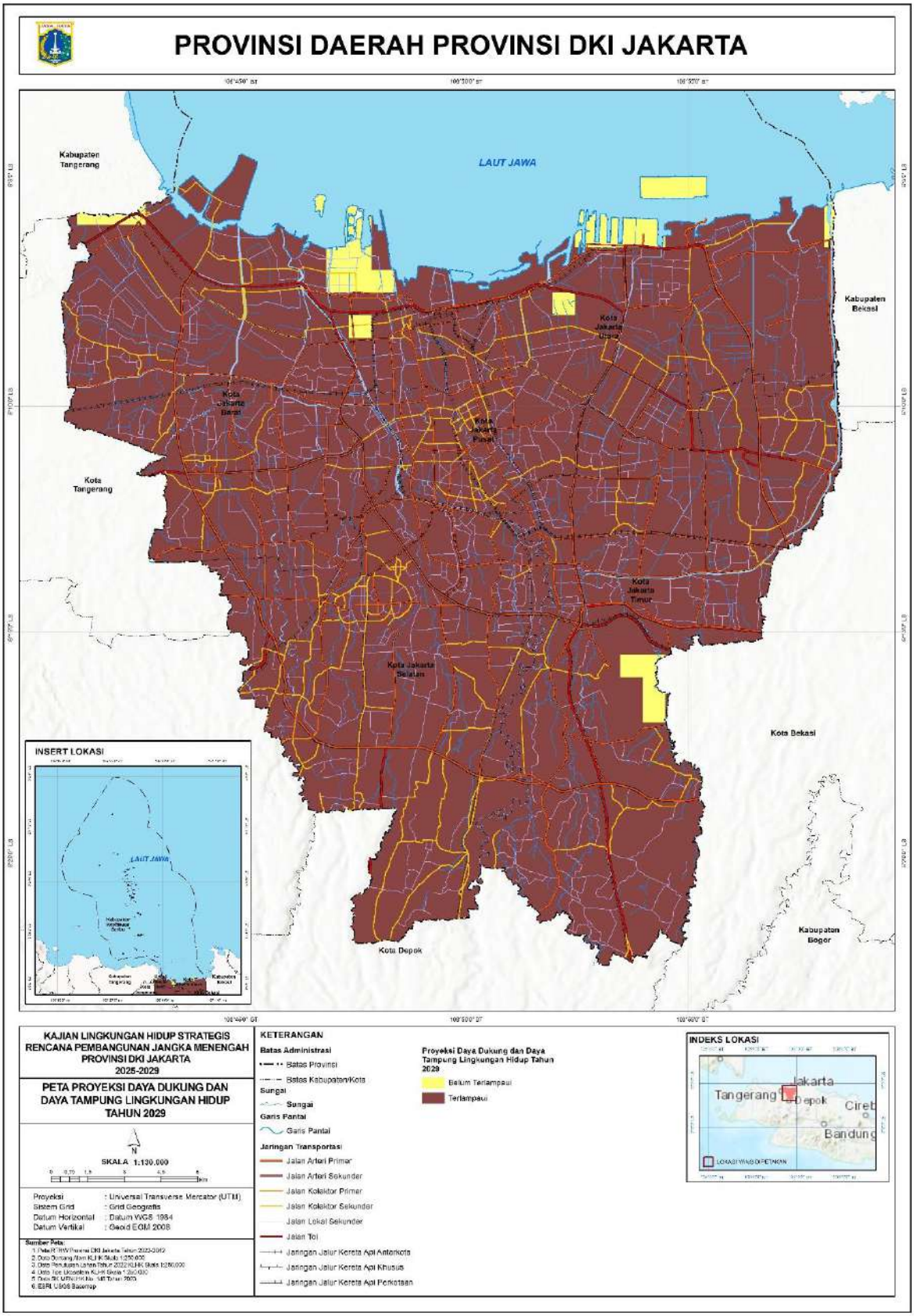

Gambar 6-7 Proyeksi Kondisi D3TLH Air untuk Provinsi DKI Jakarta 2029

Sumber: Hasil Analisa 2023

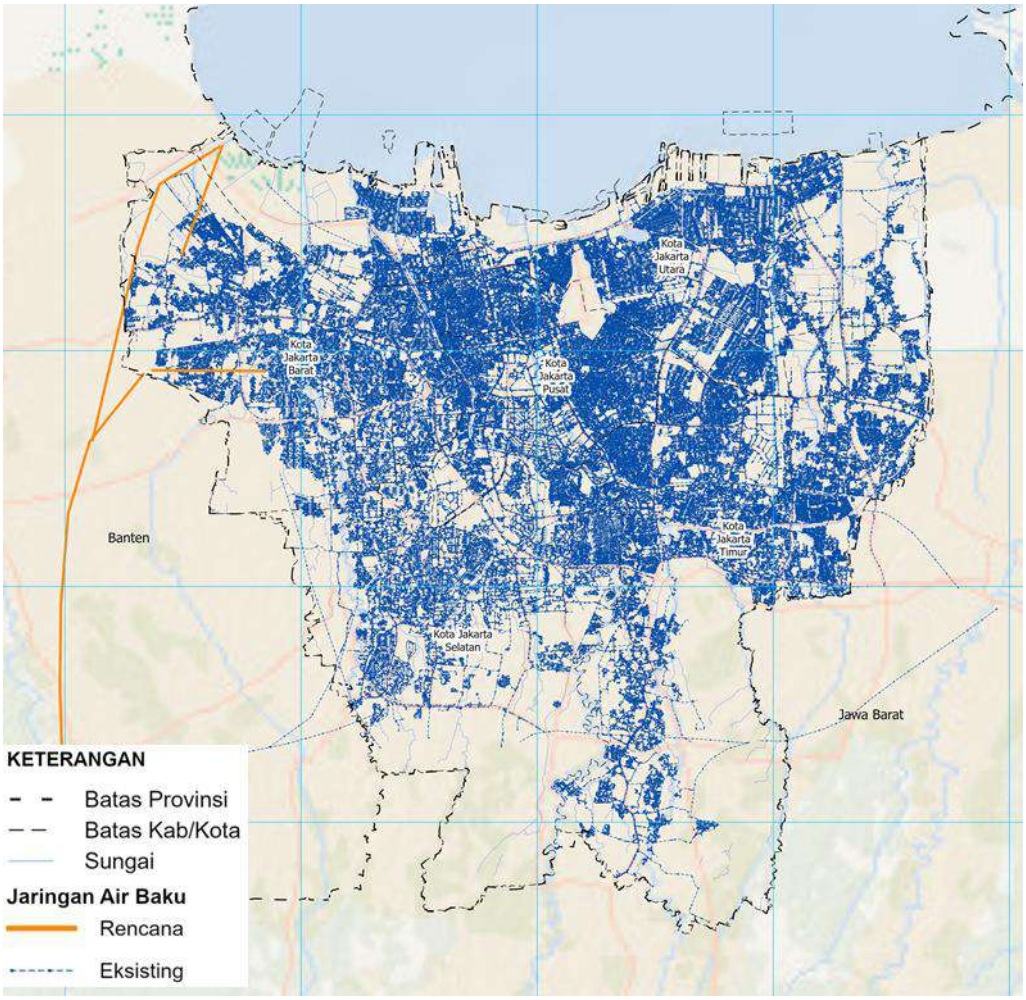

Gambar 6-8 Rencana Jaringan Air Baku
Sumber: RTRW DKI Jakarta Tahun 2022-2042

Tabel 6-4 Target Pemenuhan Infrastruktur Perkotaan

Indikator	Target	Sumber
Pemenuhan infrastruktur Perkotaan	Perwujudan lingkungan yang mandiri melalui pemenuhan standar pelayanan minimum Jakarta untuk menciptakan kawasan perumahan yang dilengkapi dengan utilitas Dasar serta Fasilitas Sosial dan Umum	RTRW DKI JAKARTA Tahun 2022 - 2042
	Pemenuhan Jaringan Air meliputi Pembangunan unit Air Baku baik IPA dan SPAM. Target Pembangunan SPAM berlokasi di 16 dan IPA berlokasi di 11 titik termasuk Kepulauan Seribu	RAPERDA RTRW DKI JAKARTA Tahun 2022-2042 Pasal 46 ayat 3
	Pembangunan unit distribusi di seluruh wilayah yang belum terlayani 100%	RAPERDA RTRW DKI JAKARTA Tahun 2022-2042 Pasal 46 ayat 9
	• Target Pengembangan kawasan strategis ekonomi dilengkapi dengan utilitas dasar pengelolaan sampah, memiliki kerja sama antar daerah terkait pengelolaan sampah, penyediaan utilitas dasar seperti pengelolaan sampah dan air limbah, penyediaan air minum, jaringan telekomunikasi serta jaringan energi dan gas sampai dengan tahun 2042 • perwujudan pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui pengurangan 30% (tiga puluh persen) sampah di sumber dengan melakukan pembatasan, pemanfaatan dan pendauran ulang sampah	RTRW DKI JAKARTA Tahun 2022 - 2042
	100% wilayah Jakarta terlayani akses air bersih perpipaan disertai pelarangan/pembatasan penggunaan air bersih pada tahun 2042	RTRW DKI JAKARTA Tahun 2022 - 2042

Degradasi keanekaragaman hayati sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 4.4.2 memiliki kecenderungan yang semakin buruk. Ekosistem laut yang menjadi aset utama keanekaragaman hayati di DKI Jakarta yang terletak di Kepulauan Seribu menunjukan kondisi yang terancam akibat pemanfaatan ruang laut yang tidak berkelanjutan dan dampak dari pencemaran di darat yang bermuaran pada wilayah lautan. Berikut ini menunjukan kondisi dan kecenderungan eksisting keanekaragaman hayati dan skenario target perbaikan hingga tahun 2029 berdasarkan jenis ekosistemnya.

Jenis Ekosistem	Kondisi Eksisting/ kecenderungannya	Target 2029
1. Ekosistem Mangrove	Kecenderungan 2019 hingga 2022 menunjukan luasan mangrove yang semakin berkurang	• Peningkatan luasan tutupan mangrove • Perbaikan kondisi tutupan mangrove eksisting
2. Ekosistem Padang Lamun	Persentase area kerusakan semakin meningkat dalam kurun waktu 2019-2022	• Perbaikan area kerusakan padang lamun
3. Ekosistem Terumbu Karang	Kategori status kondisi terumbu karang 2019 menunjukan dominasi cukup baik hingga kurang baik.	Perbaikan kondisi terumbu karang

Berdasarkan analisis di atas, alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam RPJMD DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut.

Alternatif — **Isu Ancaman terhadap Keberlanjutan SDA**

Moderate

S2.1. Pemerataan infrastruktur perkotaan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi
S2.2. Peningkatan pengelolaan sampah melalui pemanfaatan teknologi
S2.3. Kerja sama antar wilayah dalam menjaga keberlanjutan SDA dan kualitas LH
S2.4. Penghematan pemanfaatan air melalui teknologi ramah lingkungan
S2.5. Perlindungan keberlanjutan sumber daya air melalui mekanisme konservasi tanah dan air
S2.6. Perlindungan kawasan ekosistem esensial dan keanekaragaman hayati

Akselerasi

S2.7 Percepatan pencapaian 100% air perpipaan dan moratorium pengambilan air tanah di seluruh wilayah
S2.8 Rehabilitasi dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau perkotaan sesuai dengan ketentuan 30% dari luas wilayah
S2.9 Pengembangan instrumen ekonomi lingkungan yang komprehensif dalam menjalankan kerja sama di wilayah fungsional

6.1.3 Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah

Dalam dokumen RPPLH 2022-2052 perlu ditargetkan kondisi lingkungan yang riil yang ingin dicapai. Dengan demikian IKLH ini digunakan sebagai indikator pencapaian dari keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Target peningkatan IKLH akan mencakup peningkatan kualitas udara, kualitas air dan kualitas tutupan lahan. Target yang dicapai menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta saat ini fokus untuk mengembalikan fungsi ekosistem sehingga dapat memberikan layanannya secara optimal. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi salah satu indikator Kinerja Pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Hasil baseline digunakan untuk melakukan estimasi pada tahun 2029 terhadap nilai IKLH, IKA, IKU, dan IKAL. Nilai proyeksi akan menunjukkan bagaimana kondisi nilai IKLH di DKI Jakarta pada tahun 2029 dengan skenario saat ini atau skenario *Business as Usual* (BAU). Hasil proyeksi menunjukkan bahwa kondisi IKLH di tahun 2029 memiliki nilai 51.59. Sementara berdasarkan laporan RPPLH tahun 2022 – 2052 menunjukkan target IKLH DKI Jakarta sampai dengan tahun 2052 mencapai 59.03.

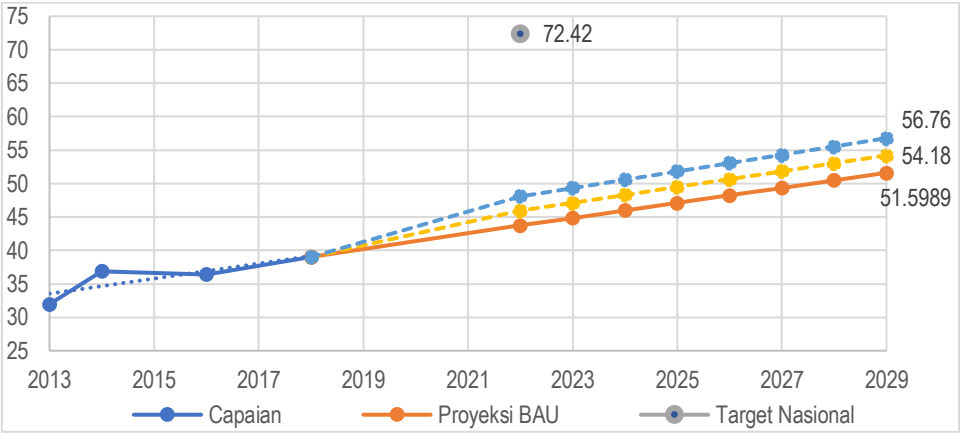

Gambar 6-9 Proyeksi Kondisi IKLH untuk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2029
Sumber: Hasil Analisa 2023

Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2029 dan menunjukkan nilai yang cukup rendah maka untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup maka ditentukanlah target moderate dan akselerasi untuk mencapai target yang lebih baik. Hasil target akselerasi menunjukkan pada tahun 2029, nilai IKLH DKI Jakarta mencapai 56,7 atau terjadi kenaikan 10% dari proyeksi BAU. Sedangkan untuk skenario moderate, terjadi penambahan 5% dari BAU dan menunjukkan angka 54.18. berikut hasil proyeksi skenario moderate dan akselerasi pada tabel di bawah ini.

Tabel 6-5 Target dan Proyeksi IKLH DKI Jakarta Sampai Dengan Tahun 2029

Tahun	Proyeksi BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi
2025	47.10	49.46	51.81
2026	48.22	50.64	53.05
2027	49.35	51.82	54.29
2028	50.47	53.00	55.52
2029	51.59	54.18	56.76

Proyeksi juga dilakukan untuk nilai IKA. Hasil proyeksi BAU pada tahun 2029 menunjukkan bahwa nilai IKA mencapai 42,63. hasil tersebut kemudian digunakan untuk melakukan proyeksi skenario moderate dan skenario akselerasi. Skenario moderate menunjukkan nilai 44,1, sedangkan untuk skenario akselerasi menunjukkan angka 46,49.

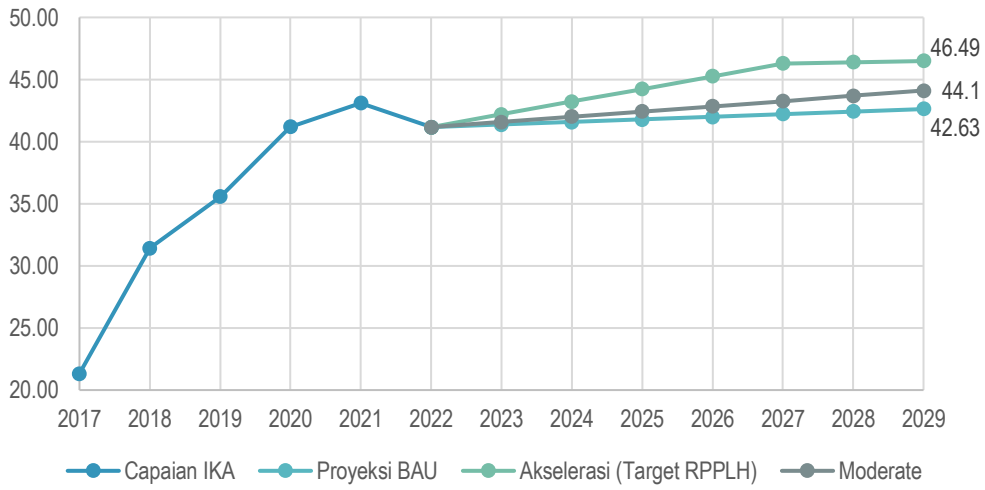

Gambar 6-10 Proyeksi Kondisi IKA Tahun 2029

Proyeksi juga dilakukan untuk nilai IKU. Hasil proyeksi BAU pada tahun 2029 menunjukkan bahwa nilai IKU mencapai 68.40. hasil tersebut kemudian digunakan untuk melakukan proyeksi skenario moderate dan skenario akselerasi (jika terdapat upaya tambahan). Skenario moderate menunjukkan nilai 71.82 atau terjadi penambahan 5% dibandingkan skenario BAU. Sedangkan untuk skenario akselerasi menunjukkan angka 75.24 atau terjadi penambahan 10% dibandingkan skenario BAU. Upaya perbaikan IKU ini dapat memfokuskan pada emisi sektor industri energi, manufaktur industri, dan transportasi. Hal ini didasarkan pada kajian Inventarisasi Emisi Polusi Udara DKI Jakarta 2020, dimana ketiga sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap beban emisi pencemar udara.

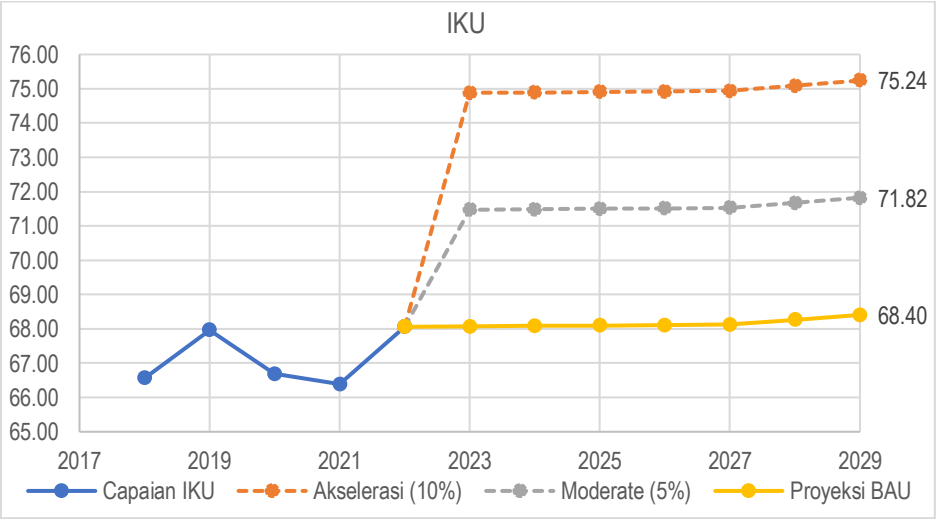

Gambar 6-11 Proyeksi Kondisi IKU Tahun 2029
Sumber: Hasil Analisa 2023

Tabel 6-6 Target dan Proyeksi IKU DKI Jakarta Sampai Dengan Tahun 2029

Tahun	Proyeksi BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi
2025	68.10	71.50	74.91
2026	68.11	71.51	74.92
2027	68.12	71.53	74.93
2028	68.26	71.67	75.09

2029	68.40	71.82	75.24

Selain itu, untuk melihat kondisi nilai IKLH dilakukan proyeksi untuk nilai IKTL. Nilai IKTL akan menggambarkan bagaimana kondisi tutupan lahan di DKI Jakarta. Hasil proyeksi BAU pada tahun 2029 menunjukkan bahwa nilai IKTL mencapai 24.96. Kemudian ditentukan skenario moderate dan akselerasi dengan menaikkan target sebesar 8% dan 14%. Skenario moderate menunjukkan nilai 27.05 sedangkan untuk skenario akselerasi menunjukkan angka 28.55 pada tahun 2029.

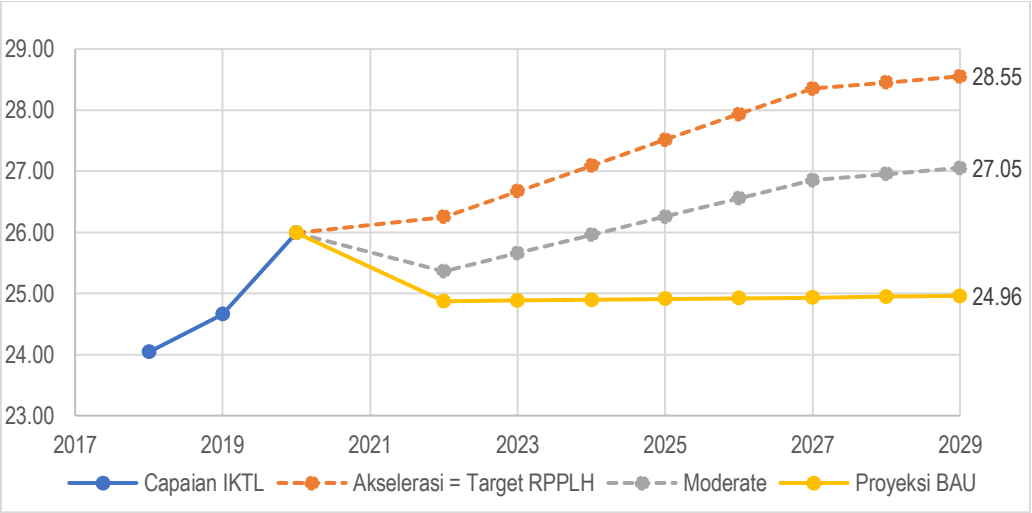

Gambar 6-12 Proyeksi Kondisi IKTL Tahun 2029
Sumber: Hasil Analisa 2023

Tabel 6-7 Target dan Proyeksi IKTL DKI Jakarta Sampai Dengan Tahun 2029

Tahun	Proyeksi BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi
2025	24.91	26.25	27.51
2026	24.92	26.55	27.93
2027	24.93	26.85	28.35
2028	24.94	26.95	28.45
2029	24.96	27.05	28.55

Sejalan dengan perbaikan kualitas lingkungan hidup, pengurangan emisi GRK dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim. Dalam peraturan tersebut, terdapat 2 (dua) target capaian yaitu mencapai skenario 30% reduksi dan skenario ambisius pengurangan 50% dari BAU pada tahun 2029. Angka reduksi ini dijadikan sebagai opsi dalam perumusan skenario alternatif. Berikut ini merupakan skenario moderate dan akselerasi untuk pengurangan emisi GRK.

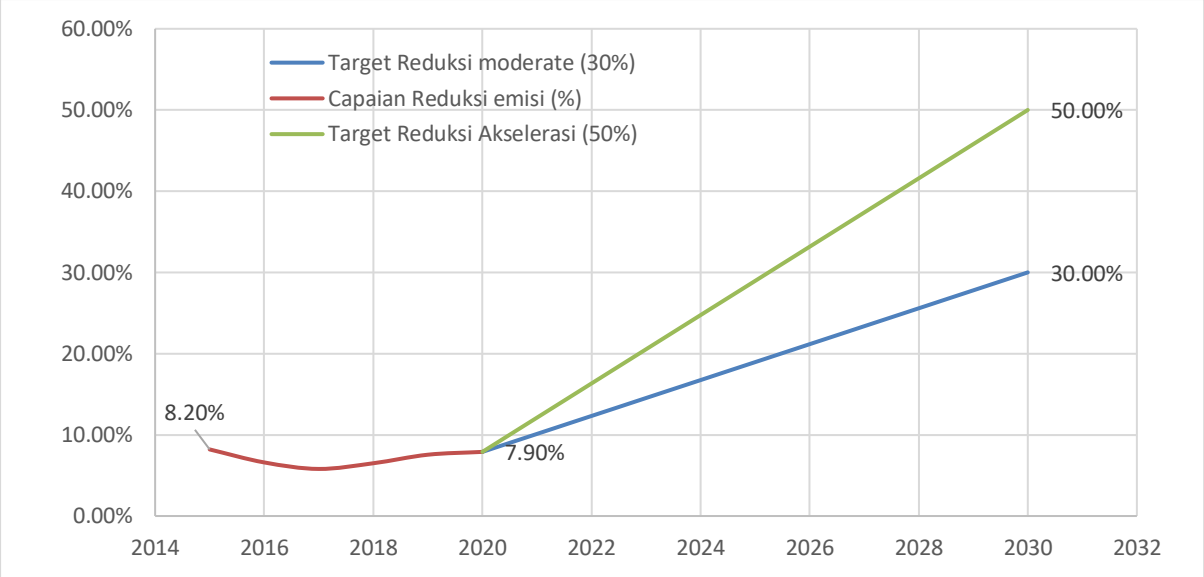

Gambar 6-13. Skenario Reduksi Emisi GRK
Sumber: Pergub 90/2021

Selain indikator di atas, dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, dilakukan kajian terhadap tren pengelolaan sampah – khususnya persentase sampah terolah di tempat pengolahan. Berdasarkan tren eksisting, persentase sampah terolah menunjukkan sedikit peningkatan sehingga pada 2029 mencapai 2,26%. Sedangkan skenario akselerasi mengacu pada target RPJPN yaitu persentase sampah terolah sebesar 90% pada tahun 2045, dan jika ditarik secara linier persentase sampah terolah pada tahun 2029 mencapai 28%.

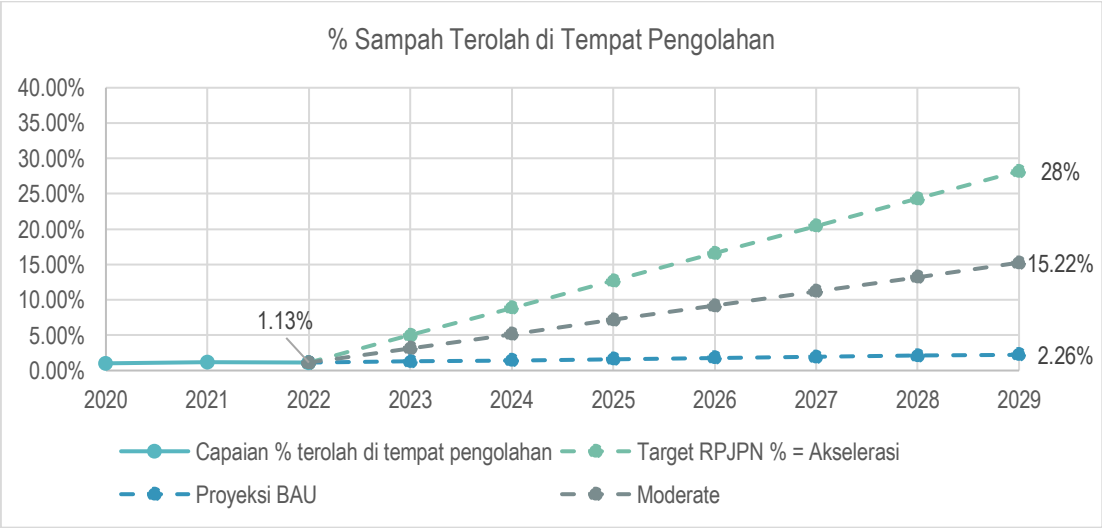

Gambar 6-14. Persentase Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan

Berdasarkan analisis di atas, alternatif dalam RPJMD DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut.

Alternatif	Isu Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah
Moderate	**Akselerasi**
S3.1. Penurunan emisi GRK melalui pengendalian sumber pengendalian sumber emisi utama (transportasi, industri, dan pembangkit listrik) S3.2. Diversifikasi sumber energi (tenaga surya) pada setiap sektor terutama sumber emisi utama S3.3. Pengembangan transportasi publik terintegrasi yang ramah lingkungan S3.3. Peningkatan fungsi ruang terbuka hijau melalui kesesuaian rancangan RTH termasuk penanaman vegetasi yang efektif menyerap emisi S3.4. Peningkatan daur ulang sampah melalui pemanfaatan teknologi dengan peran serta multi pihak	S3.5 Pengembangan inovasi dan teknologi ramah lingkungan untuk menekan emisi S3.6 Penerapan kebijakan infrastruktur hijau dalam pengembangan wilayah

6.1.4 Ketimpangan Sosial Ekonomi

Kajian tren dan proyeksi dilakukan untuk masing-masing indikator yaitu indeks pembangunan manusia, gini ratio, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

b. IPM

Pada indeks pembangunan manusia, kondisi eksisting DKI Jakarta menunjukkan tren yang positif sehingga proyeksi BaU terus meningkat hingga 84,31 pada 2029.

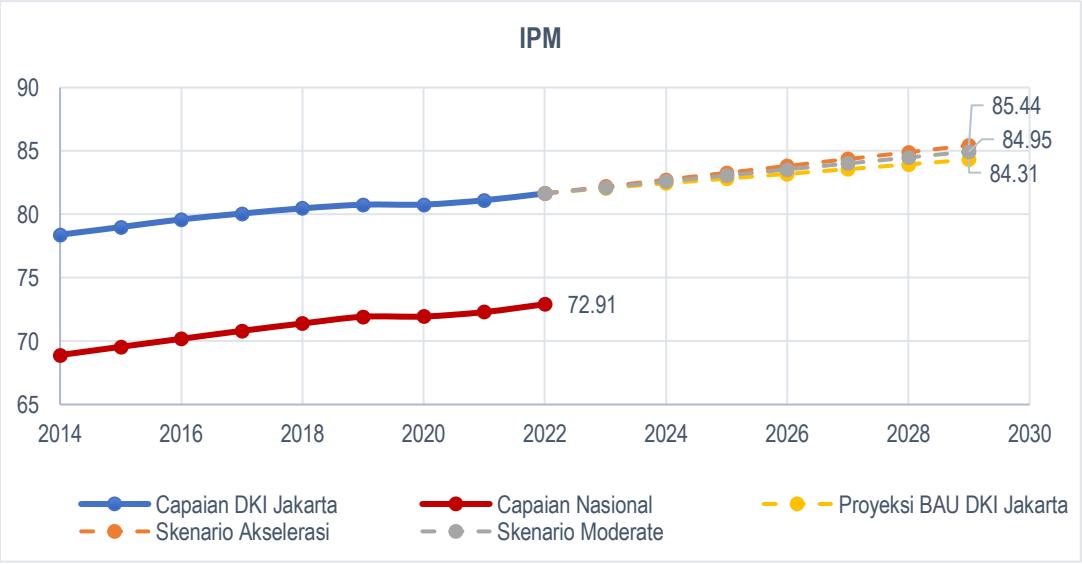

Gambar 6-15 Proyeksi IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2029

Selain skenario BaU, dirancang skenario akselerasi dan moderate yang mengacu pada capaian peringkat IPM nomor 10 dan 20 dunia pada tahun 2021, yaitu Netherland dan Korea Selatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, capaian IPM pada tahun 2029 dengan skenario akselerasi sebesar 85,44 dan skenario moderate sebesar 84,95.

Tabel 6-8 Proyeksi IPM Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Proyeksi BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi
2025	82.82	83.07	83.27
2026	83.19	83.54	83.82
2027	83.57	84.01	84.36
2028	83.94	84.48	84.90
2029	84.31	84.95	85.44

c. Gini Ratio

Rasio Gini yang mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, sedangkan nilai rasio Gini yang bernilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang mempunyai pendapatan yang sama. Berdasarkan data delapan tahun terakhir, rasio Gini Jakarta menunjukkan penurunan antara tahun 2015 (0,430) hingga 2019 (0,391). Namun pada tahun 2020 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan rasio Gini DKI Jakarta, yakni 0,399 pada tahun 2020; 0,411 pada tahun 2021; dan 0,412 pada tahun 2021, yang berarti tingkat ketimpangan semakin meningkat. Dibandingkan nasional, rasio Gini DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan nasional.

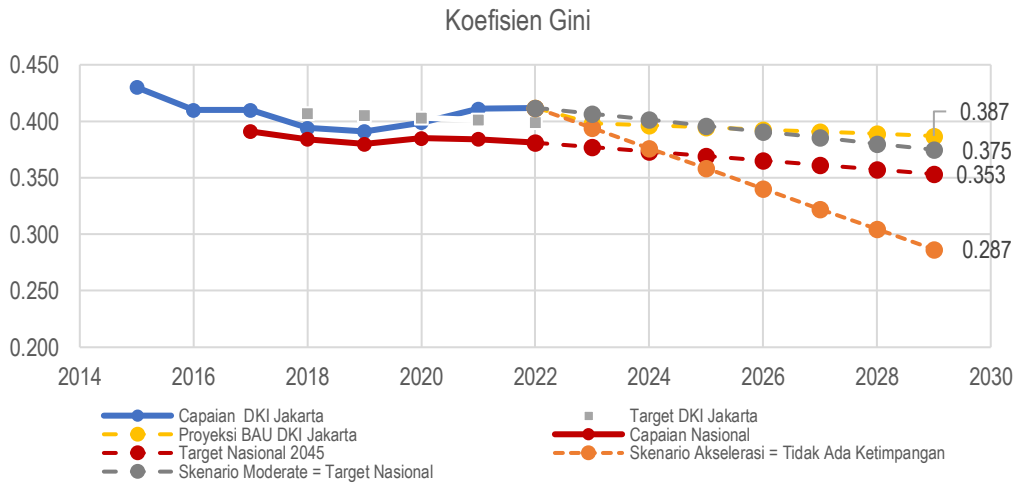

Gambar 6-16 Proyeksi Gini Ratio Provinsi DKI Jakarta Tahun 2029

Berdasarkan tren tersebut, dilakukan proyeksi secara BAU yang menunjukkan bahwa pada tahun 2029 capaian gini ratio sebesar 0,387. Sedangkan dengan skenario akselerasi yang menuju gini ratio 0 pada tahun 2045, capaian pada tahun 2029 sebesar 0,287.

Tabel 6-9 Proyeksi Gini Ratio Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Proyeksi BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi
2025	0.395	0.396	0.358
2026	0.393	0.391	0.340
2027	0.391	0.385	0.322
2028	0.389	0.380	0.305
2029	0.387	0.375	0.287

PDRB Per Kapita

PDRB DKI Jakarta menunjukkan tren meningkat hingga tahun 2029 yaitu sebesar Rp396.719.627,75. Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional yaitu sebesar Rp187.738.852,17. Berdasarkan hal tersebut, tidak diperlukan skenario moderate dan akselerasi sebagai upaya untuk meningkatkan PDRB Jakarta.

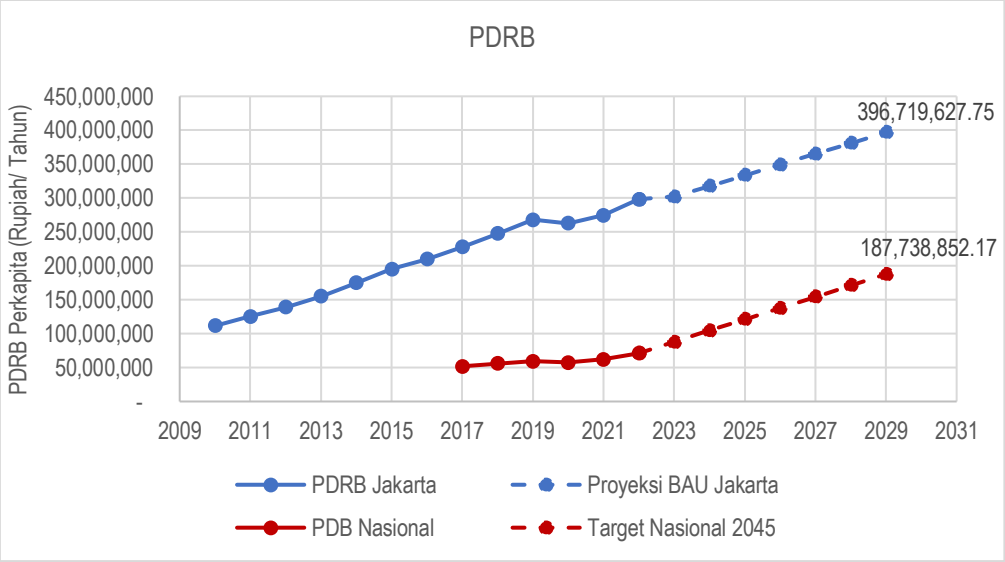

Gambar 6-17 Proyeksi PDRB Provinsi DKI Jakarta

Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan tren eksisting, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada tahun 2029 menurun hingga mencapai 4,31%. Tingkat kemiskinan ini lebih tinggi dibandingkan target DKI Jakarta pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,78%. Oleh karena itu diperlukan skenario moderate dan skenario akselerasi. Asumsi yang digunakan dalam skenario moderate yaitu menuju target nasional 2045. Sedangkan asumsi yang digunakan dalam skenario akselerasi yaitu menuju tahun 2045 tanpa kemiskinan.

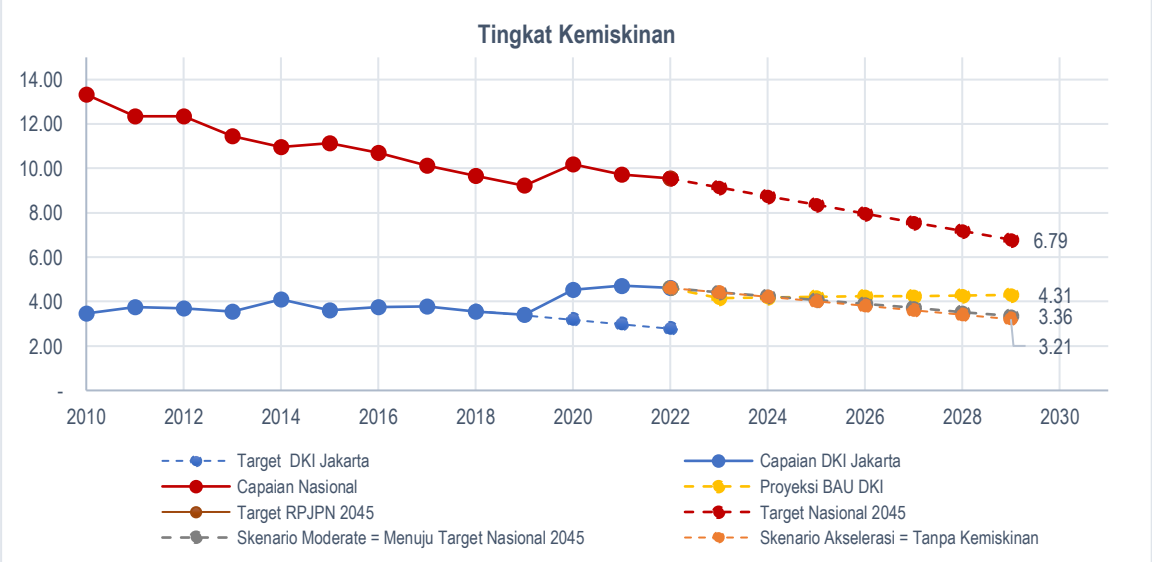

Gambar 6-18 Proyeksi Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2029

Berdasarkan hal di atas, tabel di bawah merupakan proyeksi tingkat kemiskinan secara BAU, moderate, dan akselerasi hingga tahun 2029.

Tabel 6-10 Proyeksi Tingkat Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Proyeksi BAU	Skenario Moderate	Skenario Akselerasi
2025	4.21	4.07	4.01
2026	4.23	3.90	3.81
2027	4.26	3.72	3.61
2028	4.28	3.54	3.41
2029	4.31	3.36	3.21

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta cukup fluktuatif dari 2010 – 2022. Secara BAU, analisis proyeksi menunjukkan tingkat pengangguran terbuka DKI Jakarta pada tahun 2029 sebesar 6,56. Tingkat pengangguran terbuka ini lebih tinggi dibandingkan target DKI Jakarta pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,8. Oleh karena itu diperlukan skenario moderate dan skenario akselerasi. Asumsi yang digunakan dalam skenario moderate yaitu menuju target nasional 2045. Sedangkan asumsi yang digunakan dalam skenario akselerasi yaitu lebih rendah 10% dari target nasional.

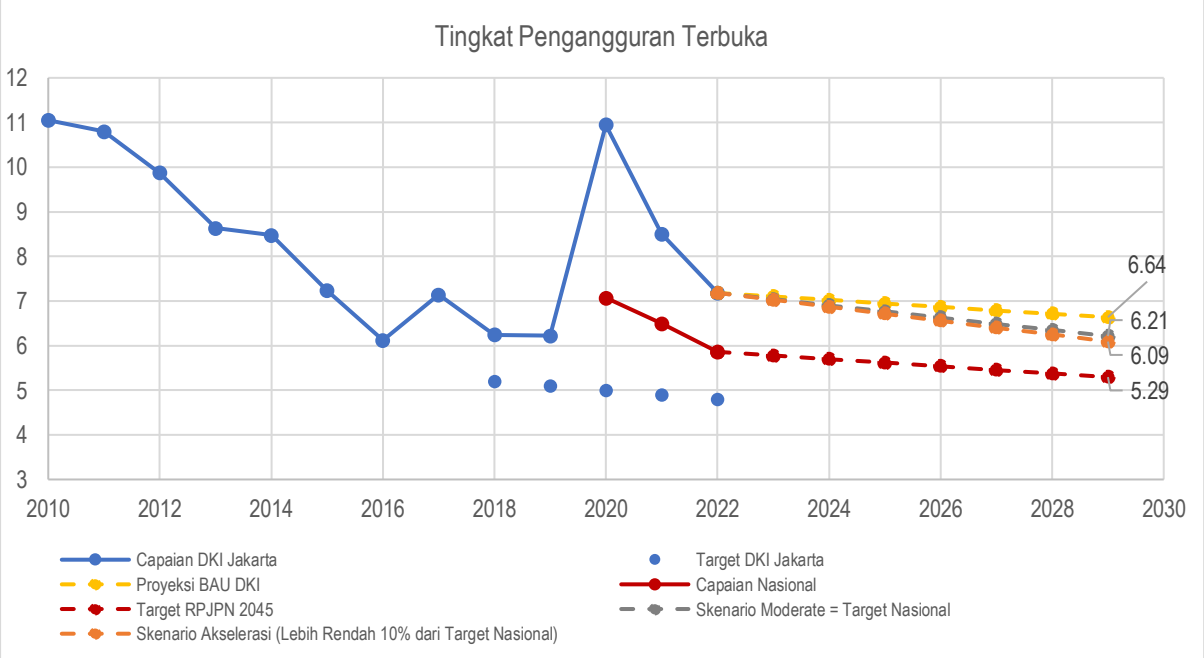

Gambar 6-19 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta Tahun 2029

Berdasarkan hal di atas, tabel di bawah merupakan proyeksi tingkat penangguran terbuka secara BAU, moderate, dan akselerasi hingga tahun 2029.

Tabel 6-11 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta

Tahun	*Proyeksi BAU*	*Skenario Moderate*	*Skenario Akselerasi*
2025	6.94	6.77	6.71
2026	6.86	6.63	6.56
2027	6.79	6.49	6.40
2028	6.71	6.35	6.25
2029	6.64	6.21	6.09

Alternatif	Isu Ketimpangan Sosial Ekonomi
Moderate S4.1. Peningkatan PDRB perkapita S4.2. Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat kepulauan S4.3. Penurunan tingkat pengangguran terbuka S4.4. Penyediaan infrastruktur air bersih perpipaan S4.5. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat S4.6. Peningkatan IPM Kepulauan Seribu S4.7. Penurunan gini ratio S4.8. Penyediaan rumah layak huni S4.9. Penurunan jumlah RW kumuh	**Akselerasi** S4.10 Pengembangan ekonomi makro bersakala global berbasis bisnis dan jasa S4.11 Peningkatan fungsi kota Jakarta sebagai kota transit internasional S4.12 Peningkatan kerja sama internasional dalam pengembangan ekonomi S4.13 Pengembangan Jakarta sebagai *smart city*

6.1.5 Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (Good Governance)

Kajian tren dan proyeksi dilakukan untuk masing-masing indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, SAKIP, ketersediaan kebijakan dan dokumen rencana, serta jumlah kerja sama dan kolaborasi antar wilayah fungsional.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Indeks kepuasan masyarakat digunakan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil capaian TPB, Indeks kepuasan masyarakat cenderung meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir (2018, 2019, dan 2020). Berdasarkan tren tersebut, proyeksi BaU akan meningkat pada 2029 hingga mencapai 91,26%. Dengan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang disertai dengan peningkatan kualitas ASN, sarana prasarana pendukung, dan lainnya, indeks kepuasan masyarakat ini dapat meningkat lebih tinggi. Sehingga dengan skenario akselerasi (asumsi lebih tinngi 7,5% dari Bau), indeks kepuasan masyarakat dapat mencapai 98,27% pada tahun 2029. Sedangkan dengan skenario moderate (asumsi lebih tinggi 2,5% dari BaU), indeks kepuasan masyarakat dapat mencapai 93,54%. Secara lebih jelas, gambar berikut menunjukkan proyeksi indeks kepuasan masyarakat.

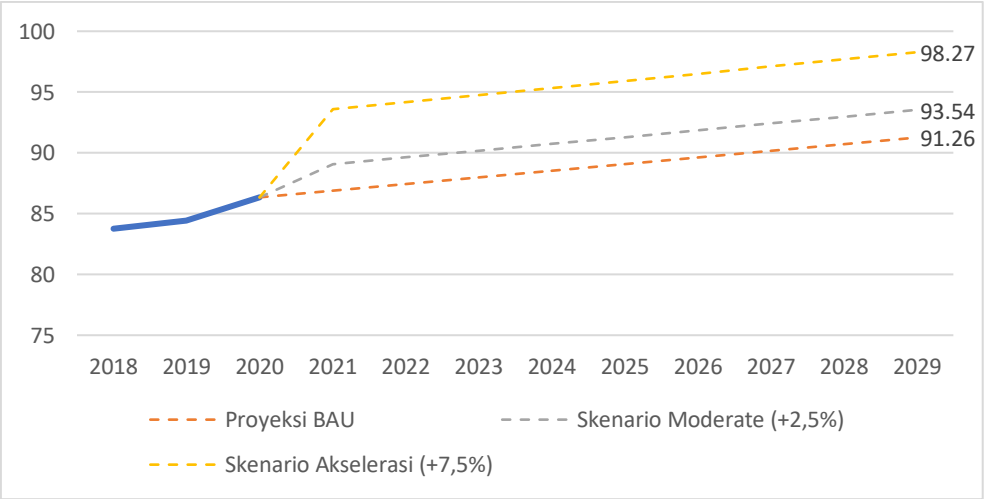

Gambar 6-20 Proyeksi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

SAKIP

Pada tahun 2022, DKI Jakarta memiliki nilai SAKIP A. Nilai ini diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun 2029, sehingga dapat secepatnya menuju nilai AA. Dalam meningkatkan nilai tersebut pada tahun 2029, perlu dilakukan pengukuran kinerja sampai level individu serta peningkatan sistem kelembagaan dengan prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*).

Tabel 6-12 Baseline dan Target SAKIP Provinsi DKI Jakarta

	SAKIP DAN AKIP
Baseline (2022)	Nilai A Instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.
Target (2029)	Peningkatan kinerja menuju Good Governance: • Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu • Peningkatan sistem kelembagaan dengan penerapan prinsip TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness)
Target (2045)	Nilai AA • Telah terwujud *Good Governance.* • Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. • Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform)*. • Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu

Ketersediaan Kebijakan dan Dokumen Rencana

Pada kondisi eksisting, DKI Jakarta telah memiliki berbagai kebijakan dan dokumen rencana terkait lingkungan hidup seperti pengendalian air tanah, keanekaragaman hayati, pencemaran udara, dan persampahan. Kebijakan dan dokumen rencana ini perlu diimplementasikan dengan baik agar permasalahan yang ada dapat teratasi, Berikut merupakan kebijakan dan dokumen eksisting serta

Tabel 6-13 Baseline dan Target Ketersediaan Kebijakan dan Dokumen Rencana

	Baseline (Kebijakan dan Dokumen Perencanaan Eksisting)	Target
Moratorium Air Tanah/ Perluasan *coverage area*	PERGUB DKI No. 93 Tahun 2021 tentang Kawasan Bebas Air Tanah	• Perluasan Kawasan zona bebas air tanah • Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	RTRW DKI Jakarta Tahun 2022 – 2042	• Pada Tahun 2042, 100% wilayah Jakarta terlayani Air bersih dan pelarangan Penggunaan Air Tanah pada wilayah zona bebas air tanah • Penatapan Zona Konservasi Air Tanah di Tahun 2042 • Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan kawasan Perumahan telah memanfaatkan air bersih melalui jaringan perpipaan bukan memanfaatkan air tanah
	Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	• Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi • Memperkuat legalisasi dokumen rencana induk
Kehati	PERGUB Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2017 Penyelenggaraan Hutan Kota	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB No. 31 Tahun 2022 tentang RDTR (Pembagian zona lindung)	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2020 - 2024	• Memperkuat legalisasi Rencana Induk, • Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi

	Baseline (Kebijakan dan Dokumen Perencanaan Eksisting)	Target
Pencemaran Udara	PERDA DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB DKI Jakarta No 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB No. 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	KEPGUB No. 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	INGUB DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
Sampah	PERDA No.3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERDA No.4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERDA No.3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB No. 108 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB No.77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Tingkat Rukun Warga	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB No. 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB No. 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah	Pelaksanaan program serta penguatan monitoring dan evaluasi
	PERGUB No. 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah	Implementasi kebijakan di pasar rakyat, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	PERGUB No.95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi
	PERGUB No.102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi
	INGUB No. 107 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah	Pelaksanaan program, penguatan monitoring dan evaluasi, penegakan hukum atas sanksi

Jumlah Kerja sama dan kolaborasi antar wilayah fungsional

Dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, perlu adanya kerja sama dan kolaborasi di wilayah fungsional agar permasalahan dapat teratasi antara hulu dan hilirnya. Hal yang dapat ditargetkan oleh DKI Jakarta pada tahun 2029 yaitu meningkatnya kuantitas dan kualitas kerja sama.

Tabel 6-14 Target Kerja Sama Provinsi DKI Jakarta

Kerja Sama Antar Daerah	Target
1. Kota Bekasi (Pengelolaan lahan tempat pemrosesan akhir) 2. Bodetabekjur (Ketahanan Pangan, transportasi, dan penyediaan air bersih – 2018) 3. Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi (Pengendalian Polusi Udara – 2022)	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerja sama dengan daerah fungsional

Alternatif — **Isu Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik**

Moderate

S5.1. Penguatan kapasitas tata kelola daerah secara internal menuju *good governance*
S5.2. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam wilayah fungsional
S5.3. Peningkatan kerja sama internasional untuk meningkatkan daya saing global
S5.4. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi berbasis digital dalam tata kelola termasuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KRP
S5.5 Peningkatan sistem penegakan hukum

Akselerasi

S5.6. Kesiapan menuju terciptanya *business enabling environment* (Reformasi ekonomi, *policy dialogue, knowledge sharing, civil society)*
S5.7. Penguatan mekanisme kerja sama multipihak dengan prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*)

6.1.6 Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK menuju Kota Berkelanjutan

Kajian tren dan proyeksi dilakukan untuk masing-masing indikator yaitu pemenuhan infrastruktur perkotaan (transportasi publik), proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, dan SPBE.

Pemenuhan infrastruktur perkotaan (transportasi publik) (TPB 11)

Penyediaan infrastruktur transportasi publik merupakan salah satu hal yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur perkotaan. Salah satu indikator untuk melihat dampak dari adanya penyediaan infrastruktur transportasi yaitu dengan melihat tingkat penggunaan angkutan umum atau *public transportation modal share*. Jika ditinjau berdasarkan tren eksisting, proyeksi BAU tingkat penggunaan angkutan umum ini mencapai 46,76% pada tahun 2029. Dengan skenario moderate melalui peningkatan kuantitas dan kualitas moda transportasi umum beserta fasilitas pendukungnya, tingkat penggunaan ini dapat meningkat hingga 54,8% atau menuju target RITJ pada tahun 2029 yaitu sebesar 60%. Sedangkan jika ditambah upaya lainnya melalui skenario akselerasi dengan asumsi lebih tinggi 5% dari target RITJ, proyeksi menunjukkan pada tahun 2029, tingkat penggunaan transportasi publik mencapai 57,55%.

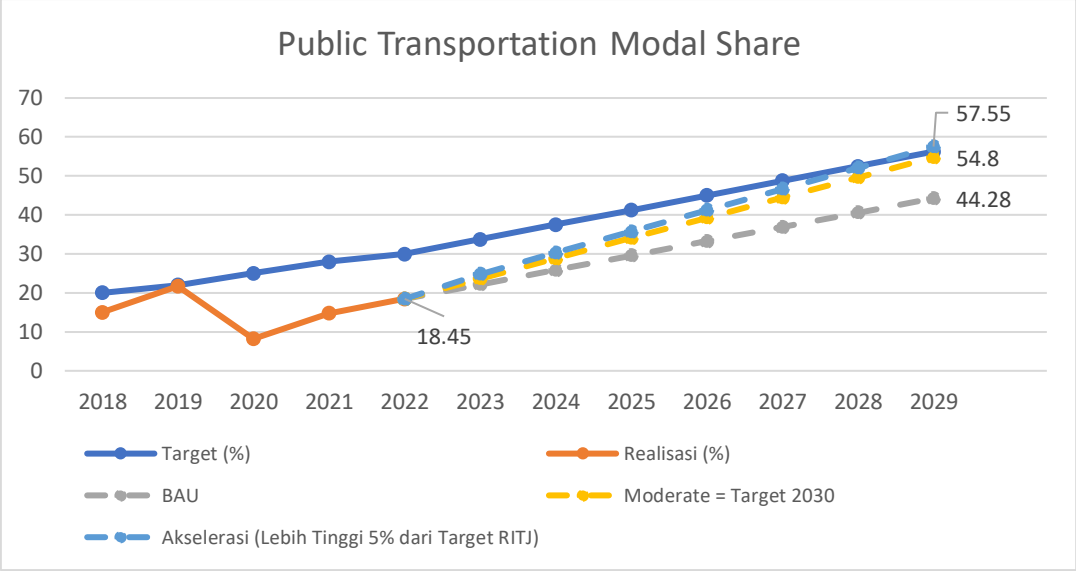

Gambar 6-21. Proyeksi dan Skenario Tingkat Penggunaan Transportasi Publik

Berikut merupakan proyeksi BAU, moderate, dan akselerasi dari tingkat penggunaan transportasi publik.

Tabel 6-15 Proyeksi Tingkat Penggunaan Transportasi Publik Provinsi DKI Jakarta

Tahun	BAU	Moderate	Akselerasi
2025	29.52	34.0	35.73
2026	33.21	39.2	41.19
2027	36.9	44.4	46.64
2028	40.59	49.6	52.09
2029	44.28	54.8	57.55

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (TPB 11)

Berdasarkan tren 2019 – 2022, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak pada tahun 2029, mencapai 46,7%. Dengan skenario akselerasi yang diturunkan dari target RPJPN 2045, proyeksi pada tahun 2029 mencapai 58%. Sedangkan dengan skenario moderate (asumsi lebih rendah 5% dari target RPJPN), proyeksi pada tahun 2029 sebesar 55,10%.

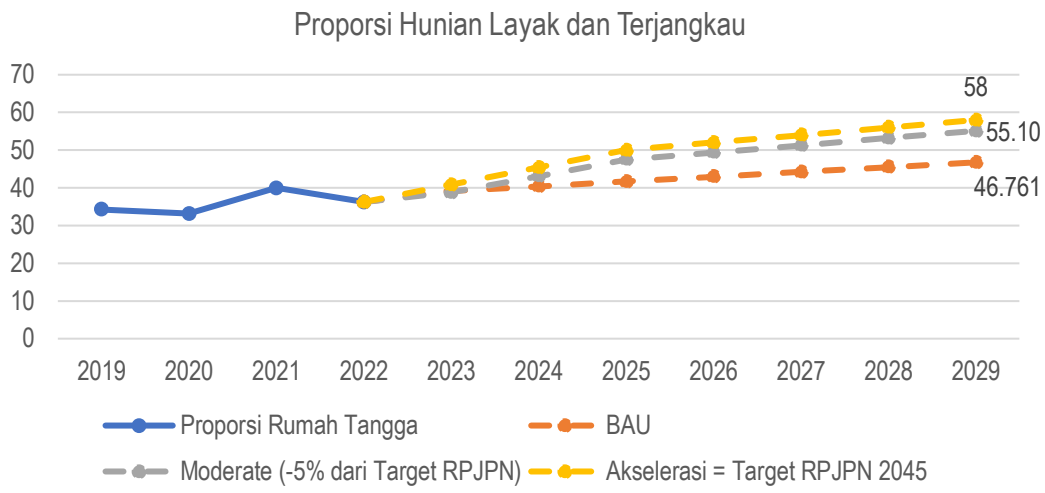

Gambar 6-22 Proyeksi Proporsi Hunian Layak dan Terjangkau Tahun 2029

Berikut merupakan proyeksi BAU, moderate, dan akselerasi dari indikator proporsi hunian layak dan terjangkau.

Tabel 6-16 Proyeksi Proporsi Hunian Layak dan Terjangkau Provinsi DKI Jakarta

Tahun	BAU	Moderate	Akselerasi
2025	41.657	47.50	50
2026	42.933	49.40	52
2027	44.209	51.30	54
2028	45.485	53.20	56
2029	46.761	55.10	58

SPBE

Dengan kondisi saat ini, DKI Jakarta memiliki indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan predikat sangat baik. Pada tahun 2029, dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan, diproyeksikan DKI Jakarta memiliki predikat SPBE "Memuaskan".

Tabel 6-17 Proyeksi SPBE Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Nilai	Predikat
2021	3.47	Baik
2022	3.67	Sangat Baik
2029	4.2 – 5.0	Memuaskan

Alternatif

Isu Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK menuju Kota Berkelanjutan

Moderate

S6.1. Peningkatan inovasi pengembangan IPTEK untuk keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas lingkungan, penurunan risiko bencana, inklusivitas sarana prasarana perkotaan dan tata kelola pemerintahan

S6.2. Peningkatan kolaborasi untuk akselerasi inovasi terkait keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas lingkungan, penurunan risiko bencana, inklusivitas sarana prasarana perkotaan dan tata kelola pemerintahan

Akselerasi

S6.3. Pengembangan Jakarta sebagai smart city

S6.4. Peningkatan akses pembiayaan inovatif untuk menunjang pengembangan IPTEK dan penerapan teknologi yang *climate friendly (Green building,* pengembangan energi terbarukan)

6.2 Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Program Prioritas

KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 merupakan KLHS *ex-ante* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga, hasil akhir dari KLHS bukan lagi memberikan perubahan atas KRP yang sedang atau telah tersusun, namun memberikan arahan kebijakan yang perlu diambil dalam penyusunan KRP nantinya.

KLHS RPJMD disusun beriringan dengan KLHS RPJPD 2025-2045. KLHS RPJPD memiliki karakteristik yang sama yaitu KLHS Ex-ante, sehingga menghasilkan sejumlah rekomendasi arahan kebijakan jangka panjang (20 tahun) termasuk pentahapan pembangunan 5 tahunan. Rekomendasi yang dihasilkan untuk tahap 5 (lima) tahun pertama (2025-2029), menjadi salah satu dasar dalam perumusan rekomendasi dalam KLHS RPJMD ini. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesinambungan kebijakan antar dokumen perencanaan. Secara ringkas, kerangka pikir penyusunan rekomendasi KLHS RPJMD disusun sebagai berikut.

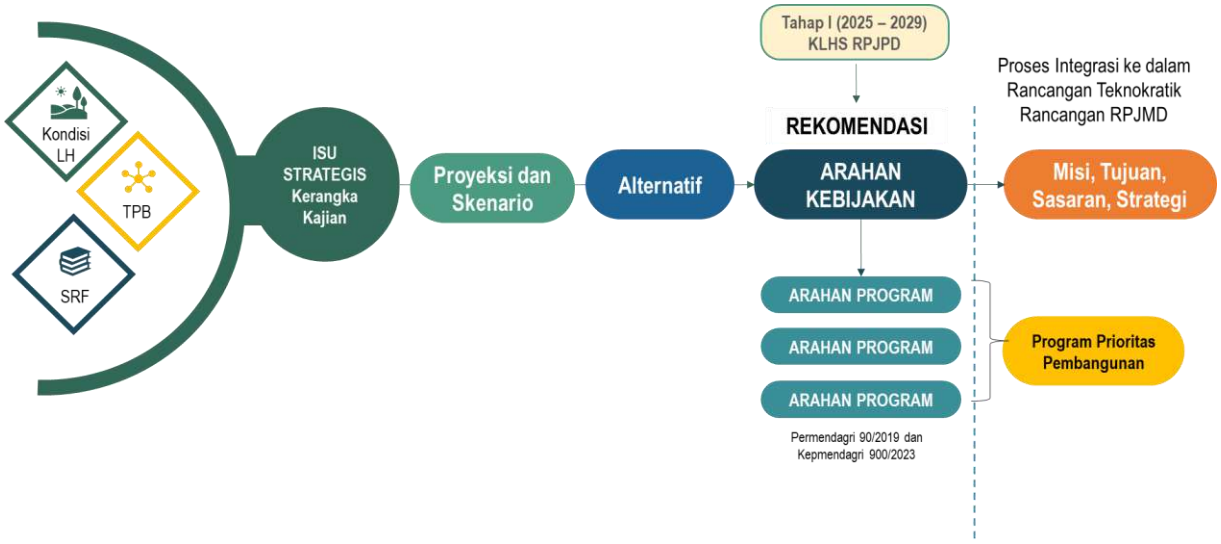

Gambar 6-23 . Kerangka Pikir Penyusunan Rekomendasi KLHS RPJMD DKI Jakarta

Penyusunan alternatif yang telah dilakukan merupakan bentuk strategi dalam menangani isu strategis termasuk permasalahan di dalamnya. Sementara itu, rekomendasi arahan kebijakan Tahap I (2025 – 2029) KLHS RPJPD berfokus pada ***penguatan fondasi tata kelola dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan SDA LH, pengurangan risiko bencana serta pemerataan pembangunan sosial-ekonomi.*** Arahan ini telah disinergi dan harmonisasikan dengan KRP terkait tingkat Nasional (RPJPN 2045) dan Provinsi (RTRW, RPPLH). Adapun penjabaran lebih lanjut hasil rekomendasi KLHS RPJPD dijelaskan sebagai berikut.

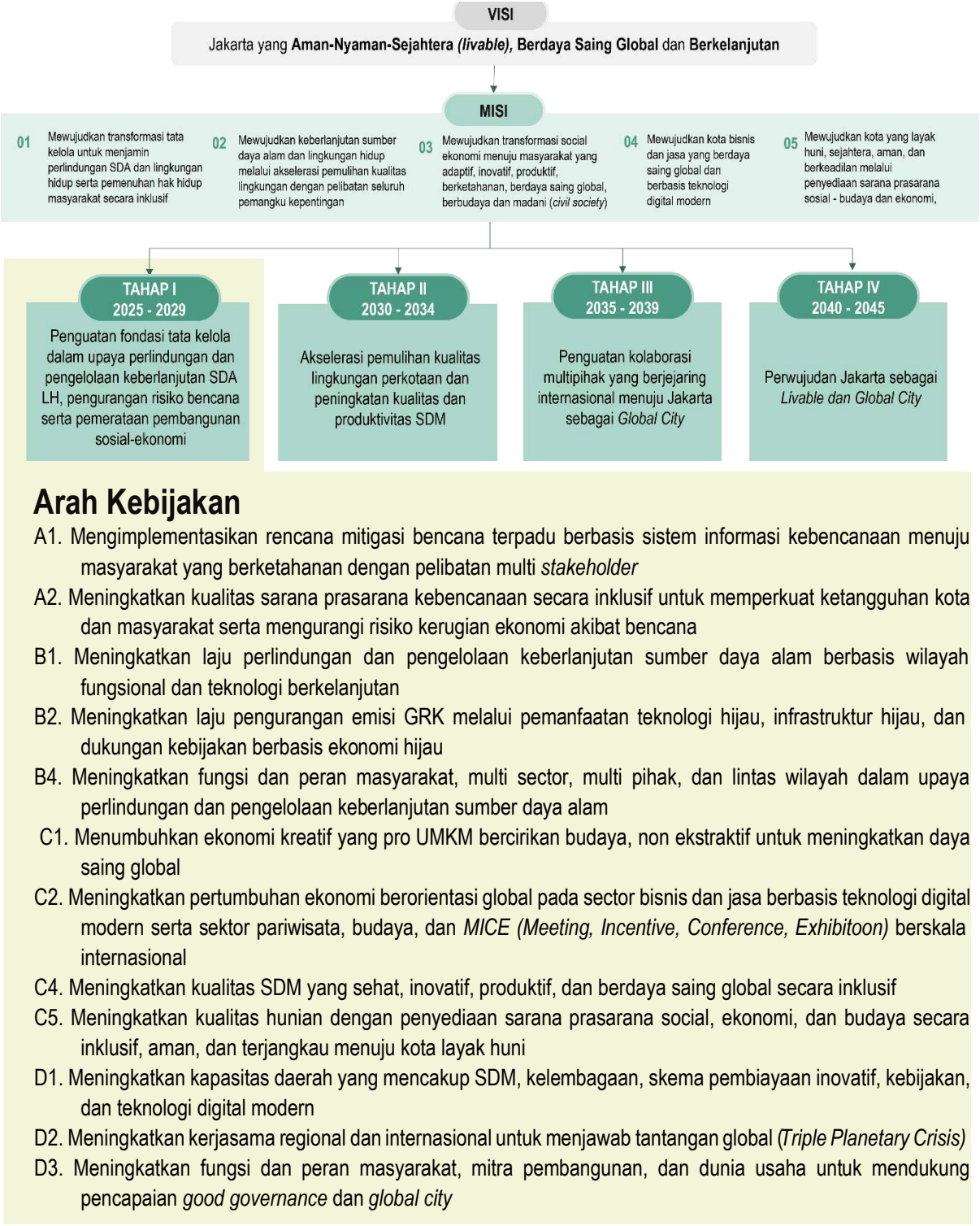

Gambar 6-24. Rekomendasi KLHS RPJPD 2025-2045

Sumber: Laporan KLHS RPJPD 2025-2045

Berpijak dari rumusan alternatif dan Rekomendasi tahap I KLHS RPJPD, maka disusunlah rekomendasi KLHS RPJMD yang terdiri atas:

a. **Rekomendasi Arahan Kebijakan,** yang dapat digunakan pada penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD

b. **Rekomendasi Arahan Program (**sesuai Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 900/2023)**,** yang dapat digunakan untuk penentuan Program Prioritas Pembangunan.

6.2.1 Rekomendasi Tingginya Risiko Bencana

Isu tingginya risiko bencana menghasilkan 4 (empat) rumusan alternatif sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 6.1.1 yang fokus pada perencanaan mitigasi bencana terpadu, kolaborasi multi pihak, peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat serta peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dari kata kunci tersebut, serta melihat kesinambungan rekomendasi arahan kebijakan pada tahap 1 RPJPD, maka disusun 2 (dua) **rekomendasi arahan kebijakan** sebagai berikut.

A1.1. Mengimplementasikan rencana mitigasi bencana terpadu berbasis sistem informasi kebencanaan menuju masyarakat yang berketahanan dengan pelibatan multi stakeholder

Rencana mitigasi bencana terpadu perlu disusun untuk mengharmonisasikan semua risiko bencana baik alam maupun non-alam dalam satu dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum. Saat ini sedang disusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) DKI Jakarta, dan masih menunggu pengesahan. Tentunya hal ini sejalan dengan rekomendasi arahan kebijakan ini. Penekanan pada pemanfaatan sistem informasi berbasis IPTEK dan pelibatan multi stakeholder perlu diperkuat untuk menyinergikan semua pihak menuju Jakarta yang berketahanan. Rekomendasi arahan kebijakan ini, diharapkan mampu menjadi salah satu landasan Visi dan Misi dan kebijakan di bawahnya sebagai upaya menciptakan Jakarta yang aman dari bencana, mengingat bahwa kerentanan bencana di Jakarta masih cukup tinggi. Peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat untuk penanggulangan bencana menjadi salah satu hal yang menjadi fokus perbaikan.

REKOMENDASI ARAHAN PROGRAM

1.05.03 Penanggulangan Bencana
1.05.04 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1.06.06 Program Penanganan Bencana
1.03.06 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
1 03 08. Penataan Bangunan Gedung
1.04.02 Pengembangan Perumahan
1.04.06. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan

A.1.2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana kebencanaan secara inklusif dengan pengembangan teknologi dan inovasi untuk memperkuat ketangguhan kota dan masyarakat serta mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat bencana

Upaya penanggulangan bencana tidak lepas dari penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan yang berkualitas. Hal ini merupakan kesiapan pemerintah yang salah satunya menjadi tolok ukur tingkat kesiapsiagaan bencana. Mengingat masih tingginya risiko bencana non alam terutama kebakaran, maka penyediaan sarana dan prasarana dasar kebencanaan yang mudah diakses sangat penting.

6.2.2 Rekomendasi Ancaman Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Isu ancaman keberlanjutan sumber daya alam memiliki 4 (empat) alternatif yang fokus pada penyediaan infrastruktur perkotaan dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya alam, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, konservasi tanah dan air serta perlindungan kawasan ekosistem esensial. Hasil rumusan alternatif menjadi dasar dalam penyusunan 2 (dua) arahan kebijakan sebagai berikut.

A2.1. Meningkatkan laju perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati berbasis wilayah fungsional dan teknologi berkelanjutan

Perlindungan Keberlanjutan sumber daya alam yang terdiri dari lahan, air dan udara menjadi hal penting yang perlu dilindungi keberlanjutannya. Kerentanan sumber daya air di DKI Jakarta menjadi permasalahan utama mengingat bahwa sebagian besar D3TLH air sudah terlampaui dan penggunaan air tanah yang tidak terkendali. Selain itu, pada saat musim penghujan umum terjadi bencana banjir yang menandakan bahwa fungsi ekosistem

REKOMENDASI ARAHAN PROGRAM

1.03.02 Pengelolaan SDA
1.03.03 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.03.04 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1.03.05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.03.06 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
2.11.08 Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
2.11.11 Pengelolaan Persampahan
3.25.02 Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau Kecil
3.25.05 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3.28.04 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3.29.02 Pengelolaan Aspek Kegeologian

pengaturan air tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, dengan pemanfaatan teknologi berkelanjutan diharapkan pengelolaan sumber daya air dapat berjalan optimal, misalnya dengan optimalisasi pengolahan untuk air baku, pengolahan limbah air domestik dan pemanfaatan infrastruktur hijau di perkotaan (sumur resapan, bioretensi dll). Peran wilayah fungsional juga perlu dikedepankan, mengingat bahwa DKI Jakarta terletak di wilayah hilir, yang sangat bergantung pada wilayah hulu. Moratorium dan pembatasan penggunaan air tanah juga perlu dikedepankan dengan terlebih dahulu pemenuhan jaringan air perpipaan di seluruh wilayah.

Selain itu, keanekaragaman hayati juga perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Mengingat bahwa, DKI Jakarta masih memiliki wilayah konservasi yang cukup luas di Kepulauan Seribu. Keanekaragaman hayati berupa ekosistem hijau (darat) dan ekosistem biru (laut), menjadi modal utama DKI Jakarta dalam upaya menjaga keseimbangan pembangunan dan alam. Hal tersebut juga tentunya mendukung perwujudan Jakarta sebagai *Biodiversity City* yang unik dengan mengedepankan modal alam yang tersedia.

A2.2. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multi sector, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, sangat dibutuhkan kontribusi masing-masing pihak. Jakarta yang memiliki jargon ”Kota Kolaborasi” menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berkontribusi bagi perkembangan kota.

6.2.3 Rekomendasi Kualitas Lingkungan Hidup Rendah

Dalam menangani isu kualitas lingkungan hidup rendah, dirumuskan 4 (empat) alternatif yang fokus pada upaya penurunan emisi GRK, energi terbarukan, ruang terbuka hijau dan peningkatan sampah terkelola. Dari alternatif tersebut dihasilkan 2 (dua) arahan kebijakan sebagai berikut.

A3.1. Meningkatkan laju pengurangan emisi GRK melalui pemanfaatan teknologi hijau, infrastruktur hijau, dan dukungan kebijakan berbasis ekonomi hijau

Tinggi tingkat emisi di DKI Jakarta di dominasi oleh sektor transportasi yang diikuti oleh sektor industri dan pembangkit listrik. Oleh karena pengendalian sumber emisi utama sangat penting melalui sejumlah kebijakan berbasis ekonomi hijau seperti pembatasan emisi kendaraan, optimalisasi transportasi publik, konversi energi terbarukan dan kebijakan pendukung lainnya. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga penting dikembangkan untuk menurunkan tingkat emisi. Seperti contohnya yaitu oxygen generator berbasis alga yang sedang saat ini sudah mulai diterapkan. Selain itu, penyediaan infrastruktur hijau termasuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan, kebijakan taman vertikal di gedung-gedung tinggi dan sejumlah upaya lainnya perlu dikembangkan. Pemilihan jenis pohon untuk RTH juga perlu diperhatikan supaya lebih efektif meningkatkan serapan emisi.

REKOMENDASI ARAHAN PROGRAM

1.03.04 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
2.11.02 Pencemaran Lingkungan Hidup
2.11.03 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.06 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH)
2.11.08 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH untuk Masyarakat

A3.2. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multi sector, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan

Fungsi dan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dapat didorong dengan penyadartahuan, kebijakan maupun penegakan hukum. Selain itu, dengan meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat mengakselerasi sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah.

6.2.4 Rekomendasi Ketimpangan Sosial Ekonomi

Ketimpangan sosial memiliki 9 (sembilan) alternatif yang fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, penyediaan infrastruktur layanan dasar yang layak, pengentasan ketimpangan dan penyediaan rumah layak huni. Dari kesembilan alternatif yang diusulkan, terdapat 4 (empat) rekomendasi arahan kebijakan yaitu:

A4.1. Menumbuhkan ekonomi kreatif yang pro UMKM bercirikan budaya, non ekstraktif untuk meningkatkan daya saing global

Sejalan dengan pengembangan ekonomi kemasyarakatan, maka salah satu arahan kebijakan yang direkomendasikan adalah pengembangan UMKM untuk berkontribusi pada Jakarta sebagai kota jasa dan bisnis. Fokus UMKM untuk mendorong masyarakat menengah ke bawah untuk mengembangkan usaha terutama untuk bidang pariwisata di Kepulauan Seribu mengingat bahwa tingkat kemiskinan tertinggi di Jakarta ada di sana.

A4.2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berorientasi global pada sector bisnis dan jasa berbasis teknologi digital modern serta sektor pariwisata, budaya, dan MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) berskala internasional

Sektor ekonomi yang bersifat lebih strategis juga perlu ditingkatkan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor dan penyediaan sarana dan prasarana digital modern berskala internasional.

A4.3. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, inovatif, produktif, dan berdaya saing global secara inklusif

Dalam rangka bersaing secara global, maka kualitas SDM perlu ditingkatkan. SDM yang inovatif dan difasilitasi untuk bersaing secara global dapat menjadi poin utama dalam peningkatan daya saing.

REKOMENDASI ARAHAN PROGRAM

1.01.02 Pengelolaan Pendidikan
1.01.03 Pengembangan Kurikulum
1.02.02 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
1.03.07 Pengembangan Permukiman
1.04.02 Pengembangan Perumahan
1.04.03 Program Kawasan Permukiman
1.04.05 Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
1 06 02. Pemberdayaan Sosial
1 06 05. Perlindungan dan Jaminan Sosial
2.07.03 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.14.04. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
2.17.07 Pemberdayaan UMKM
2.17.08 Pengembangan UMKM
3.25.06 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3.26.02 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
3.26.03 Pemasaran Pariwisata
3.26.04 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3.26.05 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.01.06 Perekonomian dan Pembangunan

A4.4. Mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara kepulauan dan daratan melalui peningkatan kualitas hunian dengan penyediaan sarana prasarana social, ekonomi, dan budaya secara inklusif, aman, dan terjangkau menuju kota layak huni

Pengembangan ekonomi yang inklusif dengan berfokus pada peningkatan ekonomi di Kepulauan untuk mengurangi kesenjangan. Selain itu, penciptaan ruang hidup yang layak untuk mendukung Jakarta sebagai *global city* yang di awali dengan pemenuhan sarana dan prasarana perkotaan yang layak.

6.2.5 Rekomendasi Belum Optimalnya Tata Kelola

Isu belum optimalnya tata kelola memiliki alternatif yang berupa penguatan kapasitas kelembagaan secara internal, peningkatan kerja sama antara daerah dan internasional dan peningkatan sistem informasi. Alternatif yang dirumuskan menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi arahan kebijakan yang berupa:

A5.1. Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup SDM, kelembagaan, skema pembiayaan inovatif, kebijakan, dan teknologi digital modern

Dalam peningkatan tata kelola perlu perbaikan beberapa aspek penting yaitu sumber daya manusia, kelembagaan, kebijakan dan pembiayaan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal utama dalam menuju *good governance*. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan SOP dan efisiensi pekerjaan. Penerapan sistem informasi dalam tata kelola pemerintah juga penting diterapkan untuk menciptakan tata kelola yang akuntabel.

A5.2. Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk menjawab tantangan global (*Triple Planetary Crisis*)

Peningkatan kerja sama antar daerah dalam wilayah fungsional menjadi fokus utama dalam rangka perbaikan fungsi ekosistem wilayah hulu-hilir. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global, maka kerja sama dengan kota-kota global lainnya melalui pertukaran budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi terutama guna mengatasi tantangan global.

A5.3. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian *good governance* dan global city

REKOMENDASI ARAHAN PROGRAM

1.03.12. Penyelenggaraan Penataan Ruang
4.01.02. Program Penataan Organisasi
4.01.03. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.06. Program Perekonomian dan Pembangunan
5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5.03.02. Program Kepegawaian Daerah
5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.07.02. Program Pelayanan Penghubung
6.01.02. Penyelenggaraan Pengawasan

Masyarakat memiliki peran sebagai salah satu aktor pengawas implementasi tata kelola pemerintahan sehingga perlu diwadahi dengan sistem informasi yang mudah diakses. Selain itu, mitra pembangunan dan dunia usaha dalam mendukung pencapaian global city perlu didorong dengan fasilitasi kemudahan berkegiatan.

6.2.6 Rekomendasi Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK

Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK memiliki alternatif dalam hal pengembangan inovasi dan peningkatan kolaborasi. Arahan kebijakan yang diusulkan yaitu:

A6.1. Meningkatkan inovasi dan kolaborasi akselerasi pengembangan IPTEK menuju kota global yang berkelanjutan

Secara umum, mitra pembangunan memiliki fokus yang beragam dan seringnya turut berkontribusi pada pengembangan inovasi untuk mendukung peningkatan IPTEK. Oleh karenanya, melalui inventarisasi pemangku kepentingan dapat mendorong upaya pemerintah dalam mengembangkan kota Jakarta yang layak huni seperti pengembangan transportasi publik ramah lingkungan, pengembangan ekonomi kreatif, penyadartahuan masyarakat, pengembangan teknologi bersih dsb.

REKOMENDASI ARAHAN PROGRAM

1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan
2.15.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2.16.03. Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik
3.26.04. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
5.05.02. Penelitian Pengembangan Daerah

6.3 Usulan Integrasi

Proses integrasi menjadi tahapan yang penting dalam penyusunan KLHS. Namun demikian, pada saat KLHS RPJMD ini dilaksanakan, dokumen RPJMD belum disusun dan masih berada pada tahap persiapan (KLHS Ex-ante). Oleh karenanya, muatan KRP belum dapat ditelaah dan gambaran integrasi belum dapat dilakukan. Oleh karenanya, untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS dapat diintegrasikan pada penyusunan RPJMD, POKJA KLHS memberikan usulan integrasi yang menjadi bagian dari laporan KLHS ini dan dijamin kualitasnya oleh penyusun KRP. Penjaminan kualitas KLHS terlampir pada berita acara dan form penilaian pada Lampiran 9.

Usulan integrasi mengedepankan pada 6 (enam) isu strategis, 14 rekomendasi arahan kebijakan dan 53 rekomendasi arahan program prioritas yang telah dijelaskan pada Sub Bab 6.2 dan diringkaskan sebagai berikut.

Tabel 6-18. Usulan Integrasi Rekomendasi KLHS ke dalam penyusunan RPJMD

Isu	Alternatif Skenario		Arahan Kebijakan	Arahan Program	Pemangku Kepentingan yang Relevan
	Moderate	Akselerasi			
1. Tingginya Risiko Bencana	S1.1. Penyusunan rencana mitigasi bencana alam dan non alam yang terpadu S1.2. Kolaborasi dan koordinasi multi pihak, multi sector, dan lintas wilayah S1.3. Peningkatan sarana prasarana serta logistik penanggulangan kebencanaan S1.4. Peningkatan kapasitas masyarakat menuju masyarakat yang adaptif dan berketahanan S1.5. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana	S1.6. Pemanfaatan teknologi informasi untuk peringatan dini bencana yang terpadu S1.7. Pengembangan teknologi dan inovasi untuk sistem pemulihan bencana yang terpadu	A1.1. Mengimplementasikan rencana mitigasi bencana terpadu berbasis sistem informasi kebencanaan menuju masyarakat yang berketahanan dengan pelibatan multi stakeholder A.1.2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana kebencanaan secara inklusif untuk memperkuat ketangguhan kota dan masyarakat serta mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat bencana	1.05.03 Penanggulangan Bencana 1.05.04 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 1.06.06 Program Penanganan Bencana 1.03.06 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 1 03 08. Penataan Bangunan Gedung 1.04.02 Pengembangan Perumahan 1.04.06. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	**OPD:** BPBD Dinas Sumber Daya Air Dinas Perumahan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan **Mitra Terkait:** PAM Jaya BAZNAS IUWASH PLUS Indonesia PPNI Platform Muria Jakarta Berketahanan Akademisi
2. Keberlanjutan SDA	S2.1. Pemerataan infrastruktur perkotaan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi S2.2. Peningkatan pengelolaan sampah melalui pemanfaatan teknologi S2.3. Kerja sama antar wilayah dalam menjaga keberlanjutan SDA dan kualitas LH S2.4. Penghematan pemanfaatan air melalui teknologi ramah lingkungan S2.5. Perlindungan keberlanjutan sumber daya air melalui mekanisme konservasi tanah dan air	S2.7 Percepatan pencapaian 100% air perpipaan dan moratorium pengambilan air tanah di seluruh wilayah S2.8 Rehabilitasi dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau perkotaan sesuai dengan ketentuan 30% dari luas wilayah S2.9 Pengembangan instrumen ekonomi lingkungan yang	A2.1. Meningkatkan laju perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati berbasis wilayah fungsional dan teknologi berkelanjutan A2.2. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multi sector, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	1.03.02 Pengelolaan SDA 1.03.03 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1.03.04 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 1.03.05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1.03.06 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	**OPD:** Dinas Sumber Daya Air Dinas Perumahan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan DKPKP **Mitra Terkait:** PAM Jaya IUWASH PLUS Indonesia Yayasan Plan Internationa Akademisi

Isu	Alternatif Skenario		Arahan Kebijakan	Arahan Program	Pemangku Kepentingan yang Relevan
	Moderate	Akselerasi			
	S2.6. Perlindungan kawasan ekosistem esensial dan keanekaragaman hayati	komprehensif dalam menjalankan kerja sama di wilayah fungsional		2.11.08 Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 2.11.11 Pengelolaan Persampahan 3.25.02 Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau Kecil 3.25.05 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 3.28.04 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 3.29.02 Pengelolaan Aspek Kegeologian	
3. Kualitas Lingkungan Hidup	S3.1. Penurunan emisi GRK melalui pengendalian sumber pengendalian sumber emisi utama (transportasi, industri, dan pembangkit listrik) S3.2. Diversifikasi sumber energi (tenaga surya) pada setiap sektor terutama sumber emisi utama S3.3. Pengembangan transportasi publik terintegrasi yang ramah lingkungan S3.3. Peningkatan fungsi ruang terbuka hijau melalui kesesuaian rancangan RTH termasuk penanaman vegetasi yang efektif menyerap emisi S3.4. Peningkatan daur ulang sampah melalui pemanfaatan teknologi dengan peran serta multi pihak	S3.7 Pengembangan inovasi dan teknologi ramah lingkungan untuk menekan emisi S3.8 Penerapan kebijakan infrastruktur hijau dalam pengembangan wilayah	A3.1. Meningkatkan laju pengurangan emisi GRK melalui pemanfaatan teknologi hijau, infrastruktur hijau, dan dukungan kebijakan berbasis ekonomi hijau A3.2. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, multi sector, multi pihak, dan lintas wilayah dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan	1.03.04 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 2.11.02 Pencemaran Lingkungan Hidup 2.11.03 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2.11.06 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH) 2.11.08 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH untuk Masyarakat 3.29.05 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	**OPD:** DLH Dinas Perindustrian Dan Energi **Mitra terkait:** PT. WALLEZZ Finansial Teknologi Inswa Yayasan Plan International Akademisi
4. Ketimpangan Sosial Ekonomi	S4.1. Peningkatan PDRB perkapita S4.2. Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat kepulauan	S4.10 Pengembangan ekonomi makro berskala global	A4.1. Menumbuhkan ekonomi kreatif yang pro UMKM bercirikan budaya, non ekstraktif untuk	1.01.02 Pengelolaan Pendidikan 1.01.03 Pengembangan Kurikulum 1.02.02 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	**OPD:** Dinas Pendidikan DinasKesehatan Dinas Perumahan

Isu	Alternatif Skenario		Arahan Kebijakan	Arahan Program	Pemangku Kepentingan yang Relevan
	Moderate	Akselerasi			
	S4.3. Penurunan tingkat pengangguran terbuka S4.4. Penyediaan infrastruktur air bersih perpipaan S4.5. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat S4.6. Peningkatan IPM Kepulauan Seribu S4.7. Penurunan gini ratio S4.8. Penyediaan rumah layak huni S4.9. Penurunan jumlah RW kumuh	berbasis bisnis dan jasa S4.11 Peningkatan fungsi kota Jakarta sebagai kota transit internasional S4.12 Peningkatan kerja sama internasional dalam pengembangan ekonomi	meningkatkan daya saing global A4.2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berorientasi global pada sector bisnis dan jasa berbasis teknologi digital modern serta sektor pariwisata, budaya, dan MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) berskala internasional A4.3. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, inovatif, produktif, dan berdaya saing global secara inklusif A4.4. Mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara kepulauan dan daratan melalui peningkatan kualitas hunian dengan penyediaan sarana prasarana social, ekonomi, dan budaya secara inklusif, aman, dan terjangkau menuju kota layak huni	Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 1.03.07 Pengembangan Permukiman 1.04.02 Pengembangan Perumahan 1.04.03 Program Kawasan Permukiman 1.04.05 Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1 06 02. Pemberdayaan Sosial 1 06 05. Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.07.03 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2.14.04. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 2.17.07 Pemberdayaan UMKM 2.17.08 Pengembangan UMKM 3.25.06 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 3.26.02 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata 3.26.03 Pemasaran Pariwisata 3.26.04 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 3.26.05 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4.01.06 Perekonomian dan Pembangunan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Dinas Ketenagakerjaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Serta Perdagangan Dinas Pariwisata Dan KebudayaaN Dinas Sosial **Mitra Terkait:** Yayasan Budha Tzu Chi AMPP, Pemuda ANSOR, Banser NU, Garuda Bung Cokro. YDMI dan Mitra Yayasan Lentera Anak Wiranesia Instan.Id, Oke Oce UN Habitat AUSAID – MAMPU LBH Apik

Isu	Alternatif Skenario		Arahan Kebijakan	Arahan Program	Pemangku Kepentingan yang Relevan
	Moderate	Akselerasi			
5. Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik	S5.1. Penguatan kapasitas tata kelola daerah secara internal menuju *good governance* S5.2. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam wilayah fungsional S5.3. Peningkatan kerja sama internasional untuk meningkatkan daya saing global S5.4. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi berbasis digital dalam tata kelola termasuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KRP S5.5 Peningkatan sistem penegakan hukum	S5.6. Kesiapan menuju terciptanya *business enabling environment* (Reformasi ekonomi, *policy dialogue, knowledge sharing, civil society)* S5.7. Penguatan mekanisme kerja sama multipihak dengan prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*)	A5.1. Meningkatkan kapasitas daerah yang mencakup SDM, kelembagaan, skema pembiayaan inovatif, kebijakan, dan teknologi digital modern A5.2. Meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk menjawab tantangan global (*Triple Planetary Crisis*) A5.3. Meningkatkan fungsi dan peran masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mendukung pencapaian good governance dan global city	1.03.12. Penyelenggaraan Penataan Ruang 4.01.02. Program Penataan Organisasi 4.01.03. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 4.01.06. Program Perekonomian dan Pembangunan 5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5.03.02. Program Kepegawaian Daerah 5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.07.02. Program Pelayanan Penghubung 6.01.02. Penyelenggaraan Pengawasan	**OPD:** Biro Tata Pemerintahan Biro Perekonomian Badan Kepegawaian Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **Mitra terkait:** UCLG ASPAC APEKSI UID ICWATCH
6. Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK Menuju Kota Berkelanjutan	S6.1. Peningkatan inovasi pengembangan IPTEK untuk keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas lingkungan, penurunan risiko bencana, inklusivitas sarana prasarana perkotaan dan tata kelola pemerintahan S6.2. Peningkatan kolaborasi untuk akselerasi inovasi terkait keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas lingkungan, penurunan risiko bencana, inklusivitas sarana prasarana perkotaan dan tata kelola pemerintahan	S6.3. Pengembangan Jakarta sebagai smart city S6.4. Peningkatan akses pembiayaan inovatif untuk menunjang pengembangan IPTEK dan penerapan teknologi yang *climate friendly (Green building,* pengembangan energi terbarukan)	A6.1. Meningkatkan inovasi dan kolaborasi akselerasi pengembangan IPTEK menuju kota global yang berkelanjutan	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan 2.15.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2.16.03. Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik 3.26.04. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 5.05.02. Penelitian Pengembangan Daerah	**OPD:** Dinas Pendidikan Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informasi **Mitra Terkait:** Ikatan Abang None Jakarta Perkumpulan PRAKARSA Instan.Id, Oke Oce USAID – MAJU European Union

Tabel di atas mengindikasikan usulan integrasi ke dalam dokumen RPJMD secara substantif, Namun demikian, apabila ditelaah lebih lanjut dari keseluruhan sistematika laporan KLHS dan maka potensi pengintegrasian dapat lebih eksplisit tercantum dalam sistematika dokumen RPJMD sebagai berikut. Laporan KLHS mengikuti struktur dokumen sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Teknik KLHS RPJMD oleh Kemendagri, sementara sistematika dokumen RPJMD mengacu pada Permendagri 86/2017.

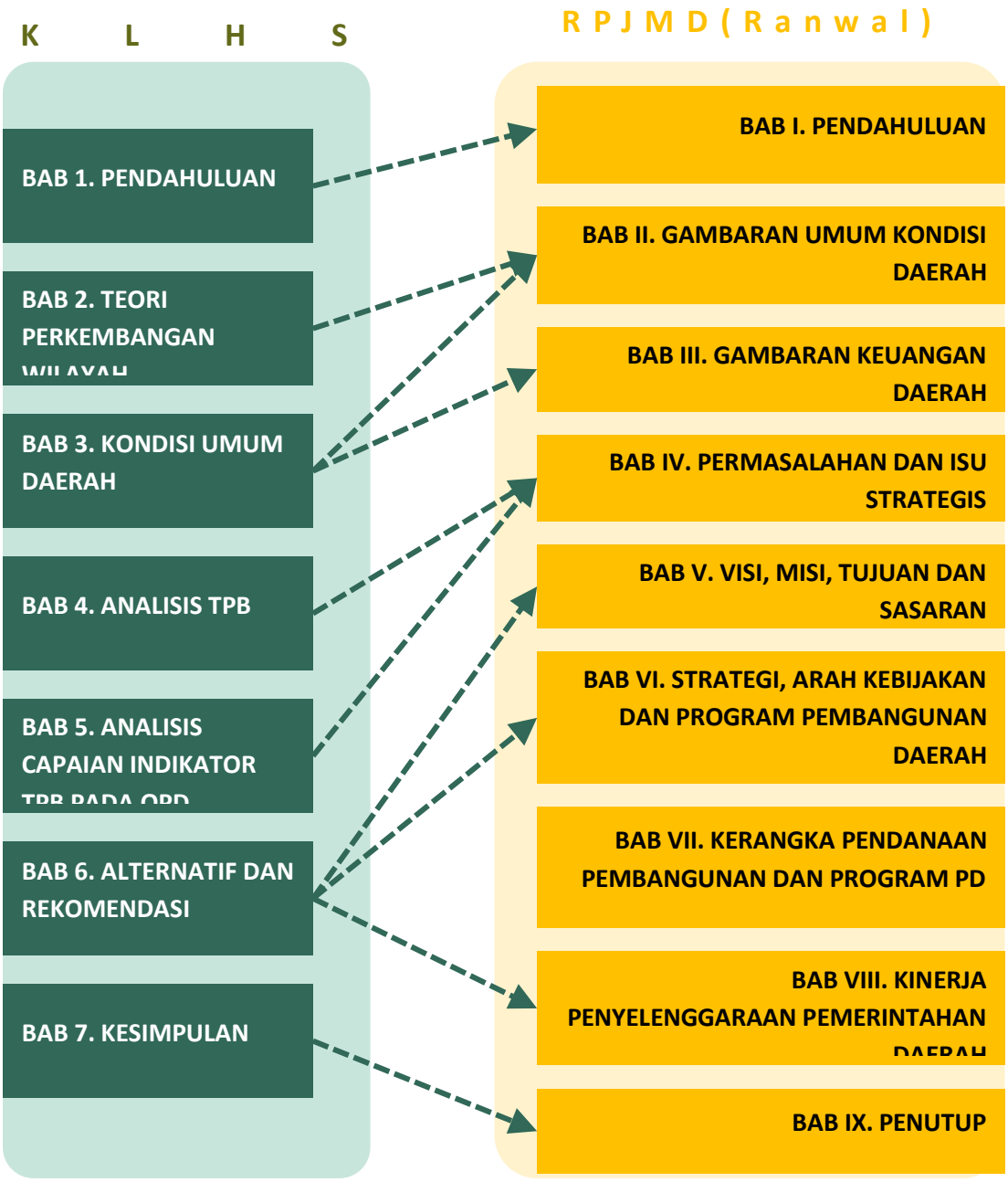

Gambar 6-25. Gambaran Usulan Pengintegrasian KLHS ke dalam RANWAL RPJMD

6.4 Rekomendasi Tindak Lanjut

- Perlu dipastikan bahwa hasil KLHS diintegrasikan ke dalam rancangan KRP RPJMD untuk memastikan bahwa semua proses dan hasil KLHS membawa manfaat dalam memperkuat sistem perencanaan pemerintah daerah.
- Perlu pemenuhan data terhadap indikator TPB yang saat ini belum memiliki data, sehingga dapat melihat capaian Provinsi DKI Jakarta yang sebenarnya.
- Pemanfaatan hasil KLHS untuk RAD TPB DKI Jakarta dengan peninjauan ulang indikator yang relevan dengan kondisi DKI Jakarta, sehingga benar-benar mencerminkan capaian TPB, seperti pada TPB 6 dan TPB 11 sebagaimana dijelaskan pada Bab 4.2.1

BAB 7

KESIMPULAN

BAB 7 KESIMPULAN

1. Penyusunan KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 dikerjakan dengan upaya optimal, baik dalam upaya memenuhi ketentuan tentang proses dan kualitas hasil kajian dan rekomendasi dan keluaran lainnya sebagaimana termuat dalam Permendagri 7/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan PP No. 46/2016 beserta dan aturan turunannya yaitu Permen LHK No. P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

   Berbagai usaha diupayakan untuk memastikan bahwa kualitas hasil KLHS dapat terpenuhi secara memadai, termasuk deskripsi kondisi sosial ekonomi berbasis data dan informasi mutakhir, hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan arahan-arahan rekomendasi kebijakan yang disinergikan dengan kebijakan nasional (RPJPN), diharmonisasikan dengan kebijakan-kebijakan jangka panjang internal DKI yang termuat dalam dokumen-dokumen kebijakan dan perencanaan strategis yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan hasil KLHS dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJMD 2025-2029 dan memberi manfaat yang nyata.

2. Dilakukan upaya cermat untuk mendokumentasikan proses dan hasil KLHS RPJMD DKI 2025-2029 dari awal hingga akhir ke dalam sebuah Laporan KLHS. Laporan KLHS RPJMD DKI 2025-2029 ini telah diselesaikan melalui proses Penjaminan Kualitas yang dokumennya telah ditandatangani oleh Kepala Daerah. Diharapkan Laporan ini dapat dijadikan salah satu tolok ukur oleh praktisi KLHS dan sebagai bahan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya peningkatan standar kualitas KLHS RPJMD.

3. Dalam penentuan isu strategis, dilakukan analisis terhadap capaian TPB. Analisis dilakukan terhadap 253 indikator TPB yang sesuai dengan kewenangan Provinsi DKI Jakarta yang secara otonomi juga memiliki sebagian kewenangan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui bahwa 26% indikator atau 67 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 46% indikator atau 116 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 2% indikator atau 4 indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, serta 26% indikator atau 66 indikator tidak tersedia data. Perlu pemenuhan data terhadap indikator TPB yang saat ini belum memiliki data, sehingga dapat melihat capaian Provinsi DKI Jakarta yang sebenarnya.

4. KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 menetapkan 6 (enam) isu strategis yaitu: (1) tingginya risiko bencana, (2) keberlanjutan sumber daya alam, (3) kualitas lingkungan hidup masih rendah, (4) ketimpangan sosial-ekonomi, (5) pemanfaatan iptek menuju kota berkelanjutan, dan (6) belum optimalnya tata kelola yang baik.

   Enam isu strategis tersebut merupakan hasil sintesis dari 21 isu pembangunan berkelanjutan yang digali dan diidentifikasi dari tiga sumber. Dari telaah indikator TPB diperoleh 23 isu yang disintesis menjadi 10 isu pembangunan berkelanjutan. Dari telaah kondisi lingkungan hidup diidentifikasi 6 isu strategis yang disintesis menjadi 4 isu pembangunan berkelanjutan. Dan dari telaah dokumen kebijakan dan rencana strategis diidentifikasi 41 isu yang disintesis menjadi 7 isu pembangunan berkelanjutan. Sumber, proses, dan penetapan isu strategis pembangunan berkelanjutan disajikan pada gambar di bawah.

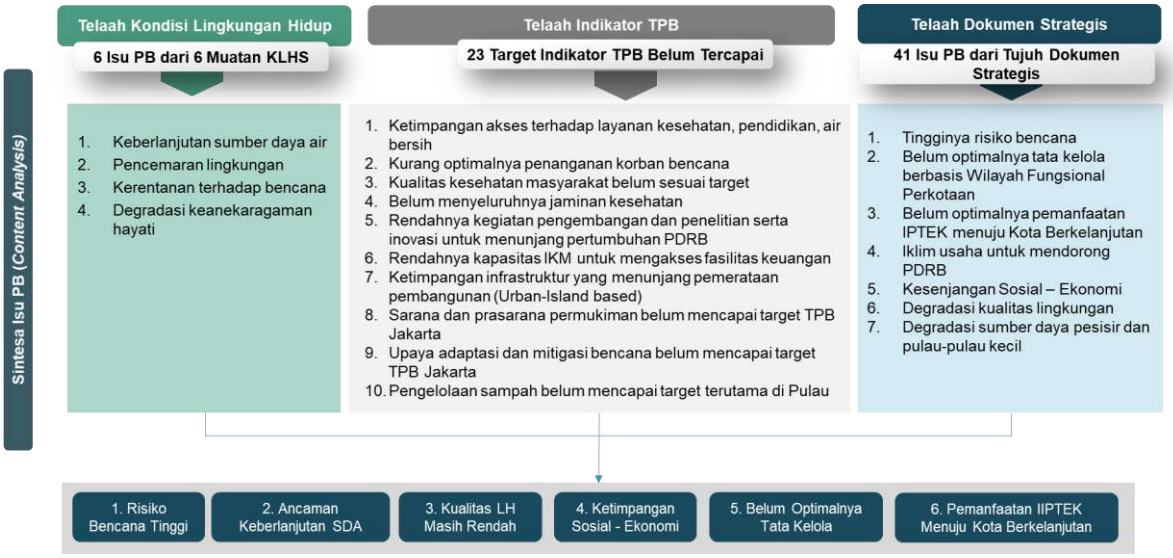

5. Apabila dianalisis lebih lanjut, isu-isu pembangunan dari sumber telaah indikator TPB mempunyai keterkaitan dengan isu strategis satu (risiko bencana), isu strategis 3 (kualitas lingkungan hidup masih rendah – hanya persampahan), dan isu strategis 4 (ketimpangan social-ekonomi). Isu-isu pembangunan dari sumber telaah kondisi lingkungan hidup memiliki keterkaitan dengan isu strategis satu (risiko bencana), isu strategis 2 (keberlanjutan sumber daya alam), dan isu strategis 3 (kualitas lingkungan hidup masih rendah). Sedangkan isu-isu pembangunan dari sumber dokumen kebijakan dan rencana strategis terkait dengan seluruh enam isu strategis.

   Dari analisis pada paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa tata cara identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur oleh Permendagri No. 7/2018 tidak mampu mengidentifikasi rentang keragaman isu strategis sebagaimana diatur oleh PP 46/2016. Hal ini terbukti dengan kenyataan bahwa isu-isu pembangunan dari telaah pencapaian TPB hanya terkait isu strategis risiko bencana, ketimpangan sosial ekonomi, dan lingkungan hidup.(yang terbatas hanya pada persampahan, padahal ada isu kualitas udara dan kualitas air). Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa KLHS sebagaimana diatur oleh Permendagri 7/2018 belum dapat memenuhi tujuan KLHS untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Gubernur No. 215 Tahun 2023 tentang Tim Pembuat KLHS RPJPD 2025 – 2045 dan RPJMD 2025 -2030

GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 215 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030.

KESATU : Membentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim dapat dibantu oleh tenaga ahli yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 215 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua II: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Anggota :
1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

21. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
32. Kepala Sekretariat *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi DKI Jakarta
33. Kepala Perguruan Tinggi/Universitas
34. Kepala Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

B. URAIAN TUGAS TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030

Ketua :

a. mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas anggota Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;

b. menyelenggarakan forum, rapat, atau pertemuan yang diperlukan terkait pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;

c. memastikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 selesai tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

d. membantu Gubernur dalam melakukan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030; dan

e. menyampaikan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 kepada Gubernur untuk dilakukan penjaminan kualitas.

Wakil Ketua :

a. membantu Ketua Tim dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;

b. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030; dan

c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

Sekretaris :

a. Menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;

b. mewakili Ketua dan Wakil Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;

c. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua/Wakil Ketua Tim; dan

d. menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua/Wakil Ketua Tim.

Anggota :

a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim;

b. menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;

c. membantu Sekretaris Tim dalam menyiapkan data, informasi, dan analisis untuk proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030; dan

d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Lampiran 2. Kerangka Acuan Kerja Penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD DKI Jakarta

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN JASA KONSULTANSI

PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Tahun	:	2023
Perangkat Daerah	:	2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Bidang Urusan	:	2.11 / Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Program	:	2.11.02 / Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Kegiatan	:	2.11.02.1.01 / Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
Sub Kegiatan	:	2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
ASK	:	Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Nama Paket	:	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kode RUP	:	33081928
	:	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : (Pengadaan Jasa Konsultansi) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

I. URAIAN PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilakukan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS diwajibkan dalam penyusunan atau evaluasi:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Merujuk pada pasal 18 dan 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dan RPJMD mencakup penyusunan KLHS. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Permendagri 7/2018).

Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu dari 101 daerah yang pada tahun 2022 masa jabatan kepala daerah telah selesai sehingga akan mengikuti Pilkada serentak pada tahun 2024. Pergantian kepala daerah diikuti dengan penyusunan RPJMD sebagai rujukan pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan. Sejalan dengan hal tersebut, periodisasi RPJPD DKI Jakarta juga akan berakhir pada tahun 2025, sehingga

penyelarasan substansi dan periodisasi akan dilakukan baik pada RPJPD maupun RPJMD. Priode RPJPD DKI Jakarta yaitu 2025-2045 sementara RPJMD yaitu 2025-2030. Pada Pasal 26 Permendagri 7/2018 disebutkan bahwa KLHS RPJMD dilakukan bersamaan dengan Rancangan Teknokratik RPJMD. Sementara itu, berdasarkan Pasal 26 Permendagri 7/2018, Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan KLHS RPJPD. Artinya, secara prinsip, prosedur pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD berlaku sama dengan KLHS RPJMD dengan penyesuaian subtansi muatan KRP.

Sehubungan dengan Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 550/5112/Bangda Tanggal 5 Juli 2022 Hal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan KLHS RPJPD, terdapat arahan untuk menganggarkan kegiatan pembuatan dan pelkasnaan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan *environmental safeguard* bagi pelaksanaan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta melalui RPJPD dan RPJMD dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam KRP tersebut sebagai dasar bagi penyusunannya.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Memberikan pandangan yang komprehensif berdasarkan capaian Pembangunan Berkelanjutan dan kondisi lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kondisi dan ketersediaan data terkini.
- Menyusun rekomendasi dalam bentuk arahan kebijakan dan program yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam rancangan awal RPJPD dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta.
- Memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3. SASARAN

Sasaran penyusunan KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD.

4. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5. SUMBER PENDANAAN	Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini adalah APBD Provinsi DKI Jakarta yang dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.	
	Perangkat Daerah	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Program	: 2.11.02 / Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Kegiatan	: 2.11.02.1.01 / Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
	Sub Kegiatan	: 2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
	Aktivitas SK	: Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Nama Paket	: Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
	Kode Rekening	: 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
		:
6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA	K/L/D/I	: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	Satuan Kerja/SKPD	: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
	PA	: Asep Kuswanto, S.E., M.Si. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
	PPK	: Helmy Zulhidayat, S.T., M.T. Kepala Bidang Tata Lingkungan

II. DATA PENUNJANG

7. STANDAR TEKNIS	-
8. STUDI-STUDI TERDAHULU	a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. c. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi DKI Jakarta.

9. REFERENSI HUKUM

a. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
f. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola; dan
k. Peraturan Gubenur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

III. RUANG LINGKUP

10. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini meliputi :

a. Menyusun rencana kerja, daftar kebutuhan data, dan persiapan lainnya untuk menginventarisasi regulasi, data, dan informasi terbaru yang berkaitan dengan penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD.
b. Melakukan studi terhadap regulasi, data, dan informasi terbaru yang berkaitan dengan KLHS RPJPD dan RPJMD.
c. Melaksanakan koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan terkait penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD sampai dengan proses penyampaian permohonan validasi.
d. Melakukan pengkajian pengaruh yang meliputi identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, identifikasi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berdampak terhadap lingkungan hidup, serta analisis pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup.

e. Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP, rekomendasi perbaikan KRP, dan integrasi KRP.
f. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS RPJPD dan RPJMD serta konsultasi publik.
g. Membantu menyiapkan bahan untuk validasi RPJPD dan RPJMD.
h. Membantu PPK dalam mengadakan rapat, *Focus Group Discussion* (FGD), dan konsultasi publik terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan, koordinasi, komunikasi dan pengumpulan data.

11. PERALATAN, MATERIAL, DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

-

12. LINGKUP KEWENANGAN PELAKSANA SWAKELOLA

Pelaksana swakelola melalui Tenaga Ahli memiliki kewenangan untuk:
a. memberikan usulan/masukan terkait dengan materi dan konten kajian/perencanaan.
b. dapat melakukan pencarian data primer dan sekunder yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pekerjaan serta meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk membantu dengan memberikan surat penugasan.

13. PERSONEL

A. Jenis dan Jumlah Tenaga yang Diperlukan

Agar pekerjaan ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan dengan waktu dan dana yang tersedia, tenaga ahli yang diperlukan adalah sebagai berikut:

No	Tenaga Ahli	Pendidikan Minimal	Pengalaman	Jumlah Personil (orang)	Durasi Penugasan (bulan)
1	Tenaga Ahli Muda Golongan II-C (Ketua Tim)	S2 Semua Jurusan	3 tahun	1	7
2	Tenaga Ahli Muda Golongan II-C (Wakil Ketua Tim)	S2 Semua Jurusan	3 tahun	1	7
3	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli Lingkungan)	S1 Semua Jurusan	8 tahun	4	7
4	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli Kebijakan Publik)	S1 Semua Jurusan	8 tahun	1	7

5	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli D3TLH)	S1 Semua Jurusan	8 tahun	1	7

Keterangan:

1. Lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi;
2. Semua tenaga ahli memiliki pengalaman pekerjaan di bidang lingkungan hidup khususnya penyusunan KLHS yang dibuktikan dengan surat keterangan/surat referensi;
3. Membuat riwayat hidup (*curriculum vitae*) yang harus ditulis dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh yang bersangkutan, dan dilampiri fotocopy ijazah yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan pengalaman kerja; dan
4. Tenaga ahli wajib menyampaikan Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditugaskan untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi yang disampaikan dalam usulan teknis.

B. Uraian Tugas

No	Tenaga Ahli	Uraian Tugas
1	Tenaga Ahli Muda Golongan II-C (Ketua Tim)	a. Mengoordinasikan dan mengalokasikan pekerjaan kepada tenaga ahli, menyusun rencana kerja serta persiapan lain yang diperlukan; b. Berkoordinasi dengan pemberi pekerjaan; c. Memimpin diskusi internal tim selama proses penyusunan KLHS RPJMD dan KLHS RPJPD; d. Bertanggung jawab dalam penyusunan KLHS RPJPD; e. Menentukan metodologi dan sistematika penyusunan KLHS RPJPD sesuai dengan ketentuan; f. Melakukan konsultasi publik Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan pemangku kepentingan terkait; g. Menganalisis hasil capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan merumuskan menjadi Isu Pembangunan Berkelanjutan strategis; h. Merumuskan skenario dengan upaya tambahan bagi penyempurnaan muatan RPJPD; i. Menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan RPJPD pada visi, misi dan arahan kebijakan jangka panjang; j. Berkomunikasi dengan penyusun KRP dalam rangka pengintegrasian hasil KLHS ke dalam RPJPD; k. Bersama dengan penyusun RPJPD melakukan penjaminan kualitas KLHS; dan l. Memandu Tim Pembuat KLHS dalam proses validasi KLHS.
2	Tenaga Ahli Muda Golongan II-C (Wakil	a. Membantu ketua tim dalam memastikan berjalannya proses penyusunan KLHS

	Ketua Tim)	RPJPD dan KLHS RPJMD; b. Bertanggung jawab dalam penyusunan KLHS RPJMD; c. Menentukan metodologi dan sistematika penyusunan KLHS RPJMD sesuai dengan ketentuan; d. Melakukan konsultasi publik Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan pemangku kepentingan terkait; e. Menganalisis hasil capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan merumuskan menjadi Isu Pembanguan Berkelanjutan strategis; f. Merumuskan skenario dengan upaya tambahan bagi penyempurnaan muatan RPJMD; g. Menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan RPJMD untuk Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; h. Berkomunikasi dengan penyusun KRP dalam rangka pengintegrasian hasil KLHS ke dalam RPJMD; i. Bersama dengan penyusun RPJMD melakukan penjaminan kualitas KLHS; dan j. Memandu Tim Pembuat KLHS dalam proses validasi KLHS.
3	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli Lingkungan I)	a. Menyusun karakteristik wilayah kajian yang mencakup perkembangan fungsi wilayah (dasar teori); b. Menganalisis hasil capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya untuk tujuan nomor 1-5 dan merumuskan menjadi Isu Pembangunan Berkelanjutan strategis; c. Menganalisis pengaruh kerangka kebijakan RPJPD yang relevan terhadap Isu Pembangunan Berkelanjutan; dan d. Menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan RPJPD pada visi dan misi.
4	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli Lingkungan II)	a. Menyusun karakteristik wilayah kajian yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan keuangan daerah; b. Menganalisis hasil capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya untuk tujuan nomor 6-9 dan merumuskan menjadi Isu Pembangunan Berkelanjutan strategis; c. Menganalisis pengaruh kerangka kebijakan RPJMD yang relevan terhadap Isu Pembangunan Berkelanjutan; dan d. Menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan RPJMD untuk Tujuan, Sasaran dan Strategi.
5	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli Lingkungan III)	a. Menyusun karakteristik wilayah kajian yang mencakup kondisi lingkungan dan peran pemangku kepentingan dalam pencapaian TPB;

		b. Menganalisis hasil capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya untuk tujuan nomor 10-13 dan merumuskan menjadi Isu Pembangunan Berkelanjutan strategis; c. Merumuskan skenario dengan upaya tambahan bagi penyempurnaan muatan RPJPD; dan d. Menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan RPJPD pada arahan kebijakan jangka panjang.
6	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli Lingkungan IV)	a. Menyusun karakteristik wilayah kajian yang mencakup gambaran kondisi lingkungan hidup (profil 6 muatan); b. Menganalisis hasil capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya untuk tujuan nomor 14-17 dan merumuskan menjadi Isu Pembangunan Berkelanjutan strategis; c. Merumuskan skenario dengan upaya tambahan bagi penyempurnaan muatan RPJMD; dan d. Menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan RPJMD untuk Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
7	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli Kebijakan Publik)	a. Membantu Ketua Tim dalam melakukan konsultasi publik Isu Pembangunan Berkelanjutan untuk KLHS RPJPD dan RPJMD dengan pemangku kepentingan terkait; b. Menganalisis kebijakan yang relevan dan esensial terhadap perkembangan Provinsi DKI Jakarta; c. Merumuskan skenario dengan upaya tambahan jangka panjang bagi penyempurnaan muatan RPJPD dan RPJMD berdasarkan kerangka kebijakan terkait; d. Menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan KRP dan usulan pengintegrasian hasil KLHS dalam bahasa pengaturan; dan e. Berkomunikasi dengan penyusun KRP dalam rangka pengintegrasian hasil KLHS ke dalam RPJPD dan RPJMD.
8	Tenaga Ahli Muda II-D (Ahli D3TLH)	a. Melakukan perhitungan dan analisis D3TLH air melalui proyeksi pada tahun kajian berdasarkan hasil kajian D3TLH yang sudah ada; b. Melakukan proyeksi jangka panjang (20 tahun) status D3TLH air untuk KLHS RPJPD; c. Melakukan proyeksi jangka menengah (5 tahun) status D3TLH air untuk KLHS RPJMD; dan d. Melakukan analisis skenario 5 tahun untuk target TPB prioritas.

C. Jadwal Penugasan Personil

Adapun Jadwal penugasan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Bulan ke-							Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
A	TENAGA AHLI								
1	Ketua Tim								1 orang
2	Wakil Ketua Tim								1 orang
3	Ahli Lingkungan								4 orang
4	Ahli Kebijakan Publik								1 orang
5	Ahli D3TLH								1 orang

14. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 7 (tujuh) bulan. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Bulan ke-						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Tahapan Persiapan							
	a. *Kick off meeting*							
	b. Pengumpulan data dan informasi							
2	Pengkajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup							
	a. Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan							
	b. Identifikasi muatan KRP berpengaruh							
	c. Analisis pengaruh							
3	Perumusan alternatif penyempurnaan KRP							
4	Perumusan rekomendasi perbaikan KRP							
5	Penjaminan kualitas KLHS							
6	Permohonan Validasi ke KLHK							
7	Laporan Akhir							

15. LAPORAN

Laporan yang harus dipenuhi dalam pengadaan jasa konsultasi ini berupa **Laporan Akhir** yang meliputi:

- Laporan KLHS RPJPD sebanyak 5 eksemplar, berisi hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, muatan KRP berdampak lingkungan hidup, analisis pengaruh KRP, perumusan alternatif penyempurnaan KRP, perumusan rekomendasi perbaikan KRP, serta penjaminan kualitas untuk KLHS RPJPD.
- Laporan KLHS RPJMD sebanyak 5 eksemplar, berisi hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, muatan KRP berdampak lingkungan hidup, analisis pengaruh KRP, perumusan alternatif penyempurnaan KRP, perumusan rekomendasi perbaikan KRP, serta penjaminan kualitas untuk KLHS RPJMD.

- Laporan Dokumentasi dan *executive summary* KLHS RPJPD sebanyak 5 eksemplar, berisi dokumentasi kegiatan penyusunan KLHS RPJPD dan ringkasan KLHS RPJPD.
- Laporan Dokumentasi dan *executive summary* KLHS RPJMD sebanyak 5 eksemplar, berisi dokumentasi kegiatan penyusunan KLHS RPJMD dan ringkasan KLHS RPJMD.

IV. METODE PENGADAAN

16. METODE PENGADAAN DAN JENIS KONTRAK

a. Metode Pengadaan
Metode pengadaan untuk Penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD menggunakan Swakelola Tipe II sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.

b. Jenis Kontrak
Jenis kontrak untuk kegiatan ini adalah kontrak Lumsum.

21. PERSYARATAN PENYELENGGARA SWAKELOLA

Persyaratan / kualifikasi penyelenggara swakelola yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Perguruan Tinggi Negeri Kementerian/Lembaga lain.
b. Memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk menyediakan barang/jasa yang diswakelolakan.

V. HAL-HAL LAIN

22. PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

23. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Pelaksana swakelola diwajibkan melaksanakan pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan.

24. ALIH PENGETAHUAN

Pelaksana swakelola berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja PPK dalam bentuk rapat dan diskusi sesuai tahapan pekerjaan.

VI. PENUTUP

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dipergunakan sebagai acuan pelaksana swakelola dalam melaksanakan pekerjaan.
b. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, maka segala sesuatu yang termaktub didalam KAK ini akan diteliti kembali.
c. Hal-hal yang belum diatur dalam KAK ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Jakarta, 5 April 2023

Kepala Bidang Tata Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta,
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen

Helmy Zulhidayat, S.T., M.T.
NIP 197808272010011020

Lampiran 3. Focus Group Discussion Penjaringan Isu

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Selasa / 27 Juni 2023
PUKUL : 08.30 WIB s.d Selesai
TEMPAT : Ruang Rapat 1 Lantai 22 Blok G Gedung Balaikota DKI Jakarta
ACARA : FGD Isu Pembangunan Berkelanjutan dalam Penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta

No	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	Tanda Tangan
1	MAH MUKI	SEKRETARIAT DLH		
2	Rika	DLH	08161368455	
3	Adi Wiyana	Tim TA / DIM	0811 15 40603	
4	Olivia	Biro KDH	-	
5	Nomi	ITDI	0812 8022 1844 / [illegible]	
6	Rahmad Wandi Putra	ITDP	0853 7752 8243 / [illegible]	
7	Nur Iman Dinda K	Dinsos	08121277 9017 / [illegible]	
8	M. Chairul Anwar	Disparekraf	0812 [illegible] 4160 / [illegible]	
9	D. Rizqiawan	Ku Dinamkal	08138125 3257 / [illegible]	
10	Fahrudin	Dphil	[illegible]	
11	Velma Dachi	Biro Kesos	0853 7851 8357	
12	Amalia Dewiyana	Biro Kesos	0838 3377 787 / [illegible]	
13	Yeni L	Bappeda	0856 9817 9114 / Yeni.indrawati@gmail.com	
14	Ryan Maulana	Bappeda	0858 6470 0866 / ryan.maulana@jakarta.go.id	
15	Ike	Bappeda	0818 06 [illegible] / [illegible]@yahoo.com	
16	Diana	Bappeda		
17	Intan Lestari	Bappeda	0818 885 7705 / intanlestari@jakarta.go.id	
18	Liura Angelissa	Bappeda	0815 1333 1977 / angelissalivia@gmail.com	
19	Karlini A.V.	Bagian PLH Jakarta Timur	0856 8866 5769 / karlini.av@gmail.com	
20	Iffah Zati	UCLG ASPAC	0822 5246 0235 / [illegible]	

No	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	Tanda Tangan
21	Early	Dinas Perhubungan	08128163049 / [illegible]	
22	FICRUL [illegible] PRIMONO	[illegible]	0878 8066 8982 / [illegible]	
23	HAFIDZ S. PRATAMA	Bappeda	0813 [illegible] 6089 / [illegible]	
24	Alhanta Martha A.	Bappeda	0857 2781 3110 / [illegible]	
25	[illegible]	Bappeda	0812 1152 2107 / [illegible]	
26	Prabowo Yogi N	Bappeda	0812 [illegible] / [illegible]	
27	Mario. M	Dem.	[illegible]	
28	Bonny P.	Bappeda P.	0853 8541 1467	
29	Leily Utari	Bag. PLH JB	0818 7613 92	
30	Dimas Aria .N	Distanhut	0859 2921 6019	
31	Dwi Icah	"	0815 8294 190	
32	Reinaldy	Bio Pemerintahan	0821 0828 3866	
33	Moh Nur P	DPRKP		
34	Atri Ramadhanti	DPRKP		
35	Dwi Wiyati N.	DPRKP		
36	Aren Zoleny R	Dishub		
37	Duani Harrie J	Bio PLH	0813 8224 1895	
38	Anindita P	Dishub	0813 2171 0011	
39	Marcell Sinay	WVI	0821 4937 4287	
40	Oki. A	DLH	0813 8956 1979	
41	Ismaya	PLH JB	0821 1261 32	
42	Dido	Dishub	0857 1587 7014	
43	IMELDA M	VS	0858 822 97 1	
44	Dani	DKUTG	0852 6285 6893	
45	Tariyono	Dinas Damkar	0812 9891 2728	

No	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	Tanda Tangan
46	Dwi Nurcahyani	UI	0812 8008 2[illegible]	
47	DIPY	DPRKP	0813 1592 5385	
48	Rendy Prawiraga	UCLG ASPAC	0897 8337 120	
49	Sri Handayani	DLH	0811-8[illegible]	
50	Fahmi N. A	DLH	0852 9413 8801	
51	Olivia Saunders	IALI PPD Jakarta / PSAL USAKTI	oliviasaunders@trisakti.ac.id	
52	Darsyam N	Disdik	0812 9630 746	
53	Muh. Salman Alkuff	Divers Clean Action	salman@diversceanaction.org	
54	Fauzi Rochman	Dinas Perhubungan	andalalin.dki@gmail.com	
55	Ifni Sholeh	DPPAPP	ifnisholeh@yahoo.com	
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				

Jakarta, 2023
Kepala Bidang Tata Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Helmy Zulhidayat
NIP 197808272010011020

Lampiran 4. Daftar Hadir Konsultasi Publik Isu Strategis KLHS RPJMD

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Kamis / 6 Juli 2023
PUKUL : 08.00 WIB s.d selesai
TEMPAT : Java Ballroom Lantai 2 Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto
ACARA : Konsultasi Publik Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN	
1	ARYATI	PT PLN Indonesia Power		1	
2	Rully. S	PAM JAYA	0813. 8855 9572		2
3	IGAN Subawa Putra	PT PLN Indonesia Power		3	
4	ENDRAWATI F	UI	0813 11233276		4
5	Andhika Gullang C	PT. PJA	08131283162	5	
6	ADE PUSA.A	PT. PJA			6
7	Bastoni Marinbo	PT. PJA		7	
8	ERICSON Dollyano	Walikota Jakarta Timur	ffbjaktim@gmail.com / ericson.simanjuntak@gmail.com		8
9	M. CHAIRUL ANAM	Disparekraf	08199259360 / anwar-p2013@gmail.com	9	
10	Iffah Zati	UCLG ASPAC	082252468735		10

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN	
11	MAULINA FIDY W.	PT. TRANSPORTASI JAKARTA	081328466412 / maulina.fidy@transjakarta.co.id	11	
12	Hasty Wiarie	PAM JAYA	081934114797 / hasty.wiarie@pamjaya.co.id		12
13	Indra	Sarana Jaya	08129244609 / indra.sukenono@sarana-jaya.co.id	13	
14	Nita Noerhayati	Dinas Dukcapil	08132272397 / nita.noerhayati@gmail.com		14
15	YADI. RORAY	PAM JAYA	08129051229	15	
16	Julia Riannisa	Dinas Pendidikan	0856873011 5 / sunpro.disdik@gmail.com		16
17	Yeni.L	Bappeda	085698179914	17	
18	CHOMSYAMLIAR.R	DPPAPP Prov	081287416909		18
19	YOGA	JAYA ANCOL	0856166 2201	19	
20	Bakuan Tarsan Gaing	Puskes SV	0856744 2201		20
21	Pandu	Humas DLH	081301242322	21	
22	Sri Handayani	DIM	0811-847719		22
23	Adi Wijaya	DIM	0811-15-4063	23	

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN	
24	Pradana Yogi N	BAPPEDA	085729580854		24
25	Diaqry Lufi A.	ANCOL	081381715145	25	
26	Mastoma A.W.	ANCOL	085643711029.		26
27	FANDY RAHMAT	BAPPEDA.	08111866778	27	
28	Inke Prima	Bappeda	0818063337 98.		28
29	Early	Dishub	081381670289	29	
30	Dinda	Dishub	089668728990		30
31	Dita Dwi P	Dinas Pendidikan	085738687040	31	
32	Shadry Helmy	Transjakarta	08111777182		32
33	Rohmadi	DLH	0813 1825 4434	33	
34	CIPTA TRI KARTIKAWAN	Bappeda	081311567107		34
35	Sally	Bappeda	081211682525	35	
36	Atheria M.A.	Bappeda	085727813110		36

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN	
37	Ardian Yang	LRT Jakarta	081266[illegible]	37	
38	SWASTIKA HARIMURTI	LRT JAKARTA	085620111205		38
39	Uji R	DLH	0896057495941	39	
40	Dhiz. I	DLH	085673063602		40
41	Leily Utari	Bag PLH JB	081376[illegible]72	41	
42	Rebecca. O	Dishub	082112626978		42
43	Christmas. E.M	Dishub	082116298630	43	
44	LIVIA A.	BAPPEDA	081513335977		44
45	Rizky	Dinas SDA	083136[illegible]	45	
46	Hendra	UCLG ASKAC	0812 6728 0136		46
47	WINARTO	JAYA ANCOL		47	
48	Dian Ayu	Bappeda	0878 8000 9841		48
49	Intan Lestari	Bappeda	0815 885 7705	49	

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN	
50	Muchlisen	Asbang JS			50
51	R. Hazami	RLH JS		51	
52	Wasezli Fauzy A	DLH.	085651298015		52
53	DWI ARIANI	Dinkes	087870249381	53	
54	[illegible]	Dinkes	[illegible] 2323		54
55	Eka.	Dinkes		55	
56	NURAH AGUNG	UVI	081239363436		56
57	Andry	Kelurahan Sevith	0812 8749470	57	
58	Endrawati	Ketua Pusat Studi Pengelolaan Perkebunan Trunakti			58
59	Ananda	Dkpkp DKI	082260756123	59	
60	Imam Filmatu	Bupnp DKI	08224597 2715		60
61	T. Imam Gusnanda	Biro Kesos	085260303230	61	
62	Indah K	B. Hukum	087888184212		62

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN	
63	Agus N	DPRKP	08131315996 2	63	
64	Novianti	DPRKP	0812 8741 7660		64
65	Rahmad Wandi Putra	TTDP	0853 7512 8793	65	
66	R. Aju Ela Supraptiti	BPBD	0812 8564876		66
67	Ferry Sriyono	Apindo	0811832466	67	
68	Irwan Ade Putra	Walikota Jakarta Pusat (Bag. PLP)	0819 0205 1211		68
69	Hafidz S. Pakaya	Bapeda	0815 6161 6184	69	
70	Aline - Farzan S	Disdamkwt	08170577560		70
71	Muh. Salman Alkupy	Divers Clean Action	085312696867	71	
72	Camelia	Peruruda Palyapya	081381266935		72
73	Fakhrurul M.A.	Peruruda Palyapya	087880800393	73	
74	Dede Sudewa	Palyapya	—		74
75	Widya K.	B. Hukum		75	

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN	
76	NADEVAN	PT JIEP	0813352113 11		76
77	Tri Ladi	JIEP	08122715706	77	
78	Mardan. T	JIEP	0812 8582214g		78
79	Fran. Lui. L	JIEP	8811 800 744	79	
80	Marcell	WM	08214437 4287		80
81	Septiato R	Biro Perkeu	0899 3936675	81	
82	M. Yusuf	DLH PSMDI	08129480 1166		82
83	Wawan H	DLH PSMDI		83	
84	Wiwiet Mugi Lestari	DCKTRP	0815 8723329		84
85	IMAM P	Bag PLH JU	08121054 3838	85	
86	Djatmiko	PSMDI / DLH	0813 4819 0461		86
87	Yusi Iosia	Ro PLH	0815 1339 0008	87	
88	Martinarytyas	Ro. PLH	0812 0227 3536		88

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP /EMAIL	TANDA TANGAN	
89	Farul A	B. Hukum		89	
90	Silvia	Biro Hukum	Subagpttf@gmail.com		90
91	Annisa	SDGs Jakarta	annisakusuma@jakarta.go.id	91	
92	Anom	BPKD			92
93	Sapudoin	BPKD		93	
94	Tri Tri Tuliapro	Dinas KPKP	0811 86 85884 / tpk_doi@yahoo.com		94
95	Cahyani	DLH	cahyani_era@yahoo.com	95	
96					96
97				97	
98					98

Jakarta, 2023
Kepala Bidang Tata Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Helmy Zulhidayat
NIP 197808272010011020

Lampiran 5. Berita Acara Konsultasi Publik Isu Strategis KLHS RPJMD

BERITA ACARA
KONSULTASI PUBLIK ISU STRATEGIS
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta 2025 - 2030
Jakarta, 6 Juli 2023

Pada hari Kamis tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilaksanakan **Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta 2025-2030,** bertempat di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta, yang dihadiri oleh Kelompok Kerja (POKJA) KLHS dan Pemangku Kepentingan Terkait, sebagaimana terlampir dalam absensi pelaksanaan kegiatan. Adapun beberapa hal yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah:

1. Isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis untuk KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025-2030, meliputi:
   a. Tingginya Resiko Bencana
   b. Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam
   c. Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah
   d. Ketimpangan Sosial – Ekonomi
   e. Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*)
   f. Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK menuju Kota berkelanjutan

2. Catatan pengkayaan Isu Strategis berupa:
   a. Masing-masing isu strategis perlu didukung dengan data yang memadai dan valid (*baseline*).
   b. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu dipertimbangkan dalam perumusan isu pembangunan berkelanjutan jangka menengah di DKI Jakarta terkait dengan:
      - aspek kesehatan, antara lain pengentasan *stunting*
      - aspek pendidikan untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten sehingga dapat berdaya saing dengan kota besar lainnya di dunia
      - aspek perumahan dan pemukiman dengan fokus pada akses air minum aman dalam jaringan perpipaan, hunian dengan sanitasi aman dan pengelolaan sampah.
   c. Infrastruktur perkotaan yang mencakup aksesibilitas transportasi, sanitasi berkelanjutan, jaringan perpipaan, jaringan drainase dan infrastruktur kebencanaan dapat memperkaya isu strategis terkait dengan kualitas lingkungan hidup. Isu kualitas lingkungan hidup juga perlu penekanan pada perubahan iklim dan energi.
3. Tindak lanjut kegiatan berupa:
   a. Perlunya pelaporan progres penyusunan KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri
   b. Penyusunan alternatif skenario jangka menengah (5 tahun) dengan dan tanpa upaya tambahan sebagai dasar perumusan rekomendasi KLHS
4. Penyusunan RAD TPB periode selanjutnya perlu adanya penelaahan indikator TPB yang relevan untuk DKI Jakarta.

Demikian Berita Acara Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2025-2030 ini dibuat dan ditandatangani oleh:

1. POKJA KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2030 yang diwakili oleh Bpk. Helmy Zulhidayat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Tim Penyusun RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2030 yang diwakili oleh Ibu Yeni Lindawati dari Bappeda Provinsi DKI Jakarta

3. Lembaga Swadaya Masyarakat diwakili oleh Bpk. M. Salman Al Kufy dari Divers Clean Action
4. Pelaku usaha yang diwakili oleh Ibu Camelia dari Perumda Paljaya

Dokumentasi kegiatan berupa notulensi dan rekaman rapat menjadi bagian dari Berita Acara ini.

Jakarta, 6 Juli 2023

POKJA KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2030 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Tim Penyusun RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2030 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
(Helmy Zulhidayat)	(Yeni Lindawati)
Pelaku usaha Perumda Paljaya	Lembaga Swadaya Masyarakat Divers Clean Action
(Camelia)	(Salman Al Kufy)

Lampiran 6. Konsultasi Publik Alternatif Skenario KLHS RPJMD

BERITA ACARA
KONSULTASI PUBLIK ISU STRATEGIS
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta 2025 - 2030
Jakarta, 9 November 2023

Pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilaksanakan **Konsultasi Publik 2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta 2025-2029,** bertempat di Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta, yang dihadiri oleh Kelompok Kerja (POKJA) KLHS dan Pemangku Kepentingan Terkait, sebagaimana terlampir dalam absensi pelaksanaan kegiatan. Adapun beberapa hal yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah:

1. Isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis untuk KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025-2029, meliputi:
   a. Tingginya Risiko Bencana
   b. Ancaman terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam
   c. Kualitas Lingkungan Hidup masih rendah
   d. Ketimpangan Sosial – Ekonomi
   e. Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*)
   f. Belum Optimalnya Pemanfaatan IPTEK menuju Kota berkelanjutan
2. Alternatif dan Rekomendasi KLHS RPJMD didasari atas hasil rekomendasi arahan kebijakan tahapan I (2025 – 2029) pada KLHS RPJPD 2025-2045
3. Rekomendasi KLHS RPJMD diusulkan terintegrasi pada Rancangan Awal RPJMD yang terdiri atas:
   a. Rekomendasi Arahan Kebijakan untuk Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
   b. Rekomendasi Arahan Program untuk Program Pembangunan Daerah

   Rekomendasi KLHS RPJMD sebagaimana terlampir.
4. Secara umum, penyusunan antara isu strategis hingga rekomendasi telah berkesinambungan sesuai dengan Permendagri 7/2018 tentang KLHS RPJMD dan pedoman umum KLHS RPJMD
5. Catatan pengayaan Rekomendasi KLHS yaitu:
   a. Proyeksi isu LH tidak mencerminkan dilakukan dengan pendekatan sistem/ terintegrasi dan tidak ada *feedback* antar isu
   b. Perlunya analisis isu strategis pada perwujudan Provinsi Jakarta pasca Ibukota Negara
   c. Belum terlihat analisis pada beberapa aspek penting RPJPN 2025-2045, seperti pengurangan emisi dan aspek biodiversitas
   d. Perumusan kebijakan perlu lebih spesifik dan menyertakan target yang kuantitatif
   e. Perlu pertimbangan keterlibatan Jakarta dalam *Sustainable City Investment Program (SCIP)*, yang memiliki 4 (empat) fokus utama:
      i. Decarbonize City
      ii. Resilient Disaster City

iii. *Biodiversity City*
iv. *Circular City*

f. Target 100% perpipaan pada dokumen RTRW 2042 perlu diarusutamakan pada Rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD.
g. Perlu penekanan pada kegiatan pengelolaan sumber daya air termasuk RTH dan sumur resapan.
h. Aset-aset pemerintah pusat perlu dipertimbangkan, mengingat terjadi perubahan status Jakarta yang tidak lagi menjadi Ibu Kota
i. Permasalahan emisi GRK dapat menjadi salah satu fokus kajian
j. Pengelolaan limbah (cair dan B3) mempengaruhi keberlanjutan sumber daya air.

6. Tindak lanjut kegiatan berupa:
   a. Pendokumentasian KLHS
   b. Penjaminan Kualitas KLHS
   c. Validasi KLHS
   d. Integrasi KLHS RPJMD terhadap penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD yang akan dilakukan pada tahun 2024.

Demikian Berita Acara Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2025-2029 ini dibuat.

Lampiran 7. Kompetensi Tenaga Ahli

Adi Wiyana – Ketua Tim

Nama	Adi Wiyana
Pendidikan	• Menyelesaikan mata kuliah program S3, Perencanaan dan Pengelolaan Pesisir dan Lautan, IPB Bogor, 2004. • MS, Development Sociology, Cornell University, New York, USA, 1991. • Drs. Teaching English as a Foreign Language (TEFL) and Minor in Linguistics, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, 1978. • BA. Bahasa dan Sastra Inggris, IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, 1975.
Pelatihan profesional	• SEA Training of Trainers pada tahun 2010 (GTZ), Germany. • Pelatihan Lingkungan Hidup: Amdal di Universitas Gajah Mada dan Environmentally-Sound Developmen Planning di Washington, D.C., USA. • Perencanaan dan Pengelolaan: Project Implementation Course (USAID); Rural and Regional Development Planning, AIT, Bangkok; Performance-Based Contracting; Perencanaan Pembangunan Wilayah, UGM; dan lainnya
Bahasa dan Tingkat Kemahiran	Bahasa: Indonesia — Berbicara: Bahasa Asli; Membaca: Bahasa Asli; Menulis: Bahasa Asli Bahasa: Inggris — Berbicara: Fasih; Membaca: Fasih; Menulis: Fasih
Pengalaman Kerja Profesional	• 2017 – sekarang, PT. Dharma Ina Mandiri, Tenaga Ahli KLHS berbagai kegiatan (pool expert) • 2015 – 2017, PT. Dharma Ina Mandiri dan Conservation International, Team Leader dan Tenaga Ahli KLHS. • 2013 – 2014, Kemendagri, Integra Consulting dan DHI, Tenaga Ahli KLHS • 2007 – 2012, Kemendagri dan DANIDA, Team Leader untuk berbagai pengembangan KLHS di daerah. • 2005 – 2006, PT. Bina Marina Nusantara, Team Leader untuk pengembangan perlindungan sumber daya daerah pesisir • 2002 – 2005, IRG dan CRC/URI, Advisor Kebijakan dan Kordinator Program Nasional, Management sumber daya pesisir. • 1998 – 2002, International Resources Group – IRG, Deputy Chief of Party, Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam • 1997 – 1998, World Bank/RSI, Rural Development and Natural Resources Advisor • 1978 – 1997, USAID/Indonesia, Program Specialist; Project Manager for pollution prevention
Pengalaman Proyek (pilihan)	Proyek : Penyusunan KLHS RTRW Jakarta 2040 – DLH Provinsi DKI Jakarta Posisi : Tenaga Ahli Sumber daya Pesisir Lokasi/Periode : Jakarta / 2021 - 2022 Deskripsi Pekerjaan: Mendampingi POKJA KLHS RTRW provinsi DKI Jakarta dalam: a. Melakukan studi terhadap regulasi, data dan informasi terbaru yang berkaitan dengan KLHS RTRW Jakarta 2040. b. Melaksanakan koordinasi intensif dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait penyusunan KLHS, terutama dengan KLHK, agar KLHS dapat divalidasi. c. Mengidentifikasi materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi LH dan identifikasi prioritasnya. d. Menganalisis pengaruh KRP terhadap kondisi LH. e. Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP dan rekomendasi perbaikan KRP dan integrasi KRP dalam RTRW Jakarta 2040. f. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS dan konsultasi publik. g. Melaksanakan pembahasan pra validasi dan validasi ke KLHK.

	h. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
	Proyek : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kepelabuhan Tanjung Carat (Proyek Strategis Nasional Pembangungan Palembang Baru) Posisi : Tenaga Ahli KLHS / Sumber daya pesisir Lokasi/Periode : Jakarta / 2021 Deskripsi Pekerjaan : Mendampingi kegiatan pembuatan KLHS Kepelabuhanan Tanjung Carat 2021 Kementerian Perhubungan dalam kegiatan Forum Group Diskusi (FGD), Konsultasi Publik, sampai dengan Tahap Validasi, dengan beberapa mekanisme berikut. (i) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (ii) perumusan isu pembangunan berkelanjutan daerah; (iii) analisis profil 6 muatan: daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, dampak/risiko lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (KEHATI) dan kerentanan perubahan iklim; (iv) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; (v) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
	Proyek/Pemberi : Penyusunan KLHS RPJMD untuk Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, BPPT – Pemda Kabupaten Deiyai Posisi : Tenaga Ahli KLHS Lokasi/Periode : Kabupaten Deiyai, Papua, 2019 Deskripsi Pekerjaan : • Memberikan pendampingan kepada POKJA KLHS dan tim tenaga ahli KLHS di tingkat daerah untuk memastikan proses dan penyusunan laporan KLHS terlaksana dengan baik, berfokus pada isu strategis yang penting dan menyeluruh, berbasis fakta dan data yang valid • Menyusun laporan KLHS berkolaborasi dengan tenaga ahli lainnya dari BPPT • Memfasilitasi POKJA KLHS dalam merumuskan rekomendasi
	Proyek/Pemberi : Penyusunan KLHS RPJMD untuk Kota Pangkal Pinang, Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Posisi : Tenaga Ahli KLHS Lokasi/Periode : Pangkal Pinang, Juli- Desember 2018 Deskripsi Pekerjaan : • Memberikan pendampingan kepada POKJA KLHS dan tim tenaga ahli KLHS di tingkat daerah untuk memastikan proses dan penyusunan laporan KLHS terlaksana dengan baik, berfokus pada isu strategis yang penting dan menyeluruh, berbasis fakta dan data yang valid • Memfasilitasi POKJA KLHS dalam merumuskan rekomendasi
	Proyek/Pemberi : Penyusunan KLHS RPJMD untuk Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Posisi : Tenaga Ahli KLHS Lokasi/Periode : Boven Digoel, Maret – September 2018 Deskripsi Pekerjaan : • Memberikan pendampingan kepada POKJA KLHS dan tim tenaga ahli KLHS di tingkat daerah untuk memastikan proses dan penyusunan laporan KLHS terlaksana dengan baik, sesuai dengan PermenLHK 69/2017 dan Permendagri 7/2018 • Memfasilitasi POKJA KLHS dalam merumuskan rekomendasi
	Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kebijakan Pengelolaan Dampak Dan Risiko Yang Ditimbulkan Oleh Pengelolaan Tailing PT. Freeport Indonesia Dan Pengamanan Ekosistem Sungai, Estuari, Dan Laut Yang Terkait, Kementerian LHK Posisi : Tenaga Ahli KLHS Lokasi/Periode : Jakarta, Februari –Agustus 2018

Deskripsi Pekerjaan :
Mengkaji kebijakan pemerintahan saat ini dan mencari gap yang ada mencakup kegiatan pengelolaan tailing PTFI dan mengidentifikasi terobosan baru, meningkatkan dan/atau memperkaya kebijakan untuk pengelolaan tailing PTFI dan mitigasi dampak/risiko lingkungan hidup terhadap ekosistem sungai, muara, laut dan masyarakat.

Proyek/Pemberi : Pelatihan KLHS untuk Provinsi Aceh, WWF-MCAI
Posisi : Fasilitator
Lokasi/Periode : Banda Aceh, 2017
Deskripsi Pekerjaan :
- Mempersiapkan materi pelatihan
- Menyampaikan pelatihan

Proyek/Pemberi : Fasilitasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk RTRW dan RPJMD Kabupaten Dharmasraya, WWF-MCAI
Posisi : Team Leader
Lokasi/Periode : Dharmasraya, 2017
Deskripsi Pekerjaan :
Bertanggung jawab untuk mendampingi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KLHS, memberikan pelatihan, dan mengawasi implementasi KLHS untuk Rencana Tata Ruang Kabupaten Dharmasraya. Serta memastikan kualitas KLHS secara keseluruhan. Sebagai penanggung jawab untuk mengelola dan memobilisasi anggota tim.

Proyek/Pemberi : ESP3 Danida 1222-4 – Pendampingan Teknis untuk KLHK dalam rangka Pemahaman Umum dan pedoman KLHS. Backstopping Management, ESP3-DANIDA, KLHK
Posisi : Tenaga Ahli KLHS
Lokasi/Periode : Desember 2016 - April 2017
Deskripsi Pekerjaan :
- Mendukung KLHK, Kemendagri dan kementerian terkait lainnya dalam mencapai pemahaman bersama tentang prinsip, konsep, metodologi, alat, dan keragaman pelaksanaan KLHS dalam perencanaan, kebijakan, dan program Indonesia dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
- Dukungan untuk Direktorat KLHKK KLHK untuk meningkatkan kapasitas teknis dan pengetahuan dalam penyusunan pedoman KLHS
- Secara langsung ikut dalam penyusunan PermenLHK 69/2017 tentang KLHS

Proyek/Pemberi : Peningkatan Kapasitas KLHS untuk Pusat Studi Lingkungan melalui Penyusunan Modul Training dan Pelatihan (ToT) di tingkat Nasional dan Daerah Terpilih. ESP3-DANIDA
Posisi : Tenaga Ahli KLHS
Lokasi/Periode : Jakarta, Makassar, Solo, Agustus 2016 - Januari 2017
Deskripsi Pekerjaan :
Menyiapkan basis program peningkatan kapasitas KLHS dan menguji serta memulai implementasi program pelatihan berjenjang dalam penerapan KLHS di tingkat daerah untuk ToT Pusat Studi Lingkungan (PSL) di 4 daerah. Kegiatannya meliputi strategi untuk membangun dan meningkatkan kapasitas PSL dalam pelaksanaan KLHS, penyusunan Modul ToT KLHS untuk pelatih dan peserta pelatihan, Ujicoba Program ToT KLHS, melaksanakan Program ToT di daerah PSL, laporan sintesis dari proses, pembelajaran, dan langkah ke depan untuk peningkatan kapasitas PSL di penjuru Indonesia.

Proyek/Pemberi : ESP3 Danida 1512-1: Bantuan Teknis untuk Pemkab. Temanggung, Magelang, dan Sukoharjo mengenai Penyusunan KLHS RTRWK. Pemprov. Jateng - ESP3 DANIDA.
Posisi : Tenaga Ahli KLHS Nasional
Lokasi/Periode : Agustus 2016 - April 2017
Deskripsi Pekerjaan :
- Mendampingi POKJA KLHS dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS sehingga dihasilkan

dokumen KLHS yang berkualitas baik

- Mengikuti serangkaian FGD dan konsultasi publik di masing-masing kabupaten untuk mengarahkan POKJA KLHS dalam menentukan Isu strategis, alternative dan rekomendasi sehingga secara tidak langsung berupaya meningkatkan kapasitas POKJA KLHS.

Proyek/Pemberi : Pendampingan Teknis untuk Kementerian Dalam Negeri dalam Pengembangan Wilayah berbasis lingkungan, ESP3-DANIDA Kemendagri
Posisi : Team Leader
Lokasi/Periode : Jakarta, 2016
Deskripsi Pekerjaan :

- Membantu Ditjen Bangda Kemendagri untuk berkoordinasi dengan 6 POKJA KLHS di daerah dan 2 konsultan KLHS yang ditunjuk oleh ESP3 (masing-masing mendukung satu pemerintah daerah) selama pengembangan KLHS di masing-masing pemerintah daerah
- mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik dari KLHS yang sedang berlangsung dan memberikan analisis singkat khususnya terkait dengan penerapan pedoman KLHS KLHK dan pedoman KLHS Kemendagri.
- Berpartisipasi sebagai nara sumber dalam kegiatan.
- Berpartisipasi dalam lokakarya nasional
- Mengumpulkan pembelajaran dari pemerintah daerah terpilih (setidaknya 5 pemerintah daerah dari Indonesia barat, tengah dan timur) yang menyusun KLHS RPJMD
- Menulis analisis tentang pembelajaran tersebut yang diambil terkait dengan proses, pengembangan kapasitas, kerangka kerja peraturan, dukungan pemerintah dan non-pemerintah terhadap pengembangan KLHS di tingkat daerah
- Memastikan kualitas seluruh hasil kerja dan juga sebagai penanggung jawab untuk mengelola dan memobilisasi anggota tim.

Proyek/Pemberi : Pengembangan Kapasitas dan Kesadaran mengenai pentingnya KLHS, Ditjen Bangda Kemendagri
Posisi : Tenaga Ahli KLHS
Lokasi/Periode : Jakarta, 2015 – 2016
Deskripsi Pekerjaan :

- Melakukan serangkaian lokakarya sosialisasi KLHS (di Lombok, Semarang, Yogyakarta) pada 2015 untuk staf terpilih dari 259 pemerintah daerah yang melakukan pilkada serentak pada 2015.
- Memberikan serangkaian sesi pelatihan KLHS (di Medan, Yogyakarta, Jakarta) pada tahun 2016 untuk staf terpilih dari 259 pemerintah daerah yang melakukan pilkada serentak pada tahun 2015.

Proyek/Pemberi : Pendampingan Teknis KLHS di Kabupaten Tapanuli Utara, Conservation International Indonesia, USAID, dan Monsanto Foundation.
Posisi : Team Leader / Tenaga Ahli KLHS
Lokasi/Periode : Tapanuli Utara, 2015 – 2016
Deskripsi Pekerjaan :

- Mendampingi pemerintah daerah dalam pelaksanaan KLHS untuk mengintegrasikannya dalam kerangka kerja pembangunan rendah emisi dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan;
- Mengembangkan kapasitas lokal di dalam pemerintah daerah (staf lembaga teknis dan anggota Pokja) dan di luar pemerintah daerah (LSM lokal) untuk melakukan KLHS, melalui kelas dan on the job training;
- Membantu pemerintah daerah untuk mengkaji kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang ada, menyelaraskan berbagai KRP, dan memberikan rekomendasi tentang strategi Pembangunan Rendah Emisi (LED);

- Menyediakan data dan informasi tentang sosial-ekonomi dan nilai-nilai budaya lokal;
- Mendorong investasi dari sektor swasta dengan mendukung KRP yang telah diselaraskan dan sistem regulasi yang disederhanakan;
- Memfasilitasi diskusi dengan dewan Forum Multi-Pemangku Kepentingan (MSF) dan memfasilitasi lokakarya tentang rencana penggunaan lahan alternatif;
- Menyusun laporan akhir KLHS yang mendokumentasikan semua proses dan hasil KLHS.

Proyek/Pemberi : Penyusunan KLHS untuk RPJMD di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Riau dan Kepulauan Riau serta di Kabupaten/Kota: Tapin (Kalsel), Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Lampung Utara (Lampung), Indragiri Hilir dan Kuansing (Riau), Kemedagri dan Pemerintah Daerah terkait.
Posisi : Tenaga Ahli KLHS
Lokasi/Periode : Indonesia, 2013 – 2014
Deskripsi Pekerjaan :

- Memberikan pelatihan KLHS;
- Memfasilitasi proses KLHS (pra-pelingkupan, pelingkupan dan data baseline, kajian dampak, pengembangan langkah-langkah mitigasi dan / atau alternatif, perumusan rekomendasi KLHS);
- Menyusun laporan KLHS;
- Melakukan penjaminan kualitas.

Proyek/Pemberi : Penyusunan KLHS MP3EI untuk Koridor Bali-Nusa Tenggara, DANIDA-ESP3
Posisi : Tenaga Ahli KLHS - Kordinator
Lokasi/Periode : Bali, 2013 – 2014
Deskripsi Pekerjaan :

- Melakukan pra-pelingkupan;
- Memfasilitasi pelingkupan KLHS dan mengembangkan data baseline;
- Melakukan kajian dan analisis, bekerja sama dengan para ahli multi disiplin;
- Menyiapkan laporan pra-pelingkupan, laporan pelingkupan, dan laporan akhir KLHS.

Proyek/Pemberi : ESP 2 - SEA for Capacity Building and Awareness Raising Activity, ESP3 DANIDA Kemendagri
Posisi : Tenaga Ahli KLHS
Lokasi/Periode : Jakarta, 2012
Deskripsi Pekerjaan :

- Mengembangkan materi untuk acara peluncuran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 67/2012 tentang KLHS;
- Memberikan serangkaian pelatihan untuk pelatih KLHS yang melibatkan peserta dari berbagai provinsi;
- Mengembangkan dan mendistribusikan materi penyadaran KLHS, termasuk materi visual dan cetak;
- Melakukan FGD pembangunan berkelanjutan bagi pembangunan daerah;
- Merevisi modul pelatihan KLHS sesuai dengan peraturan Kemendagri tentang KLHS;
- Memberikan bantuan, konsultasi, dan fasilitasi berbasis permintaan untuk pelaksanaan KLHS di provinsi, kabupaten / kota;
- Mengembangkan kriteria untuk pemilihan pemerintah daerah untuk menerima bantuan teknis pelaksanaan KLHS;
- Membantu pemerintah daerah dalam penerapan KLHS;
- Mempersiapkan laporan kemajuan dan laporan akhir tentang KLHS dan implementasi konsultasi.

Proyek/Pemberi : Pilot Applications of Strategic Environmental Assessment (SEA), ESP2 – Danida

	Posisi : Team Leader/ Tenaga Ahli KLHS Lokasi/Periode : 2007 - 2011 Deskripsi Pekerjaan : • Mengembangkan modul pelatihan KLHS; • Memberikan pelatihan KLHS; • Memberikan bantuan teknis dan fasilitasi dalam peaksanaan KLHS; • Mempersiapkan laporan kemajuan dan laporan akhir. • Melakukan penjaminan kualitas laporan KLHS

Endrawati Fatimah – Wakil Ketua/ Koordinator RPJPD

Nama	Endrawati Fatimah
Pendidikan	• Jurusan Mekanisasi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 1986 • Post graduate Diploma in Planning (Third World), Faculty of Architecture and Planning, Department of Geographical Sciences and Planning, University of Queensland, Australia, tahun 1991. Dinilai sama dengan ijasah negeri sebagai Spesialis Satu (SP I) berdasarkan SK Mendikbud No. 1118/Kep.Dikti/IJIN/1996. • Master of Planning Studies, Faculty of Architecture and Planning, Department of Geographical Sciences and Planning, University of Queensland, Australia, tahun 1994. Dinilai sama dengan ijasah negeri sebagai Magister (Strata 2) berdasarkan SK Mendikbud No. 1118/Kep.Dikti/IJIN/1996. • Doktor Ilmu Lingkungan , PS Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, tahun 2009
Pelatihan profesional	• Joint Inter-Ministerial SEA Training, 2012, Danida dan KLH, Jakarta • Workshop Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Perencanaan Ruang, 5 – 6 September 2012, KLH dan Unversitas Trisakti, Jakarta • Pelatihan SPSS, 16-19 Juni 1997, Lembaga Penelitian, Usakti • Kursus AutoCAD Basic, Intermediate dan Advance Rel.13, 1997, PT Harrisma Agung Jaya, Jakarta • Kursus Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 29 Januari – 9 Feb 1991, Universitas Indonesia, Jakarta Sertifikat Keahlian: • Ahli Utama Perencana Wilayah dan Perkotaan LPJK – IAP No. 027/BSP-IAP/LPJKN/IV/2005, Jakarta, tanggal 8 April 2005 • Ahli Madya Perencanaan Wilayah dan Kota LPJK – IAP No. 0866/BSP-IAP/LPJKN/IX/2009, Jakarta tanggal 1 September 2009 • Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota – Utama LPJKN No registrasi 1.5.502.1.088.09.1048258, Jakarta 22 Agustus 2014

Bahasa dan Tingkat Kemahiran	Bahasa	Berbicara	Membaca	Menulis
	Indonesia	Bahasa asli		
	English	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Pengalaman Kerja Profesional	• 2013 – sekarang : Wakil Dekan IV Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama FALTL, Universitas Trisakti • 1996 – sekarang : Dosen Jurusan Teknik Planologi, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan (FALTL), Universitas Trisakti. • 1995-1996: Anggota Tim Persiapan Pendirian Jurusan Teknik Planologi, Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti • 1995 – 1996 : Dosen Jurusan Arsitektur Lansekap, Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti. • 1988 – 1994 : Staf Bidang Fisik dan Prasarana, Bapeda Tingkat I Kalimantan Timur
Pengalaman Proyek (pilihan)	Proyek : Penyusunan KLHS RTRW Jakarta 2040 – DLH Provinsi DKI Jakarta Posisi : Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota Lokasi/Periode : Jakarta / 2021 - 2022 Deskripsi Pekerjaan: Mendampingi POKJA KLHS RTRW provinsi DKI Jakarta dalam: a. Melakukan studi terhadap regulasi, data dan informasi terbaru yang berkaitan dengan KLHS RTRW Jakarta 2040. b. Melaksanakan koordinasi intensif dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait penyusunan KLHS, terutama dengan KLHK, agar KLHS dapat divalidasi.

	c. Mengidentifikasi materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi LH dan identifikasi prioritasnya. d. Menganalisis pengaruh KRP terhadap kondisi LH. e. Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP dan rekomendasi perbaikan KRP dan integrasi KRP dalam RTRW Jakarta 2040. f. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS dan konsultasi publik. g. Melaksanakan pembahasan pra validasi dan validasi ke KLHK. h. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
	Proyek/Pemberi : Penataan Kawasan Sentra Flora Fauna Semanan Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapeko Jakarta Barat Posisi : Ahli Perkotaan Lokasi/Periode : Jakarta, September – Desember 2019 Deskripsi Pekerjaan : • Memberikan rekomendasi penataan Kawasan Sentra Semanan yang ramah lingkungan sesuai dengan arahan sebagai salah satu Kawasan wisata • Merekomendasikan program dalam rangkapengembangan sentra semanan seperti pengembangan promosi.
	Proyek/Pemberi : Pedoman Penentuan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup, Kementerian LHK Posisi : Narasumber/Penyunting Lokasi/Periode : Jakarta, Desember 2018 – Maret 2019 Deskripsi Pekerjaan : • Memberikan arahan pendekatan analisis daya dukung dan daya tampung yang implementatif bagi pelaksanaan di daerah • Memberikan rekomendasi arahan pemanfataan daya dukung dan daya tampung bagi perencanaan di daerah, baik secara tata ruang maupun perencanaan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan secara umum.
	Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKI Jakarta, Dinas KKKP DKI Jakarta Posisi : Ahli Lingkungan Lokasi/Periode : Jakarta, September – Desember 2018 Deskripsi Pekerjaan : • Merumuskan isu strategis berdasarkan data primer dan sekunder termasuk serangkaian FGD • Menganalisis kondisi lingkungan hidup dalam lingkup wilayah zonasi • Merumuskan alternative dan strategi sebagai rekomendasi untuk RZWP3K
	Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kebijakan Pengelolaan Dampak Dan Risiko Yang Ditimbulkan Oleh Pengelolaan Tailing PT. Freeport Indonesia Dan Pengamanan Ekosistem Sungai, Estuari, Dan Laut Yang Terkait, Kementerian LHK Posisi : Ahli Lingkungan Lokasi/Periode : Jakarta, Februari –Agustus 2018 Deskripsi Pekerjaan : Mengkaji kebijakan pemerintahan saat ini dan mencari gap yang ada mencakup kegiatan pengelolaan tailing PTFI dan mengidentifikasi terobosan baru, meningkatkan dan/atau memperkaya kebijakan untuk pengelolaan tailing PTFI dan mitigasi dampak/risiko lingkungan hidup terhadap ekosistem sungai, muara, laut dan masyarakat.

	Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pegunungan Kendeng Yang Berkelanjutan Tahap I dan Tahap II Posisi : Ahli Daya Dukung Lingkungan Lokasi/Periode : Jakarta, Oktober 2016 – April 2017 Deskripsi Pekerjaan : • Mengidentifikasi kondisi daya dukung terutama pada sumber daya lahan dan air • Memproyeksikan dampak dari pertumbuhan penduduk dan ekonomi terkait dengan terbatasnya ketersediaan lahan dan air di lokasi Kendeng • Merekomendasikan strategi pengembangan berbasis kondisi daya dukung lingkungan
	Proyek/Pemberi : Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan di Pulau Sumatera, BPIW – Kemen PUPR PT Gafa Multi Consultant Posisi : Team Leader Lokasi/Periode : Juni – Des 2015 Deskripsi Pekerjaan :
	Proyek/Pemberi : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTR Kawasan Strategis Propinsi Pantura DKI Jakarta, BPLHD DKI Jakarta Posisi : Ahli Lingkungan Lokasi/Periode : Jakarta, Juli – November 2016 Deskripsi Pekerjaan : • Merumuskan isu strategis di Kawasan Pantura • Menganalisis dampak potensial dalam usulan pengemangan • Memberikan rekomendasi dari strategi mitigasi dan adaptasi
	Proyek/Pemberi : Penyusunan Naskah akademis RPPLH dan Daya Dukung DKI Jakarta, BPLHD DKI Jakarta Posisi : Ahli Lingkungan Lokasi/Periode : Juni – Agustus 2015 Deskripsi Pekerjaan : • Menganalisis ecoregion DKI Jakarta • Merumuskan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup • Merekomendasikan infrastruktur tambahan atau infrastruktur lingkungan untuk mengoptimalkan daya dukung lingkungan
	Proyek/Pemberi : Task 6. SEA Preparation for Green Prosperity Project Implementation, MCC Indonesia – Abt - URDI Posisi : Ahli Lingkungan Lokasi/Periode : November 2012 – Juni 2013 Deskripsi Pekerjaan : • Merumuskan isu strategis • Menganalisis dampak yang mungkin terjadi dari Green Prosperity Project yang dilakukan di empat kabupaten (Muaro Jambi, Merangin, Mamuju dan Mamasa) • Memberikan rekomendasi
	Proyek/Pemberi : Studi Pengembangan Jaringan Jalan Papua, Departemen PU, Dirjen Bina marga - PT. Margapenta Posisi : Team Leader Lokasi/Periode : Jayapura, Juli – Des 2009 Deskripsi Pekerjaan : • Menganalisis potensi dampak lingkungan yang terjadi dari pengembangan jaringan

jalan di Papua

- Memberikan rekomendasi ruang terkait dengan lokasi yang sesuai untuk pengembangan jalan di Papua

Proyek/Pemberi : Peningkatan Kualitas Tata Ruang Melalui Penyediaan RTH di Middle Stream Jabodetabekjur, Dirjen Penataan Ruang, Wil II, Dept PU, PT. Gafa Multi Kons
Posisi : Team Leader
Lokasi/Periode : Jakarta, Juli-Des 2009
Deskripsi Pekerjaan :

- Mengkoordinasikan tim analisis
- Menganalisis kebutuhan RTH dan isu yang terkait di Kawasan Jabodetabekjur
- Merekomendasikan pengembangan kualitas dan kuantitas RTH
- Memastikan kualitas laporan

Proyek/Pemberi : Penyusunan Rencana Tata Ruang DAS Einlanden – Digul Papua, Dirjen Penataan Ruang, Wil IV, Dept PU, PT. Gafa Multi Kons
Posisi : Team Leader
Lokasi/Periode : Boven Digoel, Agustus – Des 2008
Deskripsi Pekerjaan :

- Menganalisis data untuk mengidentifikasi daerah yang sesuai untuk pengembangan dan juga wilayah rentan
- Merumuskan pola ruang dan struktur ruang
- Memberikan rekomendasi strategi adaptasi dan mitigasi

Proyek/Pemberi : Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh dsk (Jayapura dsk), Dirjen Penataan Ruang, Wil IV, Dept PU - PT. BWK
Posisi : Team Leader
Lokasi/Periode : Jayapura, Juli – Des 2006
Deskripsi Pekerjaan :
Kajian ini fokus pada identifikasi dari sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan dan ramah lingkungan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut

Proyek/Pemberi : Model Perencanaan di Zona Penyangga dan Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir di Pulau Kei, Maluku, Dept. Kelautan dan Perikanan - PT Forindo Bangun Konsultan
Posisi : Ahli Perencanaan Wilayah
Lokasi/Periode : Maluku, Juli 2001 – Desember 2001
Deskripsi Pekerjaan :

- Studi ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan kebijakan untuk mengembangkan dan mengelola potensi sumber daya laut dan pesisir berdasarkan daya dukung lingkungan.
- Rencana yang diusulkan telah dirumuskan oleh menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif.
- Hasil dari kajian ini digunakan untuk mempersiapkan program pengembangan desa perikanan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Proyek/Pemberi : Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliwung Bagian Hulu, Departemen Kehutanan - PT. Duta Rimba
Posisi : Ahli Perencanaan Wilayah
Lokasi/Periode : Jakarta, Juli 1997 – Desember 1997
Deskripsi Pekerjaan :

	• Analisis perubahan penggunaan lahan dan dampaknya pada ketersediaan air permukaan • Mengusulkan rekomendasi untuk mengendalikan penggunaan lahan di masa yang akan dating dalam rangka mengurangi kejadian bencana banjir di dataran rendah • Mengusulkan program rehabilitasi zona hulu

Triarko Nurlambang – Ahli Kebijakan Publik

Name	Triarko Nurlambang
Contact Details	Mobile: +628129478287 Email : triarko@gmail.com
Date of Birth	January 12, 1963
Education	(2013) *PhD in Public Policy*, Social and Political Sciences Faculty, University of Indonesia (1994) *Master of Arts in Social Sciences (Geography)* in The Flinders University of South Australia, Adelaide, Australia (1992) *Graduate Diploma in Geography* in The Australian National University Graduate Diploma in Geography (1987) *Bachelor in Geography*, Mathematic and Natural Sciences Faculty, University of Indonesia
Other Training	(2007/8) *One year Course on Soft Skills (U-Theory)*, Non-degree in Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA
Main Position	● Lecturer and researcher, University of Indonesia (1988 – now) ● Lecturer on bachelor program in Geography (FMIPA UI) ● Lecturer on master program in Geography (FMIPA UI), Disaster Management (SIL-UI), Environmental Science (SIL), and Oceanic Science (FMIPA UI)
Other Job Position	(2015 – 2020) Independent Director (Komisaris Independen) PT (Persero) Pengembagangan Pariwisata Indonesia (ITDC) (2016 - now) Member of Research Center for Disaster Risk and Response UI (2018 – now) Coordinator of SDGs Hub UI (2018 – now) Member of ISER (Institute for Sustainable Earth and Resources) (2015 – now) Vice President of Indonesian Experts on Disaster Association Consultant/ researcher/ trainer
Membership in Professional Societies	(2014 - 2021) Vice head and treasury affairs. Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) – Indonesian Forum of Disaster Expert (2020 - now) Vice division head for cooperation. Ikatan Geografer Indonesia (Indonesia Geographer Association) (2016 - now) Member of Local and Regional Development Forum. International Geography Union

Employment Record (especially for Disaster/Hazard Management and SEA/Strategic Environmental Assessment and SDGs)

Dates of employment	Name of employing organization	Positions held
2022	SDGs Hub UI and Pegadaian	Experts in Assisting the Establishment of the Green Bond Framework Pegadaian
2022	SDGs Hub UI and BRI	Experts for the Environmental Expert Opinion on BRI Green Bond Framework
2022	SDGs Hub UI and DKI Jakarta Local Government	SEA for the Integration of Jakarta Spatial Planning and Sea and Coastal Planning

2021/2022	Asian Development Bank/UCLG	National Consultant for SDGs Snapshot at Sub National Government
2021-2024	BNPB-BMKG-World Bank	Member of Technical Advisor Commission for IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiative Project)
2021	National Standard Agency (BSN)	Member Technical Commission for Disaster Management
2021	National Board for Geospatial Information (BIG)	Consultant (National Roadmap for Geospatial Information Industry)
2021/2022	Palladium (Australia)-BNPB	Consultant (Disaster Risk Assessment in Bangli District, Bali Province)
2013/4 and 2014/5	BNPB	Researcher on Weather Extreme and Disaster Management in Indonesia
2012	UNDP-RCCC (Research Center for Climate Change) UI	Researcher on Climate Change and public health in DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali and Kalimantan Tengah.
2009	The World Bank	Expert member for Climate Resilience Cities Program
2006	Bappenas and UNDP	Team Leader and Regional Development Sp. (Aceh Tsunami Disaster Recovery)

Publications (selected)

No	Publications
1	Nurlambang, Triarko, Hafid Setiadi, dan Nurul, 2008. *Assessing Role and Function of Local Coordinator Board on Spatial Planning*, The GTZ and Ministry of Home Affairs.
2	Nurlambang, Triarko, and Jeffrey Neilson, 2010. *Multi-scalar environmental governance and the emergence of spatial approaches to natural resource management in Indonesia?* presented at SEAGA International Conference in Hanoi, Vietnam
3	Nurlambang, Triarko, 2018/19. Geographic And Institution Matters In Achieving Sustainable Development In Indonesia, a book chapter of *Dilemmas of regional and local development,* Jerzy Bański (editor), Routledge publisher
4	Nurlambang, Triarko and Rudi P. Tambunan, 2021. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam Metode dan Kajian Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, editor Prof Dr. Jatna Supriatna (2021)
5	Nurlambang, Triarko dan David Makes, 2021. Kajian Pariwisata Berkelanjutan, dalam Metode dan Kajian Sumber Daya Hayati dan Lingkungan, editor Prof Dr Jatna Supriatna (2021)

Sri Handayani – Ahli Lingkungan/ Koordinator RPJMD

Nama	Sri Handayani
Pendidikan	• MBA, Universitas Gajah Mada, Jakarta, 2013. • ST, Teknik Lingkungan, Universitas Trisakti, Jakarta, 1998. • Diploma, Analis Kimia, Akademi Kimia Analis, Bogor, 1994.
Pelatihan profesional	• Kunjungan lapangan ke Pabrik Biogas EnviTec AG di Saerbeck Jerman dan Kawasan Industri di Libramont, 2015 • TOT Energy Management, 2013, GIZ Paklim • Pelatihan Energy Management System ISO 50001, 2013, UNIDO • Study Visit for Waste to Energy to Amsterdam, Sweden and Portugal, 2013, TCF – EU, • TOT Leadership Essential, 2012, Centre for Creative Leadership-USA • TOT Leadership Beyond Boundaries, Centre for Creative Leadership, 2012, Cambodia • Gender Training: kesetaraan gender untuk meningkatkan pelayanan perpipaan air berbasis masyarakat dengan dukungan swasta, 2010, Indonesia Infrastructure Innitiative AusAid • ToT on Co-Processing focused on the lesson learn of PPP co-processing between GTZ & HolCim, 2009, GTZ Paklim. • Pelatihan OHSAS 18001, 2009, Neville Clarke Indonesia • Training on Organizational Development 1-5 Modules – 2007-2008, COMO Consulting & PRAXiSS • TOT Environmental Management Accounting, 2006 Bangkok • Training on Results Chain Management, 2006, Germany • TOT tentang Environmental Navigator Management, 2005, Germany • TOT Environmental Performance Indicator, 2005, Bangkok
Bahasa dan Tingkat Kemahiran	

Bahasa	Berbicara	Membaca	Menulis
Indonesia	Bahasa Asli		
Inggris	Fasih	Fasih	Fasih
Jerman	Baik	Baik	Baik

Pengalaman Kerja Profesional	• 2016 – Present, PT.Dharma Ina Mandiri (DIM), as Director & Owner • 2018 – 2020, USAID Lestari, as SEA Specialist for project: Assistances of SEA for Spatial Planning for 3 Regencies (Mappi, Boven Digoel, Mimika). • 2019, UNDP, Preparation of the Partnership for Action on Green Economy (PAGE) Indonesia Stoctaking Report, as Team Leader • 2017-2018, UNDP – MoI, Expert on Facilitation of Profiling GHG Emissions • 2016-2018, ESP3 Danida in cooperation with MoEF and MoHA, as Environmental Expert, Capacity Building Specialist and Backstopping Management for various assignment such as Strategic Environmental Assessment (SEA) and Municipal Solid Waste Management • 2017-2018, WWF- MCAI – Supporting SEA Taskforce of Dharmasraya, as Deputy Team leader • 2016, GIZ PAKLIM – Weber Consulting – Ministry of Industry, as National consultant for Industrial Park & Facilitation on several workshops; 2016, UNIDO – water stewardship project, as Co-moderator on series of stakeholders' engagement; • 2015-2016, CI Indonesia – USAID, as Team Leader; 2015, Ministry of Climate and Energy, The Danish Energy Agency, as Project Manager; 2015, DANIDA – HN Consultant, as Team Member of Revision Mission; 2015, PT. Herfinta Farm & Plantation, as Project Development team • 2014, ICF Inc., LLC, as Team Leader & Lead Facilitator; 2014, GOPA – European Union, as Co-Trainer; 2014, The Apex Consulting, as Co-Trainer; 2014, GOPA – European Union, as Focal point of Component 6 Energy • 2013, GIZ PAKLIM, as Facilitator for Energy Mapping; 2013, GOPA-European Union, as

	Senior Energy Associates; 2013, UNIDO, as PPG Consultant for GEF; 2013, AMC-European Union, as Project Manager for Sustainable Consumption Production – Sub Project 01; 2013, MoE and GIZ PAKLIM, Lead facilitator during Networking Meetings of DPP Adidas regarding Energy Conservation for Industries; 2013, GIZ-PROTECTS, as Lead Trainer for Tsunami Disaster Risk Reduction; 2013, PT. Herfinta Farm and Plantation, as Team Leader for Change Company Cultural; 2013, PREMAnet Indonesia, as Expert Pool • 2012, The Royal Danish Embassy, as Team Leader to implement Capacity Building on Strategic Environmental Assessment; 2012, The Royal Danish Embassy, as Capacity building expert/Environmental Management; 2012, GIZ-RED, as appraisal team member for Regional Economic Development; 2012, Jakarta Islamic Center (JIC), Radix Training Centre, as Lead Trainer for Capacity Building on Facilitation and Communication. • 2011, The Royal Danish Embassy, as Capacity Building Expert & Environmental Management for Strategic Environmental Assessment; 2011, SMEC Pty Ltd, as Backstopping on project management for Water Supply Program; 2011, UNEP-RISO-BPPT, National Consultant for the implementation of Cleaner Production • 2010-2015, PT. Dazya Ina Mandiri, as Managing Partner • 2010, GTZ-International Services (GITEWS), as Lead Trainer to encourage Local Facilitator to deliver Tsunami Disaster Risk Reduction into community • 2009, GOPA, as Coordinator Consultant • 2006, GTZ ProLH, as Capacity Building Expert for Indonesia Cleaner Production Centre • 2003, GTZ ProdukSIH, as Consultant for Indonesia Cleaner Production Centre • 2002, ASEAN Secretariat, as Consultant • 2001, BAKORNAS PB, UNDP, OCHA, as Ass. Project Manager
Pengalaman Proyek (pilihan)	Proyek : Penyusunan KLHS RTRW Jakarta 2040 – DLH Provinsi DKI Jakarta Posisi : Tenaga Ahli KLHS Lokasi/Periode : Jakarta / 2021 - 2022 Deskripsi Pekerjaan: Mendampingi POKJA KLHS RTRW provinsi DKI Jakarta dalam: i. Melakukan studi terhadap regulasi, data dan informasi terbaru yang berkaitan dengan KLHS RTRW Jakarta 2040. j. Melaksanakan koordinasi intensif dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait penyusunan KLHS, terutama dengan KLHK, agar KLHS dapat divalidasi. k. Mengidentifikasi materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi LH dan identifikasi prioritasnya. l. Menganalisis pengaruh KRP terhadap kondisi LH. m. Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP dan rekomendasi perbaikan KRP dan integrasi KRP dalam RTRW Jakarta 2040. n. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS dan konsultasi publik. o. Melaksanakan pembahasan pra validasi dan validasi ke KLHK. p. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
	Proyek : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kepelabuhan Tanjung Carat (Proyek Strategis Nasional Pembangungan Palembang Baru) Posisi : Ketua Tim Tenaga Ahli KLHS Lokasi/Periode : Jakarta / 2021 Deskripsi Pekerjaan : Mendampingi kegiatan pembuatan KLHS Kepelabuhanan Tanjung Carat 2021 Kementerian Perhubungan dalam kegiatan Forum Group Diskusi (FGD), Konsultasi Publik, sampai dengan Tahap Validasi, dengan beberapa mekanisme berikut. (i) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan

hidup di suatu wilayah; (ii) perumusan isu pembangunan berkelanjutan daerah; (iii) analisis profil 6 muatan: daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, dampak/risiko lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (KEHATI) dan kerentanan perubahan iklim; (iv) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; (v) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Proyek : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2021 - 2026
Posisi : Ketua Tim Tenaga Ahli KLHS
Lokasi/Periode : Merauke / 2021
Deskripsi Pekerjaan :

Mendampingi kegiatan pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2021 – 2026 dalam kegiatan Forum Group Diskusi (FGD), Konsultasi Publik, sampai dengan Tahap Validasi, dengan beberapa mekanisme berikut. (i) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (ii) perumusan isu pembangunan berkelanjutan daerah; (iii) analisis profil 6 muatan: daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, dampak/risiko lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (KEHATI) dan kerentanan perubahan iklim; (iv) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; (v) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Proyek : Bantuan Teknis untuk KLHS RTRW di 3 Kabupaten di Provinsi Papua (Mimika, Mappi, dan Boven Digoel),
Posisi : Tenaga Ahli KLHS
Lokasi/Periode : Mimika, Mappi, dan Boven Digoel, Provinsi Papua, 2018 - 2020
Deskripsi Pekerjaan :

- Bertanggungjawab untuk peningkatan kapasitas Pokja KLHS
- Mendukung Pokja KLHS untuk melaksanakan KLHS untuk Revisi RTRW
- Supervisi Pokja KLHS untuk penerapan KLHS berdasarkan peraturan yang terbaru
- Menyediakan penjaminan kualitas dalam laporan proyek

Proyek : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Kalimantan Tengah, KLHK
Posisi : Penyunting laporan KLHS
Lokasi/Periode : Jakarta / 2020
Deskripsi Pekerjaan :

Tujuan Penyusunan KLHS Cepat ini adalah yaitu untuk memformulasikan berbagai strategi perlindungan lingkungan (environmental safeguard), kebijakan pendukung (enabling policy) yang harus dilakukan, langkah-langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta arahan monitoring dan evaluasi keberlanjutan landscape, sehingga program pengembangan pangan nasional di areal eks-PLG tersebut dilakukan dengan tetap menjamin keberlanjutan proses, fungsi dan produktifitas lingkungan hidup yang menjamin keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan lahan pangan nasional salah satunya dimaksudkan sebagai prevensi potensi krisis pangan global akibat pandemi COVID-19.

Dalam penyusunan KLHS ini ditugaskan untuk membantu POKJA KLHS KLHK dalam penyusunan laporan KLHS mencakup perbaikan draft dokumen KLHS berdasarkan hasil kajian POKJA KLHS KLHK. Perbaikan draf mencakup reformulasi isu strategis, alternative

	perbaikan dan rekomendasi sehingga menjadi dokumen KLHS dengan kualitas baik.
	Proyek : Kajian Lingkungan Hidup Ibu Kota Negara (KLHS IKN), KLHK Posisi : Penyunting Lokasi/Periode : Jakarta, Januari – Februari 2020 Deskripsi Pekerjaan : Melakukan perbaikan draft dokumen KLHS IKN berdasarkan hasil kajian POKJA KLHS IKN KLHK. Perbaikan draf mencakup reformulasi isu strategis, alternative perbaikan dan rekomendasi sehingga menjadi dokumen KLHS dengan kualitas baik.
	Proyek : Penyempurnaan Kajian Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. PT. Azevedopratama Consultants Posisi : Tenaga Ahli Penyusun Lokasi/Periode : Jakarta, Januari 2020 – Maret 2020 Deskripsi Pekerjaan : Penyempurnaan laporan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil analisis spasial yang telah dilaksanakan oleh PT.Azevedopratama Consultants, sehingga informasi kartografi dapat dijadikan dasar perumusan rekomendasi. Lingkup kegiatan meliputi: • Pemutakhiran profil wilayah kajian • Penyempurnaan deskripsi dan analisis kualitatif profil • jasa lingkungan hidup • Penyempurnaan deskripsi metodologi kajian & hasil • analisis spasial daya dukung air permukaan • Penyusunan rekomendasi
	Proyek : KLHS Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan Kabupaten Sintang. WWF Indonesia - PT. Hima Lestari Posisi : Tenaga Ahli KLHS Lokasi/Periode : Sintang, Agustus 2019 - Januari 2020 Deskripsi Pekerjaan : Melakukan penyusunan KLHS Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan, sebagai salah satu KRP yang wajib dilaksanakan KLHS mengingat luasan pemanfaatan ruang yang potensial untuk perkebunan diatas 500.000 Ha. Mengkaji kesesuaian lahan & ruang untuk lima komoditas unggulan karet, sawit, lada, kopi, dan coklat.
	Proyek : Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan Kabupaten Sintang. WWF Indonesia - PT. Hima Lestari Posisi : Penyusun Lokasi/Periode : Sintang, Desember 2019 - Januari 2020 Deskripsi Pekerjaan : Melakukan perbaikan draft dokumen Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan Kabupaten mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Menganalisis kondisi wilayah, komoditas perkebunan, sumberdaya manusia, kelembangaan, kawasan perkebunan, keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir, sarana dan prasarana, penanaman modal, dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyusun skenario pengelolaan perkebunan, roadmap, kebijakan, dan mengkaji potensi pengelolaan perkebunan untuk lima komoditas unggulan (karet, sawit, lada, kopi dan coklat). Mengintegrasikan hasil dan rekomendasi KLHS ke dalam Rencana Induk sebagai aspek pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan

Proyek : Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah Perkotaan dan Rencana Aksi Kabupaten Lombok Utara yang lebih spesifik fokus pada Pulau Gili, Provinsi NTB, Indonesia, ESP3-Danida
Posisi : Community/Public Sp.
Lokasi/Periode : Lombok Utara, Juli 2018 - Februari 2019
Deskripsi Pekerjaan :
Melakukan penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah Perkotaan untuk Kabupaten Lombok Utara, termasuk rencana aksi 4 tahunan dengan inisiatif tiap langkah yang dapat ditindaklanjuti oleh DLHPKP, dan Rencana Aksi spesifik untuk Pulau Gili, termasuk inisiatif untuk perbaikan pengumpulan, pra-pemrosesan setempat, dan persiapan untuk daur ulang, pengangkutan sampah dari pulau, pengolahan di pulau, dan pembuangan akhir. Melaksanakan serangkaian FGD di tingkat komunitas (Kepulauan Gili) untuk mengkaji kebutuhnan pengelolaan sampah yang relevan.

Proyek : Penyusunan Buku Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Nasional, KLHK
Posisi : Tenaga Ahli Penyusun
Lokasi/Periode : Jakarta, October 2018 – June 2019.
Deskripsi Pekerjaan :

- Merumuskan rancangan konsep buku informasi dan melakukan diskusi intensif dengan KLHK dalam proses penyusunannya
- Mengembangkan konten informasi yang akan disampaikan dalam buku tersebut berdasarkan SK MenLHK No. 297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional.

Proyek : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Cepat (KLHS Cepat) untuk Terobosan Kebijakan Pengamanan atas Dampak dan Resiko yang ditimbulkan PT. Freeport Indonesia, didanai oleh Pemerintah melalui KLHK
Posisi : Tenaga Ahli KLHS
Lokasi/Periode : Jakarta, Mei 2018 – Oktober 2018
Deskripsi Pekerjaan :

- Mengulas kebijakan yang sudah ada dengan menganalisis data sekunder dan melaksanakan FGD terbatas dengan beberapa narasumber.
- Mengulas pengumpulan data dari tim AMDAL dan bagian hukum yang melaksanakan survei lokasi pada bulan April - Mei 2018
- Mengulas literatur praktik terbaik, dokumen lingkungan, dan berbagai studi sebagai benchmarking approach.
- Menyusun laporan KLHS.

Proyek : Pelatihan KLHS untuk Pokja KLHS di Provinsi Papua, WWF Indonesia
Posisi : Tenaga Ahli KLHS/Pelatih
Lokasi/Periode : Jayapura, 7-11 Mei 2018
Deskripsi Pekerjaan :

- Merancang metodologi pelatihan untuk Pemerintah Daerah tentang KLHS
- Menyusun materi pelatihan
- Menyusun rencana moderasi (rincian metodologi pelatihan, semua yang terkait penyampaian pelatihan, materi, agenda)
- Memberikan pelatihan
- Melakukan penjaminan mutu untuk laporan pelatihan

Proyek : Fasilitasi Pelaksanaan KLHS untuk RTRW Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, WWF Indonesia dan MCAI USAID

Posisi : Deputy Team Leader, pakar KLHS & Peningkatan Kapasitas.
Lokasi/Periode : Dharmasraya, 2017 - 2018
Deskripsi Pekerjaan :

- Bertanggungjawab untuk peningkatan kapasitas untuk Pokja KLHS untuk melaksanakan KLHS Berpikir Strategis
- Membantu Pokja KLHS untuk melaksanakan KLHS Revisi RTRW
- Memimpin proses pelibatan pemangku kepentingan
- Menghubungkan dan koordinasi secara langsung kepada klien
- Memastikan progress pelaksanaan proyek sesuai jadwal
- Bertanggungjawab untuk kegiatan pemantauan selama proyek
- Melakukan penjaminan mutu laporan proyek

Proyek : Pendampingan Teknis untuk KLHK dalam rangka Pemahaman Umum dan pedoman KLHS, KLHK
Posisi : Backstopping Management.
Lokasi/Periode : Jakarta, Desember 2016 - April 2017
Deskripsi Pekerjaan :

Mendukung KLHK Direktorat PDLKWS untuk meningkatkan kapasitas teknis dan pengetahuan dalam menyusun pedoman KLHS. Bersama-sama dengan KLHK di berbagai Direktorat Jenderal terkait untuk menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang pedoman penyelenggaraan KLHS sebagai turunan PP 46/2016 tentang Penyelenggaraan KLHS. Melaksanakan lokakarya pembahasan pedoman KLHS dengan pemangku kepentingan terkait lainnya (K/L terkait, LSM, Mitra Internasional yang menjalankan percontohan KLHS di daerah, Universitas/Akademisi, praktisi).

Proyek : ToT KLHS untuk Pusat Studi Lingkungan: Roll Out di Medan dan Makassar (Ambon), ESP 3- DANIDA
Posisi : Ketua Tim dan Tenaga Ahli KLHS
Lokasi/Periode : Ambon Dan Makassar, 2017
Deskripsi Pekerjaan :

- Melakukan studi literatur KLHS tentang tahapan dan prosedur serta pendekatan KLHS, khususnya literatur yang ditulis oleh para ahli KLHS baik nasional maupun internasional.
- Merencanakan dan mengatur kegiatan dari keseluruhan penugasan, seperti pertemuan dan pelatihan yang diperlukan. Memastikan bahwa tim Master Trainers siap berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas.
- Mengembangkan modul KLHS (materi pelatihan) bekerja sama dengan Master Trainer dari ToT sebelumnya.
- Melaksanakan dan mengawasi ToT untuk ERC.
- Berkoordinasi dengan Direktorat PDLKWS KLHK, BKPSL dan ESP3 selama pelaksanaan kegiatan.

Proyek : Menyusun Metode Peningkatan KLHS untuk Kemendagri, didanai oleh The Royal Danish Embassy
Posisi : Pakar Peningkatan Kapasitas & Pengelolaan Lingkungan
Lokasi/Periode : Jakarta, Mei – Desember 2011
Deskripsi Pekerjaan :

- Melaksanakan pelatihan untuk pelatih
- Melaksanakan FGD Pembangunan Berkelanjutan untuk Rencana Pembangunan Daerah
- Berkoordinasi dengan Team Leader terkait persiapan teknis, pelaksanaan, dan evaluasi proyek KLHS.

Agista Hijri Rakhmadani – Ahli Lingkungan

Data Personal

Nama : Hijri Agista Rakhmadani
Email : gista@dharmainamandiri.com
Kontak : 081210227407

Pendidikan Formal

2007 - 2011 S1 Teknik Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang .

Bahasa

	Berbicara	Membaca	Mendengar
Indonesia	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik
English	Cukup	Baik	Cukup

Training/Seminar/Workshop/Kursus

- 2021 Bimtek Pendampingan Penyusunan KLHS RPJMD, DLHK Provinsi Papua dan GGGI.
- 2013 Workshop Waste to Energy, Development of Renewable Energy and Agrowaste to Energy. EIBD (EU – Indonesia Business Dialogue). Jakarta Workshop Green Solution for Manufacturing Industry. Sustainable Business Dialogue – GIZ PAKLIM. Jakarta Executive Briefing dalam Sistem Manajemen Energi ISO 50001 dan Sistem Optimasi pada Industri. UNIDO. Jakarta. Pelatihan Fasilitasi, Komunikasi dan Manajemen Proyek. PT. Dazya Ina Mandiri dan DPF. Bogor. Basic Energy Mapping Training. GIZ PAKLIM – Jababeka. Bekasi Workshop CEO – ISO 50001 oleh TUV Rheinland
- 2012 Workshop Kerangka Logika DPF. PT Dazya Ina Mandiri dan DPF. Jakarta. Workshop Standarisasi Konsep Buku Panduan. BNPB dan AusAID. Jakarta. Adobe Design
- 2010 autoCAD 2D

Pengalaman Kerja

TAHUN	DESKRIPSI
2021	**Proyek: Studi Pemetaan Program Aksi dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Sampah Plastik di DKI Jakarta, Depok, dan Bogor** | Posisi: Analis Data | Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri | Klien: DLH Provinsi DKI Jakarta Tugas: Mengumpulkan data-data pendukung. Melakukan studi literatur. Mempersiapkan materi FGD. Membantu ahli utama melakukan identifikasi potensi kolaborasi sektor swasta dan pemerintah daerah. Menyusun laporan akhir studi pemetaan dan hasil workshop/FGD.
2020	**Proyek: Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020 DKI Jakarta** | Posisi: Analis Data dan Ahli Muda Lingkungan | Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri | Klien: DLH Provinsi DKI Jakarta Tugas: Mengumpulkan data-data pendukung Melakukan studi literatur Melakukan analisis kualitas air, air laut, dan udara Menyusun laporan akhir IKLH 2020 **Proyek: Penyusunan Revisi KLHS Provinsi DKI Jakarta** | Posisi: Ahli Muda KLHS | Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri | Klien: DLH Provinsi DKI Jakarta Tugas:

TAHUN	DESKRIPSI
	Mengumpulkan data-data pendukung Melakukan studi literatur Menyusun analisis 6 muatan KLHS berdasarkan ketersediaan data sekunder mencakup (1) analisis daya dukung lingkungan hidup, (2) analisis efisiensi sumber daya alam berdasarkan ekosistem, (3) mendeskripsikan tingkat kerentanan dan sensitifitas wilayah terhadap dampak perubahan iklim termasuk identifikasi risiko bencana, (4) identifikasi dampak lingkungan hidup, (5) identifikasi kinerja jasa ekosistem, (6) analisis tingkat kerentanan kehati. **Proyek: Penyusunan Kajian Daya Dukung Air Provinsi DKI Jakarta.** | Posisi: Tim Penulis – Analis Data | Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri & PT. Azevedo | Klien: DLH Provinsi DKI Jakarta Tugas: Mengumpulkan data-data pendukung Melakukan studi literatur Perbaikan draft kajian awal disesuaikan dengan input dari KLHK, mencakup perbaikan analisis spasial yang akan digunakan sebagai basis untuk menyusun rekomendasi bagi Provinsi DKI Jakarta. Lingkup kegiatan meliputi narasi hasil analisis spasial status daya dukung air, pengkinian data profil DKI Jakarta, analisis jasa lingkungan hidup yang dikaitkan dengan daya dukung air di Jakarta (jasa penyedia air, pengaturan air, pengaturan iklim, dan pengaturan banjir), serta penyusunan rekomendasi
2019	**Proyek: Penyusunan KLHS Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan untuk Kabupaten Sintang.** | Posisi: Ahli Muda KLHS | Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri | Klien: WWF Indonesia – Sintang Lestari Tugas: Mengumpulkan data-data pendukung Melakukan studi literatur Membantu Pakar KLHS untuk mengkaji kesesuaian lahan dan ruang untuk lima komoditi utama yaitu karet, kelapa sawit, lada, kopi, dan coklat. Melakukan analisis 6 muatan KLHS mencakup (1) analisis daya dukung lingkungan hidup, (2) analisis efisiensi sumber daya alam berdasarkan ekosistem, (3) mendeskripsikan tingkat kerentanan dan sensitifitas wilayah terhadap dampak perubahan iklim termasuk identifikasi risiko bencana, (4) identifikasi dampak lingkungan hidup termasuk status tumpang tindih lahan, (5) identifikasi kinerja jasa ekosistem, (6) analisis tingkat kerentanan kehati. **Proyek: Penyusunan Buku Informasi Status Daya Dukung Air Nasional 2019** | Posisi: Asisten Penulis dan Desain Grafis | Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri | Klien: KLHK Tugas: Pengumpulan data pendukung dan mengilustrasikan data-data tersebut dalam bentuk infografis. Membantu penulis utama untuk mendeskripsikan tujuan penetapan daya dukung air nasional yang mencakup metodologi, langkah penyusunan daya dukung air nasional, dan pemanfaatan dari informasi tersebut.
2018	**Proyek: ESP3 – Danida, Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan untuk Magelang Raya, DKI Jakarta** | Posisi: Technical Support – Analis Data | Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri | Klien: ESP3 - Danida Tugas: Pengumpulan data pendukung. Studi literatur dan menyusun rangkuman aspek peraturan dan kebijakan daerah implementasi pengelolaan persampahan. Editor untuk terminology teknis dari translasi laporan akhir. Asisten koordinator untuk memudahkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan tim. Menyusun laporan administrasi dan finansial proyek untuk audit.
2016 - 2017	**Proyek: Pameran Nasional KLHS Indonesia 2017** | Posisi: Exhibitor | Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri | Klien: ESP3 - Danida

TAHUN	DESKRIPSI
	Tugas: Menyusun materi pameran pelaksanaan pendampingan penyusunan KLHS yang dilakukan oleh perusahaan. **Proyek: KLHS RTRW dan RPJMD Kabupaten Dharmasraya** | Posisi: Technical Support – Analis Data | Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri | Klien: WWF - USAID Tugas: Menyiapkan data-data pendukung. Asisten tim penyusunan KLHS RTRW dan RPJMD Kab. Dharmasraya Menyusun proposal rangkaian kegiatan pendampingan KLHS dan perencanaan anggaran. Koordinator untuk update kemajuan proses KLHS. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan. Menyusun laporan pelatihan KLHS dan kegiatan pendampingan. **Proyek: ESP3 – Danida, Revisi Master Plan Pengelolaan Persampahan mempromosikan teknologi ITF, DKI Jakarta** | Posisi: Technical Support – Analis Data | Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri | Klien: ESP3 - Danida Tugas: Menyusun laporan akhir revisi master plan persampahan khususnya terkait kondisi eksisting pelaksanaan Pengelolaan Persampahan dan ringkasan kebijakan terkait implementasi persampahan di DKI Jakarta. Pengumpulan data sekunder dan site visit. Asisten koordinator tim dan tenaga pendukung lapangan. Observasi kegiatan fasilitasi. Menyusun laporan kegiatan pendampingan. Menyusun laporan administrasi dan finansial proyek. **Proyek: ESP3 – Danida, Pedoman Umum KLHS** | Posisi: Technical Support | Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri | Klien: ESP3 - Danida Tugas: Asisten koordinator tim pendamping. Asisten editor laporan proyek. Asisten tenaga pendukung untuk pendampingan teknis penyusunan RapermenLHK KLHS 69/2017. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan. Menyusun laporan kegiatan pendampingan. Merancang dan menyusun Katalog KLHS 2017 untuk publikasi. **Proyek: ESP3 – Danida, Pendampingan Teknis KLHS RTRW Kabupaten Temanggung, Sukoharjo dan Magelang, Provinsi Jawa Tengah** | Posisi: Technical Support – Analis Data | Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri | Klien: ESP3 - Danida Tugas: Koordinator tim pendamping dan update kemajuan KLHS yang dilaksanakan 3 Kabupaten. Asisten editor laporan akhir KLHS RTRW 3 Kabupaten. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan. Menyusun laporan pelatihan KLHS serta laporan kegiatan selama proses pendampingan Menyusun laporan administrasi dan finansial proyek. **Proyek: ESP3 – Danida, Bantuan Teknis untuk Kemendagri terkait Lingkungan Hidup dan Pembangunan Daerah** | Posisi: Liaison Officer | Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri | Klien: ESP3 - Danida Tugas: Koordinator tim pendamping dan update kemajuan KLHS yang dilaksanakan 6 Kabupaten dengan tim pendamping dari 2 perusahaan konsultan. Asisten editor laporan akhir pembelajaran KLHS 6 Kabupaten.

TAHUN	DESKRIPSI
	Menyusun laporan hasil pendampingan. Menyusun laporan administrasi dan finansial proyek.
2015	**Proyek: ESP3 – Danida, Pendampingan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Temanggung, Sukoharjo dan Magelang, Provinsi Jawa Tengah** | Posisi: Technical Support | Perusahaan: PT. Dharma Ina Mandiri | Klien: ESP3 - Danida Tugas: Koordinator tim pendamping dan update kemajuan KLHS yang dilaksanakan 3 Kabupaten. Asisten editor laporan akhir KLHS RTRW 3 Kabupaten. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan. Menyusun laporan pelatihan KLHS serta laporan kemajuan kegiatan selama proses pendampingan Menyusun laporan administrasi dan finansial proyek. **Proyek: Pelatihan KLHS RTRW Kabupaten Pakpak Bharat** | Posisi: Technical Support | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: Conservation International Tugas: Terlibat dalam penyusunan materi pelatihan KLHS RTRW. Asisten fasilitator pelatihan KLHS. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan KLHS. Menyusun laporan pelatihan KLHS. **Proyek: Pendampingan Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara** | Posisi: Technical Support | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: Conservation International Tugas: Asisten tim penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Tapanuli Utara. Asisten editor laporan akhir KLHS RTRW Kabupaten Tapanuli Utara. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan KLHS. Menyusun laporan pelatihan KLHS serta laporan kemajuan kegiatan selama proses pendampingan Menyusun laporan administrasi dan finansial proyek.
2014	**Proyek: Peningkatan Akses Sanitasi dan Penguatan UKM melalui Skema Kredit Mikro di Tiga Kabupaten di Provinsi Banten** | Posisi: Ahli Muda Sanitasi | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: IUWASH – USAID Tugas: Identifikasi dan survey potensi pasar dan potensi UKM sanitasi di wilayah pedesaan. Studi literatur dan menyusun rancangan desain sanitasi berdasarkan input dari IUWASH dan standar Dinas PU. Menyusun laporan teknis termasuk perkiraan budget konstruksi untuk akses sanitasi. Menyusun materi-materi presentasi untuk kegiatan workshop/pelatihan/fasilitasi. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan. Menyusun draft laporan akhir peningkatan akses sanitasi dan penguatan UKM. Editor dan layout desain laporan dan form administratif. **Proyek: Asia LEDS Forum 2014** | Posisi: Learning Management | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: USAID LEAD Tugas: Persiapan logistik forum international. Desain publikasi kit dan perlengkapan acara. Administrasi lapangan selama proses workshop. Pengolahan data peserta untuk keperluan laporan akhir. Asisten editor dan layout desain laporan akhir. **Proyek: Studi Kelayakan Proyek SWAN Indonesia**

TAHUN	DESKRIPSI
	| Posisi: Technical Support | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: SEAMEO RECFON – ILSI Japan Tugas: Survey dan sampling sumber daya air potensial dalam rangka melakukan pemilihan lokasi percontohan. Menyusun draft laporan studi kelayakan dan laporan survey lapangan dalam rangka peningkatan sistem penyediaan air di wilayah pedesaan. Dokumentasi kegiatan **Proyek: Pelatihan Dasar Green Jobs** | Posisi: Technical Support | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: ILO (International Labour Organization) Tugas: Penyusunan materi-materi pelatihan dan penyiapan bahan pelatihan sesuai rencana moderasi pelatihan. Notulensi kegiatan pelatihan. Membuat draft laporan akhir pelatihan. Asisten editor dan layout laporan akhir dan laporan kegiatan. Dokumentasi kegiatan. Pengelolaan logistik untuk kegiatan pelatihan. **Proyek: Fasilitasi Musyawarah Subak Bali – Sistem Pengelolaan Lanskap Budaya Bali** | Posisi: Technical Support | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: Stockholm Environment Institute (SEI) Tugas: Terlibat dalam penyusunan materi fasilitasi MusBak Notulensi kegiatan fasilitasi. Menyusun draft laporan akhir fasilitasi. Asisten editor dan layout laporan akhir dan laporan kegiatan. Dokumentasi kegiatan. Pengelolaan logistik untuk kegiatan fasilitasi.
2013	**Proyek: Partisipasi Pelanggan PDAM** | Posisi: Technical Support | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: IUWASH - USAID Tugas: Asisten fasilitator untuk memfasilitasi pertemuan partisipasi pelanggan PDAM. Notulensi kegiatan fasilitasi. Menyusun draft laporan akhir fasilitasi. Editor dan layout laporan akhir fasilitasi. Dokumentasi kegiatan. Asisten logistik untuk kegiatan fasilitasi. **Proyek: Pelatihan Leadership Beyond Boundaries** | Posisi: Technical Support | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: IFAD, APMAS dan AIT Tugas: Terlibat dalam penyusunan materi pelatihan Leadership Beyond Boundaries. Notulensi kegiatan pelatihan. Menyusun laporan akhir pelatihan. Editor dan layout laporan akhir dan laporan kegiatan. Dokumentasi kegiatan. Pengelolaan logistic untuk kegiatan pelatihan. **Proyek: Fasilitasi Pelatihan Pemetaan Energi – DPP Jababeka** | Posisi: Technical Support | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: DPP Jababeka – GIZ Paklim

TAHUN	DESKRIPSI
	Tugas: Asisten untuk kegiatan fasilitasi. Dokumentasi kegiatan. Observasi kegiatan fasilitasi. Menyusun laporan hasil fasilitasi. **Proyek: Fasilitasi Networking Meeting 3 – DPP Adidas** | Posisi: Technical Support | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: DPP Adidas – GIZ Paklim Tugas: Asisten untuk kegiatan fasilitasi. Dokumentasi kegiatan. Observasi kegiatan fasilitasi. Menyusun laporan hasil fasilitasi. **Proyek: Promosi Efisiensi Energi dan Energi Terbarukan pada IKM di Indonesia** | Posisi: Technical Support | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: UNIDO Tugas: Pengumpulan data-data pendukung. Asisten untuk mereview materi hitungan konsumsi energi untuk industri kecil menengah. **Proyek: Produksi Konsumsi yang Berkelanjutan, Studi Baseline Proyek SCP di Indonesia** | Posisi: Technical Support – Asisten Editor | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: European Union Tugas: Pengumpulan data-data pendukung studi baseline proyek Sustainable Consumption Production (SCP). Asisten editor dan layout laporan akhir proyek. **Proyek: Revisi Modul FaTmi dan KaTsumi** | Posisi: Editor dan Layout Design | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: GIZ Tugas: Terlibat dalam proses penyusunan modul Fasilitator Tsunami dan Kader Tsunami. Editor modul untuk publikasi. Desain draft layout detil modul publikasi.
2012	**Proyek: ESP 2 – Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Daerah, Proyek Percontohan** | Posisi: Technical Support dan Administrasi Lapangan | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: The Royal Danish Embassy Tugas: Notulensi kegiatan pelatihan dan pertemuan/workshop tim. Asisten editor dan layout laporan akhir pendampingan KLHS dan laporan kegiatan. Asisten administrasi lapangan dan asisten logistic untuk kegiatan pelatihan/workshop/seminar Desain untuk training kit. **Proyek: ESP 2 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Peningkatan Pemahaman Pemda terhadap KLHS** | Posisi: Technical Support, Staf Administrasi dan Desain Publikasi | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: The Royal Danish Embassy Tugas: Asisten tim penyusunan Rapermendagri KLHS RPJMD. Notulensi keseluruhan kegiatan pelatihan. Asisten editor dan layout laporan akhir dan laporan kegiatan.

TAHUN	DESKRIPSI
	Merancang desain untuk seluruh media publikasi dan training kit. Pengelolaan logistik dan administrasi lapangan untuk kegiatan pelatihan/workshop/launching. **Proyek: Pendekatan Pembangunan Ekonomi Hijau** | Posisi: Technical Support – Asisten Editor | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: GIZ Regional Economic Development Tugas: Pengumpulan data-data pendukung penyusunan laporan. Layout laporan proyek. **Proyek: Pelatihan Spititual dan Manajemen Budaya Perusahaan** | Posisi: Technical Support | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: Herfinta Group – Medan Tugas: Persiapan materi pelatihan. Notulensi kegiatan pelatihan. Dokumentasi seluruh kegiatan. Desain konsep video sebagai laporan akhir proyek. Editor dan layout laporan akhir proyek. Menyusun draft desain training kit dan perlengkapan. Administrasi dan pengaturan logistic untuk kegiatan fasilitasi. **Proyek: Pelatihan Fasilitator Tsunami (FaTmi) dan Kader Tsunami (KaTsumi)** | Posisi: Technical Support – Asisten Editor | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: GIZ PROTECTS Tugas: Asisten untuk kegiatan fasilitasi dan peningkatan kapasitas/pemahaman terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis kepada Pemerintah Daerah. Terlibat dalam penyusunan materi presentasi dan pelatihan. Dokumentasi kegiatan. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan. Penyusunan laporan hasil pelatihan/workshop/fasilitasi. Merangkum seluruh rekomendasi untuk materi revisi modul FaTmi dan KaTsumi untuk publikasi. **Proyek: Revisi Pendekatan dan Modul untuk Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Tsunami (ToF dan ToT)** | Posisi: Technical Support – Asisten Editor | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: GIZ – PROTECTS GITEWS Tugas: Asisten editor dan layout desain modul pelatihan untuk materi ujicoba pelatihan FaTmi dan KaTsumi. **Proyek: Fasilitasi Networking Meeting 1 – DPP Adidas** | Posisi: Technical Support | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: DPP Adidas – GIZ Paklim Tugas: Asisten untuk kegiatan fasilitasi. Dokumentasi kegiatan. Observasi kegiatan fasilitasi. Penyusunan laporan hasil fasilitasi.
2011	**Proyek: IndII SGP Project Indonesia – Proyek Generasi Kedua** | Posisi: Technical Support – Internship | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: SMEC – AusAID Tugas: Pendokumentasian data lapangan.

TAHUN	DESKRIPSI
	Asisten editor dan layout laporan akhir pekerjaan konsultansi proyek SGP yang berlokasi di Jawa Timur dan Jawa Barat. Editing media publikasi seperti banner dan bahan untuk input ke draft website proyek. **Proyek: ESP 2 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Output 2.3** | Posisi: Technical Support – Internship | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: Sucofindo Jakarta dan The Royal Danish Embassy (Danida) Tugas: Asisten untuk kegiatan fasilitasi dan peningkatan kapasitas/pemahaman terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis kepada Pemerintah Daerah. Menyiapkan bahan-bahan presentasi dan pelatihan. Dokumentasi kegiatan. Observasi kegiatan fasilitasi dan pelatihan. Membuat ringkasan hasil pelatihan/workshop/fasilitasi. **Proyek: Pelatihan Manajemen dan Pelatihan untuk Pelatih** | Posisi: Technical Support - Internship | Perusahaan: PT. Dazya Ina Mandiri | Klien: Jakarta Islamic Centre Tugas: Asisten selama proses kegiatan fasilitasi dan peningkatan kapasitas. Persiapan materi pelatihan. Dokumentasi kegiatan. Observasi secara kesuluruhan kegiatan fasilitasi. Membuat laporan hasil pelatihan dan fasilitasi.

Dwi Nurcahyadi – Ahli Lingkungan

1. Nama Personel : Dwi Nurcahyadi, S.Si
2. Pekerjaan : Peneliti/Dosen
3. Tempat / tanggal lahir : 20 Agustus 1979
4. Kontak (Telepon/email) : 081280088278 / dnugeoui@gmail.com
5. No. Identitas : 3275012008790036
6. Alamat : Jl. Hikmah Blok D No. 10 Bekasi Mede RT 011 RW 002 Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
7. Pendidikan formal : Sarjana Sains Bidang Geografi – Universitas Indonesia
8. Pendidikan non formal : Pelatihan SEA – ITC University of Twente
9. Penguasaan bahasa
   a. Bahasa Indonesia : Baik
   b. Bahasa Inggris : Baik
10. Pengalaman kerja :

No.	Nama Paket Pekerjaan	Tahun	Nilai	Instansi Pengguna
1.	Bantuan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Rencana Tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR – KSP) Kabupaten Merauke dan Wilayah Sekitarnya di Provinsi Papua	2019	-	WWF Indonesia
2.	KLHS RDTR Provinsi DKI Jakarta	2019	-	DTK Provinsi DKI Jakarta
2.	Kebijakan Satu Peta – Peneliti Penggunaan Lahan Berkelanjutan	2019	--	WRI Indonesia
3.	Penilaian Kebutuhan Pengguna Basis Data SDGs Provinsi Riau	2019	-	UNDP
4.	Bantuan Teknis Penyusunan KLHS PK RTRW Provinsi Papua	2018	-	WWF Indonesia
5.	Bantuk Teknis Penyusunan KLHS RTRWK Dharmasraya – Provinsi Sumatera Barat	2017	-	DIM – WWF Indonesia
6.	Bantuan Teknis Penyusunan KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah	2016	-	DIM-INTEGRA-Denmark
7.	Penyusunan KLHS MP3EI	2013	-	Integra DHI-Denmark
8.	Penyusunan KLHS RPMD Provinsi DKI Jakarta	2012	-	Bappeda Provinsi DKI Jakarta
9.	Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Cilegon	2012	-	Bappeda Kota Cilegon
10.	Penyusunan KLHS RTR Pulau Papua dan Maluku	2011		KLH
11.	Penyusunan KLHS Pemilihan Lokasi Pengembangan Bandar Udara di Metropolitan Jakarta	2011		JICA
12.	Penyusunan KLHS Pemilihan Lokasi Pengembangan Pelabuhan di Metropolitan Jakarta	2011	-	JICA
13.	Penyusunan KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta	2010	-	Bappeda Provinsi DKI Jakarta
14.	Penyusunan KLHS Pantura Provinsi DKI Jakarta	2009	-	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

URAIAN PENGALAMAN KERJA

1. Pengguna Jasa	: WWF Indonesia
2. Nama Perusahaan	: Konsultan Perseorangan
3. Nama Paket Pekerjaan	: Bantuan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Kawasan Rencana Tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR – KSP) Kabupaten Merauke dan Wilayah Sekitarnya di Provinsi Papua

4. Lingkup Pekerjaan	: Melaksanakan tahapan penyelenggaraan KLHS sesuai dengan peraturan perunda-undangan bersama Pokja KLHS Provinsi Papua.
5. Lokasi Kegiatan	: Provinsi Papua
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2019 (6 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Lingkungan Berkelanjutan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak Paruh Waktu
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: WRI Indonesia
2. Nama Perusahaan	: Konsultan Perseorangan
3. Nama Paket Pekerjaan	: Kebijakan Satu Peta – Peneliti Penggunaan Lahan Berkelanjutan
4. Lingkup Pekerjaan	: Memberikan masukan kepada WRI Indonesia dan Pemerintah Daerah yang ada dalam fasilitasinya dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan KLHS.
5. Lokasi Kegiatan	: Jakarta
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2019 (12 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Lingkungan Berkelanjutan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak Paruh Waktu
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: UNDP – Kantor Riau
2. Nama Perusahaan	: Konsultan Perseorangan
3. Nama Paket Pekerjaan	: Kajian Kebutuhan Basis Data SDGs Provinsi Riau
4. Lingkup Pekerjaan	: Melakukan kajian kebutuhan pengguna data SDG's Provinsi Riau untuk mendukung penyelenggaran KLHS RPJMD Provinsi Riau
5. Lokasi Kegiatan	: Provinsi Riau
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2018 (1 Bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA SIG dan Pembangunan Berkelanjutan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak Paruh Waktu
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: WWF Indonesia
2. Nama Perusahaan	: Konsultan Perseorangan
3. Nama Paket Pekerjaan	: Bantuan Teknis Penyusunan KLHS PK RTRW Provinsi Papua
4. Lingkup Pekerjaan	: Melaksanakan tahapan penyelenggaraan KLHS sesuai dengan peraturan perunda-undangan bersama Pokja KLHS Provinsi Papua.
5. Lokasi Kegiatan	: Provinsi Papua
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2018 (8 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Lingkungan Berkelanjutan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak Paruh Waktu
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: WWF Indonesia

2. Nama Perusahaan	: Dharma Ina Mandiri
3. Nama Paket Pekerjaan	: Bantuk Teknis untuk penyusunan KLHS PK RTRW dan RPJMD Kabupaten Dharmasraya – Provinsi Sumatera Barat
4. Lingkup Pekerjaan	: Melaksanakan tahapan penyelenggaraan KLHS sesuai dengan peraturan perunda-undangan bersama Pokja KLHS Kabupaten Dharmasraya
5. Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Dharmasraya
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2017 (6 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Lingkungan Berkelanjutan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak Paruh Waktu
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: ESP3 DANIDA Denmark
2. Nama Perusahaan	: DIM -INTEGRA
3. Nama Paket Pekerjaan	: Bantuan Teknis dalam penyusunan KLHS RTRWK Provinsi Jawa Tengah
4. Lingkup Pekerjaan	: Melaksanakan tahapan penyelenggaraan KLHS sesuai dengan peraturan perunda-undangan bersama Pokja KLHS di Kab. Sukoharjo, Kab. Magelang dan Kab. Temanggung
5. Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Sukoharjo, Magelang, dan Temanggung
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2016
9. Posisi Penugasan	: TA Lingkungan Berkelanjutan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak Paruh Waktu
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: ESP 3 DANIDA Denmark
2. Nama Perusahaan	: DHI
3. Nama Paket Pekerjaan	: Penyusunan KLHS MP3EI
4. Lingkup Pekerjaan	: Melaksanakan tahapan penyelenggaraan KLHS MP3EI untuk memastikan terjaganya kualitas lingkungan koridor MP3EI
5. Lokasi Kegiatan	: Koridor Sumatera dan Jawa
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2013 (3 Bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Lingkungan Berkelanjutan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak Paruh Waktu
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Nama Perusahaan	: -
3. Nama Paket Pekerjaan	: Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta
4. Lingkup Pekerjaan	: Membantu dan mengarahkan tim pokja melakukan tahapan KLHS
5. Lokasi Kegiatan	: Provinsi DKI Jakarta
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2012 (6 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Pendamping bidang Pengembangan Keruangan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak Paruh Waktu
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: Bappeda, Kota Cilegon
2. Nama Perusahaan	: -

3. Nama Paket Pekerjaan	: Penyusunan KLHS RTRW Kota Cilegon
4. Lingkup Pekerjaan	: Membantu dan mengarahkan tim pokja melakukan tahapan KLHS
5. Lokasi Kegiatan	: Kota Cilegon Provinsi Banten
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2012 (3 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Pendamping bidang Pengembangan Keruangan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: KLH
2. Nama Perusahaan	: -
3. Nama Paket Pekerjaan	: Penyusunan KLHS RTRW Pulau Papua & Maluku
4. Lingkup Pekerjaan	: Membantu dan mengarahkan tim pokja melakukan tahapan KLHS
5. Lokasi Kegiatan	: Jakarta
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2011 (6 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Pendamping bidang Pengembangan Keruangan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: JICA
2. Nama Perusahaan	: -
3. Nama Paket Pekerjaan	: Penyusunan KLHS Pemilihan Lokasi Bandara di Metoroplitan Jakarta
4. Lingkup Pekerjaan	: Membantu pengguna jasa dan pemangku kepentingan untuk melakukan tahapan KLHS
5. Lokasi Kegiatan	: Jakarta Raya
6. Nilai Kontrak	: 400.000.000
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2011 (4 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Pendamping bidang Pengembangan Keruangan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: JICA
2. Nama Perusahaan	: -
3. Nama Paket Pekerjaan	: Penyusunan KLHS Pemilihan Lokasi Pelabuhan di Metoroplitan Jakarta
4. Lingkup Pekerjaan	: Membantu pengguna jasa dan pemangku kepentingan untuk melakukan tahapan KLHS
5. Lokasi Kegiatan	: Jakarta Raya
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2011 (4 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Pendamping bidang Pengembangan Keruangan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Nama Perusahaan	: -
3. Nama Paket Pekerjaan	: Penyusunan KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta

4. Lingkup Pekerjaan	: Membantu dan mengarahkan tim pokja melakukan tahapan KLHS
5. Lokasi Kegiatan	: Provinsi DKI Jakarta
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2011 (6 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Pendamping bidang Pengembangan Keruangan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

1. Pengguna Jasa	: BPLHD Provinsi DKI Jakarta
2. Nama Perusahaan	: -
3. Nama Paket Pekerjaan	: Penyusunan KLHS Pantai Utara Jakarta Provinsi DKI Jakarta
4. Lingkup Pekerjaan	: Membantu dan mengarahkan tim pokja melakukan tahapan KLHS
5. Lokasi Kegiatan	: Provinsi DKI Jakarta
6. Nilai Kontrak	: -
7. No. Kontrak	: -
8. Waktu Pelaksanaan	: 2009 (3 bulan)
9. Posisi Penugasan	: TA Pendamping bidang Pengembangan Keruangan
10. Status Kepegawaian pada Perusahaan	: Kontrak
11. Surat Referensi dari Pengguna Jasa	: -

Haditya Pradana – Ahli D3TLH

Nama	Haditya Pradana			
Pendidikan	● Sarjana Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Malang 2014			
Bahasa dan Tingkat Kemahiran	Bahasa	Berbicara	Membaca	Menulis
	Indonesia	Bahasa Asli		
	Inggris	Baik	Baik	Baik
Pengalaman Kerja Profesional	● 2016 - 2018, WWF Indonesia Kantor Boven Digoel, Staff GIS ● 2015 - 2016, WWF Indonesia Kantor Wasior, Kab. Teluk Wondama, Staff GIS ● 2014 - 2015, WWF Indonesia Kantor Tambrauw, Staff GIS ● 2013, Taman Nasional Bali BaratOn-the-job training in West Bali National Park, Internship			
Pengalaman Proyek (pilihan)	Proyek : Penyusunan KLHS RTRW Jakarta 2040 – DLH Provinsi DKI Jakarta Posisi : Tenaga Ahli Analis Data Lokasi/Periode : Jakarta / 2021 - 2022 Deskripsi Pekerjaan: Mendampingi POKJA KLHS RTRW provinsi DKI Jakarta dalam: a. Melakukan studi terhadap regulasi, data dan informasi terbaru yang berkaitan dengan KLHS RTRW Jakarta 2040. b. Melaksanakan koordinasi intensif dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait penyusunan KLHS, terutama dengan KLHK, agar KLHS dapat divalidasi. c. Mengidentifikasi materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi LH dan identifikasi prioritasnya. d. Menganalisis pengaruh KRP terhadap kondisi LH. e. Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP dan rekomendasi perbaikan KRP dan integrasi KRP dalam RTRW Jakarta 2040. f. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS dan konsultasi publik. g. Melaksanakan pembahasan pra validasi dan validasi ke KLHK. h. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.			
	Proyek : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2021 - 2026 Posisi : Tenaga Ahli KLHS / Daya Dukung dan Daya Tampung Lokasi/Periode : Merauke / 2021 Deskripsi Pekerjaan : ● Mendampingi kegiatan pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2021 – 2026 dalam kegiatan Forum Group Diskusi (FGD), Konsultasi Publik, sampai dengan Tahap Validasi, dengan beberapa mekanisme berikut. (i) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; (ii) perumusan isu pembangunan berkelanjutan daerah; (iii) analisis profil 6 muatan: daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, dampak/risiko lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (SDA), ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (KEHATI) dan kerentanan perubahan iklim; (iv) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; (v) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.			
	Proyek : Perencanaan Tata Ruang untuk Papua Selatan di WWF Indonesia Kantor Merauke Posisi : Koordinator Perencanaan Tata Ruang Lokasi/Periode : Merauke / 2018 - 2020			

	Deskripsi Pekerjaan : ● Bertanggung jawab dalam mendukung penataan di Papua Selatan yang meliputi wilayah Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel. ● Memastikan penataan ruang di Papua Selatan mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
	Proyek : Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Merauke Posisi : Konsultan Tata Ruang Lokasi/Periode : Merauke / 2020 - 2021 Deskripsi Pekerjaan : ● Memiliki tanggung jawab untuk mendukung analisis spasial dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Merauke. ● Mempersiapkan dokumen fakta analisis wilayah dan dokumen rencana RTRW.
	Proyek : Implementasi, Pengembangan dan Proses dari Aplikasi AKSARA di GIZ MRV-MMI Posisi : Konsultan Lokasi/Periode : Jakarta / 2020 - 2021 Deskripsi Pekerjaan : ● Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung implementasi pengembangan AKSARA termasuk pengembangan E-learning AKSARA. ● Melakukan pemutakhiran petunjuk teknis sektor lahan dan pemutakhiran teknis metodologi teknis analisis spasial untuk perubahan penutupan lahan dan penggunaan lahan.
	Proyek : Analisis Spasial Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Penyedia Air di Kota Cilegon Posisi : Konsultan Pendukung Analis Spasial di PT. Dharma Ina Mandiri Lokasi/Periode : Cilegon / 2020 Deskripsi Pekerjaan : ● Bertanggung jawab untuk membantu dalam analisis spasial daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air di Kota Cilegon. ● Menyusun metodologi perhitungan dan dokumen teknis penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penyedia air di Kota Cilegon.
	Proyek : Perencanaan Tata Ruang untuk Papua Selatan di WWF Indonesia Kantor Merauke Posisi : Koordinator Perencanaan Tata Ruang Lokasi/Periode : Merauke / 2018 - 2020 Deskripsi Pekerjaan : ● Bertanggung jawab dalam mendukung penataan di Papua Selatan yang meliputi wilayah Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel. ● Memastikan penataan ruang di Papua Selatan mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Elida Rizki Muta'alya – Ahli Lingkungan

Nama	Elida Rizki Muta'alya
Detail Kontak	elida@dharmainamandiri.com
Tanggal lahir	11/05/1992
Kebangsaan	bahasa Indonesia
Status penduduk	Penduduk
Pendidikan	• S1 Akuntansi, STIE YKPN Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, 2013
Pelatihan/seminar lainnya	• Bersertifikat Perpajakan Terapan Brevet A & B, IAI Yogyakarta • Bersertifikat ERP SAP Akuntansi Keuangan • Perangkat Lunak Dasar ERP SAP Bersertifikat • Perangkat Lunak Akuntansi MYOB Bersertifikat
Kualifikasi Profesional	Pengalaman di bidang lingkungan dalam menganaliasis data, terutama data kependudukan, keuangan dan perpajakan serta audit keuangan untuk proyek-proyek yang didanai oleh lembaga internasional dan nasional; berpengalaman dalam menggunakan aplikasi kuantitatif, pengaturan logistik dan administrasi;

Bahasa & Tingkat Kemahiran

Bahasa	Berbicara	Membaca	Menulis
Indonesia	Bahasa pertama	Bahasa pertama	Bahasa pertama
Bahasa inggris	Bagus	Bagus	Bagus

Keanggotaan dalam Masyarakat Profesional	
Pengalaman Kerja Profesional	• 2017 – Sekarang, PT. Dharma Ina Mandiri, Staf Keuangan • 2016, PT. Solusi UKM, Ibu Konsultan Junior Dynamic AX • 2014-2016, PT. Mitrasolusi Binadaya, Konsultan Aplikasi ERP • 2013-2014, PT. Uniteknindo Inti Sarana, Staf Keuangan
Pengalaman (pilihan)	Proyek : Penyusunan KLHS RTRW Jakarta 2040 – DLH Provinsi DKI Jakarta Posisi : Anggota Tim Tenaga Ahli KLHS – PT. Dharma Ina Mandiri Lokasi/Periode : Jakarta / 2021 - 2022 Deskripsi Pekerjaan: • Mendukung dan membantu tenaga ahli dan POKJA KLHS RTRW Jakarta 2040 dalam melaksanakan KLHS dalam hal inventarisasi data, administrasi dan pengelolaan kegiatan. • Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Lihudp DKI Jakarta dan SDGs Hub UI dalam pengelolaan kegiatan.
	Proyek : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kepelabuhan Tanjung Carat (Proyek Strategis Nasional Pembangungan Palembang Baru) Posisi : Anggota Tim Tenaga Ahli KLHS – PT. Dharma Ina Mandiri Lokasi/Periode : Jakarta / 2021 Deskripsi Pekerjaan : Mendukung dan membantu tenaga ahli dan POKJA KLHS Kepelabuhanan Tanjung Carat dalam melaksanakan KLHS dalam hal inventarisasi data, administrasi dan pengelolaan kegiatan. Berkordinasi dengan Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan kegiatan.
	Proyek : Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2021 - 2026 Posisi : Anggota Tim Tenaga Ahli KLHS Lokasi/Periode : Merauke / 2021 Deskripsi Pekerjaan :

	Mendukung dan membantu tenaga ahli dan POKJA KLHS RPJMD Kabupaten Merauke dalam melaksanakan KLHS dalam hal pengelolaan dan analisis data lingkungan, administrasi dan pengelolaan kegiatan.
	Proyek/Pemberi Kerja: Penyusunan rencana induk pengelolaan sampah kota dan rencana aksi untuk Kabupaten Lombok Utara dengan fokus khusus di Kepulauan Gili, provinsi Nusa Tenggara Barat / ESP3-DANIDA **Posisi** : Anggota Tim Tenaga Ahli **Lokasi** :Jakarta, Indonesia **Tahun/durasi** : 2018- 2019 **Deskripsi tugas:** • Pengelolaan dan analisis data lingkungan terkait dengan persampahan • Penyusunan Laporan • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait mencakup pemberi kerja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara • Penataan administrasi dan logistik
	Proyek/Pemberi Kerja: Penyusunan masterplan pengelolaan sampah kota antardaerah untuk Magelang Raya (Kota Magelang dan Kabupaten Magelang), Provinsi Jawa Tengah, Indonesia/ ESP3-DANIDA **Posisi dipertahankan :** Anggota Tim Tenaga Ahli **Lokasi** **:** Magelang, Indonesia **Tahun/durasi** **:** 2018 **Deskripsi tugas:** • Pengelolaan dan analisis data lingkungan terkait dengan persampahan • Penyusunan Laporan • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait mencakup pemberi kerja dan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Magelang • Penataan administrasi dan logistik
	Proyek/Pemberi Kerja: Revisi Rencana Induk Pengelolaan Sampah, DKI Jakarta – Indonesia/ ESP3-DANIDA, DIM **Posisi** : Anggota Tim Tenaga Ahli **Lokasi** :Jakarta, Indonesia **Tahun/durasi** : 2017 - 2018 **Deskripsi tugas:** • Pengelolaan dan analisis data lingkungan terkait dengan persampahan • Penyusunan Laporan • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait mencakup pemberi kerja dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI jakarta • Penataan administrasi dan logistik
	Proyek/Pemberi Kerja: Fasilitasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat / WWF-Indonesia dan MCAI, DIM **Posisi dipertahankan** : Anggota Tim Tenaga Ahli **Lokasi** :Jakarta, Riau, Padang, Indonesia **Tahun/durasi** : 2017-2018 **Deskripsi tugas:** • Pengelolaan dan analisis data lingkungan terkait dengan persampahan • Melakukan analisis kajian pengaruh pada KLHS • Penyusunan Laporan Kegiatan • Notulensi • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait mencakup pemberi kerja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya

	• Pengorganisasian Kegiatan
	Proyek/Pemberi Kerja: Penyusunan Kahiian Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia/ ESP3-DANIDA, DIM **Posisi dipertahankan** : Anggota Tim Tenaga Ahli **Lokasi** :Kabupaten Batang, Indonesia **Tahun/durasi** : 2017-2018 **Deskripsi tugas:** • Pengaturan acara untuk fasilitasi, konsultasi publik dan beberapa pertemuan. • Pengelolaan dan analisis data lingkungan terkait dengan persampahan • Melakukan analisis kajian pengaruh pada KLHS • Penyusunan Laporan Kegiatan • Notulensi • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait • Pengorganisasian Kegiatan
	Proyek/Pemberi Kerja: Training of Trainers (ToT) KLHS untuk Balai Penelitian Lingkungan Hidup: Peluncuran di Medan dan Makassar (Ambon)/ ESP3-DANIDA, DIM **Posisi dipertahankan** : Anggota Tim Tenaga Ahli **Lokasi** :Medan dan Ambon, Indonesia **Tahun/durasi** : 2017 **Deskripsi tugas:** • Pengaturan acara untuk fasilitasi, konsultasi publik dan beberapa pertemuan. • Pengelolaan dan analisis data lingkungan terkait dengan persampahan • Melakukan analisis kajian pengaruh pada KLHS • Penyusunan Laporan Kegiatan • Notulensi • Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait

Lampiran 8. Capaian TPB

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Tujuan 1 - Tanpa Kemiskinan																
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.																
1.2.1*	Tingkat Kemiskinan	BPS	%	3,78 (tahun 2017)	3,58	3,38	3,18	2,98	2.78	3,55	3,42	4,53 (Maret)	4,72 (Maret)	4,61 (September)	Dinas Sosial	Akan Tercapai/ Membaik
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.																
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	BPS, BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial	%	73 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	98	98,03	97,7	98,39	98.21	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	%	1. Formal : 116 dari penduduk yang bekerja	100	100	100	100	100	NA	150,05	103,19	112,04 (semester I)		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Data Tidak Tersedia
				2. Informal : NA	10	10	10	10	10	NA	26,85	8,83	20,25 (semester I)			
1.3.1.(c)#	Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya	Bab 6 RPJMD	%	4,8 (tahun 2017)	14,9	38,7	64,5	75	85.4	25,05	87,27	92,24	69,82	95.29	Dinas Sosial	Tercapai
1.3.1.(d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial (realisasi capaian)	Rumah Tangga	61022	65918	65918	65918	65918	65918	65368	NA	102.345 Terdiri dari : Kep. Seribu 1.001 Jakbar 20.603 Jakpus 14.356 Jaksel 17.640 Jaktim 25.242 Jakut 23.361	90.345 Terdiri dari : Kep. Seribu 936 Jakbar 17.547 Jakpus 12.924 Jaksel 16.712 Jaktim 22.062 Jakut 20.837	127.379 Terdiri dari : Kep. Seribu 1.362 Jakbar 22.454 Jakpus 19.221 Jaksel 30.267Jaktim 26.658 Jakut 27.417	Dinas Sosial	Tercapai
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.																
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Susenas BPS	%	97,43 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	96,04	98,81	99,15	99,26	NA	Dinas Kesehatan	Data Tidak Tersedia
1.4.1.(b)#	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada anak usia 12-23 bulan	SDKI BKKBN dan BPS	%	47 (tahun 2017)	50	53	55	60	60	111	95,7	68,7	91,9	97.2	Dinas Kesehatan	Tercapai
1.4.1.(c)#	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	Bab 8 RPJMD	%	56,9 (tahun 2017)	57,34	57,78	58,22	58,66	59.1	57,34	NA	59,51	60,32 (SR 2021)	59,16% (Data Rutin) ket: mCPR	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Susenas BPS	%	85,88 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	88,39	99,82	99,84	99,86	97.93	Dinas Sumber Daya Air	Perlu Perhatian Khusus
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Susenas BPS	%	83,48 (tahun 2016)	85,15	86,85	88,59	90,36	92.17	90,73	92,89	93,04	95,17	92.79	Dinas Sumber Daya Air	Tercapai
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Susenas BPS	%	15,18 (tahun 2016)	12,14	9,72	7,77	6,22	4.97	14,36	NA	NA			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Data Tidak Tersedia
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	96,06 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	95,39	93,44	NA	95,4	94.97	Dinas Pendidikan	Perlu Perhatian Khusus
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	83,27 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	81,86	83,25	NA --> 82,47	83,01	88.07	Dinas Pendidikan	Akan Tercapai/ Membaik
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	71,87 (tahun 2016) 76,83 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	79,94	86,6	NA		79.55	Dinas Pendidikan	Perlu Perhatian Khusus
1.4.1.(j)	Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran	Susenas BPS	%	96,36 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	96,23 (data update dari BPS)	97,01 (data update dari BPS)	97,39	96,40	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tercapai
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Susenas BPS	%	100 (tahun 2016)	100	100	100	100	100	100	NA	100	100(semester I)	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Tercapai
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.																
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Realisasi Capaian)	Jiwa per 100.000 orang (meninggal dan hilang)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,25	317,00	NA	1,21778	0.5545	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan Tercapai/ Membaik
			Jiwa per 100.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,76	2,63	NA	1,74222	2.406	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
			orang (terluka)													
			Jiwa per 100.000 orang (menderita dan mengungsi)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	211,29	154,73	NA	220,57 (semester I)	115.7613	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Realisasi Capaian)	Lokasi	34 (tahun 2015)	NA	NA	NA	NA	NA	76 (sekolah 50 lokasi; kelurahan 20 lokasi; rumah sakit dan pasar 1 lokasi; serta gedung pemerintah 5 lokasi)	200 (sekolah 44 lokasi; kelurahan 20 lokasi; gedung swasta 79 lokasi; dan gedung pemerintah 57 lokasi)	1.750 orang (7 kegiatan di fasilitas publik/gedung, 4 kegiatan relawan dan potensi masyarakat, 6 kegiatan kampung tangguh)		139 (Rumah ibadah 54; Gedung Sekolah 11; Kantor RW 13; Kretariat RT 1; RPTRA 6; Kantor Lurah 2; Lapangan 2; Majelis Taklim 7; Lainnya 43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan Tercapai/ Membaik
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas Sosial (realisasi capaian)	Jiwa	NA	8970 kk, 36447 jiwa (untuk semua jenis bencana)	11667 kk, 38706 jiwa + 8 orang meninggal (untuk semua jenis bencana)	321.586 Jiwa	147.923 Jiwa		8970 kk, 36447 jiwa (untuk semua jenis bencana)	11667 kk, 38706 jiwa + 8 orang meninggal (untuk semua jenis bencana)	NA	307767	110.748 Jiwa (pemberian permakanan), 131.500 (pemberian sandang)	Dinas Sosial	Perlu Perhatian Khusus
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas Sosial (realisasi capaian)	Jiwa	NA	0	1182 (untuk semua jenis bencana)	NA	856 Jiwa		0	1182 (untuk semua jenis bencana)	NA	300	6,387	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan Tercapai/ Membaik
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Realisasi Capaian)	Indeks Risiko	Jakarta Pusat 70,6; Jakarta Utara 89,7; Jakarta Barat 88,2; Jakarta Selatan 64,8; Jakarta Timur 93,2; dan Kepulauan	NA	NA	NA	NA	NA	Jakarta Pusat 58,6; Jakarta Utara 74,4; Jakarta Barat 73,2; Jakarta Selatan 53,8; Jakarta Timur 77,4; dan Kepulauan Seribu 64,8 (2018)	Jakarta Keseluruhan 67,04; Jakarta Pusat 59; Jakarta Utara 74; Jakarta Barat 73; Jakarta Selatan 54; Jakarta Timur 77; dan Kepulauan Seribu 65 (2020)	Jakarta Keseluruhan 64,02; Jakarta Pusat 56,90; Jakarta Utara 72,25; Jakarta Barat 71,07; Jakarta Selatan 52,18; Jakarta Timur 75,08; dan Kepulauan Seribu 56,66 (per Juni 2021)		"Jakarta Keseluruhan 60,43; Jakarta Pusat 54,41; Jakarta Utara 69,08; Jakarta Barat 67,95; Jakarta Selatan 49,89; Jakarta Timur 71,79; dan Kepulauan Seribu 49,46"	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan Tercapai/ Membaik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
				Seribu 64,8 (2017)												
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Disgulkarmat (realisasi capaian)	Rupiah	475.218.955.000 (kerugian akibat bencana kebakaran tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	1.80271E+11	4.77977E+11	2.3322E+11	1.77183E+11	215,700,900,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perlu Perhatian Khusus
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (realisasi capaian)	Dokumen	2 (tahun 2015)	2	2	3	3	4	2 (terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019; Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK)	2 (terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019; Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK)	2	2	#REF!	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data Tidak Tersedia
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.																
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	TKPK Provinsi	Triliun Rupiah	11,42 (tahun 2017)	9,59	PM	PM	PM	PM	9,59	10,78	NA		#REF!	Dinas Sosial	Data Tidak Tersedia
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	APBD	Miliar Rupiah, Fungsi Kesehatan	7.180,97 (tahun 2017)	7.965,44	7.742,92	PM	PM	PM	Fungsi Kesehatan, Rp 7.855 Miliar	Fungsi Kesehatan, Rp 7.743 Miliar	Fungsi Kesehatan, Rp 7.240 Miliar	Fungsi Kesehatan, Rp10.758.157.780.139	Dibawah Koordinasi Dinas Kesehatan 10.301.311.006.484	Dinas Kesehatan	Data Tidak Tersedia
Tujuan 2 - Tanpa Kelaparan																
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.																
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Susenas BPS; Riskesdas Kementerian Kesehatan; BKP; FAO/WHO/UNU	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Belum diperoleh data disagregasi level provinsi	1.43	1.94	2.2	3.42	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Perlu Perhatian Khusus
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Riskesdas dan Sirkesnas	%	14 (tahun 2013)	NA	NA	NA	NA	NA	14,3	NA	NA	4.49	2.88	Dinas Kesehatan	Akan Tercapai/ Membaik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
		Kementerian Kesehatan														
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Susenas BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6,86	NA	NA		3.77	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Data Tidak Tersedia
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Susenas BPS	%	35,43 (tahun 2015)	34,33	33,03	31,79	30,59	29.44	7,05	NA	NA		NA	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Data Tidak Tersedia
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	27,5 (tahun 2013)	NA	NA	NA	NA	NA	17,7	11	5,9	9,2 (semester I)	3.58	Dinas Kesehatan	Akan Tercapai/ Membaik
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18,0	6,9	6,5	4,49 (semester I)	2.88	Dinas Kesehatan	Akan Tercapai/ Membaik
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10,2	5,1	4,1	4 (semester I)	2.33	Dinas Kesehatan	Akan Tercapai/ Membaik
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11,5	11,4	8,33	6,27 (semester I)	8.36	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
2.2.2.(b)#	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif	Bab 6 Renstra	%	49,25 (tahun 2015)	70	75	80	85	90	81,90	70,22 (Dinkes)	70,86 (Susenas 2020) dan 65,41 (Dinkes)	80,45	81.63	Dinas Kesehatan	Akan Tercapai/ Membaik
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan:	Laporan Kementerian Pertanian													Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Data Tidak Tersedia
	1. Angka Konsumsi Ikan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (realisasi capaian)	kg/kapita /tahun	35,5 (tahun 2017)	0	37	38,5	40	41.5	39,62	49,6	NA		NA		
	2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (realisasi capaian)	skor	80,5 (tahun 2017)	0	82	83	84	85	80,4	88,2	86,3		NA		

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Tujuan 3 - Kehidupan Sehat dan Sejahtera																
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.																
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	kematian per 100.000 kelahiran hidup	44 (tahun 2017, sumber: Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	55,1	57,48	70,09	76,49	74.80	Dinas Kesehatan	Akan Tercapai/ Membaik
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Susenas BPS	%	99,59 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	99,72	NA	100		NA	Dinas Kesehatan	Data Tidak Tersedia
3.1.2.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Susenas BPS	%	97,86 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	97,19	NA	NA		NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Data Tidak Tersedia
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH.																
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	kematian per 1.000 kelahiran hidup	3 (tahun 2017, sumber: Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	3,72	3,09	2,94	1,9	4.84	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)		2 (tahun 2017, sumber: Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	2,14	1,89	1,79	1,33	3.85	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	SDKI	kematian per 1.000 kelahiran hidup	3 (tahun 2017, sumber: Profil Kesehatan Provinsi	NA	NA	NA	NA	NA	3,13	2,63	2,54	1,64	4.37	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
				DKI Jakarta Tahun 2017)												
3.2.2.(b)#	Persentase Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Bab 6 Renstra	%	100 (2017)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Tercapai
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.																
3.3.1.(a)#	Penatalaksanaan Penyakit HIV-AIDS	Bab 6 Renstra	%	100 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	94,67	113,07	118,74	105,16	100	Dinas Kesehatan	Tercapai
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Kemenkes	Jiwa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3,42	3,65	180	94(semesterI)	389	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Jiwa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0		0.01	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Kota/kab upaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	6	6	Dinas Kesehatan	Tercapai
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100	100(semester I)	100	Dinas Kesehatan	Tercapai
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	39	0	Kasus kusta baru 265 s.d tw 3		349	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	Kemenkes	Kota/kab upaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	5 (semester I)	5	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Kota/kab upaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	6 (semester I)	6	Dinas Kesehatan	Tercapai
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.																
3.4.1.(a)#	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	Bab 6 Renstra	%	0 (tahun 2017)	30	40	50	60	70	100	100	100	96,88	100	Dinas Kesehatan	Tercapai
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Riskesdas dan Sirkesnas	%	20 (tahun 2013)	NA	NA	NA	NA	NA	33,43	NA	NA	33,43(semesterI)	33.43	Dinas Kesehatan	Akan Tercapai/ Membaik
3.4.1.(c)#	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Bab 6 Renstra	%	0 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	21,87	33,68	28,18	99,15	100	Dinas Kesehatan	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Sistem Registrasi Sampel	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan	Data Tidak Tersedia
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Kemenkes	Kabupaten/kota	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	6(semesterI)	6	Dinas Kesehatan	Tercapai
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.																
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Laporan BNN	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pelajar 4%; Pekerja 1,5%	NA	NA		NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Tidak Tersedia
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Riskesdas (realisasi pencapaian)	%	2,7 (tahun 2007)	NA	NA	NA	NA	NA	3 (penduduk Umur >10 Tahun yang mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam 1 Bulan Terakhir)	NA	NA		NA	Satuan Polisi Pamong Praja	Data Tidak Tersedia
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.																
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40,7	51,2	NA	60,32 (SR 2021)	59,16% (Data Rutin) ket: mCPR	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Perlu Perhatian Khusus
3.7.1.(a)#	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	Bab 8 RPJMD	%	56,9 (tahun 2017)	57,34	57,78	58,22	58,66	59.1	57,34	NA	59,51	60,32 (SR 2021)	59,16% (Data Rutin) ket: mCPR	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Tercapai
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	34,86 (tahun 2015)	35,15	35,45	35,75	36,05	36.6	29,38	32,9	35,92	36,02 (SR 2021)	30.52	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Perlu Perhatian Khusus
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	SENSUS, SUPAS SDKI, dan SKAP	Per 1000	20 (tahun 2012) 20 (tahun 2017)	24	23	22	21	20	25	25		23,2 (IKU 2020)	19,3% (CARIK Jakarta)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Tercapai
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	SUPAS (realisasi capaian)	Nilai	2,20 (tahun 2017)	2,18	2,15	2,13	2,12	2.11	2,36	2,45		2,49 (IKU 2020)	2,22 (Carik Jakarta)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan	Akan Tercapai/ Membaik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
															Anak, dan Pengendalian Penduduk	
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.																
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Susenas BPS	%	3,56 (2017)	NA	NA	NA	NA	NA	3,20	2,81	3,93	2,61	NA	Dinas Kesehatan	Data Tidak Tersedia
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	38,26 (tahun 2015)	56,82	84,37	100	100,00	100.00	98,00	98,03	97,7	98,59	98.21	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
3.8.2.(a)#	Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	Bab 6 RPJMD	%	73 (tahun 2017)	0	95	95	95	100	98,00	98,03	97,7	98,39	98.21	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
Target 3.9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.																
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan	Sistem Registrasi Sampel	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	Dinas Kesehatan	Data Tidak Tersedia
Target 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.																
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Susenas BPS	%	24,72 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	30,77	26,04	25,75	24,44	#REF!	Dinas Kesehatan	Data Tidak Tersedia
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.																
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	98,7	98,58	99,89	98,36 (semester I)	98	Dinas Kesehatan	Perlu Perhatian Khusus
Target 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.																
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6,33	6,09	6,63			Dinas Kesehatan	Data Tidak Tersedia
Tujuan 4 - Pendidikan Berkualitas																
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.																
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	membaca: 48,3 matematika: 47,9	NA		#REF!	Dinas Pendidikan	Data Tidak Tersedia

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	96,43	97,54	97,71		98.32	Dinas Pendidikan	Akan Tercapai/ Membaik
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	96,75	98,07	96,9		98.01	Dinas Pendidikan	Akan Tercapai/ Membaik
4.1.1.(c)#	Persentase Sekolah terakreditasi A	Bab 6 RPJMD	%	0 (tahun 2017)	70,03	77,52	85,02	92,51	100	62,19	72,54	72,19	72,18	72.63	Dinas Pendidikan	Akan Tercapai/ Membaik
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	104,97 (tahun 2017)	104,2	105,1	105,9	106,76	107.61	103,63	105,5	102,94	101,02	100.65	Dinas Pendidikan	Tercapai
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	108,19 (tahun 2016) 105,4 (tahun 2017)	94,21	94,53	94,86	95,18	95.51	104,33	104,52	104,98	102,22	105.26	Dinas Pendidikan	Tercapai
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	97,25 (tahun 2016) 103, 69 (tahun 2017)	80,67	81,84	83	84,16	85.33	104,03	104,55	104,82	101,89	101.49	Dinas Pendidikan	Tercapai
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Susenas BPS	Tahun	10,97 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	11,06	11,11	11,17	11,20	11.31	Dinas Pendidikan	Akan Tercapai/ Membaik
Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.																
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	**%**	63,62 (tahun 2016) 66,32 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	24,9	43,08	39,44	36,68	37.25	Dinas Pendidikan	Akan Tercapai/ Membaik
Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.																
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	97,25 (tahun 2016) 103, 69 (tahun 2017)	80,67	81,84	83	84,16	85.33	104,03	104,55	104,82	101,89	101.49	Dinas Pendidikan	Tercapai
Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.																

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Susenas BPS	%	Tahun 2015: 80,01 (usia 15 – 24); 53,3 (usia 15 – 59) Tahun 2016: 82,53 (usia 15-24 tahun) Tahun 2017: 89,93 (usia 15-24 tahun)	87,87 (usia 15 – 25); 64,55 (usia 15 – 59)	96,5 (usia 15 – 25); 78,25 (usia 15 – 59)	100 (usia 15 – 25); 100 (usia 15 – 59)	100 (usia 15 – 25); 100 (usia 15 – 59)	100 (usia 15 – 25); 100 (usia 15 – 59)	92,15 (usia 15-24 tahun)	95,41 (usia 15-24 tahun) 85,17 (usia 15-59 tahun)	95,85 (usia 15-24 tahun) 88,08 (usia 15-59 tahun)	98,37 (usia 15-24 tahun) 91,79 (usia 15-24 tahun)	97,37 (Usia 15-24 tahun) 92,36 (Usia 15-59 tahun)	Dinas Pendidikan	Akan Tercapai/ Membaik
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.																
4.5.1*	1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di:														Dinas Pendidikan	
	a. SD/MI/sederajat	Susenas BPS	%	99,87 (tahun 2017)	52,36	53,41	54,47	55,56	56.68	99,09	99,66	100,37	100,77	99.26		Tercapai
	b. SMP/MTs/sederajat			98,16 (tahun 2017)	44,84	47,26	49,81	52,5	55.33	94,93	100,98	104,68	94,14	103.32		
	c. SMA/SMK/MA/sederajat			86,06 (tahun 2017)	27,98	29,07	30,20	31,38	32.61	103,12	100,19	92,52	97,66	101.01		
	2. Rasio APK perempuan/laki-laki di PT			91,22 (tahun 2017)	13,60	14,46	15,37	16,35	17.38	94,42	NA	NA		145.56		
Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua																
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik, (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	89,23	NA		N/A	Dinas Pendidikan	Data Tidak Tersedia
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.																

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	93,33 (tahun 2015)	96,06	98,86	100	100	100	55,94	49,94	47,14	40,24 (semester I)	37.79	Dinas Pendidikan	Perlu Perhatian Khusus
Tujuan 5 - Kesetaraan Gender																
Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.																
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Kebijakan	2	PM	PM	PM	PM	2	7 Peraturan Daerah; 13 Peraturan Gubernur; 1 Keputusan Gubernur; 2 Instruksi Gubernur	7 Peraturan Daerah; 13 Peraturan Gubernur; 1 Keputusan Gubernur; 2 Instruksi Gubernur	7 Peraturan Daerah; 13 Peraturan Gubernur; 1 Keputusan Gubernur; 2 Instruksi Gubernur	7 Peraturan Daerah; 13 Peraturan Gubernur; 1 Keputusan Gubernur; 2 Instruksi Gubernur	7 Peraturan Daerah; 13 Peraturan Gubernur; 1 Keputusan Gubernur; 2 Instruksi Gubernur	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Tercapai
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya																
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3,1	0,0000832 dan 0,0000576	282/3759839	494/3774569	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Perlu Perhatian Khusus
5.2.1.(a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	SKtA BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Data Tidak Tersedia
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,4	0,0000277 dan 0,0000181	134/3759839	155/3774569	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Perlu Perhatian Khusus
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Tercapai
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.																

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama,	Susenas BPS										NA	NA		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Data Tidak Tersedia
	- sebelum umur 15 tahun		%	0,11 (tahun 2015)	0	0	0	0	0	0,01	NA	NA	NA		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	
	- sebelum umur 18 tahun		%	3,18 (tahun 2017)	0	0	0	0	0	4,06	3,12	1,45	4,68		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Tahun	23,09 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	22,6	21	NA	NA		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Data Tidak Tersedia
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	SENSUS, SUPAS SDKI, dan SKAP	Per 1000	20 (tahun 2012) 20 (tahun 2017)	24	23	22	21	20	16	25		23,2 (IKU 2020)		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Data Tidak Tersedia
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	97,25 (tahun 2016) 103, 69 (tahun 2017)	80,67	81,84	83	84,16	85.33	104,03	104,55	104,82	101,89	101.49	Dinas Pendidikan	Tercapai
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.																
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	18,87 (tahun 2017)	19,81	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	19,81	21,7	21,7	21,7	21.7	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	BKN; Sakernas BPS	%	12,5 (tahun 2016)	NA	NA	NA	NA	NA	30,16	35,96	34,19	46,10	46.1	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Perlu Perhatian Khusus
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.																
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	SDKI BKKBN dan BPS	%	84,80 (tahun 2012)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Data Tidak Tersedia
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14,32	14,7	NA	9,85 (SR 2021)	11,73 (Carik Jakarta)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Perlu Perhatian Khusus
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	20,1 (tahun 2012)	NA	NA	NA	NA	NA	27	19,8	NA	59,4 (IKU 2020)	65,9 (SKAP 2022)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Akan Tercapai/ Membaik
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Kemhukham; BKKBN; Kementerian Kesehatan; KPPPA; Kemdikbud	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014. Kesehatan Reproduksi	Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014. Kesehatan Reproduksi	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Akan Tercapai/ Membaik
Tujuan 6 - Air Bersih dan Sanitasi yang layak																
Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.																
6.1.1.(a)#	Cakupan pelayanan air bersih	Bab 5 RPJMD	%	60 (tahun 2017)	60,99	63,65	66,09	73,69	79.61	60,38	63.16	64,24	65,3	65.41	Dinas Sumber Daya Air	Akan Tercapai/ Membaik
6.1.1.(b)#	Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	%	0 (tahun 2017)	0	0,93	1,85	-	2.78	0	5,55 (6 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan,	5,55 (6 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma)	7,41	7,41 (terdapat 8 waduk, Jagakarsa, Kaja, Kp. Rambutan, Situ Babakan,	Dinas Sumber Daya Air	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
											Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma)			Wijaya Kusuma, Daan Mogot, Grogol, Kp. Rambutan 2)		
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Susenas Kor, BPS	%	88,93 (tahun 2017)	94,17	94,95	95,73	96,52	97.32	89,59	99,82	99,84	99,86	97.93	Dinas Sumber Daya Air	Tercapai
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.																
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Susenas Kor, BPS	%	68,96 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	73,45	73,18	76,83	79,52	79.13	-	Perlu perhatian khusus
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Susenas Kor, BPS	%	83,48 (tahun 2016) 90,37 (tahun 2017)	85,15	86,85	88,59	90,36	92.17	90,73	92,89	93,04	95,17	92.79	Dinas Sumber Daya Air	Tercapai
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	- Kementerian Kesehatan - Bab 6 Renstra	Kelurahan	117 (tahun 2017)	137	167	202	237	267	229	251	251	267	267	Dinas Kesehatan	Tercapai
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Kelurahan	5 (tahun 2017)	137	167	202	237	267	21	26	27	34	45	Dinas Kesehatan	Akan Tercapai/ Membaik
6.2.1.(e)	Jumlah kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	Kota/kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	6		-	Tercapai
6.2.1.(f)#	Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	%	14,33 (tahun 2017)	15,93	17,04	20,49	23	26.44	15,73	16,73	17,75	18,19	20.595	Dinas Sumber Daya Air	Akan Tercapai/ Membaik
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.																
6.3.1.(a)	Jumlah kota/kabupaten yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kota/kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	6	6	-	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
6.3.1.(b)#	Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	%	14,33 (tahun 2017)	15,93	17,04	20,49	23	26.44	15.73	16.73	17,75	18,19	20.595	Dinas Sumber Daya Air	Akan Tercapai/ Membaik
6.3.2.(a)#	Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	%	0 (tahun 2017)	0	0,93	1,85	0	2.78	0	5,55 (6 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma)	5,55 (6 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma)	7,41 (terdapat 8 waduk, Jagakarsa, Kaja, Kp. Rambutan, Situ Babakan, Wijaya Kusuma, Daan Mogot, Grogol, Kp. Rambutan 2)	7,41 (terdapat 8 waduk, Jagakarsa, Kaja, Kp. Rambutan, Situ Babakan, Wijaya Kusuma, Daan Mogot, Grogol, Kp. Rambutan 2)	Dinas Sumber Daya Air	Tercapai
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Indeks Kualitas Air Sungai sebesar 31,41 poin	Indeks Kualitas Air Sungai sebesar 35,56 poin	NA	NA	NA	Dinas Sumber Daya Air	Data Tidak Tersedia
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.																
6.4.1.(a)#	Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah	Bab 8 RPJMD	%	50 (tahun 2017)	80	85	90	95	100	80,17	NA	90,54	99,31	99.68	Dinas Sumber Daya Air	Akan Tercapai/ Membaik
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	jdih.jakarta.go.id	Dokumen (Peraturan)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 (Pasal 38 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah, ayat (1) Terhadap kelebihan volume pemakaian per bulan dari luah/debit yang ditetapkan dikenakan denda dan ditagih melalui Surat Tagihan Denda Lebih Debit Air Tanah)	1 (Pasal 38 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah, ayat (1) Terhadap kelebihan volume pemakaian per bulan dari luah/debit yang ditetapkan dikenakan denda dan ditagih melalui Surat Tagihan Denda Lebih Debit Air Tanah)	1 (Pasal 38 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah, ayat (1) Terhadap kelebihan volume pemakaian per bulan dari luah/debit yang ditetapkan dikenakan denda dan ditagih melalui Surat Tagihan Denda Lebih Debit Air Tanah)	1 (Pasal 38 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah, ayat (1) Terhadap kelebihan volume pemakaian per bulan dari luah/debit yang ditetapkan dikenakan denda dan ditagih melalui Surat Tagihan Denda Lebih Debit Air Tanah)	1 (Pasal 38 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah, ayat (1) Terhadap kelebihan volume pemakaian per bulan dari luah/debit yang ditetapkan dikenakan denda dan ditagih melalui Surat Tagihan Denda Lebih Debit Air Tanah)	Dinas Sumber Daya Air	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.																
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (realisasi capaian)	RPDAST	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapai
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Wilayah sungai	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	4	1	1		Dinas Sumber Daya Air	Tercapai
Target 6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.																
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	DSDA (realisasi pencapaian)	Waduk/Situ/Embung	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	6 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma	6 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma	7 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma	7 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma	Dinas Sumber Daya Air	Akan Tercapai/ Membaik
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Danau	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Sumber Daya Air	Data Tidak Tersedia
Tujuan 7 - Energi Bersih dan Terjangkau																
Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.																
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Statistik PLN	%	99,98 (tahun 2016)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Tercapai
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Statistik PLN	kWh	2997 (tahun 2015)	3347	3468	3594	3767	3948	3132	3256	3021	3307	3237.68	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Perlu Perhatian Khusus
Target 7.2. Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global																
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	%	- (tahun 2017)	-	0,03	0,07	0,09	0.11	0	0,04	0,12	0,04	0.32	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Tercapai
Tujuan 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi																
Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.																

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
8.1.1*#	Pertumbuhan PDRB	BPS	%	6,29 (tahun 2017)	6,3	6,6	6,7	6,9	7	6,11	5,83	-2,39	3,56	5.25	Biro Perekonomian	Akan Tercapai/ Membaik
8.1.1.(a)#	Pertumbuhan PDRB	BPS	%	6,29 (tahun 2017)	6,3	6,6	6,7	6,9	7	6,11	5,83	-2,39	3,56	5.25	Biro Perekonomian	Akan Tercapai/ Membaik
Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.																
8.2.1*#	Pertumbuhan PDRB	BPS	%	6,29 (tahun 2017)	6,3	6,6	6,7	6,9	7	6,11	5,83	-2,39	3,56	5.25	Biro Perekonomian	Akan Tercapai/ Membaik
Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.																
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS (Sakernas)	%	26,9 (tahun 2015)	24,74	22,71	20,85	19,14	17.57	30,12	30,12	37,49	38,16	36.82	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Akan Tercapai/ Membaik
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS (Sakernas)	%	71,55 (tahun 2017)	69,82	70	70	70	70	69,82	68,45	61,78	61,74	63.12	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Akan Tercapai/ Membaik
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS (Sakernas)	%	0,13 (tahun 2017)	0,13	0,13	0,13	0,13	0.13	0,13	0,13	0,21	0,95	47	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Data Tidak Tersedia
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,5 (Peserta PKT yang memperoleh akses permodalan sebanyak 136 UMKM dari total 9071 peserta yang mendapatkan perizinan)	3,78 (Peserta PKT yang memperoleh akses permodalan sebanyak 575 UMKM dari total 15200 peserta yang mendapatkan perizinan)	3,41 (Peserta PKT yang memperoleh akses permodalan sebanyak 905 UMKM dari total 26515 peserta yang mendapatkan perizinan UMKM)	3,30 (Peserta PKT yang memperoleh akses permodalan sebanyak 1216 UMKM dari total 36893 peserta yang mendapatkan perizinan UMKM)	1,49 (Peserta PKT yang memperoleh akses permodalan sebanyak 910 UKM dari total 60746 peserta yang mendapatkan perizinan)	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perlu Perhatian Khusus
Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.																
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS (Sakernas)	Rupiah	23.596 (tahun 2017)	25248	30609	40874	54579	72881	25238	25236	28420	30662	32000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Akan Tercapai/ Membaik
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	BPS (Sakernas)	%	7,14 (tahun 2017)	5,20	5,10	5,00	4,90	4.8	6,24	6,22	10,95	8,50	7.18	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Akan Tercapai/ Membaik
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS (Sakernas)	%	18,8 (tahun 2015) 11,17	18,1	17,42	16,77	16,14	15.53	12,84	11,53	21,82	23,11	18.19	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Akan Tercapai/ Membaik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
				(tahun 2017)												
Target 8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.																
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS (Sakernas)	%	13,49 (tahun 2017)	13	13	13	13	13	16.98	15.41	20.13	20,47	17.19	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Akan Tercapai/ Membaik
Target 8.8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.																
8.8.1.(a)#	Jumlah perusahaan yang menjalankan K3	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Perusahaan	1180 (tahun 2017)	1380	1380	1380	1380	1380	NA	3155	2843	2233	2453	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Tercapai
Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.																
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,78	4,81	4,13	4,37	13.14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Akan Tercapai/ Membaik
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS (Statistik Pariwisata)	Orang	2.600.000 (tahun 2017)	2.800.000	2.940.000	3.087.000	3.241.350	3,403,417	2.811.974	2.455.427	39.324	122.299	935,182	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Akan Tercapai/ Membaik
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	33.000.000 (tahun 2017)	36.000.000	38.520.000	40.496.000	44.298.000	50,172,000	34.192.577	41.640.800	6.140.019	5.499.040	18,556,888	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Akan Tercapai/ Membaik
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	BPS (Statistik Pariwisata)	Triliun rupiah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5,73 (terdiri dari: Pajak Hotel Rp 1,74 Triliun; Pajak Restoran Rp 3,15 Triliun; dan Pajak Hiburan Rp 8,33 Miliar)	6,24 (terdiri dari: Pajak Hotel Rp 1,76 Triliun; Pajak Restoran Rp 3,61 Triliun; dan Pajak Hiburan Rp 8,60 Miliar)	2,6 (Realisasi 8 Desember) (terdiri dari: Pajak Hotel Rp 678,56 miliar; Pajak Restoran Rp 1,76 Triliun; dan Pajak Hiburan Rp 213,6 Miliar)	3,11 (terdiri dari: Pajak Hotel Rp 871,53 miliar; Pajak Restoran Rp 2,16 Triliun; dan Pajak Hiburan Rp 86,94 Miliar)	#REF!	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Data Tidak Tersedia
8.9.2*#	Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	49,07 (tahun 2017)	58	75	85	95	100	59,80	75,30	78,10	88	100	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tercapai
Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.																
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa	Bank Indonesia (SSKI)	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1. Kantor Bank: 7,01 2. ATM: 247,29	1. Kantor Bank = 6,29 2. ATM = 230,23	1. Kantor Bank = 5,56 2. ATM = 219,79	1. Kantor Bank = 5.94 2. ATM = 186,67	Biro Perekonomian	Akan Tercapai/ Membaik
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS (Podes)	km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,83	0,77	1,45	#REF!	Biro Perekonomian	Data Tidak Tersedia
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Bank Indonesia	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5,40	5,33	5,13	4,74	NA	Dinas Perindustrian,	Data Tidak Tersedia

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
		(Data UMKM)													Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Tujuan 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur																
Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.																
9.1.1.(a)#	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Bab 8 RPJMD	%	96 (tahun 2017)	0	96,5	97	97,5	98	96,16	NA	NA	96,77	97.19	Dinas Bina Marga	Akan Tercapai/ Membaik
9.1.2.(b)#	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Bab 8 RPJMD	Terminal Penumpang	- (tahun 2017)	-	-	-	1	3	NA	NA	NA	1	1	Dinas Perhubungan	Akan Tercapai/ Membaik
Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.																
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	BPS	%	13,43 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	12,66	11,82	10,86	11,64	11.72	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Akan Tercapai/ Membaik
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	BPS	%	7,41	NA	NA	NA	NA	NA	5,68	-1,22	(10,34)	11.06	5.95	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perlu Perhatian Khusus
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	BPS	%	14,37 (tahun 2015) 13,2 (tahun 2017)	15,62	16,98	18,46	20,08	21.83	13,04	12,3	11,01	11,47	10.26	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perlu Perhatian Khusus
Target 9.3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.																
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	BPS diolah Ditjen IKM Kementerian Perindustrian	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Data Tidak Tersedia
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8,41 (IMKM yang mendapatkan modal 169 IMKM dari total 2009 peserta yang telah mendapatkan perizinan IMKM)	0,78 (IMKM yang mendapatkan modal 75 IMKM dari total 9564 peserta yang telah mendapatkan	1,56 (IMKM yang mendapatkan modal 161 IMKM dari total 10.308 peserta yang telah mendapatkan perizinan IMKM)	3,15 (Peserta PKT yang memperoleh akses permodalan sebanyak 577 IMKM dari total 18313 peserta yang mendapatkan	1,49 (Peserta PKT yang memperoleh akses permodalan sebanyak 227 IKM dari total 15187 peserta yang	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perlu Perhatian Khusus

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
											perizinan IMKM)		perizinan IMKM)	mendapatkan perizinan)		
Target 9.4. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.																
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur	Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup	Data Tidak Tersedia
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	RPJMN 2015-2019	%	3,30	NA	NA	NA	NA	NA	3,55	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup	Data Tidak Tersedia
Target 9.5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negaranegara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.																
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB	APBD	%	0,00013 (2017)	PM	PM	PM	PM	PM	0,00013	0,000145	0.0000721	0,0001245		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Tidak Tersedia
Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.																
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet	Susenas Kor BPS	%	46,63 (tahun 2015) 60,65 (tahun 2017)	47,65	53,23	59,47	66,43	74.21	65,89	63,83	77,61	85,55	84.65	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik	Tercapai
Tujuan 10 - Berkurangnya Kesenjangan																
Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.																
10.1.1*	Koefisien Gini (Gini Ratio)	BPS	Nilai	0,409 (tahun 2017)	0,407	0,405	0,403	0,401	0.399	0,394	0,391	0,399	0,411	0.412	Biro Perekonomian	Perlu Perhatian Khusus
10.1.1.(a)#	Tingkat Kemiskinan	Bab 8 RPJMD	%	3,78 (tahun 2017)	3,58	3,38	3,18	2,98	2.78	3,55	3,42	4,69	4,67	4,61 (September)	Dinas Sosial	Akan Tercapai/ Membaik
Target 10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.																
10.2.1*	Proporsi populasi dengan median pendapatan di bawah 50 persen, terpilah oleh kelompok usia, jenis kelamin dan para penyandang difabilitas	Susenas	%	13,82 (tahun 2015)	12,42	11,16	10,03	9,02	8.11	NA	NA	NA	0,18	#REF!	Biro Perekonomian	Data Tidak Tersedia
Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.																

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
10.3.1.(a)#	Indeks Demokrasi	BPS	Nilai	70,85 (tahun 2017)	73,35	73,85	74,35	74,85	75.35	85,08	88,29	89,21	82,08 (Metode Baru)	82,08 (Metode Baru)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tercapai
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komnas HAM - Ditjen HAM - (Kemenkumham)	Berkas pengaduan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	126 Pengaduan (Lokus Kejadian DKI Jakarta)	52 Pengaduan (Lokus Kejadian DKI Jakarta)	70 Pengaduan (Lokus Kejadian DKI Jakarta. Data Komnas HAM: 46, Kanwil Kemenkumham: 24)	30 Pengaduan	Biro Hukum	Akan Tercapai/ Membaik
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Laporan Kasus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	859	529	510	357	687	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Perlu Perhatian Khusus
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komnas Perempuan	Kebijakan / dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	24 Aduan	Biro Hukum	Perlu Perhatian Khusus
Target 10.4. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.																
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah daerah	APBD	%	7,23 (tahun 2017)	7,7	NA	NA	NA	NA	8,84	9,15	9,92		#REF!	Dinas Sosial	Data Tidak Tersedia
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	%	1. Formal : 116 dari penduduk yang bekerja	100	100	100	100	100	NA	150,05	103,19	116,17	#REF!	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Data Tidak Tersedia
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan																
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.																
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	%	71,7 (tahun 2015) 99,49 (tahun 2017)	72,24	72,81	73,38	73,96	74.54	99,36	34,25	33,18	40	36.23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perlu Perhatian Khusus
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.																

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Dinas Perhubungan (realisasi capaian)	%	18 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	15	21,7	8,2	14,76	18.45	Dinas Perhubungan	Akan Tercapai/ Membaik
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar	Dinas Perhubungan (realisasi capaian)	Kota Besar	0 (tahun 2017)	0	3	3	3	3	3 (KRL, MRT, dan LRT)	3 (KRL, MRT, dan LRT)	3 (KRL, MRT, dan LRT)	3 (KRL, MRT, dan LRT)	3 (KRL, MRT, dan LRT)	Dinas Perhubungan	Tercapai
Target 11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.																
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Kementerian PPN/Bappenas	Institusi	44 (data institusi yang diundang dalam Forum Konsultasi Publik pada tahun 2017)	45	45	45	45	45	52 (data institusi yang diundang dalam Forum Konsultasi Publik pada tahun 2018)	52 (data institusi yang diundang dalam Forum Konsultasi Publik pada tahun 2019)	NA			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Tidak Tersedia
Target 11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.																
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Kota Pusaka	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kawasan Cagar Budaya di 4 lokasi (Kawasan Menteng, Kota Tua, Kebayoran Baru, Pulau Onrust)	Kawasan Cagar Budaya di 4 lokasi (Kawasan Menteng, Kota Tua, Kebayoran Baru, Pulau Onrust)	Kawasan Cagar Budaya di 4 lokasi (Kawasan Menteng, Kota Tua, Kebayoran Baru, Pulau Onrust)	Kawasan Cagar Budaya di 4 lokasi (Kawasan Menteng, Kota Tua, Kebayoran Baru, Pulau Onrust)	Kawasan Cagar Budaya di 4 lokasi (Kawasan Menteng, Kota Tua, Kebayoran Baru, Pulau Onrust)	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Akan Tercapai/ Membaik
Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.																
11.5.1*#	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	Bab 5 RPJMD	Nilai	4,97 (tahun 2017)	5,28	6,08	6,77	7,32	7.91	5,69	6,16	5,9	6,72	7.32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan Tercapai/ Membaik
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Realisasi Capaian)	Indeks Risiko	Jakpus 70,6; Jakut 89,7; Jakbar 88,2; Jaksel 64,8; Jaktim 93,2; dan Kepulauan Seribu 64,8 (2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Jakpus 58,6; Jakut 74,4; Jakbar 73,2; Jaksel 53,8; Jaktim 77,4; dan Kepulauan Seribu 64,8 (2018)	NA	Jakarta Keseluruhan 67,04; Jakarta Pusat 59; Jakarta Utara 74; Jakarta Barat 73; Jakarta Selatan 54; Jakarta Timur 77; dan Kepulauan Seribu 65 (2020)	60,43	62.58	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perlu Perhatian Khusus
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	Dokumen Strategi Ketahanan Jakarta	Kota/kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	6	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Peringatan Dini	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	24	24	24	23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perlu Perhatian Khusus
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Disgulkarmat	rupiah	475.218.955.000 (kerugian akibat bencana kebakaran tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	180,270,965,000	##########	###########	177,183,200,000	215,700,900,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perlu Perhatian Khusus
Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.																
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	DLH (realisasi capaian)	%	83 (tahun 2015)	83,03	83,06	83,09	83.12	83.15	87,6	100	75	75,15%	73.68%	Dinas Lingkungan Hidup	Perlu Perhatian Khusus
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Dinas Lingkungan Hidup (realisasi capaian)	Kota Hijau	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	6	6	Dinas Lingkungan Hidup	Tercapai
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.																
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,01	4,24	5,1	5,1	5.182	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Akan Tercapai/ Membaik
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Statistik Kriminal (BPS)	%	33,73 (tahun 2017)	37,16	45,47	55,65	68,09	80	35,93	Disagregasi data di tingkat nasional	Disagregasi data di tingkat nasional	49.65	54.08	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Akan Tercapai/ Membaik
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.																
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tercapai
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	2 (tahun 2015)	2	2	3	3	4	2 (terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019 dan Pergub No. 131 Tahun 2012	2 (terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019	2 (terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019 dan Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK)			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
										tentang RAD Penurunan Emisi GRK	dan Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK					
Tujuan 12 - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab																
Target 12.1. Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.																
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwins program	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kolaborasi tematik	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 (terdiri dari: Bangunan Ramah Lingkungan/Green Building dan Pengelolaan Limbah dan Sampah/Waste Management)	2 (terdiri dari: Bangunan Ramah Lingkungan/Green Building dan Pengelolaan Limbah dan Sampah/Waste Management)	2 (terdiri dari: Bangunan Ramah Lingkungan/Green Building dan Pengelolaan Limbah dan Sampah/Waste Management)	3 (terdiri dari: Bangunan Ramah Lingkungan/Green Building dan Pengelolaan Limbah dan Sampah/Waste Management)	4 (terdiri dari: Bangunan Ramah Lingkungan/Green Building dan Pengelolaan Limbah dan Sampah/Waste Management)	Dinas Lingkungan Hidup	Akan Tercapai/ Membaik
Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.																
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peserta Proper	75 (tahun 2015)	77	79	81	83	85	NA	NA	53	53 Biru + 6 Hijau + 1 Emas	- 68 perusahaan peringkat Biru - 6 perusahaan peringkat Hijau - 1 perusahaan peringkat Emas	Dinas Lingkungan Hidup	Akan Tercapai/ Membaik
12.4.2.(a)#	Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	Bab 8 RPJMD	%	- (tahun 2017)	10	-	-	-	-	18,35	NA	NA	NA		Dinas Lingkungan Hidup	Data Tidak Tersedia
Target 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.																
12.5.1.(a)#	Persentase penurunan volume sampah di kota	Bab 5 RPJMD	%	11 (tahun 2017)	14	17	20	23	26	12,40	17,06	22	24,44	26.11%	Dinas Lingkungan Hidup	Tercapai
Target 12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.																
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	perusahaan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup	Data Tidak Tersedia
Target 12.7. Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.																
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Produk ramah lingkungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup	Data Tidak Tersedia
Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.																

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Fasilitas Publik	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup	Data Tidak Tersedia
Tujuan 13 - Penanganan Perubahan Iklim																
Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.																
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	2 (tahun 2015)	2	2	3	3	4	2 (terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019 dan Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK)	2 (terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019 dan Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK)	2 (terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019 dan Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK)	2 terdiri dari: Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	2 terdiri dari: Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perlu Perhatian Khusus
13.1.2*#	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	Bab 5 RPJMD	Nilai	4,97 (tahun 2017)	5,28	6,08	6,77	7,32	7.91	5,69	6,16	5,9	6,72	7.32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Akan Tercapai/ Membaik
Target 13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.																
13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia	Dinas Lingkungan Hidup (realisasi capaian)	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 (Laporan Akhir Pelaporan Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Dearah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018)	1 (Laporan Akhir Pelaporan Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Dearah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019)	(dokumen Laporan Akhir Pelaporan Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Dearah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 tengah disusun)	1 Laporan		Dinas Lingkungan Hidup	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dinas Lingkungan Hidup (realisasi capaian)	dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 (Laporan Akhir Pelaporan Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018)	1 (Laporan Akhir Pelaporan Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Dearah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019)	(dokumen Laporan Akhir Pelaporan Evaluasi dan Pemantauan Rencana Aksi Dearah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 tengah disusun)	1 Laporan		Dinas Lingkungan Hidup	Tercapai
Tujuan 14 - Ekosistem Lautan																
Target 14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.																
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	jdih.jakarta.go.id	Dokumen (PP)	1 (tahun 2015)	1	1	1	1	1	3 (terdiri dari: Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah; Kepgub Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi Dan Pemanfaatan Ruang Di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta)	3 (terdiri dari: Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah; Kepgub Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi Dan Pemanfaatan Ruang Di Perairan Laut	3 (terdiri dari: Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah; Kepgub Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi Dan Pemanfaatan Ruang Di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta)			Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
											Pantai Utara Jakarta)					
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	WPP	1 (tahun 2015)	1	1	1	1	1	NA	1	1			Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Tercapai
Target 14.4. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.																
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	%	ikan pelagis kecil E = 0,38, ikan demersal E = 0,83, kepiting E= 0.70, Cumi cumi E=2.02 (tahun 2017)	1	0,5≤ E ≤ 1	0,5≤ E ≤ 1	0,5≤ E ≤ 1	0,5≤ E ≤ 2	NA	NA	NA			Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Data Tidak Tersedia
Target 14.5. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.																
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Ha	140,9 (tahun 2017)	141,6	142,3	143	143,7	144.4	160,25	170,46	180,86	196.2	213.82	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Tercapai
Target 14.6. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.																
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	79,45	70,77	70.93	95.68	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Akan Tercapai/ Membaik
Target 14.b. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.																
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Regulasi/ kebijakan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1. Perda No. 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan 2. Pergub No. 159 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1. Perda No. 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan 2. Pergub No. 159 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1. Perda No. 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan 2. Pergub No. 159 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Tercapai
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Kementerian Kelautan dan	Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 (terdiri dari Kabupaten Kep.	2 (terdiri dari Kabupaten Kep. Seribu	2 (terdiri dari Kabupaten Kep. Seribu dan Kota Jakarta Utara)			Dinas Ketahanan Pangan,	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
		Perikanan (KKP)								Seribu dan Kota Jakarta Utara)	dan Kota Jakarta Utara)				Kelautan dan Pertanian	
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindung.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (realisasi capaian)	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3123	3258	3258	3258	4426	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Akan Tercapai/ Membaik
Target 14.c. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want".																
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	jdih.jakarta.go.id	Dokumen (PP)	1	1	1	1	1	1	3 (terdiri dari: Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah; Kepgub Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi Dan Pemanfaatan Ruang Di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta)	3 (terdiri dari: Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah; Kepgub Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi Dan Pemanfaatan Ruang Di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta)	3 (terdiri dari: Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah; Kepgub Nomor 601 Tahun 2019 tentang Lokasi Daerah Perlindungan Laut sebagai Kawasan Konservasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Reklamasi Dan Pemanfaatan Ruang Di Perairan Laut Pantai Utara Jakarta)				Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Tercapai
Tujuan 15 - Ekosistem Daratan																
Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.																

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	+/- 80 (Mangrove)	2,48	3,93	4,19	5.1	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Akan Tercapai/ Membaik
Target 15.2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.																
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Hektar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	360,36	NA	NA	NA		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Data Tidak Tersedia
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Ha	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Data Tidak Tersedia
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	KPA	1 (data tahun 2016)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Data Tidak Tersedia
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	KPHK; KPHL; KPHP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Berdasarkan Keputusan dari Kementerian, DKI tidak memiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan	Berdasarkan Keputusan dari Kementerian, DKI tidak memiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan	Berdasarkan Keputusan dari Kementerian, DKI tidak memiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan	Berdasarkan Keputusan dari Kementerian, DKI tidak memiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Data Tidak Tersedia
Target 15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.																
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian)	Ha	NA	NA	NA	NA	NA	NA	171,88 (Luas lahan hutan kota yang sudah dihijaukan)	NA	NA	NA		Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Data Tidak Tersedia
Target 15.5. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.																
15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		-	Data Tidak Tersedia
Target 15.7. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.																
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Belum ada pidana			Dinas Lingkungan Hidup	Data Tidak Tersedia

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
15.7.1.(b)#	1. Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian)	Fauna	2.132 (tahun 2017)	2142	2152	2162	2172	2182	Taman Margasatwa Ragunan (2.171 ekor)	Taman Margasatwa Ragunan (2.286 ekor)	Taman Margasatwa Ragunan (2.296 ekor)	2.298	2275	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Tercapai
	2. Penambahan jumlah flora yang dikonservasi	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian)	Flora	52.733 (tahun 2017)	52753	52773	52793	52813	52833	total flora 52.795 tanaman	total flora 64.814 tanaman	total flora 64.994 tanaman	64.893	64884	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	
Target 15.8. Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasive prioritas																
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Dokumen Karantina Hewan; Dokumen Karantina Tumbuhan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Data Tidak Tersedia
Target 15.9. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.																
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 (Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta)	1 (Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta)	1 (Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta)	dokumen dibuat pada tahun 2018 dan pada tahun ini tidak ada kegiatan terkait keanekaragaman hayati		Dinas Lingkungan Hidup	Tercapai
Target 15.c. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.																
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Belum ada pidana			Dinas Lingkungan Hidup	Data Tidak Tersedia
Tujuan 16 - Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh																
Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.																
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Statistik Kriminal (BPS)	Kasus	76 (mencakup seluruh wilayah kerja Polda Metro Jaya yang	65	58	51	44	36	75	36	32	77	Belum rilis	Satuan Polisi Pamong Praja	Perlu Perhatian Khusus

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
				meliputi Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta dan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan/ KP3)												
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Data Rekapitulasi Aksi Anarkis Tawuran Antar Warga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kematian per 100.000 penduduk	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,11	0,11	0,07	0,08	0.02	Bakesbangpol Satuan Polisi Pamong Praja	Akan Tercapai/ Membaik
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Statistik Kriminal (BPS)	%	1,38 (tahun 2016)	1,28	1,18	1,08	0,98	0.88	0,12	0,11	0,07	0.05	Belum rilis	Satuan Polisi Pamong Praja	Tercapai
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Statistik Kriminal (BPS)	%	50,57 (2017)	50,57	51,0	51,50	52,0	51.5	Data Susenas BPS per tiga tahun	Data Susenas BPS per tiga tahun	41,17	Data Susenas BPS per tiga tahun	Data Susenas BPS per tiga tahun	Satuan Polisi Pamong Praja	Perlu Perhatian Khusus
Target 16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.																
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Data Tidak Tersedia

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Laporan Kasus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	910	650	787	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Data Tidak Tersedia
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Laporan Kasus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	472	312	0,00002	0.000043	0.00021	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Akan Tercapai/ Membaik
Target 16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.																
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	BPS (Statistik Kriminal)	%	33,73 (tahun 2017)	37,16	45,47	55,65	68,09	80	35,93	14,76	73,26	49.65	54.08	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Akan Tercapai/ Membaik
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.218 orang (Litigasi: 975 orang dan Non Litigasi: 243 orang)	1.079 orang (Litigasi: 970 orang Non litigasi: 109 orang)	749 orang (litigasi: 702 orang dan non litigasi: 47 orang)	655 orang (litigasi: 502 orang dan non litigasi: 153 orang)	Biro Hukum	Perlu Perhatian Khusus
Target 16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.																
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Statistik Kriminal (BPS)	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Disagregasi data hanya sampai tingkat nasional	Disagregasi data hanya sampai tingkat nasional	Disagregasi data hanya sampai tingkat nasional	Disagregasi data hanya sampai tingkat nasional	Disagregasi data hanya sampai tingkat nasional	Inspektorat	Data Tidak Tersedia
Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.																
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Kementerian Keuangan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	82,77	83,88 (unaudited)	75,11% (per 10 Desember 2020, data sebelum APBD-P)			Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Data Tidak Tersedia
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Badan Pemeriksa Keuangan	Predikat	WTP (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum rilis	-	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Predikat	B (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	BB	BB	BB	A	Belum rilis	-	Akan Tercapai/ Membaik
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Data di bawah koordinasi BPPBJ)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	89	95%	47,4% (refocusing anggaran COVID-19)	67,90 (refocusing anggaran COVID-19)	97.29%	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah	Akan Tercapai/ Membaik
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70,92	74,57	76,54	78,88	78.98	-	Akan Tercapai/ Membaik
16.6.2.(a)#	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik	Bab 5 RPJMD	Nilai	0	80,00	83,00	86,00	88,0	88.5	83,76	84,41	86,34			Biro ORB	Data Tidak Tersedia
Target 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.																
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	KPU	%	19,81	19,81	Tidak ada target tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada target tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada target tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada target tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada target tahunan, mengikuti siklus 5 tahun pemilu	21,7	Tidak ada pengukuran tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada pengukuran tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada pengukuran tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Tercapai
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	BKN; Sakernas BPS	%	17	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	14,86	18,6	26	20	26.19	Badan Kepegawaian Daerah/ Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Tercapai
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	BPS dan Kemenko Polhukam	Nilai	87,12 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	87,82	91,89	90,86	NA	NA	-	Belum dapat diukur
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS dan Kemenko Polhukam	Nilai	87,73 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	95,09	91,01	93,27	NA	NA	-	Belum dapat diukur

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS dan Kemenko Polhukam	Nilai	80,86 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	75,43	83,86	84,95	NA	NA	-	Belum dapat diukur
Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.																
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (realisasi capaian)	%	94,78 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	96,78	98,23	98,92 (data per 14 Desember 2020)	99,59	100	-	Akan Tercapai/ Membaik
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Basis Data Terpadu (Kementerian Sosial)	%	96,36 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	95,85	NA	NA	NA	NA	-	Data Tidak Tersedia
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	81,95	90,09	95,15 (data per 14 Desember 2020)	98,72	100	-	Akan Tercapai/ Membaik
Target 16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.																
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komnas HAM; Ditjen HAM (Kemenkum HAM)	Berkas Pengaduan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	126 Pengaduan (Lokus Kejadian DKI Jakarta)	52 Pengaduan (Lokus Kejadian DKI Jakarta)	70 Pengaduan (Data Komnas HAM: 46, Kanwil Kemenkumham: 24)	30 Pengaduan	Biro Hukum	Perlu Perhatian Khusus
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Laporan Kasus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	859	529	510	518	687	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Akan Tercapai/ Membaik
16.10.2*	Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	World Bank, UNESCO, UNDP, Akademisi dan Lembaga Penelitian, Komisi Informasi Pusat	Peraturan	2 (terdiri dar: Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik dan	NA	NA	NA	NA	NA	2 (terdiri dari: Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur	2 (terdiri dari: Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur	2 (terdiri dari: Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan)	2 (terdiri dari: Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur	2 (terdiri dari: Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik	Akan Tercapai/ Membaik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
				Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan)						Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan)	Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan)		Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan)	Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan)		
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	1	1	1	1	1	1	1,47	1,55	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik	Tercapai
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70	61,5 (total dari 26 sengketa - 6 kasus register 2019, 20 kasus register 2020)	total 27 sengketa - 20 kasus register 2020 dan 7 kasus register 2021	16 kasus yang register pada 2022	-	Akan Tercapai/ Membaik
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Komisi Informasi Pusat (KIP)	PPID	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik	Data Tidak Tersedia
Target 16.b. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.																
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komnas Perempuan	Kebijakan/dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	24 Aduan	Biro Hukum	Belum dapat diukur
Tujuan 17 - Kemitraan untuk Mencapai Tujuan																
Target 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.																
17.1.1*#	1. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	BPKD (realisasi capaian)	Triliun Rupiah	35,36 (tahun 2017)	38,13	39,97	43,35	47,2	51.25	38,13	40,29 (unaudited)	29,02	34,51	40.28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
	2. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	BPKD (realisasi capaian)	Miliar Rupiah	680,15 (tahun 2017)	689,9	704,76	715,453	733,77	749.83	671,49	587,91 (unaudited)	468,14	383,43	376.98	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	2.1 Jumlah Pendapatan Daerah	BPKD (realisasi capaian)	Triliun Rupiah	62,52 (tahun 2017)	67,67	79,99	87,45	97,06	101.47	65,81	62,3 (unaudited)	51,71	65,60	67.29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	2.2 Jumlah Belanja Daerah	BPKD (realisasi capaian)	Triliun Rupiah	61,82 (tahun 2017)	78,48	82,30	90,80537	98,40	108.86	75,09	65,05 (unaudited)	44,51	61,35	64.84	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	3. Total pendapatan Daerah sebagai proporsi terhadap Belanja Daerah	BPKD (realisasi capaian)	%	125,64 (tahun 2017)	86,24	97,20	96,31	98,64	93.20	87,64	95,78 (unaudited)	116,16	106,93	103.78	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapai
17.1.1.(a)#	Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB	Badan Pendapatan Daerah	%	1,49 (tahun 2017)	1,55	1,69	1,73	1,78	1.85	1,47	1,43	1,05	1,19	1.26	Badan Pendapatan Daerah	Akan Tercapai/ Membaik
17.1.2*#	Proporsi APBD yang didanai oleh pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	%	57,20 (tahun 2017)	47,10	51,38	52,72	52,79	53.520	50,77	57,21	153,38	44,52		Badan Pendapatan Daerah	Data Tidak Tersedia
Target 17.4. Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.																
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa	LKJP dan APBD	%	0,167	NA	NA	NA	NA	NA	0,0048	0,0068 (unaudited)	NA	0,12	#REF!	Biro Perekonomian	Data Tidak Tersedia
Target 17.8. Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.																
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet	BPS Susenas KOR	%	42,7 (tahun 2015)	47,65	53,23	59,47	66,43	74.21	65,90	NA	77,61	85,55	84.65	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik	Tercapai
Target 17.11. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.																
17.11.1.(a)#	Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	Bab 8 RPJMD	USD	4.043.918.198 (tahun 2017)	4.084.357.380	4.125.200.954	4.166.452.963	4.208.117.493	############	8.103.915.445	5.963.633.981	8.775.826.509	38.966.277.236	7,335,159,641,53	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tercapai
Target 17.17. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.																
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	- Kemenko Bidang Perekonomian; Kemenkeu; BAPPENAS; Kementerian PU & PR; Kemenhub;	Dokumen berisi daftar proyek KPBU	NA	NA	4	4	4	4	NA	4	4	4	#REF!	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tercapai

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
		Kementerian ESDM; Kementerian Kominfotik; BKPM; Pemerintah Daerah - RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu														
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Alokasi (Rp)	NA	NA	6.178.773.560	2.000.000.000	2.000.000.000	############	NA	906.154.000	498,000,000	638.000.000	#REF!	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Tidak Tersedia
Target 17.18. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.																
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Badan Pusat Statistik	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50,47 (sebanyak 161 indikator yang tercantum di RAD SDGs dan relevan dengan indikator nasional)	50,47 (sebanyak 161 indikator yang tercantum di RAD SDGs dan relevan dengan indikator nasional)	50,47 (sebanyak 161 indikator yang tercantum di RAD SDGs dan relevan dengan indikator nasional)	50,47 (sebanyak 161 indikator yang tercantum di RAD SDGs dan relevan dengan indikator nasional)		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Tidak Tersedia
Target 17.19. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.																
17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/ Lembaga	Badan Kepegawaian Daerah	Pegawai	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17 Statistisi sebanyak 0 (nol) orang dan Pranata Komputer 17 orang yang terdistribusi ke Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 2 orang dan Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 15 orang	17 Statistisi sebanyak 0 (nol) orang dan Pranata Komputer 17 orang yang terdistribusi ke Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 2 orang dan Dinas Komunikasi, Informatika &	18 Statisti sebanyak 0 (Nol), Pranata Komputer 18 orang (yang terdistribusi ke BKD 2 dan Diskominfo 16)	44 Statistisi sebanyak 1 (satu) orang pada Badan Pembinaan Usaha Milik Daerah (BPBUMD), Pranata Komputer sebanyak 43 orang yang terdistribusi ke : a. Badan Kepegawaian	49 Pranata Komputer sebanyak 49 orang yang terdistribusi ke : a. Badan Kepegawaian Daerah 2 orang b. Badan Pendapatan Daerah 1 orang c. Dinas Kebudayaan 1 orang d. Dinas	Badan Kepegawaian Daerah	Akan Tercapai/ Membaik

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
											Statistik 15 orang		Daerah 2 orang b. Badan Pendapatan Daerah 2 orang c. Dinas Kebudayaan 1 orang d. Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 35 orang e. Dinas Pariwisata 1 orang f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 orang	Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 orang e. Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 34 orang f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 orang g. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 1 orang h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 5 orang		
17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/ Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan/atau Pranata Komputer	Badan Kepegawaian Daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50 (Statistisi sebanyak 0 (nol) orang dan Pranata Komputer 17 orang yang terdistribusi ke Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 2 orang (target 5 orang) dan Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 15 orang (target 69 orang))	50 (Statistisi sebanyak 0 (nol) orang dan Pranata Komputer 17 orang yang terdistribusi ke Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 2 orang (target 5 orang) dan Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 15 orang (target 69 orang))	50 (Statistisi sebanyak 0 (nol) orang dan Pranata Komputer 17 orang yang terdistribusi ke Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 2 orang (target 5 orang) dan Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik 15 orang (target 69 orang))	100 (Statistisi sebanyak 1 (satu) orang dan Pranata Komputer 43 orang yang terdistribusi ke Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pembinaan Usaha Milik Daerah, Badan Pendapatan Daerah , Dinas Kebudayaan , Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik , Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan	50 Statistisi sebanyak 0 (Nol) orang dan Pranata Komputer 49 orang yang terdistribusi ke Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas	Badan Kepegawaian Daerah	Perlu Perhatian Khusus

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Realisasi Pencapaian					OPD Kunci	Status (berdasarkan Indikator 2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
													dan Kearsipan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/ Lembaga	Badan Kepegawaian Daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28,57 (meliputi 2 SKPD yakni Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik dan Badan Kepegawaian Daerah, untuk formasi sebanyak 7 SKPD sesuai dengan Pergub No. 9 Tahun 2015)	28,57 (meliputi 2 SKPD yakni Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik dan Badan Kepegawaian Daerah, untuk formasi sebanyak 7 SKPD sesuai dengan Pergub No. 9 Tahun 2015)	28,57 (meliputi 2 SKPD yakni Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik dan Badan Kepegawaian Daerah, untuk formasi sebanyak 7 SKPD sesuai dengan Pergub No. 9 Tahun 2015)	70	33.33	Badan Kepegawaian Daerah	Perlu Perhatian Khusus
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Kementerian Dalam Negeri	Data Registrasi	1 (tahun 2015)	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Tidak Tersedia
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data	%	10,8 (tahun 2017)	1. Perencanaan (22,73)	48	48	48	48	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Tidak Tersedia

Lampiran 9. Berita Acara Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD

GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BERITA ACARA

PENJAMINAN KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025–2030

NOMOR 11 TAHUN 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (16-11-2023), melalui aplikasi *zoom meeting* telah dilakukan Penjaminan Kualitas secara mandiri yang dilakukan oleh Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 215 Tahun 2023 tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2030, bersama dengan penyusun Kebijakan, Rencana, Program (KRP).

Dalam menyusun kebijakan, rencana, dan/atau program berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perencanaan yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melakukan penjaminan kualitas KLHS, Gubernur dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Penjaminan kualitas secara mandiri ini dilakukan sesuai dengan Lampiran VIII Tata Cara Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan rincian penilaian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara kegiatan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2030.

Jakarta, 28 Desember 2023

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

FORM PENJAMINAN KUALITAS
KLHS RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA 2025-2030
TAHUN 2023

Penilaian: Desain Proses KLHS		
Kriteria	**Penilaian**	**Keterangan**
Apakah KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan proses perencanaan KRP? - Bila "Ya" lanjutkan ke c - Bila "Tidak" lanjutkan ke a, lalu b dan c	Tidak	KLHS ini disusun sebagai salah satu pemenuhan persyaratan penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2030 KLHS ini dilakukan secara *Ex-Ante*, terpisah dengan proses penyusunan KRP. Penyusunan RPJMD akan dimulai tahun 2024
a. Apakah ada mekanisme komunikasi antara tim perencana dengan kelompok kerja KLHS? b. Apakah rekomendasi yang diusulkan KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP?	Ya	a. Semenjak awal kegiatan penyusunan KLHS, perangkat daerah penyusun KRP yaitu Bappeda turut mendampingi proses KLHS. Penyusun KRP berperan serta secara intensif sejak perumusan isu strategis hingga perumusan alternatif dan rekomendasi secara iteratif dalam berbagai FGD/Konsultasi Publik (KP) dan pertemuan terbatas yang telah didokumentasikan pada lampiran 3 s/d 6 b. Telah dilakukan sebanyak 10 FGD dan 2 kali KP yang dapat menjadi indikasi proses komunikasi dan pertukaran data informasi telah terjalin dengan sangat baik antar penyusun KRP maupun POKJA KLHS dengan didampingi oleh Tenaga Ahli. Komunikasi yang terjadi secara iteratif sejak awal diharapkan berkontribusi terhadap terintegrasikannya hasil KLHS ke dalam rancangan KRP.
c. Apakah disampaikan secara jelas siapa penyusun KLHS? (SDM internal institusi pembuat KRP, SDM institusi yang ditunjuk sebagai penyusun KLHS, tenaga ahli eksternal, perusahaan konsultan, Pokja yang dibentuk oleh SK, pegawai pemerintah atau lainnya)	Ya	c. POKJA KLHS ditetapkan sebagaimana SK Gubernur DKI Jakarta No. 215 Tahun 2023 tentang Tim Pembuat KLHS RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2030, dan di dalamnya terdapat perwakilan dari penyusun KRP. Pokja KLHS juga didampingi oleh Tenaga Ahli dari Universitas Indonesia melalui kegiatan Swakelola Tipe 2. Kompetensi tenaga ahli pendamping ada dalam Lampiran 7
Ringkasan Kesimpulan: Penyusunan KLHS RPJMD DKI Jakarta 2025-2030 dilakukan terpisah dengan proses penyusunan KRP dan disusun oleh POKJA KLHS yang ditetapkan melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. 215 Tahun 2023 tentang Tim Pembuat KLHS RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2030. Pokja KLHS diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kewenangan tertinggi di pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan para Perangkat Daerah (PD), sehingga mempermudah koordinasi antar PD dalam mengambil keputusan strategis dan didampingi oleh Wakil Ketua dari DLH selaku penanggung jawab penyusunan KLHS dan dari Bappeda selaku penanggung jawab penyusunan RPJMD. Pokja KLHS juga didampingi oleh tim Tenaga Ahli KLHS.		

2

Penilaian: Laporan KLHS			
Kriteria		**Penilaian**	**Keterangan**
Apakah Laporan KLHS telah memuat :		X	Belum lengkap
		√	Lengkap
		TS	Terpenuhi sebagian
		TR	Tidak bisa dilakukan penilaian (dijelaskan dalam Keterangan)
1.	Dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS	√	Terdapat pada sub bab 1.1. latar belakang dan 1.2. dasar hukum penyusunan KLHS
2.	Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan	√	Penyelenggaraan KLHS RPJMD DKI 2025-2030 telah mengacu pada PP 46 tahun 2016, PermenLHK No.69 Tahun 2017, dan Permendagri No. 7 Tahun 2018. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dilakukan secara Ex-Ante terhadap rancangan KRP (RPJMD DKI). Pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan belum dapat dilakukan secara langsung karena draft materi muatan KRP belum tersedia. Oleh karenanya, KLHS ini menggunakan pendekatan strategis. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengkaji dan memberikan usulan arahan kebijakan berdasarkan kajian yang komprehensif dan holistik terhadap isu strategis yang dihadapi. Dalam konteks KLHS ini, perumusan isu strategis di awali dengan pengumpulan data dan informasi terkait untuk menemukenal isu-isu dari (1) Gambaran Umum TPB; (2) Kondisi Lingkungan Hidup dan (3) Isu atau fokus dalam rencana strategis terkait. Sintesa isu strategis menjadi dasar dalam pengkajian pengaruh. Pengkajian pengaruh dilakukan dengan mengembangkan kerangka kajian yang terdiri dari kriteria dan indikator dari masing-masing isu strategis. Metodologi yang digunakan telah dijelaskan tiap tahapannya secara rinci pada sub bab 1.5. Metodologi Penyusunan, hasil pengkajian pengaruh dapat dilihat pada Bab 4. Analisis Isu Pembangunan Berkelanjutan. Dan Sub Bab 4.4. Kerangka Kajian Isu PB dan Kajian Pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan Hidup.
3.	Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP	√	Metode, teknik dan rangkaian langkah-langkah perumusan alternatif didasarkan pada analisis proyeksi dan skenario pada kerangka kajian. Skenario moderate dan akselerasi disusun sebagai opsi pencapaian target indikator pada masing-masing isu strategis di akhir tahun perencanaan (2030). Proyeksi Skenario diambil dari tahap 1 (5 tahun pertama) dari hasil analisis dalam KLHS RPJPD. Dimana target yang digunakan pada analisis proyeksi dan skenario sebagian diambil dari Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 untuk indikator yang relevan. Sementara, target lainnya ditelaah dari berbagai dokumen KRP yang ada baik di tingkat Nasional maupun Provinsi. Detil tahapan serta hasil perumusan alternatif KRP dapat dilihat pada Bab 6. Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan, Sub Bab 6.2. Rekomendasi.

4.	Pertimbangan, muatan dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan	√	Rekomendasi perbaikan KRP dirumuskan berdasarkan Isu PB Paling Strategis, analisis pengkajian menggunakan kerangka kajian, perumusan proyeksi dan skenario, perumusan alternatif kebijakan dan program serta melalui serangkaian diskusi antara POKJA KLHS dan penyusun KRP walaupun rancangan KRP belum tersedia. Berpijak dari rumusan alternatif dan Rekomendasi KLHS RPJPD untuk 5 tahun pertama, maka disusunlah rekomendasi KLHS RPJMD yang terdiri atas: **a.** Rekomendasi Arahan Kebijakan, dapat diintegrasikan dalam penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD **b.** Rekomendasi Arahan Program (sesuai Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 900/2023), dapat diintegrasikan dalam penentuan Program Prioritas Pembangunan RPJMD. Proses perumusan dan hasil rekomendasi KLHS RPJMD dijelaskan pada Bab 6 Alternatif dan Rekomendasi, Sub Bab 6.2 Rekomendasi
5.	Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP	√	Hingga akhir penyusunan KLHS, rancangan KRP belum tersedia (sifat pelaksanaan KLHS *Ex-Ante*), namun Pokja KLHS sudah berkomunikasi erat dengan Tim penyusun KRP untuk membahas rekomendasi KLHS dan gambaran mengenai integrasinya nanti dalam KRP. Gambaran usulan pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP dijelaskan pada Sub Bab 6.3. Usulan Integrasi, adalah sebagai berikut: 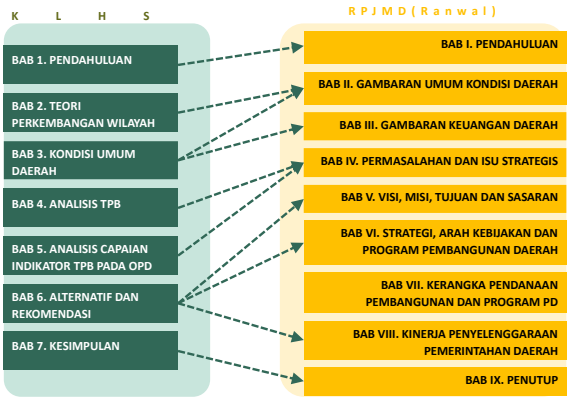
6.	Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS	√	Pada beberapa tahapan proses KLHS telah dilakukan Konsultasi Publik 1 untuk menetapkan isu strategis KLHS pada 6 Juli 2023 dan Konsultasi Publik 2 untuk merumuskan alternatif dan rekomendasi KLHS pada 9 November 2023 yang terdokumentasikan pada Lampiran 4, 5, dan 6 Hasil KLHS akan dipublikasikan melalui website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7.	Hasil penjaminan kualitas KLHS	√	Hasil penjaminan kualitas ditunjukan melalui Berita Acara sebagaimana terdapat pada Lampiran 9
8.	Ringkasan eksekutif yang menuangkan rekomendasi-rekomendasi KLHS untuk pengambil keputusan secara jelas.	√	Ringkasan eksekutif telah menjadi bagian dari laporan KLHS

4

Penilaian: Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis			
Kriteria		**Penilaian**	**Keterangan**
Nilai: • Sudah • Belum • Ada catatan (jelaskan dalam keterangan)			
Apakah identifikasi dan perumusan isu-isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis yang merupakan akar masalah melibatkan pemangku kepentingan?		Sudah	Perumusan isu PB paling strategis diawali dengan identifikasi sejumlah daftar panjang isu berdasarkan (1) Gambaran Umum TPB; (2) Kondisi Lingkungan Hidup; dan (3) Isu atau fokus dalam dokumen kebijakan dan perencanaan strategis terkait. Sintesa isu strategis dilakukan dengan menganalisis hubungan sebab-akibat dari setiap isu dengan menggunakan *mind mapping* sehingga mengerucut pada 6 (enam) isu strategis. Hasil sintesa isu kemudian dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) penjaringan isu pada 27 Juni 2023 dan Konsultasi Publik 1 untuk menetapkan isu strategis KLHS pada 6 Juli 2023 bersama-sama dengan POKJA KLHS dan para pemangku kepentingan, dimana disepakati Isu PB Paling Strategis yaitu: 1. Tingginya Risiko Bencana 2. Ancaman terhadap Keberlanjutan SDA 3. Kualitas Lingkungan Hidup masih Rendah 4. Ketimpangan Sosial Ekonomi 5. Belum Optimalnya Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*) 6. Belum Optimalnya Pemanfataan IPTEK menuju Kota Berkelanjutan Sehingga penentuan keenam isu strategis tersebut sebagai akar masalah telah sesuai dengan kaidah ilmiah dan konsensus antar pemangku kepentingan. Berita Acara Konsultasi Publik Isu Strategis terdapat pada Lampiran 5. Perumusan isu PB paling strategis dijelaskan pada Sub Bab 4.3. Identifikasi dan Perumusan Isu PB dengan Pendekatan Partisipatif
Apakah hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:		Sudah	
1.	Karakteristik wilayah		Identifikasi awal daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan didapatkan dari deskripsi karakteristik wilayah (sub bab 3.1.3) dan Hasil Analisis Capaian TPB serta kondisi lingkungan hidup (sub bab 4.2)
2.	Tingkat pentingnya potensi dampak		
3.	Keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan		Isu PB Paling strategis dirumuskan berdasarkan keterkaitan antar isu menggunakan *mind-map* sebagaimana dijelaskan pada sub bab 4.3. Perumusan Isu PB strategis
4.	Keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program		Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan juga ditelaah dari dokumen perencanaan strategis, yaitu 1. Rancangan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, 2. Tata Ruang Jabodetabekjur (Perpres No. 60 Tahun 2020,
5.	Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH; dan/atau		

6.	Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.		3. Naskah Akademik RUU Daerah Khusus Jakarta, 4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi DKI Jakarta 2022-2052, 5. Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2022-2042, 6. Laporan KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta 2022-2042, dan 7. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. 8. Laporan KLHS RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045
Apakah rumusan isu prioritas sudah memperhatikan aspek-aspek berikut:		Sudah	Perumusan isu PB paling strategis telah mempertimbangkan 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) aspek tersebut yang dapat dilihat di Bab 3 Gambaran Umum Wilayah dan Bab 4 Analisis Isu Pembangunan Berkelanjutan. Aspek ke-10 tidak terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.		
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup		
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem.		
4.	Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam.		
5.	Status mutu dan ketersediaan SDA.		
6.	Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.		
7.	Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.		
8.	Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat.		
9.	Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau		
10	Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.		
Apakah lingkup geografis diidentifikasi dengan jelas?		Sudah	Lingkup geografis diidentifikasi dengan jelas, tidak hanya sebatas wilayah administrasi provinsi DKI Jakarta saja tetapi juga melalui batas wilayah fungsional seperti dalam pembahasan mengenai sumber daya air, hutan dan ekoregion yang mencakup hulu hilir dan dijelaskan pada Sub Bab 3.1.1. Wilayah Perencanaan dan Wilayah Fungsional dan Sub Bab 3.1.2. Karakteristik Wilayah
Jika Ya, apakah melingkupi wilayah di luar cakupan KRP?		Sudah	Wilayah fungsional meliputi pula wilayah hulu dan hilir yang mencakup wilayah administrasi Jabodetabekpunjur sebagaimana dapat dilihat pada Sub Bab 3.1.1. Wilayah Perencanaan dan Wilayah Fungsional dan Sub Bab 3.1.2. Karakteristik Wilayah

6

Apakah lingkup pihak terkena dampak/berisiko dan berkepentingan disampaikan dengan jelas?	Sudah	Pada penjelasan Isu PB Paling strategis, telah dijelaskan cakupan wilayah dan/atau pihak terdampak sebagaimana dapat dilihat pada Sub Bab 4.4 Kerangka Kajian Isu PB Strategis dan Kajian Pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan Hidup. Masyarakat rentan terhadap bencana dijelaskan pada sub bab 4.4.1, ketimpangan sosial–ekonomi menyasar pada masyarakat Kepulauan Seribu yang dijelaskan pada sub bab 4.4.3, serta kolaborasi dan inovasi pengembangan IPTEK untuk keberlanjutan SDA, peningkatan kualitas lingkungan dan penurunan risiko bencana dijelaskan pada sub bab 4.4.6.
Keterangan Tambahan: Identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui serangkaian analisis isu pembangunan berkelanjutan dari capaian TPB, analisis berdasarkan kondisi lingkungan hidup, dan analisis terhadap dokumen perencanaan strategis. Hasil analisis tersebut kemudian dianalisis kembali dengan analisis konten untuk mendapatkan isu PB paling strategis. Isu PB paling strategis kemudian diuji dengan pelibatan pemangku kepentingan dalam FGD dan Konsultasi Publik 1.		

Penilaian: Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas		
Kriteria	**Penilaian**	**Keterangan**
Apakah kondisi terkini dan pemetaan masalah dari isu prioritas dideskripsikan dengan jelas?	Ya	Kondisi terkini dari setiap isu PB strategis dideskripsikan dengan baseline dan trend pada Sub Bab 4.4. Kerangka Kajian Isu PB Strategis dan Kajian Pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Pemetaan masalah dari setiap isu PB strategis dilakukan dengan *mind mapping* yang dapat dilihat pada Bab 4.4. Kerangka Kajian Isu PB Strategis dan Kajian Pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan Hidup
Apakah tersedia informasi yang menjelaskan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkini dan/atau kecenderungannya?	Ya	Informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan penyedia air yang digunakan sesuai dengan SK MenLHK No 146/2023. Status daya dukung dan daya tampung lingkungan dijelaskan pada Sub Bab 3.2.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
Apakah telah dilakukan analisis semua dampak KRP terhadap isu prioritas?	Tidak	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dilakukan secara *Ex-Ante* terhadap rancangan KRP (RPJMD DKI). Pada saat disusunnya KLHS RPJMD DKI Jakarta, proses penyusunan KRP masih dalam tahap persiapan sehingga belum ada dokumen KRP dan tidak dapat dilakukan analisis dampak KRP-nya.
Apakah hasil analisis diatas dideskripsikan dengan jelas?		
Apakah hasil analisis diatas dijelaskan secara spasial?		
Jika “Ya”, apakah dibedakan tingkat kerinciannya? Contoh: isu skala nasional, skala pulau, atau skala lokasi		

7

Penilaian: Pengkajian			
Kriteria		**Penilaian**	**Keterangan**
Hasil analisis memuat kajian:			
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan.	Ya	Analisis daya dukung dan daya tampung dijelaskan pada Sub Bab 3.2.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	Ya	Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup dapat dilihat pada Sub Bab 3.2. Kondisi Lingkungan Hidup
3.	Kinerja layanan atau jasa ekosistem.	Ya	Kinerja Jasa Lingkungan hidup dijelaskan pada sub bab 3.2.1.
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.	Ya	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi bagian dari penjelasan isu PB prioritas dan strategis ancaman terhadap keberlanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup yang ada pada Sub Bab 4.4.2 Ancaman terhadap Keberlanjutan SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.	Ya	Kerentanan perubahan iklim menjadi salah satu bagian pembahasan dalam isu PB prioritas dan strategis tingginya risiko bencana pada Sub Bab 4.4.1 Tingginya Risiko Bencana
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Ya	Potensi keanekaragaman hayati dijelaskan pada Sub Bab 3.2.3 dan area bernilai konservasi tinggi pada Sub Bab 3.2.4
Apakah pengkajian yang bersifat kuantitatif dilengkapi dengan perhitungan yang akuntabel?		Ya	Pengkajian yang bersifat kuantitatif didasarkan pada data/informasi dan hasil kajian resmi yang sudah ada seperti analisis spasial daya dukung dan daya tampung lingkungan, kinerja jasa lingkungan, zona konservasi air tanah, dsb. Analisis spasial menjabarkan besaran luasan atas hasil kajian.
Apakah pengkajian menyebutkan landasan pedoman, acuan/ referensi, standar, jaminan akuntabilitas dari ahli yang jelas?		Ya	Pengkajian dilakukan dengan landasan hukum yang terkait dan berdasarkan tata cara penyelenggaraan KLHS RPJMD sebagaimana diatur dalam PP 46/2016, PermenLHK 69/2017, dan Permendagri 7/2018 yang dapat dilihat pada sub bab 1.2 Dasar Hukum. Selain itu juga menggunakan tata cara baku kajian bidang ilmu terkait.
Apakah pengkajian dilakukan dengan pendekatan spasial?		Ya	Analisis dilakukan secara spasial dengan peta-peta yang terdapat dalam Laporan KLHS RPJMD.
Apakah dijelaskan pada tahap penyusunan KRP yang mana, proses telaahan KLHS dilaksanakan?		Ya	KLHS RPJMD dilakukan tidak bersamaan dengan proses penyusunan KRP (*Ex-Ante*).
Apakah semua dampak dan risiko terhadap isu prioritas telah dianalisis?		Ya	Analisis dampak dan risiko terhadap isu prioritas dan strategis merupakan bagian dari deskripsi isu PB strategis pada Sub Bab 4.4. Kerangka Kajian Isu PB Strategis dan Kajian Pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan Hidup digambarkan dengan *mind map* dan dianalisis secara kuantitatif serta mempertimbangkan dampak lanjutan dan dampak kumulatif berdasarkan ketersediaan data.
Apakah perkiraan dampak lanjutan dan dampak kumulatif sudah dianalisis?			
Apakah perkiraan dampak dan risiko dilakukan secara kuantitatif?			

Apakah dilakukan simulasi berbasis skenario untuk perkiraan dampak dan risiko?	Ya	Dilakukan perkiraan target capaian indikator berdasarkan skenario BaU, Moderat dan Akselerasi yang dijelaskan pada Sub Bab 6.1. Perumusan Alternatif Skenario
Apakah perkiraan dampak dan risiko dituangkan secara spasial?	Ya	Analisis dilakukan secara spasial dengan peta-peta yang terdapat dalam Laporan KLHS RPJMD.
Apakah ada penjelasan antara hasil telaahan dengan pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup?	Ya	Rumusan alternatif dan rekomendasi kebijakan disusun dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Penilaian: Alternatif dan Rekomendasi			
Kriteria		**Penilaian**	**Keterangan**
Bagaimana bentuk penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program? Uraikan dalam bagian-bagian yang sesuai di bawah ini:			
1.	Perubahan tujuan atau target	Tidak	KLHS menggunakan situasi *ex ante* (KRP belum tersusun) sehingga belum dapat dilakukan perubahan tujuan atau target, perubahan strategi pencapaian target, perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi, perubahan, penyesuaian atau adaptasi proses atau metode terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan. KLHS RPJMD menghasilkan rekomendasi arahan kebijakan dan arahan program prioritas. Substansi arahan kebijakan dan arahan program tersebut dapat digunakan oleh tim penyusun RPJMD dalam menyusun: - Tujuan/ target - Strategi pencapaian target - Ukuran, skala, dan lokasi - Proses atau metode terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi - Urutan atau prioritas pelaksanaan
2.	Perubahan strategi pencapaian target		
3.	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi		
4.	Perubahan, penyesuaian atau adaptasi proses atau metode terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		
5.	Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan		
6.	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau	Ya	Arahan kebijakan tentang perlindungan kawasan ekosistem esential dan perlindungan keanekeragaman hayati dalam Sub Bab 6.2 Rekomendasi
7.	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup		

Apakah dijelaskan bagaimana cara menyusun dan memutuskan alternatif KRP serta rekomendasi KLHS?	Ya	Alternatif KRP dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan isu strategis, *baseline* data, proyeksi, dan diharmonisasikan dengan rekomendasi kebijakan dalam KLHS RPJPD. Rekomendasi disusun berdasarkan telaahan terhadap alternatif yang telah dipilih.
Apakah langkah-langkah untuk pencegahan dan pengurangan dampak dan risiko dari KRP telah diidentifikasikan dengan jelas?	Ya	KLHS RPJMD memuat alternatif KRP sebagai langkah pencegahan dan pengurangan dampak dan risiko dari KRP. Alternatif KRP merupakan dasar perumusan rekomendasi arahan kebijakan dan arahan program. Perumusan Alternatif terdapat pada sub bab 6.1. Rekomendasi arahan dirumuskan dengan mempertimbangkan: a. Sinergi dengan rekomendasi tahap I KLHS RPJPD (yang sudah diharmonisasikan dengan RPJPN, RPPLH, RTRW) b. Upaya dalam mengatasi isu strategis untuk mengurangi dampak dari isu strategis tersebut.
Apakah langkah-langkah mitigasi mencantumkan perkiraan dampak/risiko tambahan/sisa dampak/risiko yang mungkin masih akan muncul?		
Adakah rekomendasi KLHS terkait hasil kajian terutama pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung LH diidentifikasikan dengan jelas?	Ya	daya dukung dan daya tampung LH air menjadi salah satu indikator dalam perumusan rekomendasi arah kebijakan untuk isu strategis keberlanjutan SDA (Sub Bab 4.4.2 Kerangka Kajian Isu Ancaman Keberlanjutan SDA, Sub Bab 6.1.2. Perumusan Alternatif dan Sub Bab 6.2. Rekomendasi)
Apakah hasil rekomendasi konsisten dan relevan sebagai hasil dari rangkaian proses penetapan isu prioritas, pengkajian dan penyusunan alternatif?	Ya	Hasil rekomendasi telah dilakukan secara runut dan sistematis sejak penetapan isu PB paling strategis (Sub Bab 4.3 Perumusan Isu Strategis), hasil kerangka kajian (Sub Bab 4.4. Kerangka Kajian) dan perumusan alternatif (Sub Bab 6.1 Perumusan Alternatif) yang telah diidentifikasi sebelumnya
Apakah disusun rekomendasi tindak lanjut tambahan sebagai konsekuensi implementasi KLHS untuk KRP?	Ya	Rekomendasi KLHS yang sudah diintegrasikan dalam RPJMD harus dijadikan referensi dalam penyusunan KRP turunannya (seperti RENSTRA, RKPD) (Sub Bab 6.4 Tindak Lanjut)

Penilaian: Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS		
Kriteria	**Pemenuhan**	**Keterangan**
Apakah telah terpenuhi :	• Sudah • Belum • Ada catatan (jelaskan dalam keterangan)	
1. Data pendukung proses dan hasil konsultasi publik (foto, absen, berita acara)	Sudah	Dokumentasi keseluruhan kegiatan terdapat pada Lampiran 3 s/d 6

2. Dokumen KRP sebelum dan sesudah KRP diperbaiki dan/atau matriks yang menjelaskan perubahan sebelum dan sesudah	Belum	Dokumen rancangan awal KRP hingga akhir pelaksanaan KLHS belum tersedia, karena pelaksanaan KLHS bersifat *Ex-Ante*
3. Dokumen penjaminan kualitas	Sudah	Berita Acara Penjaminan Kualitas terdapat pada Lampiran 9
4. Bukti pemenuhan kompetensi penyusun KLHS	Sudah	Terdapat pada Lampiran 7. Kompetensi Tenaga Ahli
5. SK Kelompok Kerja KLHS	Sudah	SK POKJA KLHS terdapat pada Lampiran 1

Penilaian: Pengintegrasian Hasil KLHS/Pengambilan Keputusan		
Kriteria	**Pemenuhan**	**Keterangan**
Apakah telah terpenuhi:		
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dimasukkan materi teknis KRP	Belum	Dokumen rancangan awal KRP hingga akhir pelaksanaan KLHS belum tersedia. Rekomendasi diikuti dengan usulan integrasi ke dalam rancangan awal RPJMD. Proses integrasi sangat perlu dikawal hingga akhir penetapan RPJMD.
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dijadikan ketentuan pengaturan KRP		
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS dijembatani/ diinterpretasikan kembali penulisannya dalam bahasa peraturan pada KRP		
Rekomendasi KLHS diatur tersendiri dalam ketentuan KRP (tidak ditulis kembali)		
Penjelasan tentang KRP lainnya yang juga harus mempertimbangkan rekomendasi KLHS ini?	Ya	Rekomendasi KLHS yang sudah diintegrasikan dalam RPJMD harus dijadikan referensi dalam penyusunan KRP turunannya (seperti RENSTRA, RKPD) (Sub Bab 6.4 Tindak Lanjut)
Rekomendasi khusus untuk penyusunan KLHS bagi KRP turunannya	Tidak	Turunan RPJMD tidak diwajibkan menyusun KLHS
Adakah rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL sebagai tindak lanjut KRP ini?	Tidak	KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta berada pada tataran strategis hingga arahan program, bukan teknis hingga ke kegiatan.

Penilaian: Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Apakah dijelaskan pada tahapan mana saja dilakukan konsultasi publik?	Ya	Pada proses KLHS telah dilakukan Konsultasi Publik 1 untuk menetapkan isu strategis KLHS pada 6 Juli 2023 dan Konsultasi Publik 2 untuk merumuskan alternatif dan rekomendasi KLHS pada 9 November 2023
Apakah pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam KLHS disebutkan dengan jelas?	Ya	Terdapat daftar hadir dalam setiap pertemuan (Rapat Koordinasi, FGD dan Konsultasi Publik) sebagaimana didokumentasikan pada Lampiran 4.

Apakah semua pemangku kepentingan yang dilibatkan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan selama proses KLHS? Jika tidak, pemangku kepentingan yang mana yang tidak dilibatkan?	Ya	Pemangku kepentingan yang diundang berdasarkan kebutuhan dari setiap FGD/KP luring, jika ada pemangku kepentingan yang tidak hadir dalam FGD/KP namun informasi sangat diperlukan dalam kajian, maka dilakukan FGD secara daring (online) sebagaimana dapat dilihat pada notulensi pertemuan pada Lampiran 3. Penyampaian masukan atau informasi yang belum dapat disampaikan selama kegiatan dapat dilakukan melalui form online yang terlah disediakan oleh POKJA.
Apakah semua dokumen terkait KLHS dapat diakses oleh publik selama dan setelah proses KLHS?	Ya	Dokumen dapat diakses oleh publik melalui POKJA KLHS melalui website Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Lampiran 10. D.1 Tabel Target dan Indikator

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Tujuan 1 - Tanpa Kemiskinan										
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Susenas BPS	%	3,77 (2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Sosial
	Tingkat Kemiskinan	BPS	%	3,78 (tahun 2017)	3,58	3,38	3,18	2,98	2,78	Dinas Sosial
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	BPS, BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial	%	73 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
1.3.1.(a)#	Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	Bab 6 RPJMD	%	73 (tahun 2017)	0	95	95	100	100	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	%	1. Formal : 116 dari penduduk yang bekerja	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
				2. Informal : NA	10	10	10	10	10	
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Dinas Sosial (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Sosial
1.3.1.(c)#	Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya	Bab 6 RPJMD	%	4,8 (tahun 2017)	14,9	38,7	64,5	75	85.4	Dinas Sosial
1.3.1.(d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial (realisasi capaian)	Rumah Tangga	61022	65918	65918	65918	65918	65918	Dinas Sosial
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Susenas BPS	%	97,43 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
1.4.1.(a)#	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Bab 6 Renstra	%	97 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	SDKI BKKBN dan BPS	%	52,43 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
1.4.1.(b)#	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada anak usia 12-23 bulan	SDKI BKKBN dan BPS	%	47 (tahun 2017)	50	53	55	60	60	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	SDKI	%	57,05 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
1.4.1.(c)#	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	Bab 8 RPJMD	%	56,9 (tahun 2017)	57,34	57,78	58,22	58,66	59.1	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Susenas BPS	%	85,88 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Sumber Daya Air
1.4.1.(d)#	Presentase cakupan pelayanan air bersih	Bab 8 RPJMD	%	60 (tahun 2017)	60,99	63,65	66,09	73,69	79.61	Dinas Sumber Daya Air
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Susenas BPS	%	83,48 (tahun 2016)	85,15	86,85	88,59	90,36	92.17	Dinas Sumber Daya Air
1.4.1.(e)#	Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	%	14,33 (tahun 2017)	15,93	17,04	20,49	23	26.44	Dinas Lingkungan Hidup
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Susenas BPS	%	15,18 (tahun 2016)	12,14	9,72	7,77	6,22	4.97	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1.(f)#	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	Bab 5 RPJMD	RW	223 (tahun 2017)	164	115	67	23	23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	96,06 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pendidikan
1.4.1.(g)#	Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	96,15 (tahun 2016) 96,06 (tahun 2017)	96,54	96,93	97,32	97,71	98.1	Dinas Pendidikan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	83,27 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pendidikan
1.4.1.(h)#	Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	84,79 (tahun 2016) 83,27 (tahun 2017)	86,73	88,67	90,62	92,59	85.75	Dinas Pendidikan
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	71,87 (tahun 2016) 76,83 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pendidikan
1.4.1.(i)#	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	71,87 (tahun 2016) 76,83 (tahun 2017)	74,65	77,42	80,2	82,95	85.75	Dinas Pendidikan
1.4.1.(j)	Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran	Susenas BPS	%	96,36 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.4.1.(j)#	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	Bab 8 RPJMD	%	49,5 (tahun 2017)	59,3	67,1	75,7	82,9	89.7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Susenas BPS	%	100 (tahun 2016)	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Realisasi Capaian)	Jiwa per 100.000 orang (meninggal dan hilang)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
			Jiwa per 100.000 orang (terluka)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jiwa per 100.000 orang (menderita dan mengungsi)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1*#	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	Bab 5 RPJMD	Nilai	4,97 (tahun 2017)	5,28	6,08	6,77	7,32	7.91	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Realisasi Capaian)	Lokasi	34 (tahun 2015)	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas Sosial (realisasi capaian)	Jiwa	NA	8970 kk, 36447 jiwa (untuk semua jenis bencana)	11667 kk, 38706 jiwa + 8 orang meninggal (untuk semua jenis bencana)	321.586 Jiwa	147.923 Jiwa		Dinas Sosial
1.5.1.(b)#	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Bab 8 RPJMD	%	100 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas Sosial (realisasi capaian)	Jiwa	NA	0	1182 (untuk semua jenis bencana)	NA	856 Jiwa		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(c)#	Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	Dinas Sosial (realisasi capaian)	%	11 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Realisasi Capaian)	Indeks Risiko	Jakarta Pusat 70,6; Jakarta Utara 89,7; Jakarta Barat 88,2; Jakarta Selatan 64,8; Jakarta Timur 93,2; dan Kepulauan Seribu 64,8 (2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Disgulkarmat (realisasi capaian)	Rupiah	475.218.955.000 (kerugian akibat bencana kebakaran tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (realisasi capaian)	Dokumen	2 (tahun 2015)	2	2	3	3	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.										

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	TKPK Provinsi	Triliun Rupiah	11,42 (tahun 2017)	9,59	PM	PM	PM	PM	Dinas Sosial
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	APBD	Miliar Rupiah, Fungsi Pendidikan	18.568,34 (tahun 2017	21.766 ,85	24.090 ,48	PM	PM	PM	Dinas Pendidikan
			Miliar Rupiah, Fungsi Kesehatan	7.180,97 (tahun 2017)	7.965, 44	7.742, 92	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan
			Miliar Rupiah, Fungsi Perlindungan Sosial	4.279,56 (tahun 2017)	5.782, 78	PM	PM	PM	PM	Dinas Sosial
Tujuan 2 - Tanpa Kelaparan										
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Susenas BPS; Riskesdas Kementerian Kesehatan; BKP; FAO/WHO/UNU	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2.1.1*#	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Skor	80,5	0	82	83	84	85	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Riskesdas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan	%	14 (tahun 2013)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
2.1.1.(a)#	Persentase anak balita (bawah lima tahun) kurus yang mendapatkan makanan tambahan	Bab 6 Renstra	%	80 (tahun 2017)	85	90	95	96	100	Dinas Kesehatan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Susenas BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Susenas BPS	%	35,43 (tahun 2015)	34,33	33,03	31,79	30,59	29.44	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	27,5 (tahun 2013)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
2.2.1*#	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Bab 6 Renstra	%	90,18 (tahun 2017)	91	93	96	99	100	Dinas Kesehatan
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
2.2.1.(a)#	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Bab 6 Renstra	%	90,18 (tahun 2017)	91	93	96	99	100.00	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
2.2.2*#	Persentase anak balita (bawah lima tahun) kurus yang mendapatkan makanan tambahan	Bab 6 Renstra	%	80 (tahun 2017)	85	90	95	96	100	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)#	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Bab 6 Renstra	%	96 (tahun 2017)	97	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Riskesdas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan; Susenas BPS	%	50,65 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
2.2.2.(b)#	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif	Bab 6 Renstra	%	49,25 (tahun 2015)	70	75	80	85	90	Dinas Kesehatan
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan:	Laporan Kementerian Pertanian								Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
	1. Angka Konsumsi Ikan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (realisasi capaian)	kg/kapita/tahun	35,5 (tahun 2017)	0	37	38,5	40	41.5	
	2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (realisasi capaian)	skor	80,5 (tahun 2017)	0	82	83	84	85	
Tujuan 3 - Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	kematian per 100.000 kelahiran hidup	44 (tahun 2017, sumber: Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.1.1*#	1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Bab 6 Renstra	%	96 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	2. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Bab 6 Renstra	%	97 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	3. Persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan nifas sesuai standar	Bab 6 Renstra	%	94 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Susenas BPS	%	99,59 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.1.2*#	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Bab 6 Renstra	%	97 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.1.2.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Susenas BPS	%	97,86 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
3.1.2.(a)#	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Bab 6 Renstra	%	97 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH.										
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	kematian per 1.000 kelahiran hidup	3 (tahun 2017, sumber: Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)		2 (tahun 2017, sumber: Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	SDKI	kematian per 1.000 kelahiran hidup	3 (tahun 2017, sumber: Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.2.2.(b)#	Persentase Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Bab 6 Renstra	%	100 (2017)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Kemenkes	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.3.1.(a)#	Penatalaksanaan Penyakit HIV-AIDS	Bab 6 Renstra	%	100 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Kemenkes	Jiwa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.3.2.(a)#	Jumlah Kota/Kabupaten yang Mencapai Target Case Detection Rate (CDR) di Layanan TB Sesuai Standar	Bab 6 Renstra	Kota/kabupaten	2 (tahun 2017)	3	4	5	6	6	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Jiwa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.3.3*#	Annual Parasite Incidence (API) Kasus Malaria Indigenous Sama Dengan 0 (Nol)	Bab 6 Renstra	Poin	0 (tahun 2017)	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Kota/kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.3.3.(a)#	Annual Parasite Incidence (API) Kasus Malaria Indigenous Sama Dengan 0 (Nol)	Bab 6 Renstra	Poin	0 (tahun 2017)	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.3.4.(a)#	Cakupan Deteksi Dini Hepatitis B bagi Ibu Hamil	Bab 6 Renstra	%	40 (tahun 2017)	50	55	60	65	70	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.3.5*#	Proporsi Penemuan Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat	Bab 6 Renstra	%	91,16 (tahun 2017)	93	95	95	95	95	Dinas Kesehatan
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	Kemenkes	Kota/kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.3.5.(a)#	Proporsi Penemuan Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat	Bab 6 Renstra	%	91,16 (tahun 2017)	93	95	95	95	95	Dinas Kesehatan
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Kota/kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
3.3.5.(b)#	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Peningkatan Layanan Penyakit Kecacingan	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	50	55	60	65	70	75	Dinas Kesehatan
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun	Riskesdas	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.4.1.(a)#	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	Bab 6 Renstra	%	0 (tahun 2017)	30	40	50	60	70	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Riskesdas dan Sirkesnas	%	20 (tahun 2013)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)#	Persentase Penduduk Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Bab 6 Renstra	%	0 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Riskesdas	%	39,7 (tahun 2013)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)#	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Bab 6 Renstra	%	0 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	Sistem Registrasi Sampel	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Kemenkes	Kabupaten/kota	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.4.2.(a)#	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Bab 6 Renstra	%	100 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.										
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Laporan BNN	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Riskesdas (realisasi pencapaian)	%	2,7 (tahun 2007)	NA	NA	NA	NA	NA	Satuan Polisi Pamong Praja
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
3.7.1.(a)#	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	Bab 8 RPJMD	%	56,9 (tahun 2017)	57,34	57,78	58,22	58,66	59.1	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	34,86 (tahun 2015)	35,15	35,45	35,75	36,05	36.6	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	SENSUS, SUPAS SDKI, dan SKAP	Per 1000	20 (tahun 2012) 20 (tahun 2017)	24	23	22	21	20	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	SUPAS (realisasi capaian)	Nilai	2,20 (tahun 2017)	2,18	2,15	2,13	2,12	2.11	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Susenas BPS	%	3,56 (2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.8.1.(a)#	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	Bab 6 Renstra	%	15 (tahun 2017)	30	40	50	60	70	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	38,26 (tahun 2015)	56,82	84,37	100	100,00	100.00	Dinas Kesehatan
3.8.2*#	Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	Bab 6 RPJMD	%	73 (tahun 2017)	0	95	95	95,00	100.00	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	73 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)#	Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	Bab 6 RPJMD	%	73 (tahun 2017)	0	95	95	95	100	Dinas Kesehatan
Target 3.9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.										
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan	Sistem Registrasi Sampel	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
Target 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.										
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Susenas BPS	%	24,72 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.a.1*#	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	Bab 6 Renstra	%	32 (tahun 2017)	35	38	41	44	47	Dinas Kesehatan
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.										
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.b.1.(a)#	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar	Bab 6 Renstra	%	95 (tahun 2017)	95	96	96	97	98	Dinas Kesehatan
Target 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kesehatan
3.c.1*#	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar	Bab 6 Renstra	%	32 (tahun 2017)	35	50	60	70	80	Dinas Kesehatan
Tujuan 4 - Pendidikan Berkualitas										
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pendidikan
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pendidikan
4.1.1.(a)#	Persentase Sekolah terakreditasi A	Bab 6 RPJMD	%	0 (tahun 2017)	70,03	77,52	85,02	92,51	100	Dinas Pendidikan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pendidikan
4.1.1.(b)#	Persentase Sekolah terakreditasi A	Bab 6 RPJMD	%	0 (tahun 2017)	70,03	77,52	85,02	92,51	100	Dinas Pendidikan
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pendidikan
4.1.1.(c)#	Persentase Sekolah terakreditasi A	Bab 6 RPJMD	%	0 (tahun 2017)	70,03	77,52	85,02	92,51	100	Dinas Pendidikan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	104,97 (tahun 2017)	104,2	105,1	105,9	106,76	107.61	Dinas Pendidikan
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	108,19 (tahun 2016) 105,4 (tahun 2017)	94,21	94,53	94,86	95,18	95.51	Dinas Pendidikan
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	97,25 (tahun 2016) 103, 69 (tahun 2017)	80,67	81,84	83	84,16	85.33	Dinas Pendidikan
4.1.1.(f)#	Persentase Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	97,25 (tahun 2016) 103, 69 (tahun 2017)	92,58	93,8	95,02	96,24	97.5	Dinas Pendidikan
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Susenas BPS	Tahun	10,97 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pendidikan
4.1.1.(g)#	Rata-rata lama sekolah penduduk jakarta	Bab 6 RPJMD	Tahun	10,88 (tahun 2016)	11,1	11,32	11,55	11,77	12	Dinas Pendidikan
Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	**%**	63,62 (tahun 2016) 66,32 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pendidikan
4.2.2.(a)#	Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	63,62 (tahun 2016) 66,32 (tahun 2017)	86,35	89,63	92,91	96,19	99.5	Dinas Pendidikan
Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.										
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	97,25 (tahun 2016) 103, 69 (tahun 2017)	80,67	81,84	83	84,16	85.33	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
4.3.1.(a)#	Persentase Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	97,25 (tahun 2016) 103, 69 (tahun 2017)	92,58	93,8	95,02	96,24	97.5	Dinas Pendidikan
Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Susenas BPS	%	Tahun 2015: 80,01 (usia 15 – 24); 53,3 (usia 15 – 59) Tahun 2016: 82,53 (usia 15-24 tahun) Tahun 2017: 89,93 (usia 15-24 tahun)	87,87 (usia 15 – 25); 64,55 (usia 15 – 59)	96,5 (usia 15 – 25); 78,25 (usia 15 – 59)	100 (usia 15 – 25); 100 (usia 15 – 59)	100 (usia 15 – 25); 100 (usia 15 – 59)	100 (usia 15 – 25); 100 (usia 15 – 59)	Dinas Pendidikan
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.										
4.5.1*	1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di:									Dinas Pendidikan
	a. SD/MI/sederajat	Susenas BPS	%	99,87 (tahun 2017)	52,36	53,41	54,47	55,56	56.68	
	b. SMP/MTs/sederajat			98,16 (tahun 2017)	44,84	47,26	49,81	52,5	55.33	
	c. SMA/SMK/MA/sederajat			86,06 (tahun 2017)	27,98	29,07	30,20	31,38	32.61	
	2. Rasio APK perempuan/laki-laki di PT			91,22 (tahun 2017)	13,60	14,46	15,37	16,35	17.38	
Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.										
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik, (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pendidikan
4.a.1*#	Persentase Sekolah terakreditasi A	Bab 6 RPJMD	%	0 (tahun 2017)	70,03	77,52	85,02	92,51	100	Dinas Pendidikan
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.										
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud	%	93,33 (tahun 2015)	96,06	98,86	100	100	100	Dinas Pendidikan
4.c.1*#	Persentase guru yang kompeten	Bab 8 RPJMD	%	72,16 (tahun 2017)	77,72	83,28	88,84	94,4	94.4	Dinas Pendidikan
Tujuan 5 - Kesetaraan Gender										
Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.										
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Kebijakan	2	PM	PM	PM	PM	2	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
5.1.1*#	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Bab 8 RPJMD	%	0 (tahun 2017)	12	24	36	48	60	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
5.2.1.(a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	SKtA BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
5.2.1.(a)#	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	36,3 (tahun 2017)	35,52	34,74	33,96	33,1	32.4	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
5.2.2.(a)#	Persentase korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Bab 8 RPJMD	%	63,4 (tahun 2017)	74,34	82,66	91	99,33	99.5	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama,	Susenas BPS								Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
	- sebelum umur 15 tahun		%	0,11 (tahun 2015)	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
	- sebelum umur 18 tahun		%	3,18 (tahun 2017)	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Tahun	23,09 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	SENSUS, SUPAS SDKI, dan SKAP	Per 1000	20 (tahun 2012) 20 (tahun 2017)	24	23	22	21	20	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	97,25 (tahun 2016) 103, 69 (tahun 2017)	80,67	81,84	83	84,16	85.33	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
5.3.1.(c)#	Persentase Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA	Kemdikbud dan Kemenag (Realisasi Capaian)	%	97,25 (tahun 2016) 103, 69 (tahun 2017)	92,58	93,8	95,02	96,24	97.5	Dinas Pendidikan
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	18,87 (tahun 2017)	19,81	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	BKN; Sakernas BPS	%	12,5 (tahun 2016)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.										
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	SDKI BKKBN dan BPS	%	84,80 (tahun 2012)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
5.6.1.(a)#	Unmet need (PUS yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani)	Bab 8 RPJMD	%	18 (tahun 2017)	14,7	14,5	14,4	14,2	14	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	%	20,1 (tahun 2012)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Kemhukham; BKKBN; Kementerian Kesehatan; KPPPA; Kemdikbud	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
Tujuan 6 - Air Bersih dan Sanitasi yang layak										
Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Susenas Kor, BPS	%	88,93 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Sumber Daya Air
6.1.1.(a)#	Cakupan pelayanan air bersih	Bab 5 RPJMD	%	60 (tahun 2017)	60,99	63,65	66,09	73,69	79.61	Dinas Sumber Daya Air
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	m3/detik	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Sumber Daya Air
6.1.1.(b)#	Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	%	0 (tahun 2017)	0	0,93	1,85	-	2.78	Dinas Sumber Daya Air
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Susenas Kor, BPS	%	88,93 (tahun 2017)	94,17	94,95	95,73	96,52	97.32	Dinas Sumber Daya Air
6.1.1.(c)#	Presentase cakupan pelayanan air bersih	Bab 8 RPJMD	%	60 (tahun 2017)	60,99	63,65	66,09	73,69	79.61	Dinas Sumber Daya Air

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Susenas Kor, BPS	%	68,96 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	-
6.2.1.(a)#	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Bab 6 Renstra	Kelurahan	117 (tahun 2017)	137	167	202	237	267	Dinas Kesehatan
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Susenas Kor, BPS	%	83,48 (tahun 2016) 90,37 (tahun 2017)	85,15	86,85	88,59	90,36	92.17	Dinas Sumber Daya Air
6.2.1.(b)#	persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	%	14,33 (tahun 2017)	15,93	17,04	20,49	23	26.44	Dinas Sumber Daya Air
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	- Kementerian Kesehatan - Bab 6 Renstra	Kelurahan	117 (tahun 2017)	137	167	202	237	267	Dinas Kesehatan
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Kelurahan	5 (tahun 2017)	137	167	202	237	267	Dinas Kesehatan
6.2.1.(d)#	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan (realisasi capaian)	Kelurahan	117 (tahun 2017)	137	167	202	237	267	Dinas Kesehatan
6.2.1.(e)	Jumlah kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	Kota/kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
6.2.1.(e)#	Cakupan pelayanan air limbah	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	%	14,33 (tahun 2017)	15,93	17,04	20,49	23	26.44	Dinas Sumber Daya Air
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
6.2.1.(f)#	Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	%	14,33 (tahun 2017)	15,93	17,04	20,49	23	26.44	Dinas Sumber Daya Air
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
6.3.1.(a)	Jumlah kota/kabupaten yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kota/kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
6.3.1.(a)#	Cakupan pelayanan air limbah	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	%	14,33 (tahun 2017)	15,93	17,04	20,49	23	26.44	Dinas Sumber Daya Air
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
6.3.1.(b)#	Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	%	14,33 (tahun 2017)	15,93	17,04	20,49	23	26.44	Dinas Sumber Daya Air
6.3.2.(a)	Kualitas air danau	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Danau Prioritas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
6.3.2.(a)#	Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	%	0 (tahun 2017)	0	0,93	1,85	0	2.78	Dinas Sumber Daya Air
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Dinas Sumber Daya Air (realisasi capaian)	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Sumber Daya Air

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.										
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Kementerian ESDM	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
6.4.1.(a)#	Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah	Bab 8 RPJMD	%	50 (tahun 2017)	80	85	90	95	100	Dinas Sumber Daya Air
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	jdih.jakarta.go.id	Dokumen (Peraturan)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Sumber Daya Air
Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.										
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (realisasi capaian)	RPDAST	1	1	1	1	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Wilayah sungai	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Sumber Daya Air
Target 6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.										
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	DSDA (realisasi pencapaian)	Waduk/Situ/Embun g	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Sumber Daya Air
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Danau	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Sumber Daya Air
Tujuan 7 - Energi Bersih dan Terjangkau										
Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.										
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Statistik PLN	%	99,98 (tahun 2016)	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Statistik PLN	kWh	2997 (tahun 2015)	3347	3468	3594	3767	3948	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Target 7.2. Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global										
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	%	- (tahun 2017)	-	0,03	0,07	0,09	0.11	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Tujuan 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	BPS	%	9,62 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Biro Perekonomian
8.1.1*#	Pertumbuhan PDRB	BPS	%	6,29 (tahun 2017)	6,3	6,6	6,7	6,9	7	Biro Perekonomian
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	BPS (Statistik indonesia)	Rp	228.003.636,31 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Biro Perekonomian
8.1.1.(a)#	Pertumbuhan PDRB	BPS	%	6,29 (tahun 2017)	6,3	6,6	6,7	6,9	7	Biro Perekonomian
Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.										
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun	BPS (Statistik Indonesia; Sakernas)	%	14,50 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Biro Perekonomian
8.2.1*#	Pertumbuhan PDRB	BPS	%	6,29 (tahun 2017)	6,3	6,6	6,7	6,9	7	Biro Perekonomian
Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS (Sakernas)	%	26,9 (tahun 2015)	24,74	22,71	20,85	19,14	17.57	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS (Sakernas)	%	71,55 (tahun 2017)	69,82	70	70	70	70	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS (Sakernas)	%	0,13 (tahun 2017)	0,13	0,13	0,13	0,13	0.13	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS (Sakernas)	Rupiah	23.596 (tahun 2017)	25248	30609	40874	54579	72881	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	BPS (Sakernas)	%	7,14 (tahun 2017)	5,20	5,10	5,00	4,90	4.8	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS (Sakernas)	%	18,8 (tahun 2015) 11,17 (tahun 2017)	18,1	17,42	16,77	16,14	15.53	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Target 8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.										
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS (Sakernas)	%	13,49 (tahun 2017)	13	13	13	13	13	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Target 8.8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.										
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Kementerian Ketenagakerjaan	Perusahaan	1180 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
8.8.1.(a)#	Jumlah perusahaan yang menjalankan K3	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Perusahaan	1180 (tahun 2017)	1380	1380	1380	1380	1380	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS (Statistik Pariwisata)	Orang	2.600.000 (tahun 2017)	2.800.000	2.940.000	3.087.000	3.241.350	3,403,417	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	33.000.000 (tahun 2017)	36.000.000	38.520.000	40.496.000	44.298.000	50,172,000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	BPS (Statistik Pariwisata)	Trilun rupiah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	BPS (Nesparnas)	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
8.9.2*#	Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	49,07 (tahun 2017)	58	75	85	95	100	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.										
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa	Bank Indonesia (SSKI)	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Biro Perekonomian

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS (Podes)	km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Biro Perekonomian
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Bank Indonesia (Data UMKM)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tujuan 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur										
Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Renstra Kementerian PUPR 2015-2019	**%**	96 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	-
9.1.1.(a)#	Persentase Kondisi Jalan Mantap	Bab 8 RPJMD	%	96 (tahun 2017)	0	96,5	97	97,5	98	Dinas Bina Marga
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan (realisasi capaian)	unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
9.1.2.(b)#	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Bab 8 RPJMD	Terminal Penumpang	- (tahun 2017)	-	-	-	1	3	Dinas Perhubungan
Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	BPS	%	13,43 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	BPS	%	7,41	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	BPS	%	14,37 (tahun 2015) 13,2 (tahun 2017)	15,62	16,98	18,46	20,08	21.83	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Target 9.3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	BPS diolah Ditjen IKM Kementerian Perindustrian	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Target 9.4. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.										
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur	Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	RPJMN 2015-2019	%	3,30	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup
Target 9.5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negaranegara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.										
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB	APBD	%	0,00013 (2017)	PM	PM	PM	PM	PM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.										
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet	Susenas Kor BPS	%	46,63 (tahun 2015) 60,65 (tahun 2017)	47,65	53,23	59,47	66,43	74.21	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik
Tujuan 10 - Berkurangnya Kesenjangan										
Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1*	Koefisien Gini (Gini Ratio)	BPS	Nilai	0,409 (tahun 2017)	0,407	0,405	0,403	0,401	0.399	Biro Perekonomian
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	3,77 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	-
10.1.1.(a)#	Tingkat Kemiskinan	Bab 8 RPJMD	%	3,78 (tahun 2017)	3,58	3,38	3,18	2,98	2.78	Dinas Sosial
Target 10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.										
10.2.1*	Proporsi populasi dengan median pendapatan di bawah 50 persen, terpilah oleh kelompok usia, jenis kelamin dan para penyandang difabilitas	Susenas	%	13,82 (tahun 2015)	12,42	11,16	10,03	9,02	8.11	Biro Perekonomian
Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	Kementerian Polhukam dan BPS	Nilai	87,73 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.3.1.(a)#	Indeks Demokrasi	BPS	Nilai	70,85 (tahun 2017)	73,35	73,85	74,35	74,85	75.35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komnas HAM - Ditjen HAM - (Kemenkumham)	Berkas pengaduan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Biro Hukum
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Laporan Kasus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komnas Perempuan	Kebijakan / dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Biro Hukum
Target 10.4. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah daerah	APBD	%	7,23 (tahun 2017)	7,7	NA	NA	NA	NA	Dinas Sosial
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	%	1. Formal : 116 dari penduduk yang bekerja	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
				2. Informal : NA	10	10	10	10	10	
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan										
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.										
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	%	71,7 (tahun 2015) 99,49 (tahun 2017)	72,24	72,81	73,38	73,96	74.54	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.										
	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Dinas Perhubungan (realisasi capaian)	%	18 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Perhubungan
11.2.1.(a)#	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (public transportation modal share)	Dinas Perhubungan (realisasi capaian)	%	18 (tahun 2017)	20	22	25	28	30	Dinas Perhubungan
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar	Dinas Perhubungan (realisasi capaian)	Kota Besar	0 (tahun 2017)	0	3	3	3	3	Dinas Perhubungan
Target 11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.										
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Kementerian PPN/Bappenas	Institusi	44 (data institusi yang diundang dalam Forum Konsultasi Publik pada tahun 2017)	45	45	45	45	45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Target 11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.										
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Kota Pusaka	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Realisasi Capaian)	Jiwa per 100.000 orang (meninggal dan hilang)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
			Jiwa per 100.000 orang (terluka)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
			Jiwa per 100.000 orang (menderita dan mengungsi)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
11.5.1*#	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	Bab 5 RPJMD	Nilai	4,97 (tahun 2017)	5,28	6,08	6,77	7,32	7.91	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Realisasi Capaian)	Indeks Risiko	Jakpus 70,6; Jakut 89,7; Jakbar 88,2; Jaksel 64,8; Jaktim 93,2; dan Kepulauan Seribu 64,8 (2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	Dokumen Strategi Ketahanan Jakarta	Kota/kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Peringatan Dini	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Disgulkarmat	rupiah	475.218.955.000 (kerugian akibat bencana kebakaran tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	DLH (realisasi capaian)	%	83 (tahun 2015)	83,03	83,06	83,09	83.12	83.15	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
11.6.1.(a)#	Persentase penurunan volume sampah di kota	Bab 5 dan 8 RPJMD	%	11 (tahun 2017)	14	17	20	23	26	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Dinas Lingkungan Hidup (realisasi capaian)	Kota Hijau	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.										
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Statistik Kriminal (BPS)	%	33,73 (tahun 2017)	37,16	45,47	55,65	68,09	80	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.										
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	2 (tahun 2015)	2	2	3	3	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan 12 - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab										
Target 12.1. Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.										
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwins program	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kolaborasi tematik	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peserta Proper	75 (tahun 2015)	77	79	81	83	85	Dinas Lingkungan Hidup
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Dinas Lingkungan Hidup (realisasi capaian)	Juta ton	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup
12.4.2.(a)#	Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	Bab 8 RPJMD	%	- (tahun 2017)	10	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Dinas Lingkungan Hidup (realisasi capaian)	Juta ton	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup
12.5.1.(a)#	Persentase penurunan volume sampah di kota	Bab 5 RPJMD	%	11 (tahun 2017)	14	17	20	23	26	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	perusahaan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.7. Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.										
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Produk ramah lingkungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.										
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Fasilitas Publik	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 13 - Penanganan Perubahan Iklim										
Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.										
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	2 (tahun 2015)	2	2	3	3	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Realisasi Capaian)	Jiwa per 100.000 orang (meninggal dan hilang)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jiwa per 100.000 orang (terluka)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jiwa per 100.000 orang (menderita dan mengungsi)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.2*#	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	Bab 5 RPJMD	Nilai	4,97 (tahun 2017)	5,28	6,08	6,77	7,32	7.91	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Target 13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.										
13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia	Dinas Lingkungan Hidup (realisasi capaian)	Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dinas Lingkungan Hidup (realisasi capaian)	dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 14 - Ekosistem Lautan										
Target 14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.										
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	jdih.jakarta.go.id	Dokumen (PP)	1 (tahun 2015)	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	WPP	1 (tahun 2015)	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Target 14.4. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.										
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	%	ikan pelagis kecil E = 0,38, ikan demersal E = 0,83, kepiting E= 0.70, Cumi cumi E=2.02 (tahun 2017)	1	0,5≤ E ≤ 1	0,5≤ E ≤ 1	0,5≤ E ≤ 1	0,5≤ E ≤ 2	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Target 14.5. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.										
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Ha	140,9 (tahun 2017)	141,6	142,3	143	143,7	144.4	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
14.5.1*#	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	Bab 8 RPJMD	Ha	140,9 (tahun 2017)	0	141,9	142,4	142,9	143.4	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 14.6. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.										
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Target 14.b. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.										
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Regulasi/kebijakan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindung.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (realisasi capaian)	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Target 14.c. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want".										
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	jdih.jakarta.go.id	Dokumen (PP)	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Tujuan 15 - Ekosistem Daratan										
Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.										
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
15.1.1.(a)#	Penambahan Rasio RTH Hutan	Bab 8 RPJMD	%	0,024 (tahun 2017)	0,0085	0,0115	0,0115	0,0115	0.0785	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Target 15.2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.										
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Hektar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Ha	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	KPA	1 (data tahun 2016)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	KPHK; KPHL; KPHP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Target 15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.										
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian)	Ha	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Target 15.5. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.										

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
15.5.1*#	Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian)	Fauna	2.132 (tahun 2017)	2142	2152	2162	2172	2182	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Target 15.7. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.										
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup
15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi	Laporan Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018	Spesies	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup
15.7.1.(b)#	1. Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian)	Fauna	2.132 (tahun 2017)	2142	2152	2162	2172	2182	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
	2. Penambahan jumlah flora yang dikonservasi	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (realisasi capaian)	Flora	52.733 (tahun 2017)	52753	52773	52793	52813	52833	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Target 15.8. Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasive prioritas.										
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Dokumen Karantina Hewan; Dokumen Karantina Tumbuhan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Target 15.9. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.										
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup
Target 15.c. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.										
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 16 - Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh										
Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Statistik Kriminal (BPS)	Kasus	76 (mencakup seluruh wilayah kerja Polda Metro Jaya yang meliputi Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta dan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan/KP3)	65	58	51	44	36	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Data Rekapitulasi Aksi Anarkis Tawuran Antar Warga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kematian per 100.000 penduduk	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Bakesbangpol Satuan Polisi Pamong Praja
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Statistik Kriminal (BPS)	%	1,38 (tahun 2016)	1,28	1,18	1,08	0,98	0.88	Satuan Polisi Pamong Praja
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Statistik Kriminal (BPS)	%	50,57 (2017)	50,57	51,0	51,50	52,0	51.5	Satuan Polisi Pamong Praja
Target 16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.										
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Laporan Kasus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
16.2.1.(b)#	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	% (untuk target) Laporan Kasus (untuk realisasi pencapaian)	NA	35,52	34,74	33,96	33,18	32.4	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Laporan Kasus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
Target 16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.										
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	BPS (Statistik Kriminal)	%	33,73 (tahun 2017)	37,16	45,47	55,65	68,09	80	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Biro Hukum
Target 16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.										
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Statistik Kriminal (BPS)	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Inspektorat
Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Kementerian Keuangan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Badan Pemeriksa Keuangan	Predikat	WTP (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	-
16.6.1.(a)#	Opini Laporan Keuangan Daerah	Bab 5 RPJMD	Predikat	WTP (tahun 2017)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Predikat	B (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	-

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
16.6.1.(b)#	Nilai / Predikat AKIP	Bab 5 RPJMD	Predikat	B (tahun 2017)	A	A	A	AA	AA	Inspektorat
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Data di bawah koordinasi BPPBJ)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
16.6.1.(d)#	Indeks Reformasi Birokrasi	Bab 5 RPJMD	Nilai	63,75 (tahun 2017)	68	73	78	85	91	Biro ORB
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Ombudsman RI	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
16.6.2.(a)#	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik	Bab 5 RPJMD	Nilai	0	80,00	83,00	86,00	88,0	88.5	Biro ORB
Target 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	KPU	%	19,81	19,81	Tidak ada target tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada target tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada target tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada target tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	BKN; Sakernas BPS	%	17	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Badan Kepegawaian Daerah/ Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	BPS dan Kemenko Polhukam	Nilai	87,12 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	-
16.7.2.(a)#	Indeks Demokrasi	Bab 5 RPJMD	Nilai	70,85 (tahun 2016) 84,73 (tahun 2017)	73,35	73,85	74,35	74,85	75.35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS dan Kemenko Polhukam	Nilai	87,73 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	-
16.7.2.(b)#	Indeks Demokrasi	Bab 5 RPJMD	Nilai	70,85 (tahun 2016) 84,73 (tahun 2017)	73,35	73,85	74,35	74,85	75.35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS dan Kemenko Polhukam	Nilai	80,86 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	-
16.7.2.(c)#	Indeks Demokrasi	Bab 5 RPJMD	Nilai	70,85 (tahun 2016) 84,73 (tahun 2017)	73,35	73,85	74,35	74,85	75.35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (realisasi capaian)	**%**	94,78 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	**-**
16.9.1*#	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	Bab 8 RPJMD	%	49,5 (tahun 2017)	59,3	67,1	75,7	82,9	89.7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Basis Data Terpadu (Kementerian Sosial)	%	96,36 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	-
16.9.1.(a)#	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	Bab 8 RPJMD	%	49,5 (tahun 2017)	59,3	67,1	75,7	82,9	89.7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (realisasi capaian)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
16.9.1.(b)#	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	Bab 8 RPJMD	%	49,5 (tahun 2017)	59,3	67,1	75,7	82,9	89.7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target 16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komnas HAM; Ditjen HAM (Kemenkum HAM)	Berkas Pengaduan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Biro Hukum
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (realisasi capaian)	Laporan Kasus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
16.10.2*	Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	World Bank, UNESCO, UNDP, Akademisi dan Lembaga Penelitian, Komisi Informasi Pusat	Peraturan	2 (terdiri dar: Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	1	1	1	1	1	1	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
16.10.2.(b)#	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi	Bab 8 RPJMD	%	100 (tahun 2016; 45 (tahun 2017	-	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Komisi Informasi Pusat (KIP)	PPID	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik
Target 16.b. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.										

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komnas Perempuan	Kebijakan/dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Biro Hukum
Tujuan 17 - Kemitraan untuk Mencapai Tujuan										
Target 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPS: Statistik Keuangan	%	2,71	NA	NA	NA	NA	NA	-
17.1.1*#	1. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	BPKD (realisasi capaian)	Triliun Rupiah	35,36 (tahun 2017)	38,13	39,97	43,35	47,2	51.25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	2. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	BPKD (realisasi capaian)	Miliar Rupiah	680,15 (tahun 2017)	689,9	704,76	715,453	733,77	749.83	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	2.1 Jumlah Pendapatan Daerah	BPKD (realisasi capaian)	Triliun Rupiah	62,52 (tahun 2017)	67,67	79,99	87,45	97,06	101.47	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	2.2 Jumlah Belanja Daerah	BPKD (realisasi capaian)	Triliun Rupiah	61,82 (tahun 2017)	78,48	82,30	90,80537	98,40	108.86	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	3. Total pendapatan Daerah sebagai proporsi terhadap Belanja Daerah	BPKD (realisasi capaian)	%	125,64 (tahun 2017)	86,24	97,20	96,31	98,64	93.20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Kemenkeu dan Kemendagri	%	1,49 (tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	-
17.1.1.(a)#	Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB	Badan Pendapatan Daerah	%	1,49 (tahun 2017)	1,55	1,69	1,73	1,78	1.85	Badan Pendapatan Daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Kementerian Keuangan	%	69,26	NA	NA	NA	NA	NA	-
17.1.2*#	Proporsi APBD yang didanai oleh pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	%	57,20 (tahun 2017)	47,10	51,38	52,72	52,79	53.520	Badan Pendapatan Daerah
Target 17.4. Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.										
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa	LKJP dan APBD	%	0,167	NA	NA	NA	NA	NA	Biro Perekonomian
Target 17.8. Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.										
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet	BPS Susenas KOR	%	42,7 (tahun 2015)	47,65	53,23	59,47	66,43	74.21	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik
Target 17.11. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.										
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	%	5,70 (ekspor produk migas dan non migas)	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, UKM
17.11.1.(a)#	Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	Bab 8 RPJMD	USD	4.043.918.198 (tahun 2017)	4.084.357.380	4.125.200.954	4.166.452.963	4.208.117.493	##### ####	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Target 17.17. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.										
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	- Kemenko Bidang Perekonomian; Kemenkeu; BAPPENAS; Kementerian PU & PR; Kemenhub;	Dokumen berisi daftar proyek KPBU	NA	NA	4	4	4	4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
		Kementerian ESDM; Kementerian Kominfotik; BKPM; Pemerintah Daerah - RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Alokasi (Rp)	NA	NA	6.178.773.560	2.000.000.000	2.000.000.000	##### ####	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Target 17.18. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.										
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Badan Pusat Statistik	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Target 17.19. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.										
17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/ Lembaga	Badan Kepegawaian Daerah	Pegawai	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Kepegawaian Daerah
17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/ Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan/atau Pranata Komputer	Badan Kepegawaian Daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Kepegawaian Daerah
17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/ Lembaga	Badan Kepegawaian Daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Badan Kepegawaian Daerah
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Kementerian Dalam Negeri	Data Registrasi	1 (tahun 2015)	1	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data	%	10,8 (tahun 2017)	1. Perencanaan (22,73)	48	48	48	48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					2. M&E (4,5)	NA	NA	NA	NA	

Lampiran 11. D.2 Tabel Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan yang Dilaksanakan Pemerintah

Program Usulan	Isu Terkait	Keterkaitan dengan TPB	Indikator Target	Satuan	Target Tahunan					Realisasi Anggaran (Rp Juta)					Indikatif Anggaran (Rp Juta)*					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2026	2027	2028	2029		
1.01.02 Pengelolaan Pendidikan	4,6	1,4	Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	96,54	96,93	97,32	97,71	98.1	5,225,550,867,122	6,273,526,866,320	2,208,093,830,200	791,312,076,159	3,267,490,549,508	3,721,261,366,000	3,886,113,245,000	4,058,268,061,000	4,238,049,337,000	4,425,794,922,000	APBD	Dinas Pendidikan
1.01.03 Pengembangan Kurikulum	4	1	Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	86,73	88,67	90,62	92,59	85.75												
			Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	%	74,65	77,42	80,2	82,95	85.75												
			Persentase Sekolah terakreditasi A	%	70,03	77,52	85,02	92,51	100												
			Rata-rata lama sekolah penduduk jakarta	Tahun	11,1	11,32	11,55	11,77	12												
			Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)	%	86,35	89,63	92,91	96,19	99.5												
			Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	%	87,87 (usia 15 – 25); 64,55 (usia 15 – 59)	96,5 (usia 15 – 25); 78,25 (usia 15 – 59)	100 (usia 15 – 25); 100 (usia 15 – 59)	100 (usia 15 – 25); 100 (usia 15 – 59)	100 (usia 15 – 25); 100 (usia 15 – 59)												
			Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	%	96,06	98,86	100	100	100												
			Persentase guru yang kompeten	%	77,72	83,28	88,84	94,4	94.4												
1.02.02 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4	3	Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	%	0	95	95	100	100	-	2,721,399,264,748	3,105,108,911,537	2,860,424,083,621	3,529,502,289,203	4,019,659,831,000	4,197,730,762,000	4,383,690,235,000	4,577,887,712,000	4,780,688,138,000	APBD	Dinas Kesehatan
			Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	91	93	96	99	100.00												
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	100												
			Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	kematian per 1.00	NA	NA	NA	NA	NA												

Program Usulan	Isu Terkait	Keterkaitan dengan TPB	Indikator Target	Satuan	Target Tahunan					Realisasi Anggaran (Rp Juta)					Indikatif Anggaran (Rp Juta)*					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2026	2027	2028	2029		
				0 kelahiran hidup																	
			Penatalaksanaan Penyakit HIV-AIDS	%	100	100	100	100	100												
			Cakupan Deteksi Dini Hepatitis B bagi Ibu Hamil	%	50	55	60	65	70												
			Proporsi Penemuan Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat	%	93	95	95	95	95												
			Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Peningkatan Layanan Penyakit Kecacingan	%	55	60	65	70	75												
			Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	%	30	40	50	60	70												
			Persentase Penduduk Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100												
			Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100	100	100	100	100												
			Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100												
			Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	%	30	40	50	60	70												
			Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	35	38	41	44	47												
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar	%	95	96	96	97	98												

Program Usulan	Isu Terkait	Keterkaitan dengan TPB	Indikator Target	Satuan	Target Tahunan					Realisasi Anggaran (Rp Juta)					Indikatif Anggaran (Rp Juta)*					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2026	2027	2028	2029		
1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4	3	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar	%	35	50	60	70	80	-	1,341,457,684,522	1,436,015,527,282	812,569,724,740	1,452,353,157,924	1,654,047,843,000	1,727,322,163,000	1,803,842,535,000	1,883,752,759,000	1,967,203,006,000	APBD	Dinas Kesehatan
			Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	NA	NA	NA	NA	NA												
			Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	%	NA	NA	NA	NA	NA												
			Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	%	57,34	57,78	58,22	58,66	59.1												
1.03.02 Pengelolaan Sumber Daya Air	2	1,6, 11	Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku	%	0	0,93	1,85	-	2.78	2,430,616,861,084	2,114,517,434,400	1,301,919,994,326	1,211,268,706,992	1,963,510,731,635	2,236,192,123,000	2,335,255,434,000	2,438,707,249,000	2,546,741,981,000	2,659,562,650,000	APBD	Dinas Sumber Daya Air
			Kualitas air danau	Danau Prioritas	NA	NA	NA	NA	NA												
			Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	-	NA	NA	NA	NA	NA												
			Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah	%	80	85	90	95	100												
1.03.03 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2	6	Cakupan pelayanan air bersih	%	60,99	63,65	66,09	73,69	79.61	36,431,074,153	70,770,469,975	33,885,108,331	39,778,510,182	4,268,213,145	4,860,959,000	5,076,299,000	5,301,179,000	5,536,021,000	5,781,267,000	APBD	Dinas Sumber Daya Air
			Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	%	94,17	94,95	95,73	96,52	97.32												
1.03.05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2	1,6	persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	%	15,93	17,04	20,49	23	26.44	19,921,833,433	66,544,184,666	38,408,436,284	4,455,419,000	79,625,151,952	90,683,048,000	94,700,307,000	98,895,530,000	103,276,602,000	107,851,756,000	APBD	Dinas Sumber Daya Air
1.03.06 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1,2																				
1.03.07 Pengembangan Permukiman	4		Jumlah kawasan/ fasilitas permukiman yang ditata	RW Kumuh	10	40	56	46	48	71,25	338,30	34,40	446,90	1,507,85	1,717,256,9	1,793,3	1,872,7	1,955,740,0	2,042,3	APBD	DINAS PERUMAHAN

Program Usulan	Isu Terkait	Keterkaitan dengan TPB	Indikator Target	Satuan	Target Tahunan					Realisasi Anggaran (Rp Juta)					Indikatif Anggaran (Rp Juta)*					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2026	2027	2028	2029		
1.04.03 Program Kawasan Permukiman	4		Persentase kawasan/ fasilitas permukiman yang terpelihara	%	0	100	100	100	100	0,470,918	4,603,894	6,343,018	6,560,389	4,579,281	92,000	31,477,000	76,061,000	40,000	79,324,000		RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
1.03.08. Penataan Bangunan Gedung	1		Persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar	%	52	54	56	58	60	124,483,202,532	156,786,757,508	4,381,677,050	277,704,629,759	251,552,036,414	286,486,177,000	299,177,514,000	312,431,078,000	326,271,775,000	340,725,615,000	APBD	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.12. Penyelenggaraan Penataan Ruang	5		Rasio kesesuaian rencana tata ruang	%	58	59	60	61	62	9,575,212,750	21,084,093,087	4,928,773,819	129,909,969,361	183,344,464,003	208,806,318,000	218,056,438,000	227,716,338,000	237,804,172,000	248,338,897,000	APBD	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
			Persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani	%	90	90	90	90	90												
			Persentase keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD	%	0	100	100	100	100												
1.04.02 Pengembangan Perumahan	1,4		presentase unit perumahan rakyat yang terbangun	%	2.5	0	0	0	0	2,099,983,176,653	268,655,378,965	246,746,173,059	229,008,166,230	1,082,740,374,138	1,233,105,303,000	1,287,731,868,000	1,344,778,390,000	1,404,352,072,000	1,466,564,869,000	APBD	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
			Persentase Perumahan yang lengkap sarana prasarana	%	17	0	0	0	0												
			persentase unit perumahan yang terpelihara	%	13	0	0	0	0												
1.04.05 Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	4		Panjang Jalan yang Memiliki Prasarana Jaringan Utilitas (m)	m	0	30000	30000	30000	30000	78,211,403,577	82,965,912,915	10,340,994,893	197,260,680,131	945,731,705,216	1,077,069,636,000	1,124,783,821,000	1,174,611,744,000	1,226,647,045,000	1,280,987,509,000	APBD	Dinas Bina Marga / Dinas Sosial
			Persentase Panjang Jalan yang memiliki Prasarana jaringan Utilitas	m	30000	0	0	0	0												
			Presentase prasarana dan sarana kesejahteraan sosial yang memenuhi standar pelayanan	Persen	51	64	77	87	100												
1.04.06. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan	1																				

Program Usulan	Isu Terkait	Keterkaitan dengan TPB	Indikator Target	Satuan	Target Tahunan					Realisasi Anggaran (Rp Juta)					Indikatif Anggaran (Rp Juta)*					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2026	2027	2028	2029		
Kawasan Permukiman																					
1.05.03 Penanggulangan Bencana	1		Severity Rate/Tingkat Keparahan Bencana	%	0	0	0	0	0	1,433,840,729	4,890,916,101	4,563,998,711	32,004,531,116	36,329,656,516	41,374,916,000	43,207,825,000	45,121,931,000	47,120,833,000	49,208,286,000	APBD	BPBD
			Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	%	0	100	100	100	100												
			Persentase kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1 kali 24 jam	%	0	100	100	100	100												
1.05.04 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1		Persentase penanggulangan kebakaran yang berhasil	%	82.5	83	83.5	84	84.5	197,100,870,080	461,622,862,583	142,867,347,045	636,748,839,465	821,890,291,649	936,029,820,000	977,495,941,000	1,020,799,011,000	1,066,020,407,000	1,113,245,111,000	APBD	BPBD
			Persentase Operasi Penyelamatan yang Berhasil	%	78.5	79	79.5	80	80.5												
			Persentase Peralatan / Perlengkapan Operasional Pemadaman dan Penyelamatan yang memenuhi standar mutu	%	0	38.05	57.91	78.48	100												
1.06.02. Pemberdayaan Sosial	4		Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Orang	2744	3194	3644	4094	4545	4,105,700,917	5,055,846,290	1,061,238,740	2,487,587,136,184	907,787,423,187	1,033,855,864,000	1,079,655,679,000	1,127,484,426,000	1,177,431,986,000	1,229,592,223,000	APBD	BPBD
			Jumlah lembaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Lembaga	863	883	903	923	943												
1.06.05. Perlindungan dan Jaminan Sosial	4		Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	%	0	95	95	95	100	1,457,729,461,000	1,425,052,696,649	1,998,733,451,211	2,220,015,337,705	2,261,207,781,981	2,575,231,675,000	2,689,314,438,000	2,808,451,068,000	2,932,865,450,000	3,062,791,389,000	APBD	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
			Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Penduduk	5732908	0	0	0	0												
1.06.06 Program Penanganan Bencana	1		Persentase Mitigasi Risiko Bencana yang dilaksanakan	%	7.23	0	0	0	0	6,830,704,427	10,175,068,211	2,751,817,891	35,099,685,079	20,068,379,740	22,855,364,000	23,867,857,000	24,925,203,000	26,029,389,000	27,182,491,000	APBD	BPBD
			Persentase informasi kebencanaan yang	%	0	100	100	100	100												

Program Usulan	Isu Terkait	Keterkaitan dengan TPB	Indikator Target	Satuan	Target Tahunan					Realisasi Anggaran (Rp Juta)					Indikatif Anggaran (Rp Juta)*					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2026	2027	2028	2029		
			disampaikan ke masyarakat																		
			Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	0	0.54	0.62	0.7	0.78												
			Persentase Implementasi Fasilitas Publik Aman serta Ketahanan Masyarakat Jakarta terhadap Bencana	%	0	19.75	26.33	32.92	39.5												
2.07.03 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4		Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan	orang	21000	21000	21000	21000	21000	35,942,509,220	62,563,077,024	15,618,000,919	3,498,937,343	112,243,802,026	127,831,594,000	133,494,533,000	139,408,341,000	145,584,131,000	152,033,508,000	APBD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah pencari kerja yang berwirausaha	orang	0	3399	3399	3399	3399												
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	persen	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5												
2.11.02 Pencemaran Lingkungan Hidup	3		Penurunan Tingkat Pencemaran Air	indeks	34.55	0	0	0	0	76,742,443,261	47,040,155,679	11,044,561,301	9,330,908,017	19,783,947,634	22,531,432,000	23,529,574,000	24,571,934,000	25,660,471,000	26,797,230,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3		Penurunan Tingkat Pencemaran Udara	indeks	40.43	0	0	0	0												
			Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	%	10	0	0	0	0												
			Presentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	%	40	0	0	0	0												
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	0	37.14	37.51	37.89	38.27												
2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2		Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi	fauna	2142	2152	2162	2172	2182	814,300,979,907	252,882,450,256	90,248,346,223	1,130,804,421,095	2,398,312,007,958	2,731,376,169,000	2,852,376,133,000	2,978,736,396,000	3,110,694,418,000	3,248,498,181,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
3.28.04 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	2		Penambahan jumlah flora yang dikonservasi	flora	52753	52773	52793	52813	52833												
			Penambahan jumlah Satwa yang dikonservasi	satwa	2142	0	0	0	0												
			Penambahan Rasio RTH Hutan	%	0.0085	0.0115	0.0115	0.0115	0.0115												
			Persentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara	%	95	95	96	97	97												
2.11.06 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH)	3		Peningkatan Upaya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	40	50	60	70	80	110,139,060	197,960,000	23,925,000	-	-	27,248,000	28,455,000	29,715,000	31,032,000	32,406,000	APBD	BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
			Peningkatan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan	%	5	10	15	20	25												

Program Usulan	Isu Terkait	Keterkaitan dengan TPB	Indikator Target	Satuan	Target Tahunan					Realisasi Anggaran (Rp Juta)					Indikatif Anggaran (Rp Juta)*					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2026	2027	2028	2029		
			Penggunaan Tanah (SIPPT)																		
			Kesesuaian Implementasi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase	40	0	0	0	0												
2.11.08 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH untuk Masyarakat	2,3																				
2.11.11 Pengelolaan Persampahan	2		Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA	ton/hari	6551.89	0	0	0	0	1,377,558,480,095	1,673,233,187,598	1,298,719,146,412	1,234,628,942,946	2,333,576,428,693	2,657,650,474,000	2,775,384,390,000	2,898,333,919,000	3,026,730,112,000	3,160,814,256,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase pengurangan sampah di kota	%	0	17	20	23	26												
2.14.04. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	4		Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	per 1000	24	23	22	21	20	355,832,000	6,045,282,067	2,416,276,600	3,223,324,606	14,682,629,835	16,721,671,000	17,462,441,000	18,236,028,000	19,043,884,000	19,887,528,000	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
			Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	%	57.34	57.78	58.22	58.66	59.1												
			Unmetneed (PUS yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani)	%	14.7	14.5	14.4	14.2	14												
			Persentase keluarga yang terdata	%	61	69	77	84	90												
			Persentase masyarakat yang mengetahui isu kependudukan	%	48.5	51	53	54.5	56												
2.15.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6		Penambahan Road Ratio	%	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032	3,281,146,058,872	2,700,004,483,680	1,242,918,478,509	5,371,442,655,575	8,786,032,930,701	10,006,188,055,000	10,449,462,186,000	10,912,373,361,000	11,395,791,501,000	11,900,625,064,000	APBD	Dinas Perhubungan
			Penambahan Luas jalur pejalan kaki	m2	146400	146400	146400	146400	146400												
			Persentase Kondisi Jalan Mantap	%	0	96.5	97	97.5	98												
			Presentase Kondisi Jalan mantap pada Jaringan Jalan	%	96	0	0	0	0												
			Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	Penumpang per hari	0	925785	1179494	1433363	1767292												
			Jumlah penumpang angkutan umum sesuai Standar Pelayanan Prima yang terlayani per hari	Penumpang per hari	493021	0	0	0	0												

Program Usulan	Isu Terkait	Keterkaitan dengan TPB	Indikator Target	Satuan	Target Tahunan					Realisasi Anggaran (Rp Juta)					Indikatif Anggaran (Rp Juta)*					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2026	2027	2028	2029		
			Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi	%	20	50	80	100	100												
2.16.03. Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik	6		Persentase Respon SKPD Terhadap Aspirasi Warga Jakarta melalui Media Cetak	%	80	0	0	0	0	45,364,456,516	108,486,231,637	73,052,621,371	830,887,441,693	348,261,521,757	396,626,135,000	414,196,672,000	432,545,585,000	451,707,354,000	471,717,990,000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informasi
			Persentase Laporan Warga melalui Aplikasi Interaktif Jakarta Smart City	%	74	77	81	87	87												
			Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan perlu dilakukan klarifikasi	%	0	83	86	90	93												
			Persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi	%	0	100	100	100	100												
			Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta	orang	0	4400000	5100000	5800000	6600000												
2.17.07 Pemberdayaan UMKM	4		Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	UMKM	10000	0	0	0	0	70,875,824,577	-	-	-	-	80,718,663,000	84,294,500,000	88,028,746,000	91,928,419,000	96,000,848,000	APBD	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN
2.17.08 Pengembangan UMKM	4		Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	UMKM	0	27799	27799	27799	27797	-	92,203,775,614	24,199,966,097	30,326,022,438	57,002,735,820	64,918,957,000	67,794,867,000	70,798,179,000	73,934,539,000	77,209,839,000	APBD	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN
3.25.02 Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau Kecil	2		Jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pelanggaran	0	78	73	68	65	84,824,565,954	134,264,785,287	3,321,117,124	6,359,656,430	24,241,250,054	27,607,739,000	28,830,762,000	30,107,965,000	31,441,748,000	32,834,617,000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan
			Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang	Ha.	0	141.9	142.4	142.9	143.4												

Program Usulan	Isu Terkait	Keterkaitan dengan TPB	Indikator Target	Satuan	Target Tahunan					Realisasi Anggaran (Rp Juta)					Indikatif Anggaran (Rp Juta)*					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2026	2027	2028	2029		
			dikonservasi dan direhabilitasi																		dan perikanan
3.25.05 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2		Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	0	4412	4434	4456	4478	-	13,501,538,499	449,550,400	4,174,968,552	7,644,521,779	8,706,150,000	9,091,833,000	9,494,601,000	9,915,212,000	10,354,456,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah produksi perikanan	ton	703786	0	0	0	0												
			Jumlah Produksi Perikanan tangkap	ton	0	150552	152430	153701	155386												
			Jumlah Produksi Ikan Hias	Ekor	0	20777303	21335576	21832231	22324673												
			Jumlah produksi benih ikan	Ekor	0	79594751	84998143	90810158	99258335												
			Jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	Ton	0	5959.15	6379.07	6827.57	7310.23												
			Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	0	37	38.5	40	41.5												
3.25.06 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	4																				
3.26.02 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	4		Jumlah Objek Wisata Baru	Objek wisata	2	3	3	3	2	111,607,560,810	336,162,616,963	64,504,452,022	48,858,438,342	344,768,981,213	392,648,569,000	410,042,901,000	428,207,802,000	447,177,407,000	466,987,366,000	APBD	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah Wisatawan Mancanegara	orang	2800000	2940000	3087000	3241350	3403417												
			Jumlah Wisatawan Nusantara	orang	36000000	38520000	40496000	44298000	50172000												
3.26.03 Pemasaran Pariwisata	4		Persentase Industri Pariwisata yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)	%	92	95	97	99	100	4,158,064,205	18,905,004,768	11,298,373,724	2,715,904,360	30,347,761,108	34,562,288,000	36,093,398,000	37,692,335,000	39,362,106,000	41,105,847,000	APBD	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat	%	58	75	85	95	100												
			Jumlah E-Tourism	pengunjung halaman website	0	1500000	2250000	3000000	3375000												
			Jumlah usaha pariwisata hiburan	Industri	1669	0	0	0	0												
3.26.04 Pengembangan Ekonomi Kreatif	4,6																				

Program Usulan	Isu Terkait	Keterkaitan dengan TPB	Indikator Target	Satuan	Target Tahunan					Realisasi Anggaran (Rp Juta)					Indikatif Anggaran (Rp Juta)*					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2026	2027	2028	2029		
melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual																					
3.26.05 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4																				
3.29.02 Pengelolaan Aspek Kegeologian	2																				
3.29.05 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	3		bauran energi baru terbarukan	%	0	0.03	0.07	0.09	0.11	6,762,507,400	16,624,699,022	7,887,158,156	1,063,618,424	36,566,706,132	41,644,886,000	43,489,754,000	45,416,350,000	47,428,295,000	49,529,368,000	APBD	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
4.01.02. Program Penataan Organisasi	5		Indeks Reformasi Birokrasi	(Skala 1 - 100)	0	73	78	85	91	-	1,473,605,250	665,985,000	-	-	758,473,000	792,074,000	827,163,000	863,806,000	902,072,000	APBD	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
4.01.03. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5		Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan dan berhasil	%	100	0	0	0	0	3,148,591,738	2,778,843,341	419,847,919	-	-	478,154,000	499,336,000	521,457,000	544,557,000	568,681,000	APBD	BIRO TATA PEMERINTAHAN
			Persentase Kerjasama yang difasilitasi dan berhasil	%	0	100	100	100	100												
			Persentase Kegiatan Kerjasama Luar Negeri yang Berhasil	%	75	0	0	0	0												
			Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Berhasil	%	0	80	85	85	90												
4.01.06 Perekonomian dan Pembangunan	4,5		Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan	kasus	0	0	0	0	0	355,692,692	1,124,021,357	5,600,000	-	-	6,378,000	6,660,000	6,955,000	7,263,000	7,585,000	APBD	BIRO PEREKONOMIAN
			Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan	kasus	0	0	0	0	0												
5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5		Persentase penyelesaian masalah pemerintahan	%	100	100	100	100	100	368,593,088	1,597,221,049	262,045,500	-	-	298,437,000	311,658,000	325,464,000	339,882,000	354,939,000	APBD	BIRO TATA PEMERINTAHAN
5.03.02. Program Kepegawaian Daerah	5		Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta	Nilai (Skala 0-100)	0	84	86	88	90	8,067,067,390	9,018,400,870	3,921,606,429	9,036,469,824	7,606,898,927	8,663,303,000	9,047,087,000	9,447,873,000	9,866,414,000	10,303,496,000	APBD	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Program Usulan	Isu Terkait	Keterkaitan dengan TPB	Indikator Target	Satuan	Target Tahunan					Realisasi Anggaran (Rp Juta)					Indikatif Anggaran (Rp Juta)*					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2026	2027	2028	2029		
			Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	%	0	70	75	80	85												
			Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi kewenangan BKD	%	0	7	9	11	13												
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Nilai (skala 0-100)	0	81	86	90	93												
			Capaian Kinerja ASN	Nilai (Skala 0-100)	82	0	0	0	0												
5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5		Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional	%	0	55	69	82	96	41,257,552,315	76,371,877,726	14,896,200,409	23,899,648,849	112,082,386,012	127,647,761,000	133,302,557,000	139,207,860,000	145,374,768,000	151,814,871,000	APBD	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial	%	0	64	75	86	97												
			Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural	%	0	50	67	84	98												
			Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi	%	0	48	62	81	100												
			Persentase Peningkatan Kompetensi SDM	%	40	0	0	0	0												
5.05.02. Penelitian Pengembangan Daerah	6		persentase penyelenggaraan analisis hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan	%	25	0	0	0	0	70,400,000	1,117,489,600	595,622,100	353,400,000	659,399,000	750,973,000	784,241,000	818,983,000	855,264,000	893,152,000	APBD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Jumlah inovasi yang dapat diimplementasikan	Inovasi	0	2	2	2	2												
5.07.02. Program Pelayanan Penghubung	5		Persentase Tingkat Kepuasaan Masyarakat	%	85.5	0	0	0	0	108,303,275,393	158,930,183,543	113,297,604,579	123,874,223,885	167,977,160,452	191,304,889,000	199,779,696,000	208,629,936,000	217,872,243,000	227,523,983,000	APBD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	%	100	0	0	0	0												

Program Usulan	Isu Terkait	Keterkaitan dengan TPB	Indikator Target	Satuan	Target Tahunan					Realisasi Anggaran (Rp Juta)					Indikatif Anggaran (Rp Juta)*					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2025	2026	2027	2028	2029		
6.01.02. Penyelenggaraan Pengawasan	5		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	25,474,747,446	11,023,296,265	5,654,330,020	5,661,351,000	7,525,486,200	8,570,584,000	8,950,260,000	9,346,757,000	9,760,818,000	10,193,223,000	APBD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Rata-rata capaian kegiatan OPD Perencanaan Pembangunan Daerah	%	0	91.8	91.9	92	92.1												
			Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Pemerintahan	%	0	85	85	85	85												
			Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Kesra	%	0	85	85	85	85												
			Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang SPKLH	%	0	85	85	85	85												
			Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Perekonomian	%	0	85	85	85	85												

* Indikatif Anggaran 2025 – 2029 berdasarkan pada asumsi rata-rata pertumbuhan total pengeluaran per tahun sebesar 4,43% (Sumber: Dokumen RPD DKI Jakarta 2023 – 2026 dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2020 dan 2021)

Lampiran 12. D.3 Tabel Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan yang Dilaksanakan oleh Non Pemerintah

Program/Kegiatan/indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan		Realisasi Semester				Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2018	2019	2018		2019					
					I	II	I	II				
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
INDIKATOR TPB 3 : 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.												
PROGRAM 1 : Gerebek Investigasi Kontak dan Sosialiasi TB												
Kegiatan 1 : Investigasi Pasien TB dengan melakukan deteksi terhadap 20-30 orang disekitar rumah pasien positif TB	Indikator Kegiatan: Terpaparnya informasi TB dilingkungan beresiko dengan Pasien Positif TB	Orang	110	120	51	55	63	65	100.000.000	Global Fund	Kalibaru, Koja Jakarta Utara	LKNU Jakarta Utara
Kegiatan 2 : Pertemuan Koordinator Kader	Indikator Kegiatan: Meningkatnya peran serta kader dalam melakukan investigasi kontak pasien TB	Orang	110	120	51	55	63	65	5.000.000	Global Fund	Jakarta Utara	LKNU Jakarta Utara
INDIKATOR TPB 5 : 5.6.1* : Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.												
PROGRAM 1 : Workshop Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja Puteri												
Kegiatan 1 : Workshop Pro-PN Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Puteri	Indikator Kegiatan: Terpaparnya Informasi Materi PKBR bagi Remaja Puteri	Poktan		160			85	80	1.700.000.000	APBN	Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan.	Forum GenRe DKI Jakarta, DPPAPP
Kegiatan 2 : Sosialisasi Modul serta Pembinaan bagi para Pembina PIK Remaja dan BKR	Indikator Kegiatan: Tersampaikannya Modul PKBR bagi para Fasilitator PIK R dan BKR	Poktan		160			85	80			Jakarta Pusat, Pulau Seribu, Jakarta Barat	
INDIKATOR TPB 1 : 1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.												
PROGRAM 1 : Berbenah Kampung Kamal Muara												
Kegiatan 1 : Melakukan Renovasi dan perbaikan Rumah dilingkungan Padat, kumuh, miskin	Indikator Kegiatan: Dibangunnya Rumah layak Huni	Rumah		10				10		Filantropi Tzu Chi	Kampung Kamal Muara	Yayasan Budha Tzu Chi
INDIKATOR TPB 4 : 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.												
PROGRAM 1 : Motivasi Edukatif												
Kegiatan 1 : Kunjungan Edukatif bagi anak Jalanan terkait kesehatan, kekerasan, penidikan karakter	Indikator Kegiatan: Terpaparnya Informasi Kesehatan dan karakter bagi Anak-anak Jalanan	Aktivitas		8			2	6	5.000.000	AMPP	Kolong Jembatan Season City Jakarta Barat	AMPP, Pemuda ANSOR, Banser NU, Garuda Bung Cokro.
Kegiatan 2 : Pemberian Pendidikan Karakter dan Santunan Anak Yatim	Indikator Kegiatan: Tersampaikannya Informasi Pendidikan Karakter untuk Anak Yatim	Aktivitas		2				2	32.000.000		Panti Asuhan Binadaksa	
INDIKATOR TPB 1 : 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.												

Program/Kegiatan/indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan		Realisasi Semester				Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2018	2019	2018		2019					
					I	II	I	II				
PROGRAM 2 : Pendampingan dan Fasilitasi												
Kegiatan 1 : Membentuk Inkubator wirausaha bagi orang dengan disabilitas	Indikator Kegiatan: Tersedianya inkubator wirausaha yang mendampingi dan memfasilitasi wirausaha bagi orang dengan disabilitas untuk dapat mandiri	Unit	6	6	3	3	3	3	6.000.000	APBD dan CSR	5 Kota dan 1 Kabupaten di wilayah Provinsi DKI Jakarta	YDMI dan Mitra
Kegiatan 2 : Adanya lembaga penjamin kredit bagi orang dengan disabilitas yang berwirausaha	Indikator Kegiatan: Tersedianya lembaga penjamin pinjaman bagi orang dengan disabilitas yang berwirausaha untuk meningkatkan volume usahanya	Unit	6	6	3	3	3	3	12.000.000	APBD dan CSR	5 Kota dan 1 Kabupaten di wilayah Provinsi DKI Jakarta	YDMI dan Mitra
INDIKATOR TPB 3 : 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.												
PROGRAM 1 : Penyusunan Program Nasional Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu dan Anak Serta KB untuk ODHA												
Kegiatan 1 : National Workshop PPIA dan KB untuk Komunitas perempuan yang hidup dengan HIV	Indikator Kegiatan: Tersampaikannya informasi terkait PPIA dan KB untuk Komunitas perempuan yang hidup dengan HIV	Orang		24				24		Kementerian Kesehatan RI	Jakarta, dihadiri Perwakilan dari 24 Provinsi	IPPI
Kegiatan 2 : Training Nasional pedoman PPIA dan KB untuk PDHA	Indikator Kegiatan: Terlatihnya trainer pedoman PPIA dan KB untuk PDHA	Orang		24				24		Global Fund	Jakarta, dihadiri Perwakilan dari 24 Provinsi	IPPI
INDIKATOR TPB 16 : 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).												
PROGRAM 1 : Pelatihan Diplomasi Kota												
Kegiatan 1 : Pelatihan Diplomasi Kota selama 2 harisebagai bagian dari Kerjasama Bappeda	Indikator Kegiatan: Adanya pelatihan diplomasi Kota	Orang	20			20				Uni Eropa	Jakarta	UCLG ASPAC APEKSI
INDIKATOR TPB 16: 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil.												
PROGRAM 1 : Happines Festival												
Kegiatan 1 : Happines Festival 16 dan 17 untuk meningkatkan awareness dan kepedulian masyarakat terhadap SDGs	Indikator Kegiatan: Tersampaikannya informasi SDGs kepada Masyarakat	Orang	5000	10000	5825		10745		1.800.000.000	Sponsor UID	Jakarta Pusat	UID
	Indikator Kegiatan : Hadirnya ruang dialog bagi stakeholder	Komunitas	100	200	64		149					
Kegiatan 2 : YAF 16 dan 17	Indikator Kegiatan: Menigkatnya partisipasi pemuda dan nilai kepemimpinan untuk SDGs	Orang	40	60		48		65	400.000.000	Sponsor UID	Jakarta	UID
INDIKATOR TPB 5 : 5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.												

Program/Kegiatan/indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan		Realisasi Semester				Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2018	2019	2018		2019					
					I	II	I	II				
PROGRAM 1 : Young Health Program Indonesia												
Kegiatan 1 : Pelatihan Peer Educator di 8 Sekolah	Indikator Kegiatan: Terciptanya Peer Educator di 8 Sekolah	Orang		160			115		1.000.000.000	Yayasan Plan Internasional	Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan	Yayasan Lentera Anak
	Indikator Kegiatan: Terciptanya Peer to peer activities	Orang		2000			1500					
Kegiatan 2 : Pelatihan Guru dan Orang Tua	Indikator Kegiatan: Terpaparnya informasi terkait kesehatan bagi remaja kepada orang tua dan guru	Orang		100			157				Jakarta	Yayasan Lentera Anak
Kegiatan 3 : Pembentukan Posyandu Remaja	Indikator Kegiatan: Terbentuknya Posyandu sebagai layanan kesehatan yang dapat diakses remaja	Posyandu		6			1				Jakarta	Yayasan Lentera Anak
INDIKATOR TPB 8 : 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan												
PROGRAM 1 : Global Wakaf Corporation												
Kegiatan 1 : Warung Wakaf	Indikator Kegiatan: Adanya warung wakaf untuk menghimpun dana umat yang 70% akan dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan 30% sisanya untuk warung wakaf lainnya	Unit	6	6		6	6			Wakaf Produktif	DKI Jakarta	ACT - Global Wakaf Corporation
Kegiatan 2 : Mobil Sosial Rescue (Ambulan Pre-hospital)	Indikator Kegiatan: Adanya bantuan pendampingan pasien dan keluarga sakit serta P3K pasien	Orang	Unit	1			1			Zakat	Jakarta	ACT
INDIKATOR TPB 8: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan												
PROGRAM 1 : Pembuatan Branding dan Packaging Produk UMKM												
Kegiatan 1 : Pelatihan Pentingnya Wirausaha dan Packaging Produk UMKM	Indikator Kegiatan: Terwujudnya keterampilan wirausaha dalam melakukan branding dan packaging produk UMKM	Orang		30			30		6.000.000	Wiranesia	Jakarta Selatan	Wiranesia
INDIKATOR TPB 11 : 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.												
PROGRAM 1 : Bank Sampah												
Kegiatan 1 : Digitalisasi Bank Sampah	Indikator Kegiatan: Adanya jumlah bank sampah yang tercatat secara digital	Unit		600			60		50.000.000	PT. WALLEZZ Finansial Teknologi	10 Kecamatan di Jakarta Selatan	
INDIKATOR TPB 11 : 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.												
PROGRAM 1 : MRT Transportasi Publik dan Contoh Perubahan Tingkah Laku												

Program/Kegiatan/indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan		Realisasi Semester				Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2018	2019	2018		2019					
					I	II	I	II				
Kegiatan 1 : Promosi MRT langsung dan tidak langsung serta sosialisasi perubahan tingkah laku ditransportasi publik	Indikator Kegiatan: Interaksi Sosial Media	Likes		500			500	1000		Ikatan Abang None Jakarta	Stasiun MRT Jakarta	Ikatan Abang None Jakarta
	Indikator Kegiatan: Peningkatan penggunaan transportasi publik	Presentase		5%				10%				
	Indikator Kegiatan: Kepatuhan terhadap pemandu arah MRT	Kasus		5				10				
INDIKATOR TPB 1 : 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.												
PROGRAM 1 : Penyediaan Akses Air Minum Berkualitas bagi Warga Jakarta												
Kegiatan 1 : Pembangunan dan penyediaan fasilitas sebagai akses air minum berkualitas bagi warga Jakarta	Indikator Kegiatan: Pembangunan Pipa Transmisi dan Distribusi di Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara	Presentase		100%	Perijinan		70%			PAM Jaya	DKI Jakarta	PAM Jaya
	Indikator Kegiatan: Studi F.S Distribusi untuk SPAM Jatiluhur terintegrasi	Presentase		100%			90%					
	Indikator Kegiatan: SWRO Untung Jawa beroperasi	Presentase		100%			100%					
INDIKATOR TPB 8: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan												
PROGRAM 1 : Pembuatan Branding dan Packaging Produk UMKM												
Kegiatan 1 : Pelatihan Pentingnya Wirausaha dan Packaging Produk UMKM	Indikator Kegiatan: Terwujudnya keterampilan wirausaha dalam melakukan branding dan packaging produk UMKM	Orang		30			30		6.000.000	Wiranesia	Jakarta Selatan	Wiranesia
INDIKATOR TPB 16 : 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.												
PROGRAM 1 : Down to Zero												
Kegiatan 1 : Penguatan KPAD untuk Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak melalui Program Down to Zero	Indikator Kegiatan: Tertanganinya kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak	Kasus								Hibah Luar Negeri	DKI Jakarta	Plan Internasional
INDIKATOR TPB 16 : 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik.												
PROGRAM 1 : Training Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa												
Kegiatan 1 : Pembentukan dan Pengembangan Kapasitas Komunitas SKPB terkait Isu Kepemudaan dan Anak	Indikator Kegiatan: Adanya Kepengurusan SKPB yang memahami Isu Kepemudaan dan Anak	Orang	70	70	40	35	35			100.000.000	DKI Jakarta	Akbar Tanjung Institute
INDIKATOR TPB 1 : 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.												

Program/Kegiatan/indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan		Realisasi Semester				Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2018	2019	2018		2019					
					I	II	I	II				
PROGRAM 1 : Peningkatan Akes Air Limbah Domestik dan Pembangunan IPAL												
Kegiatan 1 : Peningkatan Akses Air Limbah Domestik di Kelurahan Tebet Timur	Indikator Kegiatan: Terbangunnya IPAL Komunal dan Individu	Unit		1			1					
	Indikator Kegiatan: Adanya Masyarakat yang mengakses pada limbah domestik	KK		50			20	30			Tebet Timu	IUWASH PLUS Indonesia
Kegiatan 2 : Pendampingan Pembangunan IPAL Komunal di 10 Lokasi di DKI Jakarta	Indikator Kegiatan: Adanya IPAL yang terbangun	Unit		10							10 Lokasi Wilayah DKI Jakarta	
	Indikator Kegiatan: adanya akses masyarakat terhadap air limbah domestik	KK		1000								
INDIKATOR TPB 9 : 9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB												
PROGRAM 1 : Riset Ekonomi dan Sosial												
Kegiatan 1 : Riset Brand Awareness Brand OK OCE	Indikator Kegiatan: Adanya Penelitian terkait tingkat kepekaan masyarakat Indonesia terhadap OKE OCE	Penelitian		1			1			25.000.000	DKI Jakarta	Instan.Id, Oke Oce
INDIKATOR TPB 8 : 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan												
PROGRAM 1 : Riset Ekonomi dan Sosial												
Kegiatan 1 : Riset Terkait Over Indebtedness	Indikator Kegiatan: Terselesaikannya Penelitian terkait Over Indebtedness	Penelitian		1			1			Oxfam Indonesia	DKI Jakarta	Perkumpulan PRAKARSA

Lampiran 13. Persandingan Program Rekomendasi KLHS dengan Program 2018 - 2022

No	Usulan Program Rekomendasi KLHS	Persandingan dengan Program 2018-2022	Realisasi Anggaran					OPD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	1.01.02 Pengelolaan Pendidikan		5,225,550,867,122	6,273,526,866,320	2,208,093,830,200	791,312,076,159	3,267,490,549,508	Dinas Pendidikan
2	1.01.03 Pengembangan Kurikulum		27,291,150,993	82,790,759,732	27,573,354,825	374,201,372,136	1,253,546,119,233	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	7,895,325,828	40,963,820,311	9,815,004,376	52,155,788,243	177,724,846,153	Dinas Pendidikan
		Program Wajib Belajar 12 Tahun	2,154,529,186,524	2,737,629,983,858	815,795,967,375	181,792,606,128	1,260,344,396,974	
		Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	8,406,407,538	18,925,846,454	4,239,586,763	1,318,014,122	10,189,338,231	
		Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	972,012,880,847	1,188,091,832,617	1,347,333,208,861	143,513,613,791	501,733,591,324	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	2,055,415,915,392	2,205,124,623,348	3,336,708,000	38,330,681,739	63,952,257,593	
3	1.02.02 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	-	2,721,399,264,748	3,105,108,911,537	2,860,424,083,621	3,529,502,289,203	Dinas Kesehatan
4	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	-	1,341,457,684,522	1,436,015,527,282	812,569,724,740	1,452,353,157,924	Dinas Kesehatan
5	1.03.02 Pengelolaan SDA		2,430,616,861,084	2,114,517,434,400	1,301,919,994,326	1,211,268,706,992	1,963,510,731,635	Dinas Sumber Daya Air
		Program Pengendali Banjir dan Abrasi	-	2,114,517,434,400	1,301,919,994,326	1,211,268,706,992	1,963,510,731,635	Dinas Sumber Daya Air
		Program Pengendalian Banjir	2,430,616,861,084	-	-	-	-	
6	1.03.03 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	36,431,074,153	70,770,469,975	33,885,108,331	39,778,510,182	4,268,213,145	Dinas Sumber Daya Air
7	1.03.04 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional							
8	1.03.05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	19,921,833,433	66,544,184,666	38,408,436,284	4,455,419,000	79,625,151,952	Dinas Sumber Daya Air
9	1.03.06 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase							
10	1.03.07 Pengembangan Permukiman	Program Penataan Kawasan Permukiman	71,250,470,918	338,304,603,894	34,406,343,018	446,906,560,389	1,507,854,579,281	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
14	1.04.03 Kawasan Permukiman							

11	1.03.08. Penataan Bangunan Gedung	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda	124,483,202,532	156,786,757,508	4,381,677,050	277,704,629,759	251,552,036,414	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
12	1.03.12. Penyelenggaraan Penataan Ruang		9,575,212,750	21,084,093,087	4,928,773,819	129,909,969,361	183,344,464,003	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
		Program Penataan Ruang	9,575,212,750	18,721,288,397	4,323,881,419	109,875,345,161	164,679,532,442	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	2,362,804,690	604,892,400	20,034,624,200	18,664,931,561	
13	1.04.02 Pengembangan Perumahan		2,099,983,176,653	268,655,378,965	246,746,173,059	229,008,166,230	1,082,740,374,138	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
		Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat	2,099,983,176,653	128,282,000	-	-	-	
		Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat	-	268,527,096,965	246,746,173,059	229,008,166,230	1,082,740,374,138	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
15	1.04.05 Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		78,211,403,577	82,965,912,915	10,340,994,893	197,260,680,131	945,731,705,216	DINAS BINA MARGA / Dinas Sosial
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	44,114,516,722	15,481,965,581	4,876,465,150	169,414,803,708	899,573,124,484	DINAS BINA MARGA
		Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial	34,096,886,855	67,483,947,334	5,464,529,743	27,845,876,423	46,158,580,732	DINAS SOSIAL
16	1.04.06. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
17	1.05.03 Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1,433,840,729	4,890,916,101	4,563,998,711	32,004,531,116	36,329,656,516	BPBD
18	1.05.04 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan	197,100,870,080	461,622,862,583	142,867,347,045	636,748,839,465	821,890,291,649	BPBD
19	1.06.02. Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	4,105,700,917	5,055,846,290	1,061,238,740	2,487,587,136,184	907,787,423,187	BPBD
20	1.06.05. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	1,457,729,461,000	1,425,052,696,649	1,998,733,451,211	2,220,015,337,705	2,261,207,781,981	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
21	1.06.06 Program Penanganan Bencana	Program Pengelolaan Risiko Bencana	6,830,704,427	10,175,068,211	2,751,817,891	35,099,685,079	20,068,379,740	
22	2.07.03 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	35,942,509,220	62,563,077,024	15,618,000,919	3,498,937,343	112,243,802,026	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
23	2.11.02 Pencemaran Lingkungan Hidup							

24	2.11.03 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	76,742,443,261	47,040,155,679	11,044,561,301	9,330,908,017	19,783,947,634	Dinas Lingkungan Hidup
25	2.11.04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		814,300,979,907	252,882,450,256	90,248,346,223	1,130,804,421,095	2,398,312,007,958	Dinas Lingkungan Hidup
42	3.28.04 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Program Konservasi Flora dan Fauna	-	102,029,571,130	68,260,423,496	108,583,288,175	172,409,060,520	
		Program Konservasi Satwa	90,551,825,614	-	-	-	-	
		Program Pengelolaan Hutan	723,749,154,293	150,852,879,126	21,987,922,727	1,022,221,132,920	2,225,902,947,438	
26	2.11.06 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH)	Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup	110,139,060	197,960,000	23,925,000	-	-	BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
27	2.11.08 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH untuk Masyarakat							
29	2.11.11 Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	1,377,558,480,095	1,673,233,187,598	1,298,719,146,412	1,234,628,942,946	2,333,576,428,693	Dinas Lingkungan Hidup
30	2.14.04. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera		355,832,000	6,045,282,067	2,416,276,600	3,223,324,606	14,682,629,835	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga	-	5,534,077,067	2,416,276,600	3,223,324,606	14,682,629,835	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	355,832,000	511,205,000	-	-	-	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
31	2.15.02. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		3,281,146,058,872	2,700,004,483,680	1,242,918,478,509	5,371,442,655,575	8,786,032,930,701	Dinas Perhubungan
		Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	2,075,443,473,537	1,755,522,716,835	1,015,113,050,825	672,017,373,968	2,094,907,285,573	Dinas Perhubungan
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,010,466,022,839	748,960,941,724	109,627,512,746	219,786,682,621	1,252,570,123,079	Dinas Perhubungan
		Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	135,197,966,613	109,431,638,304	83,984,380,714	4,383,028,867,566	5,438,555,522,049	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	60,038,595,883	86,089,186,817	34,193,534,224	96,609,731,420		

32	2.16.03. Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	45,364,456,516	108,486,231,637	73,052,621,371	830,887,441,693	348,261,521,757	Dinas Komunikasi dan Informasi
33	2.17.07 Pemberdayaan UMKM	Program Pembinaan dan Pengembangan UKM	70,875,824,577	-	-	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN
34	2.17.08 Pengembangan UMKM	Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	-	92,203,775,614	24,199,966,097	30,326,022,438	57,002,735,820	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN
35	3.25.02 Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau Kecil	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	84,824,565,954	134,264,785,287	3,321,117,124	6,359,656,430	24,241,250,054	
36	3.25.05 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	-	13,501,538,499	449,550,400	4,174,968,552	7,644,521,779	Dinas Lingkungan Hidup
37	3.25.06 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan							
38	3.26.02 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata		111,607,560,810	336,162,616,963	64,504,452,022	48,858,438,342	344,768,981,213	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	51,364,919,757	201,118,652,085	63,442,411,004	13,106,567,981	211,682,065,904	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata	60,242,641,053	135,043,964,878	1,062,041,018	35,751,870,361	133,086,915,309	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
39	3.26.03 Pemasaran Pariwisata	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata	4,158,064,205	18,905,004,768	11,298,373,724	2,715,904,360	30,347,761,108	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
41	3.26.05 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							
40	3.26.04 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual							DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
43	3.29.02 Pengelolaan Aspek Kegeologian							
44	3.29.05 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Program Pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan	6,762,507,400	16,624,699,022	7,887,158,156	1,063,618,424	36,566,706,132	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI
45	4.01.02. Program Penataan Organisasi	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Jabatan Aparatur	-	1,473,605,250	665,985,000	-	-	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
46	4.01.03. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah		3,148,591,738	2,778,843,341	419,847,919	-	-	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan	2,740,695,260	-	-	-	-	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	-	2,120,470,962	121,038,000	-	-	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri	407,896,478	658,372,379	298,809,919	-	-	BIRO TATA PEMERINTAHAN

47	4.01.06 Perekonomian dan Pembangunan	Program Koordinasi kebijakan perekonomian	355,692,692	1,124,021,357	5,600,000	-	-	BIRO PEREKONOMIAN
48	5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah	368,593,088	1,597,221,049	262,045,500	-	-	BIRO TATA PEMERINTAHAN
49	5.03.02. Program Kepegawaian Daerah	Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN	8,067,067,390	9,018,400,870	3,921,606,429	9,036,469,824	7,606,898,927	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
50	5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		41,257,552,315	76,371,877,726	14,896,200,409	23,899,648,849	112,082,386,012	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur	510,984,500	-	-	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Program Pengembangan Kompetensi SDM	40,746,567,815	75,129,719,336	14,326,045,609	22,176,033,296	108,802,125,183	
		Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat	-	1,242,158,390	570,154,800	1,723,615,553	3,280,260,829	
51	5.05.02. Penelitian Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	70,400,000	1,117,489,600	595,622,100	353,400,000	659,399,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
52	5.07.02. Program Pelayanan Penghubung	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	108,303,275,393	158,930,183,543	113,297,604,579	123,874,223,885	167,977,160,452	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
53	6.01.02. Penyelenggaraan Pengawasan		25,474,747,446	11,023,296,265	5,654,330,020	5,661,351,000	7,525,486,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	3,995,020	42,805,200	78,266,200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	25,474,747,446	-	-	-	-	
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra	-	171,186,700	1,830,000	106,375,000	593,655,000	
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan	-	468,439,000	170,240,000	41,700,000	118,140,000	
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian	-	189,584,250	10,196,000	23,700,000	45,875,000	
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH	-	189,212,500	15,755,000	27,600,000	207,605,000	
		Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan wilayah	-	10,004,873,815	5,452,314,000	5,419,170,800	6,481,945,000	

	tidak ada program persandingan yang dapat teridentifikasi
	Usulan Program dan total realisasi penganggarannya

Lampiran 14. Berita Acara Asistensi Validasi

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 6, Wing C, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270

BERITA ACARA
RAPAT PEMBAHASAN DALAM RANGKA ASISTENSI VALIDASI
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025 – 2029
Rabu, 20 Desember 2023

Nomor : BA.45/PDLKWS/KLHS/12/2023

Pada hari ini, Rabu, 20 Desember Tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hendaryanto, ST., M.Si (Kepala Sub Direktorat Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebagai Pimpinan Rapat;
2. Helmy Zulhidayat, ST, MT (Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta)
3. Tezza Nur Ghina Rasikha, S.Ars (Ketua Sub Kelompok Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah, Bappeda Provinsi DKI Jakarta)

telah melaksanakan rapat secara daring dalam rangka pembahasan Asistensi Validasi KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 dengan hasil sebagai berikut:

1. Laporan KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta secara umum telah sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2016, Permendagri No. 7 Tahun 2018 dan Permen LHK Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, namun perlu disempurnakan sebagaimana masukan secara lisan dan tulisan;
2. Penyempurnaan Laporan KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pada butir 1, agar dilakukan pendetailan kembali masing-masing proses penyusunan KLHS sebagaimana berikut:

   BAB I Pendahuluan
   - Tidak ada masukan

   BAB II Dasar Teori
   - Tidak ada masukan

   BAB III Kondisi Umum Daerah
   - Memperbaiki nomenklatur tipe vegetasi menjadi Karakteristik Vegetasi Alami sesuai SK MENLHK 1272/2021 tentang Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000
   - Memperbaiki resolusi peta yang disajikan di dalam dokumen
   - Memperbaiki penyajian peta agar mengikuti kaidah kartografi
   - Memperbaiki keterangan gambar yang tidak sesuai dengan judul peta
   - Melakukan analisis kontribusi para pihak di luar OPD untuk pencapaian TPB
   - Menambahkan batas Daerah Aliran Sungai (DAS) pada peta wilayah sungai

BAB IV Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- Tidak ada masukan

BAB V Analisis Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Organisasi Perangkat Daerah

- Menyajikan capaian indikator TPB pada OPD sesuai 4 (empat) kategori capaian serta menjelaskan capaian indikator TPB pada OPD lain selain Dinas Kesehatan

BAB VI Alternatif Skenario dan Rekomendasi

- Memetakan peran para pihak di luar OPD pada rumusan rekomendasi

3. Validasi KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029 dapat diproses setelah dilakukan penyempurnaan sebagaimana butir-butir tersebut di atas dan Laporan KLHS beserta persyaratan validasi dinyatakan lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada peserta rapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2023

Kepala Bidang Tata Lingkungan,
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Helmy Zulhidayat, ST, MT
NIP 19780827 201001 1 020

Ketua Sub Kelompok
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah,
Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Tezza Nur Ghina Rasikha, S.Ars
NIP. 19871022 201001 2 029

Pimpinan Rapat,
Kepala Sub Direktorat Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hendaryanto, ST., M.Si
NIP. 19680121 199503 1 001

Lampiran 15. Surat Permohonan Validasi

GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 781/LH.00.00
Sifat : Segera
Lampiran : Dua berkas
Hal : Permohonan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

28 Desember 2023

Kepada

Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
c.q. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

di

Jakarta

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kami sampaikan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2030 beserta bukti pemenuhan standar kompetensi penyusun KLHS sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan untuk melakukan proses validasi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2030.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Heru Budi Hartono

Tembusan:

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

20
23

Pemerintah
Daerah
Provinsi
DKI Jakarta